



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

**KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2022



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan

Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 413);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang bertugas membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
12. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BP4D adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2023.
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dapat diubah dalam hal terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kaidah-kaidah Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, masing-masing Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan;
- b. Kepala EP4D menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah;
- d. Kepala BP4D melaksanakan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 6 Juli 2022



Diundangkan di Muntok
pada tanggal 6 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 56 SERI E



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1- 1
1.2 Dasar Hukum	1 - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1 - 6
1.4 Maksud dan Tujuan	1 - 7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	1 - 7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah	2 - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	2 - 1
2.1.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bangka Barat	2 - 1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat	2 - 11
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Barat	2 - 13
2.1.1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Bangka Barat	2 - 15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	2 - 15
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	2 - 15
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat	2 - 25
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya	2 - 39
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	2 - 40
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	2 - 54
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan	2 - 103
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	2 - 121
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	2 - 121
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	2 - 126
2.1.4.3 Iklim Berinvestasi	2 - 131
2.1.4.4 Sumber Daya Manusia	2 - 132
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD	2 - 134



2.2.1	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020	2 - 134
2.2.2	Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021	2 - 141
2.2.3	Realisasi RPJMD 2016- 2021	2 - 151
2.3	Capaian Standar Pelayanan Minimal	2 - 160
2.4	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	2 - 166
2.5	Permasalahan Pembangunan Daerah	2 - 167
2.5.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	2 - 167
2.6.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	2 - 176
2.6	Inovasi Daerah	2 - 180

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	3 - 1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan 2021	3 - 2
3.1.2	Kebijakan Ekonomi Nasional.....	3 - 6
3.1.3	Tantangan dan Prospek Prekonomian Provinsi Tahun 2022 dan 2023	3 - 8
3.1.4	Tantangan dan Prospek Prekonomian Kabupaten Tahun 2022 dan 2023.....	3 - 9
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3 - 12
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	3 - 13
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3 - 17
3.2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	3 - 17
3.2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	3 - 22
3.2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	3 - 25

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	4 - 1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	4 - 1
4.1.2	Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023	4 - 2
4.1.3	Perumusan Isu Strategis Daerah	4 - 10
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	4 - 32
4.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023	4 - 34



4.2.2	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi	4 - 38
4.2.3	Program Pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 - 39
4.3	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	4 - 39
4.4	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	4 - 44

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1	Rencana Program Prioritas Pembangunan	5 - 1
5.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 - 1
5.1.2	Program Urusan Wajib	5 - 2
5.1.3	Program Urusan Pilihan	5 - 8
5.1.4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	5 - 9
5.1.5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	5 - 10
5.1.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	5 - 10
5.1.7	Unsur Pemerintahan Umum	5 - 11
5.1.8	Unsur Kewilayahan	5 - 11
5.2	Pendanaan Rencana Program Priorita Pembangunan	5 - 12

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 6 - 1

BAB VII PENUTUP 7 - 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Kabupaten Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	2 - 2
Tabel 2.2	Penggunaan Lahan Existing Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019	2 - 8
Tabel 2.3	Jumlah Kulong di Kabupaten Bangka Barat	2 - 9
Tabel 2.4	Sebaran Kulong Berdasarkan Kawasan Hutan Tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat	2 - 10
Tabel 2.5	Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 14
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2021	2 - 15
Tabel 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021 (persentase)	2 - 17
Tabel 2.8	Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 -2021 (persentase)	2 - 20
Tabel 2.9	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 - 23
Tabel 2.10	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2017 -2021	2 - 24
Tabel 2.11	Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 32
Tabel 2.12	Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 33
Tabel 2.13	Prevalensi Balita stunting di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021	2 - 38
Tabel 2.14	Daftar Nama Sanggar Penerima Bantuan Alat Kesenian di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 39
Tabel 2.15	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 - 41
Tabel.2.16	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 41
Tabel.2.17	Hasil Evaluasi SAKIP Berdasarkan Komponen Penilaian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2021	2 - 41
Tabel 2.18	Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 44
Tabel 2.19	Hasil Evaluasi SAKIP Berdasarkan Komponen Penilaian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2021	2 - 46
Tabel 2.20	Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 48
Tabel 2.21	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada BUMD	2 - 50



Tabel 2.22	Daftar Penerbitan Peraturan/Kebijakan/Regulasi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2021	2 - 50
Tabel 2.23	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2021	2 - 51
Tabel 2.24	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	2 - 54
Tabel 2.25	Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	2 - 55
Tabel 2.26	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 58
Tabel 2.27	Rasio Tenaga Kesehatan dan Indikator Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 59
Tabel 2.28	Cakupan Jaminan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 60
Tabel 2.29	Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021	2 - 61
Tabel 2.30	Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Teknis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2019	2 - 62
Tabel 2.31	Luasan RTH Publik di Kabupaten Bangka Barat	2 - 63
Tabel 2.32	Persentase Bangunan ber-IMB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021	2 - 64
Tabel 2.33	Pola Ruang dalam RTRWP Kepulauan Bangka Belitung yang Terletak di Kabupaten Bangka Barat	2 - 65
Tabel 2.34	Produk Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Bangka Barat	2 - 66
Tabel 2.35	Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Barat	2 - 69
Tabel 2.36	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2021	2 - 72
Tabel 2.37	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021	2 - 73
Tabel 2.38	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen) Tahun 2017 – 2021	2 - 73
Tabel 2.39	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 74
Tabel 2.40	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2021 (ton)	2 - 75
Tabel 2.41	Rekapitulasi Bidang Tanah Bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 78
Tabel 2.42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2021	2 - 78
Tabel 2.43	Penanganan Persampahan di Kawasan Perkotaan Muntok Tahun 2017-2021	2 - 79
Tabel 2.44	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 81
Tabel 2.45	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021	2 - 82
Tabel 2.46	Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	2 - 83
Tabel 2.47	Jumlah Arus Penumpang dan Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 85
Tabel 2.48	Jaringan Trayek Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 86



Tabel 2.49	Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 86
Tabel 2.50	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 87
Tabel 2.51	Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 - 94
Tabel 2.52	Jumlah dan Jenis Lapangan Olahraga Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 95
Tabel 2.53	Peringkat Lomba PORPROV, POPDA, dan Kejurda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020	2 - 96
Tabel 2.54	Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 96
Tabel 2.55	Realisasi Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan dan Terintegrasi dengan Program Pariwisata Tahun 2017 – 2021	2 - 100
Tabel 2.56	Jumlah Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 104
Tabel 2.57	Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (ton)	2 - 104
Tabel 2.58	Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021 (ribu rupiah)	2 - 104
Tabel 2.59	Jumlah Kapal Penangkapan Ikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 105
Tabel 2.60	Daya Tarik Wisata Kabupaten Bangka Barat	2 - 106
Tabel 2.61	Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 107
Tabel 2.62	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya pada Objek Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021	2 - 108
Tabel 2.63	Usaha Jasa Makanan/Minuman Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 108
Tabel 2.64	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	2 - 109
Tabel 2.65	Luas, Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Hortikultura Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021	2 - 111
Tabel 2.66	Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021	2 - 113
Tabel 2.67	Populasi dan Produksi Ternak Unggas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 113
Tabel 2.68	Jumlah Pelanggan PLN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2021	2 - 116
Tabel 2.69	Jumlah Industri Sedang dan Besar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 120
Tabel 2.70	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Persentase)	2 - 123
Tabel 2.71	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 - 126
Tabel 2.72	Jumlah Bank dan ATM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 128
Tabel 2.73	Jumlah Produksi Listrik dan Daya Terpasang pada PLN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021	2 - 130



Tabel 2.74	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021.....	2 - 132
Tabel 2.75	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021	2 - 134
Tabel 2.76	Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2020 dengan Perubahan APBD Tahun 2020	2 - 135
Tabel 2.77	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 138
Tabel 2.78	Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja, Program dan Kegiatan antara Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan Perubahan APBD Tahun 2021.....	2 - 141
Tabel 2.79	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 144
Tabel 2.80	Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Tahun 2021	2 - 154
Tabel 2.81	Capaian Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2021	2 - 157
Tabel 2.82	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2021	2 - 161
Tabel 2.83	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Nasional	2 - 162
Tabel 2.84	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020 - 2021	2 - 169
Tabel 2.85	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	2 - 171
Tabel 2.86	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 171
Tabel 2.87	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 174
Tabel 2.88	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat	2 - 184
Tabel 2.89	Pencapaian TPB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017- 2020.....	2 - 348
Tabel 3.1	Proyeksi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 - Tahun 2023	3 - 10
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 s.d. Tahun 2023	3 - 15
Tabel 3.3	Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023	3 - 17
Tabel 3.4	Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023	3 - 21
Tabel 3.5	Rincian Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023	3 - 24
Tabel 3.6	Rincian Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 – 2024	3 - 24



Tabel 3.7	Rincian Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019 – 2023	3 - 26
Tabel 4.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026	4 - 1
Tabel 4.2	Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat disandingkan dengan Target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2023	4 - 2
Tabel 4.3	Keselarasn Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	4 - 4
Tabel 4.4	Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Tingkat Provinsi dan Nasional	4 - 9
Tabel 4.5	Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	4 - 12
Tabel 4.6	Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	4 - 24
Tabel 4.7	Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dan Tujuan Pembangunan Daerah serta Sasaran Pembangunan Daerah	4 - 32
Tabel 4.8	Tujuan, Sasaran, Indikator serta Target Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2023	4 - 33
Tabel 4.9	Keterkaitan antara Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	4 - 34
Tabel 4.10	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 - 39
Tabel 4.11	Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023	4 - 46
Tabel 4.12	Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 Mendukung Prioritas Nasional	4 - 56
Tabel 4.13	Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 Mendukung Prioritas Provinsi	4 - 67
Tabel 4.14	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	4 - 41
Tabel 4.15	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	4 - 45
Tabel 5.1	Pagu Indikatif berdasarkan Urusan Tahun 2023	5 - 13
Tabel 5.2	Pagu Indikatif berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2023	5 - 15
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	6 - 1
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023	6 - 14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Dokumen RKPD	1 - 3
Gambar 1.2	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1 - 7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat	2 - 2
Gambar 2.2	Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (hektar)	2 - 5
Gambar 2.3	Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat (hektar)	2 - 6
Gambar 2.4	Luas Kawasan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)	2 - 7
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Existing Kabupaten Bangka Barat	2 - 9
Gambar 2.6	Peta Sebaran Kulong di Kabupaten Bangka Barat	2 - 10
Gambar 2.7	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat.....	2 - 12
Gambar 2.8	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	2 - 14
Gambar 2.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 17
Gambar 2.10	PDRB ADHB, ADHK dan LPE Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 - 19
Gambar 2.11	PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 - 22
Gambar 2.12	PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (juta rupiah).....	2 - 22
Gambar 2.13	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 -2021	2 - 24
Gambar 2.14	Perkembangan Jumlah dan Angka Krimilitas per 10.000 Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 25
Gambar 2.15	Gambar Melek Huruf Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 26
Gambar 2.16	APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021.....	2 - 27
Gambar 2.17	APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021.....	2 - 28
Gambar 2.18	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 29
Gambar 2.19	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.....	2 - 30
Gambar 2.20	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 31



Gambar 2.21	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	2 - 31
Gambar 2.22	Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 34
Gambar 2.23	Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu per per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 35
Gambar 2.24	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 -2021	2 - 36
Gambar 2.25	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	2 - 37
Gambar 2.26	Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 37
Gambar 2.27	Jumlah Sanggar Kesenian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 - 39
Gambar 2.28	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 43
Gambar 2.29	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 43
Gambar 2.30	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 44
Gambar 2.31	Jumlah Pegawai Harian lepas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Periode April Tahun 2022	2 - 45
Gambar 2.32	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2021	2 - 46
Gambar 2.33	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021	2 - 48
Gambar 2.34	Jumlah Auditor Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021.....	2 - 53
Gambar 2.35	Jumlah Temuan dan Jumlah Temuan yang Selesai Ditindaklanjuti Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 - 54
Gambar 2.36	Angka Melanjutan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 (persentase)	2 - 56
Gambar 2.37	Jumlah Posyandu, Persentase Posyandu Aktif dan Rasio Posyandu per 100 Balita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	2 - 57
Gambar 2.38	Perkembangan Luasan RTH Publik di Kabupaten Bangka Barat	2 - 63
Gambar 2.39	Peta Pengadaan Tanah Untuk Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Ilmau .	2 - 66
Gambar 2.40	Kondisi Pantai Tanjung Ular	2 - 67
Gambar 2.41	Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	2 - 68
Gambar 2.42	Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021	2 - 70



Gambar 2.43	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (jiwa)	2 - 71
Gambar 2.44	Skor PPH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 76
Gambar 2.45	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaataan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Perizinan Lingkungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 - 79
Gambar 2.46	Jumlah Posyandu dan PKK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021	2 - 83
Gambar 2.47	Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel dalam 3 bulan terakhir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2021 .	2 - 88
Gambar 2.48	Penggunaan Aplikasi di Kabupaten Bangka Barat	2 - 89
Gambar 2.49	Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.....	2 - 90
Gambar 2.50	Jumlah dan Persentase Peningkatan Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 90
Gambar 2.51	Jumlah Usaha Mikro per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2021	2 - 91
Gambar 2.52	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 92
Gambar 2.53	Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017– 2021	2 - 93
Gambar 2.54	Pertambahan Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)	2 - 93
Gambar 2.55	Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga per 1.000 penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 95
Gambar 2.56	Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 97
Gambar 2.57	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 101
Gambar 2.58	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021	2 - 101
Gambar 2.59	Jumlah Judul Buku, Jumlah Koleksi Buku dan Rasio Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 102
Gambar 2.60	Pesentase Perangkat Daerah yang Telah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 -2021	2 - 103
Gambar 2.61	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 - 106
Gambar 2.62	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 110
Gambar 2.63	Jumlah Produksi (ton) dan Produktivitas (ton/ha) Padi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 110



Gambar 2.64	Produksi Tiga Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021 (ton)	2 - 112
Gambar 2.65	Luas Kawasan Hutan per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	2 - 114
Gambar 2.66	Kondisi Lahan Kritis di Kabupaten Bangka Barat	2 - 115
Gambar 2.67	Nilai, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 - 117
Gambar 2.68	Jumlah Pertokoan di Kabupaten Bangka Barat per Kecamatan Tahun 2018-2020	2 - 118
Gambar 2.69	Jumlah dan Pertumbuhan IKM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	2 - 119
Gambar 2.70	Jumlah Industri Kecil per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	2 - 119
Gambar 2.71	Laju Pertumbuhan dan Peranan Komsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (persen)	2 -121
Gambar 2.72	Pengeluaran Komsumsi RT ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 -122
Gambar 2.73	Rata-rata Komsumsi Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan Komsumsi Per Kapita (%) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021	2 -123
Gambar 2.74	Produktifitas Total Daerah dan Jumlah engkatan Kerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021.....	2 -124
Gambar 2.75	Nilai Ekspor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020.....	2 -125
Gambar 2.76	Nilai Impor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020.....	2 -125
Gambar 2.77	Nominal Uang Terhimpun dari Pihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 – 2018 (juta rupiah).....	2 -128
Gambar 2.78	Nilai Subsektor Makan Minum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 -129
Gambar 2.79	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	2 -132
Gambar 2.80	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2019 dan 2020	2 -136
Gambar 2.81	Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2020.....	2 -137
Gambar 2.82	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 dan 2021	2 -143
Gambar 2.83	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2021.....	2 -143
Gambar 3.1	Capaian PDRB Perkapita (dalam ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (%) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021	3 - 6
Gambar 3.2	Data Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2023	3 - 23



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selanjutnya dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen rencana pembangunan secara sistematis, terukur, terarah dan berorientasi pada hasil serta berkelanjutan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pendekatan perencanaan pembangunan dalam penyusunan RPKD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada substansi.

Pendekatan Pembangunan yang berorientasi pada proses terdiri dari pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas – bawah dan bawah – atas. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilaksanakan melalui pelaksanaan forum konsultasi publik, pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendekatan atas – bawah dan

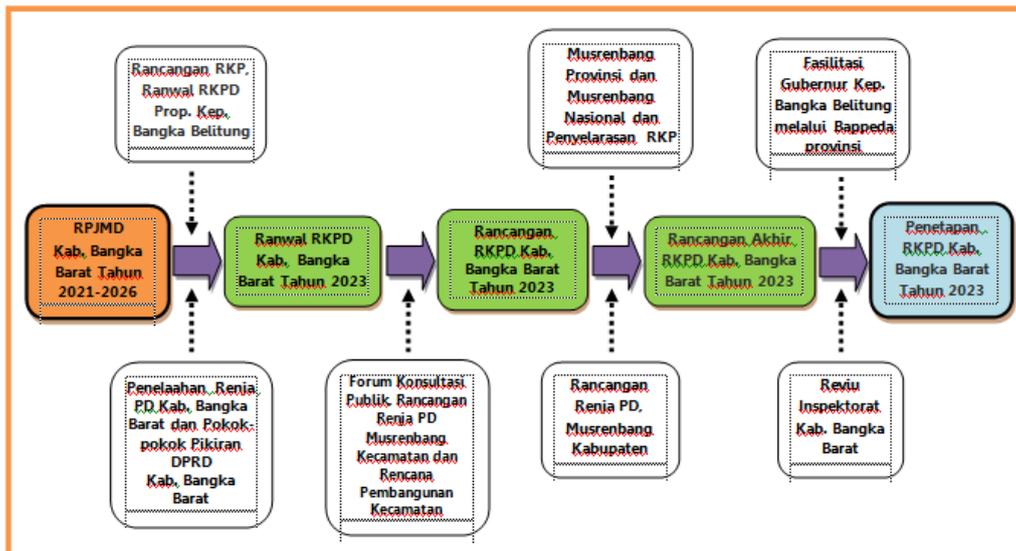


bawah – atas merupakan hasil saran/ masukan/ arahan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan jenjang pelaksanaan.

Pendekatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi terdiri dari pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah serta pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan tahapan dan proses sebagai berikut :

1. Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 Tahap II, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Rancangan awal RKPD Provinsi Tahun 2023, Pengendalian dan Evaluasi terhadap RKPD Tahun 2021, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan hasil telaahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Rancangan RKPD dengan tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dengan hasil Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2023 serta penyempurnaan Rancangan Renja PD Tahun 2023 melalui Forum Perangkat Daerah dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD;
3. Rancangan Akhir RKPD dengan tahapan proses penyempurnaan dokumen RKPD dan sekaligus bagian dari penyelarasan antara Daerah dan Pusat melalui kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten, Musrenbang RKPD Tingkat Provinsi, serta Musrenbang Nasional. Kemudian Rancangan Akhir RKPD dibahas kembali bersama Kepala Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah; dan
4. Penetapan RKPD merupakan proses terakhir melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah setelah dilakukan evaluasi dengan fasilitasi Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi. Selanjutnya dokumen RKPD yang telah ditetapkan menjadi acuan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Dokumen RKP

Secara detail, penyusunan dokumen RKP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- A. Persiapan Penyusunan;
- B. Penyusunan Rancangan Awal RKP;
- C. Pelaksanaan Konsultasi Publik;
- D. Pelaksanaan Musrenbang RKP Tingkat Kecamatan;
- E. Penyusunan Rancangan RKP;
- F. Pelaksanaan Musrenbang RKP Tingkat Kabupaten;
- G. Perumusan Rancangan Akhir RKP; serta
- H. Penetapan RKP.

Agar penyusunan RKP Tahun 2023 memenuhi kaidah-kaidah perencanaan, maka dilakukan penelaahan berbagai sektor dan dokumen antara lain sebagai berikut :

- A. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- B. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- C. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- D. Penelaahan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- E. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- F. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- G. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- H. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- I. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan program strategis provinsi;



- J. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- K. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; serta
- L. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



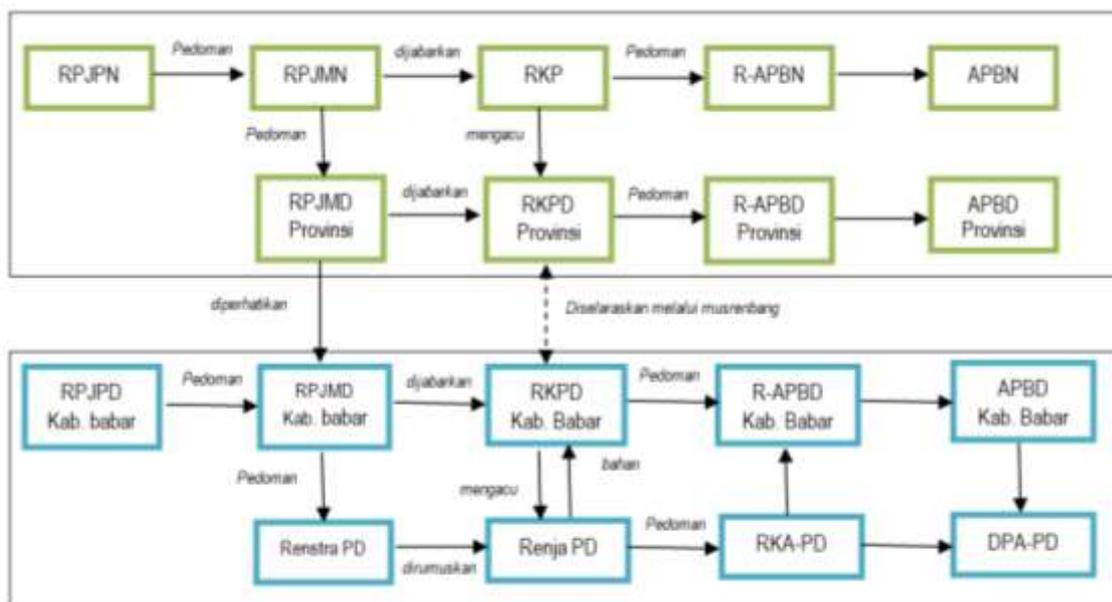
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat dilakukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan dan penganggaran. RKPD juga sebagai jembatan perencanaan pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara hingga menjadi Rancangan APBD yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dimaksudkan sebagai landasan awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya terkait kebijakan tema dan prioritas pembangunan yang digambarkan melalui rencana program, kegiatan serta subkegiatan strategis lengkap dengan indikator kinerja beserta target dan pagu indikatif dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai pedoman penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2023, serta acuan untuk menyusun Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD.



1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik peraturan perundangan dan turunannya serta peraturan daerah yang berlaku.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah berdasarkan urusan pemerintahan, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, serta permasalahan pembangunan yang berkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.1. Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Berisikan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berisikan penjelasan dan analisis kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Berisikan penjelasan dan analisis kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan yang diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Berisikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah.



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKPD sampai Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah yaitu berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.

2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal

Berisi uraian singkat terkait capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

2.4. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berisi uraian singkat terkait capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.5.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Menyajikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD.

2.5.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Menyajikan permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

2.6. Inovasi Daerah

Mengemukakan tentang inovasi daerah Kabupaten Bangka Barat dalam percepatan penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.



3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arah kebijakan dibidang ekonomi secara nasional dan kebijakan ekonomi daerah pada tahun perencanaan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

4.2. Tema Pembangunan Daerah

Menjelaskan tentang tema pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dan keselarasan dengan tema pembangunan tingkat provinsi dan nasional.

4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 dan keselarasan dengan prioritas pembangunan tingkat nasional dan provinsi serta menyajikan program pendukung prioritas nasional, provinsi dan daerah.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2023.

5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan

Berisi uraian rencana program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan urusan pemerintahan.

5.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan

Berisi uraian pagu indikatif pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan perangkat daerah.



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah melalui penetapan target pada Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang kaedah-kaedah pelaksanaan dan operasionalisasi dari RKPD Kabupaten Bangka Barat di tahun perencanaan.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Rencana pembangunan suatu daerah disusun berdasarkan pertimbangan karakteristik serta kondisi wilayah supaya pembangunan yang dilakukan dapat dijalankan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan pembangunan, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pada bagian ini dijabarkan secara menyeluruh gambaran umum kondisi Kabupaten Bangka Barat yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik meliputi urusan wajib maupun pilihan, serta dari aspek daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bangka Barat

A. Luas dan Batas

Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 memiliki luas wilayah 284.886,05 ha.

Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02° 10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi :

- Sebelah utara : Laut Natuna;
- Sebelah timur : berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Bangka.



Sumber: RTRW Kab. Bangka Barat, Tahun 2014-2034.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Bangka, yang merupakan kabupaten induknya pada era sebelum pemekaran. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 60 desa, dengan uraian per kecamatan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten
Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Muntok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpangteritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		6 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.



Kecamatan Simpangteritip memiliki wilayah terluas yaitu 27,54 persen dari wilayah Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Kecamatan Parittiga memiliki wilayah terkecil yaitu sebesar 11,47 persen dari luas wilayah Kabupaten Bangka Barat. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

Secara umum Kabupaten Bangka Barat tidak termasuk pada kategori daerah pedalaman, dan tidak ada wilayah di Kabupaten Bangka Barat yang letaknya terisolir atau terpencil yang sulit untuk diakses. Kabupaten Bangka Barat memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan $\pm 214,85$ ha meskipun sampai dengan saat ini belum berpenghuni. Kabupaten Bangka Barat memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

B. Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

Kondisi topografi Kabupaten Bangka Barat dilihat berdasarkan ketinggian dan kemiringan lahan. Kondisi ketinggian Kabupaten Bangka Barat mulai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut (mdpl) sampai dengan 425 mdpl. Ketinggian 25 mdpl tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan ketinggian 425 mdpl hanya terletak di Kecamatan Muntok, tepatnya di Bukit Menumbing atau lebih dikenal dengan sebutan Gunung Menumbing. Bukit-bukit lainnya relatif lebih rendah dari Gunung Menumbing tersebut, namun merupakan puncak relatif bagi area di sekitarnya, antara lain adalah Bukit Kelumpang, Bukit Kukus (Kecamatan Muntok), Bukit Mayang, Bukit Penyabung (Kecamatan Simpangteritip), Bukit Kebon Kapit, Bukit Pasukan, Bukit Penyabung, Sinar Kelabat (Kecamatan Jebus), Bukit Galang (Kecamatan Kelapa), dan Bukit Telimpuk (Kecamatan Tempilang).

Terkait struktur dan karakteristik geologi, tanah di wilayah Kabupaten Bangka Barat mempunyai pH rata-rata dibawah 5 yang mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya, seperti: pasir kuarsa, kaolin, batu gunung, dan sebagainya. Jenis tanah di Kabupaten Bangka Barat meliputi: podsolik coklat, podsolik kuning, podsolik merah kuning, asosiasi podsolik-regosol, asosiasi podsolik litosol, regosol, gleisol, alluvial, asosiasi alluvial regosol. Di samping itu, Kabupaten Bangka Barat juga memiliki potensi kandungan mineral yang sangat beragam pula, seperti kaolin di Kelabat, pasir kuarsa di Bakit, zirkon di Semulut, batu granit di Air Putih, bauksit di Teluk Limau, dan mineral timah yang sudah terkenal sejak zaman penjajahan atau dikenal juga dengan istilah daerah sabuk timah.

Terkait hidrologi, Kabupaten Bangka Barat memiliki 87 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 96.513 Ha, dimana DAS Mancung dengan luas 59.844 Ha merupakan DAS terluas. Kabupaten Bangka Barat memiliki 470 sungai yang tersebar di seluruh kecamatan. Secara umum, kerusakan lingkungan juga terjadi pada DAS di



Kabupaten Bangka Barat seperti mulai berkurangnya debit dan menurunnya kualitas air karena aktifitas masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar khususnya DAS.

Iklm di Kabupaten Bangka Barat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu iklim tropis dan basah. Iklim tropis dan iklim basah merupakan daerah dengan bulan basah selama 7-9 bulan dan bulan kering selama 3 bulan per tahun pada keadaan normal. Berdasarkan hasil digitasi peta curah hujan Kabupaten Bangka Barat yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tingkat curah hujan tertinggi sebesar 3000-3200 mm/tahun dan terendah pada kisaran antara 2500-2700 mm/tahun. Intensitas curah hujan tertinggi terletak di daerah Bakit Kecamatan Parittiga, sedangkan tingkat curah hujan terendah terletak di Kecamatan Muntok, Tempilang, dan sebagian besar Kecamatan Simpangteritip. Variasi curah hujan berkisar antara 84,5 mm-406,1 mm setiap bulannya dengan curah hujan terendah pada bulan Februari.

Kabupaten Bangka Barat juga memiliki intensitas penyinaran matahari rata-rata bervariasi, yakni antara 19,0-57,3% dengan tekanan udara antara 1.008,9-1.011,1 mbs. Arah angin terbanyak terjadi di bulan Desember dan Januari yang berasal dari arah utara, arah angin bulan April berasal dari arah barat, sedangkan pada bulan berikutnya bergeser ke arah selatan, tenggara, timur, dan pada bulan November kembali ke arah barat.

Suhu udara per bulannya antara 26,20oC sampai 27,80oC dengan tingkat kelembaban rata-rata 80—87%. Intensitas curah hujan di Kabupaten Bangka Barat Hampir sama dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional (2.364,25 mm/tahun). Adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini berpotensi meningkatkan persediaan air, baik air tanah maupun air permukaan jika lingkungan tetap terjaga dengan baik.

C. Penggunaan Lahan

Secara umum, penggunaan lahan berada pada kawasan budidaya yang secara detail penataan ruang telah diatur dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 terdiri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Kawasan budidaya secara detail diperuntukkan untuk kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan dan permukiman perdesaan, serta untuk kawasan peruntukan lainnya.

1. Kawasan Budidaya

- a. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bangka Barat tersebar disemua Kecamatan dengan total luasan mencapai ± 77.742 Ha yang terdiri dari hutan

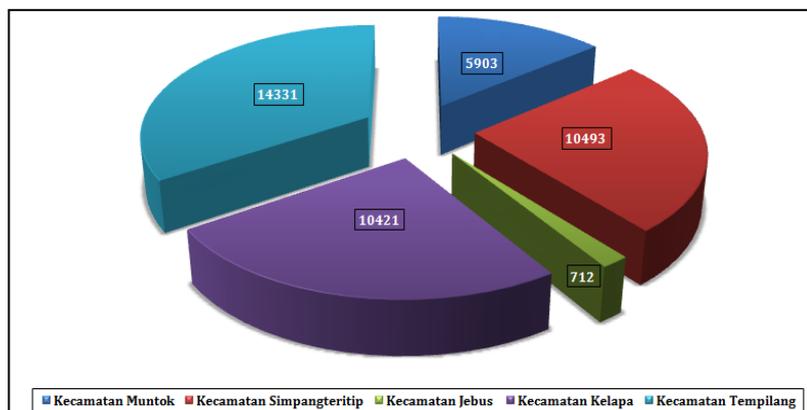
tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, serta hutan tanaman hasil rehabilitasi.

- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bangka Barat dengan total luasan ± 2.050 Ha juga tersebar di semua kecamatan. Kecamatan yang memiliki kawasan peruntukan hutan rakyat yang terluas yaitu Kecamatan Simpangteritip dengan luasan ± 851 Ha, dan diikuti dengan Kecamatan Kelapa dengan luasan ± 741 Ha.
- c. Terkait kawasan peruntukan pertanian diklasifikasi menjadi empat (4) yaitu untuk peruntukan pertanian tanaman pangan, peruntukan pertanian hortikultur, peruntukan peternakan serta peruntukan perkebunan.

Untuk Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mempunyai luasan ± 15.812 Ha, akan tetapi sebagian besar kawasan tersebut (± 11.099) berada di kawasan hutan. Untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultur mempunyai luasan ± 1.598 Ha. Untuk kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Bangka Barat terdapat di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Muntok dan Kecamatan Jebus dengan luasan ± 72 Ha.

Terkait kawasan peruntukan perkebunan dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu kawasan peruntukan perkebunan besar serta kawasan peruntukan perkebunan rakyat. Luasan kawasan peruntukan perkebunan ± 121.645 ha dipilah menjadi ± 41.860 Ha untuk peruntukan perkebunan besar dan ± 79.785 Ha untuk peruntukan perkebunan rakyat.

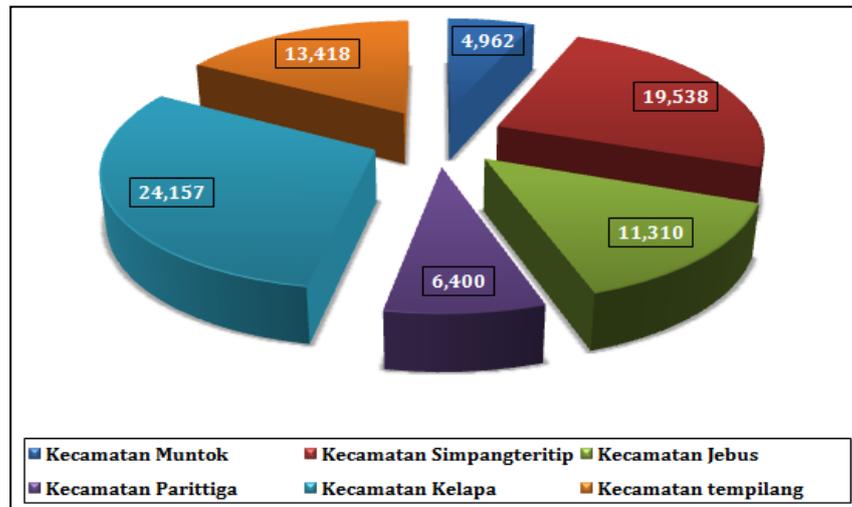
Kawasan peruntukan perkebunan besar di Kabupaten Bangka Barat tersebar hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Parittiga. Secara detail terkait luasan per kecamatan terkait kawasan peruntukan perkebunan besar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, 2014.

Gambar 2.2 Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (hektar)

Kawasan peruntukan perkebunan rakyat di Kabupaten Bangka Barat tersebar di semua kecamatan. Dari luasan perkebunan rakyat sebesar ± 79.785 Ha, terdapat ± 166 Ha berada di kawasan hutan produksi.



Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, 2014.

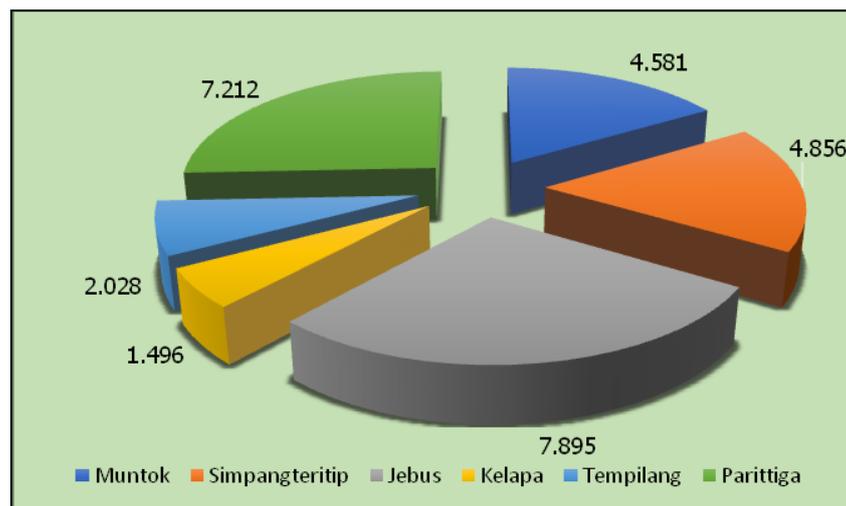
Gambar 2.3 Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat (hektar)

- d. Kawasan Peruntukan Perikanan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan (air tawar dan air payau) serta peruntukan pengolahan hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan saat ini telah didukung dengan adanya pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) yang berlokasi di Kecamatan Muntok, serta didukung oleh balai benih ikan lokal (BBIL) di Kecamatan Kelapa.
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih banyak kawasan peruntukan pertambangan yang belum dikelola dan terdapat juga ruang pasca tambang yang sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan sebagai kegiatan pembudidayaan kawasan.
- f. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bangka Barat terdapat di Kecamatan Muntok yang dibagi menjadi dua kawasan industri yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) di Tanjung Ular dengan luas ± 1.275 Ha serta kawasan industri di sekitar Tanjung Kalian dengan luas ± 139 Ha.
- g. Kawasan peruntukan pariwisata dibagi menjadi 3 (tiga) satuan kawasan wisata (SKW) yaitu SKW I yang terdapat di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Simpangteritip, SKW II yang terdapat di Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga, serta SKW III yang terdapat di Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Tempilang.
- h. Kawasan Peruntukan Perkotaan dan Permukiman Perdesaan di Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh kecamatan. Luasan Kawasan Perkotaan yang

ada yaitu ± 9.331 Ha serta luasan Kawasan Permukiman Perdesaan yang ada yaitu ± 11.987 Ha.

2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup, mencakup sumber alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034, kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, hutan konservasi, pantai berhutan bakau, dan hutan cagar budaya, serta ilmu pengetahuan. Kawasan hutan lindung terdapat di pulau utama/induk Pulau Bangka yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas ± 28.068 ha. Dari 6 kecamatan tersebut, Kecamatan Jebus memiliki kawasan hutan lindung terluas yaitu 7.895 ha (28 persen), sedangkan Kecamatan Kelapa memiliki kawasan hutan lindung terkecil yaitu 1.496 ha (6 persen).



Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, 2014.

Gambar 2.4 Luasan Kawasan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)

Selain itu, di Kabupaten Bangka Barat terdapat pula Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestraian Alam (KPA) dan cagar budaya

- KSA/KPA Menumbing seluas ± 3.333 ha yang terdapat di Kecamatan Muntok;
 - KSA/KPA Jering Menduyung seluas ± 3.538 ha yang terdapat di Kecamatan Simpangteritip; dan seluas ± 71 ha yang terdapat di Kecamatan Tempilang;
 - KSA/KPA Gunung Maras seluas ± 1.216 ha yang terdapat di Kecamatan Kelapa;
- dan

- d. Pulau-pulau kecil yang tersebar di setiap kecamatan dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan luas ± 185 ha, kecuali Pulau Nanas yang direncanakan sebagai kawasan wisata pulau kecil dengan luas ± 27 ha. Kawasan Pantai berhutan mangrove tersebar di semua kecamatan dengan total luas 22.640 ha. Kecamatan Simpangteritip memiliki luasan terbesar pantai berhutan mangrove dengan luas 6.354 ha dan Kecamatan Parittiga memiliki luasan pantai berhutan mangrove terkecil, yakni seluas 1.508 ha.

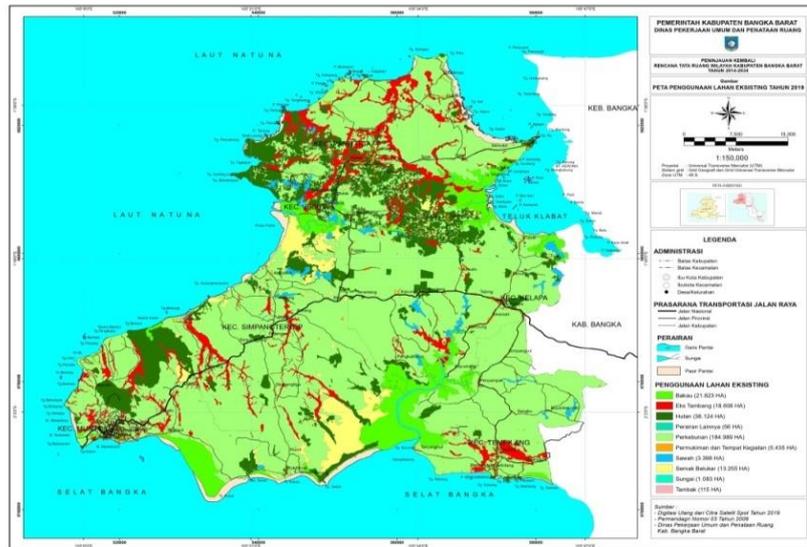
Berdasarkan kegiatan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014--2034 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kondisi penggunaan lahan *existing* di Kabupaten Bangka Barat secara rinci.

Tabel 2.2 Penggunaan Lahan *Existing* Kabupaten Bangka Barat

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Mangrove/bakau	21.823
2	Eks tambang	18.606
3	Hutan	36.124
4	Perairan lainnya	56
5	Perkebunan	184.989
6	Permukiman dan tempat kegiatan	5.435
7	Sawah	3.398
8	Semak belukar	13.255
9	Sungai	1.083
10	Tambak	115

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat, 2020.

Lahan di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar digunakan untuk perkebunan seluas 184.989 ha. Selain itu, peruntukkan hutan seluas 36.124 ha, kawasan mangrove seluas 21.823 ha, dan lahan bekas pertambangan timah seluas 18.606 ha. Penggunaan lahan terkecil untuk perairan lainnya seluas 56 ha.



Sumber: PK RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014-2034, 2020.

Gambar 2.5 Peta Penggunaan Lahan *Existing* Kabupaten Bangka Barat

Tipe penggunaan lahan bekas tambang timah merupakan empat teratas dalam penggunaan lahan existing di Kabupaten Bangka Barat seluas 18.606 ha. Hal ini disebabkan Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten potensial di sektor pertambangan dan penggalian. Pertambangan yang paling banyak dilakukan adalah pertambangan bijih timah. Namun kegiatan pertambangan timah, terutama pertambangan ilegal ini akan meninggalkan lubang-lubang bekas galian yang tergenang oleh air yang biasa disebut *kulong*.

Tabel 2.3 Jumlah *Kulong* di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Kulong
1	Jebus	839
2	Kelapa	225
3	Muntok	481
4	Parittiga	1.216
5	Simpangteritip	1.011
6	Tempilang	264
Total		4.036

Sumber Inventarisasi dan Model Pemanfaatan Kulong di Bangka Belitung, 2020.

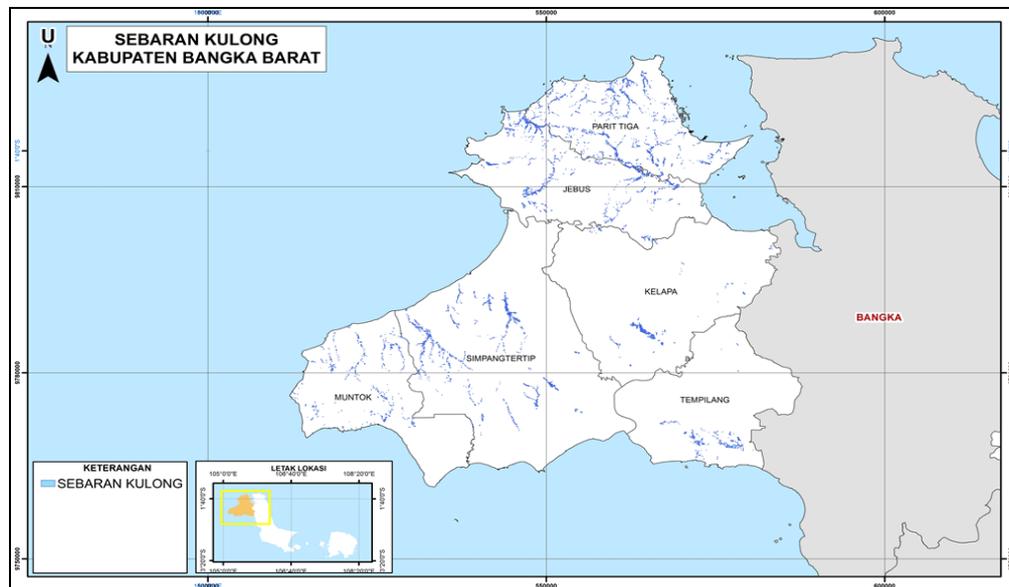
Sebaran *kulong* di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar berada di dalam kawasan hutan sebanyak 2.524 *kulong* seluas 1.161.043 ha. Jumlah *kulong* terbanyak berada di Hutan Produksi (HP) sebanyak 2.097 *kulong* seluas 916,974 ha. Selain itu, terdapat juga di Area Penggunaan Lain (APL) di luar Hutan Produksi sebanyak 1,512 *kulong* seluas 711,547 ha. Di kawasan Hutan Lindung terdapat 377 *kulong* seluas 228,037 ha sedangkan jumlah *kulong* yang paling sedikit terdapat di

kawasan KPA/KSA yaitu sebanyak 50 *kulong* seluas 16,033 ha. Adanya *kulong* di kawasan HL dan KSA/KPA menandakan bahwa kegiatan pertambangan atau pembukaan lahan telah dilakukan secara ilegal.

Tabel 2.4 Sebaran *Kulong* Berdasarkan Kawasan Hutan Tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah <i>Kulong</i>
1.	APL	711.547	1.512
2.	HL	228.037	377
3.	HP	916.974	2.097
4.	KPA/KSA	16.033	50
Total		1.872.591	4.036

Sumber: Inventarisasi dan Model Pemanfaatan *Kulong* di Bangka Belitung, 2021.



Sumber: Inventarisasi dan Model Pemanfaatan *Kulong* di Bangka Belitung, 2021.

Gambar 2.6 Peta Sebaran *Kulong* di Kabupaten Bangka Barat

Keberadaan *kulong* dari kegiatan pertambangan mengindikasikan bahwa suatu kawasan telah mengalami degradasi mutu lingkungan atau dengan kata lain lingkungan tersebut telah rusak. Akan tetapi, kerusakan tersebut dapat diminimalisasi dengan upaya pemulihan kesehatan lingkungan, salah satunya melalui pemanfaatan *kulong*. Hal ini cukup beralasan, mengingat banyaknya jumlah *kulong* dan sangat potensial untuk dimanfaatkan. Adanya pemanfaatan *kulong* juga bisa berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sumber daya *kulong* dengan karakteristiknya masing-masing dapat menjadi potensi yang berpeluang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, sumber air baku, mandi dan mencuci, serta pariwisata.

Kulong di Kabupaten Bangka Barat yang telah dimanfaatkan adalah *Kulong* Sekar Biru menjadi tempat ekowisata, *Kulong* PAM Perumnas digunakan sebagai sumber air

baku, dan *Kulong* PDAM Menumbing. Selain itu, *kulong* yang berpotensi dikembangkan sebagai tempat ekowisata karena memiliki keunikan karakteristik warna *kulong*, keberadaan *kulong* di luar kawasan hutan, dan pengembangan yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah *Kulong* Telaga Biru Muntok.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat memiliki posisi yang strategis sebagai pintu masuk regional Sumatera yang menggunakan jalur laut. Sistem perkotaan wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi susunan hirarki perkotaan yaitu terdapat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034, rencana pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Bangka Barat meliputi:

- a. Kota Muntok ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. Kota Kelapa dan Kota Paritiga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c. Pelangas, Airputih, Jebus, Tempilang, Bakit, dan Ibul ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Airnyatoh, Kundi, Rukam, Kapit, Cupat, Kacung, Pusuk, Kayuarang, Penyampak, dan Sangku ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Pemerintah menetapkan beberapa kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai prioritas dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten Bangka Barat meliputi :

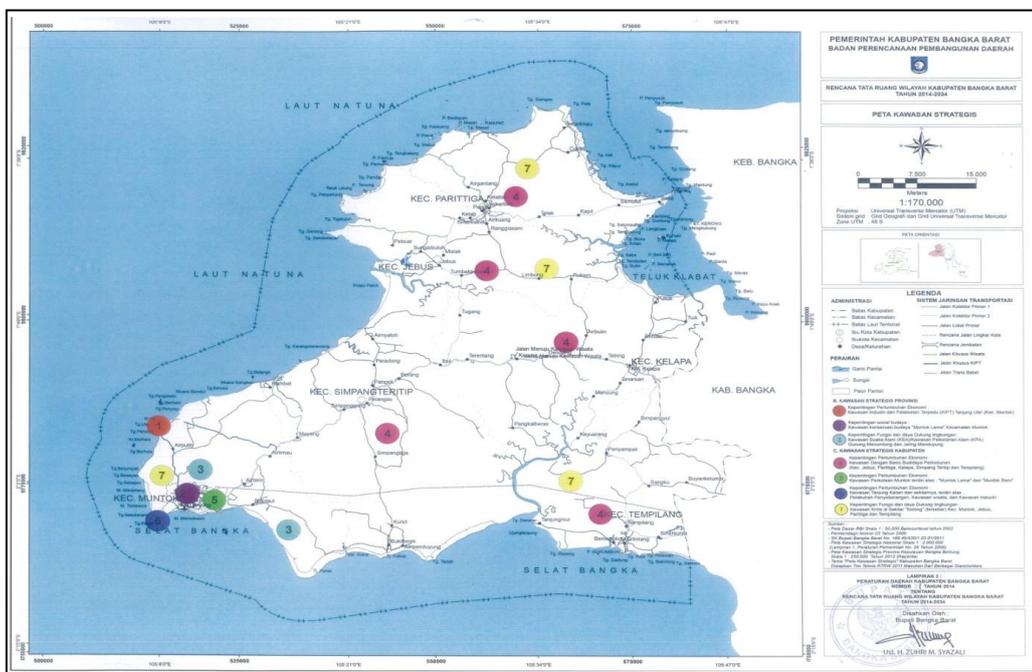
a. Kawasan Strategis Provinsi :

1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular (Kecamatan Muntok).
2. Kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan konservasi budaya "Muntok Lama" Kecamatan Muntok.
3. Kepentingan Fungsi dan daya Dukung lingkungan yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Gunung Menumbing dan Jering Menduyung.

b. Kawasan strategis Kabupaten:

1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu :
 - Kawasan dengan Basis Budidaya Perkebunan, yaitu Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip, dan Tempilang.

- Kawasan Perkotaan Muntok di Kecamatan Muntok terdiri atas; "Muntok Lama" dan "Muntok Baru".
 - Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Muntok.
 - Kawasan Tanjung Kalian dan sekitarnya, terdiri atas Pelabuhan Penyeberangan, Kawasan wisata, dan Kawasan Industri.
2. Kepentingan sosial dan budaya
- Kawasan strategis yang ditetapkan adalah kawasan konservasi budaya Muntok Lama di Kecamatan Muntok yang akan dikembangkan dan ditata untuk pemanfaatan wisata budaya dan ilmu pengetahuan.
3. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Kritis di sekitar "Kulong" tersebar di Kecamatan Muntok, Jebus, Parittiga dan Tempilang.



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

Gambar 2.7 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat

4. Potensi Wisata

Kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014—2034 dibagi menjadi 3 SKW (Satuan Kawasan Wisata), yaitu:

a. SKW I meliputi Kecamatan Muntok dan Simpangteritip. Objek wisata yang ada di SKW I terdiri dari:

- 1) Wisata Alam: Pantai Tanjung Kalian, Tanjung Ular, Pantai Bidadari, Pantai Muntok Asin, Pantai Batu Rakit, Pantai Air Mas Rambat, Pantai Air Nyatoh, Pantai Menggris dan Pantai Karang Aji, Gunung Menumbing, Batu Balai, Tanah Merah, Tungau, dan Mentiba.



2) Wisata Budaya: Pesanggrahan Menumbing, Pesanggrahan Muntok, Rumah Mayor Chung A Thiam, Masjid Jami Muntok, Kelenteng Cina Muntok, Peleburan Timah Muntok, Makam Keluarga Abdi Dalem Hamengkubuwono IX, BTW, Makam Bangsawan Melayu, dan Kampung Melayu.

b. SKW II meliputi Kecamatan Jebus dan Parittiga. Objek wisata yang ada di SKW II terdiri dari:

1) Wisata Alam: Pantai Tanjung Ru, Pulau Nanas, Pantai Blembang, Bukit Mempari, Kebun Teh Tayu, Pulau Beri-Beri, Bembang, Siangau, dan Pala Jebu.

2) Wisata Budaya: Kelenteng Cina, Makam Haji Khotamarrasyid Bin H. Usman, Sembahyang Bulan, dan Sembahyang Kubur.

c. SKW III meliputi Kecamatan Tempilang dan Kelapa, terdiri dari kawasan:

1) Wisata Alam: Pantai Pasir Kuning, Pantai Kedacak, Air Panas Dendang, perkebunan sawit, sarang burung walet.

2) Wisata Budaya: Benteng Kota Tempilang.

Adapun Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat (KPPK) terdiri dari:

a. KPPK Pariwisata Budaya Bahari Simpangteritip dan sekitarnya;

b. KPPK Pariwisata Minat Khusus Alam dan Pesisir Jebus sekitarnya;

c. KPPK rest area wilayah Kelurahan Kelapa dan sekitarnya; dan

d. KPPK Pariwisata Budaya atau Tradisi Tempilang dan sekitarnya.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan analisis dan kondisi alam lingkungan, potensi bahaya beraspek geologi di Kabupaten Bangka Barat yang utama adalah daerah berpotensi banjir/genangan dan daerah berpotensi abrasi.

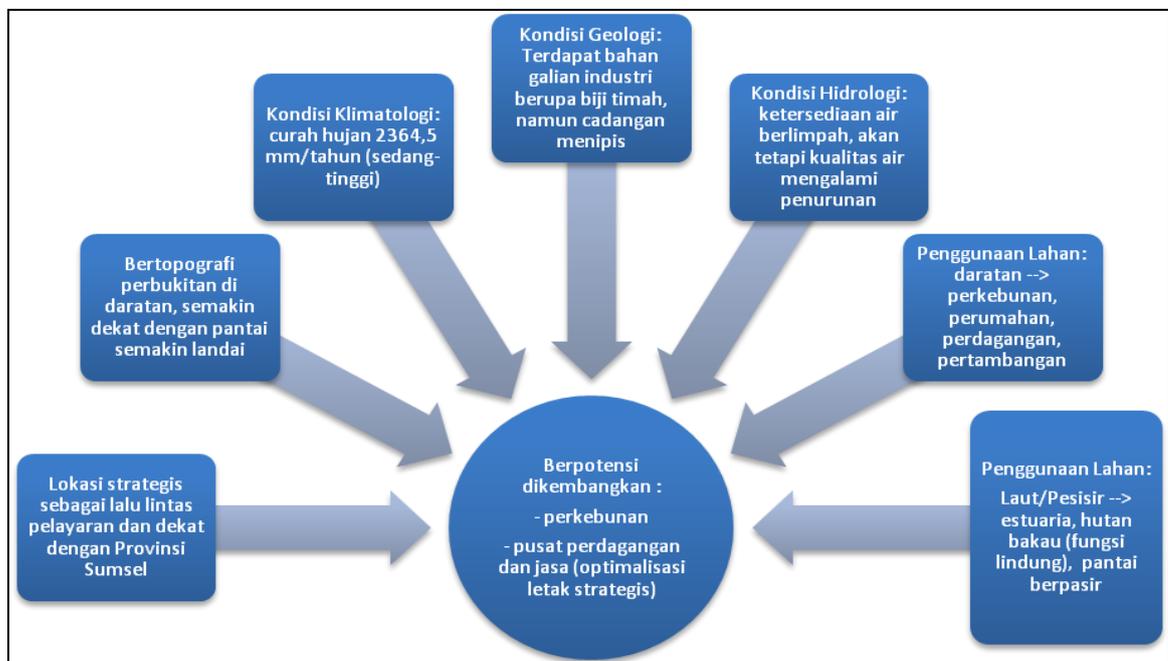
Banjir yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat terletak di Ibukota Kecamatan Muntok khususnya di daerah Teluk Rubiah, Tanjung, dan Ibukota Kecamatan Parittiga yaitu Desa Puput. Sementara daerah pesisir pantai yang berpotensi mengalami bencana abrasi adalah Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga dan Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang.

Tabel 2.5 Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	KECAMATAN	JENIS BENCANA					
		ANGIN PUTING BELIUNG	SAR	PETIR	GEMPA BUMI	TSUNAMI	BANJIR
1.	MUNTOK	3					2
2.	SIMPANGTERITIP	1		2			1
3..	KELAPA						1
4.	JEBUS						2
5.	PARITTIGA	1	1				2
6.	TEMPILANG	1					

sumber: Kabupaten Bangka Barat dalam Angka, 2022.

Dari gambaran kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan kondisi wilayah rawan bencana, dapat tergambar keterhubungan ketiga kondisi tersebut sebagai berikut:



Sumber : RPJPD Kab. Bangka Barat Tahun 2005-2025.

Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Potensi pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan kondisi geografis mengarah pada dua hal, yaitu potensi di sektor pertanian (dalam hal ini perkebunan) dan sektor perdagangan dan jasa. Perkebunan cenderung dapat dilakukan dengan kondisi topografi berupa berbukitan dan tanah yang memiliki tingkat kesuburan “sedang”. Sedangkan perdagangan dan jasa, dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan letak Kabupaten Bangka Barat sebagai jalur lalu lintas laut yang melewati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, keindahan ekosistem pantai

dapat menjadi daya tarik tersendiri dan dimungkinkan untuk pengembangan sektor pariwisata sebagai turunan sektor perdagangan dan jasa.

2.1.1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebanyak 206.246 jiwa. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Muntok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sejumlah 53.441 jiwa atau 25,91 persen dan Kecamatan Jebus dengan penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk 22.738 jiwa atau 11,03 persen.

Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat sampai Tahun 2021 terdiri dari 106.205 jiwa laki-laki (51,49 persen) dan 100.041 jiwa perempuan (48,51 persen) meningkat dari Tahun 2020 yang terdiri dari 105.382 jiwa laki-laki (51,52 persen) dan 99.145 jiwa perempuan (48,48 persen). Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2021

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Muntok	26.936	26.072	53.008	27.099	26.362	53.388
2	Simpangteritip	15.692	14.966	30.658	15.856	15.145	30.937
3	Jebus	11.638	10.893	22.531	11.744	10.994	22.672
4	Kelapa	18.174	16.649	34.823	18.259	16.722	35.032
5	Tempilang	14.715	13.531	28.246	14.923	13.672	28.552
6	Parittiga	18.227	17.034	35.261	18.344	17.146	35.425
TOTAL		105.382	99.145	204.527	106.205	100.041	206.246

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat,2022.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam menganalisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, dapat ditinjau melalui empat aspek analisis, yaitu (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (2) PDRB Per Kapita; (3) Angka Kemiskinan; dan (4) Angka Kriminalitas. Selanjutnya, melalui analisis empat aspek ini diharapkan mampu memproyeksikan rencana pembangunan jangka menengah dalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.



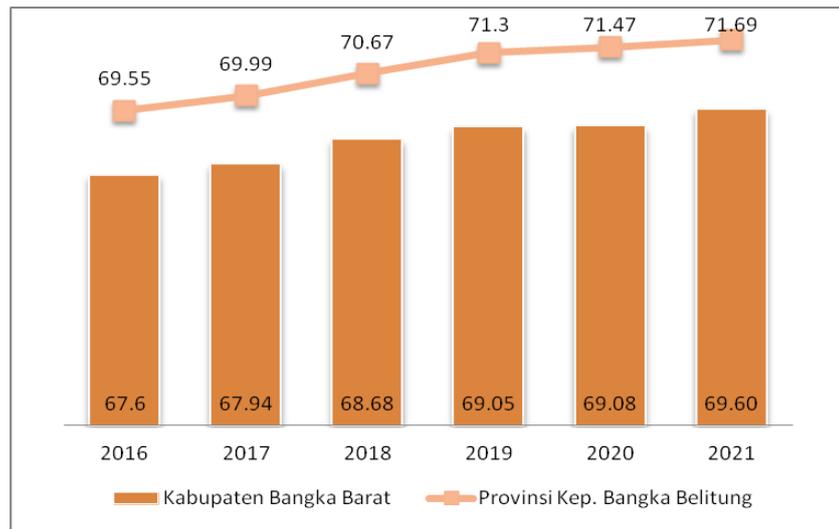
a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Jika dilihat dari perkembangan IPM dari tahun 2016 sampai tahun 2021 kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat secara nasional mengalami peningkatan. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM tahun 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada tahun 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 2,90 persen.

IPM Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 sebesar 69,60 atau tumbuh 0,75 persen dibandingkan capaian sebelumnya. Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka IPM Kabupaten Bangka Barat tergolong masih rendah bahkan selama lima tahun terakhir selalu menduduki peringkat ke 6 atau terendah setelah Kabupaten Bangka Selatan. Sementara dibandingkan dengan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 71,69 dan IPM Nasional mencapai 72,29, IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 cukup jauh tertinggal dengan perbedaan 2,09 poin dari IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 2,69 poin dari IPM Nasional.

Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk merumuskan strategi dan program yang dapat meningkatkan kinerja khususnya pada 3 (tiga) dimensi dasar IPM, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2021.

Gambar 2.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) secara berkala.

Tabel 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^r	2020 [*]	2021 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,21	1,57	-0,10	3,53	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	2,41	0,48	1,39	-13,87	10,22
C	Industri Pengolahan	6,53	6,97	12,46	-7,00	-4,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,17	8,55	15,06	19,30	8,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,59	0,01	2,01	7,50	3,97
F	Konstruksi	7,05	7,23	3,85	-1,46	1,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,35	4,53	2,55	-6,21	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan	7,85	6,54	3,34	-13,37	8,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,83	2,80	3,70	-0,65	6,29
J	Informasi dan Komunikasi	8,43	10,51	12,55	18,44	5,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,04	6,55	7,14	-0,44	5,36
L	Real Estate	5,05	7,29	1,57	4,91	4,41
M,N	Jasa Perusahaan	4,10	4,49	0,37	-9,11	4,09



Kategori	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^r	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,80	8,08	6,08	-0,63	4,64
P	Jasa Pendidikan	9,76	9,12	6,01	-0,76	1,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,90	7,52	7,37	1,07	9,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,80	4,13	4,48	-4,69	2,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,26	5,20	7,06	-5,37	0,21

Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

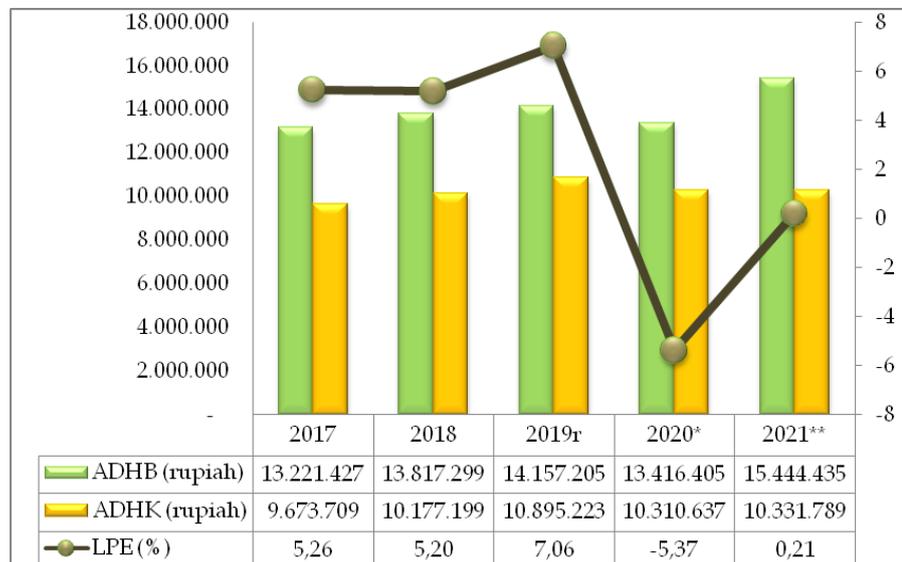
Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 mencapai Rp 10,33 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang bernilai sebesar Rp 10,31 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21 persen, sejalan dengan meningkatnya produksi di beberapa sektor lapangan usaha di tahun 2021. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Selama tahun 2021, hampir seluruh kategori lapangan usaha tercatat tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya satu sektor saja yang tercatat mengalami kontraksi, yaitu kategori Industri Pengolahan. Kategori ini tercatat mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar 4,52 persen. Hal ini membaik jika dibandingkan dengan tahun 2020, di mana kategori ini mengalami kontraksi sebesar 7,00 persen. Sementara itu, kategori lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB terbesar di antaranya adalah kategori Pertambangan dan Penggalian, Jasa Kesehatan, dan Transportasi dan Pergudangan. Kategori Pertambangan dan Penggalian tercatat tumbuh cukup signifikan, yaitu sebesar 10,22 persen di tahun 2021. Kemudian disusul oleh kategori Jasa Kesehatan yang tumbuh sebesar 9,31 persen. Selain itu, kategori Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh cukup besar di tahun 2021, yaitu sebesar 8,28 persen.

c. Perkembangan PDRB di Kabupaten Bangka Barat

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik, walaupun mengalami penurunan di

sebagian sektor pada tahun 2020. Perekonomian Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional setelah dilanda pandemic Covid-19 sejak awal tahun 2020. Nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 15,44 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 15,12 persen dibanding tahun 2020 yang hanya mencapai 13,41 triliun rupiah. Sementara itu, nilai tambah yang mampu diciptakan oleh seluruh lapangan usaha di Kabupaten Bangka Barat yang dihitung atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) mengalami peningkatan dari 10,31 triliun rupiah di tahun 2020, menjadi 10,33 triliun rupiah di tahun 2021. Berdasarkan PDRB ADHK ini, perekonomian di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 cenderung membaik. Di mana pada tahun 2021 ini angka pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 0,21 persen. Meskipun melambat, hal ini menunjukkan adanya indikasi peningkatan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat di tahun 2021. Jika dibandingkan, kondisi perekonomian tahun 2020 sempat mengalami kontraksi perekonomian sebesar 5,37 persen. Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan pada sebagian besar sektor ekonomi unggulannya, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan besar serta eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, maupun sektor lainnya.



Keterangan : r) angka revisi
*) angka sementara
**) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Gambar 2.10 PDRB ADHB, ADHK dan LPE
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

d. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 2.8 Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 (Persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^r	2020 [*]	2021 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,11	12,06	11,34	13,25	12,45
B	Pertambangan dan Penggalian	10,71	9,48	8,31	7,50	8,71
C	Industri Pengolahan	42,20	44,03	45,61	42,99	45,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,09	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,66	7,22	7,51	7,84	7,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,00	14,55	14,06	14,07	13,27
H	Transportasi dan Pergudangan	0,93	0,96	0,99	0,93	0,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,20	1,26	1,40	1,32
J	Informasi dan Komunikasi	0,31	0,33	0,37	0,45	0,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,40	0,42	0,45	0,47	0,45
L	Real Estate	2,01	2,09	2,08	2,33	2,14
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,45	4,52	4,73	5,16	4,71
P	Jasa Pendidikan	1,79	1,82	1,91	2,11	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,79	0,85	0,91	0,88
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,30	0,31	0,32	0,34	0,31
PDRB ADHB		100	100	100	100	100

Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021), struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

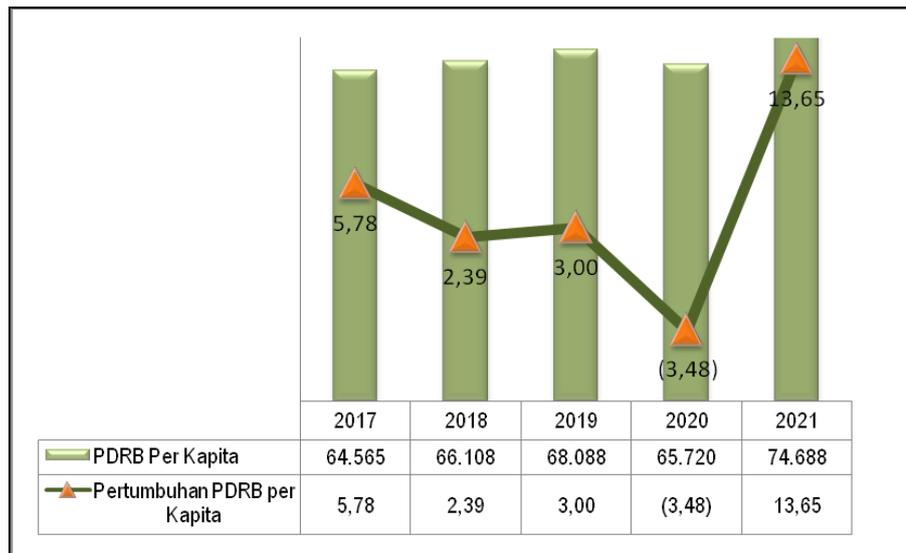


lapangan usaha Konstruksi; serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dilihat dari nilai kontribusi yang dihasilkan, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Kontribusi yang dihasilkan kategori ini menyumbang sebesar 45,13 persen dan 13,27 persen terhadap total PDRB ADHB. Selanjutnya, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai peranan sebesar 12,45 persen; disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,71 persen serta Lapangan usaha Konstruksi memiliki peranan sebesar 7,16 persen.

Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan cenderung mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2017 menjadi sebesar 42,20 persen menjadi 44,03 persen di tahun 2018. Kemudian kembali naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 45,61 persen dan tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai kontribusinya sebesar 42,99. Meskipun demikian di tahun 2021 nilai kontribusinya kembali meningkat menjadi 45,13 persen.

e. PDRB per Kapita

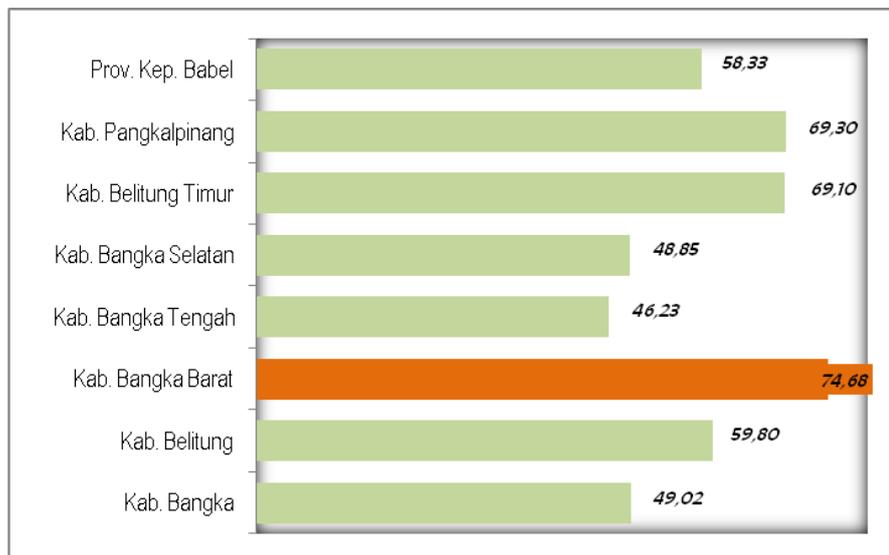
Indikator ini merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Gambar 2.11 PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021

PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat sempat mengalami penurunan. Di mana pada tahun 2020 angka PDRB per kapita sebesar 65,72 juta rupiah. Sementara di tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 74,68 juta rupiah.



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Gambar 2.12 PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (juta rupiah)

Sementara jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, pada Tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat memiliki angka yang tertinggi. Secara keseluruhan, hal ini menandakan bahwa perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat secara umum semakin membaik dari tahun ke tahun.

f. Angka Kemiskinan

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah guna menekan angka kemiskinan. Hal ini terlihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat yang pada periode 2019-2021 cenderung naik. Sama halnya dengan jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin juga mengalami peningkatan pada periode 2019-2021. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebesar 5.850 ribu jiwa atau sebesar 2,75 persen dari total penduduk di Kabupaten Bangka Barat. Angka ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020, yaitu sebesar 5.830 ribu jiwa. Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 sebesar Rp599.887 per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun 2020 yang besarnya Rp589.894 per kapita per bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan per kapita per hari pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Meningkatnya garis kemiskinan ini dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

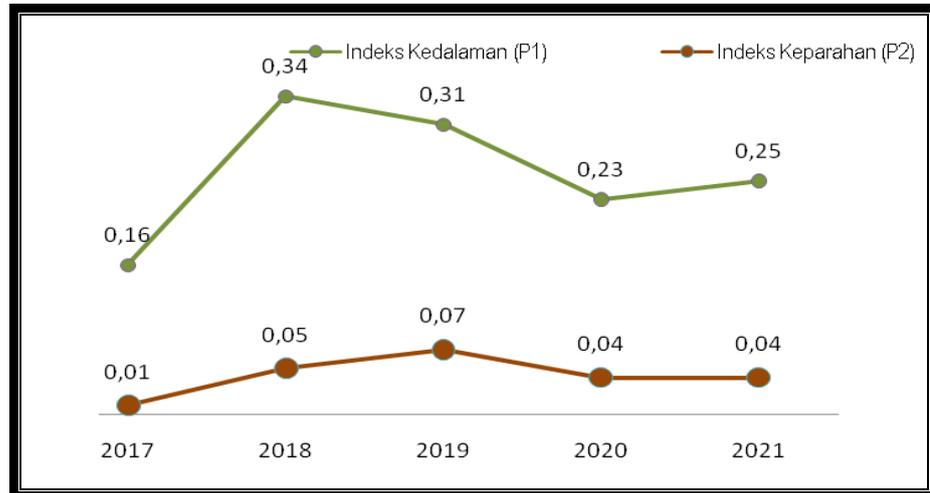
Tabel 2.9 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (Rp)	497.567	520.642	549.496	589.894	599.887
Jumlah Penduduk Miskin	6.060	6.350	5.650	5.830	5.850
Persentase Penduduk Miskin	2,98	3,05	2,67	2,70	2,75
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	97,02	96,95	97,33	97,30	97,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2022.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan kondisi cukup fluktuatif selama 2017-2021. Semakin besarnya indeks kedalaman kemiskinan, mengindikasikan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan. Nilai P1 yang pada tahun 2019 sebesar 0,31 turun menjadi 0,23 pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali naik menjadi sebesar 0,25. Perkembangan

sedikit berbeda terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bangka Barat selama 2017-2021. Pada tahun 2020, indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,04 dan terus bertahan di angka yang sama pada 2021. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin semakin menurun. Hal ini juga menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk antar penduduk miskin semakin sama dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.13 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021

g. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru serta mengukur capaian hasil pembangunan. Tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.10 Persentase TPT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2017 – 2021

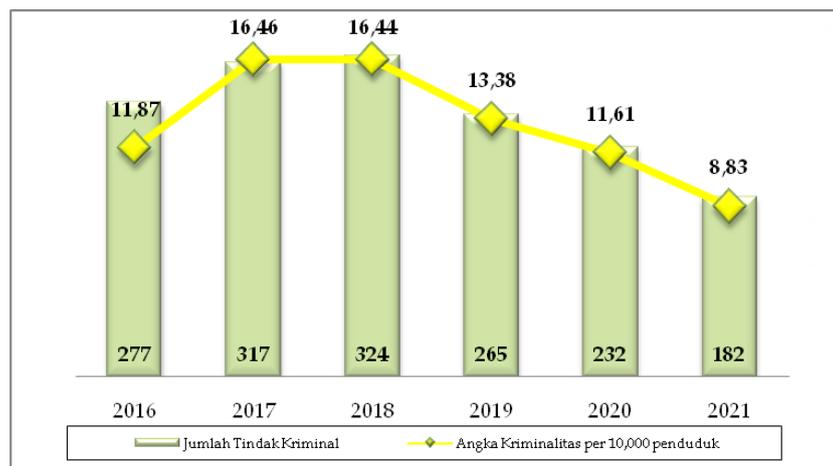
Kabupaten/kota	Persentase				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	4,29	4,12	3,80	5,42	5,97
Belitung	2,57	2,93	2,90	4,82	3,51
Bangka Barat	4,23	3,05	2,80	4,12	3,83
Bangka Tengah	3,38	3,93	4,39	5,59	4,95
Bangka Selatan	2,74	4,35	3,87	5,42	5,29
Belitung Timur	2,62	1,50	1,71	3,93	3,78
Pangkalpinang	5,80	4,70	5,01	6,93	6,81
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,78	3,65	3,39	5,25	5,03

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Bangka Barat mencapai 4,12 persen dikarenakan faktor pandemi *Covid-19* yang membuat hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami kontraksi perekonomian, dan di tahun 2021 menjadi 3,83 persen. Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Barat relatif lebih baik (rendah) dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tingkat pengangguran provinsi yang mencapai 5,03 persen, Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah provinsi.

h. Angka Kriminalitas

Kriminalitas sangat terkait dengan angka kemiskinan, tingkat ekonomi, angka pengangguran dan aspek sosial lainnya sehingga angka kriminalitas menjadi salah satu aspek analisis yang perlu diperhatikan. Angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Barat cenderung menurun. Total tindak pidana yang terjadi selama tahun 2021 di Kabupaten Bangka Barat memperlihatkan adanya penurunan 50 perkara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rata-rata tindak kriminal tertinggi setiap tahun adalah pada kasus pencurian dengan pemberatan.



Sumber : Polres Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.14 Perkembangan Jumlah dan Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

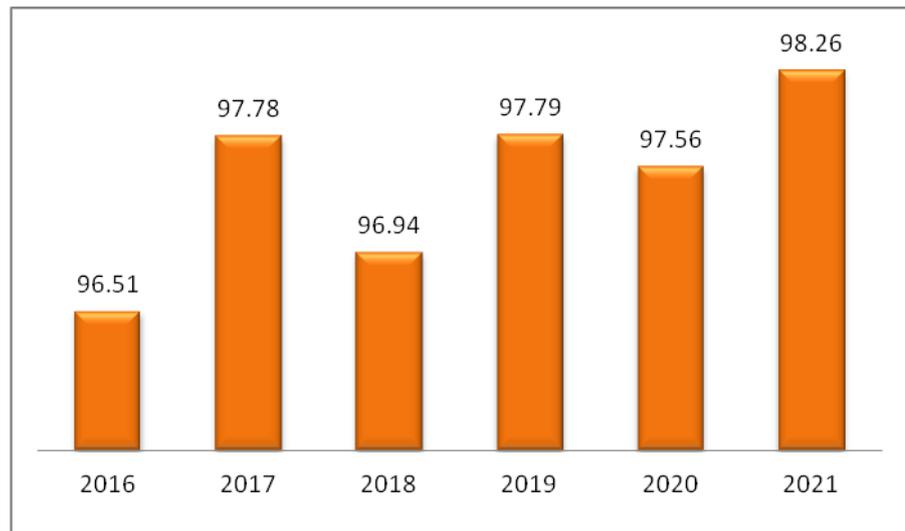
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

I. Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca serta menulis kalimat sederhana. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah,

karena kemampuan baca tulis merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar di bawah ini, menunjukkan bahwa AMH di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 mencapai 98,26 persen.



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Gambar 2.15 Angka Melek Huruf
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

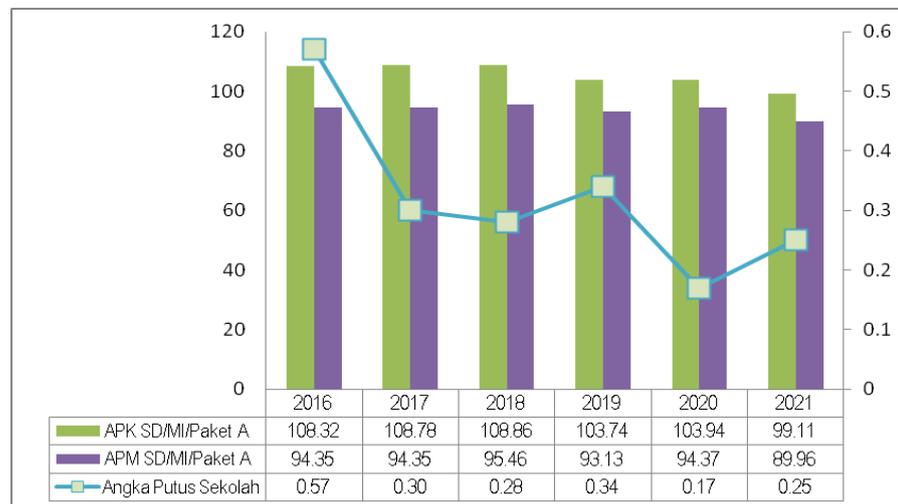
b. Angka Partisipasi Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang

pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

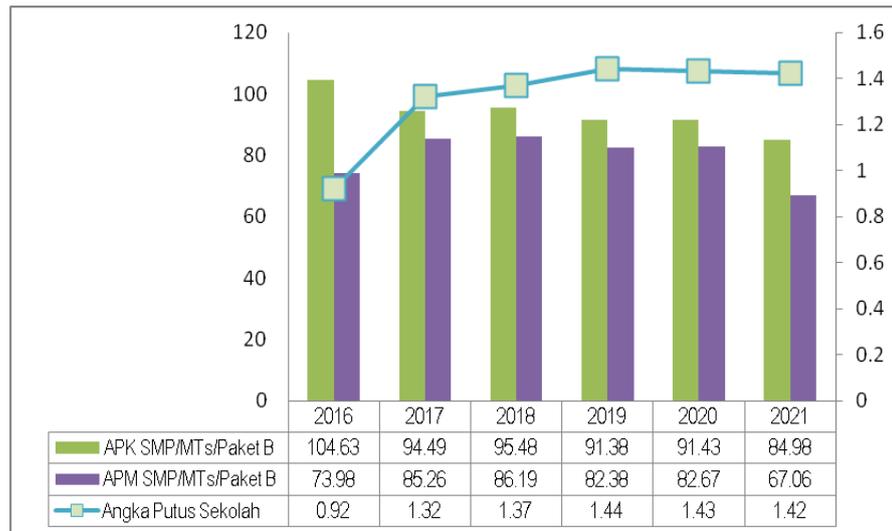
Sementara APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.16 APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021

Capaian APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan menjadi 99,11 persen sehingga angka putus sekolah meningkat menjadi 0,25 persen. Jika dilihat kedudukan APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat di tingkat provinsi tahun 2021, APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 107,16 persen.



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.17 APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Capaian APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 bersifat fluktuasi. Pada tahun 2021, angka putus sekolah menunjukkan penurunan menjadi 1,42 persen dari tahun 2020 sebesar 1,43 persen. Selain itu APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat menurun sebesar 85 persen. Capaian di tahun 2021 masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 88,44 persen. Naik turunnya APK dipengaruhi oleh angka putus sekolah yang tidak stabil. Angka putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, akses jalan dan transportasi kurang mendukung, faktor budaya (pernikahan dini), dan perceraian orang tua.

Kasus anak putus sekolah saling mempengaruhi satu sama lain dengan persoalan kemiskinan. Selain itu, putus sekolah mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

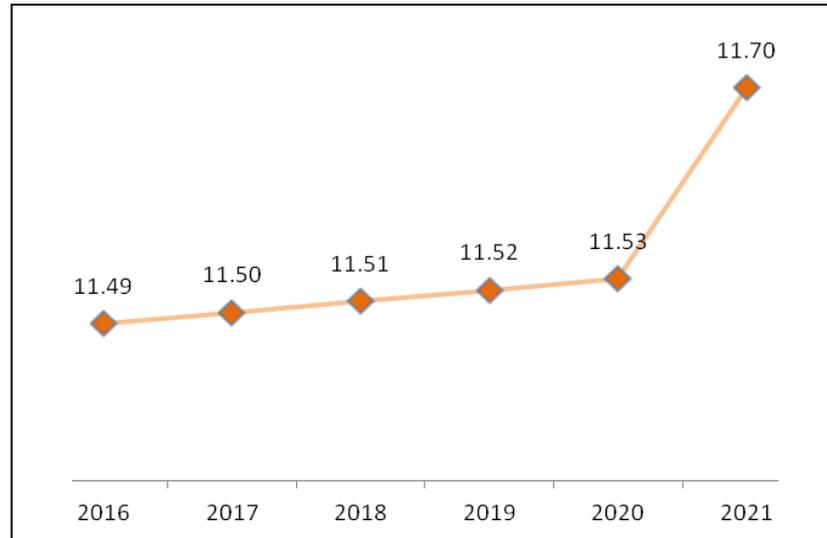
c. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam

tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.

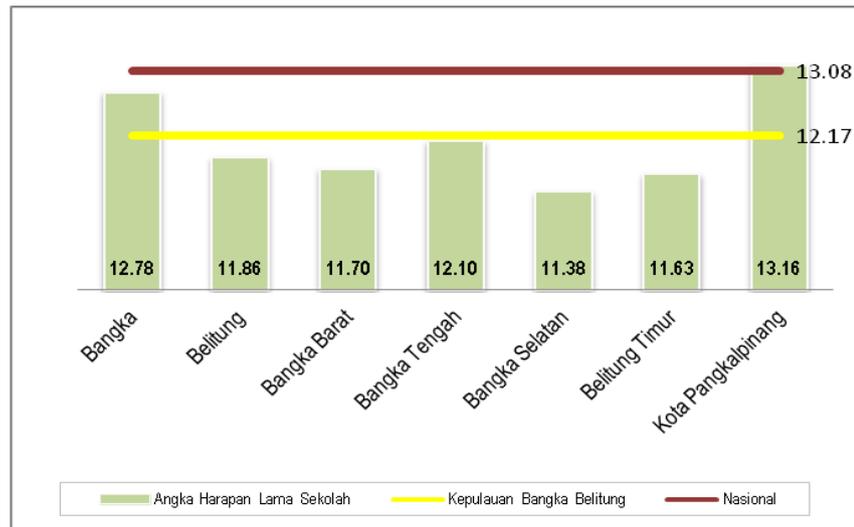
Indikator Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Angka HLS di tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.18 Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2021, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi ke-5 setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 12,17 tahun dan dibawah capaian Nasional yang mencapai 13,08 tahun.



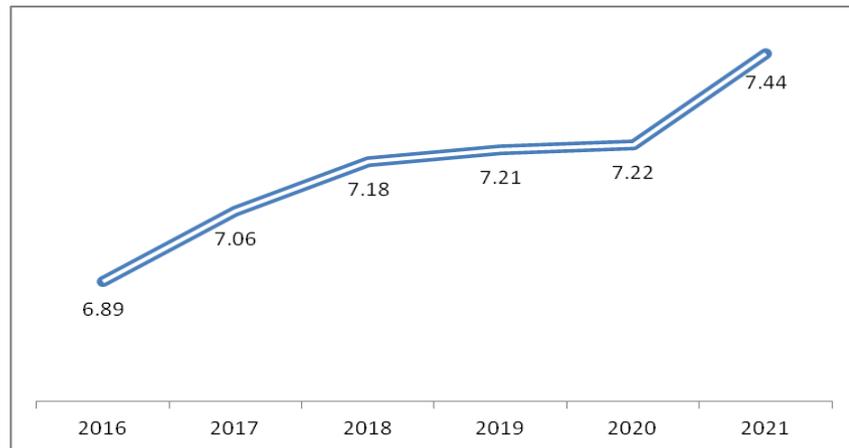
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.19 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

d. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) khususnya sektor pendidikan. RLS didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Bangka Barat pemerintah memberikan beberapa program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk mencapai wajib belajar 12 tahun.

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 mencapai 7,44 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bangka Barat menempuh pendidikan sampai kelas 1 atau 2 setara SMP/ sederajat. Angka ini tergolong rendah karena belum memenuhi target wajib belajar sembilan tahun. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan pada pasar tenaga kerja semakin tinggi, penduduk Kabupaten Bangka Barat harus terus meningkatkan kompetensi pendidikan agar tidak tertinggal dari penduduk di Kabupaten lain.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.20 Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016–2021

Sementara jika dibandingkan dengan Angka RLS dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kep. Bangka Belitung di Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.21 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

e. Kondisi Pendidikan Dasar

Kondisi Pendidikan Dasar menggambarkan keadaan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, kondisi ruang kelas, dan angka kelulusan. Gambaran kondisi yang mendukung keberhasilan wajib belajar sembilan tahun Bangka Barat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah		Kondisi ruang kelas			Jumlah Siswa	Persentase Kelulusan	Guru (orang)						
		N	S	B	RR	RB			Jumlah	S-1/D-IV	Tersertifikasi				
1.	SD	127	7	636	310	161	24.862	100 %	1.481	1.388	535				
2.	MI	2	3				900	100 %				49			
3.	SMP	27	8				298	88				27	7.965	100 %	501
4.	MTs	3	8				1.691	100 %				177			

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2022.

Keterangan:

N : Sekolah Negeri; S : Sekolah Swasta; B : kondisi kelas baik; RR : kondisi kelas rusak ringan; RB : kondisi kelas rusak berat

Lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai, hanya saja kondisi ruang kelas baik di SD/MI maupun SMP/MTs masih terdapat kondisi rusak ringan dan rusak berat. Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV tahun 2020 sebanyak 1.709 orang dari 2.208 orang, sedangkan guru yang bersertifikat pendidik adalah 535 orang atau 34,96 persen dari total guru (PNS, guru tetap yayasan, dan GTT SD).

Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 184 orang atau 27,13 persen dari total guru PNS, GTY, dan GTT. Banyaknya guru yang telah tersertifikat pendidik profesional menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Bangka Barat semakin meningkat. Untuk persentase kelulusan di semua tingkat baik SD/MI maupun SMP/MTs mencapai 100 persen.

f. Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan upaya penjaminan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan pemetaan mutu, fasilitasi dan pendampingan, serta bantuan peningkatan kualitas dan dilanjutkan dengan pengukuran kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi. Jumlah SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat yang terakreditasi dan belum terakreditasi di tahun 2020 tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Sekolah Dasar/MI						
	Terakreditasi A	25	30	31	29	25	24
	Terakreditasi B	87	90	92	93	95	98
	Terakreditasi C	18	13	9	14	16	16
	Belum Terakreditasi	8	5	6	3	3	1
2.	SMP/MTs						
	Terakreditasi A	19	20	20	19	19	18
	Terakreditasi B	16	17	18	20	20	21
	Terakreditasi C	2	3	4	4	4	4
	Belum Terakreditasi	8	6	4	3	3	3

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2022.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bangka Barat telah memiliki banyak SD dan SMP yang terakreditasi. Jumlah SD di Kabupaten Bangka Barat yang telah terakreditasi hingga tahun 2021 sebanyak 99,28 persen dari 139 sekolah. Akreditasi terbesar di kategori Baik yaitu sebanyak 98 sekolah. Pada jenjang SMP/MTs, di tahun 2021 juga telah terakreditasi A sebanyak 18 sekolah, terakreditasi B sebanyak 21 sekolah, dan terakreditasi C sebanyak 4 sekolah. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun selalu terjadi perubahan status akreditasi baik di tingkat SD maupun SMP. Capaian tersebut antara lain didukung oleh: (1) Penguatan pendampingan satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penguatan kapasitas pelaksanaan akreditasi termasuk peningkatan jumlah sasaran satuan pendidikan yang diakreditasi; (3) Peningkatan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan peningkatan kualitas pengajar dan peserta didik.

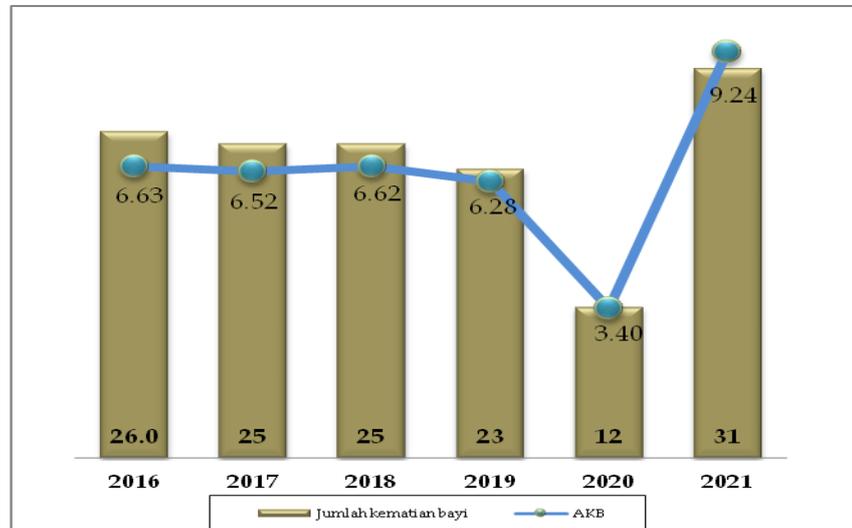
II. Kesehatan

Beberapa indikator bidang kesehatan menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kabupaten Bangka Barat dari sisi kesehatan belum sesuai dengan harapan. Permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada dapat diminimalisir dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal.

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat hubungannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya bidang kesehatan.

Jumlah Kematian Penduduk usia 0-1 tahun (bayi) di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2016 jumlah bayi mati sebanyak 26 jiwa dan terus membaik dengan penurunan signifikan di tahun 2020 menjadi sebanyak 12 jiwa dengan angka kematian bayi sebesar 3,40 persen. Selanjutnya, jumlah bayi mati meningkat di tahun 2021 menjadi sebanyak 31 jiwa dengan angka kematian bayi sebesar 9,24 persen.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2022.

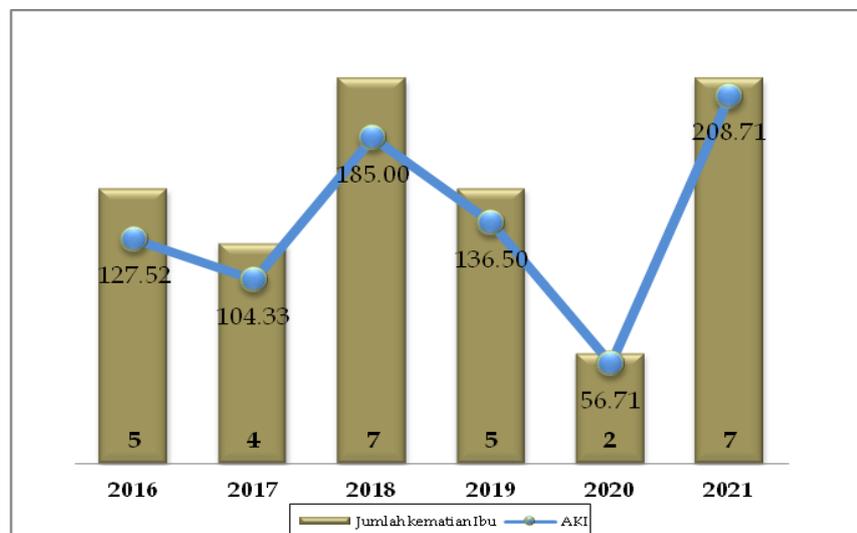
Gambar 2.22 Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB, diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan karena AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu, faktor

lainnya yaitu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang berkontribusi terhadap perbaikan gizi sehingga berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap penyakit. Di lain sisi terdapat faktor negatif yang juga mempengaruhi AKB antara lain rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan, masa nifas, rendahnya kualitas sanitasi dasar, kondisi gizi serta penyakit-penyakit infeksi serta sarana prasarana kesehatan yang belum memadai khususnya alat kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) didefinisikan sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. AKI dihitung dari kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain. AKI merupakan indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu bangsa dan menjadi salah satu komponen indeks pembangunan maupun indeks kualitas hidup.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2022.

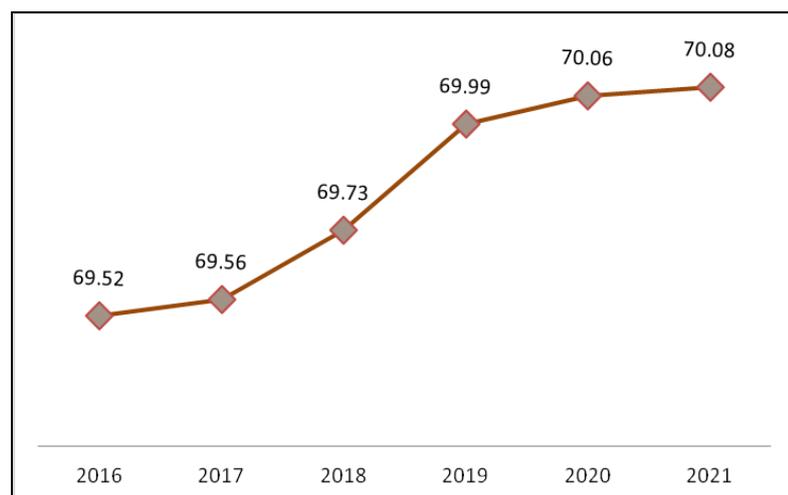
Gambar 2.23 Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Data AKI di Kabupaten Bangka Barat meningkat signifikan di tahun 2021 yaitu 208,71 per 100.000 kelahiran hidup, dimana capaian tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan target nasional 102 per 100.000 kelahiran hidup. Sebaran kasus AKI di Kabupaten Bangka Barat yaitu 2 kasus di Kecamatan Muntok dan 1 kasus di Kecamatan Simpangteritip, Kelapa, Parittiga dan Tempilang. Hal ini

disebabkan ibu hamil menderita anemia, kurang gizi, dan mengalami penyakit tekanan darah tinggi saat hamil. Selain itu, kenaikan jumlah kematian ibu dan bayi juga terjadi saat pandemi Covid-19. Selama tahun 2021 tercatat ada 3 ibu meninggal dengan hasil pemeriksaan swab PCR /antigen positif. Upaya dalam menekan rendahnya AKI yaitu memperkuat kapasitas dan kapabilitas fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu menangani permasalahan sedini mungkin.

c. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, AHH penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 70,08 tahun. Selain sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia sudah cukup memadai, kondisi masyarakat semakin maju dan semakin peduli dengan kesehatan juga menjadi faktor pendorong meningkatnya AHH di Kabupaten Bangka Barat.

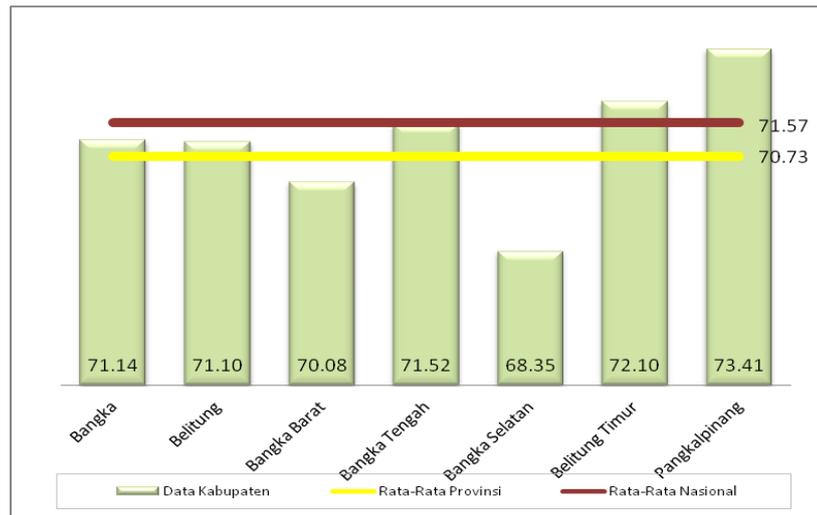


Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.24 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021

Walaupun capaian AHH Kabupaten Bangka Barat terus meningkat, namun jika dibandingkan dengan AHH Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2021 ternyata masih berada pada posisi yang cukup rendah, yaitu posisi ke 6 (enam). Capaian AHH Kabupaten Bangka Barat ini lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (70,73 tahun) dan AHH Nasional (71,57 tahun) di Tahun 2021.

:

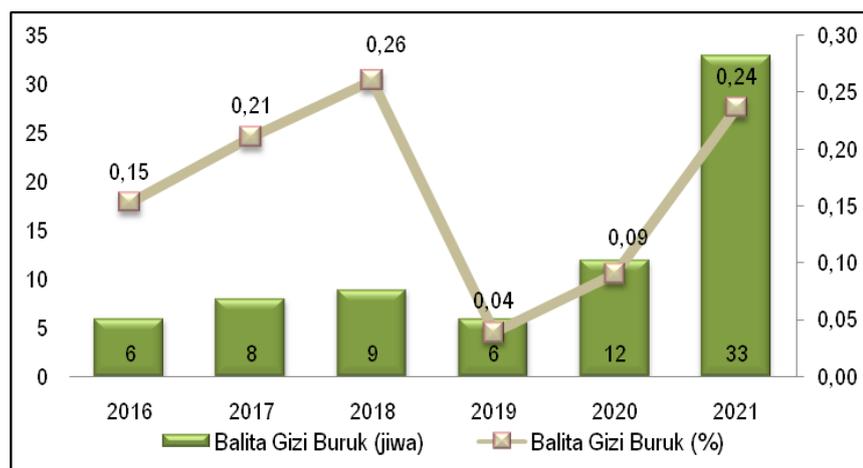


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.25 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

d. Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan ≤ 3 standar deviasi dan atau ditemukan tanda-tanda klinis gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Bangka Barat meningkat signifikan menjadi 33 (tiga puluh tiga) kasus dari jumlah kasus di tahun sebelumnya yaitu 12 (dua belas) kasus di tahun 2020. Kasus gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Bangka Barat seluruhnya mendapat perawatan dari tenaga kesehatan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.26 Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021

e. Stunting

Pada Tahun 2019, Kabupaten Bangka Barat menjadi salah satu Kabupaten yang masuk ke dalam 100 Kabupaten/Kota prioritas intervensi *stunting* di Indonesia dengan angka *stunting* relatif tinggi yang kemudian ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018. *Stunting* adalah salah satu dari Proyek Prioritas Nasional yang harus mendapat perhatian penuh dan harus segera ditangani oleh pemerintah demi mencapai target penurunan 14 persen pada Tahun 2024.

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Tahun 2021 sebesar 11,10 persen (1.552 balita *stunting* dari 13.980 balita), menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 12,38 persen (1.750 balita *stunting* dari 14.134 balita).

Tabel 2.13 Prevalensi Balita *Stunting* di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2020 dan Tahun 2021

Puskesmas	2020			2021		
	Total Balita Diukur	Balita <i>Stunting</i>	%	Total Balita Diukur	Balita <i>Stunting</i>	%
Muntok	2.772	111	4,00	2.876	138	4,80
Simpangteritip	1.522	338	22,21	1.505	278	18,47
Kundi	698	270	38,68	733	238	32,47
Kelapa	2.755	439	15,93	2.649	425	16,04
Jebus	1.695	136	8,02	1.673	139	8,31
Puput	1.526	144	9,44	1.535	102	6,64
Sekar Biru	988	98	9,92	912	90	9,87
Tempilang	2.178	214	9,83	2.097	142	6,77
KABUPATEN	14.134	1.750	12,38	13.980	1.552	11,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2022.

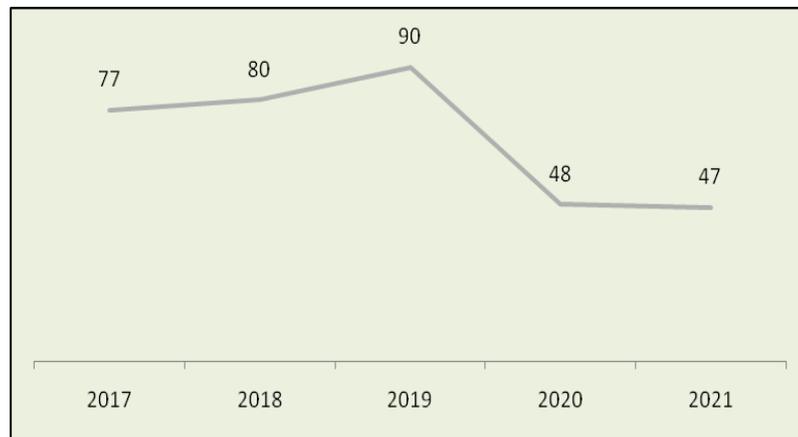
Faktor penyebab terjadinya *stunting* di Kabupaten Bangka Barat, yaitu:

1. Pernikahan usia dini ibu, dimana risiko ibu menikah kurang dari 20 tahun terhadap kejadian *stunting* dua kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang menikah diatas 20 tahun;
2. Penyakit infeksi (diare), dimana bayi dengan penyakit ini memiliki faktor risiko 3 (tiga) kali lebih besar dibanding yang tidak diare;
3. Pendidikan orang tua, dimana pendidikan ibu rendah memiliki faktor risiko terhadap kejadian *stunting* sebanyak 1.705 kali dibandingkan dengan pendidikan ibu tinggi;

4. Pendapatan keluarga, dimana pendapatan keluarga yang rendah mempunyai faktor risiko terjadinya kejadian stunting sebanyak 2.427 kali dibandingkan dengan pendapatan tinggi;
5. Ketersediaan jamban sehat, dimana hal ini menjadi faktor risiko terjadinya stunting 2,4 kali lebih besar dibandingkan yang mempunyai jamban.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah tantangan perkembangan budaya global. Berdasarkan data tahun terakhir, pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan karena kepesertaan sanggar kesenian yang sudah tidak aktif.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.27 Jumlah Sanggar Kesenian
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021

Tabel 2.14 Daftar Nama Sanggar Penerima Bantuan Alat Kesenian
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	NAMA SANGGAR	JENIS KESENIAN	ALAMAT	NO SKT BUPATI	KETERANGAN
1	Pandan Wangi	Seni Pertunjukan (Tari dan Musik)	Kec. Tempilang	431/943/SKT/2.16.1.1/2018	Sound System
2	STKB (Seni Tari Kebudayaan Bangka)	Seni Pertunjukan (Tari dan Musik)	Kec. Tempilang	431/807/ SKT /2.16.1.1/2018	Sound System
3	Mempanggung	Seni Pertunjukan (Tari dan Musik)	Kec. Jebus	431/800/ SKT /2.16.1.1/2018	Sound System, Kostum Penari, Alat Musik Tradisional
4	Pesona Budaya	Seni Pertunjukan (Dambus)	Kec. Parittiga	431/802/ SKT /2.16.1.1/2018	Sound System
5	Al- Farak	Dabus Dan Rodat	Kec. Muntok	431/792/ SKT /2.16.1.1/2018	Sound System
6	Sejiran Setason	Seni Pertunjukan (Dambus, Campak dan Belatik)	Kec. Muntok	431/804/ SKT t/2.16.1.1/2018	Sound System



NO	NAMA SANGGAR	JENIS KESENIAN	ALAMAT	NO SKT BUPATI	KETERANGAN
7	Empeng	Seni Pertunjukan (Dambus)	Kec. Kelapa	431/940/ SKT t/2.16.1.1/2018	Sound System
8	Sinar Laut	Seni Tari/ Pencak Silat	Kec. Muntok	431/929/ SKT /2.16.1.1/2018	Sound System
9	Seruni	Seni Pertunjukan (Tari dan Musik)	Kec. Muntok	431/785/ SKT /2.16.1.1/2018	Sound System
10	Panglima Angin	Seni Pertunjukan (Tari dan Musik)	Kec. Muntok	431/786/ SKT /2.16.1.1/2018	Sound System
11	Kampuseni	Seni Pertunjukan (Tari dan Musik)	Kec. Muntok	431/783/ SKT t/2.16.1.1/2018	Sound System
12	Tresno Budoyo	Seni Pertunjukan (Kuda Lumping)	Kec. Muntok	431/934/ SKT /2.16.1.1/2018	Sound System

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Barat, 2022.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum pada hakekatnya merupakan implementasi pelayanan publik, yakni segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk pelayanan barang, pelayanan jasa maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan terhadap urusan pemerintahan daerah yang sebelumnya urusan wajib terdiri dari 26 urusan menjadi 24 urusan, sementara urusan pilihan tetap berjumlah 8 urusan.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian serta urusan perencanaan pembangunan yang sebelumnya menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebelum diuraikan mengenai capaian kinerja fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan, berikut beberapa capaian kinerja terkait penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut.

a. Kepegawaian Daerah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sebagai acuan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Standar

Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Tabel 2.15 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Profesionalitas ASN	indeks	77,84	50	51,55	64,17	60,16

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

Perhitungan IP ASN merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 dari Badan Kepegawaian Nasional tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pencapaian IP ASN di Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 64,17 di tahun 2020.

Tabel 2.16 Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	Dimensi Standar Profesionalitas ASN	Standar Bobot Pengukuran	Hasil Pengukuran (%)	Realisasi (%)
1.	Kualifikasi	25	12,83	51,32
2.	Kompetensi	40	17,17	42,93
3.	Kinerja	30	25,17	83,90
4.	Disiplin	5	4,99	99,80
Total		100	60,16 (rendah)	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

Berdasarkan penilaian Indeks Profesional ASN Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendapatkan nilai yang masih rendah, yaitu dengan total poin 60,16 persen dari target yang telah ditetapkan tahun 2021 yaitu sebesar 70 persen. Berdasarkan empat dimensi yang digunakan dalam perhitungan indeks profesional ASN, dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi yang belum mencapai hasil maksimal.

Dari dimensi kompetensi, Kabupaten Bangka Barat secara berkala menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai.

Tabel 2.17 Jenis Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi ASN
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021

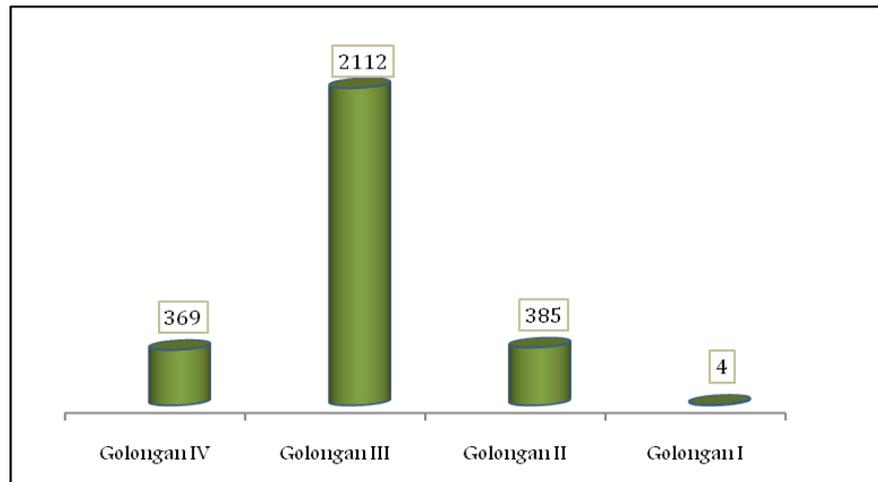
NO	TAHUN	JENIS DIKLAT	JUMLAH ORANG
1	2018	Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II	30
		Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	80
		Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40
		Diklat Guru Kurikulum 2013	30
		Diklat Guru Mapel UN SMP	35
		Diklat Manajemen Kepala Sekolah	30



NO	TAHUN	JENIS DIKLAT	JUMLAH ORANG
		Diklat Penguatan Pengawas Sekolah	18
		Diklat teknis Akuntansi Berbasis Aktual bagi PPK SKPD	30
		Diklat Strategi Pengadaan	30
		Diklat Basic Trauma dan Cardiac Life Supports (BTCLS)	30
		Diklat Bendahara berbasis aplikasi	30
2	2019	Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Angkatan I	40
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Angkatan II	40
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Angkatan III	40
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Angkatan IV	40
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Angkatan V	40
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II	39
		Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV	30
		Ujian Sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	80
		Diklat penguatan Kepala Sekolah	91
		Diklat Calon Pengawas Sekolah	32
		Pelatihan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan (PMPK)	30
3	2020	Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III	30
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II	30
		Pelatihan penyusunan standar operasional prosedur	30
		Pelatihan penyusunan evaluasi jabatan	30
4	2021	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	40
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III	40
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III	40
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III	40
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II	40
		Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II	25
		Pelatihan HOTS MAPEL SMP (IPA, B. INGGRIS)	40

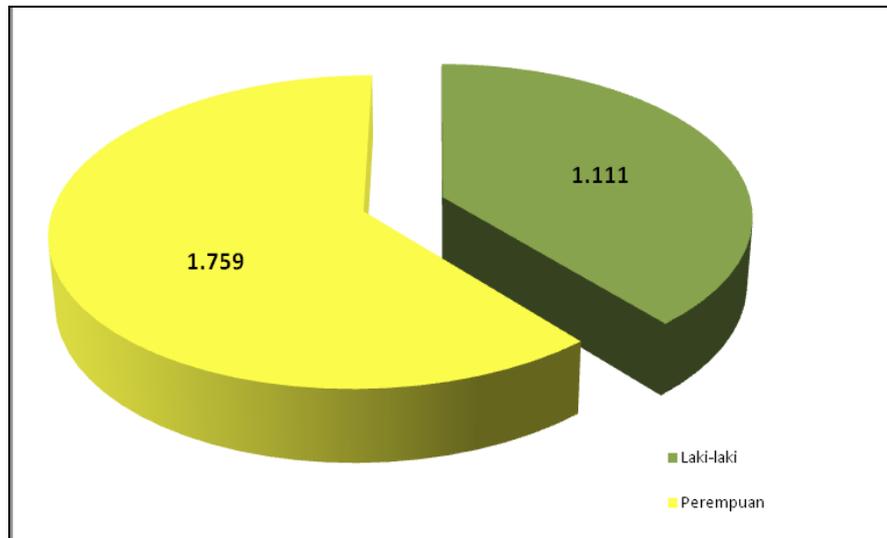
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

Berdasarkan dimensi kualifikasi, Kabupaten Bangka Barat saat ini memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2.870 orang yang terdiri dari 1.111 orang laki-laki dan 1.759 orang perempuan.



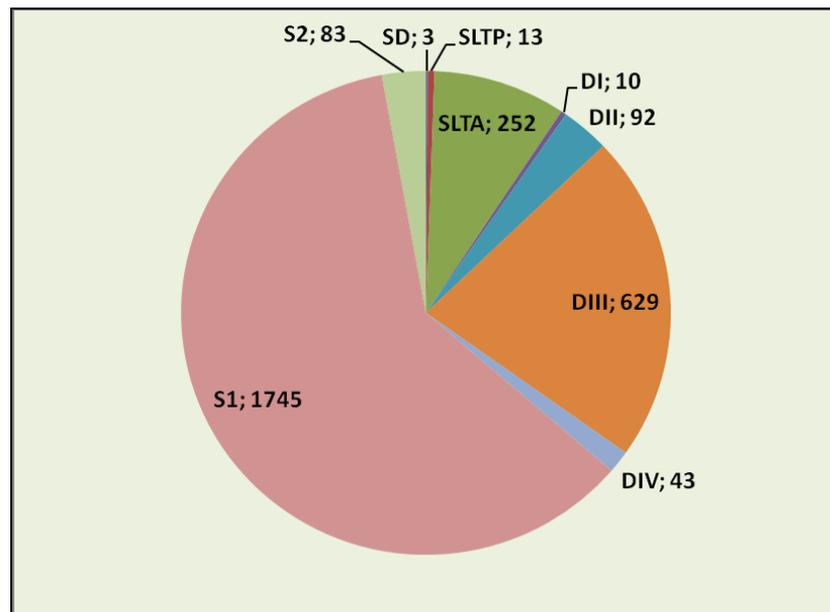
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.28 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.29 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.30 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Bangka Barat dengan masa perjanjian kontrak dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025, berjumlah 27 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Berdasarkan penempatannya 27 pegawai tersebut terdiri dari 16 pegawai ditempatkan di 15 SD Negeri di Kabupaten Bangka Barat, dan 11 pegawai ditempatkan sebagai penyuluh pertanian di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat.

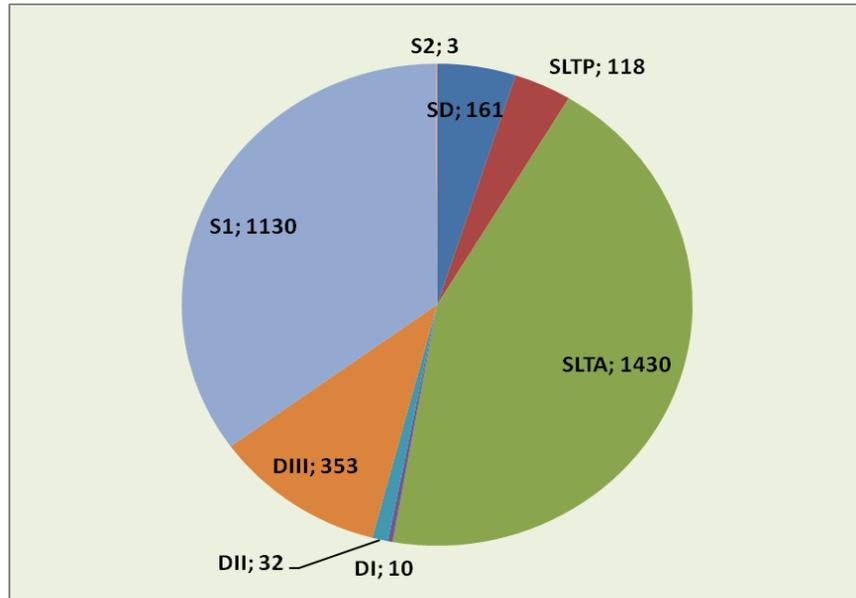
Tabel 2.18 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN	JABATAN	PENEMPATAN
1	2 Orang	S-1 Pendidikan Agama Islam	Guru Pendidikan Agama Islam	SD Negeri
2	14 Orang	S-1 PGSD	Guru Kelas SD	SD Negeri
3	1 Orang	Dokter Hewan	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Dinas Pertanian dan Pangan
4	3 Orang	S-1 Budidaya Pertanian	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Dinas Pertanian dan Pangan
5	2 Orang	S-1 Sosial Ekonomi Pertanian	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Dinas Pertanian dan Pangan
6	1 Orang	S-1 Agronomi	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Dinas Pertanian dan Pangan
7	1 Orang	D-III Kesehatan Hewan	Penyuluh Pertanian Pelaksana	Dinas Pertanian dan Pangan
8	1 Orang	SMT Pertanian	Penyuluh Pertanian Pemula	Dinas Pertanian dan Pangan

No.	JUMLAH PEGAWAI	PENDIDIKAN	JABATAN	PENEMPATAN
9	1 Orang	SMK Budidaya Pertanian	Penyuluh Pertanian Pemula	Dinas Pertanian dan Pangan
10	1 Orang	SMK Budidaya Tanaman	Penyuluh Pertanian Pemula	Dinas Pertanian dan Pangan

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

Selanjutnya, Pegawai Harian Lepas Kabupaten Bangka Barat berjumlah 3.237 orang terdiri dari 1.497 orang laki-laki dan 1.740 orang perempuan.

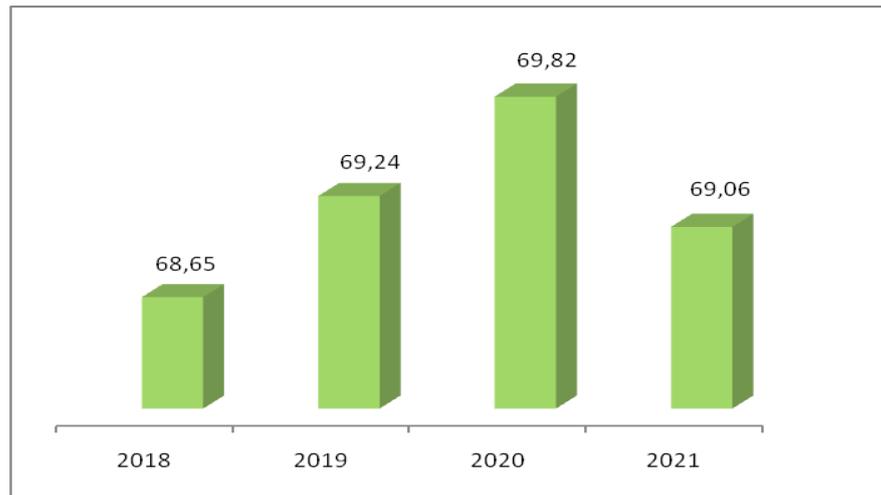


Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2022

Gambar 2.31 Jumlah Pegawai Harian lepas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Periode April Tahun 2022

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Sumber : BP4D Kab. Bangka Barat, 2022 (diolah).

Gambar 2.32 Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021

Tabel 2.19 Hasil Evaluasi SAKIP Berdasarkan Komponen Penilaian
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2021

KOMPONEN	BOBOT	2020	2021	KET
Perencanaan Kinerja	30	23,55	23,42	↓
Pengukuran Kinerja	25	16,07	15,85	↓
Pelaporan Kinerja	15	11,20	11,12	↓
Evaluasi Internal	10	7,12	6,78	↓
Capaian Kinerja	20	11,88	11,89	↑
Nilai Hasil Evaluasi	100	69,82	69,06	↓

Sumber: Kementerian PAN RB, 2022.

Penilaian terhadap implementasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilihat dari 5 (lima) aspek yaitu dari sisi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Dari kelima aspek tersebut, aspek dengan bobot penilaian terbesar adalah pada perencanaan kinerja yaitu 23,42 persen, yang selanjutnya pengukuran 15,85 persen, capaian kinerja masing-masing 11,89 persen, pelaporan kinerja dengan bobot 11,12 persen dan evaluasi internal sebesar 6,78 persen.

Pada penilaian SAKIP Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 masih pada predikat “B” (Baik) dengan nilai 69,06. Jika dilihat dari hasil tersebut, maka terjadi penurunan jika dibandingkan dengan hasil penilaian SAKIP tahun 2020 dengan nilai 69,82. Perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.

c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018-2019 Kabupaten Bangka Barat mendapat penilaian yaitu Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akhirnya dapat diraih untuk penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang materil, posisi keuangan dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan akuitas telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

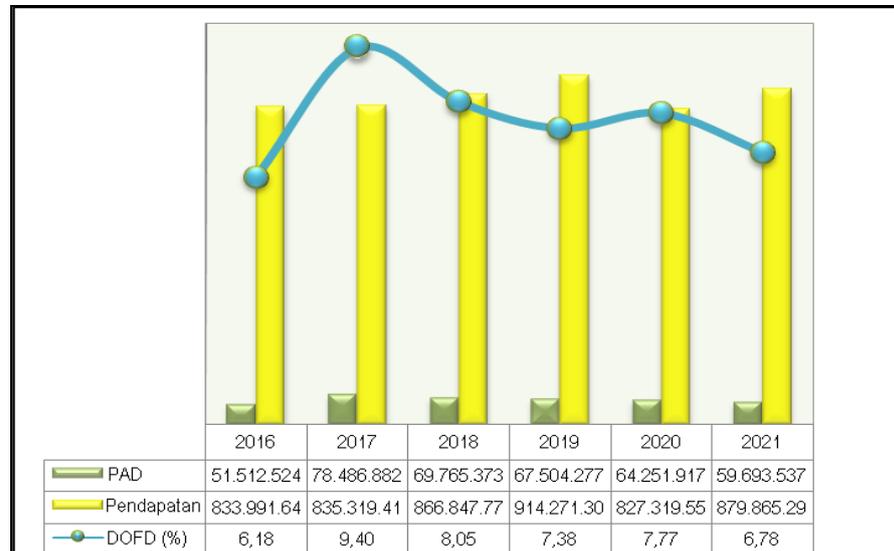
Kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat melalui komposisi pendapatan daerah dalam APBD. Seperti halnya sebagian besar daerah lain di Indonesia, komposisi pendapatan daerah di dalam APBD Kabupaten Bangka Barat masih didominasi oleh dana transfer dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat terbatas untuk membiayai program-program pembangunan khususnya yang bersifat inisiatif daerah.

Sejalan dengan permasalahan di atas, Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Bangka Barat dapat dikategorikan masih tergolong sangat kurang atau rendah dengan rata-rata 7,88 persen (2017-2021). DOFD merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan. DOFD Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan sebesar 0,99 persen yaitu dari 7,77 persen di tahun 2020 menjadi 6,78 persen di tahun 2021. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Adanya perubahan aturan tentang perubahan tarif PPJ dan aturan pembebasan BPHTB bagi program PTSL;
2. Potensi PAD Kabupaten Bangka Barat belum terkelola dengan optimal;
3. Metode yang digunakan *self Assessment* sehingga wajib pajak yang menyetor pajak sering tidak sesuai dengan potensi pajak yang sebenarnya;
4. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah;
5. SDM yang masih terbatas baik jumlah personil maupun keahlian dan pemahaman;
6. Data potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang teradministrasi masih belum sesuai dengan kondisi riilnya;
7. Tidak adanya PPNS Khusus yang menangani Pajak yang bisa menilai dan

mengawasi sanksi terhadap penunggak pajak;

8. Wajib Pajak sarang burung wallet sulit ditemui karena banyak pemilik berdomisili diluar Bangka Barat.



Sumber : BPPRD dan BPKAD Kab. Bangka Barat, 2022 (diolah)

Gambar 2.33 Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Salah satu pos PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Tabel 2.20 Jumlah Wajib Pajak Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

NO.	WAJIB PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pajak Hotel	13	15	15	16	14
2	Pajak Restoran	479	881	991	1.089	1.130
3	Pajak Hiburan	13	16	19	19	21



NO.	WAJIB PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Pajak Reklame	345	425	480	512	524
5	Pajak Penerangan Jalan	3	3	3	3	1
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan	33	139	251	270	300
7	Pajak Parkir	4	5	6	6	6
8	Pajak Air Tanah	83	92	93	94	98
9	Pajak Sarang Burung Walet	106	111	111	111	103
10	Pajak Bumi dan Bangunan	32.455	39.310	42.540	45.274	53.099
11	BPHTB	175	331	332	223	348
JUMLAH WAJIB PAJAK		33.709	41.328	44.841	47.617	55.644

Jumlah PAD di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami penurunan setiap tahunnya, PAD Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2017 mencapai hingga Rp78.486.881.529,- dan sampai dengan Tahun 2021 menurun hingga sebesar Rp59.693.536.555,86,-. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bangka Barat oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah :

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak sehingga potensi pajak dapat tergali secara maksimal;
2. Melakukan sosialisasi berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran, kepatuhan, ketaatan, kejujuran dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak;
3. Membentuk PPNS dan Juru Sita Pajak;
4. Menyusun database potensi pajak;
5. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti pihak Kejaksaan sebagai pengacara negara dalam melakukan penagihan pajak dan piutang pajak;
6. Membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat memaksa pada wajib pajak, seperti dalam pengurusan izin harus melunasi pajak terutang terlebih dahulu;
7. Menerapkan standarisasi administrasi pajak berbasis aplikasi online.

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bangka Barat melalui penyertaan modal pemerintah daerah kedalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terdapat 2 (dua) BUMD yang menerima penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu PDAM Tirta Sejiran Setason dan PD Bangka Barat Sejahtera. Berikut rincian jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.21 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada BUMD

No	Nama BUMD	TAHUN	Penyertaan Modal (Rp)
1	PDAM Tirta Sejiran Setason	2013	2.500.000.000,00
		2014	2.500.000.000,00
		2015	2.000.000.000,00
		2016	1.500.000.000,00
		2017	1.500.000.000,00
		Jumlah	
2	PD "Bangka Barat Sejahtera"	2009	1.000.000.000,00
		2011	1.000.000.000,00
		2012	2.000.000.000,00
		2013	1.000.000.000,00
		Jumlah	

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

d. Produk Hukum Daerah

Secara umum produk hukum yang ditetapkan pada tahun 2011-2021 berfluktuasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.22 Daftar Penerbitan Peraturan/Kebijakan/Regulasi Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2021

No.	Tahun	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati
1.	2011	17	66	575
2.	2012	26	39	681
3.	2013	17	56	946
4.	2014	14	46	1.059
5.	2015	14	64	968
6.	2016	12	93	834
7.	2017	12	104	825
8.	2018	15	110	860
9.	2019	13	89	863
10.	2020	13	80	791
11.	2021	8	123	590

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

Dalam rangka menyebarluaskan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2014 telah dibangun Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Kabupaten Bangka Barat. Pembangunan JDIIH Kabupaten Bangka Barat bertujuan untuk dapat menyebarluaskan dan memberikan informasi hukum kepada masyarakat maupun penyelenggara pemerintah ataupun pihak swasta secara cepat dan tepat.

e. Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik

Tugas utama dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana layanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat sesuai prosedur yang ditetapkan, maka dilakukan survei kepuasan masyarakat di unit-unit pelayanan masyarakat.

Pada tahun 2021, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) telah dilakukan di unit-unit pelayanan yaitu sebanyak 22 unit pelayanan dengan rata-rata SKM sebesar sebesar 82,07 yaitu masuk dalam kategori B (Baik).

Dari kuisioner yang telah disampaikan ke Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi, setelah dilakukan evaluasi terdapat 2 (dua) unit pelayanan yang belum menggunakan pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 2.23 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2021

No.	Unit Pelayanan	SKM 2019	SKM 2020	SKM 2021	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	76.12	77.37	84.47	Meningkat
2	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan	85	-	82.16	-
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81.3	81.41	63.17	Menurun
4	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	81.84	82.1	77.53	Menurun
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P3A	81.03	86.62	88.49	Meningkat
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	88.29	87.41	86.92	Menurun
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	85.95	82.1	84.85	Meningkat
8	RSUD Sejiran Setason	74.81	76.82	82.73	Meningkat
9	Kecamatan Muntok	81.86	81.9	81.92	Meningkat
10	Kecamatan Simpangteritip	84.78	85.48	89.39	Meningkat
11	Kecamatan Kelapa	80.72	80.75	80.8	Meningkat
12	Kecamatan Jebus	81.49	81.49	81.34	Menurun
13	Kecamatan Parittiga	82.75	80.05	82.25	Meningkat
14	Kecamatan Tempilang	88.7	-	86.37	-



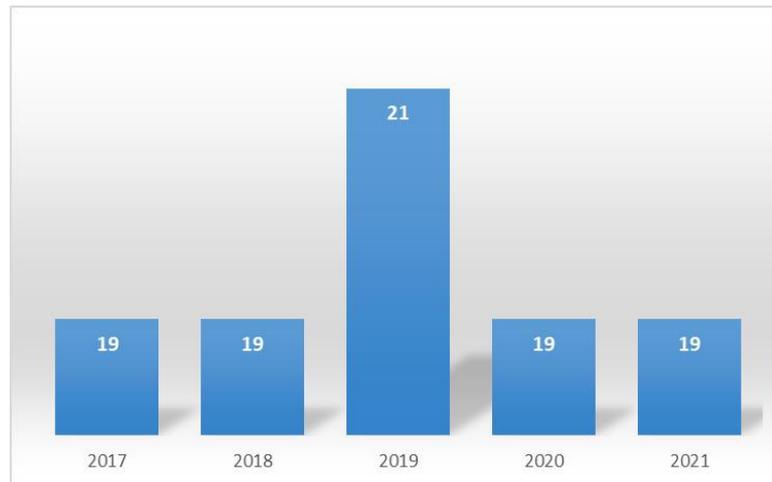
No.	Unit Pelayanan	SKM 2019	SKM 2020	SKM 2021	Keterangan
15	Puskesmas Muntok	78.75	78.42	84.29	Meningkat
16	Puskesmas Simpangteritip	74.4	79.9	79.97	Meningkat
17	Puskesmas Kelapa	81.9	82.12	82.4	Menurun
18	Puskesmas Sekarbiru	81.76	81.87	82.23	Meningkat
19	Puskesmas Puput	77.96	74.89	82.26	Menurun
20	Puskesmas Tempilang	80.16	80.49	81.04	Meningkat
21	Puskesmas Jebus	77.34	83.25	83.87	Meningkat
22	Puskesmas Kundi	67.36	75.07	77.08	Meningkat
PEMKAB. BANGKA BARAT		80.28	80.98	82.07	Meningkat

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

f. Pengawasan Internal

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pelaksanaan pengawasan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Baiknya kualitas pengawasan di daerah maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja daerah. Kualitas pengawasan internal daerah dapat dilihat dari tingkat maturasi SPIP dan level *Internal Audit Capability Model* (IACM). Berdasarkan hasil laporan Inspektorat Provinsi kepulauan Bangka Belitung, tingkat maturasi SPIP Pemerintah Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2018 adalah 2,68 yaitu dengan kriteria berkembang. Sementara tingkat kapabilitas pengawasan internal yang dilihat dari IACM, di Tahun 2018 berada pada level 2 plus (dengan catatan) atau masih dalam level *Infrastructure*. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 dengan nilai 3,28 pada level 3 (*integrated*) tingkat maturasi mengalami penurunan. Elemen yang digunakan dalam penentuan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) antara lain peran dan layanan pengawasan internal, pengelolaan SDM, praktik profesional, manajemen dan akuntabilitas kinerja, hubungan dan budaya organisasi, serta struktur tata kelola.

Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berperan menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kuantitas dan kompetensi auditor mempengaruhi hasil audit yang dilakukan di daerah. Hal ini dikarenakan titik berat pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.



Sumber : Inspektorat Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.34 Jumlah Auditor Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021

Auditor mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern pada instansi pemerintah dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan-temuan pemeriksaan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Manfaat pengawasan internal melalui pemeriksaan auditor tidak hanya berupa banyaknya temuan yang dilaporkan, namun juga berupa efektivitas tindak lanjut oleh pihak yang di audit. Pengawasan internal akan menjadi sia-sia tanpa tindakan perbaikan dalam penyelesaian tindak lanjut sehingga tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan kinerja bagi organisasi.

Pada Tahun 2021, terdapat 192 jumlah temuan audit yang disampaikan oleh APIP Kabupaten Bangka Barat, namun jumlah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 138 hasil audit atau 71,88 persen. Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh internal auditor salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh pihak yang di audit. Jumlah temuan audit dan jumlah yang selesai ditindaklanjuti selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Inspektorat Kab. Bangka Barat, 2022

Gambar 2.35 Jumlah Temuan dan Jumlah Temuan yang Selesai Ditindaklanjuti Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah, Rasio Guru/ Murid dan Angka Melanjutkan Sekolah.

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan tertentu per jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk mengakomodir seluruh penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.24 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SEKOLAH DASAR / MI							
Usia 7 - 12 tahun	Jiwa	22.740	21.653	22.850	26.129	26.338	23.014
Jumlah Sekolah	sekolah	138	138	138	139	139	139
Rasio		1 : 165	1 : 157	1 : 166	1 : 188	1 : 189	1 : 166



Jenjang Pendidikan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ Mts							
Usia 13 - 15 tahun	Jiwa	9.374	7.011	9.329	9.215	9.215	7.995
Jumlah Sekolah	sekolah	45	46	46	46	46	46
Rasio		1 : 208	1 : 152	1 : 203	1 : 200	1 : 200	1 : 174

Sumber data : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2021, diolah.

Untuk ketersediaan sekolah SD, pada tahun 2021 secara rata-rata satu sekolah dasar dapat menampung 166 murid, dimana nilai ini menurun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 yaitu satu sekolah dasar dapat menampung 189 murid. Untuk ketersediaan sekolah menengah pertama pada tahun 2021 satu sekolah dapat menampung 174 murid.

Solusi dari permasalahan ketersediaan sekolah terhadap perkembangan jumlah penduduk usia sekolah adalah dengan melakukan strategi penambahan ruang kelas di setiap jenjang pendidikan khususnya pada sekolah-sekolah negeri.

b. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar yang juga menunjukkan kondisi ideal proporsi guru dan murid untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

Tabel 2.25 Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Jenjang Pendidikan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SEKOLAH DASAR / MI							
Guru	orang	1.422	1.286	1.314	1.405	1.530	1.411
Jumlah Siswa	orang	24.606	24.934	25.798	26.129	25.762	25.356
Rasio	Rasio	1 : 17	1 : 19	1 : 20	1 : 19	1 : 17	1 : 18
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ Mts							
Guru	orang	591	565	592	620	678	647
Jumlah Siswa	orang	9.565	9.748	9.329	9.215	9.656	10.132
Rasio	Rasio	1 : 16	1 : 17	1 : 16	1 : 15	1 : 14	1:16

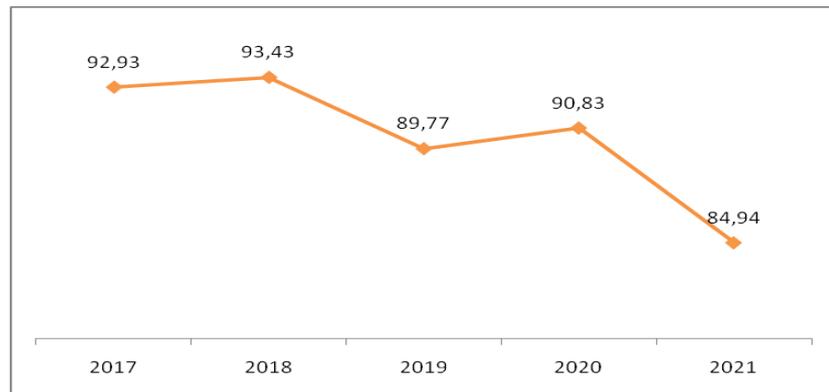
Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2022

Data pada tabel diatas menunjukkan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD di tahun 2021 menunjukkan bahwa 1 guru dapat mengajar 18 siswa sedangkan rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP menunjukkan bahwa 1 guru dapat mengajar 16 siswa.

c. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah digunakan untuk melihat seberapa besar antusias dan keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan sekolah merupakan salah satu penentu dalam kualitas pendidikan yang dihubungkan dengan tingkat partisipasi sekolah.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020.



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.36 Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021 (Persentase)

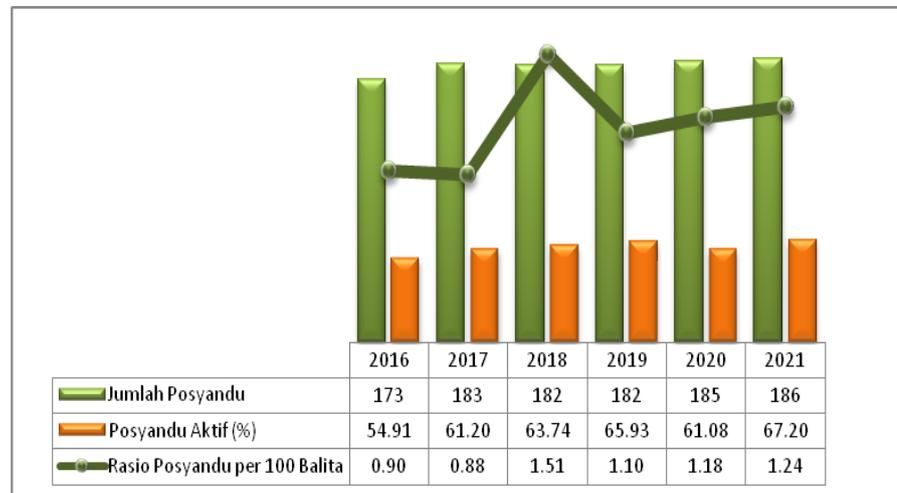
2. Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bangka Barat terbilang cukup memadai, dan telah tersebar sampai tingkat Dusun/Desa. Untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan maupun jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.

a. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana pelayanan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sarana kesehatan yang mencakup rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan posyandu merupakan sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit bagi

masyarakat. Semakin tinggi ketersediaan sarana kesehatan akan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dengan catatan adanya dukungan akses pelayanan kesehatan yang baik.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.37 Jumlah Posyandu, Persentase Posyandu Aktif dan Rasio Posyandu per 100 Balita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa rasio posyandu per 100 balita di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif namun cenderung meningkat.

Untuk sarana kesehatan, di tahun 2021 jumlah rumah sakit di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3 unit yaitu RSUD Sejiran Setason, RSBT Muntok, dan RS Gunung Manik. Jumlah puskesmas sebanyak 8 unit dengan rincian 6 puskesmas perawatan dan 2 puskesmas non perawatan yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Sementara jumlah puskesmas keliling sebanyak 7 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 19 unit.

Khusus puskesmas, berdasarkan jumlah ketersediaan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 1 : 25.751, sementara rasio ideal ketersediaan puskesmas adalah 1 : 16.000. Untuk puskesmas pembantu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebesar 1 : 10.842 dengan rasio ideal adalah 1 : 1.500. Jika dilihat dari jumlah dan rasio tersebut, maka sarana kesehatan di Kabupaten Bangka Barat masih belum memadai, mengingat puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.26 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA				
		PEMDA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rumah Sakit					
1.	Rumah Sakit Umum	1			2	3
2.	Rumah Sakit Khusus					
II.	Puskesmas dan Jaringannya					
1.	Puskesmas Rawat Inap	6				6
	- Jumlah Tempat Tidur	118				101
2.	Puskesmas Non Rawat Inap	2				2
3.	Puskesmas Keliling	7				7
4.	Puskesmas Pembantu	19				19
III.	Sarana Pelayanan Lain					
1.	Rumah Bersalin/Praktik Mandiri Bidan				26	26
2.	Klinik Pratama		1		7	8
3.	Klinik Utama				4	4
4.	Balai Pengobatan					
5.	Praktik Dokter Bersama				2	2
6.	Praktik Dokter Umum Perorangan				30	30
7.	Praktik Dokter Gigi Perorangan					
8.	Praktik Dokter Spesialis Perorangan				3	3
9.	Praktik Pengobatan Tradisional					
10.	Bank Darah Rumah Sakit					
11.	Unit Transfusi Darah	1				1
IV.	Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian					
1.	Industri Farmasi					
2.	Industri Obat Tradisional					
3.	Usaha Mikro Obat Tradisional					
4.	Produksi Alat Kesehatan					
5.	Pedagang Besar Farmasi					
6.	Apotek				18	18
7.	Apotek PRB				1	1
8.	Toko Obat				1	1
9.	Toko Alkes					

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2022.

b. Tenaga Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Selain sarana maupun fasilitas kesehatan, terdapat variabel kesehatan lainnya, seperti tenaga kesehatan. Dengan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang optimal, maka

pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Rasio tenaga kesehatan merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan di suatu daerah untuk mencapai target pembangunan tertentu. Menurut WHO, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) memberikan kontribusi hingga 80 persen dalam keberhasilan pembangunan kesehatan.

Tabel 2.27 Rasio Tenaga Kesehatan dan Indikator Kesehatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 4.485	1 : 3.071	1 : 2.568	1 : 2.573	1 : 2.467	1 : 2.341
2.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 3.684	1 : 2.627	1 : 2.293	1 : 2.226	1 : 2.195	1 : 2.060
3.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	98,30	112,33	76,54	86,71	72,51	118,39
4.	Cakupan Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2022.

Berdasarkan WHO kondisi ideal dokter dalam memberikan pelayanan adalah 1 : 2.500 penduduk, sementara pada tahun 2021 Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Bangka Barat sudah mencapai 1 : 2.341. Sedangkan untuk indikator Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk mencapai 1 : 2.060, dalam arti terjadi peningkatan kecukupan tenaga medis bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 1 : 3.684.

Berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, beberapa capaian indikator kesehatan yang berkaitan antara lain cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 mencapai 118,39 persen dan Cakupan Desa UCI (*Universal Child Immunization*) dalam kurun waktu tahun 2016-2021 mencapai 100 persen.

c. Jaminan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan perluasan cakupan dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pencapaian UHC (*Universal Health Coverage*) dengan harapan masyarakat dapat semakin mudah menjangkau pelayanan kesehatan seutuhnya. Capaian UHC di Tahun 2021 telah mencapai 97,89 persen, dari jumlah penduduk sebanyak 206.246 jiwa.

Tabel 2.28 Cakupan Jaminan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	Persen
A. PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	35.986	17,47
2	PBI APBD	79.867	38,77
SUB JUMLAH PBI		115.853	56,24
B. NON PBI			
1.	Pekerja Penerima Upah (PPU)	35.334	17,15
2.	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/ Mandiri	48.141	23,37
3.	Bukan Pekerja (BP)	2.337	1,13
SUB JUMLAH NON PBI		85.812	41,66
JUMLAH		201.665	97,89

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2022.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Pekerjaan Umum

Indikator pekerjaan umum di Kabupaten Bangka Barat dilihat dari beberapa kondisi terkait urusan pekerjaan umum, yaitu jaringan jalan, jaringan irigasi, dan rasio tempat ibadah.

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan dapat digambarkan melalui kondisi jalan yang dikategorikan menjadi beberapa kondisi, yaitu baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kondisi jalan dikategorikan baik, apabila permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6 persen), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan.

Kondisi jaringan jalan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Kondisi jaringan jalan berkaitan dengan konektivitas suatu daerah dengan daerah lain di sekitarnya mengingat jalur perhubungan utama masih dipegang oleh perhubungan darat. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir panjang jalan Kabupaten Bangka Barat secara umum tidak mengalami perubahan. Sementara proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017-2021 kondisinya

berfluktuasi. Pada Tahun 2021 jalan dengan kondisi baik sebesar 76,04 persen dan kondisi sedang sebesar 5,56 persen. Jalan dengan kondisi rusak berat pada tahun 2019-2020 tidak ada yang menandakan bahwa kondisi jalan yang rusak parah segera diperbaiki. Kondisi jalan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2017-2021 terlihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.29 Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021

Kondisi Jalan	2017		2018		2019		2020		2021	
	KM	%								
a. Baik / <i>Good</i>	543,18	77,50	551,69	78,71	347,174	49,53	457,23	65,23	532,99	76,04
b. Sengah / <i>Moderate</i>	35,3	5,04	33,33	4,76	179,671	25,63	106,65	15,22	38,96	5,56
c. Rusak / <i>Damage</i>	59,67	8,51	60,19	8,59	174,076	24,84	137,04	19,55	125,53	17,91
d. Rusak Berat	62,76	8,95	55,70	7,95	0,00	-	0,00	-	3,44	0,49
Jumlah	700,92	100								

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat, 2022.

Walaupun cakupan jalan dengan kriteria baik di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan, upaya yang kuat untuk penambahan jumlah jaringan jalan baru harus terus dilakukan karena terkait dengan sasaran strategis daerah yaitu “ Indeks Konektivitas Kabupaten”.

b. Jaringan Irigasi

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat kabupaten diutamakan guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya dan merupakan faktor penting sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian. Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Pembukaan lahan sawah terus dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan untuk mendukung perkembangan persawahan tersebut telah dibangun irigasi sekunder di beberapa lokasi persawahan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel 2.30 Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Teknis
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2019

No.	Kecamatan	Luas Areal Pertanian (Ha)	Luas Irigasi Sekunder (Ha)		
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Muntok	64	-	-	-
2.	Simpangteritip	579	-	65,00	130
3.	Kelapa	1.228	220	454,00	562
4.	Jebus	366	104	130,00	296
5.	Parittiga	-	-	-	-
6.	Tempilang	305	265	305,00	305
Total		2.542	589	954	1.293
Persentase			23,39	37,89	51,35

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat, 2021.

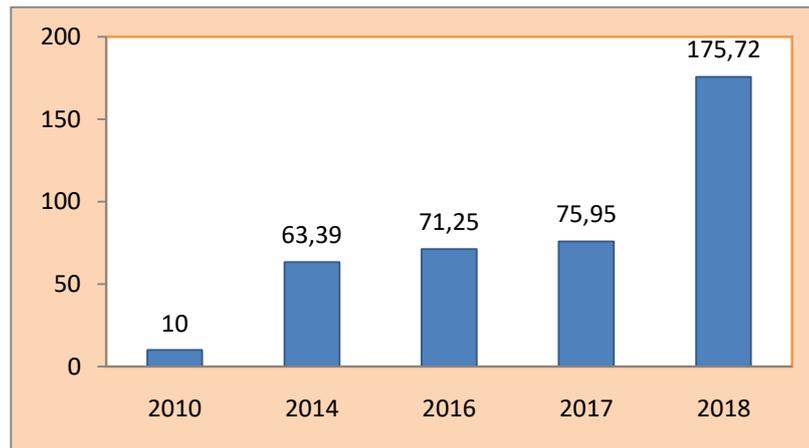
Irigasi teknis yang dimaksud adalah saluran sekunder baik permanen maupun non permanen yang secara fungsional sudah siap di koneksikan dengan saluran tersier. Sampai dengan Tahun 2019, dari 2.542 ha areal pertanian, yang telah beririgasi teknis adalah seluas 1.293 ha (51,35 persen). Pada Tahun 2020 tidak ada penambahan luasan irigasi dikarenakan tidak ada kegiatan pembangunan irigasi. Sampai saat ini irigasi yang ada belum dapat digunakan sesuai fungsinya dikarenakan belum memiliki sistem jaringan pengairan tersier dan kwarter yang baik dan optimal.

3.2 Penataan Ruang

Kondisi Kabupaten Bangka Barat terkait urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain adalah sebagai berikut

a. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang pada umumnya diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi. RTH ini dimaksudkan untuk mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung seperti fungsi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan suatu wilayah. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Perkembangan RTH di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat, 2021.

Gambar 2.38 Perkembangan Luasan RTH Publik (Ha) di Kabupaten Bangka Barat

Perkembangan luasan RTH terlihat bahwa total Luas RTH publik di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2018 sebesar 175,72 ha. Luasan tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total luasan kawasan areal perkotaan di Kabupaten Bangka Barat yaitu 9.331 ha atau hanya 1,88 persen dari total wilayah perkotaan Kabupaten Bangka Barat, sehingga kedepannya diharapkan terjadi perkembangan luasan RTH, tidak hanya di Kecamatan Muntok namun juga di kecamatan lainnya. Luasan RTH publik di Kabupaten Bangka Barat secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Luasan RTH Publik di Kabupaten Bangka Barat

Wilayah	Luasan Kawasan Perkotaan (ha)	Luasan RTH (ha)	%
Kec. Muntok	4.345	175,72	4,04
Kec. Simpangteritip	978	0	0
Kec. Tempilang	959	0	0
Kec. Kelapa	1.067	0	0
Kec. Jebus	1.067	0	0
Kec. Parittiga	915	0	0
Kab. Bangka Barat	9.331	175,72	1.88

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, 2021.

Sebagaimana tabel diatas terlihat bahwa penambahan luas RTH di Kabupaten Bangka Barat selama kurun waktu delapan tahun berfluktuatif. Total Luas RTH publik di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2018 sebesar 175 ha atau 9,38 persen dari total RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan yaitu 1.866,12 ha. Dengan demikian kedepannya diharapkan terjadi perkembangan luasan RTH di

Kabupaten Bangka Barat. Perkembangan RTH diharapkan tidak hanya di Kecamatan Muntok namun juga kecamatan lainnya.

b. Persentase Bangunan Ber-IMB

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB diperlukan sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan agar bangunan memenuhi standar persyaratan teknis.

Salah satu komponen pengendalian ruang oleh pemerintah daerah adalah dengan mekanisme penerbitan IMB. Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Bangka Barat yang akan mendirikan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung harus sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Tabel 2.32 Persentase Bangunan ber-IMB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB pada tahun n	263	230	257	270	99
2.	Jumlah Bangunan ber-IMB sampai dengan tahun n	1.993	2.223	2.480	2.750	2.849
3.	Jumlah Bangunan	44.752	44.752	46.862	46.862	46.862
4.	Persentase bangunan ber-IMB	4,45	4,97	5,29	5,87	6,08

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangka Barat, 2022.

Persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan terus mengalami peningkatan. Dalam meningkatkan persentase bangunan yang ber-IMB, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang yang didorong oleh rendahnya efektivitas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

c. Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Sebagai acuan dalam pembangunan terkait penataan ruang, maka keberadaan dokumen RTRW sangatlah penting, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014. Dalam penetapan pola ruang pada RTRW Kepulauan Bangka Belitung, baik pada

naskah rencana maupun pada gambar peta pola ruang, dapat dikemukakan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Bangka Barat, seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.33 Pola Ruang dalam RTRWP Kepulauan Bangka Belitung yang Terletak di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kawasan Lindung	Lokasi Kecamatan
1.	Kawasan Hutan Lindung	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
2.	Kawasan Bergambut	Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jabus
3.	Kawasan Hutan Bakau	Kelapa, Jebus, Tempilang, Simpangteritip
4.	Sempadan Pantai	Kelapa, Parittiga, Simpangteritip.
5.	Sempadan Sungai	Tersebar
6.	Sempadan Kolong	Muntok, Jebus, Tempilang
7.	Suaka Alam/Cagar Alam	Muntok, Simpangteritip, Kelapa.
8.	Cagar Budaya	Muntok.
9.	Taman Hutan Raya	-
10.	Rawan Banjir	Muntok, Parittiga, Jebus,
11.	Rawan Abrasi Pantai	Parittiga, Tempilang, dan Simpangteritip
Kawasan Budidaya		Lokasi Kecamatan
1.	Produksi	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
2.	Perkebunan	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
3.	Permukiman	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
4.	Pertanian (Sawah)	Simpangteritip, Jebus, Kelapa, Muntok

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan pada tahun 2020. Berdasarkan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034 tersebut diperoleh skor 90,27 sehingga direkomendasikan bahwa RTRW Kabupaten Bangka Barat tidak perlu dilakukan revisi meskipun belum seluruh pola ruang Kabupaten Bangka Barat terealisasi sesuai rencana. Hal ini disebabkan karena sebagian besar realisasi perencanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Barat masih belum terbangun.

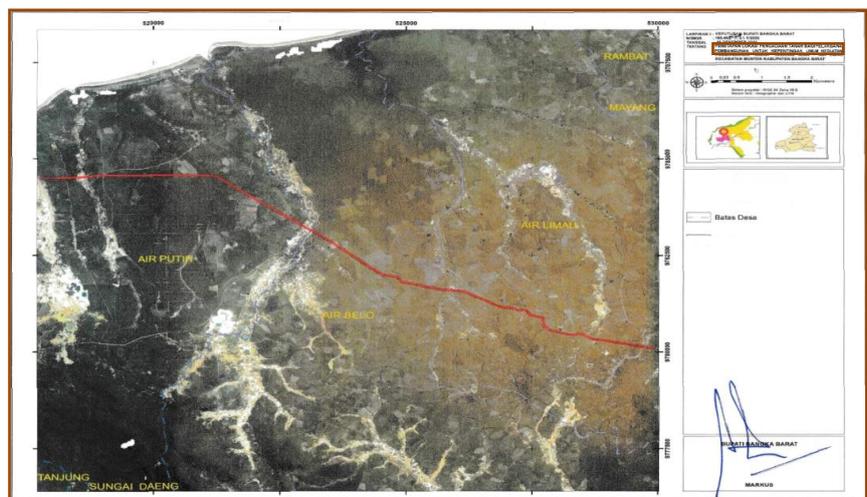
Kendala yang dihadapi pada urusan tata ruang diantaranya disebabkan oleh minimnya produk rencana rinci yang harus ditetapkan berdasarkan amanat dari Perda RTRW, sehingga alat untuk pengendalian ruang belum ada. Hal ini karena belum adanya peta yang tersedia di Badan Informasi Geografi (BIG) sesuai dengan persyaratan dalam penyusunan rinci akibat keterbatasan anggaran dan peralatan pendukung. Hingga tahun 2020 produk-produk terkait dengan perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34 Produk Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Bangka Barat

No.	Jenis Kebijakan	Tahun
1.	Perda RTRW Tahun 2014-2034	2014
2.	Perbup RTBL Cluster Eropa	2016
3.	Perbup RTBL Cluster Melayu	2017
4.	Penetapan Lokasi Pelabuhan Sesuai dengan Tata Ruang	2019
5.	Usulan Perubahan Kawasan Hutan	2019
6.	Peraturan Bupati Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Kesuaian Pemanfaatan Ruang	2020
7.	SOP Surat Keterangan Ruang	2020
8.	Keputusan Bupati Terkait Peninjauan Kembali RTRW	2020
9.	Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau	2020
10.	Perubahan Perbup Masterplan Perkantoran Pemkab. Bangka Barat	2021

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat, 2022.

Adapun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat sebanyak tiga kebijakan yakni RTBL Klaster Eropa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Eropa Kota Muntok, RTBL Klaster Melayu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Melayu Muntok Lama, serta Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau pada Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/503.A/1.3.1.1/2020 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kegiatan pembangunan jalan Tanjung Ular-Air Limau Kecamatan Muntok.



Gambar 2.39 Peta Pengadaan Tanah Untuk Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau

Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau menjadi hal yang penting mengingat Kawasan Tanjung Ular menjadi Kawasan Strategi Provinsi sebagai Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT). Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat menetapkan rencana struktur jaringan transportasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan pemerataan pelayanan transportasi dan perkembangan wilayah Kabupaten Bangka Barat.



Gambar 2.40 Kondisi Pantai Tanjung Ular

Selain berperan sebagai jalan pembuka ke Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bangka Barat dipandang penting juga oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kabupaten yang strategis secara ekonomi sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat didalam RTRW telah menetapkan sistem transportasi darat melalui jaringan jalan khusus Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu, yaitu Ruas jalan Muntok-Air Putih Tanjung Ular-Air Limau sejauh 13,8 km untuk menunjang kawasan tersebut.

Kabupaten Bangka Barat akan menjadi daerah maju diberbagai bidang terutama industri, industri hilir, perdagangan, perekonomian, perhubungan transportasi darat dan laut ke depan dengan adanya kawasan KIPT Tanjung Ular. Diharapkan adanya Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular dapat menjadi hal positif untuk menarik investor berbagai bidang untuk segera membangun atau menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian, perekonomian di Bangka Barat dapat bangkit dan *multiflier effect* dari keberadaan kawasan tersebut dapat dirasakan berbagai pihak.

d. Akses air minum dan sanitasi layak



Sumber : Disperkimhub Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.41 Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021

Cakupan penduduk dengan akses air minum berkualitas (layak) mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 89,46 persen menjadi 92,79 persen di tahun 2021. Sementara persentase penduduk bersanitasi layak dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap jamban sehat sebagai sanitasi dasar. Perkembangan jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi layak terlihat pada gambar diatas, dimana pada tahun 2021 penduduk yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 54,99 persen.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah adalah meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan, Kabupaten Bangka Barat berupaya melalui penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/220B/DISPERKIMHUB/2021 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021, korban bencana yang dibantu pada Tahun 2021 berjumlah 2 (dua) rumah di Desa Pangek, Kecamatan Simpangteritip dan Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang. Bantuan rehabilitasi rumah korban bencana juga diberikan sebanyak 2 (dua) unit di tahun 2020 dan 5 (lima) unit di tahun 2019.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Kawasan Permukiman indikator kinerja lain yang harus dicapai adalah berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan. Pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Bangka Barat dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/310.A/4.3.1.1/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Barat, luasan kawasan kumuh Kabupaten Bangka Barat sebesar 70,42 Ha yang tersebar di beberapa lokasi. Sampai dengan tahun 2021, belum ada perubahan terhadap luasan kumuh tersebut. Jika dibandingkan dengan total luasan kawasan perkotaan di Kabupaten Bangka Barat sebesar 285.100,90 Ha, maka luasan kawasan kumuh sebesar 0,025 persen.

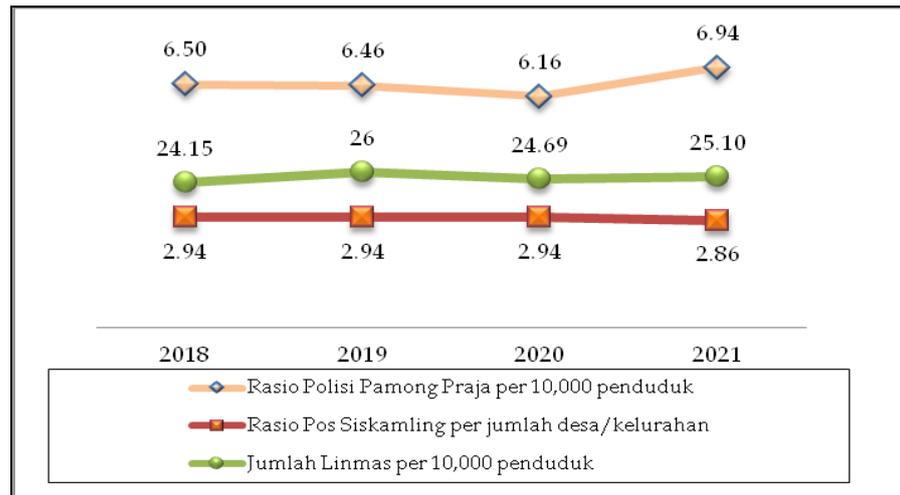
Tabel 2.35 Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Nama Lokasi/Kawasan	Luas (ha)	Klaster Penanganan
1.	Muntok	Tanjung	2,17	Muntok seluas 4,61 ha
2.	Muntok	Teluk Rubiah	2,44	
3.	Tempilang	Air Lintang	10	Tempilang seluas 28,84 ha
4.	Tempilang	Benteng Kota	18,84	
5.	Parittiga	Puput	32,06	Parittiga seluas 36,97 ha
6.	Jebus	Kp. Palembang	4,91	
Total			70,42	

Sumber : Disperkimhub Kab. Bangka Barat, 2022.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Indikator terkait pencapaian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah dari ketersediaan dan kesesuaian tugas pokok serta kewenangan satuan polisi pamong praja (Satpol PP), satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) dan Pos Siskamling.



Sumber : Satpol PP dan PB Kab. Bangka Barat, 2022.

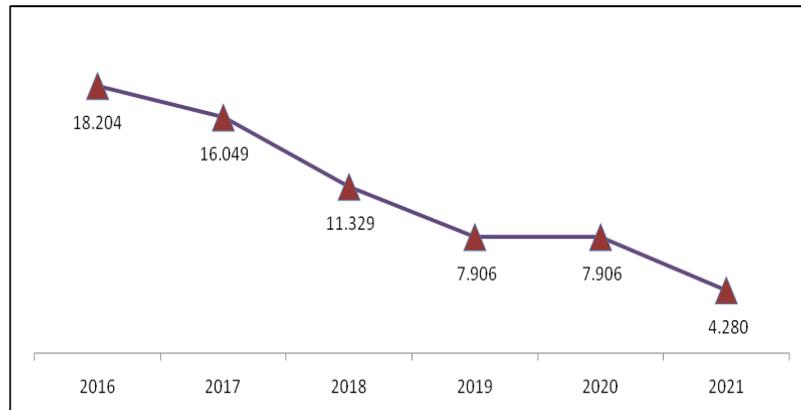
Gambar 2.42 Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2021

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan pada rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk dan penurunan pada jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Untuk membangun kesatuan keamanan masyarakat yang baik, tentu jumlah ini perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal untuk jumlah Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja adalah sebanyak 251 sampai dengan 350 PNS dengan perhitungan berdasarkan kriteria umum yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut. Sampai dengan Tahun 2021, jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Bangka Barat berjumlah 143 orang terdiri dari 30 orang PNS dan 113 Non PNS.

6. Sosial

Terkait pemberdayaan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial berbagai program pelayanan sosial telah diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mendefinisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Pada tahun 2019, istilah PMKS berubah menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Dalam peraturan tersebut disebutkan terdapat 26 jenis pemerlu pelayanan masalah sosial akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan dan keterpencilan, termasuk diantaranya fakir miskin, lansia

terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas, dan komunitas adat terpencil.



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.43 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (Jiwa)

Untuk program bantuan perlindungan sosial yang diberikan kepada penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat merupakan komplementaritas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diantaranya Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan DTKS tersebut, mulai dari pengelolaan DTKS (merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan) yang terdiri dari pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan.

DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Penduduk Kabupaten Bangka Barat yang masuk dalam kategori DTKS pada tahun 2021 sebesar 66.444 jiwa, dimana Kecamatan Simpangteritip merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi dilanjutkan dengan Kecamatan Muntok (versi DTKS). Sementara pada Tahun 2020, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori DTKS sebanyak 39.099 jiwa atau meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2021.

Tabel 2.36 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2021

KECAMATAN	2019	2020	2021
	JIWA		
Muntok	7.634	8.008	14.230
Simpangteritip	9.875	9.847	14.636
Jebus	4.367	4.256	6.891
Parittiga	4.436	4.214	8.661
Kelapa	8.892	7.547	13.751
Tempilang	5.352	5.227	8.271
TOTAL	40.556	39.099	66.444

Sumber: Dinas Sosial, PMD Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Barat, 2022.

7. Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintra sektoral sehingga perannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan manusia. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu TPT.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

Tabel 2.37 Indikator Ketenagakerjaan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja	106.408	103.518	102.281	104.271
Bekerja	103.102	100.563	98.071	100.274
Pengangguran	3.306	2.955	4.210	3.997
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,83	66,34	65,76	65,98
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,05	2,80	4,12	3,83

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022

TPAK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 65,98 persen artinya sebesar 66 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Persentase penduduk usia kerja di Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan sebesar 0,22 poin dan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 0,29 poin di Tahun 2021.

Dilihat dari TPT kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat ketiga terendah dengan urutan TPT tertinggi di Pangkalpinang, yaitu sebesar 6,81 persen sedangkan TPT terendah di Belitung sebesar 3,51 persen.

Tabel 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen) Tahun 2017 – 2021

Kabupaten/kota	Persentase				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bangka	4,29	4,12	3,80	5,42	5,97
Belitung	2,57	2,93	2,90	4,82	3,51
Bangka Barat	4,23	3,11	2,85	4,12	3,83
Bangka Tengah	3,38	3,93	4,39	5,59	4,95
Bangka Selatan	2,74	4,35	3,87	5,42	5,29
Belitung Timur	2,62	1,50	1,71	3,93	3,78
Pangkalpinang	5,80	4,70	5,01	6,93	6,81
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3,78	3,65	3,39	5,25	5,03

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada era sekarang ini, peran perempuan telah merambah berbagai bidang ilmu dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai ibu rumah tangga, namun ikut pula mencari nafkah bagi keluarga. Kemandirian perempuan juga menempatkannya pada posisi tawar yang setara atau bahkan pada beberapa kasus lebih tinggi dari

laki-laki. Untuk itu, terkait pembangunan daerah informasi mengenai partisipasi perempuan dalam lingkungan kerja juga perlu ikut dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil pemilihan legislatif Kabupaten Bangka Barat tahun 2019, terdapat empat orang perempuan yang menduduki sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2019—2024 dari total keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat berjumlah 25 orang. Dari hasil pemilihan legislatif tersebut, maka dapat dilihat proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Bangka Barat saat ini sebesar 16 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan daerah, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan akses dan partisipasi perempuan. Langkah ini menjadi salah satu strategi dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang dimulai dari pembangunan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan tidak terlihat perbedaan yang berarti antara proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja di lembaga pemerintah. Bahkan, jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada laki-laki yang bekerja pada lembaga pemerintah di Kabupaten Bangka Barat.

Kualitas hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap tindak kekerasan. Pada masa sekarang masyarakat semakin terbuka dan peduli terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta adanya sosialisasi, edukasi, dan advokasi melalui kegiatan sosialisasi pencegahan/perlindungan anak dan remaja dari kekerasan dan kegiatan pengembangan P2TP2A.

Tabel 2.39 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kecamatan Muntok	37	7	5	3	10	6
2.	Kecamatan Simpangteritip	10	4	-	-	1	3
3.	Kecamatan Jebus	2	1	2	5	2	1
4.	Kecamatan Parittiga	7	3	1	2	5	4
5.	Kecamatan Kelapa	1	4	1	-	3	2
6.	Kecamatan Tempilang	1	-	1	2	3	2
Bangka Barat		58	19	10	12	24	18

Sumber : P2TP2A Kabupaten Bangka Barat, 2022.

Dari kasus yang dilaporkan terjadi di tahun 2021 sebanyak 18 kasus di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya ditindaklanjuti dan ditangani oleh masing-masing unit pelayanan terkait penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain oleh RSUD Sejiran Setason, Dinas Kesehatan, Polres, dan Kejari Kabupaten Bangka Barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangka Barat.

9. Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu urusan wajib pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk yaitu pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan terkait tiga hal, meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, dan gizi. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, antara lain melalui jaminan penyediaan pangan. Indikator capaian kinerja dalam urusan pangan meliputi:

A. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi lokal/domestik, pasokan pangan (ekspor/impor) dan pengelolaan cadangan pangan. Adapun terkait pasokan pangan (impor pangan), data diperoleh melalui pendekatan data Konsumsi SUSENAS BPS yang telah diolah, sehingga meningkat atau menurunnya tingkat konsumsi pangan akan berpengaruh besar pada hasil akhir analisis data ketersediaan pangan di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.40 Ketersediaan Pangan Utama

di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2021 (ton)

No.	Tahun	Ketersediaan Pangan Utama (ton)
1.	2018	33.671,76
2.	2019	35.355,34
3.	2020	37.123,11
4.	2021	38.979,27

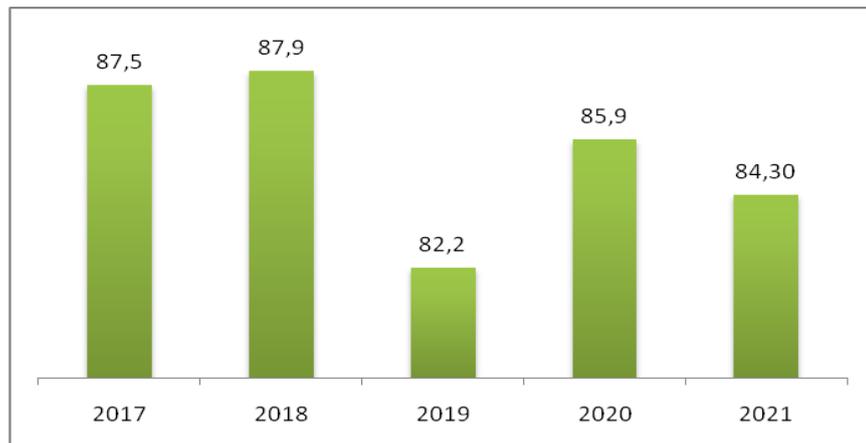
Sumber: Neraca Bahan Makanan, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Bangka Barat, 2022.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2021 ketersediaan pangan utama cenderung meningkat. Kemampuan daerah dalam penyediaan pangan belum bisa memenuhi kebutuhan penduduknya. Berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Pangan, Kabupaten Bangka Barat mampu menyediakan pangan sebesar 47 persen saja untuk kebutuhan masyarakat. Khusus untuk komoditas pangan utama/pokok yaitu beras, Kabupaten Bangka Barat hanya mampu memenuhi 41,43 persen dari kebutuhan. Di sisi lain, Kabupaten Bangka Barat saat ini baru bisa menyiapkan 15 ton

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dari standar kebutuhan CPPD seharusnya yaitu sebesar 73 ton. Hal ini mengakibatkan Ketergantungan terhadap impor pangan dari luar daerah sangat besar, dan karena Kabupaten Bangka Barat adalah daerah kepulauan maka rentan terjadinya rawan pangan.

B. Skor Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam. Skor PPH merupakan indikator strategis dan penggunaannya menjadi tolak ukur dari gambaran kualitas konsumsi pangan.



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.44 Skor PPH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 — 2021

Pada tahun 2021 Skor PPH menurun dengan nilai sebesar 84,30. Penurunan ini disebabkan oleh tingginya konsumsi beras dan kurangnya konsumsi sayur buah, umbi-umbian serta kacang-kacangan. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan bahkan kehilangan sumber pendapatan akibat terganggunya aktivitas ekonomi akibat pandemi covid-19, yang berujung pada perubahan struktur pengeluaran kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi. Masyarakat umumnya menurunkan kualitas konsumsi makanannya dengan membatasi pilihan makanan sumber protein hewani dan vitamin mineral terutama dari buah-buahan, dan bergeser kepada pangan sumber karbohidrat.

C. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan persentase antara jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, dibagi dengan jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Adapun nilai capaian untuk indikator Program Pengawasan Keamanan Pangan di tahun 2021 adalah sebesar 94,02 persen (dari 117 sampel yang diuji, 7 sampel terindikasi mengandung bahan berbahaya). Dengan catatan bahwa 108 sampel diuji hanya menggunakan rapid test kit (uji kualitatif) dan hanya 9 sampel saja yang diuji secara kuantitatif melalui pengujian laboratorium.

10. Pertanian

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanian diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada.

Indikator pertanian bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah yang pada akhirnya berperan mengurangi kasus-kasus tanah negara. Salah satu faktor penghambat dalam pembangunan tidak terlepas dari aspek pertanian atau lahan. Persentase luas lahan bersertifikat merupakan hasil bagi antara luas lahan bersertifikat dengan luas wilayah dikali seratus persen. Sampai tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat memiliki total 47.663 bidang tanah dengan luas lahan bersertifikat 474.291.407 m². Sementara itu, luas lahan di Kabupaten Bangka Barat adalah 2.848.860.500 m². Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 adalah 16,65 persen.

Faktor penghambat dalam pembangunan terkait dengan urusan tanah yakni tidak jelasnya status kepemilikan lahan oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya kasus tanah.

Tabel 2.41 Rekapitulasi Bidang Tanah Bersertifikat
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Jenis Sertifikat	Bidang	Luas (m ²)
Hak Milik	46.395	122.304.975
Hak Guna Usaha	57	347.257.780
Hak Guna Bangunan	781	1.349.855
Hak Pakai	386	3.263.971
Hak Wakaf	44	114.826
Jumlah	47.663	474.291.407

Sumber: BPN Kabupaten Bangka Barat, 2022.

11. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup saat ini sering menjadi sorotan, karena tingkat kesadaran dunia dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan semakin meningkat. Beberapa komponen yang sangat erat dengan lingkungan hidup adalah terkait udara, air dan tutupan lahan/hutan. Dari ketiga komponen tersebut dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perhitungan IKLH diukur dari 3 (tiga) parameter/indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH) dengan bobot untuk masing-masing parameter sebesar 30 persen untuk IKA, 30 persen untuk IKU dan 40 persen untuk ITH.

Berdasarkan ketiga parameter tersebut, IKLH Kabupaten Bangka Barat IKLH Tahun 2021 sebesar 69,21 mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sebesar 63,29. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2021 sebesar 70,00 maka IKLH Kabupaten Bangka Barat mencapai 98,87 persen.

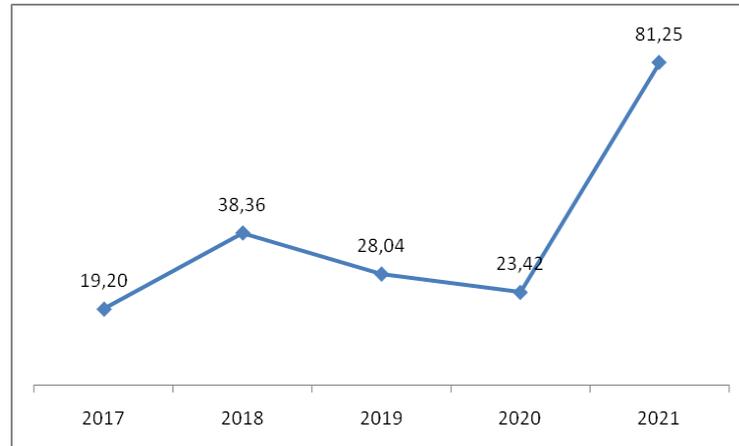
Tabel 2.42 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2021

Parameter	Rata-Rata	Bobot	Nilai	IKLH	Rata-Rata	Bobot	Nilai	IKLH
	2020				2021			
Indeks Pencemaran Air	70,00	30	21,00	63,29	65,79	0,376	24,74	69,21
Indeks Pencemaran Udara	91,52	30	27,46		89,71	0,405	36,33	
Indeks Tutupan Hutan	37,08	40	14,83		37,16	0,219	8,14	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat, 2022.

Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari 19,20 persen pada Tahun 2017,

menjadi 38,36 persen pada Tahun 2018. Namun selama dua tahun terakhir, hal tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar 28,04 persen pada Tahun 2019, dan di Tahun 2020 turun menjadi 23,42 persen. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 81,25 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditangani meningkat.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.45 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Perizinan Lingkungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021

Adapun pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH pada tahun 2021 sebanyak 5 pengaduan, di tahun 2020 sebanyak 2 pengaduan.

Tabel 2.43 Penanganan Persampahan di Kawasan Perkotaan Muntok Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Produksi sampah	m3	N/A	28,771.64	28,771.64	29,058.53	29,058.57
2	Sampah yang ditangani / diangkut	m3	N/A	5,391.78	5,103.90	5,338.86	5,535.04
3	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) aktif	Unit	1	1	1	1	1
4	Tempat Pembuangan Sampah	Unit	Bangunan TPS = 14 titik				
5	Pasukan Kuning	Orang	156	156	160	157	157

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat, 2022.

Dari data di atas, dapat terlihat bahwa jumlah sampah yang ditangani di kawasan perkotaan Muntok masih sangat kecil, yakni 19,05 persen dari total produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, namun tingkat kebersihan pada fasilitas umum dan



publik dapat dikatakan baik. Penanganan persampahan di Kabupaten Bangka Barat sampai saat ini masih terfokus pada Kecamatan Muntok sebagai ibukota Kabupaten Bangka Barat, sedangkan pengelolaan persampahan di kawasan pedesaan belum dilakukan secara terpadu. Pengelolaan sampah pada fasilitas umum seperti pasar dan terminal di kecamatan selain Kota Muntok, sampai saat ini masih dikelola oleh pihak kecamatan, seperti di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, dan Kecamatan Parittiga.

Persentase pelaku usaha di Tahun 2021 yang memiliki dokumen lingkungan semakin mengalami peningkatan. Sesuai dengan tingkatannya, dokumen tersebut adalah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), serta Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

Pada tahun 2021 Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi sebanyak 64 Usaha dan/atau kegiatan, terdapat 60 pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan. Capaian cakupan perusahaan / industri / masyarakat yang taat peraturan & peduli lingkungan hidup sesuai dokumen pelaporan AMDAL TERPADU adalah sebesar 100 persen terdiri dari 28 perusahaan/industri/ masyarakat yang taat dokumen pelaporan AMDAL dari 28 perusahaan/industri/masyarakat yang diawasi. Capaian cakupan perusahaan/industri/masyarakat yang taat peraturan & peduli lingkungan hidup sesuai dokumen pelaporan UKL – UPL terdiri dari 8 perusahaan/industri/masyarakat yang taat dokumen pelaporan UKL – UPL dari 16 perusahaan/industri/masyarakat yang diawasi. Sedangkan capaian cakupan perusahaan/industri/masyarakat yang taat peraturan & peduli lingkungan hidup sesuai dokumen pelaporan DPLH/DELH sebesar 100 persen.

12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya E-KTP serta pencatatan kependudukan dengan menggunakan sistem (SIAK) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lebih mudah. Dua hal ini merupakan subbagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dengan baik kepada masyarakat. Tidak hanya itu, bentuk kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka Barat terhadap identitas diri dan administrasi kependudukan pun memiliki peran penting. Kesadaran ini dibuktikan dengan kepemilikan administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan Akta Kematian.

Tabel 2.44 Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penduduk Memiliki KTP	96,51	97,46	98,27	98,56	99,25
2.	Penduduk Memiliki KIA	2,13	7,88	25,92	42,89	45,88
3.	Penduduk Berakte Kelahiran	36,95	39,80	45,55	49,93	50,96
4.	Pasangan Berakte Nikah	30,32	34,27	42,40	47,35	51,32

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2022.

Persentase penduduk yang memiliki KTP dan Penduduk yang memiliki akte kelahiran belum mencapai 100 persen dikarenakan beberapa penduduk yang berusia lanjut tidak melakukan pengurusan terhadap administrasi kependudukan tersebut. Pada indikator administrasi pasangan yang berakte nikah tidak mencapai 60 persen dikarenakan akta nikah yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berasal dari penduduk yang non muslim, sedangkan penduduk muslim (beragama Islam) pembuatan akta nikah dilakukan di KUA.

Untuk persentase penduduk berakte kelahiran Tahun 2021 sebesar 50,96 persen, namun untuk persentase penduduk berakte kelahiran 0-18 tahun telah mencapai 94,55 persen dan untuk persentase penduduk berakte kelahiran 0-11 tahun telah mencapai 99,68 persen.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat berhasil apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan peraturan pelaksana yang secara tidak langsung menjadikan desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah yang memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Beberapa perubahan yang sangat mendasar terhadap status desa berdasarkan perundangan tersebut meliputi kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa.

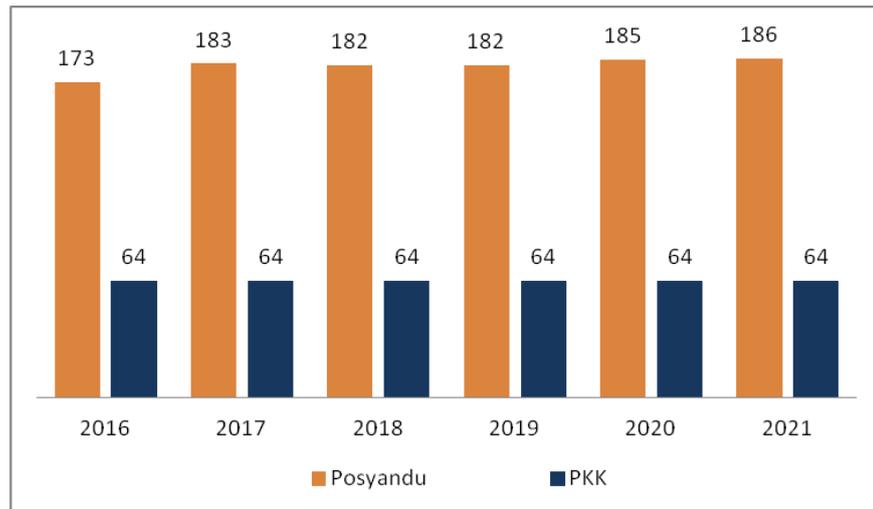
Tabel 2.45 Rekapitulasi Indeks Desa Membangun
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021

Status Desa	Tahun	Kecamatan						Total Desa	%
		Muntok	Simpang Teritip	Jebus	Kelapa	Tempilang	Parittiga		
		4 Desa	13 Desa	11 Desa	13 Desa	9 Desa	10 Desa	60 Desa	
Mandiri	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	1	0	0	0	1	2	3,33
	2021	0	1	0	0	0	1	2	3,33
Maju	2018	0	4	1	0	2	2	9	15,00
	2019	0	4	1	1	3	5	14	23,33
	2020	1	4	1	1	3	4	14	23,33
	2021	3	6	1	1	3	5	19	31,67
Berkembang	2018	4	9	9	11	7	8	48	80,00
	2019	4	9	10	12	6	5	46	76,67
	2020	3	8	10	12	6	5	44	73,33
	2021	1	6	10	12	6	4	39	65,00
Tertinggal	2018	0	0	1	2	0	0	3	5,00
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tertinggal	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangka Barat, 2022.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021, terlihat bahwa terjadi peningkatan status desa di Kabupaten Bangka Barat. Pada Tahun 2018 masih terdapat 5 persen atau sebanyak 3 desa Desa Tertinggal, namun sejak Tahun 2019 sudah tidak terdapat Desa Tertinggal di Kabupaten Bangka Barat. Sementara pada Tahun 2019 terjadi peningkatan persentase Desa Maju dari sebanyak 15 persen atau 9 desa di Tahun 2018 menjadi 23,33 persen atau 14 desa di Tahun 2019. Tahun 2020 terjadi peningkatan persentase desa maju menjadi mandiri sebanyak 3,33 persen. Di Tahun 2021 terdapat peningkatan status sebanyak 5 Desa dari status berkembang menjadi Desa Maju sehingga persentase Desa berstatus Maju menjadi 31,67 persen.

Jumlah PKK dari Tahun 2016-2021 tidak terjadi peningkatan, yaitu sebanyak 64 PKK. Sementara untuk jumlah posyandu, pada Tahun 2016 sebanyak 173 dan pada Tahun 2021 menjadi 186 posyandu. Persentase PKK aktif sudah mencapai 100% sejak tahun 2016-2021, Posyandu juga memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan balita. Posyandu yang ada di Kabupaten Bangka Barat kecenderungannya terus meningkat.



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangka Barat, 2022

Gambar 2.46 Jumlah Posyandu dan PKK
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Oleh sebab itu, banyaknya peserta KB aktif di Kabupaten Bangka Barat dapat memperlihatkan seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penekanan banyaknya kelahiran. Adanya bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang ditujukan untuk masyarakat yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Tabel 2.46 Cakupan Peserta KB Aktif
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Tahun	Peserta KB Aktif	Pasangan Usia Subur	Cakupan Peserta KB Aktif (%)
2016	32.869	40.431	81,30
2017	30.134	38.818	77,63
2018	30.939	38.792	79,76
2019	31.680	39.286	80,64
2020	30.215	38.162	79,18
2021	31.331	38.872	80,60

Sumber: DP2KBP3A Kab. Bangka Barat, 2022.



Cakupan peserta KB menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi diantara Pasangan Usia Subur (PUS). Pada Tahun 2016-2021 cakupan peserta KB di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuatif. Data peserta cakupan KB aktif pada tahun terbaru, yaitu tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan cakupan peserta KB aktif 79,19 persen menjadi 80,60 persen.

Selain melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait Keluarga Berencana, untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif tentunya tidak terlepas dari peran para penyuluh KB. Dari jumlah PLKB/PKB yang ditugaskan di 6 (enam) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat ini belum mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan SPM yaitu satu petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan (66 desa/kelurahan).

15. Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang mempunyai daya dorong dalam pembangunan kepariwisataan serta sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah sehingga terciptanya kenyamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas, diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Kebijakan pembangunan sistem transportasi kedepan hendaknya dipadukan dalam sebuah bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan yaitu suatu sistem yang memungkinkan kebutuhan akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan pilihan moda transportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi.

Berikut beberapa kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat terkait dengan urusan perhubungan antara lain :

a. Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah penumpang/barang yang diangkut menggambarkan mobilitas masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di daerah yang diukur dengan menghitung jumlah penumpang/barang yang datang/berangkat dengan kendaraan umum. Arus penumpang yang secara langsung dari dan ke Kabupaten Bangka Barat yaitu melalui transportasi darat melalui Bis/travel Antar Kota serta melalui transportasi laut berupa kapal angkut penumpang serta kapal angkut barang.

Tabel 2.47 Jumlah Arus Penumpang dan Angkutan Umum
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	%	70	65	59	59	58
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	20.981	25.197	22.476	20.568	20.300
3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	orang	23.151	30.341	26.914	19.842	19.700
4.	Pemasangan Rambu-rambu	jumlah	778	778	778	778	778

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat, 2022.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2017-2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum yang buruk. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas cenderung konstan. Hal ini mengindikasikan kurangnya optimalisasi dalam penyediaan, penataan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan serta sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Sebagai upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan dalam berlalu lintas, maka upaya pemeliharaan dan penambahan rambu-rambu perlu dilakukan.

b. Jaringan Trayek

Jumlah trayek antar kota dalam provinsi pada tahun 2020 yaitu 9 (sembilan) trayek antara lain dengan trayek terminal Muntok–Pangkalpinang, Pelabuhan Tanjungkalian–Pangkalpinang, Kelapa–Pangkalpinang, Kundi–Pangkalpinang, Parittiga–Pangkalpinang, Jebus–Pangkalpinang, dan Tempilang–Pangkalpinang. Sementara untuk jumlah trayek perkotaan terdiri dari 4 (empat) trayek yaitu terminal Muntok–Pelabuhan Tanjungkalian dan Angkutan Dalam Kota Muntok. Sedangkan untuk trayek pedesaan terdapat 5 (lima) trayek yaitu terminal Muntok-terminal Parittiga, terminal Muntok-terminal Kelapa, dan terminal Muntok-Kecamatan Tempilang, terminal Muntok- Mayang, dan terminal Muntok-Kundi.

Tabel 2.48 Jaringan Trayek Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Trayek Antar Kota dalam Provinsi	8	9	9	9	9
2.	Jumlah Trayek Perkotaan dalam Kabupaten	4	4	4	4	3
3.	Jumlah Trayek Perdesaan dalam Kabupaten	5	5	5	5	3

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat, 2022.

Dari data diatas jika dibandingkan dengan jumlah desa yaitu sebanyak 60 maka dengan jumlah trayek dalam pedesaan sebanyak 3 (tiga) trayek maka masih sangat kecil. Namun hal ini juga bisa diartikan bahwa ada alternatif lain dalam keterhubungan transportasi antar desa yaitu berupa ketersediaan jasa ojek, kendaraan pribadi dan kurangnya minat masyarakat untuk mengguna jasa transportasi pedesaan.

c. Uji KIR Angkutan Umum

Pada tahun 2019 Kabupaten Bangka Barat telah memiliki tempat yang representatif sesuai standar untuk pengujian kendaraan bermotor, namun masih terkendala dengan kurangnya SDM yang terlatih serta prasarana pendukung pengujian KIR.

Tabel 2.49 Uji KIR Angkutan Umum
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tempat Uji KIR	1	1	1	1	1
2.	Petugas Uji KIR	2	2	2	2	4
3.	Lama Pengujian KIR (menit)	25	25	25	25	25
4.	Jumlah kendaraan	131.482	139.773	143.731	168.204	159.169
	- Kendaraan Roda Dua	120.526	128.184	131.740	155.565	145.119
	- Kendaraan Roda Empat/lebih	10.956	11.589	11.991	12.639	14.050
5.	Jumlah Kendaraan wajib KIR yang diuji KIR	1.679	1.609	1.745	1.604	1.274
	- Ulang	1.611	1.532	1.646	1.546	1.228
	- Baru	68	77	99	58	46
6.	Biaya Pengujian KIR					
	- Mobil penumpang	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000
	- Mobil Bus	42.000	42.000	42.000	42.000	65.000
	- Mobil Barang	52.000	52.000	52.000	52.000	60.000
	- Kereta gandeng	42.000	42.000	42.000	42.000	70.000

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat, 2022.

d. Jumlah pelabuhan laut/ terminal bis

Saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki 3 (tiga) pelabuhan Laut, yaitu Pelabuhan Muntok, Pelabuhan Unit Metalurgi dan Pelabuhan Tanjung kalian. Pelabuhan Muntok diperuntukkan sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan ikan. Kondisi pelabuhan Muntok semakin kritis dikarenakan terjadinya sedimentasi/pengendapan tanah di daerah pesisir pelabuhan. Hal ini berdampak pada sulitnya kapal untuk mendekat ke daerah pantai. Kapal harus berhenti sekitar 50-100 meter dari pantai. Sedangkan untuk Pelabuhan Unit Metalurgi dikhususkan untuk keperluan bongkar muat PT.Timah Tbk saja. Pelabuhan Tanjungkalian merupakan pelabuhan penumpang sekaligus pelabuhan barang karena sebagian besar barang masuk atau keluar dari Kabupaten Bangka Barat ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan ini dengan menggunakan fasilitas kapal ferry.

Untuk melayani transportasi antarkota dan di dalam kota, Kabupaten Bangka Barat memiliki 3 (tiga) buah terminal, yang terletak di kecamatan Muntok, kecamatan Kelapa dan kecamatan Parittiga. Tipe terminal tertinggi yang dimiliki saat ini adalah tipe C yang terletak di Kecamatan Muntok. Namun, rute bis via terminal yang ada saat ini belum melingkupi hingga ke seluruh pelosok daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.50 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Rambu - rambu Lalu Lintas (Unit)	778	778	778	778	778
2.	Jumlah <i>Traffic Light</i> (Lokasi/Unit)	4/24	5/29	5/29	5/29	5/29
3.	Panjang Pagar Pengaman Jalan (m)	2620	2620	2620	2620	2620
4.	Jumlah Deliniator (Unit)	542	542	542	542	542
5.	Panjang Marka Jalan (m)	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6.	Jumlah <i>Warning Light</i> (m)	24	24	24	24	24
7.	Jumlah <i>Traffic Cone</i> (unit)	156	156	156	156	156
8.	Panjang Median Jalan	155,83	155,83	155,83	155,83	155,83

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat, 2022.

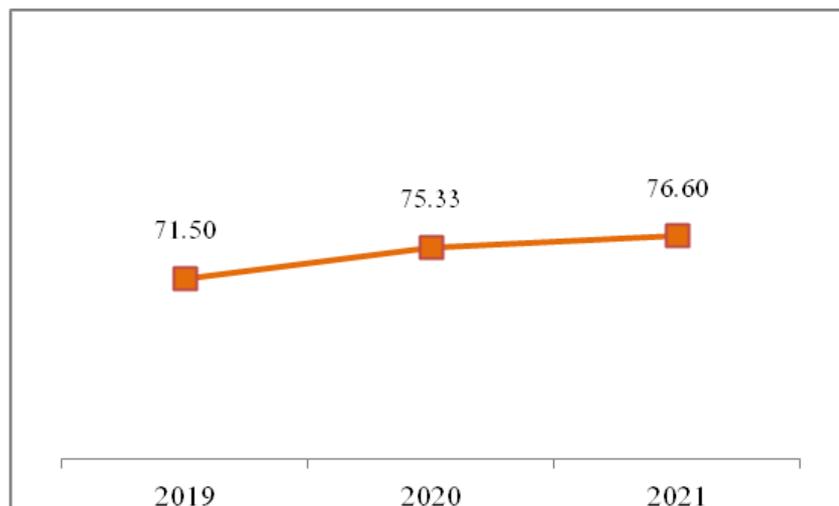
Guna meningkatkan upaya keselamatan, keamanan, ketertiban dan mencegah serta mengurangi kecelakaan lalu lintas, telah dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan. Fasilitas perlengkapan jalan sampai tahun 2021 tidak mengalami penambahan jika dibandingkan dengan tahun 2017 kecuali untuk

Jumlah *Traffic Light* (lokasi/unit) bertambah dari 4 (empat) lokasi sebanyak 2 (dua) unit bertambah menjadi 5 (lima) lokasi sebanyak 29 unit yang merupakan hibah dari provinsi.

16. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat suatu daerah agar dapat bersaing secara global. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang mendukung pertukaran informasi dan terjadinya komunikasi. Semakin baik akses masyarakat terhadap teknologi, maka semakin baik pula pemahaman terhadap informasi.

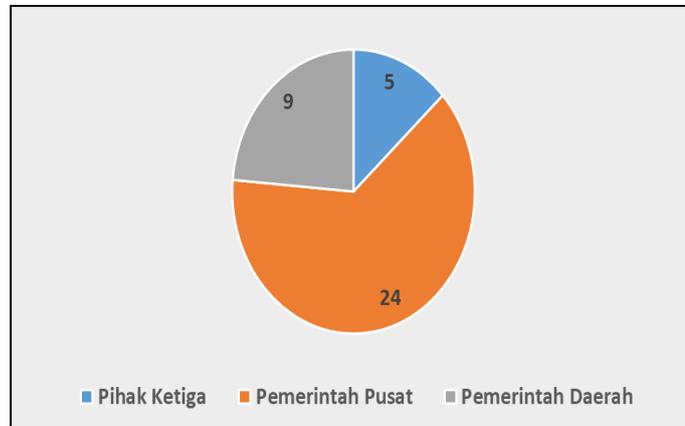
Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah yang perkembangannya tidak bisa terlepas dari interaksi dengan wilayah sekitarnya. Pada bagian-bagian sebelumnya, telah diutarakan bahwa terdapat banyak potensi-potensi internal daerah Bangka Barat, yang bisa berkembang dengan adanya suntikan investasi ataupun kerjasama dengan investor dari luar daerah. Oleh karena itu, akses terhadap informasi dan komunikasi merupakan salah satu poin krusial dalam menunjang perkembangan dan pembangunan wilayah. Apalagi dengan kondisi fisik geografisnya yang berada pada wilayah kepulauan, perlu adanya infrastruktur penunjang yang bisa mengatasi kendala (*barrier*) fisik ini. Teknologi nirkabel (*wireless*) merupakan salah satu tumpuan dalam sistem informasi dan komunikasi di Kabupaten Bangka Barat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022.

Gambar 2.47 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel dalam 3 Bulan terakhir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2021

Dampak dari berkembangnya teknologi dengan pesat adalah keterbukaan komunikasi dan informasi bagi seluruh masyarakat, dengan berkembangnya teknologi masyarakat dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara cepat sesuai kepentingannya dan mengetahui kepentingan publik lainnya.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.48 Penggunaan Aplikasi di Kabupaten Bangka Barat

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 38 Aplikasi baik yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, Pihak Ketiga maupun oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Aplikasi tersebut digunakan oleh beberapa perangkat daerah guna membantu tercapainya kinerja organisasi yang lebih efisien.

17. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam era desentralisasi daerah, koperasi berperan besar sebagai lembaga keuangan yang kokoh guna menjangkau lapisan bawah dari ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah perdesaan. Keberadaan koperasi juga berperan dalam menahan arus keluar sumber keuangan daerah karena beragam studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih efektif dalam menahan arus kapital keluar.

Dengan berkembangnya koperasi diharapkan turut membantu perputaran perekonomian, khususnya bagi masyarakat yang bergelut pada usaha mikro dan kecil. Ketiadaan jaminan yang sering kali menjadi penghambat untuk melakukan pinjaman pada perbankan, menjadikan koperasi sebagai pilihan utama bagi

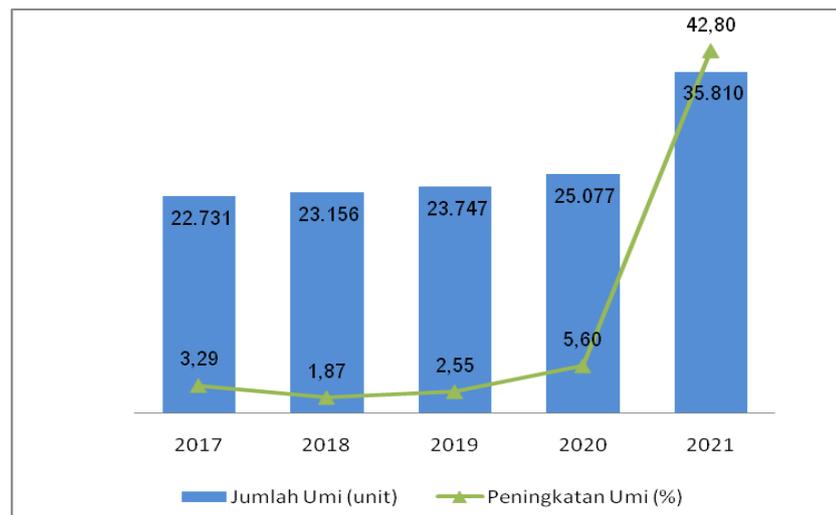
masyarakat. Secara kuantitas, perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka Barat dapat dikatakan stabil.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bangka Barat, 2022.

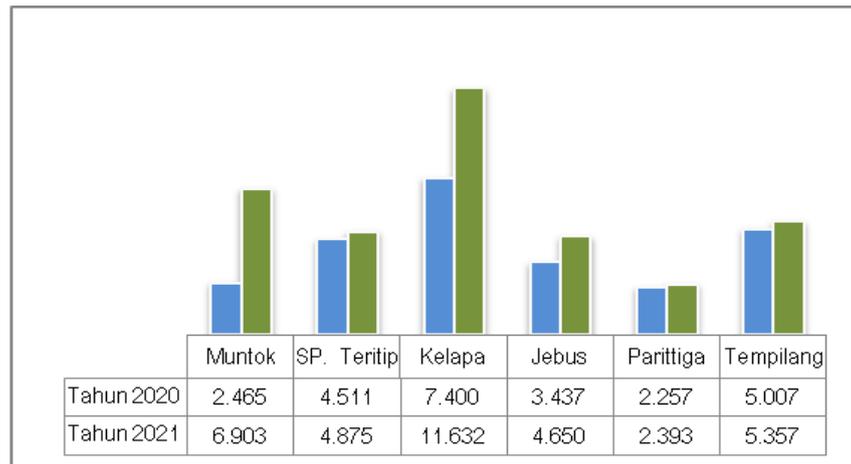
Gambar 2.49 Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Dilihat dari jumlah usaha mikro di Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2017 sampai dengan 2021, menunjukkan perkembangan yang positif atau terus meningkat, begitu pula dengan persentase peningkatan/pertumbuhan usaha mikro menunjukkan kecenderungan meningkat khususnya di tiga tahun terakhir. Pada Tahun 2017 jumlah usaha mikro sebanyak 22.731 unit meningkat secara signifikan menjadi 35.810 unit di tahun 2021.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.50 Jumlah dan Persentase Peningkatan Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021



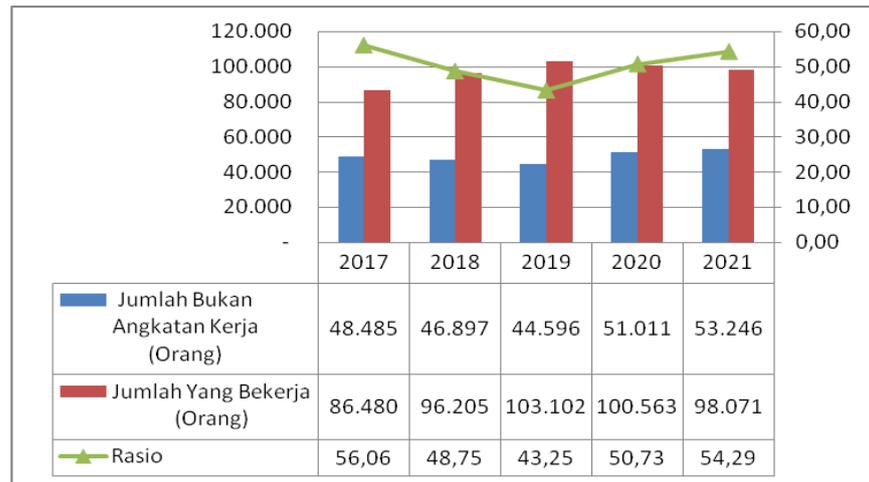
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.51 Jumlah Usaha Mikro per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2021

Berdasarkan sebaran UMi di Kabupaten Bangka Barat, jumlah UMi terbanyak di Tahun 2020-2021 terdapat di Kecamatan Kelapa sebanyak 11.632 unit UMi atau 32,48 persen dari total seluruh UMi yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

18. Penanaman Modal

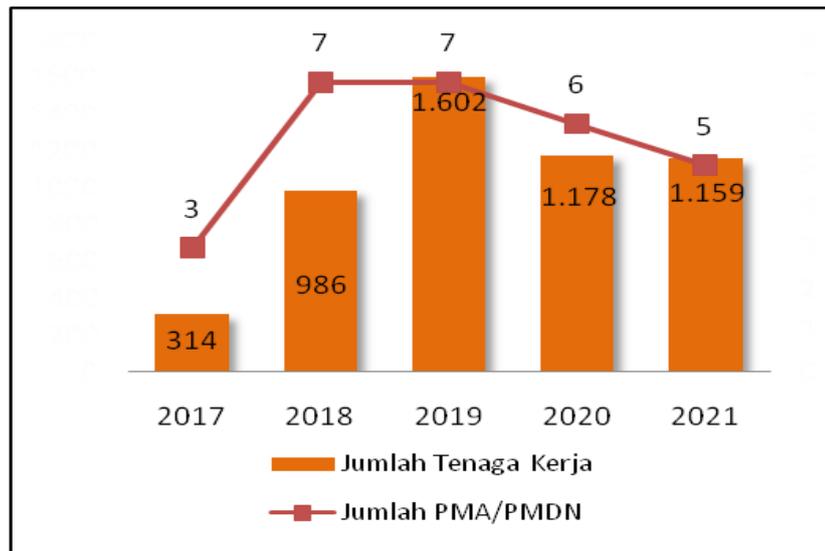
Penetapan fokus pengembangan penanaman modal di Kabupaten Bangka Barat disesuaikan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki sehingga dapat mendukung sektor unggulan atau prioritas daerah. Potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Bangka Barat perlu dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pembangunan daerah. Kegiatan pengembangan penanaman modal (investasi), sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, seperti menciptakan lapangan kerja, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Kebijakan dari pemerintah daerah dibutuhkan demi terciptanya iklim yang kondusif untuk investasi. Berdasarkan data pada tahun 2017-2021, diketahui bahwa rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bangka Barat fluktuatif.



Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Nakertrans Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.52 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

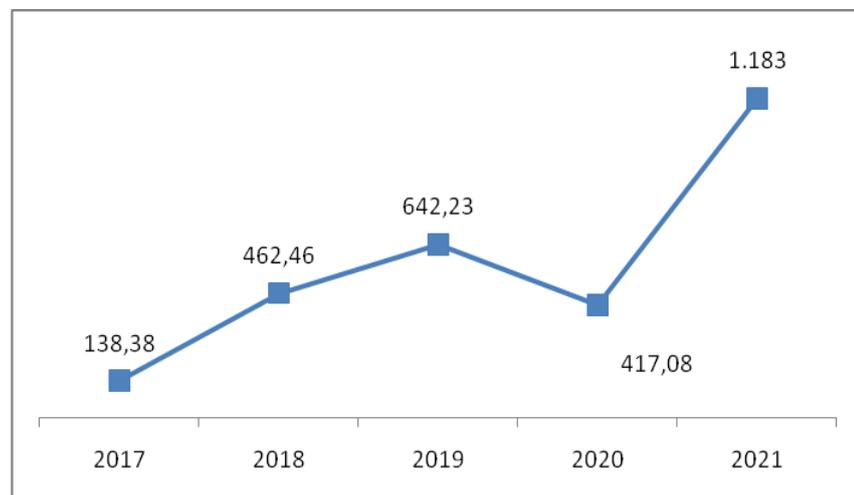
Pada tahun ini jumlah Rasio ini menggambarkan daya tampung proyek investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja, maka semakin besar pula daya tampung proyek investasi PMA/PMDN. Adapun di Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2021, rasio daya serap tenaga kerjanya mencapai 54,29. Rasio daya serap tenaga kerja tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,57 dari tahun sebelumnya. Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN.



Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Nakertrans Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.53 Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

Besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat khususnya di sektor perkebunan dan perindustrian membuka peluang untuk pengembangan investasi kedepan.



Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Nakertrans Kab. Bangka Barat, 2021.

Gambar 2.54 Pertambahan Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 (miliar rupiah)

Dilihat dari gambar di atas terjadi peningkatan pertambahan nilai investasi sebesar Rp766 milyar atau 64,8 persen di tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian nilai investasi Tahun 2020.

PMA dan PMDN yang telah terealisasi di Kabupaten Bangka Barat sampai tahun 2021 sebesar Rp1.183.055.206.415,- mengalami peningkatan secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp765.973.206.415,-. Sebagian besar investor tersebut bergerak di bidang pertambangan bijih timah yaitu senilai Rp22.263.849.058,- dan bidang perkebunan kelapa sawit senilai Rp1.054.363.170,-, Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi senilai Rp824.000.021.000,- serta investor lain.

Pada investasi sektor sekunder, di Kabupaten Bangka Barat hanya terdapat PMA saja, yaitu industri minyak makan, lemak nabati, dan hewani. Sebaliknya, pada investasi sektor tersier, belum terdapat PMA, namun terdapat PMDN, yaitu pada jenis investasi ketenagalistrikan, transmisi tenaga Listrik (PLTD) Muntok, angkutan bus antarkota dalam provinsi (AKDP)/ trayek, Aktivitas penunjang pertambangan, dan penggalian lainnya.

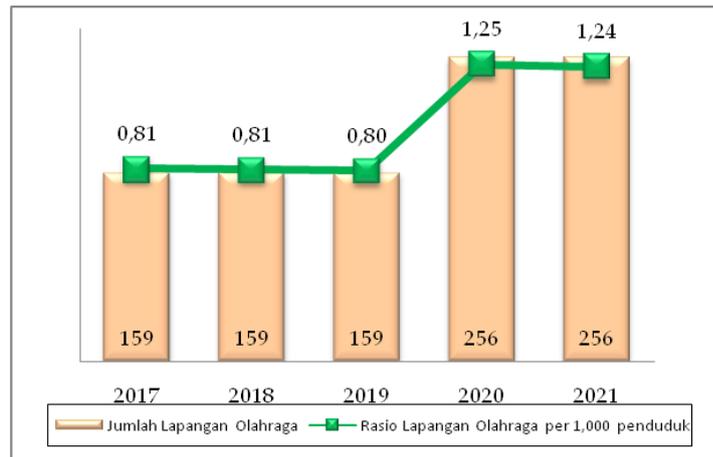
Tabel 2.51 Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021

Jenis Investasi	2017	2018	2019	2020	2021
Sektor Primer PMDN	17.658.706.586	156.739.941.287	34.271.285.738	235.499.464.594	33.671.212.228
Sektor Primer PMA	3.928.283.258	28.350.541.148	28.709.356.884	115.529.098.837	6.995.111.237
Sektor Sekunder PMDN	4.414.725.502	199.952.295.203	132.694.366.567	-	824.000.021.000
Sektor Sekunder PMA	933.395.895	4.209.194.596	605.923.093	5.346.126.767	271.189.283.852
Sektor Tersier PMDN	110.007.875.176	68.604.503.357	45.957.122.091	60.707.309.802	47.199.578.098
Sektor Tersier PMA	-	4.600.000.000	-	-	-
Total Investasi	138.389.922.165	462.456.475.591	642.238.054.373	417.082.000.000	1.183.055.206.415

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Nakertrans Kab. Bangka Barat, 2022.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menunjang bidang olahraga dengan menyediakan sarana dan prasarana. Fasilitas keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah fasilitasi pembentukan organisasi olahraga, pembangunan lapangan olahraga dan gelanggang olahraga. Sebaran jumlah lapangan olahraga di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 sebanyak 256 lapangan, tidak ada penambahan lapangan olahraga dengan jumlah yang sama dengan tahun 2020. Rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 sebesar 1,24.



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.55 Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga per 1.000 penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021

Jenis lapangan olahraga tersebut yaitu lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, kolam renang, Atletik, lapangan futsal, lapangan tenis, gedung olahraga, lapangan menembak, panahan, sasana tinju, dan tempat biliar. Ketersediaan fasilitas olahraga terlengkap berada di Kecamatan Muntok yaitu mempunyai 12 jenis lapangan olahraga, di Kecamatan Tempilang dan Kecamatan Jebus hanya mempunyai 4 jenis lapangan olahraga.

Tabel 2.52 Jumlah dan Jenis Lapangan Olahraga Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Jenis Lapangan	Jebus	Kelapa	Muntok	Parittiga	Simpang Teritip	Tempilang
Lapangan Bola voli	13	11	15	23	19	23
Lapangan Bola Basket	1	1	7	10	1	1
lapangan Tenis			4			
Futsal	2	1	6	4	6	6
Atletik			1		1	
Bulutangkis	14	7	10	18	23	13
GOR			2			
Kolam renang		1	2	1		
Lapangan Tembak			3			
Panahan			1			
Sasana Tinju/beladiri			3			
Biliar			1	1		
Jumlah per Kecamatan	30	21	55	57	50	43

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab.Bangka Barat, 2022.

Jika dilihat dari prestasi olahraga melalui Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Daerah, dan Kejuaraan Daerah, Kabupaten Bangka Barat selalu masuk dalam peringkat ke-6 atau ke-7 besar. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga pelajar maupun olahraga prestasi di Kabupaten Bangka Barat belum dapat bersaing dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Namun pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan prestasi pada kejuaraan POPDA dengan menduduki peringkat 3 dari 7 kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.53 Peringkat Lomba PORPROV, POPDA, dan Kejurda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	PERINGKAT					
	Popda 2016	Kejurda 2017	Popda 2018	Porprov 2018	Kejurda 2019	Popda 2020
Bangka	4	5	3	1	4	2
Pangkalpinang	3	3	1	2	1	1
Bangka Tengah	2	4	6	3	5	5
Belitung	5	1	4	4	3	6
Belitung Timur	6	2	5	5	2	-
Bangka Selatan	1	7	2	6	7	4
Bangka Barat	7	6	7	7	6	3

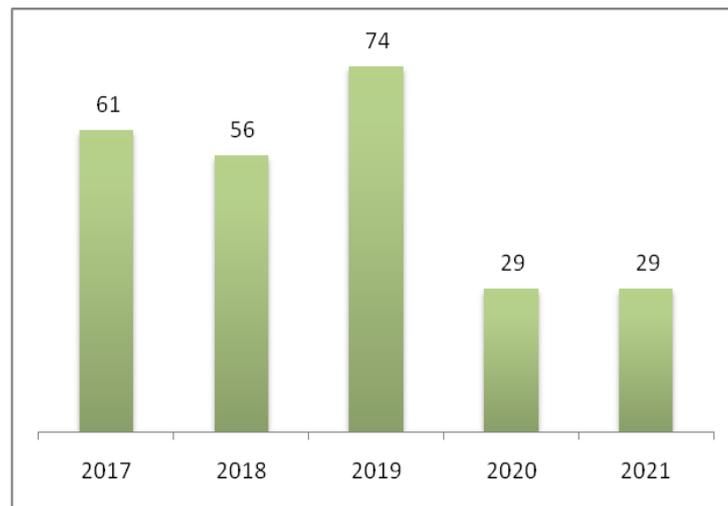
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Bangka Barat, 2021.

Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Bangka Barat yaitu mempunyai SDM pelatih yang bersertifikasi. Sertifikasi pelatih mempunyai beberapa level kategori yaitu kategori Kabupaten Daerah, Nasional maupun Internasional. Jenis kategori level pelatih disesuaikan dengan aturan masing-masing pengurus besar cabang olahraga. Tahun 2021 sebanyak 47 pelatih yang bersertifikasi yaitu level kabupaten/cabang sebanyak 12 pelatih terdiri dari cabang olahraga pencak silat, level provinsi/daerah sebanyak 17 pelatih terdiri dari cabang olahraga pencak silat, sepak takraw, bola voli, bola basket, atletik, karate dan taekwondo dan level Nasional sebanyak 18 pelatih terdiri dari cabang olahraga catur, sepakbola, bola voli dan karate.

Tabel 2.54 Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Level	Jumlah	Cabang Olahraga
Nasional	18	Catur, Sepak bola, Bola voli, dan Karate
Provinsi	17	Pencak silat, Sepak takraw, Bola voli, Atletik, Basket, Karate, dan Taekwondo
Kabupaten	12	Pencak Silat
Total	47	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Bangka Barat, 2022



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.56 Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

Atlet berprestasi di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya berfluktuatif. Atlet terbanyak di tahun 2019 sejumlah 74 atlet berprestasi, menurun sampai dengan tahun tahun 2020 dan masih sama di tahun 2021 hanya memiliki 29 atlet berprestasi.

Rendahnya prestasi olahraga baik olahraga pendidikan maupun olahraga prestasi Kabupaten Bangka Barat secara umum disebabkan oleh masih minimnya sarana dan prasarana olahraga, kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para atlet baik pembinaan rutin maupun ketika persiapan menghadapi perlombaan, serta pendanaan yang belum memadai. Selain itu, pandemi Covid-19 menjadi penyebab menurunnya pembinaan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan keikutsertaan atlet yang mengikuti kompetisi. Namun di setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selalu memberikan Hibah untuk kemajuan dunia olahraga melalui lembaga KONI Kabupaten Bangka Barat.

20. Statistik

Ketersediaan data statistik sektoral bagi pemerintah daerah merupakan suatu keharusan dalam rangka menyajikan potensi serta sebagai bahan analisis perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pengelolaan data informasi



pembangunan sebagai optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Namun demikian, untuk ketersediaan beberapa data statistik sektoral dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bangka Barat masih belum dapat disajikan secara maksimal dikarenakan belum tervalidasi dan terkelola dengan baik sehingga ke depan masih perlu dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan data statistik sektoral daerah.

21. Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi urusan pemerintah daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kinerja Urusan Persandian diukur melalui persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

22. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditinjau dari tingkat pemanfaatan seni dan budaya dalam penyelenggaraan event, baik di daerah maupun luar daerah Kabupaten Bangka Barat. Sejauh ini, seni dan budaya daerah umumnya ditampilkan pada upacara adat, seperti perang ketupat, tujuh likur, dan acara-acara resmi kedaerahan. Sementara sarana penunjang seperti gedung kesenian belum tersedia di Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat banyak memiliki benda, situs bersejarah. Sebagian besar merupakan peninggalan kolonial Belanda. Dari hasil survey Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi terdapat 52 benda, situs dan kawasan bersejarah di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2015 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional bahwa Pesanggerahan Menumbing dan Pesanggerahan Muntok termasuk ke dalam 35 cagar budaya yang masuk dalam peringkat nasional. Kemudian berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/426/2.16.1.1/2018 bahwa bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yaitu Eks. Kantor Pusat PN. Timah Belanda, Menumbing Berghotel, Rumah Residen Mayor Cina, Hollandsche Chinesche School, Gereja Katolik Pelindung Para Pelaut, Gereja Bethesda (GPIB), Menara Suar Tanjung Kalian, Makam Pangeran Hario Pakuningprang, Kelenteng Kong Fuk Miao, dan Masjid Jamik. Sedangkan pada Tahun 2019 dikeluarkan SK Bupati Bangka Barat :

1. Nomor 188.45/269/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Rumah Temenggung



Sebagai Bangunan Cagar Budaya;

2. Nomor 188.45/270/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Eks European School Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

3. Nomor 188.45/272/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Meriam Lantaka Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

4. Nomor 188.45/276.A/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Makam Wan Abdul Jabar, Makam Wan Akub, Makam Wan Serin, Makam Abang Pahang, Makam Isteri Abang Pahang, Makam Abang Muhammad Toyib, Makam Abang Arifin, dan Makam Isteri Abang Arifin Sebagai Struktur Cagar Budaya;

5. Nomor 188.45/282.A/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Benteng Sungai Buluh Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Bangka Barat; dan

6. Nomor 188.45/284.B/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Eks Kantor Sahbandar Muntok Sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Pada Tahun 2020 dikeluarkan SK Bupati Bangka Barat tentang Bangunan Cagar Budaya:

1. Nomor 188.45/396/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Bangunan Gudang Kuning sebagai Bangunan Cagar Budaya

2. Nomor 188.45/397/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Benda Mobil Sedan BN 10 Menumbing sebagai Bangunan Cagar Budaya

3. Nomor 188.45/398/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Rumah Residen sebagai Bangunan Cagar Budaya

4. Nomor 188.45/399/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Benteng Tempilang sebagai Bangunan Cagar Budaya

5. Nomor 188.45/400/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Struktur Benteng Kute Seribu sebagai Bangunan Cagar Budaya

6. Nomor 188.45/401/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Struktur Limbung sebagai Bangunan Cagar Budaya

Balai Purbakala Jambi sudah menginventaris beberapa bangunan diantara lain Benteng Kota Seribu, Makam Kanjeng Pangeran Hario Pakuningprang, Makam Bangsawan di Kecamatan Muntok, Benteng Sungai Buluh di Kecamatan Jebus serta Benteng Kota di Kecamatan Tempilang. Bangunan yang sudah diinventaris telah dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.55 Realisasi Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan dan Terintegrasi dengan Program Pariwisata Tahun 2017 – 2021

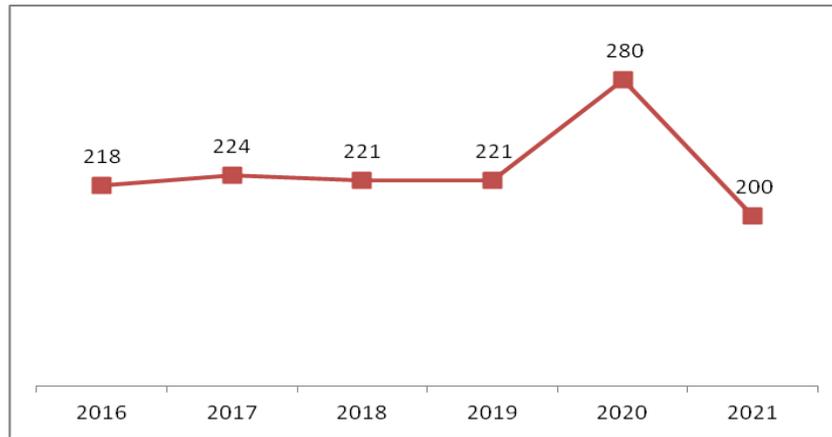
No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Benda Warisan Budaya	0	0	0	1	0
2.	Warisan Tak Benda	0	0	0	0	0
3.	Bangunan Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya	2	6	13	17	17
4.	Even Budaya/Even Tradisi	31	34	35	20	14
5.	Kesenian Budaya yang diselenggarakan	4	5	3	3	0
6.	Pelestarian nilai sejarah	-	1	1	0	0
Total		37	46	52	69	31

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2022.

Dari tabel diatas realisasi pada tahun 2021 target Bangunan Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya terealisasi sebanyak 17 bangunan, event budaya dapat terlaksana sebanyak 14 kali, kesenian/budaya diselenggarakan tidak dapat terlaksana dikarenakan pandemi *Covid-19*.

23. Perpustakaan

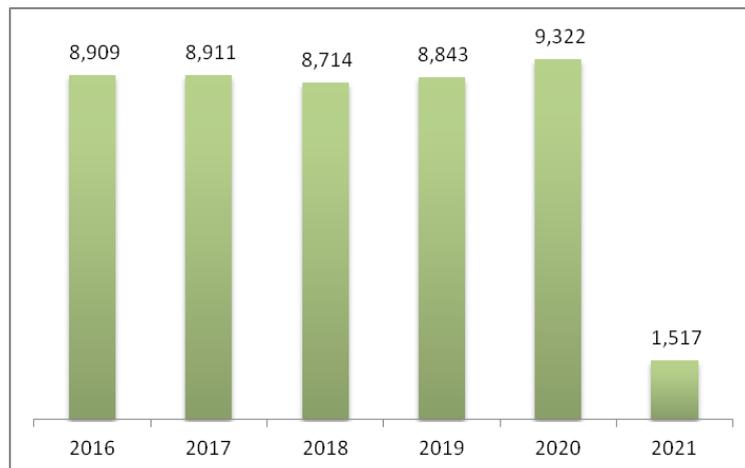
Budaya membaca merupakan kebiasaan yang perlu terus diasah dan dipupuk sejak dini. Membaca membuka wawasan terhadap berbagai macam hal yang bermanfaat. Perpustakaan sebagai gudang buku sangat berperan penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kabupaten Bangka Barat memiliki 200 perpustakaan hingga tahun 2021 yang terdiri dari 1 perpustakaan di SLB, 46 perpustakaan di TK, 134 perpustakaan di SD, 35 perpustakaan di SMP, 15 perpustakaan di SMA, dan 49 perpustakaan desa. Selain perpustakaan, Kabupaten Bangka Barat memiliki taman bacaan masyarakat yang tersebar di beberapa desa/kelurahan yaitu sebanyak 12 taman bacaan.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.57 Jumlah Perpustakaan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

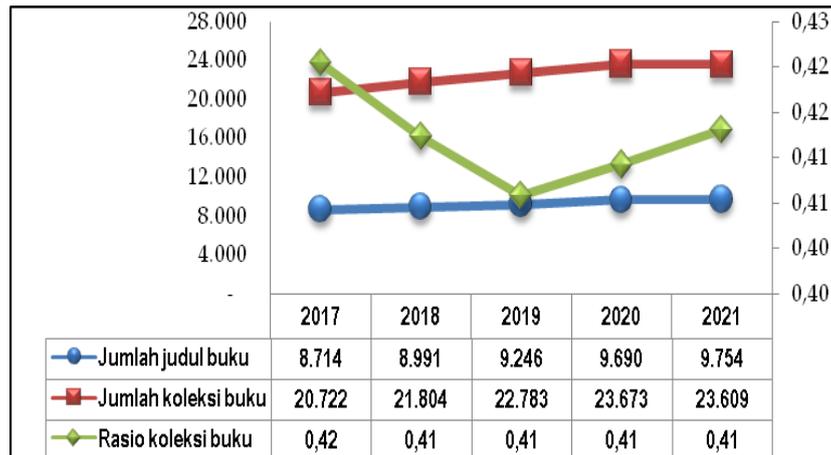
Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat di tahun 2021 mengalami penurunan dari 9.322 orang menjadi 1.517 orang dikarenakan pandemi Covid-19 dan ditutupnya perpustakaan daerah karena penataan gedung baru.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.58 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

Untuk meningkatkan kunjungan di perpustakaan, maka ketersediaan dan keragaman buku bacaan sangat menentukan. Sampai dengan tahun 2021 koleksi dan judul buku perpustakaan terus meningkat baik yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sendiri maupun bantuan dari provinsi dan pusat.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.59 Jumlah Judul Buku, Jumlah Koleksi Buku dan Rasio Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021

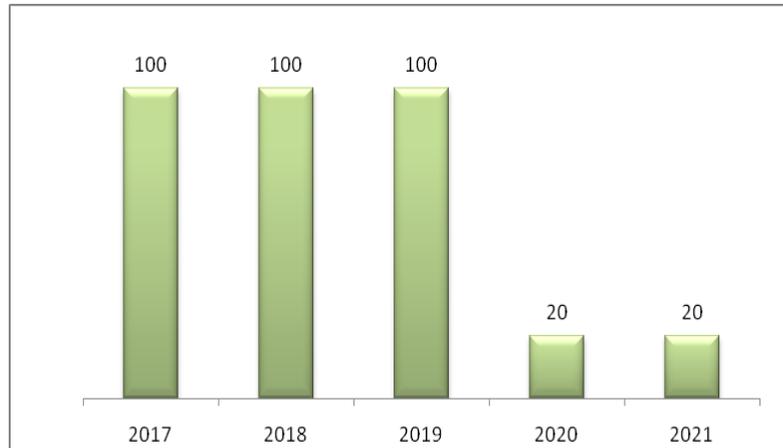
Dari koleksi buku perpustakaan daerah Kabupaten Bangka Barat baik dari jumlah judul maupun jumlah buku terjadi peningkatan disetiap tahunnya. Pada Tahun 2017, jumlah judul buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 8.714 judul buku dengan jumlah koleksi buku sebanyak 20.722 buku dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 9.754 judul buku dengan jumlah koleksi buku sebanyak 23.609 buku. Dilihat dari ketersediaan buku tersebut, diharapkan dapat memenuhi ketersediaan dan keberagaman jumlah dan koleksi buku bagi masyarakat.

Jika dilihat dari perkembangan teknologi di masyarakat, maka kebutuhan akan bahan baca dalam bentuk digital menjadi suatu keharusan. Dilihat ketersediaan koleksi bahan pustaka digital di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat, sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 177 koleksi *e-book*. Minimnya koleksi bahan pustaka digital tersebut disebabkan masih sulitnya pengadaan bahan pustaka digital serta minimnya sarana dan prasarana untuk alih media. Melihat kondisi tersebut, maka masih perlu dilakukan peningkatan pada koleksi bahan pustaka digital serta sarana dan prasarana untuk alih media.

24. Kearsipan

Dalam rangka pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2012 telah dibangun gedung *record center/depot* arsip untuk menyimpan/menyelamatkan dokumen arsip Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Untuk pencapaian pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah, Perangkat Desa dan Kelurahan dalam rangka

peningkatan aparatur pengelola kearsipan. Pada Tahun 2020 dan 2021 Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip secara baku mengalami penurunan menjadi 20 persen hal ini dikarenakan dari 10 perangkat daerah yang dilakukan pengawasan hanya 2 perangkat daerah yang menerapkan arsip menuju standar baku.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.60 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Produksi subsektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka Barat mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dengan sumberdaya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Diantara komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi antara lain adalah ikan kerapu, kakap merah, udang, cumi-cumi, sirip ikan, dan lain-lain. Selain potensi tangkapan di laut, potensi yang tak kalah besarnya adalah perikanan budidaya di sekitar pesisir, namun saat ini belum maksimal dikembangkan oleh masyarakat.

Peningkatan jumlah masyarakat nelayan dalam beberapa tahun terakhir cukup menjelaskan bahwa subsektor perikanan termasuk yang diminati masyarakat sebagai ladang usaha. Adanya sumber daya alam subsektor perikanan dan sumber daya manusia yang bergerak di subsektor tersebut selanjutnya masih memerlukan keterlibatan pemerintah daerah guna meningkatkan nilai tambah bagi perbaikan kehidupan nelayan dan perbaikan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Tabel 2.56 Jumlah Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

No.	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Muntok	1.219	1.264	1.321	1.321	1.442
2.	Simpangteritip	871	899	859	859	936
3.	Kelapa	380	380	335	335	292
4.	Tempilang	408	419	624	624	558
5.	Jebus	326	317	406	406	332
6.	Parittiga	712	751	899	899	920
	Jumlah	3.916	4.030	4.444	4.444	4.480

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bangka Barat, 2022.

Jumlah nelayan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terus meningkat, yaitu dari 3.916 orang di tahun 2017 menjadi 4.480 orang di tahun 2021 yang tersebar di setiap wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat. Kecamatan Muntok merupakan kecamatan dengan jumlah nelayan paling banyak, dan diikuti oleh Kecamatan Simpang teritip serta Kecamatan Parittiga.

Tabel 2.57 Jumlah Produksi Perikanan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 (ton)

No.	Jumlah Produksi Perikanan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Perikanan Tangkap	12.974	12.757	14.979	16.916,32	19.341,90	28.204,33
2.	Budidaya Air Tawar	25,40	28,04	65,25	90,33	105,81	95,09
3.	Budidaya Air Laut	857,90	259,76	286,24	460,98	823,31	991,95

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bangka Barat, 2022.

Dilihat perkembangannya selama 6 (enam) tahun terakhir, produksi perikanan di Kabupaten Bangka Barat masih sangat didominasi oleh perikanan tangkap. Selama tiga tahun terakhir jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya air laut (air laut dan payau) cenderung meningkat, sementara jumlah budidaya air tawar menurun di tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 28.204,33 ton, budidaya air tawar sebesar 95,09 ton dan budidaya air laut sebesar 991,95 ton.

Tabel 2.58 Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016 - 2021 (ribu rupiah)

No	Nilai Produksi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	239,730,420	449,026,800	547,851,080	591,662,000	632,902,236	961,499,853
2.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	597,830	635,060	1,696,699	2,291,137	2,747,875	2,492,565
3.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut	6,584,000	1,990,640	2,284,200	3,690,000	30,534,700	60,676,455

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bangka Barat, 2022.

Sejalan dengan produksi perikanan, nilai produksi perikanan selama beberapa tahun terakhir juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp961,499,853.000,00, budidaya air tawar sebesar Rp2.492.565.000,00 dan budidaya air laut sebesar Rp60.676.455.000,00.

Tabel 2.59 Jumlah Kapal Penangkapan Ikan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

No.	Jenis	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kapal Tanpa Motor	218	133	584	584	359
2.	Perahu Motor Tempel	1.684	1.650	1.960	1.960	689
3.	Kapal Motor	1.018	697	964	1.018	583

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bangka Barat, 2021.

Sarana penangkapan ikan pada tahun 2021 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan banyak nelayan yang menggunakan kapal untuk melaut dengan sistem pinjam dan sewa.

Jika dilihat dari prasarana bidang perikanan sampai dengan tahun 2021 seperti dermaga tambat perahu penangkap ikan rakyat di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 11 unit yang tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Sementara jumlah dermaga tambat kapal penangkap ikan rakyat sebanyak 1 unit dan tempat pelelangan ikan pada tahun 2021 sebanyak 1 unit di Kecamatan Muntok.

2. Pariwisata

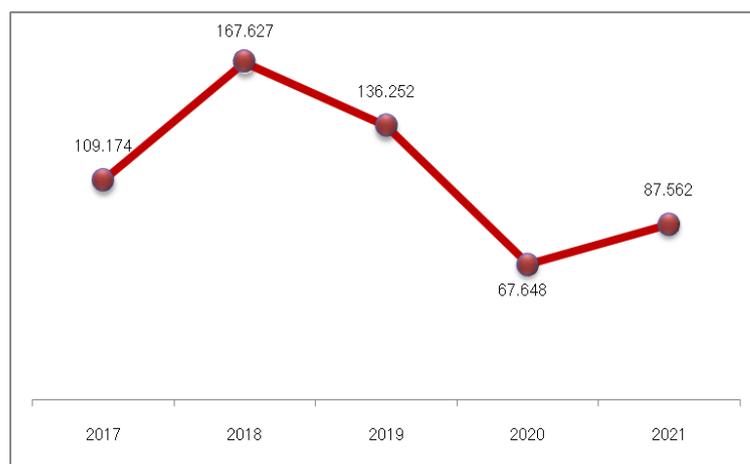
Berdasarkan data kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa potensi pariwisata dapat berkembang kedepannya jika dikelola dengan baik dan didukung penuh oleh sektor lainnya. Pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan pemasaran yang dilakukan secara luas dan terbuka dengan melibatkan para *stakeholder* pariwisata dapat memberikan peluang yang menjanjikan bagi perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat. Potensi daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat cukup beragam seperti wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan atau regulasi yang mendukung sektor pariwisata agar dapat mempertahankan jati diri /karakter lokal dengan melestarikan nilai-nilai sejarah dan tradisi khas Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.60 Daya Tarik Wisata Kabupaten Bangka Barat

Kecamatan	Alam, Pantai, dan Sungai	Alam/Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
Muntok	Pantai Baturakit Pantai Asmara Pantai Tanjung Kalian Pantai Tanjung Ular Pantai Tanah Merah Pantai Menggris	Batu Balai	Hutan Konservasi Menumbing Kapal Ashinagara Kapal SS Vyner Brooke Perkebunan Durian dan cempedak Karang Aji Karang Berang-Berang
Simpang Teritip	Pantai Aikemas Pantai Tungau		Perkebunan Durian Simpangteritip Hutan Cempedak Rakyat Simpangtiga
Jebus	Pantai Bembang Pantai Mentiba	Sumur Dewa Danau Sekar Biru Pulau Nenas	Perkebunan Durian Jebus
Kelapa		Air Panas Dendang	Perkebunan Kelapa Sawit Dendang
Tempilang	Pantai Pasir Kuning Pantai Kedacak		Perkebunan Kelapa Sawit Tempilang
Parittiga	Pantai Siangau Pantai Jebu Darat Pantai Jebu Laut Pantai Cupat Pantai Pala Pantai Bakit		Karang Malang Guntur Teluk Limau Karang Malang Doyang Teluk Limau Karang Malang Iyu eluk Limau

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2022.

Kontribusi dalam PDRB Kabupaten Bangka Barat untuk subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih sangat rendah, dimana tahun 2020 kontribusi subsektor ini sebesar 1,40 persen dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 1,32 dalam PDRB .



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.61 Jumlah Kunjungan Wisata
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

Dalam rangka mengakomodasi wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka Barat, maka ketersediaan hotel dan penginapan sangat penting. Sampai dengan tahun 2021, jenis hotel yang ada hanya hotel melati dengan jumlah 4 unit, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 10 unit. Sementara jumlah penginapan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 sebanyak 42 unit, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan jumlah 36 unit.

Tabel 2.61 Jumlah Hotel dan Penginapan
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

No	Jenis Hotel dan Penginapan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	*Hotel					
	Hotel Melati	12	12	12	10	4
2	** Penginapan Lainnya					
	a. Motel	12	0	0	0	0
	b. Bungalow	4	4	4	4	4
	c. Mess	13	13	13	13	-
	d. Home Stay	27	7	7	6	25
	e. Guest House	14	2	2	1	1
	f. Penginapan	12	12	12	12	12

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2022.

Meskipun daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat sangat beragam serta memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, namun sampai saat ini belum terkelola secara profesional dan belum memiliki infrastruktur yang memadai. Sebanyak 11 desa menjadi desa wisata berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang dimiliki oleh desa masing-masing serta telah terbentuknya kelompok sadar wisata (pokdarwis), karang taruna atau badan usaha milik desa (BUMDes). Desa wisata tersebut antara lain Desa Air Putih dengan potensi Pantai Tanjung Ular, Desa Air Belo dengan potensi Bukit Kukus, Desa Belo Laut dan Desa Bakit memiliki wisata andalan kuliner, Desa Tanjung Punai, Desa Kapit dan Desa Teluk Limau dengan potensi pantai dan mangrove, Desa Air Limau memiliki wisata edukasi berbasis lingkungan dan budaya, Desa Kelabat memiliki objek batu utama batu granit Belimbing, Desa Jebu Laut dan Desa Penganak dengan objek kawasan pantai. Kedepan perlu dilakukan pengembangan yang disinergikan dengan aspek pembangunan lainnya seperti aspek perekonomian dan sosial budaya serta aspek infrastruktur sarana prasarana seperti jalan dan fasilitas umum guna menunjang kepariwisataan.

Tabel 2.62 Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya pada Objek Wisata
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021

No.	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Objek Wisata Budaya	34	35	41	41
2	Objek Wisata Bahari	16	16	19	39
3	Objek Wisata Cagar Alam	0	0	0	0
4	Objek Wisata Pertanian	0	3	7	7
5	Objek Wisata Buru	0	0	0	0
6	Objek Wisata Alam	6	8	13	20
7	Objek Wisata Sejarah	10	10	12	17
8	Objek Wisata Religi	1	2	3	4
9	Objek Wisata Pendidikan	0	0	0	2
10	Objek Wisata Kuliner	0	0	0	6
11	Objek Wisata Belanja	0	0	0	7
12	Objek Wisata Buatan	0	2	5	4

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2022.

Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka Barat, maka diperlukan pemasaran yang tepat serta promosi wisata yang luas. Pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Biro Wisata namun hanya memiliki agen perjalanan wisata sebanyak 7 agen. Untuk ketersediaan pemandu wisata, sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat memiliki 10 orang pemandu wisata yang seluruhnya telah bersertifikat. Untuk mendukung kepariwisataan, pada tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat terdapat 2 toko cenderamata dan 7 pedagang cenderamata non toko.

Tabel 2.63 Usaha Jasa Makanan/Minuman Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

No.	Jenis	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Restoran	7	2	4	4	2
2	Jumlah Cafeteria/Cafe	12	13	12	12	12
3	Jumlah Kantin	1	1	1	1	1
4	Jumlah <i>Coffee Shop</i>	4	4	4	4	0
5	Jumlah Pub/Bar	1	1	1	1	0
6	Jumlah Warung/Kedai Makan	49	53	50	50	247

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2022.

Jumlah usaha jasa makanan/minuman di Kabupaten Bangka Barat seperti restoran, *coffee shop* dan bar mengalami penurunan dikarenakan oleh sepiunya pengunjung karena Pandemi Covid -19 sehingga pemilik usaha harus menutup usaha mereka.

Tabel 2.64 Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021

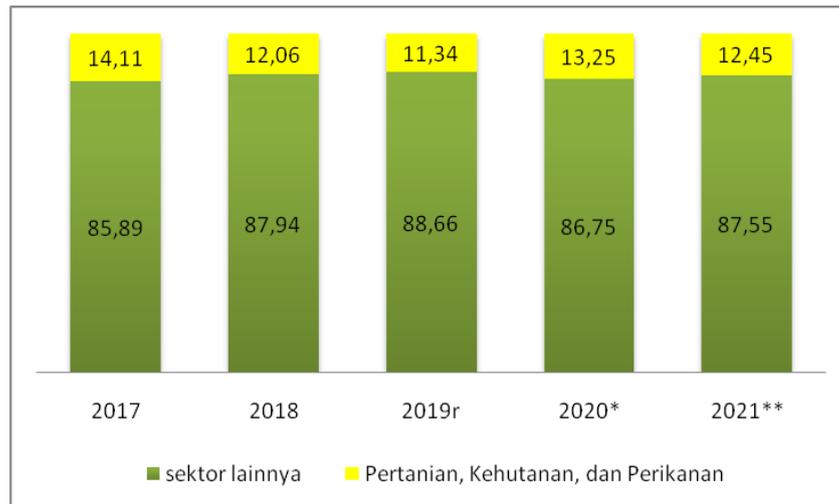
Tahun	Pajak Hotel (Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan/Hotel)	Pajak Restoran (Rumah Makan)	Pajak Hiburan (Pajak Pertandingan Olahraga)	Retribusi wisata dan rekreasi (Retribusi Izin tertentu)	Jumlah
2016	107.003.033,00	1.225.012.102,00	12.879.750,00	37.804.000,00	1.382.698.885,00
2017	108.295.589,00	1.908.482.123,70	34.286.000,00	120.018.000,00	2.171.081.712,70
2018	94.254.117,00	2.422.680.765,00	38.846.000,00	158.042.000,00	2.713.822.882,00
2019	96.795.137,00	2.114.418.273,00	22.235.100,00	160.100.000,00	2.393.548.510,00
2020	63.051.026,00	2.351.093.848,00	6.434.000,00	187.038.000,00	2.607.616.874,00
2021	58.074.135,00	2.499.623.400,00	2.036.000,00	155.518.000,00	2.715.251.535,00

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2022.

Penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2019 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp107.634.661,00, yang semula Rp2.607.616.874,00 menjadi Rp2.715.251.535,00. Peningkatan PAD sektor pariwisata pada Tahun 2021 dipengaruhi oleh pajak restoran (rumah makan) yang semula di Tahun 2020 sebesar Rp2.351.093.848,00 dan di tahun 2021 menjadi Rp2.499.623.400,00.

3. Pertanian

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian. Berdasarkan distribusi PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Bangka Barat, selama 5 (lima) tahun terakhir sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan telah bergeser menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kedepan jika dikelola dengan tepat dan optimal akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.

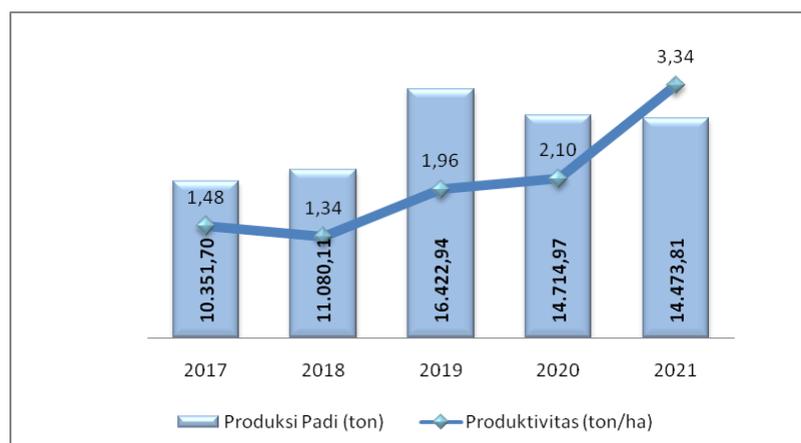


Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Gambar 2.62 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari 14,11 persen di tahun 2017 menjadi 12,45 persen di tahun 2021.

Sementara jika dilihat dari sisi produksi dan produktivitas, perkembangan statistik tanaman pangan di Kabupaten Bangka Barat khususnya padi selama 5 (lima) tahun berfluktuatif. Adanya dukungan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bagi petani untuk peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi serta meningkatnya pengetahuan petani tentang budidaya padi misalnya pengetahuan tentang aplikasi teknologi pertanian.



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.63 Jumlah Produksi (ton) dan Produktivitas (ton/ha) Padi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

Produktivitas beberapa tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Bangka Barat secara umum telah menunjukkan perkembangan yang positif dan cenderung

meningkat. Pada tahun 2021, produktivitas padi sebesar 3,34 ton/ha dengan jumlah produksi padi sebesar 14.473,81 ton.

Sementara jika dilihat dari infrastruktur pertanian, untuk irigasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat masih belum dapat difungsikan secara maksimal karena belum terbangun sistem pengairan persawahan masyarakat. Irigasi teknis sebagai saluran sekunder baik permanen maupun non permanen yang secara fungsional sudah siap di koneksikan dengan saluran tersier untuk pengairan sampai dengan Tahun 2020, dari total lahan sawah seluas 1.166 ha.

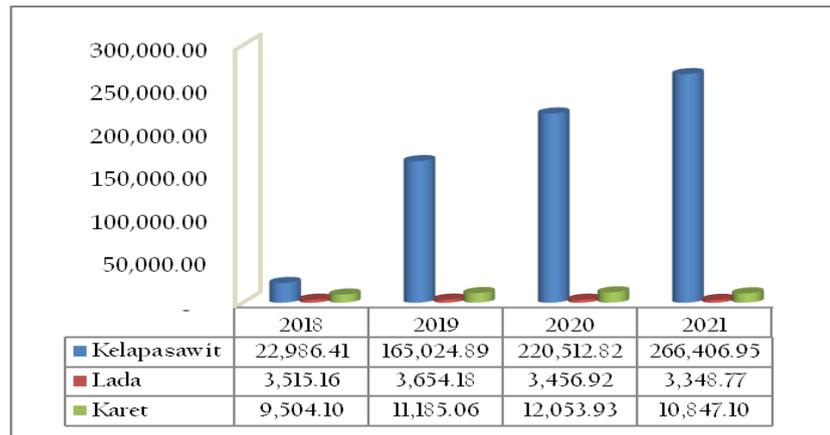
Tabel 2.65 Luas, Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Hortikultura
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2021

	Hortikultura	2016	2017	2018	2019	2021
A.	Luas Areal Hortikultura (Ha)	1.176,17	950,34	962,33	1.274,63	1.290,77
1.	Luas Areal Buah-Buahan	922,37	735,01	759,35	1.020,09	1.079,86
2.	Luas Areal Sayuran	253,8	215,33	202,98	254,54	210,91
B.	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)	3.913,16	8.647,50	8.005,95	3.648,70	11.084,82
1.	Jumlah Produksi Buah-Buahan	2.725,95	7.281,45	6.981,93	2.618,07	9.011,83
2.	Jumlah Produksi Sayuran	1.187,21	1.366,05	1.024,02	1.030,63	2.072,99
C.	Nilai Produksi Hortikultura	44.110.372.000,00	86.183.084.500,00	86.554.325.100,00	38.186.268.000,00	161.879.725.484,93
1.	Nilai Produksi Buah-Buahan	29.863.660.000,00	69.790.472.500,00	74.266.117.500,00	25.818.660.000,00	122.899.671.014,93
2.	Nilai Produksi Sayuran	14.246.712.000,00	16.392.612.000,00	12.288.207.600,00	12.367.608.000,00	38.980.054.470,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat, 2022.

Untuk lahan perkebunan rakyat, di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, peruntukan perkebunan rakyat dicadangkan seluas ± 14.331 ha dan untuk perkebunan besar seluas ± 41.860 ha. Jika dilihat dari eksisting perkebunan besar sampai saat ini seluas 37.111,66 ha yang telah digunakan oleh perusahaan besar sawit, maka sisa untuk perkebunan besar dari cadangan dalam RTRW adalah hanya seluas 4.748,34 ha sehingga tidak banyak lagi potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk perkebunan besar kecuali ada peralihan rencana/fungsi lahan dari RT/RW.

Komoditas perkebunan rakyat yang menjadi unggulan di Kabupaten Bangka Barat serta memiliki potensi antara lain adalah sawit, karet dan lada. Untuk potensi lada, meskipun Kabupaten Bangka Barat memiliki brand yang cukup terkenal yaitu “*Muntok White Pepper*”, namun sampai saat ini belum dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bertanam lada sehingga produksi lada masyarakat masih terbilang rendah.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.64 Produksi Tiga Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021 (ton)

Harga komoditas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan kenaikan. Beranjaknya kenaikan komoditi unggulan Kabupaten Bangka Barat membuat perekonomian petani semakin membaik. Rendahnya harga komoditi perkebunan lada dan karet menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021. Produksi komoditi yang rata-rata masih rendah disebabkan produktivitas akibat kualitas benih tidak baik, pengelolaan sistem usaha tani yang belum maksimal baik karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan petani maupun karena terbatasnya akses modal, kondisi tanaman yang sebagian besar baru memasuki fase mutasi ke Tanaman Menghasilkan, umur tanaman sudah tua, dan pengaruh perubahan iklim yang terjadi dimana musim panas cukup panjang.

Terkait peternakan, secara umum peternak di Kabupaten Bangka Barat adalah peternak sapi dan peternak kambing. Fokus dari perangkat daerah adalah pengembangan peternakan sapi guna memenuhi kebutuhan lokal yang sampai saat ini masih sangat tergantung dari wilayah sekitar. Secara umum peternak sapi di Kabupaten Bangka Barat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu peternak yang mulai dari pembibitan serta peternak yang fokus pada penggemukan daging.

Sebagian besar peternak yang ada di Kabupaten Bangka Barat merupakan peternak pemula, dimana terkadang pekerjaan sebagai peternak merupakan pekerjaan sampingan. Beberapa strategi telah dilakukan seperti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peternak dalam melaksanakan budidaya dan pemanfaatan teknologi serta memfasilitasi akses dukungan modal usaha dengan melakukan program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri,) Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dibidang Peternakan dengan tingkat suku bunga yang cukup rendah

yaitu 6 persen pertahun dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yang berguna untuk mengurangi tingkat resiko dalam pemeliharaan ternak sapi peningkatan kelahiran ternak.

Tabel 2.66 Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021

No	Jenis Ternak	2018		2019		2020		2021	
		Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)
1	Sapi	1.630	251.104	1.757	303.389	1.375	246.167	1.650	300.696
2	Kambing	392	12.536	367	10.563	517	12.384	556	17.078
3	Kerbau	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Domba	20	115	89	383	79	-	13	-
TOTAL		2.042	263.755	2.213	314.335	1.971	258.551	2.219	317.774

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat, 2022.

Pada tahun 2021, produksi daging sapi dan daging kambing mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu produksi daging sapi sebesar 22,15 persen dibanding tahun 2020 dan produksi daging kambing sebesar 37,90 persen. Secara umum, produksi daging ruminansia meningkat sebesar 22,90 persen di tahun 2021. Peningkatan produksi daging ruminansia disebabkan meningkatnya daya beli masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi daerah.

Tabel 2.67 Populasi dan Produksi Ternak Unggas
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

No	Jenis Ternak	2017		2018		2019		2021	
		Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)
1.	Ayam Petelur	8.502	26.826	11.361	32.757	4.300	34.276	59.844	18.259
2.	Ayam Pedaging	0	843.516	0	766.669	0	1.155.163	0	1.024.569
3.	Ayam Buras	166.105	39.077	145.974	55.771	120.029	71.220	122.949	64.827
4.	Itik	18.972	6.464	6.333	3.722	7.112	3.742	8.708	5.122
5.	Puyuh	0	0	125	82	1.495	59	2.066	155,98
TOTAL (Kg)		178.098	514.828	193.579	915.883	163.793	1.264.460	193.567	1.112.933

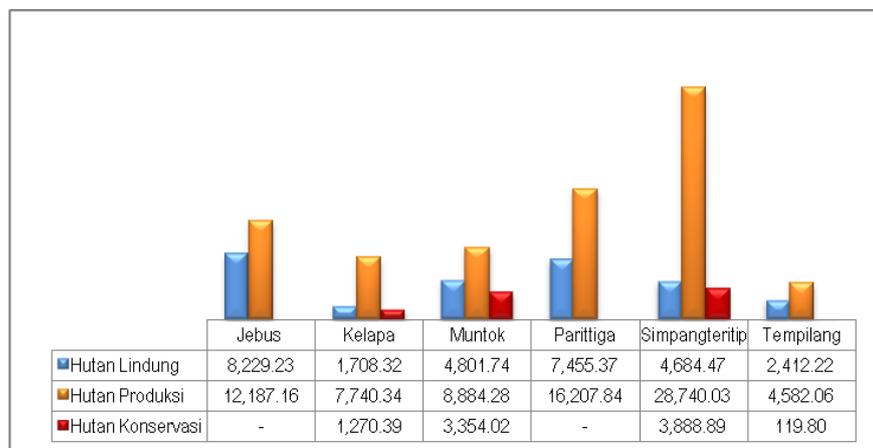
Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat, 2022.

Produksi ternak unggas di Kabupaten Bangka Barat didukung oleh beberapa jenis ternak yaitu ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Nilai produksi ternak unggas dihitung berdasarkan dengan harga rata-rata jenis unggas dalam satu tahun. Nilai produksi ternak unggas pada tahun 2021 adalah Rp40.069.128.400,00. Ternak unggas (non ruminansia) di Kabupaten Bangka Barat lebih didominasi oleh ayam pedaging.

4. Kehutanan

Meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan kawasan hutan, namun dengan potensi kehutanan yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pelaksanaan urusan kehutanan hanya difokuskan pada pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing seluas 3.333,19 ha. Namun demikian, Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi kehutanan yang dapat memberikan peran relatif besar dalam pembangunan, sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.



sumber: BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, 2020.

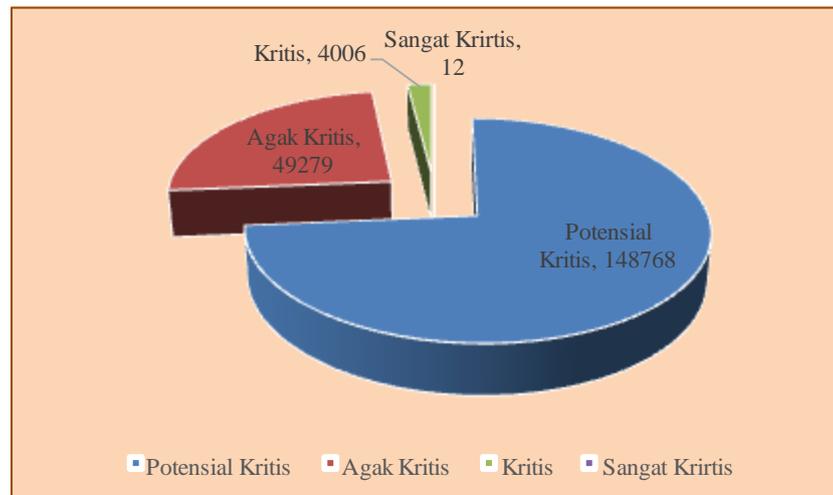
Gambar 2.65 Luas Kawasan Hutan per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

Luas keseluruhan kawasan hutan di Kabupaten Bangka Barat sekitar 116.245,33 ha. Kawasan ini terdiri dari hutan lindung seluas 29.291,35 ha, hutan produksi seluas 78.341,71 ha, dan hutan konservasi seluas 8.612,28 ha. Dari ketiga fungsi hutan yang ada di Kabupaten Bangka Barat tersebut, terdapat potensi kehutanan yang cukup besar dengan luasan hutan produksi seluas 78.341,71 ha.

Selain itu, guna mendukung fungsi ekologi dan pengawetan keanekaragaman hayati untuk menjaga lingkungan hidup, wilayah Kabupaten Bangka Barat juga didukung dengan keberadaan Hutan Konservasi yang di dalamnya terdiri dari Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Jering Menduyung, seluas 3.747,4 ha, Kawasan Hutan Tahura Menumbing seluas 3.333,20 ha, dan Taman Nasional Bukit Maras seluas 1.270,39 ha. Namun, tingginya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat tersebut juga dibarengi tingginya laju deforestasi. Berdasarkan data dari BPKH tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat memiliki laju deforestasi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Deforestasi di

kawasan hutan lindung mencapai luasan 164,90 ha dan di Hutan Produksi mencapai luasan 659,90 ha.

Disisi lain, berdasarkan data dari BPDAS HL Baturusa Cerucuk, kondisi lahan kritis secara keseluruhan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 mencapai luasan 202.065 ha. Lahan pada kategori kritis seluas 4.006 ha dan pada kategori sangat kritis seluas 12 ha. Adapun lahan yang potensial kritis seluas 148.768 ha dan agak kritis seluas 49.279 ha. Kondisi ini terjadi karena tidak sesuai penggunaan lahan dengan kemampuan lahan, sehingga menyebabkan kerusakan fisik, kimia maupun biologi. Meskipun demikian, faktor yang dominan penyebab lahan kritis di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar berasal dari aktivitas pertambangan.



sumber: BPDAS HL Baturusa Cerucuk, 2020

Gambar 2.66 Kondisi Lahan Kritis di Kabupaten Bangka Barat

Adapun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya di Kabupaten Bangka Barat, maka dibentuklah sistem perhutanan sosial. Sistem perhutanan sosial ini merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Kabupaten Bangka Barat terdapat 9 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terdiri dari 282 KK dengan 40 izin perhutanan sosial dan luas areal 930 ha.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalan pada PDRB Kabupaten Bangka Barat merupakan sektor yang cukup dominan, yaitu menempati urutan kedua setelah industri pengolahan. Bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Barat dan paling banyak dieksploitasi selama ini serta telah banyak diusahakan secara

besar-besaran adalah timah yang pengelolaannya selain oleh pemerintah juga dilakukan oleh penduduk setempat dan swasta.

Sesuai dengan kewenangan daerah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota hanya sebatas energi baru terbarukan yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Sampai saat ini di Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki sumber energi dari panas bumi yang dikelola/dimanfaatkan. Meskipun demikian, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk salah satu urusan yang juga harus diperhatikan dalam rangka pembangunan daerah berkelanjutan termasuk didalamnya adalah terkait penggunaan dan ketersediaan daya listrik.

Jaringan listrik di Kabupaten Bangka Barat sudah menjangkau 100 persen pedesaan di Kabupaten Bangka Barat. PLN Muntok di Kabupaten Bangka Barat melayani penyediaan kebutuhan listrik untuk para pelanggan PLN. Pelanggan PLN terdiri dari beberapa kategori besar, seperti rumah tangga, industri, dinas, instansi badan sosial, penerangan jalan, bisnis, dan layanan khusus.

Tabel 2.68 Jumlah Pelanggan PLN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2021

No	Uraian	Satuan	2020	2021
a.	Rumah Tangga	Pelanggan	60.880	63.483
b.	Industri	Pelanggan	59	78
c.	Dinas/Instansi/Gedung	Pelanggan	456	470
d.	Badan Sosial	Pelanggan	1.503	1.587
e.	Penerangan Jalan	Pelanggan	96	99
f.	Bisnis	Pelanggan	2.637	2.936
g.	Layanan Khusus	Pelanggan	95	91
Jumlah Pelanggan			65.726	68.744

sumber: Kabupaten Bangka Barat dalam Angka, 2022.

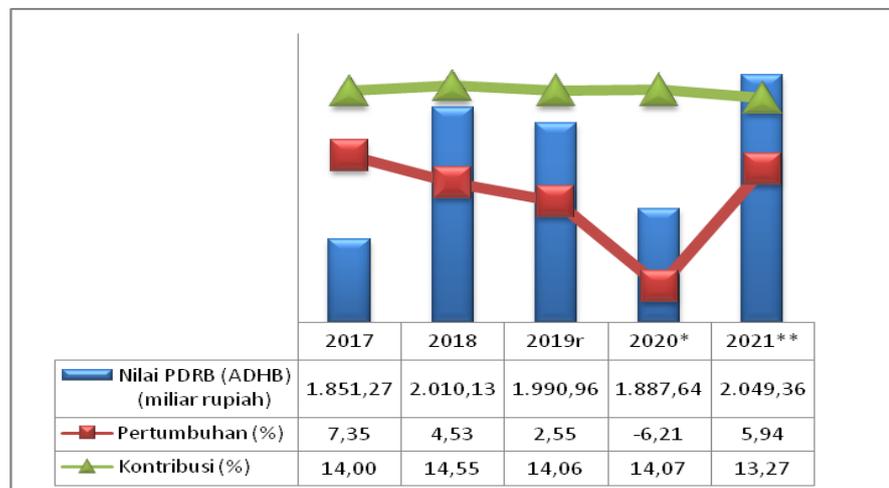
PT. PLN Persero di Kota Muntok menyajikan listrik kepada pelanggan hanya satu generator. Daya terpasang pada wilayah Kabupaten Bangka Barat adalah 103.528.150 kWh selama tahun 2021. Begitu pula dengan banyaknya produksi PLN oleh PLN Muntok sebesar 148.597.618 kWh. Persentase rumah tangga pengguna listrik yang merupakan persentase dari jumlah rumah tangga pengguna listrik dibandingkan dengan seluruh rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat mencapai 92,35 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir semua rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat menggunakan listrik. Jumlah yang berlangganan layanan penyediaan listrik terbesar porsinya adalah untuk rumah tangga yaitu 63.483

pelanggan, sedangkan proporsi yang paling kecil adalah untuk keperluan industri yaitu 78 pelanggan. Industri di Kabupaten Bangka Barat termasuk kecil.

6. Perdagangan

Sektor perdagangan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar.

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang sangat potensi terhadap hasil alam seperti komoditi timah, lada dan kaya dengan hasil laut dan hutannya. Pembangunan perdagangan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Selain itu, pembangunan perdagangan memberikan kontribusi pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Selama 5 (lima) tahun terakhir, di dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

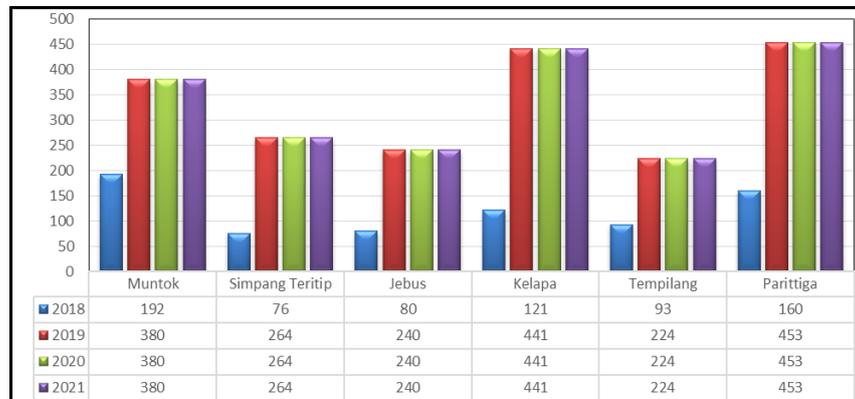


Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Gambar 2.67 Nilai, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021

Pasar memiliki peranan utama sebagai tempat transaksi perdagangan masyarakat. Pada tahun 2021, jumlah bangunan pasar tradisional sebanyak 19 bangunan, yang berada pada 9 (sembilan) lokasi pasar. Sebanyak 7 (tujuh) pasar berstatus aktif dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Pasar Muntok, Pasar Simpang Teritip, Pasar Kelapa, Pasar Parittiga, Pasar Jebus, dan Pasar Tempilang. Sementara 1 (satu)

pasar aktif dikelola oleh pemerintah desa yaitu Pasar Benteng Kota. Sedangkan pasar yang tidak aktif sebanyak 1 (satu) pasar yaitu Pasar Cupat. Sementara jumlah toko di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 sebanyak 2.002 toko.



Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.68 Jumlah Pertokoan di Kabupaten Bangka Barat per kecamatan Tahun 2018 – 2021

7. Perindustrian

Sektor industri pengolahan merupakan sektor utama pembentuk PDRB di Kabupaten Bangka Barat, yaitu dengan adanya keberadaan Pusat Metalurgi milik PT. Timah. Adapun sektor perdagangan, juga termasuk penyumbang peringkat keempat pada pembentukan PDRB daerah setelah sektor pertambangan dan galian serta sektor pertanian. Kondisi tersebut menegaskan bahwa perindustrian dan perdagangan merupakan motor penggerak ekonomi wilayah yang sangat vital di Kabupaten Bangka Barat. Saat ini industri dan perdagangan memberi kontribusi yang dominan dibandingkan sektor lain dengan pertumbuhan yang terlihat cukup stabil.

Sektor industri pengolahan perlu dikelola dengan optimal sehingga menjadi motor ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh, dapat memproduksi barang-barang bermutu, bernilai tambah tinggi, dan padat karya dengan tingkat keterampilan tinggi. Industri yang dapat dikembangkan antara lain: *home industry* seperti pembuatan terasi, akar bahar, songket cual, industri pengolahan lanjutan CPO, pasir kuarsa (*glass ware industry*), keramik (kaolin), serta *tin chemical* (industri hilir timah).

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga terus melakukan pembinaan dan pengembangan khususnya terhadap industri berskala kecil yang merupakan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

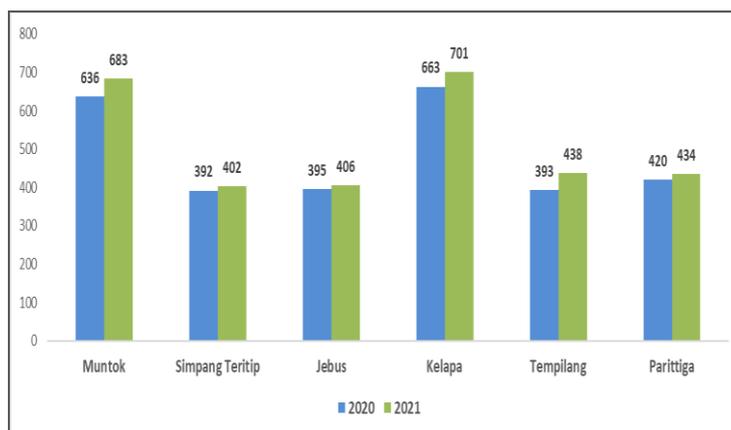
Selama lima (lima) tahun terakhir, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat. Pada tahun 2017 jumlah IKM di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.459 unit, dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 3.064 unit IKM. Meskipun demikian, jika dilihat dari pertumbuhan IKM selama 5 (lima) tahun terakhir terus terjadi penurunan dengan persentase pertumbuhan industri kecil di Tahun 2017 sebesar 7,43 persen menjadi 5,69 persen di Tahun 2021.

Dilihat dari sebaran IKM di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021, jumlah IKM terbanyak terdapat di Kecamatan Kelapa yaitu sebanyak 701 unit IKM dan yang terendah terdapat di Kecamatan Simpang Teritip dengan jumlah IKM sebanyak 402 unit.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.69 Jumlah dan Pertumbuhan IKM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.70 Jumlah Industri Kecil per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021

Untuk jumlah Industri sedang dan besar di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2021 sebanyak 8 unit, yaitu 2 unit industri sedang dan 6 unit industri besar. Jenis industri yang ada adalah industri pengolahan pangan berupa minyak kelapa

sawit dan air mineral serta industri galian bukan logam berupa batu bata merah dan Industri Baja/Pengolahan Logam berupa balok timah.

Tabel 2.69 Jumlah Industri Sedang dan Besar
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
Industri Sedang		
1.	Industri Pengolahan Pangan	
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	1
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	80
	- Jumlah Produksi (Ton)	1.169
2.	Industri Galian Bukan Logam	
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	1
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	40
	- Jumlah Produksi (Ton)	3
Industri Besar		
1.	Industri Pengolahan Pangan	
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	5
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	587
	- Jumlah Produksi (Ton)	182.449,80
2.	Industri Baja/Pengolahan Logam	
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	1
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	710
	- Jumlah Produksi (Ton)	30

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab.Bangka Barat, 2022.

8. Transmigrasi

Dalam rangka pelaksanaan urusan ketransmigrasian, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menetapkan beberapa wilayah sebagai daerah transmigrasi. Di dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat, wilayah yang dijadikan sebagai daerah pembangunan dan pengembangan transmigrasi berada di Kecamatan Jebus, Simpangteritip dan Kelapa.

Sampai dengan tahun 2020, wilayah yang dikembangkan untuk transmigrasi berlokasi di Kecamatan Jebus yaitu di Desa Jebus dengan luas wilayah transmigrasi ±161 ha. Penempatan transmigran di Kecamatan Jebus tahun 2020 sebanyak 80 keluarga transmigran. Dalam pengembangan transmigran, telah dilakukan pula pembangunan rumah sebanyak 80 unit dan saat ini sudah terisi semua oleh warga transmigran. Dalam rangka pelaksanaan dan penempatan transmigran, Kabupaten Bangka Barat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, dimana pembangunan kawasan berasal dari program Pemerintah Pusat sedangkan pemerintah daerah melakukan fasilitasi penempatan transmigran dan pendukung lainnya.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama tahun 2017-2021, perkembangan konsumsi akhir rumah tangga terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan). Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

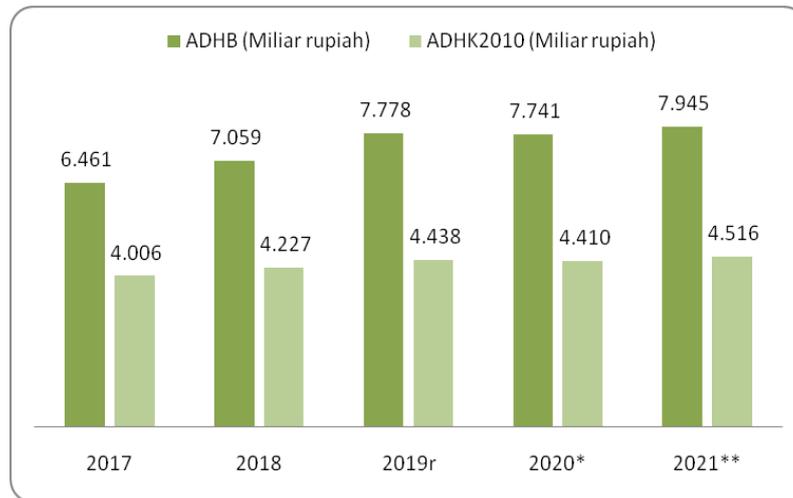


Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Keterangan: r) Angka revisi *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Gambar 2.71 Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 (persen)

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 48,87 persen meningkat hingga sebesar 51,44 persen pada tahun 2021. Meskipun peranan konsumsi rumah tangga cukup besar kontribusinya pada total PDRB. Namun, secara total pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan selama tahun 2017-2021 cenderung menurun dari 5,73 persen pada tahun 2017 menjadi 2,41 persen pada tahun 2021.



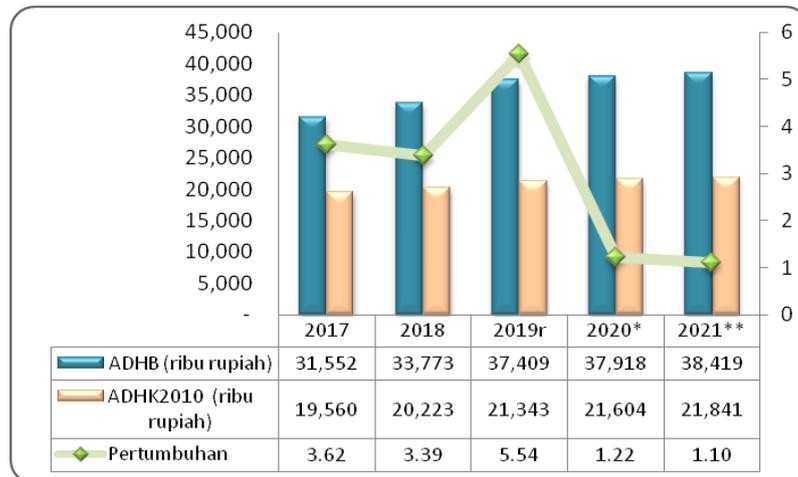
Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Keterangan: r) Angka revisi *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Gambar 2.72 Pengeluaran Konsumsi RT ADHB dan ADHK
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

Pengeluaran konsumsi per kapita baik atas dasar harga berlaku mau pun dasar harga konstan menunjukkan kecenderungan yang meningkat searah dengan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Secara nominal pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku pada tahun 2021 sebesar 7,94 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mencapai sebesar 7,74 triliun rupiah.

Rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Bangka Barat meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita berdasarkan PDRB ADHB konsisten terjadi selama tahun 2017 – 2021. Di tahun 2021, rata-rata konsumsi per kapita mencapai sebesar 38,41 juta rupiah. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022.

Keterangan: r) Angka revisi *) Angka sementara **) Angka sangat sementara.

Gambar 2.73 Rata-rata Konsumsi Per Kapita/Tahun (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhan Konsumsi Per Kapita (%) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

Secara rata-rata, struktur konsumsi akhir rumah tangga selama tahun 2016-2020 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan rokok. Peranan pengeluaran untuk konsumsi makanan, minuman, dan rokok menyumbang setengah dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan kisaran kontribusinya sebesar 48-69 persen. Pengeluaran untuk kelompok non makanan yang memiliki kontribusi cukup besar diantaranya perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga. Kelompok ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Sedangkan Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai indikator perubahan serta pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat.

Tabel 2.70 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Persentase)

No.	KELOMPOK KONSUMSI	2016	2017	2018r	2019*	2020**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	48,78	55,99	61,00	67,88	69,09
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,21	3,43	3,67	3,83	3,78
3	Perumahan, Perkakas, perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,37	19,70	21,86	24,04	24,90
4	Kesehatan dan Pendidikan	4,84	5,61	6,11	6,63	6,78
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15,75	17,17	18,58	20,07	17,97
6	Hotel dan Restoran	8,23	9,45	10,57	12,00	11,38
7	Lainnya	1,84	2,00	2,03	2,01	1,89
Konsumsi Rumah Tangga		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

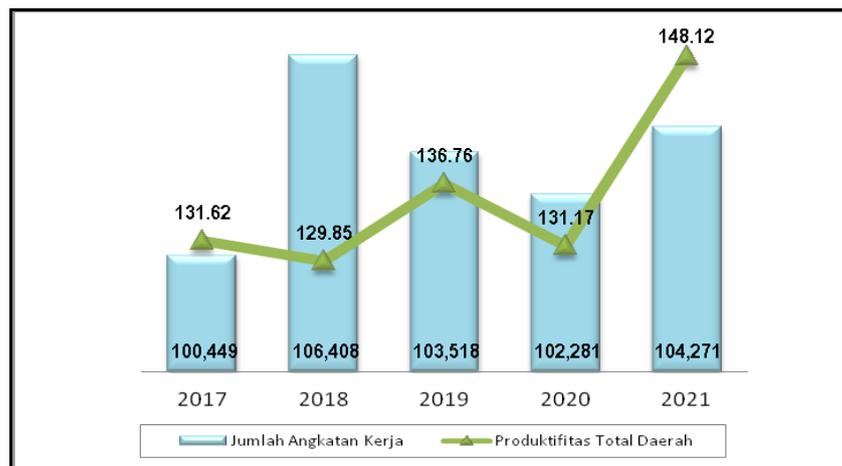
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021.

Keterangan: r) Angka revisi *) Angka sementara **) Angka sangat sementara.

2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas sektor PDRB per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah.

Produktivitas total daerah Kabupaten Bangka Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan data yang berfluktuatif namun dengan kecenderungan atau trend yang meningkat. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya nilai PDRB di setiap tahunnya dan meningkatnya jumlah angkatan kerja hampir di setiap tahunnya.



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Gambar 2.74 Produktifitas Total Daerah dan Jumlah Angkatan Kerja
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

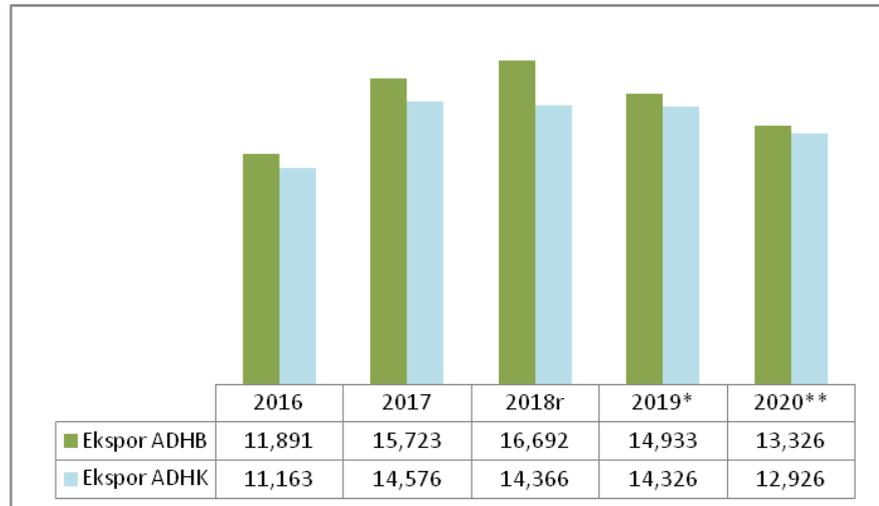
3. Ekspor dan Impor

Aktifitas jual beli barang antar wilayah telah ada sejak dahulu. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor impor.

Peranan ekspor terhadap pembentukan PDRB selama kurun waktu 2016-2020 pertumbuhan menunjukkan nilai positif. Hal ini disebabkan karena permintaan komoditi ekspor ke luar wilayah Kabupaten Bangka Barat cukup tinggi sehingga mendorong peningkatan ekspor. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan *volume* maupun harga.

Mengingat produk Kabupaten Bangka Barat tersebut tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka untuk memenuhinya didatangkan berbagai produk barang dan jasa yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain maupun kabupaten/kota lain yaitu sebesar 8.557 miliar rupiah pada tahun 2016, 12.601 miliar

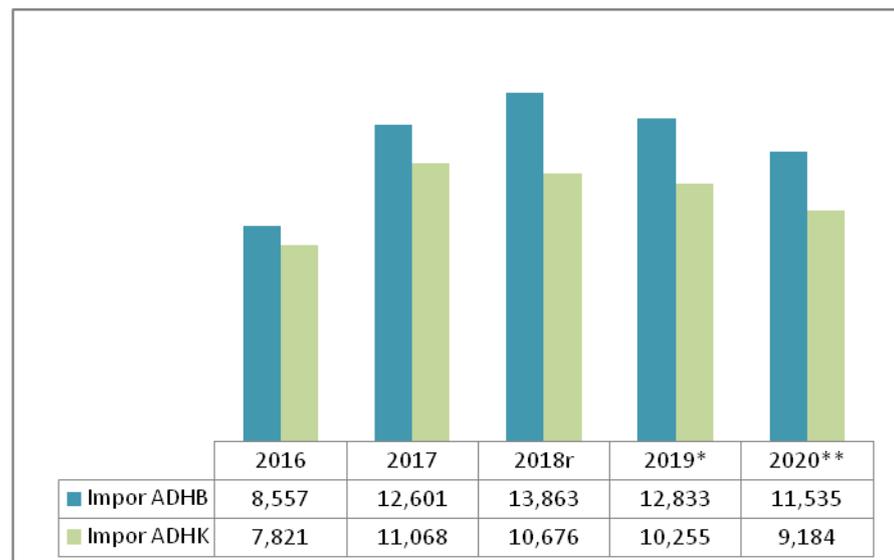
rupiah pada tahun 2017, 13.863 miliar rupiah pada tahun 2018, 12.883 pada tahun 2019 dan 11.535 pada tahun 2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021.

Keterangan: r) Angka revisi *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Gambar 2.75 Nilai Ekspor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021.

Keterangan: r) Angka revisi *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Gambar 2.76 Nilai Impor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas merupakan faktor utama guna menunjang pembangunan, baik dari sisi perekonomian maupun non perekonomian. Jarak tempuh yang jauh terkadang tidak menjadi persoalan yang utama, jika infrastruktur terpenuhi dengan kualitas yang baik. Jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar dan wajib yang harus dimiliki pada setiap wilayah dengan tipe jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan, antara lain jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.

Tabel 2.71 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang Jalan Total	898	898	898	898	898
2	Jumlah Motor*	120.526	128.184	131.740	155.565	144.423
3	Jumlah Mobil*	10.956	11.589	11.991	12.639	14.498
4	Jumlah Kendaraan*	131.482	139.773	143.731	168.204	158.291
Rasio Keseluruhan		1:146	1:156	1:160	1:187	1:176

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

*) Data yang membayar pajak

Jika dilihat dari nilai rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan masih terlihat normal. Secara rata rata dari 5 (lima) tahun terakhir, setiap kilometer panjang jalan berbanding dengan 165 kendaraan. Masih belum terlihat kemacetan, walau di daerah perkotaan baik pada jam sibuk. Apalagi dari data jumlah kendaraan yang ada, masih didominasi oleh kendaraan roda dua yaitu diatas 90 persen.

Pelengkap aksesibilitas daerah yang penting dimiliki oleh daerah lainnya yaitu adanya sarana dan prasarana untuk angkutan umum, menjadikan sektor transportasi di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam sektor strategis. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki satu pelabuhan penumpang, serta dua pelabuhan non penumpang, dan tiga buah terminal dengan sembilan jumlah trayek antar kota dalam provinsi.

Melalui sarana angkutan umum tersebut, mobilitas penumpang dan barang terjadi yang merupakan bagian dari perputaran ekonomi di Kabupaten Bangka Barat. Perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana pada sektor transportasi dilakukan untuk memperlancar mobilitas antar kecamatan, antar kota dalam provinsi maupun antar pulau seperti Bangka-Palembang.



Pergerakan penumpang lewat jalur bis mengalami peningkatan baik yang keluar maupun masuk ke Kabupaten Bangka Barat. Peningkatan penumpang yang datang ke Kabupaten Bangka Barat terlihat lebih stabil dan signifikan. Akan tetapi berbeda dengan pergerakan penumpang lewat jalur laut, dimana terjadi penurunan pada penumpang yang datang, sedangkan untuk penumpang yang berangkat mengalami kenaikan.

2. Penataan Wilayah

Di dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, dari Rencana Peruntukan seluas 285.100,90 ha, telah ditetapkan kawasan budidaya seluas 248.660,05 ha sebagai potensi pengembangan wilayah.

Kawasan peruntukan terkait potensi pengembangan wilayah antara lain :

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan luas ± 77.742 ha;
- b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan luas ± 2.050 ha;
- c. Kawasan Peruntukan Pertanian, yang terdiri atas :
 - 1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, disetiap kecamatan dengan total luas ± 15.812 ha, dari luas total tersebut ± 11.099 ha berada di kawasan hutan;
 - 2) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, disetiap kecamatan dengan total luas ± 1.598 ha;
 - Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas Kawasan peruntukan perkebunan besar, seluas ± 41.860 ha, dengan rincian:
 - a) Kecamatan Muntok seluas ± 5.903 ha;
 - b) Kecamatan Simpangteritip seluas ± 10.493 ha;
 - c) Kecamatan Jebus seluas ± 712 ha;
 - d) Kecamatan Kelapa seluas ± 10.421 ha;
 - e) Kecamatan Tempilang seluas ± 14.331 ha.
 - Kawasan peruntukan perkebunan rakyat, seluas ± 14.331 ha, dan dari luas total tersebut ± 166 ha berada di kawasan hutan produksi.
 - 3) Kawasan peruntukan peternakan, terdapat di Kecamatan Kelapa, Muntok dan Kecamatan Jebus seluas ± 72 ha.

3. Sarana dan Prasarana Pendukung

a) Fasilitas Bank

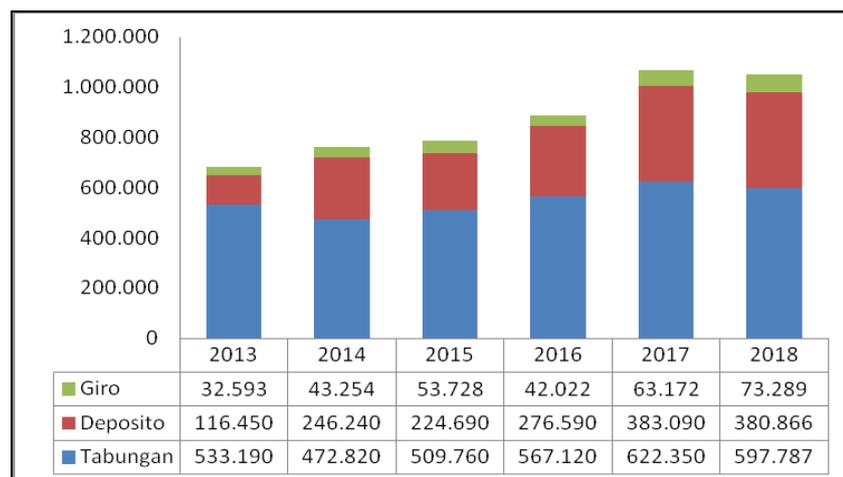
Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dan daerah dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan sangat bergantung pada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank.

Tabel 2.72 Jumlah Bank dan ATM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	Kecamatan	BANK	ATM
1.	Muntok	10	22
2.	Simpang Teritip	2	3
3.	Jebus	2	2
4.	Kelapa	4	5
5.	Tempilang	2	2
6.	Parittiga	6	11
Jumlah		24	45

Sumber : BP4D Kab.Bangka Barat, 2021

Banyaknya jumlah bank pada suatu daerah menunjukkan perputaran uang yang ada di daerah tersebut, sehingga dengan pengertian semakin banyak jumlah bank yang ada, maka semakin banyak perputaran uang yang ada di daerah tersebut. Dari 3 (tiga) jenis tabungan yang ada, jenis tabungan merupakan yang paling dominan yaitu selalu diatas 60 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir.



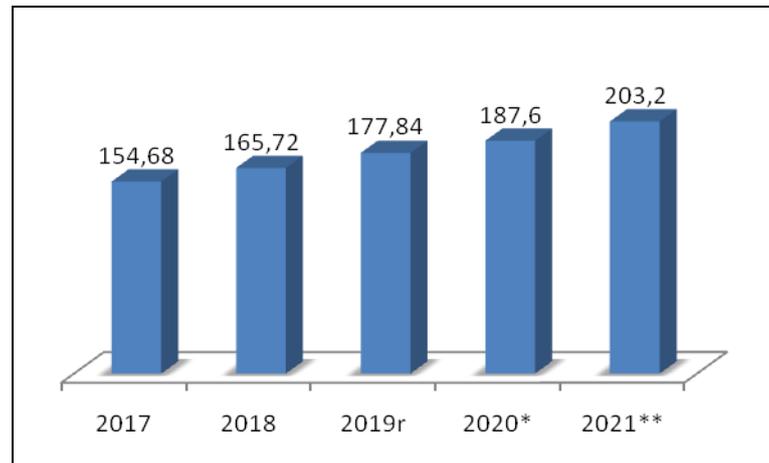
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019.

Gambar 2.77 Nominal Uang Terhimpun dari Pihak Ketiga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013-2018 (juta rupiah)

b) Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Perkembangan usaha restoran dan rumah makan di Kabupaten Bangka Barat dari sisi jumlah dapat dikatakan perkembangannya stagnan. Tidak ada penambahan jumlah restoran dan rumah makan dalam beberapa tahun terakhir.

Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan penyediaan makan minum dalam PDRB, rata-rata kenaikannya dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup signifikan.



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Gambar 2.78 Nilai Subsektor Makan Minum
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

c) Ketersediaan Penginapan

Perkembangan usaha penginapan dan hotel di Kabupaten Bangka Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan, walau belum optimal. Dari sisi sebaran, usaha penginapan dan hotel di Kabupaten Bangka Barat masih terfokus pada Kecamatan Muntok sebagai ibukota kabupaten.

Dalam rangka mengakomodasi wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka Barat, maka ketersediaan hotel dan penginapan sangat penting. Sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Bangka Barat tidak ada penambahan sarana akomodasi, tersedia hotel non bintang dengan jumlah 14 unit dan penginapan sebanyak 24 unit.

4. Komunikasi dan Informatika

a) Fasilitas Listrik

Listrik memegang peranan yang penting sekali dalam pembangunan, kegunaan dan intensitas penggunaan tenaga listrik bertambah luas, baik sebagai prasarana produksi maupun sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi rumah

tangga. Sebagai faktor produksi tersedianya tenaga listrik cukup menentukan laju kecepatan pembangunan sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pembangunan sektor-sektor ini sangat vital bagi tercapainya tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, mengubah struktur ekonomi dan lain-lain. Disamping itu tersedianya listrik dikalangan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.73 Jumlah Produksi Listrik dan Daya Terpasang pada PLN
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021

Tahun	Produksi Listrik (KWh)	Daya Terpasang (Kw)
2018	100.593.926	77.448.100
2019	108.474.685	82.827.300
2020	129.508.990	82.827.300
2021	148.597.618	103.528.150

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Pada Tahun 2021 PLN Muntok di Kabupaten Bangka Barat melayani penyediaan kebutuhan listrik untuk para pelanggan PLN. Pelanggan PLN sendiri terdiri dari beberapa kategori besar seperti rumah tangga, industri, dinas, instansi badan sosial, penerangan jalan, bisnis, dan layanan khusus. PT.PLN Persero menyajikan listrik kepada pelanggan dengan 1 generator saja. Untuk pelanggan rumah tangga, jumlah yang berlangganan layanan penyediaan listrik kepada 68.744 rumah tangga. Adapun kategori ini memiliki porsi pelanggan yang terbesar dibandingkan dengan kategori lain. Daya terpasang pada wilayah Kabupaten Bangka Barat adalah 103.528.150 KW selama tahun 2021. Begitu pula dengan banyaknya produksi PLN oleh PLN Mentok sebesar 148.597.618 KWh. Produksi listrik dan daya terpasang pada wilayah Kabupaten Bangka Barat setiap tahun terus bertambah guna memenuhi kebutuhan pelanggan.

b) Fasilitas Komunikasi

Fasilitas komunikasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat cukup baik, dimana hampir di keseluruhan wilayah memiliki jaringan telekomunikasi. Walaupun tingkat kualitas jaringan komunikasi di setiap wilayah berbeda, akan tetapi sudah menjangkau sampai pada level perdesaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 persentase penduduk berumur 5 (lima) tahun ke atas yang menggunakan Telepon Seluler (HP)/

Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet) di Kabupaten Bangka Barat sebesar 76,60 persen (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Barat, 2021).

2.1.4.3 Iklim Berinvestasi

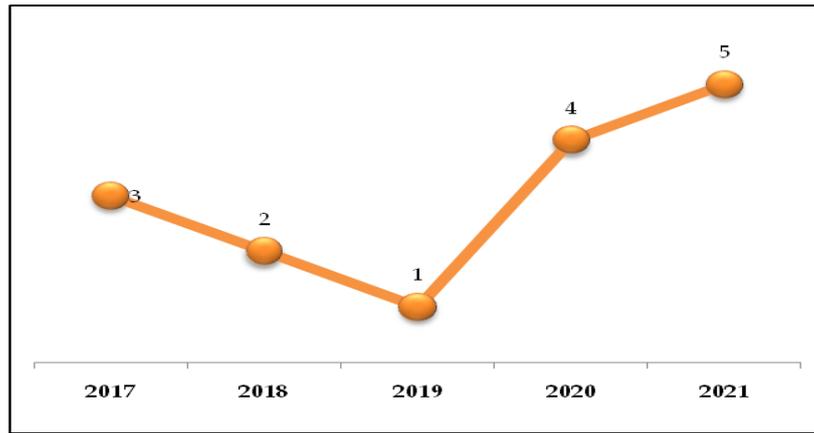
Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan meningkatkan perekonomian daerah serta sekaligus dapat mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Selain dari perhitungan secara bisnis, masuknya investor asing ke suatu wilayah juga sangat tergantung dari kondisi keamanan dan ketertiban serta politik dalam wilayah tersebut, khususnya terkait ketenagakerjaan. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investor di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : Keamanan dan Ketertiban, Perizinan, Insentif, dan Retribusi.

Kekurangan yang terjadi dalam iklim investasi di Kabupaten Bangka Barat adalah masih minimnya data yang berhubungan dengan potensi daerah serta belum disusunnya dokumen khusus terkait perencanaan terkait investasi sehingga daya tawar kepada para investor dirasa masih sangat minim.

1. Keamanan dan Ketertiban

Angka Kriminalitas mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Hal tersebut terkait investasi jangka panjang yang memerlukan modal yang cukup besar, sehingga kepastian akan keamanan sangatlah penting.

Semakin rendah jumlah demonstrasi pada suatu daerah, maka ketertarikan investor untuk menanam investasi di suatu daerah semakin tinggi, khususnya terkait persoalan ketenagakerjaan. Tingkat keamanan di suatu wilayah menjadi sangat penting bagi para investor, karena modal yang dikeluarkan untuk membangun aset dan menjalankan roda usaha sangat besar khususnya pada usaha yang berbasis padat modal. Data lengkap tentang jumlah demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Bangka Barat di sajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bangka Barat, 2022.

Gambar 2.79 Jumlah Demonstrasi
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

2. Perizinan

Masalah perizinan juga merupakan faktor penentu dalam peningkatan daya saing investasi daerah khususnya terkait kemudahan dalam proses administrasi perizinan.

Lama pengurusan, jumlah persyaratan dan biaya yang bervariasi sesuai dengan peraturan dan SOP masing-masing yang diharapkan menciptakan kemudahan dalam investasi di Kabupaten Bangka Barat.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas SDM berhubungan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang ada (permintaan pasar tenaga kerja). Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

Tabel 2.74 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

Tingkat Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Tidak/belum sekolah	49.627	49.476	50.882	54.028	33.803
Persentase Tidak/belum sekolah	25,76	25,11	25,68	26,42	16,39
Belum/tidak tamat SD	24.717	25.000	25.060	26.030	31.103
Persentase Belum/tidak tamat SD	12,83	12,69	12,69	12,73	15,08
Tamat SD	60.738	60.938	60.512	61.254	67.642



Tingkat Pendidikan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Persentase Tamat SD	31,53	30,92	30,54	29,95	32,80
Tamat SMP	22.969	24.366	24.565	25.030	31.808
Persentase Tamat SMP	11,92	12,36	12,40	12,24	15,42
Tamat SMA	28.380	30.496	30.223	30.957	34.369
Persentase Tamat SMA	14,73	15,48	15,25	15,14	16,66
Diploma I/II/III	2.747	2.824	2.808	2.814	2.805
Persentase Diploma I/II/III	1,43	1,43	1,41	1,38	1,36
S1/DIV	3.360	3.875	3.945	4.306	4.603
S2	85	88	90	103	108
S3	3	3	3	5	5
Persentase minimal S1	1,79	2,01	2,03	2,11	2,23
Total	192.626	197.066	198.088	204.527	206.246

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka Barat, 2022.

Dari data diatas, pada tahun 2021 rata-rata jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tiga terbesar adalah penduduk tamatan SD (32,80 persen), tidak/belum sekolah (16,39 persen) dan tamat SMA (16,66 persen). Terlihat sangat jelas bahwa tingkat pendidikan sebagian besar penduduk di Kabupaten Bangka Barat masih sangat minim. Dilihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Barat di sisi tenaga kerja masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dibawah Diploma.

Dengan kondisi pendidikan penduduk tersebut, sering kali peluang kerja yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang membutuhkan pendidikan yang cukup tinggi, kesempatan tersebut banyak diambil oleh penduduk luar Kabupaten Bangka Barat. Melihat kondisi tersebut pemerintah daerah harus segera mengambil strategi yang tepat untuk memperkuat daya saing penduduk, baik peningkatan keahlian dengan pelaksanaan pendidikan non formal yang saat ini sering dibutuhkan maupun membuka sekolah kejuruan yang berpotensi untuk mengelola kekayaan lokal yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

2. Tingkat Ketergantungan

Rata-rata rasio ketergantungan Kabupaten Bangka Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 48,19 persen yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (umur 15–64 tahun) menanggung \pm 50 penduduk yang tidak produktif (umur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Untuk lebih detail terkait data rasio ketergantungan di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.75 Rasio Ketergantungan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
0 – 14 Tahun	51.064	56.245	57.665	57.074	56.552
65 Tahun keatas	8.850	8.641	9.048	9.536	10.279
Penduduk Usia Tidak Produktif	59.914	64.886	66.713	66.610	66.831
Penduduk Usia produktif	132.712	132.180	131.375	137.917	139.415
Rasio Ketergantungan	45,15	49,09	50,78	48,30	47,94
< 15 Tahun	38,48	42,55	43,89	41,38	40,56
> 65 Tahun	6,67	6,54	6,89	6,91	7,37

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka Barat, 2022.

Rasio ketergantungan di tiap tahunnya selalu mengalami perubahan walaupun tidak terlalu signifikan. Rata-rata rasio ketergantungan dalam lima tahun terakhir yaitu 50, yang secara umum disimpulkan bahwa 2 (dua) orang produktif menanggung 1 (satu) orang yang tidak produktif.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan subkegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 49 Tahun 2019 tertanggal 28 Juni 2019. Sejalan dengan perubahan perkembangan pembangunan di tahun 2020, dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 52 Tahun 2020 tertanggal 6 Agustus 2020. RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2019 yang selanjutnya diubah melalui Perubahan APBD Tahun 2020 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan harapan akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020 dilakukan hanya terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang berasal dari belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2020 serta perubahan penjabaran APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 517.135.137.869,00,00 yang terdiri dari 309 program dan 1.458 kegiatan termasuk program dan kegiatan rutin di masing-masing perangkat daerah. Program dan kegiatan dilaksanakan oleh 30 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.76 Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2020 dengan Perubahan APBD Tahun 2020

No.	Uraian	Perubahan RKPD	Perubahan APBD	Selisih
1.	Jumlah Anggaran Belanja Langsung	490.984.762.144,00	517.135.137.869,00	26.150.375.725,00
2.	Jumlah Program	309	309	-
3.	Jumlah Kegiatan	1.454	1.458	4

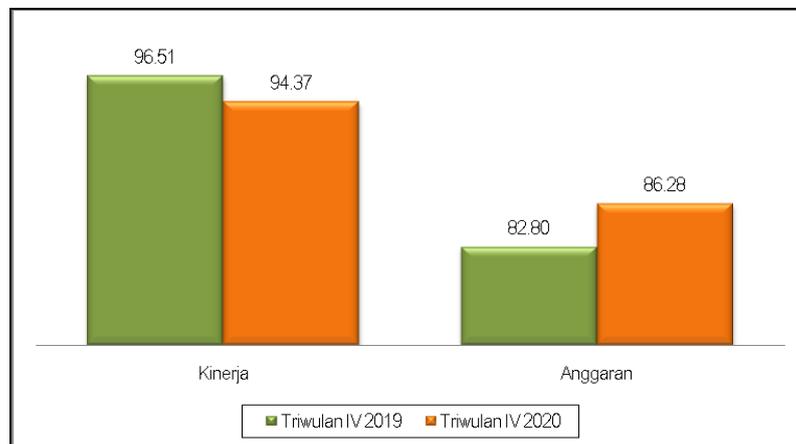
Jika dibandingkan dengan Perubahan RKPD Tahun 2020, setelah ditetapkan menjadi APBD terjadi perubahan pada total anggaran belanja langsung dengan selisih sebesar Rp 26.150.375.725,00. Selisih pada total belanja langsung tersebut karena adanya pembahasan pada saat penyusunan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2020. Pada jumlah program tidak terdapat perbedaan antara Perubahan RKPD Tahun 2020 dengan Perubahan APBD Tahun 2020 (konsisten), sementara pada jumlah kegiatan terdapat selisih sebanyak 4 kegiatan setelah dilakukan pembahasan pada saat penyusunan Perubahan KUA/PPAS Tahun 2020.

Rangkuman evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 adalah :

- Total anggaran belanja langsung Tahun 2020 adalah Rp. 517.135.137.869,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 423.544.686.525,79 atau 81,90 persen dengan kriteria Tinggi;
- Total rata-rata capaian kinerja RKPD Tahun 2020 sebesar 94,37 persen dengan kriteria Sangat Tinggi;
- Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD Tahun 2020 sebesar 86,28 persen dengan kriteria Tinggi;
- Total rata-rata capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2020 sebesar 96,40 persen dengan kriteria Sangat Tinggi;
- Total rata-rata capaian realisasi anggaran RPJMD sampai dengan Tahun 2020 sebesar 64,75 persen dengan kriteria Rendah;
- Pada laporan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang disampaikan ke Bappelitbangda sebagai bahan penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD masih terdapat program, kegiatan serta satuan target Renstra yang belum selaras dengan program,

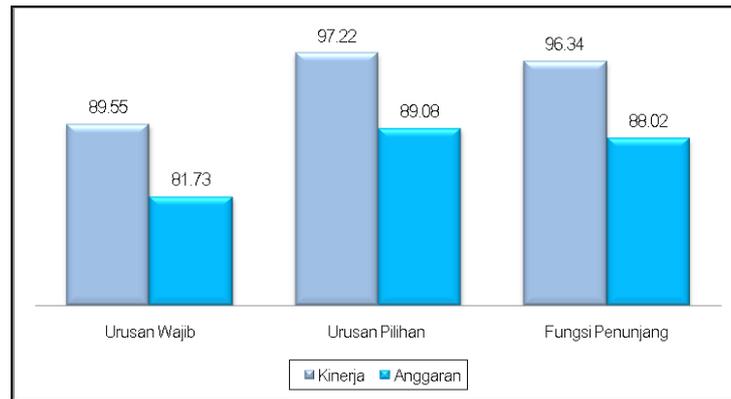
kegiatan serta satuan target Renja dan APBD Tahun 2020, sehingga capaian kinerja RKPD dan RPJMD belum dapat dihitung dengan tepat.

- g. Terdapat evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang target dan realisasi kinerja kegiatan yang belum terisi baik pada target renstra maupun realisasi sampai dengan tahun sebelumnya serta realisasi kinerja kegiatan pada tahun evaluasi, sehingga menyebabkan capaian kinerja Renja dan Renstra belum dapat dihitung dengan tepat;
- h. Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV di tahun 2019, maka rata-rata capaian di tahun 2020 sampai dengan Triwulan IV untuk rata-rata realisasi kinerja lebih rendah dan untuk rata-rata realisasi anggaran lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Capaian pada Triwulan IV di tahun 2019 untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 96,51 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 82,80 persen. Sementara di tahun 2020, sampai dengan Triwulan IV untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 94,37 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 86,28 persen.



Gambar 2.80 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran
Tahun 2019 dan 2020

- i. Jika dilihat dari capaian urusan, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020, untuk urusan wajib rata-rata realisasi kinerja sebesar 89,55 persen dan keuangan sebesar 81,73 persen. Untuk Urusan Pilihan, rata-rata realisasi kinerja sebesar 97,22 persen dan keuangan sebesar 89,08 persen. Sementara untuk Fungsi Penunjang di Triwulan IV, rata-rata realisasi kinerja sebesar 96,34 persen dan keuangan sebesar 88,02 persen. Capaian pada Urusan Pilihan merupakan capaian tertinggi jika dibandingkan dengan pencapaian pada Urusan Wajib dan Fungsi Penunjang.



Gambar 2.81 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD
Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2020

j. Secara umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 terdapat kendala dan permasalahan antara lain:

- Masih terbatasnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
- Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan belum digunakan secara maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- Terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga dilakukan pergeseran dan pengurangan anggaran untuk pembiayaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Kejadian Pandemi Covid-19 juga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun yang melibatkan perkumpulan orang.

Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020 per urusan pemerintahan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.77 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPd Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2020	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN RKPd SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)		TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Urusan Wajib							
1.	Pendidikan	9	74	97,92	89,50	60,72	60,44	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Kesehatan	21	91	94,08	85,08	81,44	134,23	Dinas Kesehatan dan RSUD Sejiran Setason
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15	47	90,00	84,94	79,92	39,7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	7	34	95,70	91,49	57,36	50,95	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15	72	88,05	81,66	61,66	62,84	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
6.	Sosial	7	42	100,00	90,70	58,75	66,76	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Tenaga Kerja	3	6	100,00	97,01	80,24	21,76	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5	90,67	87,80	51,6	33,33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Pangan	2	8	100,00	87,69	63,08	40,34	Dinas Pertanian dan Pangan
10.	Pertanahan	1	3	56,10	47,17	36,5	31,34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Lingkungan Hidup	9	38	87,26	83,78	42,91	43,87	Dinas Lingkungan Hidup



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2020	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)		TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	35	96,37	87,14	61,3	67,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	9	89,29	77,44	52,91	44,78	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	53	93,81	91,82	59,86	45,2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Perhubungan	2	9	100,00	90,99	59,43	45,79	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	6	32	95,02	81,61	57,61	42,41	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi dan UKM	8	36	100,00	94,35	36,49	36,01	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
18.	Penanaman Modal	6	28	100,00	95,21	71,21	60,38	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19.	Kepemudaan dan Olahraga	5	7	70,00	65,78	61,52	29,02	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20.	Statistik	2	4	100,00	76,52	56,76	12,6	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian	1	1	100,00	82,79	59,28	6,79	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Kebudayaan	3	7	100,00	89,00	57,04	31,68	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Perpustakaan	4	26	94,45	91,65	58,89	61,73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Kearsipan	2	2	100,00	86,86	79,11	64,12	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Urusan Pilihan								
1.	Kelautan dan Perikanan	6	31	100,00	97,32	40,12	38,24	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Pariwisata	6	34	100,00	87,21	85,31	56,97	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2020	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)		TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020 (%)		PERANGKAT DAERAH
				REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Pertanian	16	52	99,99	87,68	49,31	33,66	Dinas Pertanian dan Pangan
4.	Kehutanan	0	0	-	-	60	34,22	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
6.	Perdagangan	3	5	100,00	90,54	47,71	63,33	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.	Perindustrian	5	7	83,33	75,13	54,14	31,02	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
8.	Transmigrasi	1	2	100,00	96,62	47,85	44,28	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Fungsi Penunjang							
1.	Kesekretariatan	24	134	95,90	82,13	91,95	72,23	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
2.	Pengawasan	5	38	104,00	91,49	77,74	64,5	Inspektorat Daerah
3.	Perencanaan Pembangunan	9	58	96,39	86,66	54,11	46,59	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.	Penelitian dan Pengembangan	1	3	84,55	70,28	87,25	30,89	
5.	Kepegawaian	6	46	95,13	82,92	79,75	64,76	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiain Daerah
6.	Pengelolaan Keuangan	10	119	97,62	90,09	92,18	66,68	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7.	Kewilayahan	63	260	96,94	92,74	102,71	112,83	Dilaksanakan oleh 6 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Tempilang

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2020



2.2.2. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2020 tertanggal 07 Juli 2020. Sejalan dengan perubahan perkembangan pembangunan di tahun 2021, dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 28 Tahun 2021 tertanggal 02 Agustus 2021. RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 yang selanjutnya diubah melalui Perubahan APBD Tahun 2021 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2021. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan harapan akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2021 dilakukan hanya terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang berasal dari belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2021 serta perubahan penjabaran APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 925.663.668.154,27 yang terdiri dari 167 program, 377 Kegiatan, dan 1.085 Subkegiatan termasuk program dan kegiatan rutin di masing-masing perangkat daerah. Program dan kegiatan dilaksanakan oleh 30 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Tabel 2.78 Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja, Program dan Kegiatan antara Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan Perubahan APBD Tahun 2021

No.	Uraian	Perubahan RKPD	Perubahan APBD	Selisih RKPD dengan APBD
1.	Jumlah Anggaran Belanja	941.302.441.604,77	947.015.149.144,24	5.712.707.539,47
2.	Jumlah Program	163	173	10
3.	Jumlah Kegiatan	387	399	12
4.	Jumlah Subkegiatan	1.118	1.151	33

Jika dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021, setelah ditetapkan menjadi APBD terjadi perubahan pada total anggaran belanja dengan selisih sebesar Rp5.712.707.539,47. Selisih pada total belanja tersebut karena adanya pembahasan pada saat penyusunan Kebijakan Umum



Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2021 baik ditingkat eksekutif maupun ditingkat legislatif.

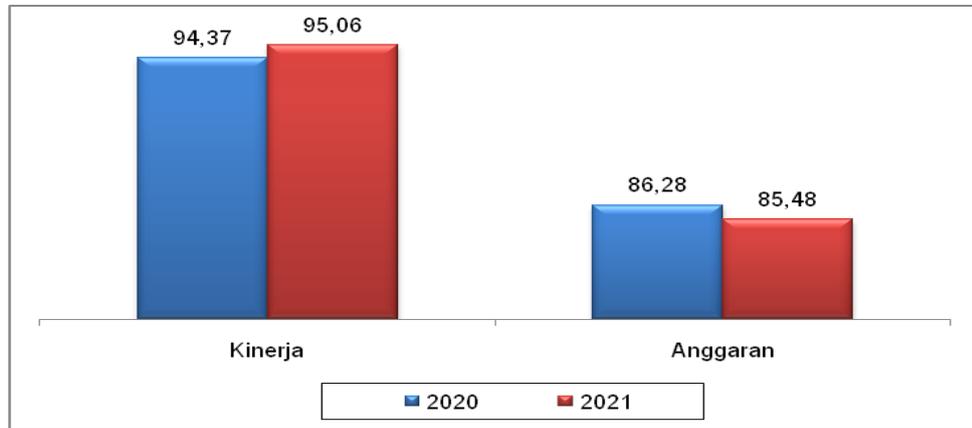
Pada jumlah program terdapat selisih antara Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan Perubahan APBD Tahun 2021 sebanyak 10 program, pada jumlah kegiatan terdapat selisih sebanyak 12 kegiatan, sementara pada subkegiatan terdapat selisih sebanyak 33 subkegiatan yang secara umum merupakan program, kegiatan dan subkegiatan yang bertambah setelah dilakukan pembahasan KUPA Tahun 2021.

Dengan dilakukannya evaluasi terhadap hasil RKPD diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi BP4D selaku perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah yang membidangi penganggaran untuk mengevaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan perangkat daerah dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran untuk periode berikutnya.

Rangkuman evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah :

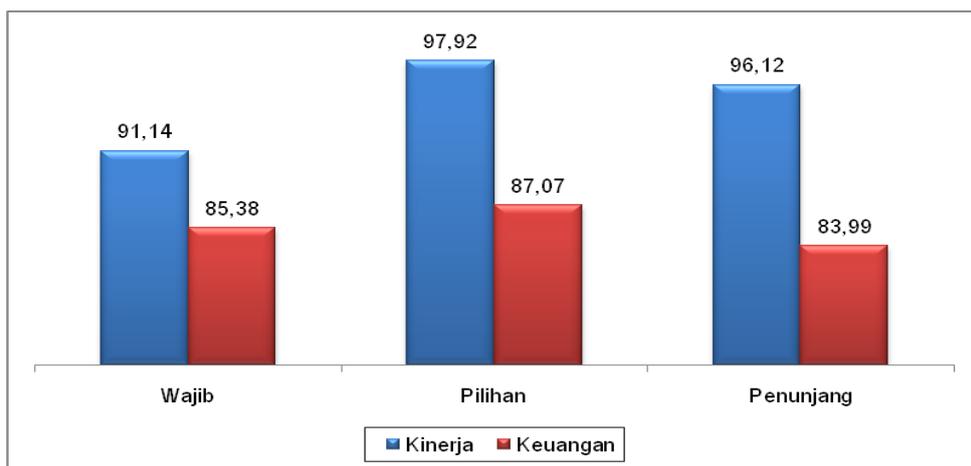
- a. Untuk penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 hanya dilakukan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2021, tidak dibandingkan dengan target RPJMD/Renstra karena terjadinya perubahan nomenklatur program dan kegiatan.
- b. Total anggaran belanja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV adalah Rp.947.015.149.144,24 dengan total realisasi anggaran s.d Triwulan IV sebesar Rp. 814.298.456.353,03 atau 85,99 persen dengan kriteria Tinggi;
- c. Total rata-rata capaian kinerja RKPD s.d. Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 95,06 persen dengan kriteria Sangat Tinggi;
- d. Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD s.d. Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 85,48 persen dengan kriteria Tinggi;
- e. Dikarenakan tidak bisa membandingkan capaian Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD, maka untuk melihat capaian kinerja RPJMD digunakan evaluasi hasil RKPD sampai dengan Tahun 2020;
- f. Total rata-rata capaian kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020 sebesar 67,40 persen dengan kriteria Sedang;
- g. Total rata-rata capaian realisasi anggaran RPJMD Tahun 2020 sebesar 56,89 persen dengan kriteria Rendah;
- h. Pada laporan evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan Tahun 2020 masih terdapat program, kegiatan serta satuan target Renstra yang belum selaras dengan program, kegiatan serta satuan target Renja dan APBD Tahun 2020, sehingga capaian kinerja RKPD dan RPJMD belum dapat dihitung dengan tepat;

- i. Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV di tahun 2020, maka rata-rata capaian di tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV untuk rata-rata realisasi kinerja lebih tinggi, sementara untuk rata-rata realisasi anggaran lebih rendah. Capaian pada Triwulan IV di tahun 2021 untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 95,06 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 85,48 persen;



Gambar 2.82 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 dan 2021

- j. Jika dilihat dari capaian urusan, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, untuk urusan wajib rata-rata realisasi kinerja sebesar 91,14 persen dan keuangan sebesar 85,38 persen. Untuk Urusan Pilihan, rata-rata realisasi kinerja sebesar 97,92 persen dan keuangan sebesar 87,07 persen. Sementara untuk Fungsi Penunjang di Triwulan IV, rata-rata realisasi kinerja sebesar 96,12 persen dan keuangan sebesar 83,99 persen. Pada triwulan IV, capaian kinerja tertinggi adalah pada fungsi pilihan dan capaian anggaran tertinggi pada urusan pilihan;



Gambar 2.83 Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2021

Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2021 per urusan pemerintahan sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 2.79 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPd Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPd TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Wajib												
1.	Pendidikan	2	10	51	93,47	92,45	ST	ST	60,72	60,44	R	R	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Kesehatan	5	18	65	76,71	61,62	T	R	81,44	134,23	T	ST	Dinas Kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	16	44	96,55	94,36	ST	ST	79,92	39,7	T	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	9	25	84,42	78,99	T	T	57,36	50,95	R	R	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	9	23	59	97,78	94,67	ST	ST	61,66	62,84	R	R	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
6.	Sosial	4	10	28	99,41	79,47	ST	T	58,75	66,76	R	S	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Tenaga Kerja	4	8	26	95,28	88,28	ST	T	80,24	21,76	T	SR	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5	5	90,00	85,00	ST	T	51,6	33,33	R	SR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Pangan	4	10	28	100,00	89,13	ST	T	63,08	40,34	R	SR	Dinas Pertanian dan Pangan
10.	Pertanahan	1	1	1	0,00	0,00	SR	SR	36,5	31,34	SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Lingkungan Hidup	7	12	29	100,21	94,13	ST	ST	42,91	43,87	SR	SR	Dinas Lingkungan Hidup



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	35	82,67	91,03	T	ST	61,3	67,66	R	S	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	4	10	100,00	97,27	ST	ST	52,91	44,78	R	SR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	12	43	98,24	93,53	ST	ST	59,86	45,2	R	SR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Perhubungan	1	2	2	100,00	99,14	ST	ST	59,43	45,79	R	SR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	3	8	30	97,33	90,62	ST	ST	57,61	42,41	R	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi dan UKM	5	10	27	86,34	85,11	T	T	36,49	36,01	SR	SR	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
18.	Penanaman Modal	3	3	6	91,00	78,26	ST	T	71,21	60,38	S	R	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19.	Kepemudaan dan Olahraga	3	3	3	99,97	87,85	ST	T	61,52	29,02	R	SR	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20.	Statistik	1	1	2	100,00	97,44	ST	ST	56,76	12,6	R	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian	1	2	2	100,00	99,53	ST	ST	59,28	6,79	R	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Kebudayaan	5	13	27	97,99	91,47	ST	ST	57,04	31,68	R	SR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Perpustakaan	2	8	26	100,00	82,62	ST	T	58,89	61,73	R	R	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Kearsipan	2	3	4	100,00	97,06	ST	ST	79,11	64,12	T	R	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Urusan Pilihan												
1.	Kelautan dan Perikanan	3	8	28	95,83	91,48	ST	ST	40,12	38,24	SR	SR	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Pariwisata	3	4	11	96,67	87,83	ST	T	85,31	56,97	T	R	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
3.	Pertanian	5	6	9	95,00	92,01	ST	ST	49,31	33,66	SR	SR	Dinas Petanian dan Pangan
4.	Kehutanan	1	1	1	100,00	74,65	ST	S	60	34,22	R	SR	Dinas Lingkungan Hidup
5.	ESDM												
6.	Perdagangan	2	2	3	100,00	76,80	ST	T	47,71	63,33	SR	R	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.	Perindustrian								54,14	31,02	R	SR	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
8.	Transmigrasi	2	2	2	100,00	99,67	ST	ST	47,85	44,28	SR	SR	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Fungsi Penunjang												
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Kesekretariatan)	5	31	98	92,49	73,49	ST	S	91,95	72,23	ST	S	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
2.	Pengawasan	3	8	31	84,72	68,86	T	S	77,74	64,5	T	R	Inspektorat Daerah



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
3.	Perencanaan Pembangunan	3	11	38	100,00	83,11	ST	T	54,11	46,59	R	SR	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.	Penelitian dan Pengembangan	1	3	3	100,00	81,08	ST	T	87,25	30,89	T	SR	
5.	Kepegawaian	3	12	40	94,21	83,00	ST	T	79,75	64,76	T	R	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiain Daerah
6.	Keuangan	5	16	76	98,39	91,00	ST	ST	92,18	66,68	ST	S	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7.	Unsur Kewilayahan	36	71	187	99,16	91,39	ST	ST	102,71	112,83	ST	ST	Dilaksanakan oleh 6 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, dan



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
													Kecamatan Tempilang
8.	Unsur Pemerintahan Umum	11	18	46	100,00	100,00	ST	ST	77,57	54,82	T	R	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2021.

Evaluasi pelaksanaan hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dapat dilihat secara rinci pada tabel 2.88 terlampir.

2.2.3 Realisasi RPJMD 2016-2021

Berdasarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2021, dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Evaluasi terhadap indikator pembangunan daerah tersebut adalah dengan membandingkan capaian/realisasi dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan melalui dokumen perencanaan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

Di dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, terdapat 10 sasaran dengan 15 indikator sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Sasaran dengan kriteria “Baik Sekali” sebanyak 1 (satu) sasaran;
- b. Sasaran dengan kriteria “Baik” sebanyak 5 (Baik) sasaran;
- c. Sasaran dengan kriteria “Cukup” sebanyak 3 (tiga) sasaran;
- d. Sasaran dengan kriteria “Kurang” sebanyak 1 (satu) sasaran.

Sasaran dengan kriteria “Baik Sekali” sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Sasaran “Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah”, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun.

Sasaran dengan kriteria “Baik” sebanyak 5 (lima) sasaran yaitu :

- Sasaran “Meningkatnya kualitas pembangunan daerah”, terdiri dari 5 (lima) indikator yang keseluruhannya adalah indikator makro pembangunan daerah yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDRB Per Kapita;
- Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan” , terdiri dari 1 (satu) indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah;
- Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel”, terdiri dari 1 (satu) indikator Nilai SAKIP Daerah;
- Sasaran “Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik”, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar dan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik;
- Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan”, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



Sasaran dengan kriteria “Cukup” sebanyak 3 (tiga) sasaran yaitu :

- Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah” dengan 1 (satu) indikator yaitu Derajat Otonomi Fiskal Daerah;
- Sasaran “Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif” dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi;
- Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif”, dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran dengan kriteria “Kurang” sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Sasaran “Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat” yang terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat.

Sementara jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yaitu Tahun 2021, maka diperoleh capaian sebagai berikut :

- a. Sasaran dengan kategori “Tercapai” sebanyak 2 (dua) sasaran; dan
- b. Sasaran dengan kategori “Tidak Tercapai” 8 (delapan) sasaran.

Sasaran dengan kategori “Tercapai” sebanyak 2 (dua) sasaran yaitu Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan”, dan Sasaran “Meningkatnya Jumlah Investasi/Penanaman Modal di Daerah”.

Sasaran dengan kategori “Tidak Tercapai” sebanyak 8 (delapan) sasaran yaitu :

- Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah” dengan 5 (lima) indikator;
- Sasaran “Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif”, dengan 1 (satu) indikator;
- Sasaran “Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah” dengan 1 (satu) indikator;
- Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel” dengan 1 (satu) indikator;
- Sasaran “Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif”, dengan 1 (satu) indikator;
- Sasaran “Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik”, dengan (dua) indikator;
- Sasaran “Meningkatnya Nilai Produksi, Komoditas Unggulan Perkebunan Rakyat” dengan 1 (satu) indikator;



- Sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan”, dengan 1 (satu) indikator.

Rincian capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.80 Capaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
sampai dengan Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	2021			Kriteria Capaian	Capaian s.d. Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian s.d. Tahun 2021	Kriteria Capaian
					Target	Realisasi	Persentase Capaian					
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	-5,37	6,91 - 7,44	0,21	3,04	Kurang	0,21	5,05	4,16	Tidak Tercapai
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,08	69,27 - 69,42	69,6	100,26	Baik Sekali	69,6	72,23	96,36	Tidak Tercapai
		Angka Kemiskinan	%	2,7	2,70 - 2,99	2,75	100	Baik	2,75	2,85	103,51	Tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,12	3,39 - 4,06	3,83	100	Baik	3,83	5,65	132,21	Tercapai
		PDRB Per Kapita	rupiah	65.720	67.673 - 68.145	74.688	109,60	Baik Sekali	74.688	70.428	106,05	Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							82,58	Baik			88,46	Tidak Tercapai
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	45,94	70	49,60	70,86	Cukup	49,60	70	70,86	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							70,86	Cukup			70,86	Tidak Tercapai
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Baik	WTP	WTP	100	Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							100	Baik			100	Tercapai



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	2021			Kriteria Capaian	Capaian s.d. Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian s.d. Tahun 2021	Kriteria Capaian
					Target	Realisasi	Persentase Capaian					
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	7,77	9,00	6,79	75,44	Cukup	6,79	9	75,44	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							75,44	Cukup			75,44	Tidak Tercapai
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	69,82	70	69,06	98,66	Baik	69,06	70	98,66	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							98,66	Baik			98,66	Tidak Tercapai
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,17	82,73	60,16	72,72	Cukup	60,16	82,73	72,72	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							79,49	Cukup			72,72	Tidak Tercapai
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	%	92,59	80	79,67	99,59	Baik	79,67	80	99,59	Tercapai
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	80,98	85	82,07	96,55	Baik	82,07	85	96,55	Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							98,07	Baik			98,07	Tidak Tercapai
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	miliar rupiah	417,08	100	989,38	989,38	Baik Sekali	2749,05	600	458,18	Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							989,38	Baik Sekali			458,18	Tercapai



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	2021			Kriteria Capaian	Capaian s.d. Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian s.d. Tahun 2021	Kriteria Capaian
					Target	Realisasi	Persentase Capaian					
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	miliar rupiah	592,67	4.069	891,04	21,90	Kurang	891,04	4.069,20	21,90	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							21,90	Kurang			21,90	Tidak Tercapai
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,29	70	69,21	98,87	Baik	69,21	70	98,87	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Sasaran							98,87	Baik			98,87	Tidak Tercapai

Sumber : BP4D Kabupaten Bangka Barat 2022 (diolah).



Untuk capaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.81 Capaian Sasaran RPJMD
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2021

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	KET
1.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	-5,37	5,16	0,21	4,07	Tidak Tercapai
a	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Persentase	10,69	5	8,16	163,20	Tecapai
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	Persentase	-10,67	6,04	20,87	345,53	Tecapai
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	2,33	2,36	2,22	94,07	Tidak Tercapai
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	18,05	26,56	16,97	63,89	Tidak Tercapai
				Persentase capaian			166,67	Tecapai
b	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	417	532	989,38	185,97	Tecapai
				Persentase capaian			185,97	Tecapai
c	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0,68	0,68	0,68	100	Tecapai
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang	n/a	n/a	n/a
d	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63,29	70,39	69,21	98,32	Tidak Tercapai
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	Persentase	41,18	41,18	41,18	100	Tecapai



No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	KET
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	-	Tinggi	Tinggi	100	Tercapai
				Persentase capaian			99,44	Tidak Tercapai
1.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	12.233	12419	12.269	98,79	Tidak Tercapai
a	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Persentase	2,7	2,77	2,75	100,72	Tercapai
				Persentase capaian			100,72	Tercapai
b	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	Persentase	4,12	4,03	3,83	104,96	Tercapai
				Persentase capaian			104,96	Tercapai
2.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,08	69,31	69,6	100,42	Tercapai
a	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,22	7,23	7,44	102,90	Tercapai
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,53	11,53	11,7	101,47	Tercapai
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	Persentase	23,8	23,8	22,46	94,37	Tidak Tercapai
				Persentase capaian			99,58	Tidak Tercapai
b	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,06	70,23	70,08	99,79	Tidak Tercapai
		Prevalensi <i>Stunting</i>	Persentase	12,38	10,36	11,1	107,14	Tercapai
				Persentase capaian			103,46	Tercapai
c	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,03	90,5	90,04	99,49	Tidak Tercapai
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	-	Pratama	Pratama	100	Tercapai
				Persentase capaian			99,75	Tidak Tercapai
d	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	n/a	Cukup	n/a	n/a	n/a
				Persentase capaian				
3.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Buruk	Buruk	Buruk	100	Tercapai
a	Meningkatnya tata	Nilai SAKIP	Nilai	69,82	70	69,06	98,66	Tidak



No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021	KET
	kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel							Tercapai
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	Berkem-bang	Berkembang	100	Tercapai
		Indeks SPBE	Kategori	Cukup	Cukup	Cukup	100	Tercapai
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,17	64,37	60,16	93,46	Tidak Tercapai
			Persentase capaian				98,42	Tidak Tercapai
b	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,92	81,22	82,07	101,05	Tercapai
			Persentase capaian				101,05	Tercapai
3.2	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,26	0,26	0,58	223,08	Tercapai
a	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Persentase	6,45	8,96	6,79	75,78	Tidak Tercapai
			Persentase capaian				75,78	Tidak Tercapai

Sumber : BP4D Kabupaten Bangka Barat, 2022.

Dari 5 (lima) tujuan dengan kategori "Tercapai" sebanyak 3 (tiga) tujuan yaitu :

- "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia" dengan satu indikator tujuan "Indeks Pembangunan Manusia";
- "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik" dengan satu indikator tujuan "Indeks Reformasi Birokrasi"; dan
- "Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah" dengan satu indikator tujuan "Indeks Kapasitas Fiskal Daerah".

Sedangkan yang "tidak tercapai" yaitu "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas" dan "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

Sasaran dengan kategori "Tercapai" sebanyak 7 (tujuh) sasaran yaitu :

- Sasaran "Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah" dengan 4 (empat) indikator sasaran;



- Sasaran “Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah”, dengan 1 (satu) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur wilayah” dengan 2 (dua) indikator sasaran, namun hanya di hitung dari “Indeks Konektivitas”, sedangkan “Indeks Bangunan Gedung” masih n/a;
- Sasaran “Menurunnya Angka Kemiskinan” dengan 1 (satu) indikator sasaran;
- Sasaran “Menurunnya angka pengangguran”, dengan 1 (satu) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat”, dengan 2 (dua) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan pemerintah” dengan 1 (satu) indikator sasaran.

Sasaran dengan kategori “Tidak Tercapai” sebanyak 5 (lima) sasaran yaitu :

- “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 3 (tiga) indikator sasaran;
- “Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan” dengan 3 (tiga) indikator sasaran;
- “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” dengan 2 (dua) indikator sasaran;
- “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Akuntabel” dengan 5 (lima) indikator sasaran;
- “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah” dengan 1 (satu) indikator sasaran;

Sasaran yang belum dapat dihitung capaiannya sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu “Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat” dengan 1 (satu) indikator sasaran“.

2.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan yang diamanahkan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat adalah urusan wajib yang terkait pelayanan dasar yang terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Sosial, serta Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa standar teknis terkait mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar akan



diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar.

Aturan turunan yang menjelaskan tentang Standar Pelayanan Minimal antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel 2.82 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2021

No.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1.	Urusan Pendidikan	62,25%	65,95%
2.	Urusan Kesehatan	91,52%	92,01%
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93,20%	73,74%
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50,00%	50,00%
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	62,76%	62,46%
6.	Urusan Sosial	159,97%	100%
CAPAIAN SPM KABUPATEN BANGKA BARAT		92,59%	87,57%

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.

Dari 6 (enam) bidang urusan wajib pelayanan dasar terdapat 2 (dua) urusan yang capaiannya mengalami peningkatan jika di dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu urusan pendidikan dan kesehatan. Kemudian terdapat 1 (satu) urusan yang capaiannya tidak mengalami perubahan dari capaian tahun yang



lalu yaitu pada urusan perumahan dan sedangkan 3 (tiga) urusan yang lain yaitu Pekerjaan Umum, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial capaiannya mengalami penurunan dari tahun yang lalu.

Dari kondisi di atas menyebutkan bahwa untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat memang belum dapat terlaksana dengan optimal. Tentunya ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya yaitu kondisi yang bersifat situasional yang dalam hal ini bencana yang sangat berdampak dalam pelaksanaan pelayanan SPM di masyarakat. Kemudian memang tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan definisi operasional cara penghitung capaian SPM tahun 2020 dengan tahun 2021 ini mengalami perubahan walaupun tidak pada seluruh urusan pengampuhan SPM. Hal ini tentunya perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyingkapi permasalahan SPM yang ada di daerah. terlebih dengan adanya kebijakan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah yang salah satu muatannya adalah capaian penerapan SPM di daerah menjadi parameter dari penghitungan besaran dana transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Untuk itu, penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah harus dijadikan sebagai komitmen dari pemangku kebijakan serta perhatian bersama melalui integrasi SPM dalam proses pembangunan daerah sehingga penerapan SPM dapat terlaksana secara optimal.

Untuk capaian dari masing-masing urusan pengampuhan SPM tahun 2021 jika dibandingkan dengan target nasional dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.83 Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dibandingkan dengan Target Nasional

No.	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET NASIONAL	KET
I	URUSAN KESEHATAN			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	92,86%	100%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	95,01%	100%	Tidak Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	95,73%	100%	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	93,36%	100%	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	93,36%	100%	Tidak Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	83,65%	100%	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	83,90%	100%	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	87,97%	100%	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	103,71%	100%	Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100%	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	61,58%	100%	Tidak Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	107,96%	100%	Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN		92,01%	100%	Tidak Tercapai



No.	INDIKATOR	REALISASI 2021	TARGET NASIONAL	KET
II	URUSAN PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Usia Dini	97,83%	100%	Tidak Tercapai
2	Pendidikan Dasar	94,53%	100%	Tidak Tercapai
3	Pendidikan Kesetaraan	5,50%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN		62,25%	65,95%	Tidak Tercapai
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM			
	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	92,48%	100%	Tidak Tercapai
	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air Limbah Domestik	54,99%	100%	Tidak Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM		72,92%	73,74%	Tidak Tercapai
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT			
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Tercapai
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0%	0%	Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT		100%	50%	Tidak Tercapai
V	URUSAN SOSIAL			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandang dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL		100%	100%	100%
VI	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tidak Tercapai
SUB URUSAN BENCANA DAERAH				
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	5,42%	100%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	6,87%	100%	Tidak Tercapai
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Tercapai
SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH				
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	Tercapai
CAPAIAN SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		62,46%	100%	Tidak Tercapai

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat, 2022.



1. SPM Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2021, SPM Urusan Kesehatan yang mencapai target nasional ada 3 (tiga) indikator yaitu indikator Persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

3 (tiga) indikator yang telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Persentase penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.

Diabetes Melitus (DM) atau penyakit kencing manis adalah suatu keadaan dimana tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin yang sesuai kebutuhan tubuh, akibatnya mengganggu metabolisme gula sehingga gula yang semestinya berada dalam sel justru berada dalam darah. Penderita mengalami penurunan kualitas hidup, kinerja menurun karena cepat lelah. Pemeriksaan gula darah secara rutin dapat mengetahui gejala awal kencing manis sehingga terapi pengobatan dapat dilakukan pada fase awal penyakit dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup penderita. Pada tahun 2021 capaian indikator ini sebesar 103,71%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 105,30% mengalami penurunan dan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 100% indikator ini telah mencapai target.

- b. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*, pada keadaan ini virus menyerang sistem kekebalan tubuh manusia akibatnya kemampuan tubuh untuk melawan infeksi penyakit mengalami penurunan, sampai saat ini obat untuk menyembuhkan HIV belum ditemukan, pengobatan yang diberikan adalah untuk mempertahankan jangan sampai HIV berkembang menjadi AIDS serta meningkatkan kualitas hidup penderita. AIDS adalah suatu keadaan dimana tubuh sudah sama sekali kehilangan sistem kekebalan tubuh sehingga kemungkinan penderita meninggal amat besar karena tubuh tidak mampu lagi melawan penyakit. Pada tahun 2021 pemeriksaan HIV pada kelompok yang rentan terinfeksi sebesar 107,96%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 (105,38%) indikator ini mengalami peningkatan dan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 100% telah mencapai target.

- c. Persentase orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Orang dengan gangguan jiwa adalah seseorang yang setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan memiliki gangguan kesehatan jiwa. Dalam kehidupannya kualitas hidup maupun produktifitas dengan gangguan jiwa sangat rendah, untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok ini dilakukan program pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa.



2. SPM Urusan Pendidikan

Untuk rata-rata capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 adalah 65,95 persen, dimana dari 3 (tiga) indikator tidak ada satupun indikator yang mendapatkan capaian 100 persen. Namun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dimana pada tahun 2020 capaian SPM urusan pendidikan sebesar 62,25 persen. Dalam pelaksanaan penerapan SPM di bidang pendidikan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang di hadapi oleh dinas teknis. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Ketercukupan tenaga pendidik dengan jumlah yang minimal;
- b. Minimnya pendataan terhadap anak putus sekolah pada usia sekolah yang membuat Dinas teknis kesulitan dalam melakukan penghitungan kebutuhan SPM untuk anak putus sekolah;
- c. Masih adanya anak usia sekolah pada jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan rentang usia jenjang pendidikan tersebut ;
- d. Terbatasnya penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian SPM di Kabupaten;
- e. Perubahan kebijakan penerapan SPM di tingkat pusat yang belum diikuti dengan penyesuaian program dan kegiatan SPM di tingkat daerah dikarenakan kebijakan SPM tersebut di implementasikan oleh Pemerintah Daerah pada ujung tahun.

3. SPM Urusan Penerimaan Umum dan Penataan Ruang

Rata-rata capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 adalah 73,74 persen. Capaian rata-rata tersebut merupakan capaian dari indikator "Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari" sebesar 92,48 persen serta capaian dari indikator "Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik" sebesar 54,99 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan dimana pada tahun 2020 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya sebesar 93,20 persen.

4. SPM Urusan Perumahan dan Permukiman

Rata-rata capaian SPM urusan perumahan dan permukiman Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 adalah 50 persen, dimana dari 2 (dua) indikator ada 1 (satu) yang mendapatkan capaian 100 persen sedangkan indikator lainnya 0 persen.

5. SPM Urusan Sosial

Rata-rata capaian SPM urusan sosial Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 adalah 100 persen, dimana dari 5 (lima) indikator semuanya mendapatkan capaian 100 persen. Layanan standar rehabilitasi sosial dasar yang harus diterima oleh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan, serta pemenuhan kebutuhan dasar.



6. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rata-rata capaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 adalah 62,46 persen, dimana dari 5 (lima) indikator terdapat 3 (tiga) indikator yang mendapatkan capaian 100 persen.

2.4 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau secara internasional disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. TPB berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan secara global dapat dicapai pada tahun 2030.

TPB terdiri atas 17 Tujuan yang menjadi kesepakatan global untuk mencapainya pada tahun 2030. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan,



- mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuh belas TPB tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, pilar hukum dan tata kelola. Selanjutnya dari masing-masing TPB diukur melalui indikator yang akan dievaluasi capaiannya setiap tahun oleh pemerintah sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Adapun indikator tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kewenangannya terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Indikator kewenangan Pusat berjumlah 308 indikator;
2. Indikator kewenangan Provinsi 235 indikator;
3. Indikator kewenangan Kabupaten 220 indikator;
4. Indikator kewenangan Kota 222 indikator.

Dari 220 indikator TPB, pilar sosial terdiri dari 96 indikator, pilar ekonomi terdiri dari 61 indikator, pilar lingkungan terdiri dari 42 indikator dan pilar hukum dan tata kelola terdiri dari 21 indikator.

Realisasi Capaian TPB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel.2.89 terlampir.

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat dari data dan hasil evaluasi pada setiap pelaksanaan perencanaan yang dilakukan dan permasalahan yang terkait gambaran umum kondisi daerah. Permasalahan pembangunan juga bisa dilihat dari perkembangan maupun tren pencapaian pembangunan daerah yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

2.5.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Secara nyata, pada Tahun 2022 masih terjadi permasalahan berskala besar yang menimpa seluruh dunia yaitu terjadinya pandemi akibat *Coronavirus Disease 2019* atau disingkat dengan Covid-19. Indonesia termasuk negara yang terdampak pandemi ini termasuk pula wilayah Kabupaten Bangka Barat. Hal ini menyebabkan perubahan secara menyeluruh terhadap tatanan kehidupan baik masyarakat maupun pemerintahan.

Untuk menangani dampak Covid-19, pemerintah baik di pusat maupun daerah melakukan



penyesuaian pendapatan dan fokus belanja yang juga mengubah struktur APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021. Target indikator makro pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk tahun 2021 yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,45 – 4,95%, Indeks Pembangunan Manusia 70,75, Tingkat Kemiskinan sebesar 5,30%, dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,78%.

Dengan melihat dari berbagai aspek tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yaitu **“PERCEPATAN PEMULIHAN DAN PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DAERAH YANG OPTIMAL, BERKELANJUTAN, DAN BERKEADILAN (GREEN ECONOMY)”**.

Menghadapi dinamika yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merevisi Tema Pembangunan RKPD 2021 menjadi **“PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGGERAK EKONOMI”** dengan tetap memperhatikan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, dinamika dan realita kondisi umum daerah, Arah Kebijakan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan hasil pengendalian pembangunan tahun berjalan. Berdasarkan tema tersebut maka program/kegiatan strategis Tahun 2021 lebih diarahkan pada upaya-upaya penguatan pelayanan dasar dan menjaga pertumbuhan ekonomi.

Fokus belanja lebih diarahkan ke bidang kesehatan, jaringan pengamanan sosial dan pemulihan perekonomian. Hal ini mengakibatkan banyak program maupun kegiatan yang dilakukan *refocusing*. Program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 mengalami perubahan bahkan penghapusan/penundaan dan anggaran dialihkan untuk pembiayaan penanggulangan Covid-19.

Sejalan dengan *refocusing* anggaran yang dilakukan tersebut, mengakibatkan sasaran pembangunan daerah yang didukung melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan turut mengalami dampak sehingga target yang diinginkan tidak dapat dicapai secara maksimal.

Berikut permasalahan pembangunan daerah secara umum yang dianggap memiliki nilai strategis jika dihubungkan dengan capaian tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD di Tahun 2021, permasalahan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat, yaitu :

a. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Misi pertama RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 adalah “Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat” yang terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.



Jika dilihat dari capaian indikator kedua tujuan diatas untuk tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi masih memiliki capaian yang rendah yaitu 0,21 persen jika dibandingkan dengan perkiraan capaian yang tercantum dalam RPJMD yaitu 5,16 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dilihat dari pertumbuhannya, jika dibandingkan dengan tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi sebesar -5,37 persen dan pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Bangka Barat tumbuh sebesar 0,21 persen meskipun terlihat masih sangat rendah. Seluruh sektor lapangan usaha di Kabupaten Bangka Barat mengalami pertumbuhan yang positif kecuali sektor industri pengolahan. Hal ini yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat tidak meningkat terlalu signifikan, dimana sektor industri pengolahan yang biasanya menjadi salah satu penyumbang terbesar mengalami kontraksi sebesar 4,52 persen.

Tabel 2.84 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020 - 2021

No	Lapangan Usaha	Tahun	
		2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,53	0,01
2	Pertambangan dan Penggalian	-13,87	10,22
3	Industri Pengolahan	-7	-4,52
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19,3	8,54
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,5	3,97
6	Konstruksi	1,46	1,79
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,21	5,94
8	Transportasi dan Pergudangan	-13,37	8,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,65	6,29
10	Informasi dan Komunikasi	18,44	5,92
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,44	5,36
12	Real Estat	4,91	4,41
13	Jasa Perusahaan	-9,11	4,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,63	4,64



No	Lapangan Usaha	Tahun	
		2020	2021
15	Jasa Pendidikan	-0,76	1,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	9,31
17	Jasa Lainnya	-4,69	2,2
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-5,37	0,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2022.

Jika melihat dari tabel diatas, penurunan bisa dilihat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Salah satu yang menyebabkan sektor ini menurun adalah menurunnya beberapa produksi beberapa komoditas strategis perkebunan terutama perkebunan tahunan.

Pengadaan Listrik dan Gas merupakan salah satu lapangan usaha yang penting dalam menunjang aktivitas produksi sektoral dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Bangka Barat, belum ada pasokan gas secara langsung. Hal ini menyebabkan pasokan gas masih impor dari daerah lain, sehingga hanya ketenagalistrikan dan produksi es yang menghasilkan nilai tambah, sehingga sektor ini juga menurun sangat drastis di mana pada Tahun 2020 19,3 persen dan Tahun 2021 menjadi 8,54 persen.

Selain itu penurunan juga terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi, jika dilihat dari pertumbuhannya, kategori ini juga mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 5,92 persen, melambat cukup tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 18,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keterbutuhan masyarakat akan Teknologi dan Komunikasi justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan aktivitas pendidikan yang semula online perlahan telah dilaksanakan offline sejalan dengan mambainya kondisi pandemi covid-19.

b. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 misi kedua pembangunan adalah “Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia” yang terdiri dari 1 (satu) tujuan yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Jlka melihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 mengalami kenaikan, yang mana pada Tahun 2020 capaian Kabupaten Bangka Barat sebesar 69,08 persen sedangkan di Tahun 2021 sebesar 69,60 persen. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, capaian IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 berada di posisi dua terendah.



Tabel 2.85 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Capaian	Status
1.	Pangkalpinang	78,57	Tinggi
2.	Belitung	72,57	Tinggi
3.	Bangka	72,46	Tinggi
4.	Belitung Timur	71,42	Tinggi
5.	Bangka Tengah	70,89	Tinggi
6.	Bangka Barat	69,60	Sedang
7.	Bangka Selatan	67,06	Sedang

Badan Pusat Statistik Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2022

Untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, capaian ketiga dimensi penyusunan IPM harus ditingkatkan yaitu dimensi pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. IPM Kabupaten Bangka Barat dapat ditingkatkan dengan fokus pada pencapaian dimensi pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah serta meningkatkan pencapaian dimensi kesehatan yaitu angka harapan hidup.

c. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 misi ketiga pembangunan adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik” yang terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dan “Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”.

Salah satu permasalahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 49,6 dengan kategori “C” atau predikat “Buruk”. Kategori ini diinterpretasikan bahwa penerapan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bangka Barat perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar.

Tabel 2.86 Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A.	Komponen Pengungkit		
I	Pemenuhan	20,00	10,13
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,75
III	Reform	30,00	3,84
	Total Komponen Pengungkit	60,00	18,72



No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas kinerja dan Keuangan	10,00	7,82
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,83
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,46
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,77
	Total Komponen Hasil	40,00	30,88
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	49,60

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022.

Jika dilihat dari komponen Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat tersebut, nilai terendah adalah pada total komponen pengungkit dengan nilai 18,72 persen dari total bobot 60 persen.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, terdapat beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan implementasi Program Reformasi Birokrasi adalah :

- a. Kualitas penerapan reformasi birokrasi baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan pada tingkat Perangkat Daerah belum cukup baik dan merata, sehingga belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan;
- b. Beberapa catatan dalam hal Manajemen Perubahan sebagai berikut :
 - Telah dilakukannya upaya percepatan reformasi birokrasi melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/147/4.1.3.1/2020. Namun, hal ini belum dilengkapi dengan rencana kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Tim Reformasi Birokrasi untuk kemudian ditindaklanjuti dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemkab Bangka Barat;
 - Pembentukan agen perubahan belum dilengkapi dengan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya, sehingga belum diketahui sejauh mana perubahan yang telah dihasilkan oleh para agen perubahan;
 - Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) perlu dikomunikasikan secara *massive* guna percepatan perbaikan program reformasi birokrasi di Pemkab Bangka Barat.
- c. Pada penataan peraturan perundang-undangan, Pemkab Bangka Barat telah melakukan upaya harmonisasi/sinkronisasi meskipun belum menysasar kepada percepatan dan efisiensi pelayanan. Selain itu, belum terdapat tindak lanjut atas rekomendasi tahun lalu terkait penyusunan pemetaan keterkaitan antar kebijakan pada seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan Pemkab Bangka Barat;



- d. Telah disusunnya dokumen identifikasi penyederhanaan jabatan, namun belum sepenuhnya dilakukan tindak lanjut penyederhanaan jabatan hasil dari identifikasi tersebut;
- e. Peta proses bisnis yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Pemkab Bangka Barat, sehingga belum terlihat efektivitas struktur organisasi yang selaras dengan kinerja organisasi yang dihasilkan. Disamping itu, peta proses bisnis pada OPD belum menggambarkan keterkaitan antar OPD secara jelas sehingga struktur organisasi yang ideal belum terlihat;
- f. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tergambar dari belum disusunnya arsitektur pengembangan SPBE. Disamping itu, monitoring dan evaluasi guna mengukur efektifitas dan manfaat dari aplikasi-aplikasi yang telah ada belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran Indeks SPBE Pemkab Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 2,27 yang masih berada pada kategori cukup;
- g. Beberapa catatan dalam hal Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur sebagai berikut :
 - Indikator kinerja individu yang disusun belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi di atasnya, sehingga belum optimal dimanfaatkan sebagai indikator capaian kinerja pegawai dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - Belum dilaksanakannya penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karier individu/pemberian *reward and punishment* terhadap pegawai secara optimal.
- h. Dalam peningkatan manajemen kinerja, Pemkab Bangka Barat telah mengembangkan aplikasi monitoring kinerja namun belum secara optimal mendorong perbaikan kinerja;
- i. Implementasi penguatan kebijakan pengawasan masih lemah sehingga upaya pada area penguatan pengawasan masih sebatas pemenuhan dokumen, belum mengarah kepada penerapan atas kebijakan yang telah ada baik pada level kabupaten maupun level OPD. Pada upaya peningkatan integritas perlu ditingkatkan mengingat tidak ada Unit Kerja yang diajukan menuju Zona Integritas WBK/WBBM pada Tahun 2021;
- j. Beberapa catatan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain :
 - Implementasi pelayanan publik khususnya di OPD pelayanan dalam hal system kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar belum diterapkan secara optimal;
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) hanya dilakukan 1 (satu) tahun sekali dan baru dilakukan pada sebagian OPD. Disamping itu, hasil penilaian SKM belum dipublikasikan secara *massive* dan belum ditindaklanjuti serta dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Bangka Barat.



Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diharapkan kedepan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat melakukan upaya-upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sebagai salah satu area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penataan SDM aparatur menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan *merit system* sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Penerapan manajerial birokrasi yang mengarah kepada profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci bagi perubahan cara pandang tata kelola pemerintahan. Manajerial birokrasi tersebut harus didukung oleh aparatur yang kuat baik dari sisi kompetensi maupun mental dalam melayani.

Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif merupakan sasaran yang berkaitan dengan manajemen sumber daya aparatur yang baik yang diukur melalui tingkat profesionalitas ASN. Melalui indikator ini akan diukur kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Berdasarkan hasil perhitungan, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 hanya mencapai 60,16 poin.

Dari 4 (empat) dimensi yang digunakan dalam perhitungan indeks profesional ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, 2 (dua) dimensi masih belum baik hasilnya yaitu dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi.

Tabel 2.87 Penilaian Indeks Profesionalitas ASN
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO	DIMENSI	BOBOT	Tahun 2021	
			HASIL	REALISASI
1.	Kualifikasi	25	12,83	51,32%
2.	Kompetensi	40	17,17	42,96%
3.	Kinerja	30	25,17	83,90%
4.	Disiplin	5	4,99	99,80%
TOTAL		100	60,16	

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bangka Barat, 2022

Permasalahan terkait pencapaian Indeks Profesional ASN di Kabupaten Bangka Barat, khususnya pada dimensi kualifikasi dan kompetensi antara lain :

- a. Belum adanya pemetaan kebutuhan Pegawai dengan spesifikasi pendidikan lanjutan (S1, S2 dan dokter spesialis) yang dapat mendukung kebutuhan Pemerintah Daerah;



- b. Belum semua Jabatan Eselon/Fungsional yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya;
- c. Masih minimnya keikutsertaan Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan kompetensinya, baik dalam cakupan keikutsertaan pegawai dalam mengikuti diklat teknis minimal 20 JP per tahun dan seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya guna peningkatan sumber daya ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu upaya lebih untuk dapat meningkatkan kualitas profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, khususnya pada dimensi kualifikasi ASN (Jenjang Pendidikan) dan kompetensi ASN yang nilainya masih sangat jauh dari bobot yang ada.

Permasalahan lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah nilai maturitas SPIP yang masih di level berkembang dan indeks SPBE masih dalam kategori cukup.

Maturitas SPIP menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Ini juga menjadi dasar perumusan rekomendasi peningkatan kematangan penyelenggaraan SPIP. Tujuan SPIP adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai maturitas SPIP Kabupaten Bangka Barat yang masih di level-2 atau berkembang, menunjukkan bahwa sebagian besar indikator penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Bangka Barat hanya pada tahap tersedianya kebijakan yang sudah dikomunikasikan dan dipahami. Namun kebijakan tersebut sebagian besar belum diimplementasikan dan belum di evaluasi keefektifannya. Pengendalian yang belum optimal tersebut disebabkan karena masih belum pahamnya Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan SPIP.

Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di suatu daerah. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nilai Indeks SPBE dapat dijadikan acuan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang sesuai dengan zaman.

Permasalahan terkait pelaksanaan SPBE di Kabupaten Bangka Barat yaitu belum menerapkan sertifikat elektronik sebagai dukungan penyelenggaraan SPBE, sehingga waktu



pelayanan lebih lama, otoritas dokumen hasil pelayanan SPBE berkurang, terjadinya penyangkalan oleh penandatanganan dokumen, serta kerugian transaksi elektronik dalam pelayanan SPBE.

Permasalahan berikutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana capaian di Tahun 2021 hanya sebesar 6,79 persen dengan target awal sebesar 8,96 persen. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan PAD melalui pajak daerah serta retribusi daerah. Di Kabupaten Bangka Barat, pelaksanaan Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi belum dilakukan secara optimal. Ekstensifikasi dilakukan melalui peningkatan jumlah wajib pajak sedangkan intensifikasi dilakukan dengan target penerimaan pajak dari data wajib pajak yang sudah terdata.

2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Wajib pemerintahan daerah terdiri dari 24 urusan, sementara urusan pilihan tetap berjumlah 8 urusan. Kemudian untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian serta urusan perencanaan pembangunan yang sebelumnya menjadi urusan wajib pemerintah daerah menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan umum pembangunan daerah yang dilihat dari kondisi umum Kabupaten Bangka Barat, secara terperinci akan diuraikan permasalahan tersebut berdasarkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Berikut dijabarkan secara rinci permasalahan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan:

A. Urusan Pemerintahan Wajib

a. Pendidikan

1. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat lebih rendah dari Angka Provinsi dan Nasional;
2. Belum optimalnya kompetensi dan sertifikasi pendidik;
3. Menurunnya APK/APM SD/MI;
4. Meningkatnya Angka Putus Sekolah SD/MI.

b. Kesehatan



1. Meningkatnya angka kematian ibu yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil dan pada saat hamil;
 2. Meningkatnya angka kematian bayi dengan penyebab utama berat badan lahir rendah;
 3. Meningkatnya kasus balita gizi buruk dan masih tingginya prevalensi status gizi di Kabupaten Bangka Barat (tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung);
 4. Ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal;
 5. Kurangnya tenaga kesehatan (dokter), tenaga kefarmasian, tenaga sanitasi dan tenaga gizi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
 6. Belum memadainya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Kabupaten Bangka Barat.
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang dibangun di daerah irigasi;
 2. RTRW Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 3. Belum ditetapkannya Dokumen RDTR yang merupakan dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Bangka Barat
 4. Belum terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 5. Belum terpenuhinya pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Belum terpenuhinya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Belum tertanganinya kawasan kumuh.
- e. PU
- Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Bangka Barat dikarenakan belum diakomodir di dalam regulasi;
- f. Perhubungan
- Belum optimalisnya penyediaan, penataan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan.
- g. Ketentraman, Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat



1. Belum optimalnya peningkatan ketertiban dan keamanan;
 2. Belum optimalnya pelaksanaan bidang pemadam kebakaran;
 3. Belum optimalnya pelaksanaan urusan bidang kebencanaan.
- h. Ketenagakerjaan
1. Minimnya daya tampung sektor formal dalam menampung pencari kerja;
 2. Minimnya investasi yang melibatkan banyak tenaga kerja.
- i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Meningkatnya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak;
 2. Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak.
- j. Pangan
1. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Barat belum mencapai target Nasional;
 2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah. Masih ditemukannya pangan yang tidak aman.
- k. Lingkungan Hidup
1. Belum seluruh kecamatan melakukan pengolahan sampah serta ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana persampahan belum optimal;
 2. Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu, khususnya pada wilayah perkotaan masih belum optimal;
 3. Masih rendahnya penanganan terhadap lahan kritis di Kabupaten Bangka Barat.
- l. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1. Belum optimalnya pemenuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, karena pelayanan masih terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 2. Masih rendahnya kepatuhan terhadap standard pelayanan publik.
- m. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Belum mencukupinya pemenuhan petugas PLKB/PKB di 6 (enam) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk melayani kebutuhan masyarakat.
- n. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1. Kelembagaan dan peran koperasi belum optimal;



2. Tingkat pemasaran produk UMKM masih terbatas.
- o. Penanaman Modal
 1. Menurunnya rasio daya serap tenaga kerja proyek investasi Penanaman Modal Asing dan dan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 2. Belum optimalnya potensi dalam sektor perkebunan dan perindustrian untuk pengembangan investasi.
- p. Kepemudaan dan Olahraga
 1. Rendahnya Prestasi Olahraga di Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan kurangnya pembinaan ke atlet, kurangnya perhatian kepada atlet berprestasi, serta minimnya SDM olahraga berlesensi;
 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan olahraga dan kepemudaan.
- q. Statistik
 1. Belum optimalnya pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bangka Barat;
 2. Data Statistik Sektoral belum terkelola dan tervalidasi dengan baik.
- r. Persandian

Belum optimalnya penerapan urusan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
- s. Perpustakaan
 1. Turunnya jumlah pengunjung di perpustakaan daerah;
 2. Turunnya jumlah perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat;
 3. Koleksi Bahan Pustaka Digital serta Sarana Prasarana untuk Alih Media/Koleksi *E-Book* belum optimal.
- t. Kearsipan

Turunnya jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

- a. Kelautan dan Perikanan

Turunnya produksi perikanan budidaya air tawar.
- b. Pariwisata



1. Belum kembali pulihnya tingkat kunjungan wisatawan seperti sebelum munculnya pandemi *covid-19*;
 2. Minimnya usaha yang mendukung sektor pariwisata.
- c. Pertanian
1. Turunnya produksi ternak unggas khususnya pada komoditas ayam petelur, ayam pedaging dan ayam buras;
 2. Kabupaten Bangka Barat belum menetapkan dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- d. Perindustrian
1. Kurangnya kemampuan modal, peralatan, SDM, kemitraan dan literasi digital industri kecil menengah;
 2. Pengembangan produk IKM yang berkualitas, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi ekspor belum optimal.
- e. Perdagangan
1. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan;
 2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pasar.
- f. Kehutanan
- Belum terkelolanya kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Menumbing.

C. Urusan Penunjang

1. Masih rendahnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi;
2. Turunnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Tingkat maturasi SPIP masih pada kategori berkembang;
4. Masih rendahnya Indeks Profesional ASN;
5. Masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

2.6 Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi juga dapat menjadi faktor penting dalam mendukung



perkembangan ekonomi dan daya saing daerah. Bentuk inovasi daerah antara lain inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berikut beberapa inovasi daerah yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Bangka Barat :

1. ATRAKTIF (Aksi *Microbacter Alfaafa* Mengubah Lahan Kritis menjadi Produktif dalam *Integrated Ecofarming*).

ATRAKTIF dalam *Integrated Ecofarming* merupakan inovasi dalam mengubah lahan kritis menjadi kawasan pertanian terintegrasi berbasis *Microbacter Alfaafa*. Inovasi ini mematahkan *mindset* masyarakat yang menilai bahwa lahan kritis tidak dapat dimanfaatkan. ATRAKTIF dalam *Integrated Ecofarming* bergerak dari hulu ke hilir, dari mengolah limbah pertanian berbasis *Microbacter Alfaafa* (MA11) yang diterapkan pada lahan kritis menjadi kawasan pertanian terintegrasi (*Integrated Ecofarming*).

Menerapkan *Integrated Ecofarming* dengan menggunakan hasil pengolahan limbah berbasis MA11 mampu menghidupkan kembali lahan kritis menjadi produktif. Dalam satu *Integrated Ecofarming*, bisa menghasilkan berbagai macam produk turunan yang mampu mendongkrak nilai ekonomi petani. Hal ini menunjukkan bahwa *Integrated Ecofarming* dengan menggunakan olahan limbah berbasis MA11, dapat menghasilkan produk pertanian dan peternakan lebih cepat sehingga dapat memperoleh pemasukan dari beberapa sumber sekaligus. *Integrated Ecofarming* mendampingi pertanian, peternakan, dan perikanan sekaligus sehingga inovasi ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Kelompok Tani, Kelompok Ternak, dan Kelompok Pembudidaya Ikan.

Inovasi dilakukan Kelompok Tani MAKMUR Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kelompok Tani ini sebagai *pilot project* yang sudah berkembang menjadi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya "MAKMUR" dan mendapat sertifikat klasifikasi dari Kementerian Pertanian disahkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 11 November 2019, dan mendapat predikat P4S Kelas Utama.

Inovasi ini dapat diterapkan di berbagai kondisi lahan, konservasi lahan kritis saja bisa, apalagi lahan subur. Inovasi ini sudah diadopsi oleh Polsek Jebus sebagai *pilot project* Taman Edukasi Ketahanan Pangan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekolah, pondok pesantren, koperasi, Perusahaan Integrasi Sapi PO-Kelapa Sawit di Palembang, kelompok tani maupun kelompok wanita tani hingga ke lintas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inovasi ini sangat menjanjikan untuk menghidupkan kembali lahan kritis, sebagai perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

2. BIKCANTEK (Bina Keluarga Calon Pengantin OKe).



BIKCANTEK merupakan layanan kesehatan terpadu yang melibatkan bidan, analis, gizi, apoteker, serta dokter pada pasangan calon pengantin. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, bekerjasama dengan PLKB kecamatan, seluruh Kepala Desa dan P3N Desa di Kecamatan Simpang Teritip.

BIKCANTEK mulai dilaksanakan sejak 2017 dengan nama SUSCATEN akan tetapi belum mendapatkan dukungan penuh dari stakeholder sehingga dimatangkan kembali dengan menjalin kerjasama yang lebih efektif dan pemeriksaan yang lebih kompleks kepada pasangan calon pengantin pada tahun 2019, kemudian berubah nama menjadi BIKCANTEK.

Kegiatan BIKCANTEK berupa pemberian KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) tentang kesehatan reproduksi, penyakit akibat hubungan seksual dan lain-lain, serta pemeriksaan status gizi, pengambilan sample darah dan urine untuk memastikan kesehatan pasangan calon pengantin. Calon pengantin yang telah mendapatkan layanan ini langsung diberikan sertifikat BIKCANTEK dan Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin. Keduanya merupakan syarat wajib untuk pengurusan administrasi pranikah baik di Kantor Desa maupun di KUA, sehingga semua pasangan calon pengantin di wilayah kerja Puskesmas Simpang Teritip telah mendapatkan jaminan kesehatan dan edukasi pranikah, khususnya calon pengantin perempuan yang akan menjadi seorang ibu.

BIKCANTEK dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tingginya angka rujukan di Puskesmas Simpang Teritip terutama ibu hamil usia kurang dari 17 tahun dan usia kurang dari 20 tahun yang disebabkan oleh komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas. Selain itu hal ini berdampak pada tingginya kejadian komplikasi neonatus. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka komplikasi dan rujukan adalah pernikahan di usia sekolah mulai dari 12 sampai dengan 17 tahun dan pernikahan usia 17 sampai dengan 20 tahun.

Hingga tahun 2020, BIKCANTEK berhasil menekan angka komplikasi dan rujukan usia kurang dari 20 tahun sebesar 16,58%. Angka ini merupakan angka kasus terkecil di Puskesmas Simpang Teritip sejak tahun 2015 dan berdampak pada menurunnya angka kejadian BBLR, STUNTING, AKI dan AKB. BIKCANTEK bisa diterapkan diseluruh Puskesmas.

3. Bukalapak Puskesmas Mini "SUKRO" (Sadari sejak dini, Ubah perilaku yang tidak sehat, Konsultasikan ke petugas kesehatan, Rangkul kepesertaan JKN, Obati sesuai standar)

Puskesmas Mini SUKRO merupakan pelayanan terintegrasi langsung ke sasaran yang dilakukan dengan konsep jemput bola dan berpindah-pindah secara blusukan menjangkau lokasi yang jauh dari faskes kesehatan dimana pelayanan ini seperti puskesmas mini yaitu mendapatkan penyuluhan kesehatan, konsultasi dokter, pemeriksaan PTM (Cek Gula, Kolesterol, dan Asam Urat), konsultasi gizi, pelayanan KB, Pelayanan IVA, Deteksi TB, dan Mendapatkan Obat selain itu juga kemudahan untuk kepesertaan JKN. Sasaran utama Bukalapak Puskesmas Mini SUKRO adalah masyarakat yang belum sama sekali terjamah pelayanan kesehatan. Dalam Bukalapak Puskesmas Mini SUKRO,



dilakukan penyuluhan, konsultasi, dan pengobatan yang ditangani langsung oleh tenaga medis profesional.

Inovasi ini melibatkan seluruh elemen masyarakat baik tokoh masyarakat, aparat desa, kader kesehatan, dan berintegrasi antara lintas sektor dan lintas program UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) di puskesmas. Sasaran Bukalapak Puskesmas Mini SUKRO adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sekar Biru, yaitu Desa Sekar Biru, Desa Telak, Desa Kapit, Desa Semulut, dan Desa Bakit. Dengan adanya Bukalapak Puskesmas Mini SUKRO, ditargetkan pemahaman masyarakat akan pentingnya berperilaku hidup bersih dan sehat serta kualitas derajat kesehatan masyarakat menjadi meningkat. Kegiatan ini bersifat promotif (penyuluhan), preventif (pencegahan), dan pengobatan. Dengan menghadirkan Puskesmas Mini ke masyarakat, dapat meningkatkan kunjungan masyarakat dalam control kesehatan untuk mencegah akibat potensi bahaya Penyakit Tidak Menular (PTM).

4. RANTING (Ragam Intervensi Penanganan Stunting)

Dalam pencegahan dan penanganan stunting Puskesmas Jebus melakukan intervensi spesifik dengan beragam kegiatan dimulai dari pemberian tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri (rematri), pemeriksaan Hb kepada remaja putri dan pemberian makanan tambahan kepada balita stunting/gizi buruk/gizi kurang dan ibu hamil KEK. Manfaat dari inovasi Ranting untuk menghindari terjadinya kekurangan gizi kronis pada remaja putri sehingga tidak menyumbangkan penambahan jumlah kelahiran balita stunting dan diberikan PMT kepada balita stunting/gizi buruk/kurang dan ibu hamil KEK selama 90 hari untuk melihat perubahan ke arah perbaikan dan balita tersebut dapat mengalami pertumbuhan sesuai standar serta ibu hamil KEK tidak melahirkan dengan perdarahan /mengalami anemia.

**Tabel 2.8. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2021
Kabupaten Bangka Barat**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										DINAS DIKPORA
1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	166,493,099,705.00	-	165,197,204,935.00	-	-		
			Optimalnya disiplin aparatur	100	%							
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%							
			Status capaian kinerja keuangan	100	%							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	14,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	8,000,000.00	6.00	2,000,000.00	150.00	25.00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen tersusun	2	dokumen	4,000,000.00	2.00	4,000,000.00	100.00	100.00		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	5	dokumen	2,000,000.00	5.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									116.67	75.00		
Predikat kinerja									ST	T		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	163,930,924,200.00	-	162,781,352,977.00	-	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersalurnya gaji dan tunjangan ASN Dikpora	12	Bulan	163,924,924,200.00	12.00	162,775,352,977.00	100.00	99.30		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen tersusun	2	Dokumen	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen tersusun	2	Dokumen	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.82		
Predikat kinerja									ST	ST		
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	31,600,000.00	-	31,600,000.00	-	-		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan barang milik SKPD	12.00	bulan	31,600,000.00	12.00	31,600,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-		
Predikat kinerja									SR	SR		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya pakaian khusus hari-haritertentu	-	Stell	-	-	-	target tidak diisi	target tidak diisi		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-		
Predikat kinerja									SR	SR		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	623,506,505.00	-	596,328,772.00	-	-		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik untuk menunjangkerja kantor	12	Bulan	19,582,200.00	12.00	18,605,000.00	100.00	95.01		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	5	Jenis	11,457,000.00	5.00	10,512,000.00	100.00	91.75		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapatdan kantor	12	Bulan	67,290,250.00	12.00	67,287,400.00	100.00	100.00		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan danpenggandaan kantor	12	Bulan	47,806,550.00	12.00	47,296,800.00	100.00	98.93		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah danbuku-buku peraturan	12	Bulan	13,740,000.00	12.00	10,805,000.00	100.00	78.64		
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	58,646,705.00	12.00	58,454,400.00	100.00	99.67		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan luar daerah	12	Bulan	404,983,800.00	12.00	383,368,172.00	100.00	94.66		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	94.09		
Predikat kinerja									ST	ST		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1,681,999,000.00	-	1,592,684,186.00	-	-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12	bulan	1,276,680,000.00	12.00	1,263,844,000.00	100.00	98.99		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	12	bulan	143,400,000.00	12.00	111,080,186.00	100.00	77.46		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	12	bulan	261,919,000.00	12.00	217,760,000.00	100.00	83.14		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	86.53		
Predikat kinerja									ST	T		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	211,070,000.00	-	187,239,000.00	-	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	12	bulan	206,320,000.00	12.00	182,489,000.00	100.00	88.45		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	2	paket	4,750,000.00	2.00	4,750,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	94.22		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						166,493,099,705.00	-	165,197,204,935.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									103.33	89.94		
Predikat kinerja Program									ST	T		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-	-	92,494,634,780.00	-	55,095,126,481.38	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	-	45,982,826,450.00	-	21,247,563,190.00	-	-		
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Raport SD	4,200	Rapor	196,496,000.00	4,200.00	195,704,500.00	100.00	99.60		
			Terpenuhinya buku dan alat tulis siswakurang mampu SD	-	siswa							
			Tersedianya seragam sekolah siswa baruSD/MI	-	Stell							
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya pembangunan ruang guru sekolah	3	ruang	752,269,000.00	3.00	699,694,000.00	100.00	93.01		
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya pembangunan perpustakaan seklah	2	ruang	478,792,000.00	2.00	454,180,000.00	100.00	94.86		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tersedianya pagar sekolah SDN 1 Kelapadan SDN 8 Muntok	180	Meter	467,233,000.00	180.00	447,605,000.00	100.00	95.80		
		Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas	Terpeliharanya ruang kelas	4	sekolah	1,833,110,000.00	4.00	1,773,469,000.00	100.00	96.75		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpeliharanya fisik bangunan sekolah	1	sekolah	36,718,000.00	1.00	34,308,000.00	100.00	93.44		
		Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa	Terlaksananya Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa	2	Jenis	2,177,096,000.00	2.00	2,166,221,240.00	100.00	99.50		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Tersalurnya dana BOS SD	134	SD	23,468,231,000.00	134.00	100,000,000.00	100.00	0.43		
			Tersalurnya hibah bansos pendidikan SD	400	Siswa							
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Olimpiade Sains Siswa Nasional Tingkat SD	1	Mata Pelajaran	62,231,450.00	1.00	61,731,450.00	100.00	99.20		
			Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI Dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI	2	Event							
			Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD/MI Dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/MI	12	Cabang							
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersalurnya beasiswa PPG guru PAI	8.00	orang	40,000,000.00	8.00	40,000,000.00	100.00	100.00		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembayaran Gaji Bulanan GTT dan PTT Sekolah Dasar	812	Orang	16,470,650,000.00	811.58	15,274,650,000.00	99.95	92.74		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									78.57	87.76		
Predikat kinerja									T	T		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	-	22,764,198,107.00	-	12,314,567,954.90	-	-		
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya Pengadaan Raport SMP	2,800	Siswa	128,717,640.00	2,800.00	127,135,960.00	100.00	98.77		
			Terpenuhinya buku dan alat tulis siswakurang mampu SMP	-	Buku							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			Tersedianya seragam sekolah siswa baruSMP/MTs	-	Stel							
		Rehabilitasi sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terpeliharanya ruang kelas sekolah	7	sekolah	4,432,826,000.00	7.00	4,211,433,420.90	100.00	95.01		
		Rehabilitasi sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terpeliharanya perpustakaan sekolah	2	sekolah	782,801,000.00	2.00	764,615,000.00	100.00	97.68		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terpeliharanya toilet sekolah	2	sekolah	273,392,000.00	2.00	264,636,000.00	100.00	96.80		
		Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa	Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa	4	jenis	636,510,000.00	4.00	608,608,107.00	100.00	95.62		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tersalurnya hibah bansos pendidikan SMP	200	Orang	9,456,502,000.00	200.00	100,000,000.00	100.00	1.06		
			Tersedianya dana BOS Sekolah MenengahPertama	35	Sekolah							
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Gala Siswa Indonesia	1	Jenjang	97,799,467.00	1.00	75,689,467.00	100.00	77.39		
			Terlaksananya Olimpiade Sains Siswa Nasional Tingkat SMP	3	Mata Pelajaran							
			Terseleksinya siswa berprestasi dalam lomba kesiswaan	2	Event							
			Terselenggaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/Mts dan FestivalLomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)SMP/Mts	16	Cabang							
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersalurnya pembayaran beasiswa PPG guru PAI	2	Orang	10,000,000.00	2.00	10,000,000.00	100.00	100.00		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terbayarnya gaji GTT PTT SMP	12	Bulan	6,945,650,000.00	12.00	6,152,450,000.00	100.00	88.58		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									69.23	83.43		
Predikat kinerja									S	T		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	-	14,760,370,723.00	-	12,918,856,336.48	-	-		
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya Raport TK	1,000	Buku	45,019,600.00	1,000.00	44,694,000.00	100.00	99.28		
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya pembangunan ruang kelas PAUD	2	sekolah	266,085,000.00	2.00	265,062,000.00	100.00	99.62		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terlaksananya pembangunan area bermain dan toilet	7	sekolah	889,258,000.00	7.00	878,258,000.00	100.00	98.76		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terpeliharanya ruang kelas sekolah	2	sekolah	609,072,000.00	2.00	549,896,536.48	100.00	90.28		
		Pengadaan Alat Praktik dan peraga Siswa PAUD	Terlaksananya pengadaan alat praktik dan peraga siswa	3	paket	63,830,000.00	3.00	61,824,000.00	100.00	96.86		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya dana BOP PAUD	12	bulan	4,243,280,000.00	12.00	3,763,550,000.00	100.00	88.69		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Pembayaran Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD	1,000	BSiswa	142,586,123.00	1,000.00	118,332,000.00	100.00	82.99		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	6	Kecamatan	60,000,000.00	6.00	58,349,800.00	100.00	97.25		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Tersedianya tambahan penghasilan pendidik PAUD	450	Orang	8,441,240,000.00	450.00	7,178,890,000.00	100.00	85.05		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	93.20		
Predikat kinerja									ST	ST		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		-	-	-	8,987,239,500.00	-	8,614,139,000.00	-	-	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Tersedianya dana BOP kesetaraan	12	bulan	788,400,000.00	12.00	786,350,000.00	100.00	99.74		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya insentif ustad/ustadzah	935	Orang	8,198,839,500.00	935.00	7,827,789,000.00	100.00	95.47		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.47		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						92,494,634,780.00	-	55,095,126,481.38	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									86.95	89.97		
Predikat kinerja Program									T	T		
				-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PENDIDIKAN						258,987,734,485.00	-	220,292,331,416.38	-	-		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PENDIDIKAN (%)									95.14	89.95		
PREDIKAT KINERJA URUSAN PENDIDIKAN									ST	T		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									DINKES	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintahan daerah	100	persen	95,550,205,663.00	100.00	73,770,750,276.00	-	-		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100	persen	10,000,000.00	100.00	9,850,000.00	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	4,000,000.00	4.00	3,900,000.00	100.00	97.50		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	4,000,000.00	4.00	4,000,000.00	100.00	100.00		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	2,000,000.00	4.00	1,950,000.00	100.00	97.50		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.33		
Predikat kinerja									ST	ST		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jasa aparatur sipil negara dan terlaksananya administrasi keuangan	100	persen	70,708,326,867.00	100.00	69,487,020,244.00	-	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	70,702,326,867.00	14.00	69,481,020,244.00	100.00	98.27		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.57		
Predikat kinerja									ST	ST		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	-	-	-	-	-		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	stel	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-		
Predikat kinerja									SR	SR		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	726,309,214.00	100.00	542,362,466.00	-	-		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	unit	107,528,870.00	8.00	99,971,000.00	100.00	92.97		
			- Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12	bulan	-	12.00	-	100.00	-		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	jenis	-	-	-				
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	bulan	1,395,020.00	12.00	-	100.00	-		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	46,745,112.00	12.00	40,722,500.00	100.00	87.12		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	50,765,825.00	12.00	50,057,700.00	100.00	98.61		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	5,006,000.00	12.00	3,300,000.00	100.00	65.92		
			Penyediaan Bahan/Material	12	bulan	50,468,387.00	12.00	47,475,130.00	100.00	94.07		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	464,400,000.00	12.00	300,836,136.00	100.00	64.78		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	71.92		
Predikat kinerja									ST	S		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	2,838,307,520.00	82.37	2,799,141,731.00	-	-		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	552	OB	1,342,820,000.00	552.00	1,341,820,000.00	100.00	99.93		
			- Tersedianya jasa pengiriman	-	paket	-	-	-	target tidak diisi	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	139,800,000.00	12.00	125,118,627.00	100.00	89.50		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium PHL	570	OB	1,355,687,520.00	564.00	1,332,203,104.00	98.95	98.27		
			Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja	12	bulan	-	12.00	-	100.00	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									99.74	95.90		
Predikat kinerja									ST	ST		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100	persen	954,280,000.00	-	932,375,835.00	-	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran honorarium PHL	324	OB	954,280,000.00	324.00	932,375,835.00	100.00	97.70		
			Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	12	bulan	-	12.00	-	100.00	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.70		
Predikat kinerja									ST	ST		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD	100	persen	20,312,982,062.00	-	-	-	-		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya layanan dan pendukung layanan kesehatan (BLUD)	1	RSUD	20,312,982,062.00	1.00	-	100.00	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	-		
Predikat kinerja									ST	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						95,550,205,663.00	-	73,770,750,276.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									99.96	77.24		
Predikat kinerja Program									ST	T		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpeliharanya sarana prasarana kesehatan	100	persen	105,774,822,980.57	100.00	80,915,943,563.00	-	-		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP	100	persen	24,464,750,112.00	100.00	17,907,747,239.00	-	-		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terlaksananya kegiatan renovasi sarana pelayanan kesehatan	1	unit	545,340,000.00	1.00	343,230,000.00	100.00	62.94		
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya peningkatan sarana pelayanan kesehatan	-	unit	-	-	-				
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terlaksananya kegiatan Pembangunan serta peningkatan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya	1	RSUD	2,725,961,500.00	1.00	2,675,608,100.00	100.00	98.15		
		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas/ pustu dan jaringannya	8	Puskesmas	272,985,000.00	8.00	271,926,000.00	100.00	99.61		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya kegiatan pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan			313,950,000.00						
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan`	Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit	1	RSUD	14,951,666,606.00	1.00	10,453,399,092.00	100.00	69.91		
		-	Tersedianya alat kesehatan Puskesmas	8	Puskesmas	-	8.00	-	100.00	-		
		Pengadaan Obat, Vaksin	Terdistribusinya obat essensial, bahan medis habis pakai (BMHP) dan reagen ke Puskesmas	8	Puskesmas	5,507,339,856.00	8.00	3,765,200,928.00	100.00	68.37		
		-	Terpenuhinya persediaan obat essensial, bahan medis habis pakai (BMHP) dan reagen	2	paket	-	2.00	-	100.00	-		
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya secara berkala alat kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan II	8	Puskesmas	147,507,150.00	8.00	109,845,119.00	100.00	74.47		
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya pemeliharaan rutin dan berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	-	paket	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	80.77		
Predikat kinerja									ST	T		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	100	persen	81,267,617,098.57	100.00	62,975,802,974.00	-	-		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya AMP	8	Puskesmas	911,903,000.00	8.00	653,384,571.00	100.00	71.65		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengembangan ruang Puskesmas ramah anak dan terselenggaranya Lomba Balita Sejahtera Indonesia	8	Puskesmas	362,825,000.00	8.00	331,830,000.00	100.00	91.46		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan dan pembinaan anak usia sekolah dasar	34	Sekolah	187,756,060.00	34.00	156,756,060.00	100.00	83.49		
			Terlayannya masyarakat dalam pelayanan kesehatan	8	Puskesmas	-	8.00	-	100.00	-		
			Terperiksanya kesehatan anak sekolah	50	sekolah	-	50.00	-	100.00	-		
			Terpilinya sekolah sehat sebagai peringkat I ditingkat Provinsi	24	Sekolah	-	24.00	-	100.00	-		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya skrining kesehatan usia produktif (15 s.d 59 tahun)	23	Sekolah	167,008,270.00	23.00	33,548,270.00	100.00	20.09		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Peningkatan pelayanan kesehatan di Posyandu Usila (pertemuan kader) dan pengadaan kartu menuju sehat Usila	2,000	buku	215,930,000.00	2,000.00	203,518,000.00	100.00	94.25		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terselenggaranya pembinaan dan kegiatan Posbindu	250	peserta	18,749,800.00	250.00	18,749,800.00	100.00	100.00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terselenggaranya pembinaan dan pencegahan diabetes melitus	150	peserta	12,749,930.00	150.00	12,749,930.00	100.00	100.00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terselenggaranya kegiatan kesehatan jiwa dan penanganan gangguan jiwa berat	8	Puskesmas	56,744,930.00	8.00	50,544,930.00	100.00	89.07		
		-	Terselenggaranya kegiatan kesehatan jiwa dan penanganan gangguan jiwa berat	30	peserta	-	-	-	-	-		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tertatalaksananya penderita TB sesuai prosedur DOTS	8	Puskesmas	92,178,150.00	8.00	72,562,150.00	100.00	78.72		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tersedianya bahan habis pakai pemeriksaan HIV	1	paket	149,004,800.00	1.00	132,494,800.00	100.00	88.92		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah penanganan kasus gizi buruk	9	kasus	1,021,992,100.00	36.00	630,944,700.00	400.00	61.74		
		-	Terlaksananya pencegahan dan penanganan stunting	5	Kecamatan	-	5.00	-	100.00	-		
		-	Tersedianya PMT penderita TB Paru dan Kusta	75	orang	-	-	-	-	-		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya pencegahan dan penanganan stunting	6	Kecamatan	20,284,800.00	6.00	18,929,800.00	100.00	93.32		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terselenggaranya kegiatan pemucuan dan verifikasi ODF	17	desa	197,350,000.00	17.00	175,267,200.00	100.00	88.81		
		-	Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan pembinaan sarana pengolahan limbah pada fasilitas pelayanan kesehatan	8	Puskesmas	-	8.00	-	100.00	-		
		-	Terselenggaranya kegiatan verifikasi Pokja pasar sehat dan sekolah	4	pasar	-	4.00	-	100.00	-		
		-	Terselenggaranya pemeriksaan kualitas air bersih	128	sampel	-	128.00	-	100.00	-		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Pembentukan Posyandu percontohan pemanfaatan TOGA	16	Posyandu	8,779,864.00	16.00	6,749,264.00	100.00	76.87		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terdeteksinya kasus KLB penyakit menular dan penyakit tidak menular	175	kasus	670,046,780.00	7.00	205,036,569.00	4.00	30.60		
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlayannya kesehatan mitra (kondisi khusus)	30	kali	313,699,850.00	30.00	273,040,708.00	100.00	87.04		
		-	Terselenggaranya kegiatan PMI	1	tahun	-	1.00	-	100.00	-		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan PTM	8	Puskesmas	1,299,233,592.00	8.00	1,096,970,072.00	100.00	84.43		
		-	Terdeteksinya pasien disemua fasilitas pelayanan kesehatan	100	persen	-	100.00	-	100.00	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			Terdeteksinya penyakit hepatitis disemua fasilitas pelayanan kesehatan	8	Puskesmas	-	8.00	-	100.00	-		
			Terlaksananya pencegahan dan penggangguhan penyakit diare	8	Puskesmas	-	8.00	-	100.00	-		
			Terlayannya seluruh penderita kusta	40	kasus	-	2.00	-	5.00	-		
			Terselenggaranya desa UCI, sosialisasi bias dan monev imunisasi	64	desa	-	-	-	-	-		
			Terselenggaranya kegiatan pengobatan kecacingan	8	Puskesmas	-	8.00	-	100.00	-		
			Terselenggaranya kegiatan tatalaksana penderita malaria	8	Puskesmas	-	8.00	-	100.00	-		
			Terselenggaranya pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas)	8	Puskesmas	-	8.00	-	100.00	-		
			Tertatalaksananya program DBD dan terkendalinya penyakit DBD di Kabupaten Bangka Barat	100	kasus	-	-	-	-	-		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil	100	persen	268,640,000.00	100.00	264,100,000.00	100.00	98.31		-
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				64,925,000.00	100.00	62,325,000.00	100.00	96.00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				1,806,238,800.00	70.00	1,141,635,000.00	70.00	63.21		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				139,931,200.00	80.00	111,475,000.00	80.00	79.66		
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				29,650,000.00	90.00	26,000,000.00	90.00	87.69		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat	31,000	peserta	27,622,619,920.00	79,867.00	26,434,604,731.00	257.64	95.70		-
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Peningkatan tatanan kawasan sehat	7	tatanan/ desa	43,058,000.00	7.00	2,653,000.00	100.00	6.16		-
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional RSUD	1	paket	27,914,035,166.00	1.00	23,638,137,108.00	100.00	84.68		-
			- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor RSUD	1	paket	-	1.00	-	100.00	-		
			- Terpenuhinya obat-obatan rutin di RSUD	1	paket	-	1.00	-	100.00	-		
			- Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit	12	bulan	-	12.00	-	100.00	-		
			- Tersedianya layanan dan pendukung layanan kesehatan	1	RSUD	-	1.00	-	100.00	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Terkelolanya Bantuan Operasional Kesehatan	8	Puskesmas	16,934,833,146.57	8.00	6,947,209,520.00	100.00	41.02	-	
		- Tersedianya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, Pustu, Poliindes dan Poskesdes		8	Puskesmas	-	8.00	-	100.00	-		
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya survei akreditasi	1	RSUD	737,448,940.00	1.00	274,586,791.00	100.00	37.23		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									94.36	75.19		
Predikat kinerja									ST	T		
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	100	persen	42,455,770.00	100.00	32,393,350.00	-	-		
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, up dating dan analisis data serta penyusunan profil	2	jenis	21,999,940.00	2.00	17,308,690.00	100.00	78.68		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya sistem informasi Puskesmas	8	Puskesmas	20,455,830.00	8.00	15,084,660.00	100.00	73.74		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	76.21		
Predikat kinerja									ST	T		
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan BLUD pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten	100.00	persen	-	-	-	-	-		
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan	8.00	Puskesmas	-	-	-	-	-		
		- Terlaksananya penguatan pelayanan kesehatan		8.00	Puskesmas	-	-	-	-	-		
		- Terselenggaranya jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terawasi		8.00	Puskesmas	-	-	-	-	-		
		- Terselenggaranya pengelolaan BLUD		8.00	Puskesmas	-	-	-	-	-		
		- Terselenggaranya Puskesmas berprestasi		8.00	Puskesmas	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-		
Predikat kinerja									SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						105,774,822,980.57	-	80,915,943,563.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									73.59	58.04		
Predikat kinerja Program									S	R		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan sesuai kompetensi	95	persen	10,478,248,500.00	-	9,409,021,143.00	-	-		
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan jasa tenaga kesehatan	100	persen	10,166,580,600.00	100.00	9,233,291,443.00	-	-		
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan	12	bulan	10,166,580,600.00	12.00	9,233,291,443.00	100.00	90.82		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan	
				5			6		7				
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp			
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	90.82	
									Predikat kinerja		ST	ST	
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota	100.00	persen	311,667,900.00	-	175,729,700.00	-	-			
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	110.00	orang	311,667,900.00	110.00	175,729,700.00	100.00	56.38			
		-	Terlaksananya pelatihan penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatologi dasar PONED	-	tenaga kesehatan	-	-	-	target tidak diisi	-			
		-	Terlaksananya penilaian bagi pegawai untuk pengusulan angka kredit	50.00	orang	-	-	-	-	-			
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		50.00	56.38	
									Predikat kinerja		R	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						10,478,248,500.00	-	9,409,021,143.00	-	-			
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)		75.00	73.60	
									Predikat kinerja Program		T	S	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	50	Persen	202,041,050.00	-	59,350,011.00	-	-			
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100	Persen	29,434,050.00	-	3,671,150.00	-	-			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tersedianya jumlah sarana kefarmasian yang wajib diawasi	21	sarana	29,434,050.00	-	3,671,150.00	-	12.47			
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		-	12.47	
									Predikat kinerja		SR	SR	
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100	Persen	104,547,000.00	-	42,937,000.00	-	-			
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terselenggaranya kegiatan pengawasan terhadap tempat pengolahan makanan dan minuman	50	sampel	104,547,000.00	20.00	42,937,000.00	40.00	41.07			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Terselenggaranya pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	-	Kecamatan	-	-	-	target tidak diisi	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	64.57		
Predikat kinerja									ST	R		
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan strata desa siaga	32	Persen	31,878,350.00	-	13,388,350.00	-	-		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya pelaksanaan gerakan masyarakat sehat	6	Kecamatan	31,878,350.00	6.00	13,388,350.00	100.00	42.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	42.00		
Predikat kinerja									ST	SR		
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan strata desa siaga	32	Persen	4,750,000.00	-	4,750,000.00	-	-		
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terbinanya Posyandu, pelatihan kader Poskestren dan terbentuknya sakabakti husada	40	Posyandu	4,750,000.00	40.00	4,750,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						510,375,250.00	-	324,057,750.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	68.86		
Predikat kinerja Program									ST	S		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN KESEHATAN						212,515,693,443.57	-	164,479,122,743.00	-	-		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN KESEHATAN (%)									76.71	61.62		
PREDIKAT KINERJA URUSAN KESEHATAN									T	R		
-		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PUPR	
-		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	6,488,196,622.50	-	5,945,340,107.00	-	-		
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan capaian kinerja program Perangkat Daerah	100	%	8,000,000.00	-	5,600,000.00	-	-		
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	3	Jenis	2,000,000.00	3.00	1,950,000.00	100.00	97.50		
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	4,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	48.75		
			Jumlah dokumen tersusun	4	Dokumen	-	4.00	-	100.00	-		
			Jumlah dokumen tersusun	4	Dokumen	-	4.00	-	100.00	-		
-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tesedianya Dokumen	3	Dokumen	2,000,000.00	3.00	1,700,000.00	100.00	85.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	77.08		
Predikat kinerja									ST	T		
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Status capaian kinerja keuangan	100	%	3,647,180,000.00	-	3,403,473,328.00	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	3,641,180,000.00	12.00	3,397,623,328.00	100.00	93.31		
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	97.50		
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen tersusun	2	Dokumen	2,000,000.00	2.00	1,950,000.00	100.00	97.50		
-		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	97.50		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	96.45		
Predikat kinerja									ST	ST		
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalnya disiplin aparatur	100	%	-	-	-	-	-		
-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	Stel	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-		
Predikat kinerja									SR	SR		
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	638,060,940.00	-	451,916,314.00	-	-		
-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	9,997,620.00	12.00	9,991,000.00	100.00	99.93		
-		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	Bulan	2,879,000.00	12.00	2,690,000.00	100.00	93.44		
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman kantor	12	Bulan	42,789,320.00	12.00	41,158,900.00	100.00	96.19		
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12	Bulan	8,500,000.00	12.00	8,499,750.00	100.00	100.00		
-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	4,895,000.00	12.00	4,650,000.00	100.00	94.99		
-		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	69,000,000.00	12.00	68,987,000.00	100.00	99.98		
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	Bulan	500,000,000.00	12.00	315,939,664.00	100.00	63.19		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	92.53		
Predikat kinerja									ST	ST		
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	1,027,567,682.50	-	961,642,515.00	-	-		
-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran honorarium PHL	144	OB	442,845,000.00	144.00	441,580,000.00	100.00	99.71		
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air	12	Bulan	109,340,000.00	12.00	78,622,015.00	100.00	71.91		
-		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	23,294,682.50	12.00	20,810,000.00	100.00	89.33		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium PHL	84	OB	452,088,000.00	84.00	420,630,500.00	100.00	93.04	-	-
-		-	Pembayaran honorarium PHL	96	OB	-	-	-	-	-	-	-
-		-	Pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja	12	Bulan	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									66.67	88.50	-	-
Predikat kinerja									S	T	-	-
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam keadaan baik	100	%	1,167,388,000.00	-	1,122,707,950.00	-	-	-	-
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran honorarium PHL	324	OB	1,137,388,000.00	324.00	1,092,791,950.00	100.00	96.08	-	-
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	3	Gedung	30,000,000.00	3.00	29,916,000.00	100.00	99.72	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.90	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						6,488,196,622.50	-	5,945,340,107.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									93.33	90.49	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah daerah jaringan irigasi yang dibangun	57	%	7,420,340,810.00	-	5,985,210,405.02	-	-	-	-
-		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data identifikasi, monitoring dan evaluasi rawan banjir/genangan, panjang sungai yang menyebabkan rawan banjir yang dinormalisasi	70	%	441,410,000.00	-	434,217,000.00	-	-	-	-
-		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Talud Terbangun	-	Meter	-	-	-	-	-	-	-
-		Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	Kegiatan	441,410,000.00	2.00	434,217,000.00	100.00	98.37	-	-
-		-	Terlaksananya peningkatan pembersihan/pengerukan sungai/kali (meter)	12,511	m3	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									50.00	98.37	-	-
Predikat kinerja									R	ST	-	-
-		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	100	%	6,978,930,810.00	-	5,550,993,405.02	-	-	-	-
-		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terpeliharanya jaringan Irigasi	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
-		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	-	2	Kegiatan	6,838,145,110.00	2.00	5,411,470,205.02	100.00	79.14	-	-
-		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	peningkatan fungsi jaringan irigasi	1	Kegiatan	140,785,700.00	1.00	139,523,200.00	100.00	99.10	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	89.12	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						7,420,340,810.00	-	5,985,210,405.02	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									75.00	93.75	-	-
Predikat kinerja Program									T	ST	-	-
-		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase titik/lokasi/ kawasan rawanbanjir yang memiliki sistem drainase yang baik	40	%	855,065,000.00	-	806,150,003.08	-	-	-	-
-		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase titik/lokasi/kawasan rawan banjir yang memiliki sistem drainase yang baik	100	%	855,065,000.00	-	806,150,003.08	-	-	-	-
-		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Siring yang terbangun	9,245	Meter	855,065,000.00	9,245.00	806,150,003.08	100.00	94.28	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	94.28	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						855,065,000.00	-	806,150,003.08	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	94.28	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan dengankondisi baik	74	%	57,567,256,898.00	-	55,821,953,761.84	-	-	-	-
-		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dan jembatan dengankondisi baik	74	%	57,567,256,898.00	-	55,821,953,761.84	-	-	-	-
-		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya dokumen lingkunganPembangunan Jalan dan Jembatan	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
-		Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Terlaksananya kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan	1,700	meter	5,966,850,900.00	1,700.00	5,674,627,270.00	100.00	95.10	-	-
-		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya jalan dan jembatan yangmemperlancar arus lalu lintas	1	Dokumen	531,274,130.00	1.00	464,973,600.00	100.00	87.52	-	-
-		Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun	3,150	meter	3,370,722,400.00	2,900.00	3,120,632,359.00	92.06	92.58	-	-
-		Pembangunan Jembatan	-	1	keg	1,682,891,350.00	1.00	1,682,891,350.00	100.00	100.00	-	-
-		Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dtingkatkan	10,414	m	32,515,493,368.00	10,414.00	32,015,997,394.00	100.00	98.46	-	-
-		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang pemeliharaan jalan	2,520	m	10,164,233,000.00	2,224.00	9,610,796,093.84	88.25	94.56	-	-
-		Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya jalan secara rutin	10	lokasi	3,335,791,750.00	10.00	3,252,035,695.00	100.00	97.49	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab	-	unit	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									97.19	95.10	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						57,567,256,898.00	-	55,821,953,761.84	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									97.19	95.10	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	persentase pekerja konstruksi yang memiliki sertifikat pekerja terampil	15	%	-	-	-	-	-	-	-
-		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	persentase pekerja konstruksi yang memiliki sertifikat pekerja terampil	15	%	-	-	-	-	-	-	-
-		Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta SKT untuk pekerjakonstruksi	-	orang	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja Program									f	SR	SR	-
-		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah kebijakan tata ruang yang ditetapkan	6	kebijakan	542,438,880.00	-	516,791,750.00	-	-	-	-
-		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang ditetapkan	2	kebijakan	-	-	-	-	-	-	-
-		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen yang di susun (RTKawasan Perkotaan Jebus dan PerkotaanMuntok)	-	dok	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
-		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2	dokumen	269,999,750.00	-	262,765,750.00	-	-	-	-
-		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen RTRW yang direvisi dan Albumpeta tematik	1	dokumen	119,999,800.00	1.00	115,335,800.00	100.00	96.11	-	-
-		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen RRTR kawasan perkotaanmuntok kelapa dan jebus yang diMutakhirkan	1	dokumen	149,999,950.00	1.00	147,429,950.00	100.00	98.29	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.20	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
-		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1	dokumen	176,875,130.00	-	165,462,000.00	-	-	-	-
-		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang di susun dan Tersedianya dokumen survey dan PemetaanPemanfaatan Ruang	1	dokumen	176,875,130.00	1.00	165,462,000.00	100.00	93.55	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	93.55	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	1	-	105,000,000.00	1.00	77,045,700.00	100.00	73.38		
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	1	-	25,000,000.00	1.00	24,842,700.00	100.00	99.37		
-		Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat	Terlaksananya Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK	-	unit	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	90.73	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						4,413,092,500.00	-	4,360,756,501.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	90.73	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
-		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-	627,767,000.00	-	623,054,935.00	-	-	-	
-		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota	-	-	-	627,767,000.00	-	623,054,935.00	-	-	-	
-		Pembangunan TPA / TPST / SPA/ TPS-3R / TPS	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1	unit	627,767,000.00	1.00	623,054,935.00	100.00	99.25	Pencairan Uang Muka 25%	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.25	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						627,767,000.00	-	623,054,935.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.25	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
-		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase sarana dan prasarana aparaturdalam kondisi baik	100	%	15,364,263,140.72	-	15,271,266,220.72	-	-	-	
-		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di WilayahDaerah Kabupaten/Kota, Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100	%	15,364,263,140.72	-	15,271,266,220.72	-	-	-	
-		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya Bangunan Gedung Negara	7	Paket	15,364,263,140.72	7.00	15,271,266,220.72	100.00	99.39		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.39	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						15,364,263,140.72	-	15,271,266,220.72	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.39	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
-				-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						23,079,056,400.72	-	22,888,804,141.72	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (%)									100.00	95.10	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									ST	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI TOTAL URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						95,952,354,611.22		91,964,250,168.66				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM TOTAL URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (%)									96.552	94.36		
PREDIKAT KINERJA TOTAL URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									ST	ST		
-		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	5,515,168,002.50	-	4,972,266,886.00	-	-	-	-
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	-	7,427,000.00	-	6,350,000.00	-	-	-	-
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	3	Dokumen	2,000,000.00	3.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	2	Dokumen	3,427,000.00	2.00	2,350,000.00	100.00	68.57	-	-
-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	4	Dokumen	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	89.52	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan	100	%	3,174,470,965.00	-	2,917,383,697.00	-	-	-	-
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	3,168,470,965.00	12.00	2,911,383,697.00	100.00	91.89	-	-
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-
-		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.97	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	100	%	22,800,000.00	-	19,800,000.00	-	-	-	-
-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga	45	stel	22,800,000.00	45.00	19,800,000.00	100.00	86.84	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	86.84	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	1	-	719,966,637.50	-	575,879,944.00	-	-	-	-
-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	1,999,900.00	12.00	1,467,000.00	100.00	73.35	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	-	unit	-	-	-	-	-	-	-
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman Kantor	12	bulan	24,359,512.50	12.00	21,140,920.00	100.00	86.79	-	-
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	273,834,225.00	12.00	147,893,400.00	100.00	54.01	-	-
-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	12	bulan	4,800,000.00	12.00	2,400,000.00	100.00	50.00	-	-
-		Penyediaan Bahan/Material	Alat Tulis Kantor	12	bulan	34,000,000.00	12.00	33,878,000.00	100.00	99.64	-	-
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah / Dalam	12	bulan	380,973,000.00	12.00	369,100,624.00	100.00	96.88	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	76.78	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,348,810,000.00	-	1,294,982,095.00	-	-	-	-
-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Honorarium PHL	227	ob	552,490,000.00	226.00	546,070,000.00	99.56	98.84	-	-
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	89,100,000.00	12.00	67,727,595.00	100.00	76.01	-	-
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium PHL	292	ob	707,220,000.00	283.00	681,184,500.00	96.92	96.32	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									98.83	90.39	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	241,693,400.00	-	157,871,150.00	-	-	-	-
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	12	bulan	236,010,000.00	12.00	154,709,150.00	100.00	65.55	-	-
-			Pembayaran Honorairum PHL	43	ob	-	32.00	-	74.42	-	-	-
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	12	bulan	3,865,000.00	9.00	1,835,000.00	75.00	47.48	-	-
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12	bulan	1,818,400.00	12.00	1,327,000.00	100.00	72.98	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									87.35	62.00	-	-
Predikat kinerja									T	R	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						5,515,168,002.50	-	4,972,266,886.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									97.70	83.92	-	-
Predikat kinerja Program									ST	T	-	-
-		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase berkurangnya luasanpermukiman kumuh di kawasan perkotaan	20	%	2,962,314,000.00	-	2,917,932,850.00	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	-	-	-	2,462,314,000.00	-	2,424,571,900.00	-	-	-	-
-		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat	112	unit	2,462,314,000.00	112.00	2,424,571,900.00	100.00	98.47	-	-
-		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh	100	%	500,000,000.00	-	493,360,950.00	-	-	-	-
-		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya Dokumen Perumahan dan Permukiman	1	dokumen	500,000,000.00	1.00	493,360,950.00	100.00	98.67	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.67	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						2,962,314,000.00	-	2,917,932,850.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	98.67	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	20	%	186,783,800.00	-	176,603,000.00	-	-	-	-
-		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/ Kota	100	%	186,783,800.00	-	176,603,000.00	-	-	-	-
-		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Rehabilitasi / Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat	5	unit	130,000,000.00	5.00	129,872,000.00	100.00	99.90	-	-
-		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Perumahan Masyarakat (BOP BSPS)	5	kecamatan	56,783,800.00	5.00	46,731,000.00	100.00	82.30	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	91.10	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						186,783,800.00	-	176,603,000.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	91.10	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	-	130,000,000.00	-	54,948,350.00	-	-	-	-
-		Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	-	-	-	130,000,000.00	-	54,948,350.00	-	-	-	-
-		Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	-	5.00	unit	130,000,000.00	2.00	54,948,350.00	40.00	42.27	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									40.00	42.27	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						130,000,000.00	-	54,948,350.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									40.00	42.27	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Predikat kinerja Program												
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						8,794,265,802.50	-	8,121,751,086.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (%)									84.42	78.99	-	-
PREDIKAT KINERJA URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									T	T	-	-
-												
-												SATPOL PP DAN PB
-												-
-												-
-												-
-												-
-												-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
-												-
-												-
-												-
-												-
-												-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
-												-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5			6		7		8	9	
-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus hari - hari tertentu	25	stel	-	-	-	-	-	-	-	
Predikat kinerja									-	-	-	-	
									SR	SR	-	-	
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	165,742,250.00	-	165,742,250.00	-	-		-	
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor	12	bulan	19,871,500.00	12.00	19,871,500.00	100.00	100.00		-	
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan kantor	12	bulan	25,850,200.00	12.00	25,850,200.00	100.00	100.00		-	
-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah dan surat kabar	12	bulan	2,276,000.00	12.00	2,276,000.00	100.00	100.00		-	
-		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kebutuhan kantor (ATK)	12	bulan	17,364,550.00	12.00	17,364,550.00	100.00	100.00		-	
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata- rata pelaksanaan SPPD	12	bulan	100,380,000.00	12.00	100,380,000.00	100.00	100.00		-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00		-	
									Predikat kinerja		ST	ST	-
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	266,728,798.00	-	266,728,798.00	-	-		-	
-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah phl dan jumlah kebutuhan surat menyurat	45	OB	94,600,000.00	45.00	94,600,000.00	100.00	100.00		-	
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hubungan komunikasi berjalan lancar dan kelancaran operasional kantor	12	bulan	21,949,998.00	12.00	21,949,998.00	100.00	100.00		-	
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah phl	63	OB	150,178,800.00	63.00	150,178,800.00	100.00	100.00		-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00		-	
									Predikat kinerja		ST	ST	-
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	%	195,658,200.00	-	195,658,200.00	-	-		-	
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pembayaran honorarium PHL sopir dan perizinan	36	OB	192,658,200.00	36.00	192,658,200.00	100.00	100.00		-	
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan ktr	-	gedung	-	-	-	target tidak diisi			-	
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan, Terpeliharanya peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi	5	jenis	3,000,000.00	5.00	3,000,000.00	100.00	100.00		-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00		-	
									Predikat kinerja		ST	ST	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						3,099,855,100.00	-	3,099,855,100.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktifitas	100	%	2,493,940,500.00	-	2,493,940,500.00	-	-	-	-
-		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten	12	bulan	2,469,665,500.00	-	2,469,665,500.00	-	-	-	-
-		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase terciptanya situasi dan kondisi yang tertib, aman dan terkendali	12	kali perkecamatan/tahun	14,200,000.00	12.00	14,200,000.00	100.00	100.00	-	-
-		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya monitoring pelaksanaan terhadap perda dan Perkada	-	kecamatan	-	-	-	target tidak diisi	-	-	-
-		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Gelar Pasukan dalam rangka pemeliharaan tibumtrnmas, linmas, dan kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran	16	desa/kelurahan	97,630,500.00	16.00	97,630,500.00	100.00	100.00	-	-
-		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase tingkat kesadaran anggota satuan polisi pamong praja sebagai abdi negara, Terciptanya Penegakan disiplin anggota piket pos dan BKO, Terlaksananya piket pos pos penjagaan	10	pos/bulan	2,357,835,000.00	10.00	2,357,835,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
-		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	24,275,000.00	-	24,275,000.00	-	-	-	-
-		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terciptanya penyelesaian pelanggaran secara non yustisi	1	paket	24,275,000.00	1.00	24,275,000.00	100.00	100.00	-	-
-		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terciptanya penyelesaian pelanggaran secara yustisi	-	paket	-	-	-	target tidak diisi	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						2,493,940,500.00	-	2,493,940,500.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
-		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana yang menerima layanan sesuai standar	100	%	1,551,998,750.00	-	1,551,998,750.00	-	-	-	-
-		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pencegahan dan Penanganan Bencana	100	%	137,360,000.00	-	137,360,000.00	-	-	-	-
-		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Mitigasi Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah PHL Anggota TRC	63	OB	137,360,000.00	63.00	137,360,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
-		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	1,414,638,750.00	-	1,414,638,750.00	-	-	-	-
-		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana, Terwujudnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana	12	kasus	4,572,500.00	12.00	4,572,500.00	100.00	100.00	-	-
-		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan logistik untuk penanggulangan bencana (item barang)	-	paket	-	-	-	target tidak diisi	-	-	-
-		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Tertanganinya Penyebaran Covid 19	12	Bulan	1,410,066,250.00	12.00	1,410,066,250.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,551,998,750.00	-	1,551,998,750.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran yang menerima layanan sesuai standar	100	%	163,960,000.00	-	163,960,000.00	-	-	-	-
-		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan Bahaya Kebakaran	100	%	163,960,000.00	-	163,960,000.00	-	-	-	-
-		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/volume/tandon air/air/foam untuk pemadaman, 'Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, 'terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran	-	paket	-	-	-	target tidak diisi	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Honorarium per kejadian kebakaran	40	kejadian	7,875,000.00	40.00	7,875,000.00	100.00	100.00	-	
-		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dan Honorarium Piket Jaga, Jumlah PHL Anggota Damkar	63	OB	156,085,000.00	63.00	156,085,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						163,960,000.00	-	163,960,000.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA						7,309,754,350.00	-	7,309,754,350.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA (%)									100.00	100.00	-	
PREDIKAT KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA									ST	ST	-	
-		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100.00	%	1,662,757,286.20	-	1,381,537,689.00	-	-	SATPOL PP DAN DAMKAR	
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	%	-	-	-	-	-	-	
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD, Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	
-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan LAKIP, LKPJ, TAPKIN, LPPD	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00	%	1,131,091,005.00	-	934,812,713.00	-	-	-	
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	4.00	bulan	1,129,091,005.00	4.00	932,862,713.00	100.00	82.62	-	
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	2,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	
-		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5			6		7		8	9	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	90.06	-	
Predikat kinerja										ST	ST	-	
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00	%	-	-	-	-	-	-	-	
-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus hari - hari tertentu	25.00	stel	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										-	-	-	
Predikat kinerja										SR	SR	-	
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	%	271,461,029.20	-	205,386,815.00	-	-	-	-	
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor	4.00	bulan	12,487,570.00	4.00	12,412,000.00	100.00	99.39	-	-	
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan kantor	4.00	bulan	19,093,423.00	4.00	19,090,000.00	100.00	99.98	-	-	
-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah majalah dan surat kabar	4.00	bulan	2,703,320.00	4.00	2,700,000.00	100.00	99.88	-	-	
-		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kebutuhan kantor (ATK)	4.00	bulan	15,098,116.20	4.00	15,097,000.00	100.00	99.99	-	-	
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata- rata pelaksanaan SPPD	4.00	bulan	222,078,600.00	4.00	156,087,815.00	100.00	70.28	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	93.91	-	
Predikat kinerja										ST	ST	-	
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	%	139,910,952.00	-	136,596,161.00	-	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah phl dan jumlah kebutuhan surat menyurat	60.00	OB	46,500,000.00	60.00	46,500,000.00	100.00	100.00	-	-	
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hubungan komunikasi berjalan lancar dan kelancaran operasional kantor	4.00	bulan	13,050,002.00	4.00	9,737,341.00	100.00	74.62	-	-	
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah phl	84.00	OB	80,360,950.00	84.00	80,358,820.00	100.00	100.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	91.54	-	
Predikat kinerja										ST	ST	-	
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100.00	%	120,294,300.00	-	104,742,000.00	-	-	-	-	
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pembayaran honorarium PHL sopir dan perizinan	48.00	OB	110,951,800.00	48.00	95,742,000.00	100.00	86.29	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan dan peralatan ktr	1.00	gedung	7,342,500.00	1.00	7,000,000.00	100.00	95.34	-	
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan, Terpeliharanya peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi	5.00	jenis	2,000,000.00	5.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	93.88	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,662,757,286.20	-	1,381,537,689.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									80.00	73.88	-	
Predikat kinerja Program									T	S	-	
-		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktifitas	100.00	%	1,735,935,250.00	-	1,398,194,490.00	-	-	-	
-		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten	12.00	bulan	1,683,554,760.00	-	1,345,814,000.00	-	-	-	
-		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Persentase terciptanya situasi dan kondisi yang tertib, aman dan terkendali	12.00	kali perkecamatan/tahun	38,015,700.00	12.00	35,175,000.00	100.00	92.53	-	
-		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya monitoring pelaksanaan terhadap perda dan Perkada	6.00	kecamatan	18,014,000.00	6.00	14,700,000.00	100.00	81.60	-	
-		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Gelar Pasukan dalam rangka pemeliharaan tibumtrnmas, linmas, dan kesiapsiagaan dan pemadam kebakaran	16.00	desa/kelurahan	55,366,060.00	16.00	40,584,000.00	100.00	73.30	-	
-		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase tingkat kesadaran anggota satuan polisi pamong praja sebagai abdi negara, Terciptanya Penegakan disiplin anggota piket pos dan BKO, Terlaksananya piket pos pos penjagaan	10.00	pos/bulan	1,572,159,000.00	10.00	1,255,355,000.00	100.00	79.85	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	81.82	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
-		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	52,380,490.00	-	52,380,490.00	-	-	-	
-		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terciptanya penyelesaian pelanggaran secara non yustisi	1.00	paket	15,203,300.00	1.00	15,203,300.00	100.00	100.00	-	
-		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terciptanya penyelesaian pelanggaran secara yustisi	1.00	paket	37,177,190.00	1.00	37,177,190.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,735,935,250.00	-	1,398,194,490.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	90.91	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran yang menerima layanan sesuai standar	100.00	%	126,966,680.00	-	123,199,480.00	-	-	-	-
-		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan dan Penanganan Bahaya Kebakaran	100.00	%	126,966,680.00	-	123,199,480.00	-	-	-	-
-		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah/volume/tandon air/air/foam untuk pemadaman, 'Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran, 'terpenuhinya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1.00	paket	36,561,030.00	1.00	33,369,030.00	100.00	91.27	-	-
-		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Honorarium per kejadian kebakaran	40.00	kejadian	8,951,250.00	40.00	8,951,250.00	100.00	100.00	-	-
-		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dan Honorarium Picket Jaga, Jumlah PHL Anggota Damkar	84.00	OB	81,454,400.00	84.00	80,879,200.00	100.00	99.29	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	96.85	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						126,966,680.00	-	123,199,480.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	96.85	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						3,525,659,216.20	-	2,902,931,659.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN (%)									93.33	87.21	-	-
PREDIKAT KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									ST	T	-	-
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100.00	%	424,090,143.00	-	339,300,263.00	-	-	BPBD	-
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	%	-	-	-	-	-	-	-
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD, Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-
-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan LAKIP,LKPJ,TAPKIN,LPPD	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00	%	316,543,143.00	-	232,105,635.00	-	-	-	-
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	4.00	bulan	314,543,143.00	4.00	230,105,635.00	100.00	73.16	-	-
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1.00	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	86.58	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00	%	-	-	-	-	-	-	-
-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus hari - hari tertentu	25.00	stel	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	%	54,500,000.00	-	54,450,000.00	-	-	-	-
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan logistik kantor	4.00	bulan	20,415,000.00	4.00	20,415,000.00	100.00	100.00	-	-
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan kantor	4.00	bulan	3,000,000.00	4.00	3,000,000.00	100.00	100.00	-	-
-		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kebutuhan kantor (ATK)	4.00	bulan	7,000,000.00	4.00	7,000,000.00	100.00	100.00	-	-
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rata- rata pelaksanaan SPPD	4.00	bulan	24,085,000.00	4.00	24,035,000.00	100.00	99.79	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.95	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	%	15,740,000.00	-	15,444,628.00	-	-	-	-
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hubungan komunikasi berjalan lancar dan kelancaran operasional kantor	4.00	bulan	7,000,000.00	4.00	6,704,628.00	100.00	95.78	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah phl	4.00	OB	8,740,000.00	4.00	8,740,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.89	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100.00	%	37,307,000.00	-	37,300,000.00	-	-	-	
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pembayaran honorarium PHL sopir dan perizinan	4.00	OB	37,307,000.00	4.00	37,300,000.00	100.00	99.98	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.98	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						424,090,143.00	-	339,300,263.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	96.10	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
-		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana yang menerima layanan sesuai standar	100.00	%	1,272,068,200.00	-	1,182,583,800.00	-	-	-	
-		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pencegahan dan Penanganan Bencana	12.00	bulan	65,250,750.00	-	65,180,000.00	-	-	-	
-		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah PHL Anggota TRC	84.00	OB	65,250,750.00	84.00	65,180,000.00	100.00	99.89	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.89	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
-		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		-	-	1,206,817,450.00	-	1,117,403,800.00	-	-	-	
-		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		-	1.00	1,096,391,750.00	1.00	1,009,012,400.00	100.00	92.03	-	
-		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		-	1.00	110,425,700.00	1.00	108,391,400.00	100.00	98.16	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.09	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,272,068,200.00	-	1,182,583,800.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	97.49	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						1,696,158,343.00	-	1,521,884,063.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (%)									100.00	96.80	-	-
PREDIKAT KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									ST	ST	-	-
-				-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12,531,571,909.20	-	11,734,570,072.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									97.78	94.67	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan		
				5			6		7					
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp				
PREDIKAT KINERJA URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											ST	ST	-	
-		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL DAN PEMDES		
-		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	%	5,399,204,060.00	-	4,946,258,132.00	-	-	-	-		
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%									
			Optimalnya disiplin aparatur	100	%									
			Status capaian kinerja keuangan	100	%									
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	8,000,000.00	-	7,885,000.00	-	-	-	-		
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen tersusun	3.00	dokumen	2,000,000.00	3.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-		
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen tersusun	4.00	dokumen	4,000,000.00	4.00	3,885,000.00	100.00	97.13	-	-		
-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi dokumen perencanaan SKPD	4.00	laporan	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.04	-	-		
Predikat kinerja									ST	ST	-	-		
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3,613,030,000.00	-	3,220,566,682.00	-	-	-	-		
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	3,607,030,000.00	13.00	3,214,566,682.00	92.86	89.12	-	-		
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-		
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan semesteran SKPD	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-		
-		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran SKPD	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									98.21	97.28	-	-		
Predikat kinerja									ST	ST	-	-		
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	-	stel	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-		
Predikat kinerja									SR	SR	-	-		
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	507,702,100.00	-	482,754,240.00	-	-	-	-		
-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	4,957,400.00	12.00	4,637,500.00	100.00	93.55	-	-		
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan Dan Minuman Kantor	12	bulan	34,401,700.00	12.00	33,992,000.00	100.00	98.81	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	25,330,000.00	12.00	24,852,900.00	100.00	98.12	-	
-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	3,020,000.00	12.00	2,310,000.00	100.00	76.49	-	
-		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	40,000,000.00	12.00	39,360,500.00	100.00	98.40	-	
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12	bulan	399,993,000.00	12.00	377,601,340.00	100.00	94.40	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	93.29	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	940,033,760.00	-	917,045,410.00	-	-	-	
-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dan pembayaran honorarium PHL	132.00	bulan	302,320,000.00	132.00	300,585,000.00	100.00	99.43	-	
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, listrik dan internet	12.00	bulan	50,000,000.00	12.00	43,536,910.00	100.00	87.07	-	
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium PHL	192.00	bulan	587,713,760.00	192.00	572,923,500.00	100.00	97.48	-	
		-	Pembayaran honorarium PHL kebersihan dan keamanan kantor	36.00	bulan	-	27.00	-	75.00	-	-	
		-	Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.00	bulan	-	9.00	-	75.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									90.00	94.66	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	330,438,200.00	-	318,006,800.00	-	-	-	
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	10	mobil dan motor	153,920,000.00	10.00	143,642,800.00	100.00	93.32	-	
		-	Pembayaran honorarium PHL	24	bulan	-	24.00	-	100.00	-	-	
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	unit	168,218,200.00	1.00	166,064,000.00	100.00	98.72	-	
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12	bulan	3,300,000.00	12.00	3,300,000.00	100.00	100.00	-	
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	5,000,000.00	12.00	5,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.01	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						5,399,204,060.00	-	4,946,258,132.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									97.64	96.46	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
-		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Lembaga Sosial yang aktif	100	%	1,693,140,500.00	-	1,393,061,031.00	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Cakupan Keberhasilan Pemberdayaan Keluarga/Kelompok	50	%							
-		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1,693,140,500.00	-	1,393,061,031.00	-	-		-
-		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya operasional dan rekrutmen potensi dan sumber kesejahteraan sosial	80	orang	1,687,142,500.00	80.00	1,393,061,031.00	100.00	82.57		-
-		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbinanya/pengembangan kapasitas karang taruna	15	KT	5,998,000.00	15.00	-	100.00	-		-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	41.28		-
Predikat kinerja									ST	SR		-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,693,140,500.00	-	1,393,061,031.00	-	-		-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	41.28		-
Predikat kinerja Program									ST	SR		-
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar	100	%	2,305,740,625.00	-	2,288,449,701.00	-	-		-
			Persentase orang lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	100	%							
			Persentase orang tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai standar	100	%							
-		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-	-	2,200,081,750.00	-	2,191,195,701.00	-	-		-
-		Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang memperoleh bantuan permakanan	342	Orang	2,124,800,000.00	342.00	2,118,732,900.00	100.00	99.71		-
			Jumlah Penyandang Disabilitas	164	Orang	-	164.00	-	100.00	-		
			Jumlah lansia yang diberi bantuan jaminan sosial dan sharing 50 penerima asuh	580	Orang	-	580.00	-	100.00	-		
-		Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya operasional/penguatan Rumah Singgah	1	Kegiatan	75,281,750.00	1.00	72,462,801.00	100.00	96.26		-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.98		-
Predikat kinerja									ST	ST		-
-		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-	105,658,875.00	-	97,254,000.00	-	-		-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
-		Penyediaan Permakanan	Tersedianya kebutuhan dasar bagi keluarga fakir miskin	175	KPM	55,658,875.00	175.00	50,428,000.00	100.00	90.60	-	
-		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya operasional dalam rangka pelaksanaan PKH	12	Kecamatan/ bulan	50,000,000.00	12.00	46,826,000.00	100.00	93.65	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	92.13	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						2,305,740,625.00	-	2,288,449,701.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	95.06	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
-		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar biasa	100	%	2,214,900,000.00	-	1,914,427,700.00	-	-	-	
-		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	1,933,000,000.00	-	1,679,744,000.00	-	-	-	
-		Penyediaan Makanan	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan sosial	1	kegiatan	1,933,000,000.00	1.00	1,679,744,000.00	100.00	86.90	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	86.90	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
-		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-	-	281,900,000.00	-	234,683,700.00	-	-	-	
-		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pelaksanaan penanggulangan korban bencana alam dan masalah sosial	1	paket keg	281,900,000.00	1.00	234,683,700.00	100.00	83.25	-	
-		-	Pelaksanaan pemantapan, operasional dan mobilisasi TAGANA	47	orang	-	47.00	-	100.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	83.25	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						2,214,900,000.00	-	1,914,427,700.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	85.07	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN SOSIAL						11,612,985,185.00	-	10,542,196,564.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN SOSIAL (%)									99.41	79.47	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN SOSIAL									ST	T	-	
-		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PMPPTSP NAKERTRANS	
-		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4,227,955,000.00	-	3,951,798,058.00	-	-	-	
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	-	-	
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	3	dokumen	2,000,000.00	3.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen tersusun	5	dokumen	3,000,000.00	5.00	3,000,000.00	100.00	100.00	-	
-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	2,799,070,000.00	-	2,629,979,583.00	-	-	-	
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	2,793,070,000.00	14.00	2,623,979,583.00	100.00	93.95	-	
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
-		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.49	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	-	-	-	-	-	-	
-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu	25	stel	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	441,063,000.00	-	356,185,897.00	-	-	-	
-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	5,000,000.00	12.00	5,000,000.00	100.00	100.00	-	
-		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	2,500,000.00	12.00	2,500,000.00	100.00	100.00	-	
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat kegiatan	12	bulan	29,750,000.00	12.00	29,683,000.00	100.00	99.77	-	
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	25,500,000.00	12.00	25,500,000.00	100.00	100.00	-	
-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan kantor	12	bulan	5,040,000.00	12.00	4,320,000.00	100.00	85.71	-	
-		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya ATK	12	bulan	34,000,000.00	12.00	34,000,000.00	100.00	100.00	-	
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	308,273,000.00	12.00	231,012,897.00	100.00	74.94	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	92.30	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	778,782,000.00	-	760,546,778.00	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pengiriman surat menyurat dan pembayaran honorarium PHL	120	ob	297,100,000.00	120.00	293,500,000.00	100.00	98.79	-	
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi rekening air dan listrik	12	bulan	86,400,000.00	12.00	73,696,778.00	100.00	85.30	-	
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya administrasi keuangan dan pembayaran honorarium PHL	132	ob	395,282,000.00	132.00	393,350,000.00	100.00	99.51	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	94.53	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	persen	197,040,000.00	-	193,685,800.00	-	-	-	
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran honorarium PHL terpeliharanya kendaraan dinas operasional	24	ob	142,940,000.00	24.00	141,265,800.00	100.00	98.83	-	
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	1	gedung	49,100,000.00	1.00	49,100,000.00	100.00	100.00	-	
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	5	jenis	5,000,000.00	3.00	3,320,000.00	60.00	66.40	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									86.67	88.41	-	
Predikat kinerja									T	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						4,227,955,000.00	-	3,951,798,058.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									97.78	93.62	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
-		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	-	246,384,000.00	-	224,021,500.00	-	-	-	
-		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75	persen	246,384,000.00	-	224,021,500.00	-	-	-	
-		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tenaga kerja terampil	45	orang	246,384,000.00	45.00	224,021,500.00	100.00	90.92	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	90.92	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						246,384,000.00	-	224,021,500.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	90.92	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
-		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	-	-	14,360,000.00	-	14,360,000.00	-	-	-	
-		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Cakupan tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	50	persen	14,360,000.00	-	14,360,000.00	-	-	-	
-		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jenis informasi bursa kerja	5	jenis	9,600,000.00	5.00	9,600,000.00	100.00	100.00	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Job Fair/Bursa Kerja	Data lowongan kerja diperusahaan-perusahaan	1	dokumen	4,760,000.00	1.00	4,760,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						14,360,000.00	-	14,360,000.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian kasus ketenagakerjaan	-	-	84,705,000.00	-	18,775,000.00	-	-	-	-
-		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian kasus ketenagakerjaan	100	persen	84,705,000.00	-	18,775,000.00	-	-	-	-
-		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	1	dokumen	9,910,000.00	1.00	9,910,000.00	100.00	100.00	-	-
-		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Laporan jumlah serikat pekerja daerah	1	dokumen	4,835,000.00	1.00	4,835,000.00	100.00	100.00	-	-
-		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perusahaan yang melaksanakan tripartit	1	dokumen	69,960,000.00	0.50	4,030,000.00	50.00	5.76	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									83.33	68.59	-	-
Predikat kinerja									T	S	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						84,705,000.00	-	18,775,000.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									83.33	68.59	-	-
Predikat kinerja Program									T	S	-	-
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN TENAGA KERJA						4,573,404,000.00	-	4,208,954,558.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN TENAGA KERJA (%)									95.28	88.28	-	-
PREDIKAT KINERJA URUSAN TENAGA KERJA									ST	T	-	-
-		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		-	-	-	-	-	-	-	DINAS PPKB DAN PPPA	
-		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		-	-	153,173,240.00	-	150,792,540.00	-	-	-	-
-		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-	19,573,750.00	-	18,500,730.00	-	-	-	-
-		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Bangka Barat	30	OPD	19,573,750.00	30.00	18,500,730.00	100.00	94.52	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	94.52	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
-		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	133,599,490.00	-	132,291,810.00	-	-	-	-
-		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya DWP Kabupaten dan DWP Kecamatan, Terlaksananya Organisasi GOW Kabupaten	24	bln	133,599,490.00	24.00	132,291,810.00	100.00	99.02	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.02	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						153,173,240.00	-	150,792,540.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	96.77	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-	100,668,619.00	-	57,748,797.00	-	-	-	-
-		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	%	64,120,963.00	-	25,394,441.00	-	-	-	-
-		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan (Penyajian Data dan Informasi Kasus Kekerasan)	15	kasus	64,120,963.00	6.00	25,394,441.00	40.00	39.60	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									40.00	39.60	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
-		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100	%	36,547,656.00	-	32,354,356.00	-	-	-	-
-		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dana untuk Operasional Rumah Singgah	12	bln	36,547,656.00	12.00	32,354,356.00	100.00	88.53	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	88.53	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						100,668,619.00	-	57,748,797.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									70.00	64.07	-	-
Predikat kinerja Program									S	R	-	-
-		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-	65,221,310.00	-	61,408,310.00	-	-	-	-
-		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak	80	%	-	-	-	-	-	-	-
-		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konvensi Hak Anak	30	org	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	25	Stel	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	647,777,906.00	-	529,828,500.00	-	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik	1	Tahun	14,978,050.00	1.00	14,799,250.00	100.00	98.81	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan pembayaran honorarium	1	Tahun	900,000.00	1.00	900,000.00	100.00	100.00	-	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (peralatan dan bahan pembersih)	1	Tahun	14,999,640.00	1.00	14,721,350.00	100.00	98.14	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum	1	Tahun	70,017,500.00	1.00	68,917,800.00	100.00	98.43	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak	1	Tahun	32,485,350.00	1.00	26,141,400.00	100.00	80.47	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	1	Tahun	4,939,000.00	1.00	3,570,000.00	100.00	72.28	-	-
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor	1	Tahun	59,459,366.00	1.00	57,923,450.00	100.00	97.42	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	1	Tahun	449,999,000.00	1.00	342,855,250.00	100.00	76.19	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	90.22	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	1,519,969,820.00	-	1,468,151,495.00	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Honorarium PHL dan jasa pengiriman	1	Tahun	425,030,000.00	1.00	424,502,000.00	100.00	99.88	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kantor yang tersedia pembayaran listrik, air dan komunikasi	1	Tahun	87,701,620.00	1.00	62,044,495.00	100.00	70.74	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-Jumlah pengelola administrasi keuangan -Jumlah pengelola jasa kebersihan kantor -Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1	Tahun	1,007,238,200.00	1.00	981,605,000.00	100.00	97.46	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	89.36	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	204,362,900.00	-	167,471,239.00	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-Jumlah kendaraan operasional yang di pelihara -Jumlah mobil oprasional yang dipelihara	1	Tahun	197,020,400.00	1.00	160,131,526.00	100.00	81.28	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Unit	7,342,500.00	1.00	7,339,713.00	100.00	99.96	-	-
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	90.62	-	-
							Predikat kinerja		ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						11,981,085,016.00	-	11,027,260,863.00	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	93.37	-	-
							Predikat kinerja Program		ST	ST	-	-
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	-	-	402,318,968.00	-	380,412,450.00	-	-	-	-
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses serta ketersediaan pangan daerah	90	%	27,444,628.00	-	23,720,750.00	-	-	-	-
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan analisis kondisi ketersediaan pangan melalui neraca bahan makanan	5	Laporan	15,299,870.00	5.00	11,737,000.00	100.00	76.71	-	-
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Laporan analisis kondisi harga dan pasokan pangan	5	Laporan	12,144,758.00	5.00	11,983,750.00	100.00	98.67	-	-
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	87.69	-	-
							Predikat kinerja		ST	T	-	-
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses serta ketersediaan pangan daerah	90	%	374,874,340.00	-	356,691,700.00	-	-	-	-
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Optimalisasi pemanfaatan pekarangan kelompok penerima manfaat	5	KWT	363,074,540.00	5.00	345,210,900.00	100.00	95.08	-	-
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Laporan Analisis Pola konsumsi pangan penduduk dan skor PPH	5	Laporan	11,799,800.00	5.00	11,480,800.00	100.00	97.30	-	-
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	96.19	-	-
							Predikat kinerja		ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						402,318,968.00	-	380,412,450.00	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	91.94	-	-
							Predikat kinerja Program		ST	ST	-	-
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketercapaian swasembada pangan daerah	25	%	69,673,775.00	-	50,014,300.00	-	-	-	-
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Ketercapaian swasembada pangan daerah	32	%	29,999,800.00	-	29,999,800.00	-	-	-	-
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan peta dan analisis situasi pangan dan gizi kabupaten	5	Laporan	29,999,800.00	5.00	29,999,800.00	100.00	100.00	-	-
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	100.00	-	-
							Predikat kinerja		ST	ST	-	-
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Ketercapaian swasembada pangan daerah	32	%	39,673,975.00	-	20,014,500.00	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Bangka Barat	15	Ton	39,673,975.00	15.00	20,014,500.00	100.00	50.45	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	50.45	-	
Predikat kinerja									ST	R	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						69,673,775.00	-	50,014,300.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	75.22	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
-		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-	-	108,221,903.00	-	102,677,000.00	-	-	-	
-		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penguatan cadangan pangan Kabupaten	-	-	108,221,903.00	-	102,677,000.00	-	-	-	
		Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan keamanan pangan lintas sektoral di Kabupaten Bangka Barat	1	Kegiatan	23,015,380.00	1.00	22,526,000.00	100.00	97.87	-	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengujian mutu dan keamanan pangan terhadap sampel PSAT	50	Sempel	85,206,523.00	50.00	80,151,000.00	100.00	94.07	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.97	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						108,221,903.00	-	102,677,000.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	95.97	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PANGAN						12,561,299,662.00	-	11,560,364,613.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PANGAN (%)									100.00	89.13	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN PANGAN									ST	T	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PUPR	
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Luasan ketersediaan lahan yang disiapkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah	-	%	-	-	-	-	-	-	
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah dokumen tersusun	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	jumlah bidang aset tanah pemda yang disertifikasi	-	bidang	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									-	-	-	
Predikat kinerja Program									SR	SR	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-	124,825,000.00	-	-	-	-	-	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	124,825,000.00	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	1.00	-	124,825,000.00	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						124,825,000.00	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									-	-	-	
Predikat kinerja Program									SR	SR	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PERTANAHAN						124,825,000.00	-	-	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PERTANAHAN (%)									-	-	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN PERTANAHAN									SR	SR	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS LH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Status capaian kinerja keuangan	100	%	4,200,999,872.00	-	4,041,292,583.00	-	-	-	
			Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100	%							
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%							
			Optimalnya disiplin aparatur	100	%							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	7,993,540.00	-	7,993,540.00	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	3	Dokumen	2,000,000.00	3.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen tersusun	5	Dokumen	3,993,540.00	5.00	3,993,540.00	100.00	100.00	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	4	Dokumen	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2,368,320,000.00	-	2,249,596,671.00	-	-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	2,362,320,000.00	12.00	2,243,596,671.00	100.00	94.97	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Dokumen	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.74	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	-	-	-	-	-	
			#Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	25	stel	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	399,563,675.00	-	389,148,265.00	-	-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	7,763,184.00	12.00	5,741,494.00	100.00	73.96	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	2,444,310.00	12.00	2,186,470.00	100.00	89.45	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12	bulan	30,084,780.00	12.00	30,078,300.00	100.00	99.98	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	39,999,930.00	12.00	33,301,076.00	100.00	83.25	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	bulan	4,405,500.00	12.00	3,690,000.00	100.00	83.76	
			Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	39,999,971.00	12.00	39,790,445.00	100.00	99.48	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	bulan	274,866,000.00	12.00	274,360,480.00	100.00	99.82	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	89.96	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1,211,628,657.00	-	1,191,993,816.00	-	-	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Honorarium PHL	156	OB	387,860,000.00	156.00	377,908,000.00	100.00	97.43	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	193,200,000.00	12.00	192,280,192.00	100.00	99.52	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran Honorarium PHL	96	OB	242,360,000.00	96.00	234,305,000.00	100.00	96.68	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium PHL	144	OB	388,208,657.00	143.00	387,500,624.00	99.31	99.82	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									99.83	98.36	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah sumber air yang dipantau	66	titik pantau	108,733,500.00	66.00	68,269,700.00	100.00	62.79	-	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen emisi GRK	1	dokumen	19,594,850.00	1.00	19,584,500.00	100.00	99.95	-	
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Bahan-bahan operasional laboratorium	3	paket	231,739,460.00	3.00	228,558,870.00	100.00	98.63	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.63	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	43,359,700.00	-	34,471,580.00	-	-	-	
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang tesusun	1	dokumen	43,359,700.00	1.00	34,471,580.00	100.00	79.50	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	79.50	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						403,427,510.00	-	350,884,650.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	89.06	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau yang dikelola/dikembangkan	4	%	37,800,000.00		36,243,750.00	-	-	-	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	37,800,000.00	-	36,243,750.00	-	-	-	
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pemeliharaan RTH	10	ha	37,800,000.00	9.92	36,243,750.00	100.00	95.88	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.88	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						37,800,000.00	-	36,243,750.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	95.88	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen UKL/UPL; Amdal (Andal, RKL/RPL)	70	%	66,172,900.00	-	66,172,900.00	-	-	-	
			Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang taat dalam mengelola lingkungan	70	%						-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	66,172,900.00	-	66,172,900.00	-	-		
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang diawasi	63	Perusahaan	66,172,900.00	64.00	66,172,900.00	101.59	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									101.59	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						66,172,900.00	-	66,172,900.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									101.59	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Optimalisasi sumberdaya aparatur dalam bekerja	100	%	-	-	-	-	-		
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-		
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis lingkungan hidup	6	orang	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									-	-	-	
Predikat kinerja Program									SR	SR	-	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah desa/kelurahan yang mendapat edukasi dan promosi lingkungan hidup secara efektif dan direpson positif oleh masyarakat	11	%	36,309,900.00	-	35,209,900.00	-	-		
			Persentase perangkat daerah yang memiliki sistem pengelolaan lingkungan di perkantoran	100	%							
			Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan lingkungan kepada anak didik di lingkungan sekolah/luar sekolah	50	%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			Jumlah komunitas (CSO)/LSM yang ada atau terbentuk dan berperan aktif	12	CSO/LSM							
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	36,309,900.00	-	35,209,900.00	-	-		
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang mengikuti program adiwiyata	18	sekolah	36,309,900.00	18.00	35,209,900.00	100.00	96.97		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	96.97		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						36,309,900.00	-	35,209,900.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	96.97		
Predikat kinerja Program									ST	ST		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan	6	kebijakan	6,486,768,190.00	-	6,275,776,387.00	-	-		
			Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terintegrasi	19	%							
			Jumlah model pendayagunaan sampah yang ekonomis secara berkelanjutan	6	model							
		Pengelolaan Sampah		-	-	-	6,486,768,190.00	-	6,275,776,387.00	-	-	
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pembayaran Honorarium PHL	1,884	OB	6,486,768,190.00	1,883.00	6,275,776,387.00	99.95	96.75		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									99.95	96.75		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						6,486,768,190.00	-	6,275,776,387.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									99.95	96.75		
Predikat kinerja Program									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						11,435,671,222.00	-	10,976,676,220.00	-	-		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP (%)									100.21	94.13		
PREDIKAT KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									ST	ST		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		-	-	-	-	-	-	-	DINAS DUKCAPIL	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	5,004,676,220.00	75.00	4,358,183,424.00	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	27,301,000.00	235.00	10,855,050.00	-	-		-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RKA, Renja, Renstra	3	dok	2,000,000.00	3.00	1,976,300.00	100.00	98.82		-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya DALEV Dokumen Perencanaan	4	dok	8,771,000.00	4.00	4,638,000.00	100.00	52.88		-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya LAKIP, LKPJ LPPD dan TAPKIN	4	dok	16,530,000.00	4.00	4,240,750.00	100.00	25.65		-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	59.12		-
Predikat kinerja									ST	R		-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	1,942,050,000.00	100.00	1,824,311,327.00	-	-		-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	1,936,050,000.00	14.00	1,818,321,327.00	100.00	93.92		-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	2,000,000.00	1.00	1,997,300.00	100.00	99.87		-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	1	dok	2,000,000.00	1.00	1,997,400.00	100.00	99.87		-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	1	dok	2,000,000.00	1.00	1,995,300.00	100.00	99.77		-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.35		-
Predikat kinerja									ST	ST		-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	18,839,150.00	3.85	10,451,050.00	-	-		-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga dan pakaian adat melayu	25	stell	-	-	-	-	-		-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				18,893,150.00						
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									50.00	27.74		-
Predikat kinerja									R	SR		-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1,077,598,860.00	91.20	708,072,490.00	-	-		-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan Kantor (SKPD dan UPT)	12	bulan	5,875,130.00	12.00	4,988,600.00	100.00	84.91		-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat/ bahan kebutuhan kantor	12	bulan	500,000.00	12.00	500,000.00	100.00	100.00		-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum rapat koordinasi, tamu dan logistik kantor	12	bulan	29,542,000.00	12.00	17,837,601.00	100.00	60.38		-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas dan UPT)	12	bulan	43,820,650.00	12.00	30,800,300.00	100.00	70.29		-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah	12	bulan	4,912,000.00	12.00	3,960,000.00	100.00	80.62	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor (SKPD dan UPT)	12	bulan	116,801,780.00	12.00	94,929,240.00	100.00	81.27	-	
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor				508,417,400.00						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Program dan kegiatan Satuan Kerja	12	bulan	226,992,900.00	12.00	202,119,299.00	100.00	89.04	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									96.88	77.61	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	18,000,000.00	6.00	16,800,000.00	-	-		
		Pengadaan Mebel	-	6.00	unit	18,000,000.00	6.00	16,800,000.00	100.00	93.33		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	93.33	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	1,673,941,540.00	100.00	1,651,244,557.00	-	-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya bahan dan pengiriman serta terbayarnya gaji PHL	276	OB	653,210,000.00	276.00	645,118,000.00	100.00	98.76	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon dan listrik DUKCAPIL (SKPD dan UPT)	12	bulan	75,493,360.00	12.00	70,008,057.00	100.00	92.73	-	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa Pemeliharaan dan pembelian suku cadang	12	bulan	4,049,500.00	12.00	1,563,500.00	100.00	38.61	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Jasa Pengaman Kantor	12	OB	941,188,680.00	12.00	934,555,000.00	100.00	99.30	-	
			Terbayarnya Jasa Petugas Kebersihan serta tersedianya alat/ bahan kebersihan	24	OB	-	24.00	-	100.00	-		
			Terbayarnya Jasa PHL	300	OB	-	300.00	-	100.00	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	82.35	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	246,945,670.00	136.00	136,448,950.00	-	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Service, BBM dan suku cadang kendaraan	12	bulan	137,945,670.00	12.00	126,844,500.00	100.00	91.95	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	12	bulan	75,000,000.00	12.00	8,986,450.00	100.00	11.98	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	2	jenis	34,000,000.00	2.00	618,000.00	100.00	1.82	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	35.25	-	
Predikat kinerja									ST	SR	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						5,004,676,220.00	-	4,358,183,424.00	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		91.15	63.40	-	
							Predikat kinerja Program		ST	R	-	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	87	%	194,485,460.00	-	180,414,985.00	-	-	-	
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan Kependudukan secara optimal	100	%	88,923,660.00	138.31	76,119,485.00	-	-	-	
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pendataan penduduk pendatang (Penduduk Non Permanen)	66	des/kel	9,471,660.00	44.00	9,471,485.00	66.67	100.00	-	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan dokumen kependudukan (KK, KTP, KIA)	25,000	dok	79,452,000.00	34,626.00	66,648,000.00	138.50	83.88	-	
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		102.59	91.94	-	
							Predikat kinerja		ST	ST	-	
		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	100	%	9,949,500.00	1,809.00	8,683,200.00	-	-	-	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Terbitnya kartu identitas anak	25,000	kartu	9,949,500.00	1,809.00	8,683,200.00	7.24	87.27	-	
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		7.24	87.27	-	
							Predikat kinerja		SR	T	-	
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	100	%	95,612,300.00	100.00	95,612,300.00	-	-	-	
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi terkait Kependudukan	6	bulan	4,112,100.00	6.00	4,112,100.00	100.00	100.00	-	
		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan Kependudukan secara aktif	6	bulan	91,500,200.00	6.00	91,500,200.00	100.00	100.00	-	
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Tersampainya informasi terkait Kependudukan	-	kali	-	-	-	-	-	-	
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	100.00	-	
							Predikat kinerja		ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						194,485,460.00	-	180,414,985.00	-	-	-	
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		69.94	93.07	-	
							Predikat kinerja Program		S	ST	-	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan bayi berakte kelahiran	70	%	54,504,500.00	-	54,299,300.00	-	-	-	
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil secara optimal	100	%	21,152,500.00	54.50	20,947,300.00	-	-	-	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya dokumen kependudukan selain KTP-EI, alat dan bahan penerbitan terkait Pencatatan Sipil	-	%	-	-	-	-	-	-	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil (Akte Kelahiran, Kematian, Perkawinan dll)	10,000	lembar blangko	21,152,500.00	5,450.00	20,947,300.00	54.50	99.03	-	
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		54.50	99.03	-	
							Predikat kinerja		R	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku	100	%	33,352,000.00	100.00	33,352,000.00	-	-		
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi terkait Pencatatan Sipil	-	bulan	-	-	-				
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya pelayanan Pencatatan Sipil secara aktif	6	bulan	14,110,000.00	6.00	14,110,000.00	100.00	100.00		
		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Tersampainya informasi terkait Pencatatan Sipil	-	kali	-	-	-				
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam administrasi pencatatan sipil	60	%	19,242,000.00	60.00	19,242,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						54,504,500.00	-	54,299,300.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									77.25	99.51		
Predikat kinerja Program									T	ST		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pelaksanaan dan pelayanan kependudukan dengan sistem informasi kependudukan	100	%	7,706,950.00	12,007.00	7,666,800.00	-	-		
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terkumpul dan tersajinya data secara akurat	100	%	5,708,850.00	7.00	5,697,800.00	-	-		
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Harmonisasi Data OPD untuk pengambilan keputusan	7	SKPD	5,708,850.00	7.00	5,697,800.00	100.00	99.81		
		-	Tersedianya media Informasi teknologi untuk kependudukan dan pencatatan sipil	1	SIM	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									50.00	99.81		
Predikat kinerja									R	ST		
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terselenggara dengan baik	100	%	-	-	-	-	-		
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersampainya informasi terkait Informasi Administrasi Kependudukan	2	kali	-	-	-	-	-		
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Tervalidasinya data kependudukan	6,000	KK	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-		
Predikat kinerja									SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersusunnya perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan laporan terkait Informasi Administrasi Kependudukan	9	bulan	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100	%	1,998,100.00	12,000.00	1,969,000.00	-	-	-	-
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terpenuhinya Target Wajib KTP dan KK	12,000	orang	1,998,100.00	12,000.00	1,969,000.00	100.00	98.54	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.54	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						7,706,950.00	-	7,666,800.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									75.00	99.18	-	-
Predikat kinerja Program									T	ST	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	-	Peringkat	18,657,490.00	100.00	18,656,125.00	-	-	-	-
		Penyusunan Profil Kependudukan	Profil Kependudukan tersusun dengan akurat	100	%	18,657,490.00	100.00	18,656,125.00	-	-	-	-
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Profil kependudukan dan Indeks Kepuasan Masyarakat setiap tahun	2	dok	18,657,490.00	2.00	18,656,125.00	100.00	99.99	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.99	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						18,657,490.00	-	18,656,125.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.99	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5,280,030,620.00	-	4,619,220,634.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (%)									82.67	91.03	-	-
PREDIKAT KINERJA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									T	ST	-	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS SOSIAL DAN PEMDES	
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Swadaya	5	%	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Percepatan Pilot Project Desa Online	6	desa	30,000,000.00	6.00	30,000,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	100.00	-	
							Predikat kinerja Program		ST	ST	-	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Keterlibatan Unsor Masyarakat dalam Membangun Desa	85	%	39,070,000.00	-	35,285,000.00	-	-	-	
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	-	-	-	39,070,000.00	-	35,285,000.00	-	-	-	
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terbinanya Kelembagaan BKD/BKAD	2	Kawasan Perdesaan	39,070,000.00	2.00	35,285,000.00	100.00	90.31	-	
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	90.31	-	
							Predikat kinerja		ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						39,070,000.00	-	35,285,000.00	-	-	-	
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	90.31	-	
							Predikat kinerja Program		ST	ST	-	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaporan Keuangan Desa Tertib Administrasi dan Tepat Waktu	100	%	94,599,800.00	-	94,119,800.00	-	-	-	
		-	Ketersediaan data Profil dan Potensi Desa	1	Dokumen							
		-	Meningkatnay Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	10	Bumdes							
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-	94,599,800.00	-	94,119,800.00	-	-	-	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang telah didampingi dalam pengelolaan Keuangan Desa	66	Desa/ Kelurahan	18,350,000.00	66.00	18,235,000.00	100.00	99.37	-	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dibina, didampingi, dimonev, serta di fasilitasi pembentukannya	11	BUMDes	30,000,000.00	11.00	30,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Permutakhiran data profil desa	60	desa	15,650,000.00	60.00	15,525,000.00	100.00	99.20	-	
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang telah didampingi dalam pengelolaan Aset Desa	66	Desa/ Kelurahan	18,350,000.00	66.00	18,235,000.00	100.00	99.37	-	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Pengisian BPD serentak	8	Desa	12,249,800.00	8.00	12,124,800.00	100.00	98.98	-	
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	99.39	-	
							Predikat kinerja		ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						94,599,800.00	-	94,119,800.00	-	-	-	
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	99.39	-	
							Predikat kinerja Program		ST	ST	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Keterlibatan Unsor Masyarakat dalam Membangun Desa	85	%	488,372,500.00	-	468,262,700.00	-	-	-	
			TTG yang dimanfaatkan	2	Jenis							
			Desa yang Memanfaatkan TTG	2	Jenis							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	488,372,500.00	-	468,262,700.00	-	-		
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas usaha ekonomi masyarakat dalam sistem manajemen intergrasi Bumdes	5	BUMDes	28,245,000.00	5.00	28,022,500.00	100.00	99.21		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Pelaksanaan Pembinaan Posyantek	1	kegiatan	25,000,000.00	1.00	25,000,000.00	100.00	100.00		
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya Kegiatan PKK	1	kegiatan	435,127,500.00	1.00	415,240,200.00	100.00	95.43		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.21		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						488,372,500.00	-	468,262,700.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.39		
Predikat kinerja Program									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						652,042,300.00	-	627,667,500.00	-	-		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (%)									100.00	97.27		
PREDIKAT KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									ST	ST		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PPKB DAN PPPA	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	-	-	3,848,094,367.00	-	3,638,378,896.00	-	-		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	7,998,200.00	-	7,998,200.00	-	-		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dok	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	4	dok	3,998,200.00	4.00	3,998,200.00	100.00	100.00		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	3	dok	2,000,000.00	3.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00		
Predikat kinerja									ST	ST		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2,427,500,000.00	-	2,253,180,306.00	-	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	bln	2,421,500,000.00	12.00	2,249,130,306.00	100.00	92.88		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dok	2,000,000.00	1.00	50,000.00	100.00	2.50	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	dok	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dok	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	73.85	-	
Predikat kinerja									ST	S	-	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25	stel	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	349,644,947.00	-	347,865,383.00	-	-	-	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bln	10,368,500.00	12.00	10,368,450.00	100.00	100.00	-	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	bln	2,284,600.00	12.00	2,184,600.00	100.00	95.62	-	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bln	50,000,000.00	12.00	48,739,450.00	100.00	97.48	-	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bln	34,000,000.00	12.00	33,997,400.00	100.00	99.99	-	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bln	3,097,080.00	12.00	3,076,000.00	100.00	99.32	-	
			Penyediaan Bahan/Material	12	bln	33,995,767.00	12.00	33,995,767.00	100.00	100.00	-	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bln	215,899,000.00	12.00	215,503,716.00	100.00	99.82	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.89	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Mebel	2	jenis	-	-	-	-	-	-	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	jenis	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	759,989,520.00	-	748,620,790.00	-	-	-	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	PHL	214,255,000.00	8.00	207,817,000.00	100.00	97.00	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bin	65,902,800.00	12.00	61,012,070.00	100.00	92.58	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium PHL	13	PHL	479,831,720.00	13.00	479,791,720.00	100.00	99.99	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	96.52	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	302,961,700.00	-	280,714,217.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Honorarium PHL, Service BBM, dan Suku Cadang Kendaraan Dinas	12	bin	283,670,500.00	12.00	264,203,017.00	100.00	93.14	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	bin	7,342,500.00	12.00	7,342,500.00	100.00	100.00	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor	12	bin	4,948,700.00	12.00	2,673,700.00	100.00	54.03	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	2	jenis	7,000,000.00	2.00	6,495,000.00	100.00	92.79	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	84.99	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						3,848,094,367.00	-	3,638,378,896.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	90.85	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	-	386,375,660.00	-	365,386,660.00	-	-	-	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	386,375,660.00	-	365,386,660.00	-	-	-	
		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Meningkatnya TFR & Unmet Need di Kabupaten Bangka Barat	6	kec	214,500,000.00	6.00	193,516,000.00	100.00	90.22	-	
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Publik Adrees	6	unit	125,920,000.00	6.00	125,915,000.00	100.00	100.00	-	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pemuktahiran Data Keluarga	66	peserta	45,955,660.00	66.00	45,955,660.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	96.74	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						386,375,660.00	-	365,386,660.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	96.74	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	-	3,134,740,420.00	-	2,809,532,399.00	-	-	-	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	719,125,250.00	-	681,093,700.00	-	-	-	
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	100	%	104,975,000.00	100.00	104,525,000.00	100.00	99.57	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terlaksananya Operasional dan Sarana Balai Penyuluhan KKBPK	100	%	435,024,000.00	100.00	406,015,450.00	100.00	93.33	-	
		Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Program KKBPK	12	bln	137,302,000.00	12.00	131,407,000.00	100.00	95.71	-	
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Pelayanan KIE	6	kecamatan	41,824,250.00	6.00	39,146,250.00	100.00	93.60	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.55	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	-	1,042,026,000.00	-	980,184,000.00	-	-	-	
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Sarana dan Prasarana Guna Mendukung Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)	6	kecamatan	341,775,000.00	6.00	308,254,000.00	100.00	90.19	-	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tersedianya Insentif bagi PKKBD dan Sub PKKBD	261	poktan	321,300,000.00	261.00	293,195,000.00	100.00	91.25	-	
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pembayaran Honorarium PHL	13	PHL	378,951,000.00	13.00	378,735,000.00	100.00	99.94	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	93.80	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	313,140,000.00	-	313,035,000.00	-	-	-	
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Menurunkan TFR dan Unmeet Need	6	kec	313,140,000.00	6.00	313,035,000.00	100.00	99.97	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.97	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1,060,449,170.00	-	835,219,699.00	-	-	-	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MOW	80	MOW	181,764,000.00	2.00	11,830,700.00	2.50	6.51	-	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	6	paket	400,639,996.00	6.00	395,156,000.00	100.00	98.63	-	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan KB dan Kespro di Faskes termasuk jaringan dan Jejaringnya	1	-	4,950,000.00	1.00	4,950,000.00	100.00	100.00	-	
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promkes Reproduksi serta hak-hak Reeproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1	-	286,690,000.00	1.00	285,430,000.00	100.00	99.56	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Tersedianya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	240	akseptor	81,220,000.00	240.00	72,940,000.00	100.00	89.81	-	
		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terlaksananya Metode Kontrasepsi Pria MOP	10	MOP	9,610,000.00	-	-	-	-	-	
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya pelayanan KB dan TKBK Muyan dalam rangka moment-moment tertentu	6	kecamatan	95,575,174.00	6.00	64,912,999.00	100.00	67.92	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									71.79	66.06	-	
Predikat kinerja									S	S		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						3,134,740,420.00	-	2,809,532,399.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									92.95	88.84	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	-	495,762,364.00	-	492,600,964.00	-	-	-	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	460,853,249.00	-	458,604,849.00	-	-	-	
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Terlaksananya Pembinaan kepada Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK- R dan Uppks)	62	poktan	30,878,249.00	62.00	29,134,849.00	100.00	94.35	-	
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	-	1	-	104,975,000.00	1.00	104,470,000.00	100.00	99.52	-	
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	-	1	-	325,000,000.00	1.00	325,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Tersedianya Insentif Kelompok Tribina	-	kelompok tribina	-	-	-			-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.96	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	34,909,115.00	-	33,996,115.00	-	-	-	
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tersedianya Dukungan Operasional Harganas	8	lomba	34,909,115.00	8.00	33,996,115.00	100.00	97.38	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.38	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	3	jenis	1,990,000.00	3.00	1,990,000.00	100.00	100.00	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen tersusun	3	jenis	3,946,500.00	3.00	3,696,500.00	100.00	93.67	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	4	dokumen	1,990,000.00	4.00	1,990,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.89	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100	%	2,048,170,000.00	-	1,877,144,650.00	-	-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	2,042,200,000.00	12.00	1,871,174,650.00	100.00	91.63	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	1,990,000.00	1.00	1,990,000.00	100.00	100.00	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	2	dokumen	1,990,000.00	2.00	1,990,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Tersusun	2	dokumen	1,990,000.00	2.00	1,990,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.91	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100	%	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan khusus hari - hari tertentu	25	stel	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100	%	717,151,196.00	-	688,268,572.00	-	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan penerangan	13	alat listrik	4,894,400.00	13.00	4,040,400.00	100.00	82.55	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4	jenis	244,888,700.00	4.00	232,061,000.00	100.00	94.76	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	12	bulan	34,815,300.00	12.00	28,386,500.00	100.00	81.53	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12	bulan	25,608,000.00	12.00	25,605,000.00	100.00	99.99	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12	bulan	4,966,200.00	12.00	3,465,000.00	100.00	69.77	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat tulis kantor	12	bulan	29,525,596.00	12.00	29,517,500.00	100.00	99.97	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah / dalam daerah	12	bulan	372,453,000.00	12.00	365,193,172.00	100.00	98.05	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	89.52	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	%	667,904,400.00	-	593,286,822.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembayaran honorarium phl	96	OB	375,995,000.00	96.00	332,936,000.00	100.00	88.55	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Komunikasi, Sumberdaya Air Listrik	12	bulan	90,000,000.00	12.00	58,799,522.00	100.00	65.33	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium PHL	36	OB	201,909,400.00	36.00	201,551,300.00	100.00	99.82	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	84.57	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	%	224,900,000.00	-	209,115,900.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Honorarium PHL	24	OB	142,420,000.00	24.00	137,928,900.00	100.00	96.85	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	Gedung	7,500,000.00	1.00	7,500,000.00	100.00	100.00	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	45	kali	8,980,000.00	27.00	3,575,000.00	60.00	39.81	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	7	jenis	66,000,000.00	7.00	60,112,000.00	100.00	91.08	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									90.00	81.93	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						3,666,052,096.00	-	3,375,492,444.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									98.00	90.36	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersebar nya informasi publik secara efektif	60	%	1,119,130,300.00	-	1,042,090,060.00	-	-	-	
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat	12	bulan	1,119,130,300.00	-	1,042,090,060.00	-	-	-	
		Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Raper a tentang Inormasi dan Komunikasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat	1	raperbup	73,930,000.00	1.00	73,120,000.00	100.00	98.90	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			- Jumlah Raperda tentang Inormasi dan Komunikasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat	1	raperda	-	1.00	-	100.00	-		
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumentasi Audiovisual Kabupaten Bangka Barat	50	Audiovisual	49,510,060.00	48.00	42,785,060.00	96.00	86.42		
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita yang di upload pada website Kabupaten Bangka Barat	100	berita	18,760,000.00	100.00	17,040,000.00	100.00	90.83		
		Pelayanan Informasi Publik	Dokumen data informasi publik	1	dokumen	254,802,000.00	1.00	190,565,000.00	100.00	74.79		
			- Jumlah media informasi yang terpasang dan mencetak dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan daerah	10	jenis	-	10.00	-	100.00	-		
			- Jumlah peliputan kegiatan pemerintahan daerah	50	liputan	-	50.00	-	100.00	-		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah kerja sama dengan media massa	4	media	722,128,240.00	4.00	718,580,000.00	100.00	99.51		
			- Pertukaran dan penyebaran informasi pembangunan	2	kali	-	2.00	-	100.00	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									99.56	90.09	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,119,130,300.00	-	1,042,090,060.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									99.56	90.09	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Peningkatan masyarakat yang memanfaatkan informasi melalui media online	5	%	1,440,967,100.00	-	1,215,543,669.00	-	-		
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	80,250,000.00	-	79,050,000.00	-	-		
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan jaringan dan peralatan SIM Terpadu	12	bulan	80,250,000.00	12.00	79,050,000.00	100.00	98.50		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.50	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	1,360,717,100.00	-	1,136,493,669.00	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Peralatan data center	3	item	454,130,000.00	2.00	250,412,500.00	66.67	55.14	-	
		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Lebar pita(band width) layanan internet	29	OPD	898,238,300.00	29.00	877,732,369.00	100.00	97.72	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tersedianya Data Sumber daya TIK	1	dokumen	8,348,800.00	1.00	8,348,800.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									88.89	84.29	-	
Predikat kinerja									T	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,440,967,100.00	-	1,215,543,669.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									94.44	91.40	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						6,226,149,496.00	-	5,633,126,173.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (%)									97.33	90.62	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									ST	ST	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya keberhasilan capaian akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian.	-	-	4,402,927,670.00	-	3,944,774,409.00	-	-	DINAS KUKMP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Status capaian kinerja	-	-	7,999,700.00	-	7,699,500.00	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	dokumen	1,999,900.00	3.00	1,999,750.00	100.00	99.99	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	dokumen	1,999,800.00	3.00	1,999,750.00	100.00	100.00	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	dokumen	4,000,000.00	4.00	3,700,000.00	100.00	92.50	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.50	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Status capaian kinerja keuangan	-	-	2,444,818,950.00	-	2,292,735,092.00	-	-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN DKUP	12	bulan	2,438,820,000.00	12.00	2,286,736,342.00	100.00	93.76	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen yang tersusun	1	dokumen	1,999,350.00	1.00	1,999,250.00	100.00	99.99	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen yang tersusun	2	dokumen	1,999,800.00	2.00	1,999,750.00	100.00	100.00	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen yang tersusun	2	dokumen	1,999,800.00	2.00	1,999,750.00	100.00	100.00	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan	
				5			6		7				
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	98.44	-	
Predikat kinerja										ST	ST	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin aparatatur dalam berpakaian	-	-	12,012,000.00	-	10,920,000.00	-	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	12	stel	12,012,000.00	12.00	10,920,000.00	100.00	90.91	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	90.91	-	
Predikat kinerja										ST	ST	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-	-	624,434,240.00	-	385,114,055.00	100.00	-	-		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	12	bulan	4,997,770.00	12.00	4,997,110.00	100.00	99.99	-		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan logistik kantor	12	bulan	4,272,350.00	12.00	4,105,000.00	100.00	96.08	-		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan kegiatan kantor	12	bulan	41,564,200.00	12.00	41,445,500.00	100.00	99.71	-		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dan kantor operasional UPT	12	bulan	72,119,500.00	12.00	59,503,500.00	100.00	82.51	-		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12	bulan	4,860,000.00	12.00	4,230,000.00	100.00	87.04	-		
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor dan operasional UPT	12	bulan	40,280,420.00	12.00	40,278,750.00	100.00	100.00	-		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas Luar dan dalam daerah	12	bulan	456,340,000.00	12.00	230,554,195.00	100.00	50.52	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	87.98	-	
Predikat kinerja										ST	T	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-	-	1,046,962,880.00	-	997,670,927.00	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran honorarium PHL dan peningkatan admistrasi perkantoran selama 12 bulan	48	OB	128,480,000.00	48.00	115,387,200.00	100.00	89.81	-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran honorarium PHL dan peningkatan admistrasi perkantoran selama 12 bulan	12	bulan	109,646,040.00	12.00	78,808,227.00	100.00	71.88	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12	bulan	808,836,840.00	12.00	803,475,500.00	100.00	99.34	-	
		-	Pembayaran honorarium PHL dan peningkatan administrasi keuangan selama 12 bulan	108	OB	-	108.00	-	100.00	-		
		-	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, penyediaan kebersihan Kantor dan Penyediaan Jasa Pengamanan Pasar 12 bulan	216	OB	-	216.00	-	100.00	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	87.01	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana Transportasi dalam kondisi baik	-	-	266,699,900.00	-	250,634,835.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	12	bulan	78,389,900.00	12.00	66,469,400.00	100.00	84.79	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak Kendaraan dinas dan perpanjangan STNK.	12	bulan	68,240,000.00	12.00	64,962,800.00	100.00	95.20	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Petak toko	50	petak	120,070,000.00	14.00	119,202,635.00	28.00	99.28	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									76.00	93.09	-	
Predikat kinerja									T	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						4,402,927,670.00	-	3,944,774,409.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									96.00	92.49	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tercapainya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-	-	515,120,000.00	-	513,380,000.00	-	-	-	
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	-	-	515,120,000.00	-	513,380,000.00	-	-	-	
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Tenaga Penyuluh Koperasi	15	orang	487,500,000.00	15.00	487,500,000.00	100.00	100.00	-	
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi	2	kebijakan	27,620,000.00	2.00	25,880,000.00	100.00	93.70	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	96.85	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						515,120,000.00	-	513,380,000.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	96.85	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	-	167,782,000.00	-	147,684,300.00	-	-	-	-
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	-	-	-	167,782,000.00	-	147,684,300.00	-	-	-	-
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	1	kegiatan	167,782,000.00	1.00	147,684,300.00	100.00	88.02	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	88.02	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						167,782,000.00	-	147,684,300.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	88.02	-	-
Predikat kinerja Program									ST	T	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi	-	-	163,232,000.00	-	140,182,000.00	-	-	-	-
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Umi	-	-	163,232,000.00	-	140,182,000.00	-	-	-	-
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	-	1	-	154,632,000.00	1.00	131,582,000.00	100.00	85.09	-	-
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Ketersediaan data untuk pengembangan UMKM	1	dokumen	8,600,000.00	1.00	8,600,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	92.55	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						163,232,000.00	-	140,182,000.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	92.55	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terciptanya Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	-	-	395,277,800.00	-	220,021,100.00	-	-	-	-
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Peningkatan Unit Sekala UMI	-	-	395,277,800.00	-	220,021,100.00	-	-	-	-
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Ketersediaan Tenda Ramadan & Fasilitas Dekranasda	210	UMi	395,277,800.00	75.00	220,021,100.00	35.71	55.66	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									35.71	55.66	-	-
Predikat kinerja									SR	R	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						395,277,800.00	-	220,021,100.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									35.71	55.66	-	-
Predikat kinerja Program									SR	R	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5,644,339,470.00	-	4,966,041,809.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH (%)									86.34	85.11	-	-
PREDIKAT KINERJA URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									T	T	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PMPPTSP NAKERTRANS
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	-	10,000,000.00	-	9,995,000.00	-	-		
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah inventasi terkait perizinan	50	milyar	10,000,000.00	-	9,995,000.00	-	-		
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen nilai inventasi dan nilai realisasi inventasi	1	dokumen	10,000,000.00	1.00	9,995,000.00	100.00	99.95		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.95		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						10,000,000.00	-	9,995,000.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.95		
Predikat kinerja Program									ST	ST		
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama dengan investor	7	kerjasama	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Terlaksananya pameran luar daerah	-	kali	-	-	-				
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pameran pembangunan kabupaten bangka barat	-	kali	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-		
Predikat kinerja									SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									-	-		
Predikat kinerja Program									SR	SR		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Lama waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin usaha tertentu atau jenis ijin tertentu	-	-	145,365,000.00	-	126,875,000.00	-	-		
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Lama waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan izin usaha tertentu atau jenis ijin tertentu	7	hari	145,365,000.00	-	126,875,000.00	-	-		
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya data perizinan	1	dokumen	81,565,000.00	1.00	67,550,000.00	100.00	82.82		
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Berita acara survey perizinan jumlah pengawasan menara telekomunikasi	150	dokumen	63,800,000.00	119.00	59,325,000.00	79.33	92.99		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									89.67	87.90		
Predikat kinerja									T	T		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5			6		7		8	9	
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM			145,365,000.00	-	126,875,000.00	-	-		
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		89.67	87.90			
							Predikat kinerja Program		T	T			
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah kerjasama dengan investor	-	-	357,241,750.00	-	211,499,750.00	-	-			
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama dengan investor	7	kerjasama	357,241,750.00	-	211,499,750.00	-	-			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan pelaksanaan penanaman modal didaerah untuk PMDN dan UKM	2	laporan	101,400,000.00	2.00	12,900,000.00	100.00	12.72			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dokumen nilai investasi dan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	1	dokumen	190,272,000.00	1.00	174,940,000.00	100.00	91.94			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pemantauan pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk PMDN dan UKM	2	laporan	65,569,750.00	1.00	23,659,750.00	50.00	36.08			
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		83.33	46.92			
							Predikat kinerja		T	SR			
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM			357,241,750.00	-	211,499,750.00	-	-		
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		83.33	46.92			
							Predikat kinerja Program		T	SR			
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PENANAMAN MODAL			512,606,750.00	-	348,369,750.00	-	-		
				RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PENANAMAN MODAL (%)					91.00	78.26			
							PREDIKAT KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL		ST	T			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-	-	-	-	-			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	-	751,408,533.00	-	477,533,740.00	-	-			
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	-	751,408,533.00	-	477,533,740.00	-	-			
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Terlaksananya seleksi dan pembinaan paskibraka	100	orang	751,408,533.00	99.92	477,533,740.00	99.92	63.55			
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		99.92	63.55			
							Predikat kinerja		ST	R			
				JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM			751,408,533.00	-	477,533,740.00	-	-		
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		99.92	63.55			
							Predikat kinerja Program		ST	R			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-			
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	-	1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	12	Bulan	1,500,000,000.00	12.00	1,500,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,500,000,000.00	-	1,500,000,000.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-	-	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-	-	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-	
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	12	bulan	150,000,000.00	12.00	150,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						2,401,408,533.00	-	2,127,533,740.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (%)									99.97	87.85	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									ST	T	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan dan validitas data/ informasi untuk perencanaan	55	%	199,622,000.00	-	191,107,400.00	-	-	DINAS KOMINFO	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	199,622,000.00	-	191,107,400.00	-	-	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Sektoral Untuk Pengambilan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	192,822,000.00	1.00	184,357,400.00	100.00	95.61	-	
		-	Terlaksananya Kegiatan IKG	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	Tersedianya buku indikator kesejahteraan rakyat Bangka Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Pengelolaan dan Updating data SDDKN kab.Bangka Barat	12	bulan	6,800,000.00	12.00	6,750,000.00	100.00	99.26		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.44	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						199,622,000.00	-	191,107,400.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	97.44	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN STATISTIK						199,622,000.00	-	191,107,400.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN STATISTIK (%)									100.00	97.44	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN STATISTIK									ST	ST	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												
		Persentase Pengguna Layanan Informasi Melalui Peralatan dan Jaringan Telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya		90	%	63,908,000.00	-	63,608,000.00	-	-	DINAS KOMINFO	
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	31,936,000.00	-	31,786,000.00	-	-	-
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pengelolaan dan perlindungan konten informasi milik pemerintah daerah	1	konten	31,936,000.00	1.00	31,786,000.00	100.00	99.53		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.53	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	31,972,000.00	-	31,822,000.00	-	-	-
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Dukungan kegiatan penting pada pemerintah daerah dan sterilisasi Objek Vital	3	objek	31,972,000.00	3.00	31,822,000.00	100.00	99.53		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.53	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						63,908,000.00	-	63,608,000.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.53	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PERSANDIAN						63,908,000.00	-	63,608,000.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PERSANDIAN (%)									100.00	99.53	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN PERSANDIAN									ST	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PARBUD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	4,082,677,757.00	-	3,868,133,777.00	-	-	-	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	8,000,000.00	-	7,950,000.00	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	dokumen	4,000,000.00	4.00	3,950,000.00	100.00	98.75	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	dokumen	2,000,000.00	3.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.58	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2,654,390,000.00	-	2,540,231,998.00	-	-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	bulan	2,648,390,000.00	14.00	2,534,231,998.00	100.00	95.69	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	dokumen	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	dokumen	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.92	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian hari-hari tertentu	25	stel	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	409,954,060.00	-	374,069,776.00	-	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mengganti, melengkapi dan mencukupi alat listrik kantor	16	item	9,996,600.00	16.00	9,467,000.00	100.00	94.70	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan Minum Kegiatan, Rapat dan Tamu Kantor	12	bulan	73,550,950.00	12.00	73,065,200.00	100.00	99.34	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan sarana adminstrasi kantor mencukupi	12	bulan	50,000,000.00	12.00	23,046,550.00	100.00	46.09	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi Kantor	3	item	4,968,000.00	3.00	3,180,000.00	100.00	64.01	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	44	jenis	71,115,510.00	44.00	65,179,576.00	100.00	91.65	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	12	bulan	200,323,000.00	12.00	200,131,450.00	100.00	99.90	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	82.62	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	798,766,197.00	-	738,304,770.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Gaji PHL Administrasi Perkantoran	144	OB	346,640,000.00	144.00	345,649,000.00	100.00	99.71	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran komunikasi, sumber daya air listrik dan internet	4	lokasi	250,356,000.00	4.00	193,016,234.00	100.00	77.10	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honorarium PHL administrasi keuangan	36	OB	201,770,197.00	36.00	199,639,536.00	100.00	98.94	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	91.92	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	bulan	211,567,500.00	-	207,577,233.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran PHL Supir, Service, BBM dan Suku cadang Kendaraan Dinas/Operasional	36	OB	199,330,000.00	36.00	196,476,733.00	100.00	98.57	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor terawat dan terpelihara	1	gedung	7,342,500.00	1.00	7,103,000.00	100.00	96.74	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Alat kantor yang terawat dan terpelihara	4	jenis	4,895,000.00	4.00	3,997,500.00	100.00	81.66	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	92.32	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						4,082,677,757.00	-	3,868,133,777.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	93.07	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	jumlah kekayaan budaya lokal daerah yang dilestarikan	39	budaya	761,639,350.00	-	326,230,240.00	-	-	-	
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah acara adat dan tradisi yang dilestarikan	20	event	174,821,600.00	-	156,442,340.00	-	-	-	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah acara adat yang diselenggarakan	18	event	174,821,600.00	14.00	156,442,340.00	77.78	89.49	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									77.78	89.49	-	
Predikat kinerja									T	T	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5			6		7		8	9		
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	122,817,750.00	-	117,137,200.00	-	-	-	-		
		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Fasilitasi penyambutan tamu	11	ceremony	122,817,750.00	11.00	117,137,200.00	100.00	95.37	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	95.37	-	-
									Predikat kinerja		ST	ST	-	-
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	464,000,000.00	-	52,650,700.00	-	-	-	-		
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	-	-	-	384,000,000.00	-	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Terlaksananya Program Kerja Lembaga Adat	1	dokumen	80,000,000.00	0.92	52,650,700.00	92.00	65.81	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		92.00	65.81	-	-
									Predikat kinerja		ST	S	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						761,639,350.00	-	326,230,240.00	-	-	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)		89.93	83.56	-	-
									Predikat kinerja Program		T	T	-	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	penyelenggaraan festival seni dan budaya	10	kali	378,764,600.00	-	365,115,100.00	-	-	-	-		
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Kesenian Masyarakat Bangka Barat	100	%	378,764,600.00	-	365,115,100.00	-	-	-	-		
		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Bantuan Alat Kesenian Sanggar Seni	6	paket	228,764,800.00	6.00	219,786,000.00	100.00	96.08	-	-		
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Fasilitasi Dewan Kesenian	1	laporan	149,999,800.00	1.00	145,329,100.00	100.00	96.89	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	96.48	-	-
									Predikat kinerja		ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						378,764,600.00	-	365,115,100.00	-	-	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	96.48	-	-
									Predikat kinerja Program		ST	ST	-	-
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	jumlah kerjasama pemerintah daerah terkait pengelolaan kekayaan budaya	4	buah	62,054,360.00	-	53,655,000.00	-	-	-	-		
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersampainya informasi kepada Masyarakat	100	%	62,054,360.00	-	53,655,000.00	-	-	-	-		
		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah fasilitasi, koordinasi terkait pembinaan dan pelestarian sejarah lokal daerah pada tahun bersangkutan	2	laporan	62,054,360.00	2.00	53,655,000.00	100.00	86.46	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	86.46	-	-
									Predikat kinerja		ST	T	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						62,054,360.00	-	53,655,000.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	86.46	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	jumlah kebijakan tentang budaya lokal daerah yang ditetapkan	29	buah	264,429,840.00	-	258,545,500.00	-	-	-	
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cagar Budaya Yang Telah di Tetapkan	100	%	264,429,840.00	-	258,545,500.00	-	-	-	
		Pelindungan Cagar Budaya	Terbayarnya Honorarium PHL juru pelihara cagar budaya	72	OB	264,429,840.00	72.00	258,545,500.00	100.00	97.77	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.77	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						264,429,840.00	-	258,545,500.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	97.77	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN KEBUDAYAAN						5,549,565,907.00	-	4,871,679,617.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN KEBUDAYAAN (%)									97.99	91.47	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN KEBUDAYAAN									ST	ST	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERPUS ARSIP	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	4,271,893,519.85	-	3,445,637,363.00	-	-	-	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	7,844,400.00	-	7,500,000.00	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Laporan	1,994,800.00	2.00	1,900,000.00	100.00	95.25	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	3,854,800.00	1.00	3,700,000.00	100.00	95.98	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	1,994,800.00	4.00	1,900,000.00	100.00	95.25	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.49	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2,212,964,400.00	-	2,090,770,007.00	-	-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12	Bulan	2,206,980,000.00	12.00	2,085,070,007.00	100.00	94.48	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	1,994,800.00	1.00	1,900,000.00	100.00	95.25	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Dokumen	1,994,800.00	2.00	1,900,000.00	100.00	95.25		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	1,994,800.00	2.00	1,900,000.00	100.00	95.25		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.05	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Olahraga	25	Stel	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	310,761,369.85	-	310,400,202.00	-	-		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengisian Tabung Gas	12	Bulan	4,800,000.00	12.00	4,800,000.00	100.00	100.00		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	Bulan	33,994,815.00	12.00	33,992,000.00	100.00	99.99		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Biaya Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	38,784,480.00	12.00	38,764,100.00	100.00	99.95		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Koran dan Majalah)	12	Bulan	2,438,880.00	12.00	2,319,720.00	100.00	95.11		
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material (ATK)	12	Bulan	50,999,694.85	12.00	50,961,083.00	100.00	99.92		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah)	12	Bulan	179,743,500.00	12.00	179,563,299.00	100.00	99.90		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.15	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintah Daerah	100	%	676,638,000.00	-	185,660,000.00	-	-		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	19	Jenis	295,250,000.00	-	-	-	-		
		Pengadaan Mebel	-	-	-	156,668,000.00	-	-	-	-		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	224,720,000.00	-	185,660,000.00	-	82.62		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	27.54	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	931,533,120.00	-	722,935,547.00	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Gaji Honorarium PHL	84	OB	591,510,000.00	84.00	464,410,500.00	100.00	78.51	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Gaji Honorarium PHL, Biaya Listrik dan Telepon	12	Bulan	146,772,000.00	12.00	65,765,427.00	100.00	44.81	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji Honorarium PHL dan Bahan Pembersih	48	OB	193,251,120.00	48.00	192,759,620.00	100.00	99.75	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	74.36	-	
Predikat kinerja									ST	S	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	132,152,230.00	-	128,371,607.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Gaji Honorarium PHL, Biaya Perawatan, BBM	24	OB	124,685,130.00	24.00	120,904,507.00	100.00	96.97	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	2	Gedung	7,467,100.00	2.00	7,467,100.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.48	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						4,271,893,519.85	-	3,445,637,363.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	92.51	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan umum dan keliling	45,000	pengunjung	340,490,640.00	-	223,292,230.00	-	-	-	
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Keliling	100	%	103,945,140.00	-	85,008,540.00	-	-	-	
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pengeola Perpustakaan	66	Peserta	31,937,660.00	66.00	31,317,660.00	100.00	98.06	-	
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Tersedianya Bahan Pustaka yang Memadai	1	Paket	47,359,480.00	1.00	30,822,880.00	100.00	65.08	Kegiatan Sedang Dilaksanakan (Berp	
		-	-	10	Klasifikasi	-	-	-	-	-		
		-	-	1,500	Eks	-	-	-	-	-		
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Profil Perpustakaan Desa, Sekolah dan Bibliografi Daerah Kabupaten/Kota	100	Buku	24,648,000.00	100.00	22,868,000.00	100.00	92.78	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	85.31	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum dan Keliling	100	%	236,545,500.00	-	138,283,690.00	-	-	-	
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	4	Kegiatan	127,056,100.00	4.00	47,514,450.00	100.00	37.40	-	
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Pemustaka dapat Dijangkau dan Dilayani	8	Kegiatan	109,489,400.00	8.00	90,769,240.00	100.00	82.90	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		-	-	3,000	Pengunjung	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	60.15	-	-
Predikat kinerja									ST	R	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						340,490,640.00	-	223,292,230.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	72.73	-	-
Predikat kinerja Program									ST	S	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PERPUSTAKAAN						4,612,384,159.85	-	3,668,929,593.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PERPUSTAKAAN (%)									100.00	82.62	-	-
PREDIKAT KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN									ST	T	-	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PERPUS ARSIP	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah/desa yang melakukan Pengelolaan arsip secara baku	64	%	74,912,950.00	-	70,911,650.00	-	-	-	-
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah/Desa yang Melakukan Pengelolaan Arsip secara Baku	78	%	34,044,950.00	-	30,044,700.00	-	-	-	-
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pengawasan Kearsipan	10	OPD	34,044,950.00	10.00	30,044,700.00	100.00	88.25	Kegiatan Sedang Berjalan	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	88.25	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah/Desa yang Melakukan Pengelolaan Arsip Secara Baku	78	%	40,868,000.00	-	40,866,950.00	-	-	-	-
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Terlaksananya Database System Kearsipan	1	Paket	17,640,000.00	1.00	17,640,000.00	100.00	100.00	Kegiatan Sedang Berjalan	-
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelola Kearsipan OPD Mengerti Tentang Tata Cara Penyusutan Arsip	66	Orang	23,228,000.00	66.00	23,226,950.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						74,912,950.00	-	70,911,650.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	94.12	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perangkat daerah/desa yang melakukan Pengelolaan arsip secara baku	35	%	68,399,750.00	-	68,399,750.00	-	-	-	-
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dokumen/Arsip Daerah yang Disimpan di Record Center	80	%	68,399,750.00	-	68,399,750.00	-	-	-	-
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Pemilahan Arsip dan Pedoman JRA SKPD	100	Boks	68,399,750.00	100.00	68,399,750.00	100.00	100.00	Kegiatan Sedang Berjalan	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5			6		7		8	9	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	98.87	-	
Predikat kinerja										ST	ST	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	25	stel	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										-	-	-	
Predikat kinerja										SR	SR	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	382,488,400.00	-	381,885,916.00	-	-	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangann bangunan kantor	12	bulan	3,950,000.00	12.00	3,936,600.00	100.00	99.66	-	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	4,600,000.00	12.00	4,600,000.00	100.00	100.00	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minuman rapat	12	bulan	35,982,000.00	12.00	35,924,600.00	100.00	99.84	-	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	31,500,000.00	12.00	31,496,200.00	100.00	99.99	-	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya surat kabar,majalah dan buku peraturan	12	bulan	4,960,000.00	12.00	4,960,000.00	100.00	100.00	-	-	
		Penyediaan Bahan/Material	tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	31,500,000.00	12.00	31,492,350.00	100.00	99.98	-	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	269,996,400.00	12.00	269,476,166.00	100.00	99.81	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	99.90	-	
Predikat kinerja										ST	ST	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pembayaran honorarium PHL dan persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	-	-	750,447,500.00	-	736,609,994.00	-	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembayaran honorarium PHL	12	bulan	55,940,000.00	12.00	55,940,000.00	100.00	100.00	-	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	penyediaan jasa telepon, air dan listrik	12	bulan	101,392,500.00	12.00	92,975,044.00	100.00	91.70	-	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pembayaran honorium PHL	240	ob	593,115,000.00	240.00	587,694,950.00	100.00	99.09	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	96.93	-	
Predikat kinerja										ST	ST	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor, persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-	-	164,921,350.00	-	162,805,145.00	-	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	pembayaran honorarium PHL,	12	OB	129,300,000.00	12.00	127,615,145.00	100.00	98.70	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5			6		7		8	9		
		Lapangan	pembayaran STNK kendaraan diinas,	21	Unit	-	-	-	-	-				
			terpeliharannya kendaran dinas/operasional	14	Unit	-	-	-	-	-				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1	paket	27,396,350.00	1.00	26,980,000.00	100.00	98.48		-		
			terpeliharannya gedung kantor	1	gedung	-	-	-	-	-				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharannya perlengkapan gedung kantor	12	bulan	4,988,200.00	12.00	4,975,000.00	100.00	99.74		-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharannya peralatan gedung kantor	12	bulan	3,236,800.00	12.00	3,235,000.00	100.00	99.94		-		
									100.00	99.21				
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		-			
									Predikat kinerja		ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						2,746,477,250.00	-	2,664,850,980.00	-	-	-			
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	98.98	-	
									Predikat kinerja Program		ST	ST	-	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	12	%	3,216,199,700.00	-	1,053,803,469.00	-	-		-		
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah mesin tempel (mesin 3,5 PK), persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	-	-	1,608,099,850.00	-	1,029,971,969.00	-	-		-		
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	tersedianya bubu lipat	500	unit	77,950,000.00	500.00	46,930,000.00	100.00	60.21		-		
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	tersedianya mesin 3,5 PK	20	unit	1,530,149,850.00	20.00	983,041,969.00	100.00	64.24		-		
			tersedianya GPS	78	unit	-	-	-	-	-		-		
			Tersedianya perahu, alat penangkap ikan dan alat bantu	7	paket	-	7.00	-	100.00	-		-		
									75.00	62.23				
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		-			
									Predikat kinerja		T	R	-	
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	pendampingan pinjaman modal bagi nelayan kecil, persentase pengembalian pembiayaan pinjaman bagi nelayan	-	100 %	24,381,900.00	-	23,831,500.00	-	-		-		
		Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	pendampingan pinjaman modal bagi nelayan kecil	15	kelompok	24,381,900.00	15.00	23,831,500.00	100.00	97.74		-		
									100.00	97.74				
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		-			
									Predikat kinerja		ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,632,481,750.00	-	1,053,803,469.00	-	-	-			
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)		87.50	79.98	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan		
				5			6		7					
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp			8	9
Predikat kinerja Program											T	T	-	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar	15	%	597,462,500.00	-	548,695,700.00	-	-	-			
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	-	597,462,500.00	-	548,695,700.00	-	-	-			
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya pakan ikan	10,100	kg	230,126,200.00	10,100.00	226,317,000.00	100.00	98.34	-			
			tersedianya pakan ikan BBI	12	bulan	-	12.00	-	100.00	-	-			
			tersedianya benih ikan nila dan lele	75,000	ekor	-	75,000.00	-	100.00	-	-			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pengadaan mesin pembuat pakan	1	paket	276,352,600.00	1.00	231,602,000.00	100.00	83.81	-			
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedia dokumen kajian rencana strategis pengembangan dan optimalisasi kinerja Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Bangka Barat	1	Dokumen	85,000,000.00	1.00	84,793,000.00	100.00	99.76	-			
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pengadaan obat-obatan ikan di BBI	12	bulan	5,983,700.00	12.00	5,983,700.00	100.00	100.00	-			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.48	-			
Predikat kinerja									ST	ST	-			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						597,462,500.00	-	548,695,700.00	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	95.48	-			
Predikat kinerja Program											ST	ST	-	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	lomba masak serba ikan	-	lomba	-	-	-	target tidak diisi	-	-			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-			
Predikat kinerja									SR	SR	-			
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya alat pemisah tulang (separator bones)	-	unit	-	-	-	target tidak diisi	-	-			
			tersedianya chest freezer	-	unit	-	-	-	target tidak diisi	-	-			
			tersedianya mesin penggiling ikan dan bumbu	-	unit	-	-	-	target tidak diisi	-	-			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-			
Predikat kinerja									SR	SR	-			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						-	-	-	-	-	-			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya pelatihan usaha homestay/ pondok wisata dan desa wisata	80.00	Peserta	258,600,856.00	80.00	238,931,800.00	100.00	92.39		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	88.80	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						776,202,572.00	-	679,922,800.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	88.80	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah paket wisata yang dipasarkan	19	kali	338,545,565.00	-	230,052,130.00	-	-	-	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Wisata yang di pasarkan	30	paket	338,545,565.00	-	230,052,130.00	-	-	-	
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Bahan Informasi Promosi Wisata	4	media	43,547,030.00	4.00	40,266,990.00	100.00	92.47	-	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Event Wisata Masyarakat/Komunitas	12	fasilitasi	269,922,315.00	8.80	168,777,890.00	73.33	62.53	-	
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Pemuktahiran data kepariwisataan	1	dokumen	17,076,495.00	1.00	14,772,860.00	100.00	86.51	-	
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya kerjasama antara Pemkab. Babar dengan stakeholders lainnya di sektor kepariwisataan	1	kerjasama	7,999,725.00	1.00	6,234,390.00	100.00	77.93	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									93.33	79.86	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						338,545,565.00	-	230,052,130.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									93.33	79.86	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PARIWISATA				2,745,387,495.00	-	2,518,359,910.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PARIWISATA (%)									96.67	87.83	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN PARIWISATA									ST	T	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-	136,965,840.00	-	135,210,000.00	-	-	DISTANGAN	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktivitas Padi (ton/ha/thn) dan persentase peningkatan produksi padi (ton) setiap tahun	11,000	Ton	91,298,340.00	-	89,866,000.00	-	-	-	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-Lausan kebun entres tanaman karet yang terpelihara	1	Ha	91,298,340.00	1.00	89,866,000.00	100.00	98.43	-	
		-	Tersedianya sarpras Inseminasi Buatan (IB)	3	Pos IB	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									50.00	98.43	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi/infrastruktur pengembangan sentra industri agropolitan	40	%	343,580,500.00	-	316,912,925.00	-	-	-	-
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas pengendalian serangan OPT perkebunan	115	Hektar	343,580,500.00	115.00	316,912,925.00	100.00	92.24	-	-
			Jumlah Luas pengendalian serangan OPT TPH	180	Hektar	-	180.00	-	100.00	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	92.24	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						343,580,500.00	-	316,912,925.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	93.68	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			-	-	-	869,811,580.00	-	837,341,420.00	-	-	-	-
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			Persentase penyuluh pertanian yang dibina/diberdayakan	100	%	869,811,580.00	-	837,341,420.00	-	-	-	-
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			Jumlah Movev penyuluhan pertanian lapangan	79	Laporan	799,592,000.00	79.00	770,052,000.00	100.00	96.31	-	-
			Jumlah penilaian DUPAK dan PAK penyuluh pertanian lapangan (ASN)	79	PAK	-	79.00	-	100.00	-	-	-
			Jumlah PPL ASN/PHL dan THL-TB PP yang di bayarkan BOP	1	Tahun	-	1.00	-	100.00	-	-	-
			Jumlah PPL dan THL-TB PP yang di gaji	1	Tahun	-	1.00	-	100.00	-	-	-
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			Jumlah fasilitasi pembinaan posluhdes dan P4S	64	desa/kelurahan	42,945,920.00	64.00	42,933,920.00	100.00	99.97	-	-
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			Jumlah demplot PPL di masing-masing BPP	6	BPP	27,273,660.00	6.00	24,355,500.00	100.00	89.30	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.19	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						869,811,580.00	-	837,341,420.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	95.19	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
-	#	#	#	#	#	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PERTANIAN						1,448,495,120.00	-	1,378,398,895.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PERTANIAN (%)									95.00	92.01	-	-
PREDIKAT KINERJA URUSAN PERTANIAN									ST	ST	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Hutan	3,333	Ha	96,700,500.00	-	72,184,550.00	-	-	DINAS LH	-
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota			Terlaksananya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	-	-	96,700,500.00	-	72,184,550.00	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5			6		7		8	9		
		Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Dokumen pengelolaan kawasan Tahura	1	kawasan	96,700,500.00	1.00	72,184,550.00	100.00	74.65				
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	74.65	-	
									Predikat kinerja		ST	S	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						96,700,500.00	-	72,184,550.00	-	-	-			
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	74.65	-	
									Predikat kinerja Program		ST	S	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN KEHUTANAN						96,700,500.00	-	72,184,550.00	-	-	-			
									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN KEHUTANAN (%)		100.00	74.65	-	
									PREDIKAT KINERJA URUSAN KEHUTANAN		ST	S	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS KUKMP			
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tercapainya Peningkatan Stabilitas Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	-	408,996,000.00	-	325,215,000.00	-	-				
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Peningkatan Stabilitas Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	-	408,996,000.00	-	325,215,000.00	-	-				
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dokumen updating harga dan stock kebutuhan pokok masyarakat	48	dokumen	18,000,000.00	48.00	17,700,000.00	100.00	98.33				
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya paket pasar murah berupa sembako murah dan subsidi daging sapi	3,300	paket	390,996,000.00	3,300.00	307,515,000.00	100.00	78.65				
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	88.49	-	
									Predikat kinerja		ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						408,996,000.00	-	325,215,000.00	-	-	-			
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	88.49	-	
									Predikat kinerja Program		ST	T	-	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Terlaksanya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-	-	87,626,200.00	-	57,052,701.00	-	-				
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	87,626,200.00	-	57,052,701.00	-	-				
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya sidang tera di pasar dan objek timbang	100	%	87,626,200.00	100.00	57,052,701.00	100.00	65.11				
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	65.11	-	
									Predikat kinerja		ST	S	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						87,626,200.00	-	57,052,701.00	-	-	-			
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	65.11	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan Sekda	4	Stel	9,880,200.00	4.00	9,880,000.00	100.00	100.00	-	
		-	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	44	Stel	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									50.00	100.00	-	
Predikat kinerja									R	ST	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	4,001,638,445.00	-	3,363,902,928.01	-	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	64,159,535.00	12.00	64,086,000.00	100.00	99.89	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Jenis	40,000,000.00	5.00	10,495,900.00	100.00	26.24		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan rumah tangga	12	Bulan	168,742,350.00	12.00	164,734,000.00	100.00	97.62		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya makanan dan minuman	12	Bulan	1,038,422,550.00	12.00	1,034,329,500.00	100.00	99.61		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	164,445,910.00	12.00	154,981,000.00	100.00	94.24		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	182,991,600.00	12.00	65,504,500.00	100.00	35.80		
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12	Bulan	195,497,500.00	12.00	195,220,000.00	100.00	99.86		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar Daerah	12	Bulan	2,147,379,000.00	12.00	1,674,552,028.01	100.00	77.98		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	78.90	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	2,822,280,000.00	-	1,769,340,700.00	-	-	-	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan	15	unit	2,052,680,000.00	2.00	1,097,790,000.00	13.33	53.48		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	jenis	419,600,000.00	6.00	373,095,700.00	100.00	88.92		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	paket	350,000,000.00	2.00	298,455,000.00	100.00	85.27		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									13.33	53.48	-	
Predikat kinerja									SR	R	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Bulan	5,335,948,160.00	-	4,524,052,801.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Honorarium PHL	732	ob	2,231,827,500.00	732.00	2,161,700,000.00	100.00	96.86		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Honorarium PHL	12	ob	1,342,720,000.00	12.00	839,160,551.00	100.00	62.50		
		- Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		12	Bulan	-	12.00	-	100.00	-		-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium PHL	96	ob	1,761,400,660.00	97.00	1,523,192,250.00	101.04	86.48		
		- Pembayaran Honorarium PHL		396	ob	-	396.00	-	100.00	-		-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.17	81.94		-
Predikat kinerja									ST	T		-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	3,527,895,000.00	-	3,460,884,200.00	-	-		-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Honorarium PHL	264	ob	1,646,743,000.00	264.00	1,644,017,200.00	100.00	99.83		-
			Pembayaran STNK Kendaraan Dinas/Operasional	150	unit	-	49.00	-	32.67	-		
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	-	12.00	-	100.00	-		
			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	4	unit	-	-	-	-	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	12	Bulan	1,595,280,000.00	12.00	1,563,877,000.00	100.00	98.03		-
		- Terpeliharanya Mess dan Rumah Dinas		12	Bulan	-	12.00	-	100.00	-		
		- Terpeliharanya rumah jabatan		2	jenis	-	2.00	-	100.00	-		
		- Tersedianya operasional Masjid Agung Baiturridho		12	Bulan	-	12.00	-	100.00	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan kerja	12	Bulan	200,787,000.00	12.00	200,453,000.00	100.00	99.83		-
		- Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas		12	Bulan	-	12.00	-	100.00	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan kerja	12	Bulan	85,085,000.00	12.00	52,537,000.00	100.00	61.75		-
		- Tersedianya operasional Masjid Agung Baiturridho		12	Bulan	-	12.00	-	100.00	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									86.06	89.86		-
Predikat kinerja									T	T		-
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	Persen	829,175,760.00	-	595,774,924.00	-	-		-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	200,000,000.00	14.00	126,697,924.00	116.67	63.35	-	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	14	Stel	80,875,760.00	14.00	80,825,000.00	100.00	99.94	-	
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Medical Check Up KDH dan WKDH beserta keluarga	12	Bulan	148,300,000.00	9.00	31,612,000.00	75.00	21.32	-	
		-	Tersedianya Suplemen kesehatan KDH dan WKDH	8	Orang	-	8.00	-	100.00	-	-	
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Operasional KDH dan WKDH	12	Bulan	400,000,000.00	12.00	356,640,000.00	100.00	89.16	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									98.33	68.44	-	
Predikat kinerja									ST	S	-	
		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Terfasilitasinya Kerumahtangaan Kepala Daerah ,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100	Persen	578,137,098.00	-	438,388,425.00	-	-		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Bupati	5	paket	227,926,332.00	5.00	154,117,125.00	100.00	67.62	-	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Wakil Bupati	5	paket	277,087,798.00	5.00	225,945,600.00	100.00	81.54	-	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Rumah Dinas Sekretaris Daerah	5	paket	73,122,968.00	5.00	58,325,700.00	100.00	79.76	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	76.31	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat Fungsi dan tepat Ukuran	80	Persen	261,128,550.00	-	244,224,100.00	-	-		
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen	95,928,830.00	2.00	89,189,000.00	100.00	92.97	-	
		Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersusunnya dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Dokumen	76,899,750.00	2.00	72,355,000.00	100.00	94.09	-	
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi Kabupaten	1	Dokumen	32,239,950.00	1.00	30,262,000.00	100.00	93.86	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya doukmen Laporan Kinerja Pemerintah	100	%	56,060,020.00	100.00	52,418,100.00	100.00	93.50	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	93.61	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terselenggaranya protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	Persen	1,555,332,360.00	-	1,508,311,100.00	-	-		
		Fasilitas Keprotokolan	Penataan acara Pimpinan Daerah di dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	44,551,360.00	12.00	-	100.00	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya hubungan KDH/WKDH dengan Ormas/pelajar/Mahasiswa dan tokoh Masyarakat	12	Bulan	1,475,086,000.00	12.00	1,473,316,100.00	100.00	99.88	-	
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	35,695,000.00	12.00	34,995,000.00	100.00	98.04	-	
		-	Tersedianya Informasi melalui Website dan pengolahan data elektronik dalam bentuk aplikasi	12	Bulan	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									75.00	65.97	-	
Predikat kinerja									T	S	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						27,008,807,573.00	-	23,648,115,651.01	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									83.90	81.67	-	
Predikat kinerja Program									T	T	-	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan rancangan regulasi Daerah menjadi regulasi Daerah	100	Persen	6,536,871,012.00	-	5,913,412,300.00	-	-	-	
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase rumusan kebijakan tata Pemerintahan Daerah yang tersusun	6	Kebijakan Daerah	233,122,612.00	-	145,959,700.00	-	-	-	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Rapat Bina Pamong	6	Kali	71,883,560.00	-	22,770,000.00	-	31.68	-	
		-	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	6	Kali	-	3.00	-	50.00	-	-	
		-	Tersedianya pelayanan PATEN sesuai dengan SOP yang berlaku	6	Kecamatan	-	6.00	-	100.00	-	-	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Fasilitasi penyelesaian Batas wilayah dan sosialisasi	1	Kali	69,514,732.00	1.00	63,022,600.00	100.00	90.66	-	
		-	Tersusunnya dokumen Rupabumi	1	Dokumen	-	1.00	-	100.00	-	-	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Penilaian Kecamatan	6	Kecamatan	91,724,320.00	-	60,167,100.00	-	65.60	-	
		-	Tersedianya Dokumen SPM Kabupaten	1	Dokumen	-	1.00	-	100.00	-	-	
		-	Tersusunnya LKPJ Kepala Daerah	1	Dokumen	-	1.00	-	100.00	-	-	
		-	Tersusunnya LPPD Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat	1	Dokumen	-	1.00	-	100.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									72.22	62.64	-	
Predikat kinerja									S	R	-	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terealisasinya kegiatan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100	Persen	5,590,722,300.00	-	5,199,195,000.00	-	-	-	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Da'i yang melakukan pembinaan di tiap Desa	45	Orang	1,481,484,000.00	40.00	1,420,568,000.00	88.89	95.89	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			- Jumlah Toga dan Toma yang diberangkatkan Haji	300	Orang	-	-	-	-	-		
			- Terfasilitasinya Kegiatan lembaga keagamaan	6	Organisasi	-	6.00	-	100.00	-		
			- Terlaksananya safari ramadhan	12	Desa	-	-	-	-	-		
			- Tersedianya belanja hibah kepada kelompok/anggota masyarakat	30	kelompok/masyarakat	-	37.00	-	123.33	-		
			- Tersedianya Operasional PHBI	7	Hari Besar	-	4.00	-	57.14	-		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah survey dan monitoring yang dilaksanakan tiap desa	100	proposal	4,071,228,300.00	100.00	3,778,627,000.00	100.00	92.81	-	
			- Tersedianya bantuan sosial pendidikan sekolah menengah atas dan tinggi	30	Siswa/Mahasiswa	-	13.00	-	43.33	-		
			- Terselenggaranya sosialisasi kepada masyarakat perangkat Desa, lembaga keagamaan	6	Kecamatan	-	6.00	-	100.00	-		
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Peserta sosialisasi yang dilaksanakan	24	Sekolah	38,010,000.00	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									61.27	62.90	-	
Predikat kinerja									R	R	-	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersusunnya produk hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	Persen	693,256,300.00	-	548,492,000.00	-	-		
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	700	Produk Hukum	142,437,200.00	700.00	137,335,500.00	100.00	96.42	-	
			- Jumlah Raperbup yang tersusun	30	Raperbup	-	30.00	-	100.00	-		
			- Jumlah Raperda yang sesuai dengan instrumen HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	12	Raperda	-	11.00	-	91.67	-		
			- Jumlah Raperda yang tersusun	14	Raperda	-	14.00	-	100.00	-		
			- Jumlah Raperdes/perdes yang dikaji	2	Kali	-	2.00	-	100.00	-		
			- Penyusunan pengelolaan bahan Raperda yang akan dibahas tahun berikutnya	15	Raperda	-	11.00	-	73.33	-		
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan terhadap permasalahan peraturan perundang-undangan	1	Kasus	152,318,000.00	-	109,094,000.00	-	71.62		
			- Jumlah Rancangan dan laporan kerja RANHAMDA yang tersusun	2	Laporan	-	2.00	-	100.00	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Perda/Raperda dan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru yang disosialisasikan	12	Judul	398,501,100.00	-	302,062,500.00	-	75.80		
		-	Jumlah Produk Hukum yang terupdate melalui Website JDH	100	Produk hukum	-	85.00	-	85.00	-	-	
		-	Terlaksananya pengawasan atas Pembangunan Daerah	31	SKPD	-	5.00	-	16.13	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									69.65	81.28	-	
Predikat kinerja									S	T	-	
		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya kerjasama Daerah dengan Daerah lain dan pihak ketiga	10	Kerjasama/PKS	19,769,800.00	-	19,765,600.00	-	-		
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Adanya Kerjasama yang terjalin antar daerah	10	MOU	19,769,800.00	26.00	19,765,600.00	260.00	99.98		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									260.00	99.98	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						6,536,871,012.00	-	5,913,412,300.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									115.79	76.70	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengembangan Kebijakan Pembangunan sesuai dengan perencanaan	100	Persen	569,975,070.00	-	485,152,000.00	-	-		
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian yang dikeluarkan	2	Kebijakan	215,943,150.00	-	146,159,000.00	-	-		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terjalannya Kerjasama antara BUMD dengan Masyarakat/Dunia Usaha	2	Pelaku usaha	140,892,500.00	-	80,450,000.00	-	57.10		
		-	Terlaksananya Pemilihan Direksi/Dewan Pengawas BUMD	1	Kali	-	1.00	-	100.00	-		
		-	Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD per triwulan	4	Dokumen	-	4.00	-	100.00	-		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Tersedianya komponen data Inflasi di Kabupaten Bangka Barat	4	Dokumen	53,015,450.00	4.00	50,033,000.00	100.00	94.37		
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Tersedianya laporan CSR perusahaan yang ada di Bangka Barat	4	Dokumen	22,035,200.00	4.00	15,676,000.00	100.00	71.14		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									80.00	74.21	-	
Predikat kinerja									T	S	-	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tingkat Deviasi realisasi fisik dan keuangan Pembangunan Daerah	30	Persen	87,124,800.00	-	82,335,000.00	-	-		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Rapat TEPPRA	12	Bulan	87,124,800.00	12.00	82,335,000.00	100.00	94.50		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	94.50	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Predikat kinerja					ST	ST	-	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	level	3.00	266,907,120.00	-	256,658,000.00	-	-	-	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen Pelaksanaan pengadaan yang ditindaklanjuti	100	%	144,667,120.00	100.00	144,658,000.00	100.00	99.99	-	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Aparatur, dan Penyedia yang mengetahui tata cara penggunaan aplikasi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik	150	Paket	122,240,000.00	137.00	112,000,000.00	91.33	91.62	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									95.67	95.81	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						569,975,070.00	-	485,152,000.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									91.89	88.17	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SEKRETARIAT DAERAH						34,115,653,655.00	-	30,046,679,951.01	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH (%)									97.19	82.18	-	
PREDIKAT KINERJA SEKRETARIAT DAERAH									ST	T	-	
		SEKRETARIAT DPRD		-	-	-	-	-	-	-	-	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	25,532,657,007.00	-	21,393,940,977.00	-	-	SETWAN	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	7,046,380.00	-	5,850,000.00	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	3	dokumen	2,000,000.00	3.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	5	dokumen	3,046,380.00	5.00	1,950,000.00	100.00	64.01	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun	4	dokumen	2,000,000.00	4.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	86.34	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2,026,820,000.00	-	1,919,295,719.00	-	-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2,020,820,000.00	12.00	1,913,445,719.00	100.00	94.69	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1	laporan	2,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan yang tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan yang tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5			6		7		8	9	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	96.80	-	
Predikat kinerja										ST	ST	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakaian Olahraga	100	%	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25	stel	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										-	-	-	
Predikat kinerja										SR	SR	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1,597,581,045.00	-	1,189,659,071.00	-	-	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	12	bulan	106,184,780.00	12.00	77,601,100.00	100.00	73.08	-	-	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	51,080,400.00	12.00	44,439,500.00	100.00	87.00	-	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	159,732,200.00	12.00	145,318,000.00	100.00	90.98	-	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12	bulan	412,823,990.00	12.00	150,375,500.00	100.00	36.43	-	-	
		-	Tersedianya makanan dan minuman	12	bulan	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	465,709,640.00	12.00	408,615,700.00	100.00	87.74	-	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	67,200,000.00	12.00	49,140,000.00	100.00	73.13	-	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	174,671,035.00	12.00	174,057,550.00	100.00	99.65	-	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah	12	bulan	160,179,000.00	12.00	140,111,721.00	100.00	87.47	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										88.89	79.43	-	
Predikat kinerja										T	T	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	96,540,000.00	-	89,815,000.00	-	-	-	-	
		Pengadaan Mebel	-	100.00	unit	96,540,000.00	100.00	89,815,000.00	100.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										100.00	-	-	
Predikat kinerja										ST	SR	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	bulan	2,110,307,624.00	-	1,955,014,114.00	-	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Honorarium PHL	372	ob	939,199,995.00	372.00	915,425,000.00	100.00	97.47	-	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	12	bulan	368,363,999.00	12.00	277,808,964.00	100.00	75.42	-	-	
		-	Terkelolanya website DPRD	12	bulan	-	-	-	-	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium PHL	276	ob	802,743,630.00	276.00	761,780,150.00	100.00	94.90	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5			6		7		8	9	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										75.00	89.26	-	
Predikat kinerja										T	T	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	3,958,777,001.00	-	3,636,124,391.00	-	-		-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	3	unit	123,000,000.00	3.00	78,229,750.00	100.00	63.60		-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Honorarium PHL	84	ob	509,020,000.00	61.00	372,835,100.00	72.62	73.25		-	
		-	Terpeliharanya kendaraan dinas	9	unit	-	9.00	-	100.00	-		-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi sedang berat rumah Jabatan Pimpinan DPRD	1	Paket	2,420,189,001.00	1.00	2,326,816,750.00	100.00	96.14		-	
		-	Terpeliharanya gedung kantor	2	gedung	-	2.00	-	100.00	-		-	
		-	Terpeliharannya rumah jabatan/dinas	3	unit	-	3.00	-	100.00	-		-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1	unit	110,548,000.00	1.00	100,684,791.00	100.00	91.08		-	
		-	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas	60	unit	-	55.00	-	91.67	-		-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	182	unit	796,020,000.00	182.00	757,558,000.00	100.00	95.17		-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										96.03	83.85	-	
Predikat kinerja										ST	T	-	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	14,281,155,254.00	-	11,670,773,982.00	-	-		-	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	12	Bulan	13,968,384,254.00	12.00	11,376,482,982.00	100.00	81.44		-	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	150	Stel	312,771,000.00	150.00	294,291,000.00	100.00	94.09		-	
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya Medical check up untuk Anggota DPRD dan Keluarga	25	Orang	-	-	-	-	-		-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)										66.67	87.77	-	
Predikat kinerja										S	T	-	
		Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintah Daerah	100	%	1,454,429,703.00	-	927,408,700.00	-	-		-	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi hearing, dialog dan monitoring adanya masukan/ aspirasi masyarakat	4	Kegiatan	698,429,720.00	3.00	363,825,000.00	75.00	52.09		-	
		-	Fasilitasi pelantikan/peresmian PAW	2	Kali	-	-	-	-	-		-	
		-	Fasilitasi rapat-rapat Badan musyawarah	24	Kegiatan	-	13.00	-	54.17	-		-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			-	12	Kegiatan	-	33.00	-	275.00	-		
			-	40	Paripurna	-	34.00	-	85.00	-		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Fasilitasi Kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12	Bulan	755,999,983.00	12.00	563,583,700.00	100.00	74.55		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									98.19	63.32	-	
Predikat kinerja									ST	R	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						25,532,657,007.00	-	21,393,940,977.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									89.25	83.82	-	
Predikat kinerja Program									T	T	-	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Raperda Menjadi Perda	100	%	17,709,293,750.00	-	10,191,675,591.00	-	-	-	-
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	100	%	591,257,870.00	-	36,165,000.00	-	-	-	-
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Fasilitasi Pembahasan Raperda	15	Raperda	514,418,950.00	7.00	26,265,000.00	46.67	5.11		
			Fasilitasi Penyusunan Rancangan Perda Inisiatif	1	Raperda	-	-	-	-	-		
		Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Fasilitasi rapat-rapat badan Legislatif	4	Kegiatan	76,838,920.00	4.00	9,900,000.00	100.00	12.88		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									48.89	8.99	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	%	188,627,320.00	-	97,362,000.00	-	-	-	-
		Pembahasan APBD	Fasilitasi rapat-rapat Badan Anggaran	4	Kegiatan	188,627,320.00	4.00	97,362,000.00	100.00	51.62		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	51.62	-	
Predikat kinerja									ST	R	-	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%	4,244,827,860.00	-	2,228,835,137.00	-	-	-	-
		Bimbingan Teknis DPRD	Fasilitasi pendalaman tugas yang diikuti Pimpinan Anggota DPRD	6	Kali	3,223,000,000.00	6.00	1,368,015,137.00	100.00	42.45		
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Fasilitasi publikasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	12	Bulan	441,000,000.00	12.00	405,820,000.00	100.00	92.02		
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Fasilitasi jasa konsultasi dan bantuan hukum bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	12	Bulan	226,770,000.00	12.00	211,500,000.00	100.00	93.27		
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli yang tersedia per tahun	60	ob	270,000,000.00	60.00	243,500,000.00	100.00	90.19		
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	fasitasi forum komunikasi DPRD dan Masyarakat	12	kegiatan	84,057,860.00	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									80.00	63.58	-	
Predikat kinerja									T	R	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%	644,080,700.00	-	269,828,000.00	-	-	-	-
		Pelaksanaan Reses	Fasilitasi kegiatan Reses Anggota DPRD untuk menjangkau aspirasi masyarakat di daerah Dapil masing-masing	3	reses	644,080,700.00	3.00	269,828,000.00	100.00	41.89	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	41.89	-	-
Predikat kinerja									ST	SR	-	-
		Fasilitasi Tugas DPRD	Terfasilitasinya pelaksanaan Tugas DPRD	100	%	12,040,500,000.00	-	7,559,485,454.00	-	-	-	-
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Fasilitasi kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	73	Berkas	12,040,500,000.00	75.00	7,559,485,454.00	102.74	62.78	-	-
		-	Fasilitasi perjalanan dinas pimpinan DPRD dalam rangka konsultasi atau koordinasi	72	Kali	-	74.00	-	102.78	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									102.76	62.78	-	-
Predikat kinerja									ST	R	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						17,709,293,750.00	-	10,191,675,591.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									86.33	45.77	-	-
Predikat kinerja Program									T	SR	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SEKRETARIAT DPRD						43,241,950,757.00	-	31,585,616,568.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM SEKRETARIAT DPRD (%)									87.79	64.80	-	-
PREDIKAT KINERJA SEKRETARIAT DPRD									T	R	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						77,357,604,412.00	-	61,632,296,519.01	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (%)									92.49	73.49	-	-
PREDIKAT KINERJA UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									ST	S	-	-
		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		INSPEKTORAT DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja	100	%	4,569,646,450.00	-	4,353,346,762.00	-	-	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Status Capaian Kinerja Keuangan	100	%	8,000,000.00	-	6,861,000.00	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	3	Dokumen	2,000,000.00	3.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	4	Dokumen	4,000,000.00	4.00	2,961,000.00	100.00	74.03	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	3	Jenis	2,000,000.00	3.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	89.68	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Status Capaian Kinerja Keuangan Daerah	100	%	3,430,000,000.00	-	3,246,292,828.00	-	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	3,424,000,000.00	12.00	3,240,442,828.00	100.00	94.64	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	3	Dokumen	2,000,000.00	3.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	-
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Tersusun	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	96.78	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Optimalnya Disiplin Aparatur Daerah	100	%	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	70	stell	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	477,766,450.00	-	477,485,421.00	-	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12	bulan	6,772,200.00	12.00	6,759,700.00	100.00	99.82	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	12	bulan	42,500,000.00	12.00	42,355,000.00	100.00	99.66	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	51,412,250.00	12.00	51,402,000.00	100.00	99.98	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	4,800,000.00	12.00	4,800,000.00	100.00	100.00	-	-
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	97,750,000.00	12.00	97,750,000.00	100.00	100.00	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	274,532,000.00	12.00	274,418,721.00	100.00	99.96	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.90	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi	100	%	492,790,000.00	-	466,396,073.00	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran honorarium PHL	96	OB	246,860,000.00	96.00	245,201,000.00	100.00	99.33	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	bulan	67,056,000.00	12.00	42,543,073.00	100.00	63.44	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium PHL	12	bulan	178,874,000.00	12.00	178,652,000.00	100.00	99.88	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	87.55	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100	%	161,090,000.00	-	156,311,440.00	-	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	24	ob	148,590,000.00	24.00	143,811,440.00	100.00	96.78		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	gedung	7,500,000.00	1.00	7,500,000.00	100.00	100.00		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1	gedung	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.93		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						4,569,646,450.00	-	4,353,346,762.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	94.57		
Predikat kinerja Program									ST	ST		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	100	%	1,936,082,000.00	-	1,865,990,000.00	-	-		
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	100	%	1,719,530,000.00	-	1,656,290,000.00	-	-		
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Evaluasi perencanaan penganggaran responsif gender	1	laporan	220,400,000.00	1.00	220,400,000.00	100.00	100.00		
			- jumlah lakip OPD yang dievaluasi	29	OPD	-	29.00	-	100.00	-		
			- jumlah opd yang di evaluasi	30	Objek Evaluasi	-	30.00	-	100.00	-		
			- jumlah unit pelayanan publik (PTSP)	1	Dokumen	-	1.00	-	100.00	-		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pencapaian PKPT	20	Objek Audit	249,150,000.00	20.00	245,010,000.00	100.00	98.34		
			- Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi	29	laporan	-	29.00	-	100.00	-		
		Reviu Laporan Kinerja	Entitas pelaporan penyerapan anggaran	1	dokumen	234,100,000.00	1.00	230,650,000.00	100.00	98.53		
			- entitas pelaporan penyerapan PBJ	1	dokumen	-	1.00	-	100.00	-		
			- Jumlah dokumen perencanaan yang di reviu	5	Jenis	-	5.00	-	100.00	-		
			- terlaksananya reviu lakip daerah	1	laporan	-	1.00	-	100.00	-		
		Reviu Laporan Keuangan	terkelolanya SIM Hasil pemeriksaan	12	bulan	117,050,000.00	12.00	64,200,000.00	100.00	54.85		
			- tersedianya laporan reviu LKPD	31	Objek reviu	-	31.00	-	100.00	-		
		Pengawasan Desa	Jumlah Dana Desa	1	Dokumen	581,530,000.00	1.00	580,180,000.00	100.00	99.77		
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah evaluasi / pemantauan	120	paket	317,300,000.00	120.00	315,850,000.00	100.00	99.54		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5			6		7		8	9		
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	91.84	-	
									Predikat kinerja		ST	ST	-	
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	100	%	216,552,000.00	-	209,700,000.00	-	-	-	-		
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	persentase pelimpahan kasus TPTGR	100	%	300,000.00	-	-	-	-	-	-		
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah kasus tertangani	16	kasus	216,252,000.00	24.00	209,700,000.00	150.00	96.97	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		75.00	48.49	-	
									Predikat kinerja		T	SR	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,936,082,000.00	-	1,865,990,000.00	-	-	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)		87.50	70.16	-	
									Predikat kinerja Program		T	S	-	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	100	%	558,260,000.00	-	468,058,150.00	-	-	-	-		
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	100	%	558,260,000.00	-	468,058,150.00	-	-	-	-		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aksi pencegahan korupsi	29	Laporan	14,600,000.00	-	-	-	-	-	-		
			terlaksananya gelar pengawasan,	1	kali	-	-	-	-	-	-	-		
			terlaksananya lapor SP4N	1	Laporan	-	1.00	-	100.00	-	-	-		
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah asistensi yang dilaksanakan	2	kali	42,300,000.00	2.00	34,150,000.00	100.00	80.73	-	-		
			jumlah laporan LHKASN	1	laporan	-	1.00	-	100.00	-	-	-		
			jumlah OPD yang melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	30	OPD	-	30.00	-	100.00	-	-	-		
			jumlah OPD yang membuat buku register resiko	1	Laporan	-	1.00	-	100.00	-	-	-		
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen laporan RAD PPK	1	dokumen	500,460,000.00	1.00	433,908,150.00	100.00	86.70	-	-		
			jumlah laporan pengaduan melalui WBS	1	Laporan	-	-	-	-	-	-	-		
			terkelolanya gratifikasi ke KPK	1	Laporan	-	1.00	-	100.00	-	-	-		
			tersedianya laporan SABER Pungii	2	Laporan	-	2.00	-	100.00	-	-	-		
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan benturan kepentingan per tahun	1	laporan	900,000.00	-	-	-	-	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		66.67	41.86	-	
									Predikat kinerja		S	SR	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						558,260,000.00	-	468,058,150.00	-	-	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)		66.67	41.86	-	
									Predikat kinerja Program		S	SR	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	bulan	5,700,000.00	12.00	3,302,000.00	100.00	57.93	-	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	bulan	33,946,700.00	12.00	32,443,000.00	100.00	95.57	-	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	34,000,000.00	12.00	16,223,750.00	100.00	47.72	-	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	4,998,000.00	12.00	4,320,000.00	100.00	86.43	-	
			Penyediaan Bahan/Material	12	bulan	33,960,300.00	12.00	33,940,000.00	100.00	99.94	-	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	629,886,000.00	12.00	626,617,882.00	100.00	99.48	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	78.36	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	865,287,000.00	-	812,717,865.00	-	-	-	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120	OB	410,695,000.00	120.00	389,363,000.00	100.00	94.81	-	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	102,000,000.00	12.00	82,947,365.00	100.00	81.32	-	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	OB	352,592,000.00	60.00	340,407,500.00	100.00	96.54	-	
			- Pembayaran honorarium PHL dan tersedianya jasa kebersihan kantor	36	OB	-	36.00	-	100.00	-	-	
			- Pembayaran honorarium PHL Keamanan Kantor	24	OB	-	24.00	-	100.00	-	-	
			- Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	12	bulan	-	12.00	-	100.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	90.89	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	bulan	205,022,500.00	-	172,646,000.00	-	-	-	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36	OB	167,800,000.00	36.00	140,993,500.00	100.00	84.02	-	
			- Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12	bulan	-	12.00	-	100.00	-	-	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	gedung	7,342,500.00	2.00	7,342,500.00	100.00	100.00	-	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	gedung	26,610,000.00	1.00	21,040,000.00	100.00	79.07	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12	bulan	3,270,000.00	12.00	3,270,000.00	100.00	100.00	-	-
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	90.77	-	-
							Predikat kinerja		ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						5,106,310,500.00	-	4,754,141,222.00	-	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	86.10	-	-
							Predikat kinerja Program		ST	T	-	-
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penghargaan Pangripta Tingkat Propinsi	3	peringkat	1,606,578,420.00	-	1,412,317,138.00	-	-	-	-
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/ Kota sesuai Tata Cara berdasarkan peraturan perundangan	100	persen	1,313,039,750.00	-	1,224,505,938.00	-	-	-	-
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan RKPD	2	kegiatan	113,651,780.00	2.00	88,238,000.00	100.00	77.64	-	-
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen RKPD disusun tepat waktu	1	dokumen	1,199,387,970.00	1.00	1,136,267,938.00	100.00	94.74	-	-
		-	Dokumen Perubahan RKPD	1	dokumen	-	1.00	-	100.00	-	-	-
		-	Raperda RPJMD	1	dokumen	-	1.00	-	100.00	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	86.19	-	-
							Predikat kinerja		ST	T	-	-
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Analisis Data dan Informasi pemerintahan Daerah/ Bidang Perencanaan Pembangunan daerah	100	persen	98,858,056.00	-	73,403,900.00	-	-	-	-
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah	2	Sim	98,858,056.00	2.00	73,403,900.00	100.00	74.25	-	-
		-	Updating Data SIPD Kabupaten Bangka Barat	4	Triwulan	-	4.00	-	100.00	-	-	-
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	74.25	-	-
							Predikat kinerja		ST	S	-	-
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan daerah	100	persen	194,680,614.00	-	114,407,300.00	-	-	-	-
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	2	dokumen	100,723,600.00	2.00	61,712,200.00	100.00	61.27	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			Tersusunnya dokumen pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1	dokumen	-	1.00	-	100.00	-		
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah	1	dokumen	93,957,014.00	1.00	52,695,100.00	100.00	56.08		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	58.68	-	
Predikat kinerja									ST	R	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,606,578,420.00	-	1,412,317,138.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	73.04	-	
Predikat kinerja Program									ST	S	-	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keberhasilan Indikator Sasaran Daerah	100	%	636,530,090.00	-	572,151,147.00	-	-	-	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran program RPJMD dalam RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	%	245,125,000.00	-	209,727,900.00	-	-	-	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	100,200,000.00	12.00	90,783,500.00	100.00	90.60		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terselenggaranya perencanaan pembangunan Pemerintahan	12	bulan	20,000,000.00	12.00	14,196,800.00	100.00	70.98		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	104,925,000.00	12.00	91,594,800.00	100.00	87.30		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terselenggaranya perencanaan pembangunan Sosial Budaya I, II dan III	12	bulan	20,000,000.00	12.00	13,152,800.00	100.00	65.76		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	78.66	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	%	190,692,020.00	-	175,610,180.00	-	-	-	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	87,478,580.00	12.00	79,346,740.00	100.00	90.70		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang persik II	12	bulan	7,867,370.00	12.00	7,867,370.00	100.00	100.00	-	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	87,478,760.00	12.00	80,528,760.00	100.00	92.06	-	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan III	12	bulan	7,867,310.00	12.00	7,867,310.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.69	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	%	200,713,070.00	-	186,813,067.00	-	-	-	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	87,488,730.00	12.00	80,538,730.00	100.00	92.06	-	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Terselenggaranya perencanaan pembangunan bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan I	12	bulan	7,867,370.00	12.00	7,867,367.00	100.00	100.00	-	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12	bulan	97,489,600.00	12.00	90,539,600.00	100.00	92.87	-	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan	12	bulan	7,867,370.00	12.00	7,867,370.00	100.00	100.00	-	
		-	Data perencanaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	dokumen	-	1.00	-	100.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	96.23	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						636,530,090.00	-	572,151,147.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	90.19	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PERENCANAAN						7,349,419,010.00	-	6,738,609,507.00	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PERENCANAAN (%)									100.00	83.11	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN PERENCANAAN									ST	T	-	
-		KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	4,814,034,806.00	-	4,525,920,458.00	-	-	BPKAD	
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	8,000,000.00	-	7,950,000.00	-	-	-	
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RENSTRA, RKA dan RENJA yang tersusun	3	dokumen	2,000,000.00	3.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ihtisar kinerja yang tersusun	1	dokumen	4,000,000.00	1.00	3,950,000.00	100.00	98.75	-	
-		-	Jumlah dokumen DALEV yang tersusun	3	dokumen	-	3.00	-	100.00	-	-	
-		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LAKIP, LKPJ, TAPKIN dan LPPD yang tersusun	4	dokumen	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.58	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3,206,370,000.00	-	3,010,237,745.00	-	-	-	
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	3,200,370,000.00	14.00	3,004,237,745.00	100.00	93.87	-	
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
-		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis yang tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.47	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	25	stel	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	481,683,246.00	-	429,680,126.00	-	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lampu yang dibeli	12	bulan	9,000,000.00	12.00	6,400,000.00	100.00	71.11	-	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengisian Ulang Gas Elpij Keperluan kantor	12	bulan	2,475,000.00	12.00	990,000.00	100.00	40.00	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli untuk keperluan kegiatan, rapat dan tamu	12	bulan	63,444,546.00	12.00	62,487,260.00	100.00	98.49	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang dibayar	12	bulan	31,897,500.00	12.00	10,763,600.00	100.00	33.74	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah tagihan koran dan majalah yang dibayar	12	bulan	2,640,000.00	12.00	2,100,000.00	100.00	79.55	-	-
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya ATK	12	bulan	39,580,200.00	12.00	37,433,000.00	100.00	94.58	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayar	12	bulan	332,646,000.00	12.00	309,506,266.00	100.00	93.04	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	72.93	-	-
Predikat kinerja									ST	S	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	956,726,560.00	-	933,820,087.00	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah PHL yang terbayar : 1 orang (SMA)	12	OB	28,220,000.00	12.00	28,144,000.00	100.00	99.73	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Listrik, Telepon, Air dan Internet yang dibayar	12	bulan	108,204,000.00	12.00	85,576,396.00	100.00	79.09	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			- Pelaksanaan pengelolaan website	-	-	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (3 jenis)	12	bulan	820,302,560.00	12.00	820,099,691.00	100.00	99.98		-
			- Jumlah PHL yang terbayar : 5 orang (SMA)	60	OB	-	60.00	-	100.00	-		
			- Jumlah PHL yang terbayar sebanyak 22 org	264	OB	-	264.00	-	100.00	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	92.93		-
Predikat kinerja									ST	ST		-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	161,255,000.00	-	144,232,500.00	-	-		-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan	12	Bulan	143,620,000.00	12.00	130,982,000.00	100.00	91.20		-
			- Jumlah PHI yang terbayar 2 orang (SMA)	24	OB	-	24.00	-	100.00	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	3	gedung	7,500,000.00	3.00	3,250,500.00	100.00	43.34		-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	2	jenis	10,135,000.00	2.00	10,000,000.00	100.00	98.67		-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	77.74		-
Predikat kinerja									ST	T		-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						4,814,034,806.00	-	4,525,920,458.00	-	-		-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	73.61		-
Predikat kinerja Program									ST	S		-
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	menurunya temuan atas audit BPK atas LKD Pemda	6	temuan	119,997,270,503.90	-	110,465,765,227.98	-	-		-
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya penyusunan Rencana Anggaran Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai peraturan perundang-undangan	100	%	1,120,503,708.50	-	1,029,248,750.00	-	-		-
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	KUA/PPAS APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	1	dokumen	142,029,800.00	1.00	136,019,400.00	100.00	95.77		-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KUA / PPAS APBD Perubahan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	1	dokumen	145,129,820.00	1.00	138,978,500.00	100.00	95.76	-	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang tersusun	30	DPA	40,449,750.00	30.00	37,839,000.00	100.00	93.55	-	
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang tersusun	30	DPA	41,239,830.00	30.00	39,313,250.00	100.00	95.33	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	1	perda	291,729,965.00	1.00	259,297,050.00	100.00	88.88	-	
		-	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang APBD Kab. Bangka Barat Tahun 2022	1	perbup	-	1.00	-	100.00	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Bangka Barat Tahun 2021	1	perda	295,456,559.00	1.00	273,501,750.00	100.00	92.57	-	
		-	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Bangka Barat Tahun 2021	1	perbup	-	1.00	-	100.00	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	umlah Laporan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	1	dokumen	40,380,289.50	1.00	38,437,500.00	100.00	95.19	-	
		-	Jumlah Peraturan dan Kebijakan Pelaksanaan APBD yan tersusun	2	perbup dan SK Bupati	-	2.00	-	100.00	-	-	
		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Belanja Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	124,087,695.00	1.00	105,862,300.00	100.00	85.31	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	92.79	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	%	457,664,940.00	-	401,345,250.00	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Kas Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	43,238,600.00	1.00	42,120,000.00	100.00	97.41	-	
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Transfer Pusat Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	45,969,900.00	1.00	44,463,600.00	100.00	96.72	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Pengelolaan Gaji PNS/CPNS pada seluruh OPD Kabupaten Bangka Barat	12	bulan	181,915,680.00	12.00	152,946,400.00	100.00	84.08	-	
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Pengelolaan Keuangan SKPKD Kabupaten Bangka Barat	12	bulan	186,540,760.00	12.00	161,815,250.00	100.00	86.75	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	91.24	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	%	405,160,933.00	-	293,978,600.00	-	-	-	
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	1	perbup	53,334,945.00	1.00	32,564,900.00	100.00	61.06	-	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Akhir Tahun Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020	1	laporan	74,704,698.00	1.00	39,437,500.00	100.00	52.79	-	
		-	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	1	laporan	-	1.00	-	100.00	-	-	
		-	Jumlah Laporan semester Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	1	laporan	-	1.00	-	100.00	-	-	
		-	Jumlah Pendampingan Implementasi Program Aplikasi Belanja dan Pelaporan	1	aplikasi	-	1.00	-	100.00	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab.Bangka Barat Tahun 2020	1	perda	78,782,790.00	1.00	59,760,400.00	100.00	75.85		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Penyelesaian Kasus Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1	Laporan	102,048,500.00	1.00	96,555,000.00	100.00	94.62		
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah kebijakan dan panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	1	Dokumen	30,000,000.00	1.00	24,598,700.00	100.00	82.00		
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun	1	Dokumen	66,290,000.00	1.00	41,062,100.00	100.00	61.94		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	71.38		
Predikat kinerja									ST	S		
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan	100	%	118,013,940,922.40	-	108,741,192,627.98	-	-		
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa	60	desa	114,106,092,100.00	60.00	106,048,290,000.00	100.00	92.94		
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Alokasi Untuk Belanja Tidak terduga	100	%	355,115,400.00	-	-	-	-		
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa	60	desa	3,552,733,422.40	60.00	2,692,902,627.98	100.00	75.80		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									66.67	56.25		
Predikat kinerja									S	R		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						119,997,270,503.90	-	110,465,765,227.98	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									91.67	77.91		
Predikat kinerja Program									ST	T		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Menurunnya Temuan atas audit BPK terkait aset/BMD Pemda	3	temuan	1,063,626,054.00	-	738,435,350.00	-	-		
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100	%	1,063,626,054.00	-	738,435,350.00	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah laporan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Harga Satuan Standar Kabupaten Bangka Barat	41	buku	54,865,000.00	41.00	47,995,000.00	100.00	87.48	-	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan RKBMD dan RKPBM Kabupaten Bangka Barat	2	dokumen	47,329,870.00	2.00	37,749,870.00	100.00	79.76	-	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan penatausahaan aset daerah Kabupaten Bangka Barat	100	buku	183,553,700.00	100.00	108,618,900.00	100.00	59.18	-	
		-	Jumlah Pendampingan Implementasi Program Aplikasi BMD	1	aplikasi	-	1.00	-	100.00	-	-	
		-	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	perbup	-	1.00	-	100.00	-	-	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen Laporan Pemantauan dan Investigasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	406,581,300.00	1.00	298,804,400.00	100.00	73.49	-	
		-	Jumlah Pengadaan tanda identitas dan plang pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	5	jenis	-	5.00	-	100.00	-	-	
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	3	dokumen	130,440,580.00	3.00	116,100,980.00	100.00	89.01	-	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	235,588,444.00	1.00	123,899,040.00	100.00	52.59	-	
		-	Jumlah Dokumen Pemusnahan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	-	1.00	-	100.00	-	-	
		-	Jumlah Laporan Hasil penelitian usulan penghapusan barang milik daerah (SK Penghapusan BMD) Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	-	1.00	-	100.00	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			Jumlah Laporan penilaian dan laporan penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	2	laporan	-	2.00	-	100.00	-		
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Barang Milik Daerah Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	5,267,160.00	1.00	5,267,160.00	100.00	100.00		
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Bimbingan teknis BMD Kabupaten Bangka Barat	63	peserta	-	-	-	-	target tidak diisi		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	77.36	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,063,626,054.00	-	738,435,350.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	77.36	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						125,874,931,363.90	-	115,730,121,035.98	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									97.22	91.94	-	
PREDIKAT KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									ST	ST	-	
KEUANGAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	7,356,342,686.00	-	6,403,879,776.00	-	-	BP2RD	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksanannya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah	100	%	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Tersusunnya Laporan Renstra, Renja, dan RKA SKPD	3	Jenis	2,000,000.00	3.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tersusunnya Laporan DALEV Dokumen Perencanaan SKPD	3	Jenis	4,000,000.00	3.00	4,000,000.00	100.00	100.00	-	
			Tersusunnya Laporan Ikhtisar Capaian Realisasi Kinerja SKPD	1	Dokumen	-	1.00	-	100.00	target tidak diisi		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja PD (LAKIP, TAPKIN, LKPJ, dan LPPD)	4	Dokumen	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Terlaksanannya pengelolaan administrasi keuangan perangkatdaerah	100	%	5,034,885,000.00	-	4,212,356,739.00	-	-	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Terlaksanannya pembayaran gaji dantunjangan ASN	14	Bulan	5,028,885,000.00	14.00	4,206,356,739.00	100.00	83.64	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan BulananSemesteran yang Tersusun	2	Dokumen	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Pronosis Realisasi/Anggaran yang Tersusun	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.91	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksanannya pengadaan pakaian olah raga	25	Stel	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksanannya Pengadaan Pakaian Olahraga	25	Stel	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional umum perangkat daerah	100	%	612,604,277.00	-	545,968,965.00	-	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	10,000,000.00	12.00	8,394,000.00	100.00	83.94	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	5,320,000.00	12.00	4,415,000.00	100.00	82.99	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor	12	Bulan	45,948,000.00	12.00	45,606,000.00	100.00	99.26	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	41,524,000.00	12.00	26,271,750.00	100.00	63.27	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	Bulan	4,320,000.00	12.00	2,160,000.00	100.00	50.00	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	148,698,177.00	12.00	147,632,177.00	100.00	99.28	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	356,794,100.00	12.00	311,490,038.00	100.00	87.30	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	80.86	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	1,461,837,818.00	-	1,409,069,831.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksanannya Pembayaran Honorarium PHL dan Jasa Surat Menyurat	36	OB	221,910,000.00	36.00	219,608,000.00	100.00	98.96	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanannya Pembayaran Telepon, Internet, Listrik dan Domain Web Site serta ISP Pelayanan PBB dan BPHTB	12	OB	378,081,818.00	12.00	327,658,831.00	100.00	86.66	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksanannya Pembayaran Honorarium PHL	336	OB	861,846,000.00	336.00	861,803,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.21	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				Predikat kinerja		ST	ST	-	-			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	239,015,591.00	-	228,484,241.00	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Honorarium PHL	24	Bulan	197,743,136.00	24.00	193,922,786.00	100.00	98.07	-	-
		-	Pembayaran STNK Kendaraan Dinas	25	Unit	-	-	-	-	-	-	-
		-	Terlaksana Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	13	Unit	-	13.00	-	100.00	target tidak diisi	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kenyaman dan Kondisi Fisik Gedung Kantor Terpelihara	1	Gedung	7,500,000.00	1.00	7,500,000.00	100.00	100.00	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksana Pemeliharaan Perlembagaan Gedung Kantor	15	Unit	5,000,000.00	15.00	4,950,000.00	100.00	99.00	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	24	Unit	28,772,455.00	19.00	22,111,455.00	79.17	76.85	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									79.86	93.48	-	-
				Predikat kinerja		T	ST	-	-	-	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						7,356,342,686.00	-	6,403,879,776.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									95.97	93.09	-	-
				Predikat kinerja Program		ST	ST	-	-	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			persentase peningkatan PAD	14	%	1,305,234,825.00	-	1,088,901,725.00	-	-	-	-
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			Persentase peningkatan PAD	14	%	1,305,234,825.00	-	1,088,901,725.00	-	-	-	-
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Data Objek PBB P2	360	OP	190,719,500.00	335.00	185,169,500.00	93.06	97.09	-	-
		-	Data Subjek dan Objek Pajak PBB P2	1,000	OP	-	1,590.00	-	159.00	target tidak diisi	-	-
		-	Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan	9,982	Ketetapan	-	7,355.00	-	73.68	target tidak diisi	-	-
		-	Penatausahaan Pengelolaan Pendataan, Penilaian, dan Penetapan yang tertib, rapi dan efektif	10,914	Berkas	-	9,280.00	-	85.03	target tidak diisi	-	-
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Adanya Penerbitan SPPT PBB P2 Kab. Babar	47,500	SPPT	128,869,000.00	53,108.00	123,419,000.00	111.81	95.77	-	-
		-	Aplikasi SISMIOP dapat berjalan dengan baik	1	Aplikasi	-	1.00	-	100.00	target tidak diisi	-	-
		-	Terlaksananya Pendampingan Sistem BPHTB	1	Aplikasi	-	1.00	-	100.00	target tidak diisi	-	-
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	23,728	Berkas	385,645,400.00	13,295.00	234,360,900.00	56.03	60.77	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	7,500	WP	261,874,425.00	6,522.00	224,635,425.00	86.96	85.78		
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Validasi, Pendataan, Pengukuhan Subjek Pajak Daerah	865	WP	83,662,000.00	888.00	81,737,000.00	102.66	97.70		
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Pajak Daerah	4	Kali	63,513,500.00	4.00	54,064,500.00	100.00	85.12		
		-	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi RKUD dan BPHTBT	4	Kali	-	4.00	-	100.00	target tidak diisi		
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Pajak terhadap Keberatan WP dan Realisasi Objek Pajak	929	WP	190,951,000.00	1,350.00	185,515,400.00	145.32	97.15		
		-	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	76,000	WP	-	101,277.00	-	133.26	target tidak diisi		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									103.16	87.04	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,305,234,825.00	-	1,088,901,725.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									103.16	87.04	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH						8,661,577,511.00	-	7,492,781,501.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH									99.56	90.07	-	
PREDIKAT KINERJA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN KEUANGAN						134,536,508,874.90	-	123,222,902,536.98	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN KEUANGAN									98.39	91.00	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN KEUANGAN									ST	ST	-	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah	100	%	-	-	-	-	-	BP4D	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Cakupan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan potensi daerah	100.00	%	283,380,890.00	-	178,779,330.00	-	-		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Meningkatkan rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di Bidang Sosial dan Kependudukan	100	%	64,161,830.00	-	51,665,330.00	-	-		
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang pendidikan yang dilakukan	1	dokumen	64,161,830.00	1.00	51,665,330.00	100.00	80.52		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	80.52	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatkan rekomendasi dan strategi dalam perencanaan dan Pengambilan Kebijakan di Bid. Ekonomi dan Pembangunan	100	%	155,719,700.00	-	127,114,000.00	-	-		
		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Tersedianya data-data pengembangan lokasi dan budidaya sektor unggulan Sumber daya alam di Kabupaten Bangka Barat	100	%	155,719,700.00	100.00	127,114,000.00	100.00	81.63		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	81.63	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya kualitas dan memaksimalkan hasil kajian/penelitian serta menciptakan sistem informasi Inovasi Teknologi	100	%	63,499,360.00	-	-	-	-		
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Tersedianya data-data dan informasi terkait pengembangan dan teknologi di Kabupaten Bangka Barat	1	dokumen	63,499,360.00	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						283,380,890.00	-	178,779,330.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	81.08	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						283,380,890.00	-	178,779,330.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (%)									100.00	81.08	-	
PREDIKAT KINERJA URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									ST	T	-	
		KEPEGAWAIAN		-	-	-	-	-	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	4,782,403,353.00	-	4,370,702,704.00	-	-	BKPSDMD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Laporan Kinerja Perangkat Daerah	73	%	8,000,000.00	-	7,800,000.00	-	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	3	dokumen	2,000,000.00	3.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	4	dokumen	4,000,000.00	4.00	3,900,000.00	100.00	97.50	-	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Tersusun	4	dokumen	2,000,000.00	4.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.50	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pemeriksaan Keuangan yang Ditanggapi	100	%	2,844,780,000.00	-	2,682,062,512.00	-	-	BKPSDMD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	2,838,780,000.00	14.00	2,676,162,512.00	100.00	94.27	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Tersusun	2	dokumen	2,000,000.00	2.00	1,950,000.00	100.00	97.50	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.32	-	
Predikat kinerja									ST	ST	BKPSDMD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin Pegawai	100	%	25,000,000.00	-	-	-	-	-	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Absensi	170	unit	25,000,000.00	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	15	stel	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	626,399,850.00	-	498,009,185.00	-	-	BKPSDMD	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen-komponen Listrik	12	bulan	70,000,000.00	12.00	11,649,000.00	100.00	16.64	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Alat-alat Rumah Tangga	8	jenis	10,640,000.00	8.00	8,683,000.00	100.00	81.61	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	12	bulan	42,500,000.00	12.00	40,294,700.00	100.00	94.81	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	bulan	39,525,000.00	12.00	30,231,800.00	100.00	76.49	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan surat kabar dan Majalah	12	bulan	4,997,850.00	12.00	3,240,000.00	100.00	64.83	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	42,500,000.00	12.00	42,495,500.00	100.00	99.99	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	12	bulan	416,237,000.00	12.00	361,415,185.00	100.00	86.83	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	74.46	-	
Predikat kinerja									ST	S	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	%	1,113,232,004.00	-	1,023,587,707.00	-	-	BKPSDMD	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pegawai Harian Lepas	12	bulan	291,200,000.00	12.00	281,521,500.00	100.00	96.68	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Telepon, Air dan Listrik	12	bulan	344,211,534.00	12.00	299,037,743.00	100.00	86.88	-	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	12	bulan	133,960,470.00	12.00	105,892,964.00	100.00	79.05	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor dan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan	12	bulan	343,860,000.00	12.00	337,135,500.00	100.00	98.04	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	90.16	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	bulan	149,991,499.00	-	144,243,300.00	-	-	BKPSDMD	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional dan Tersedianya Jasa PHL dan Pembayaran Pajak Kendaraan	12	bulan	142,498,900.00	12.00	136,767,300.00	100.00	95.98	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	2	gedung	7,492,599.00	2.00	7,476,000.00	100.00	99.78	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.88	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						4,782,403,353.00	-	4,370,702,704.00	-	-	BKPSDMD	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	91.46	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi	100	%	930,023,700.00	-	771,458,207.00	-	-	BKPSDMD	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	20	%	231,830,500.00	-	211,163,844.00	-	-	BKPSDMD	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen penyusunan formasi pegawai	1	dokumen	5,500,000.00	1.00	5,297,400.00	100.00	96.32	-	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Pelamar Test Penerimaan CPNS dan Jumlah Pelamar Test Penerimaan P3K	300	orang	-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Pensiun PNS	65	orang	15,547,500.00	91.00	15,247,500.00	140.00	98.07	-	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terselenggaranya Kegiatan KORPRI	12	bulan	10,000,000.00	12.00	9,999,000.00	100.00	99.99	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Fasilitasi SAPK BKN	1	tahun	28,575,000.00	1.00	22,900,896.00	100.00	80.14	-	
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Fasilitasi Pengurusan Karis, Karsu, KPE, Cuti dll	300	orang	172,208,000.00	300.00	157,719,048.00	100.00	91.59	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									90.00	93.22	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pengisian JPT, Administrator dan Pengawas secara Terbuka dan Kompetitif	70	%	328,495,000.00	-	277,827,824.00	-	-	BKPSDMD	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pelantikan CPNS menjadi PNS dan Jumlah Promosi Mutasi	5	kali	133,565,000.00	5.00	94,434,400.00	100.00	70.70	-	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Proses Kenaikan Pangkat	2	periode	40,000,000.00	2.00	31,700,000.00	100.00	79.25	-	
		Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Seleksi Terbuka JPT	3	jabatan	154,930,000.00	3.00	151,693,424.00	100.00	97.91	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	82.62	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	20	%	150,000,000.00	-	83,497,500.00	-	-	-	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	PNS dilingkungan Pemkab. Bangka Barat	140	orang	145,000,000.00	140.00	78,497,500.00	100.00	54.14	-	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Aparatur yang Menerima Bantuan Beasiswa TUBEL	1	orang	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	77.07	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian Kinerja ASN yang Objektif dan Terukur	75	%	219,698,200.00	-	198,969,039.00	-	-	BKPSDMD	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pengembangan dan Pembinaan	32	OPD	58,327,200.00	32.00	53,599,139.00	100.00	91.89	-	
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pemberian Karya Satya Lencana	150	orang	21,511,000.00	150.00	18,597,400.00	100.00	86.46	-	
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah OPD/Unit Kerja yang di Monitoring	32	OPD	35,000,000.00	32.00	33,985,000.00	100.00	97.10	-	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin	4	kasus	43,479,000.00	4.00	37,421,300.00	100.00	86.07	-	
		Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	12	orang	61,381,000.00	12.00	55,366,200.00	100.00	90.20	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	90.34	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						930,023,700.00	-	771,458,207.00	-	-	BKPSDMD	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									97.50	85.81	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan		
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5			6		7		8	9		
Predikat kinerja Program											ST	T	-	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan sesuai kebutuhan	0	%	1,217,532,780.00	-	946,921,450.00	-	-		BKPSDMD		
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pegawai asn yang memenuhi kompetensi teknis	1	%	144,859,000.00	-	86,575,000.00	-	-				
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan Diklat ASN	1	dokumen	77,909,000.00	1.00	56,745,000.00	100.00	72.83				
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Aparatur yang Terfasilitasi biaya Diklat	21	orang	66,950,000.00	11.00	29,830,000.00	52.38	44.56				
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									76.19	58.70	-			
Predikat kinerja											T	R	-	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase pegawai asn yang memenuhi kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	13	%	1,072,673,780.00	-	860,346,450.00	-	-		BKPSDMD		
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Pemetaan Kebutuhan	1	dokumen	27,091,000.00	1.00	24,265,000.00	100.00	89.57				
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang Mengikuti Diklat Prajabatan/ Latsar, Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PIM, Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat Fungsional	304	orang	1,045,582,780.00	268.00	836,081,450.00	88.16	79.96				
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									94.08	84.77	-			
Predikat kinerja											ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						1,217,532,780.00	-	946,921,450.00	-	-		BKPSDMD		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									85.13	71.73	-			
Predikat kinerja Program											T	S	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI URUSAN KEPEGAWAIAN						6,929,959,833.00	-	6,089,082,361.00	-	-		-		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM URUSAN KEPEGAWAIAN (%)									94.21	83.00	-			
PREDIKAT KINERJA URUSAN KEPEGAWAIAN											ST	T	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	9	bulan	649,100.00	9.00	649,100.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pembayaran pengisian Tabung LPG dan alat rumah tangga	9	bulan	1,520,000.00	9.00	1,520,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pembayaran makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu	9	bulan	6,968,000.00	9.00	6,968,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	erlaksananya penyediaan Kertas NCR, Blangko Kwitansi, Blangko SSP dan Spanduk	9	bulan	9,266,550.00	9.00	9,266,550.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pembayaran 2 Surat Kabar lokal	9	bulan	1,540,000.00	9.00	1,540,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya pembayaran kebutuhan alat tulis kantor	9	bulan	12,962,700.00	9.00	12,962,700.00	100.00	100.00	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9	bulan	72,283,083.00	9.00	72,283,083.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	237,049,539.00	-	237,049,539.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pembayaran Honor PHL dan kebutuhan surat menyurat	45	OB	104,400,000.00	45.00	104,400,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya hubungan komunikasi berjalan lancar dan kelancaran operasional kantor	9	bulan	11,518,129.00	9.00	11,518,129.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran Honor PHL dan kebutuhan administrasi keuangan Peralatan kebersihan serta bahan pembersih	54	OB	121,131,410.00	54.00	121,131,410.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	erpuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	34,271,975.00	-	34,264,000.00	-	-		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya kelancaran pelaksanaan operasional kantor	9	bulan	34,271,975.00	9.00	34,264,000.00	100.00	99.98		
			Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas /operasional	2	mobil dan motor	-	-	-	-	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	-	bulan	-	-	-	target tidak diisi	target tidak diisi		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.98		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						961,132,661.00	-	961,124,686.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.99		
Predikat kinerja Program									ST	ST		
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan lintas agama dan lintas golongan	100	%	55,632,920.00	-	55,632,920.00	-	-		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	100	%	55,632,920.00	-	55,632,920.00	-	-		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersantuninya Keluarga Pejuang	26	orang	55,632,920.00	26.00	55,632,920.00	100.00	100.00		
			Terselenggaranya rangkaian kegiatan HUT RI	1	kegiatan	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						55,632,920.00	-	55,632,920.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00		
Predikat kinerja Program									ST	ST		
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	-	776,230,408.00	-	776,230,408.00	-	-		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	776,230,408.00	-	776,230,408.00	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya penyaluran hibah kepada partai politik	10	parpol	754,370,408.00	10.00	754,370,408.00	100.00	100.00	-	
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya berkas Parpol yang terverifikasi	1	parpol	12,900,000.00	1.00	12,900,000.00	100.00	100.00	-	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya laporan perkembangan politik daerah	2	laporan	8,960,000.00	2.00	8,960,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						776,230,408.00	-	776,230,408.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	11,250,000.00	-	11,250,000.00	-	-	-	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Ormas/LSM	100	%	11,250,000.00	-	11,250,000.00	-	-	-	
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	erlaksananya Verifikasi Pendaftaran, Pendataan dan Pemantauan Ormas/LSM Kab. Bangka Barat	100	%	11,250,000.00	100.00	11,250,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						11,250,000.00	-	11,250,000.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terselenggaranya seminar, talk show, diskusi, pentas, festival dan lomba peningkatan wawasan kebangsaan	100	%	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Toleransi Kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, nilai-nilai religius, sosial dan solidaritas serta Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa	100	%	-	-	-	-	-		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasinya kegiatan FKUB, FKDM dan FPK serta Terlaksananya penyaluran hibah kepada FKUB	-	bulan	-	-	-	target tidak diisi			
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									-	-	-	
Predikat kinerja Program									SR	SR	-	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelanggaran administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	-	%	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	-		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	%	2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	-		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi pejabat forum koordinasi pimpinan daerah	-	kali	-	-	-	target tidak diisi			
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya pendataan keberadaan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	1	orang asing	2,100,000.00	1.00	2,100,000.00	100.00	100.00		
		Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terselenggaranya kegiatan rencana aksi terpadu penanganan gangguan konflik sosial Kabupaten Bangka Barat	-	dokumen	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						2,100,000.00	-	2,100,000.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
-	#	#	#	#	#	-	-	-	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	%	35,959,067.00	-	35,959,067.00	-	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya terpenuhinya Kebutuhan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	4.00	bulan	113,800.00	4.00	113,800.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya pembayaran pengisian Tabung LPG dan alat rumah tangga	4.00	bulan	895,000.00	4.00	895,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya pembayaran makanan dan minuman untuk Rapat dan Tamu	4.00	bulan	2,543,600.00	4.00	2,543,600.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan Kertas NCR, Blangko Kwitansi, Blangko SSP dan Spanduk	4.00	bulan	3,091,050.00	4.00	3,091,050.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pembayaran 2 Surat Kabar lokal	4.00	bulan	1,100,000.00	4.00	1,100,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya pembayaran kebutuhan alat tulis kantor	4.00	bulan	2,207,700.00	4.00	2,207,700.00	100.00	100.00	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4.00	bulan	26,007,917.00	4.00	26,007,917.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	%	117,480,221.00	-	117,480,221.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pembayaran Honor PHL dan kebutuhan surat menyurat	20.00	OB	49,800,000.00	20.00	49,800,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya hubungan komunikasi berjalan lancar dan kelancaran operasional kantor	4.00	bulan	11,281,871.00	4.00	11,281,871.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pembayaran Honor PHL dan kebutuhan administrasi keuangan Peralatan kebersihan serta bahan pembersih	24.00	OB	56,398,350.00	24.00	56,398,350.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	erpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00	%	40,896,925.00	-	40,896,925.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya kelancaran pelaksanaan operasional kantor	4.00	bulan	37,072,025.00	4.00	37,072,025.00	100.00	100.00	-	
			Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas /operasional	2.00	mobil dan motor	-	-	-	-	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4.00	bulan	3,824,900.00	4.00	3,824,900.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									66.67	100.00	-	
Predikat kinerja									S	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						568,003,213.00	-	568,003,213.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									93.33	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan lintas agama dan lintas golongan	100.00	%	197,872,320.00	-	197,872,320.00	-	-	-	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	100.00	%	197,872,320.00	-	197,872,320.00	-	-	-	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersantuninya Keluarga Pejuang	26.00	orang	197,872,320.00	26.00	197,872,320.00	100.00	100.00	-	
			Terselenggaranya rangkaian kegiatan HUT RI	1.00	kegiatan	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						197,872,320.00	-	197,872,320.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	-	-	26,133,150.00	-	26,133,150.00	-	-	-	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	-	26,133,150.00	-	26,133,150.00	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya penyaluran hibah kepada partai politik	-	parpol	-	-	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya berkas Parpol yang terverifikasi	10.00	parpol	14,596,150.00	10.00	14,596,150.00	100.00	100.00	-	-
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya laporan perkembangan politik daerah	4.00	laporan	11,537,000.00	3.00	11,537,000.00	75.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									87.50	100.00	-	-
Predikat kinerja									T	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						26,133,150.00	-	26,133,150.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									87.50	100.00	-	-
Predikat kinerja Program									T	ST	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	-	12,693,400.00	-	12,693,400.00	-	-	-	-
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Ormas/LSM	100.00	%	12,693,400.00	-	12,693,400.00	-	-	-	-
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	erlaksananya Verifikasi Pendaftaran, Pendataan dan Pemantauan Ormas/LSM Kab. Bangka Barat	100.00	%	12,693,400.00	100.00	12,693,400.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						12,693,400.00	-	12,693,400.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Terselenggaranya seminar, talk show, diskusi, pentas, festival dan lomba peningkatan wawasan kebangsaan	100.00	%	81,701,200.00	-	81,701,200.00	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pembinaan Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Toleransi Kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, nilai-nilai religius, sosial dan solidaritas serta Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa	100.00	%	81,701,200.00	-	81,701,200.00	-	-	-	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasinya kegiatan FKUB, FKDM dan FPK serta Terlaksananya penyaluran hibah kepada FKUB	4.00	bulan	81,701,200.00	4.00	81,701,200.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						81,701,200.00	-	81,701,200.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase pelanggaran administrasi sesuai peraturan perundang-undangan	-	%	176,836,750.00	-	176,836,750.00	-	-	-	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100.00	%	176,836,750.00	-	176,836,750.00	-	-	-	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi pejabat forum koordinasi pimpinan daerah	4.00	kali	98,831,000.00	4.00	98,831,000.00	100.00	100.00	-	
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Terlaksananya pendataan keberadaan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing	200.00	orang asing	78,005,750.00	200.00	78,005,750.00	100.00	100.00	-	
		Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terselenggaranya kegiatan rencana aksi terpadu penanganan gangguan konflik sosial Kabupaten Bangka Barat	3.00	dokumen	-	3.00	-	100.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						176,836,750.00	-	176,836,750.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						1,063,240,033.00		1,063,240,033.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (%)									96.81	100.00		
PREDIKAT KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									ST	ST		
-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						2,869,586,022.00		2,869,578,047.00				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									98.40	100.00		
PREDIKAT KINERJA UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									ST	ST		
		UNSUR KEWILAYAHAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KECAMATAN MUNTOK		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100	%	7,526,251,930.00	-	6,950,379,526.00	-	-		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	8,000,000.00	-	7,750,000.00	-	-	Kec. Muntok	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	3	laporan	2,000,000.00	3.00	1,900,000.00	100.00	95.00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen tersusun	2	laporan	4,000,000.00	2.00	3,900,000.00	100.00	97.50		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	4	laporan	2,000,000.00	4.00	1,950,000.00	100.00	97.50		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	96.67		
Predikat kinerja									ST	ST		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3,963,350,000.00	-	3,718,768,986.00	-	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	3,957,350,000.00	12.00	3,712,938,986.00	100.00	93.82		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1	laporan	2,000,000.00	1.00	1,980,000.00	100.00	99.00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1	laporan	2,000,000.00	1.00	1,900,000.00	100.00	95.00		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen tersusun	1	laporan	2,000,000.00	1.00	1,950,000.00	100.00	97.50		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	96.33		
Predikat kinerja									ST	ST		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus hari-hari tertentu lainnya beserta atribut kelengkapannya	100	%	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	-	stel	-	-	-	target tidak diisi	target tidak diisi		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									#DIV/0!	#DIV/0!		
Predikat kinerja									#DIV/0!	#DIV/0!		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1,087,792,850.00	-	800,314,010.00	-	-		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	bulan	4,851,300.00	12.00	4,673,300.00	100.00	96.33		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya peralatan rumah tangga	12	bulan	2,000,000.00	12.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya administrasi tata usaha dan logistik Kantor Lurah Keranggan	1	kelurahan	999,999,000.00	1.00	720,928,010.00	100.00	72.09		
		-	Terpenuhinya administrasi tata usaha dan logistik Kantor Lurah Menjelang	1	kelurahan	-	1.00	-	100.00	-		
		-	Terpenuhinya administrasi tata usaha dan logistik Kantor Lurah Sungai Baru	1	kelurahan	-	1.00	-	100.00	-		
		-	Terpenuhinya administrasi tata usaha dan logistik Kantor Lurah Sungai Daeng	1	kelurahan	-	1.00	-	100.00	-		
		-	Terpenuhinya administrasi tata usaha dan logistik Kantor Lurah Tanjung	1	kelurahan	-	1.00	-	100.00	-		
		-	Tersedianya makanan dan minuman	12	bulan	-	12.00	-	100.00	-		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	12,742,350.00	12.00	12,619,200.00	100.00	99.03		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan	12	bulan	4,627,900.00	12.00	3,400,000.00	100.00	73.47		
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	25,498,300.00	12.00	24,264,000.00	100.00	95.16		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12	bulan	38,074,000.00	12.00	32,429,500.00	100.00	85.17		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	88.75	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,836,562,080.00	-	1,820,435,880.00	-	-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya honorarium PHL	487	ob	1,156,895,000.00	487.00	1,156,595,000.00	100.00	99.97		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	bulan	94,800,000.00	12.00	85,995,800.00	100.00	90.71		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honorarium PHL	237	ob	584,867,080.00	226.00	577,845,080.00	95.36	98.80		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									98.45	96.50	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	347,980,000.00	-	342,786,650.00	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4	unit	131,214,000.00	4.00	127,751,650.00	100.00	97.36	-	-
		-	Tersedianya honorarium PHL	24	ob	-	24.00	-	100.00	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	2	gedung	207,500,000.00	2.00	206,401,000.00	100.00	99.47	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1	tahun	4,766,000.00	1.00	4,409,000.00	100.00	92.51	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1	tahun	4,500,000.00	1.00	4,225,000.00	100.00	93.89	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.81	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						7,526,251,930.00	-	6,950,379,526.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									99.74	94.36	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	67,526,710.00	-	66,605,500.00	-	-	-	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	19,129,710.00	-	18,208,500.00	-	-	-	-
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang kecamatan	5	kelurahan dan desa	19,129,710.00	5.00	18,208,500.00	100.00	95.18	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	95.18	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	%	48,397,000.00	-	48,397,000.00	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Meningkatnya pengetahuan dan pemutakhiran data pelayanan dan penatausahaan administrasi, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	-	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terpenuhinya fasilitas pelayanan perizinan yang terpadu sesuai dengan ketentuan	5	perizinan	48,397,000.00	5.00	48,397,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						67,526,710.00	-	66,605,500.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	97.59	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Kualitas Pelayanan	100	%	3,793,929,630.00	-	3,178,751,430.00	-	-	-	-
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	%	38,177,500.00	-	22,280,000.00	-	-	-	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya BBGRM	-	kelurahan	-	-	-	-	-	-	-
		-	Terlaksananya lomba desa	-	desa	-	-	-	-	-	-	-
		-	Terlaksananya penguatan kelembagaan di Kecamatan	1	kegiatan	38,177,500.00	1.00	22,280,000.00	100.00	58.36	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	58.36	-	-
Predikat kinerja									ST	R	-	-
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	100	%	3,161,752,130.00	-	2,679,418,930.00	-	-	-	-
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya musrenbang kelurahan	5	kelurahan	48,672,130.00	5.00	39,585,330.00	100.00	81.33	-	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat Kantor Lurah Keranggan	-	%	-	-	-	-	-	-	-
		-	Terlaksananya pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat Kantor Lurah Menjelang	-	%	-	-	-	-	-	-	-
		-	Terlaksananya pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat Kantor Lurah Sungai Baru	-	%	-	-	-	-	-	-	-
		-	Terlaksananya pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat Kantor Lurah Sungai Daeng	-	%	-	-	-	-	-	-	-
		-	Terlaksananya pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan Kelurahan sesuai aspirasi masyarakat Kantor Lurah Tanjung	-	%	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung di Kelurahan Keranggan	100	%	3,113,080,000.00	100.00	2,639,833,600.00	100.00	84.80	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			- Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung di Kelurahan Menjelang	100	%	-	100.00	-	100.00	-		
			- Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung di Kelurahan Sungai Baru	100	%	-	100.00	-	100.00	-		
			- Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung di Kelurahan Sungai Daeng	100	%	-	100.00	-	100.00	-		
			- Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung di Kelurahan Tanjung	100	%	-	100.00	-	100.00	-		
			- Tersedianya honorarium RT, RW dan LPM	168	orang	-	168.00	-	100.00	-		
		Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya lomba Kelurahan	-	-	-	-	-				
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	83.06	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM)				122,000,000.00		-				
		Penanganan Covid- di Tingkat Desa dan Kelurahan				122,000,000.00	-	0	target tidak diisi	0.0		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	41.53		
Predikat kinerja									ST	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						3,793,929,630.00	-	3,178,751,430.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	73.91	-	
Predikat kinerja Program									ST	S	-	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				200,000,000.00		-				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				200,000,000.00		-				
		Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan				200,000,000.00	-	0	0.00	0.0		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									0.00	0.00		
Predikat kinerja									SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						200,000,000.00		-				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									0.00	0.00		
Predikat kinerja Program									SR	SR		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	100	%	31,756,000.00	-	21,268,000.00	-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sersuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	31,756,000.00	-	21,268,000.00	-	-		
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya kegiatan HUT RI	-	kelurahan dan desa	-	-	-	target tidak diisi	target tidak diisi		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya forum koordinasi pinpinan tingkat Kecamatan	1	kegiatan	31,756,000.00	1.00	21,268,000.00	100.00	66.97		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	66.97		
Predikat kinerja									ST	S		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						31,756,000.00	-	21,268,000.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	66.97		
Predikat kinerja Program									ST	S		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun APBDes tepat waktu	100	%	53,671,510.00	-	52,881,800.00	-	-		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	%	53,671,510.00	-	52,881,800.00	-	-		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya evaluasi RAPBDes	4	desa	13,785,100.00	4.00	13,033,000.00	100.00	94.54		
		-	Terlaksananya evaluasi RAPERDES	1	kegiatan	-	1.00	-	100.00	-		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan pembinaan desa	4	desa	20,851,610.00	4.00	20,844,000.00	100.00	99.96		
		-	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dan manajemen desa	1	kegiatan	-	1.00	-	100.00	-		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa	1	kegiatan	10,904,800.00	1.00	10,904,800.00	100.00	100.00		
		-	Tersusunnya LKPJ dan LPPD desa dengan baik dan benar	4	desa	-	4.00	-	100.00	-		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi pengendalian keamanan lingkungan	5	kelurahan dan desa	8,130,000.00	5.00	8,100,000.00	100.00	99.63		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.53		
Predikat kinerja									ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						53,671,510.00	-	52,881,800.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	98.53		
Predikat kinerja Program									ST	ST		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	3,000,000.00	12.00	3,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	12	bulan	29,984,800.00	12.00	29,984,800.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12	bulan	13,096,600.00	12.00	13,096,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	4,320,000.00	12.00	4,296,000.00	100.00	99.44	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	12	bulan	26,405,000.00	12.00	26,405,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	89,429,000.00	12.00	82,990,000.00	100.00	92.80	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.88	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	4	jenis	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	4	jenis	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	448,230,000.00	-	448,104,000.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Honorarium PHL	120	ob	312,850,000.00	120.00	312,724,000.00	100.00	99.96	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik	12	bulan	25,200,000.00	12.00	25,200,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium PHL	48	ob	110,180,000.00	48.00	110,180,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.99	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	137,644,000.00	-	137,349,500.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Honorarium PHL	12	ob	113,348,000.00	12.00	113,053,500.00	100.00	99.74	-	
		-	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	4	unit	-	4.00	-	100.00	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	4	unit	15,000,000.00	4.00	15,000,000.00	100.00	100.00	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		-	Terpeliharanya Rumah Dinas	2	unit	-	2.00	-	100.00	-		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	4	unit	5,000,000.00	4.00	5,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	2	unit	4,296,000.00	2.00	4,296,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.94	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						2,620,939,400.00	-	2,484,975,895.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.41	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keterlibatan unsur Masyarakat Dalam Membangun Desa	90	persen	25,866,900.00	-	25,866,900.00	-	-	-	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan tugas pelimpahan kewenangan Kepala Daerah yang dilakukan secara efektif	90	persen	21,145,900.00	-	21,145,900.00	-	-	-	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1	kali	17,445,900.00	1.00	17,445,900.00	100.00	100.00	-	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Data Profil dan Informasi Tentang Kecamatan	1	dokumen	3,700,000.00	1.00	3,700,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	persen	4,721,000.00	-	4,721,000.00	-	-	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12	bulan	4,721,000.00	12.00	4,721,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						25,866,900.00	-	25,866,900.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tersedianya wadah pengembangan perempuan di pedesaan	100	persen	32,703,200.00	-	32,703,200.00	-	-	-	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan kualitas pelayanan	100	persen	32,703,200.00	-	32,703,200.00	-	-	-	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan di Kecamatan	12	bulan	32,703,200.00	12.00	32,703,200.00	100.00	100.00	-	
		-	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan	-	kali	-	-	-	-	-	-	
		-	Terlaksananya Lomba Desa	-	kali	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
							Predikat kinerja		ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM				32,703,200.00			-	32,703,200.00	-	-	-	
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	100.00	-	
							Predikat kinerja Program		ST	ST	-	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				200,000,000.00		-				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				200,000,000.00		-				
		Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan		1		200,000,000.00	-	0	0.00	0.0		
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		0.00	0.00		
							Predikat kinerja		SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM				200,000,000.00				-				
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		0.00	0.00		
							Predikat kinerja Program		SR	SR		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh Kecamatan	100	persen	13,965,000.00	-	13,965,000.00	-	-		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya peringatan hari besar nasional	100	persen	13,965,000.00	-	13,965,000.00	-	-		
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peringatan dan Perayaan HUT RI di Kecamatan Simpang Teritip	-	kali	-	-	-				
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	4	kali	13,965,000.00	4.00	13,965,000.00	100.00	100.00		
							Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)		100.00	100.00	-	
							Predikat kinerja		ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM				13,965,000.00			-	13,965,000.00	-	-	-	
							Rata-rata capaian kinerja Program (%)		100.00	100.00	-	
							Predikat kinerja Program		ST	ST	-	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun APBDDesa tepat waktu	100	persen	63,733,700.00	-	63,733,700.00	-	-		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	-	63,733,700.00	-	63,733,700.00	-	-		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Evaluasi RAPERDES	1	kegiatan	26,954,700.00	1.00	26,954,700.00	100.00	100.00		
		-	Terlaksananya Evaluasi RAPBDES	2	kali	-	2.00	-	100.00	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa	12	bulan	21,168,000.00	12.00	21,168,000.00	100.00	100.00	-	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan baik dan benar	26	dokumen	7,386,000.00	26.00	7,386,000.00	100.00	100.00	-	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Keamanan Lingkungan	12	bulan	8,225,000.00	12.00	8,225,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						63,733,700.00	-	63,733,700.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KECAMATAN SIMPANGTERITIP						3,065,258,200.00	-	2,838,194,695.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM KECAMATAN SIMPANGTERITIP (%)									100.00	94.97	-	
PREDIKAT KINERJA KECAMATAN SIMPANGTERITIP									ST	ST	-	
KECAMATAN JEBUS												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	persen	2,792,625,100.00	-	2,358,808,398.00	-	-	KEC. JEBUS
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kebutuhan Penunjang Pemerintahan Daerah	100	persen	7,606,100.00	-	7,606,100.00	-	-		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen tersusun	2	dokumen	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	3,606,100.00	4.00	3,606,100.00	100.00	100.00	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen tersusun	4	dokumen	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	persen	1,928,870,000.00	-	1,513,527,895.00	-	-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	1,922,870,000.00	12.00	1,507,527,895.00	100.00	78.40	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah dokumen tersusun	2	dokumen	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah dokumen tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	94.60	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	persen	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25	stel	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	persen	184,999,000.00	-	184,263,000.00	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Kantor	12	bulan	30,000,000.00	12.00	30,000,000.00	100.00	100.00	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12	bulan	15,000,000.00	12.00	15,000,000.00	100.00	100.00	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	bulan	5,000,000.00	12.00	4,264,000.00	100.00	85.28	-	-
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	30,000,000.00	12.00	30,000,000.00	100.00	100.00	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12	bulan	104,999,000.00	12.00	104,999,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.06	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	persen	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	9	unit	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	5	unit	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	505,460,000.00	-	505,439,803.00	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Honorarium PHL	129	ob	315,960,000.00	129.00	315,960,000.00	100.00	100.00	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	27,500,000.00	12.00	27,479,803.00	100.00	99.93	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium PHL	60	ob	162,000,000.00	60.00	162,000,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.98	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	persen	165,690,000.00	-	147,971,600.00	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Honorarium PHL	12	ob	156,390,000.00	12.00	142,471,600.00	100.00	91.10	-	-
		-	Pembayaran Pajak STNK Kendaraan Dinas	15	unit	-	7.00	-	46.67	-	-	-
		-	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	7	unit	-	7.00	-	100.00	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	-	jenis	-	-	-	target tidak diisi	target tidak diisi	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	7	unit	4,900,000.00	5.00	2,800,000.00	71.43	57.14	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12	unit	4,400,000.00	6.00	2,700,000.00	50.00	61.36	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									73.62	69.87	-	-
Predikat kinerja									S	S	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						2,792,625,100.00	-	2,358,808,398.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									94.72	92.30	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Tugas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah yang dilakukan secara efektif	100	persen	201,801,800.00	-	199,721,600.00	-	-	-	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	persen	18,772,000.00	-	18,772,000.00	-	-	-	-
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1	kali	14,993,000.00	1.00	14,993,000.00	100.00	100.00	-	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Data Profil dan Informasi Tentang Kecamatan	1	dokumen	3,779,000.00	1.00	3,779,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12	bulan	171,829,800.00	-	171,779,800.00	-	-	-	-
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembayaran Honorarium PHL	72	ob	171,829,800.00	72.00	171,779,800.00	100.00	99.97	-	-
		-	Tersedianya Peralatan Kebersihan	12	bulan	-	12.00	-	100.00	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.97	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peringatan dan Perayaan HUT RI di Kecamatan Jebus	1	kali	-	-	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	12	bulan	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja									SR	SR	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									-	-	-	-
Predikat kinerja Program									SR	SR	-	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyusun APBDesa tepat waktu	100	persen	41,078,000.00	-	41,078,000.00	-	-	-	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	persen	41,078,000.00	-	41,078,000.00	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Evaluasi RAPERDES	1	kali	29,705,000.00	1.00	29,705,000.00	100.00	100.00	-	-
		-	Terlaksananya Evaluasi RAPERDES	2	kali	-	2.00	-	100.00	-	-	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pemerintah Desa	-	bulan	-	-	-	target tidak diisi	-	-	-
		-	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Manajemen Pemerintah Desa	-	kali	-	-	-	target tidak diisi	-	-	-
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	1	kali	4,615,000.00	1.00	4,615,000.00	100.00	100.00	-	-
		-	Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan baik dan benar	22	dokumen	-	22.00	-	100.00	-	-	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Keamanan Lingkungan	12	bulan	6,758,000.00	12.00	6,758,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						41,078,000.00	-	41,078,000.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	12	Bulan	4,992,000.00	12.00	4,992,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	Bulan	25,500,000.00	12.00	25,500,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	12	Bulan	109,855,000.00	12.00	109,315,000.00	100.00	99.51	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.86	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100	Persen	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	2	jenis	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1	Jenis	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	Persen	530,270,000.00	-	527,163,068.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Honorarium PHL	12	bulan	263,280,000.00	12.00	262,980,000.00	100.00	99.89	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	bulan	38,000,000.00	12.00	35,273,068.00	100.00	92.82	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium PHL	12	Bulan	228,990,000.00	12.00	228,910,000.00	100.00	99.97	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.56	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100	Persen	119,480,600.00	-	113,708,150.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Honorarium PHL dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas dan Perpanjangan STNK Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12	Bulan	102,050,000.00	12.00	96,405,500.00	100.00	94.47	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	2	gedung	7,498,400.00	2.00	7,498,400.00	100.00	100.00	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	2	unit	4,970,000.00	2.00	4,886,750.00	100.00	98.32	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	4	unit	4,962,200.00	4.00	4,917,500.00	100.00	99.10	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.97	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						2,612,600,345.00	-	2,501,974,981.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.20	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100	Persen	376,792,950.00	-	376,594,750.00	-	-	-	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100	Persen	13,048,750.00	-	13,048,750.00	-	-	-	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1	kali	9,838,750.00	1.00	9,838,750.00	100.00	100.00	-	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Data Profil dan Informasi tentang kecamatan	1	Dokumen	3,210,000.00	1.00	3,210,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	100	Persen	360,021,000.00	-	359,841,000.00	-	-	-	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembayaran Gaji PHL dan Tersedianya Cetak Karcis dan Alat Kebersihan	144	OB	360,021,000.00	144.00	359,841,000.00	100.00	99.95	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.95	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100	Persen	3,723,200.00	-	3,705,000.00	-	-	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tersedianya Jasa pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12	Bulan	3,723,200.00	12.00	3,705,000.00	100.00	99.51	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.51	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						376,792,950.00	-	376,594,750.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.82	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100	persen	31,715,800.00	-	31,551,900.00	-	-	-	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100	Persen	31,715,800.00	-	31,551,900.00	-	-	-	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan	1	kali	31,715,800.00	1.00	31,551,900.00	100.00	99.48	-	
		-	Terlaksananya Lomba Desa	-	kali	-	-	-	target tidak diisi	-	-	
		-	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan di Kecamatan	12	Bulan	-	12.00	-	100.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.48	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						31,715,800.00	-	31,551,900.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.48	-	
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	435,575,000.00		91,725,550.00				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	435,575,000.00		91,725,550.00				
		Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	-	1	-	435,575,000.00	1	91,725,550	100.00	21.1		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	21.06		
Predikat kinerja									ST	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						435,575,000.00		91,725,550.00				
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	21.06		
Predikat kinerja Program									ST	SR		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	100	Persen	26,867,000.00	-	26,250,000.00	-	-		-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	100	Persen	26,867,000.00	-	26,250,000.00	-	-		-
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peringkatan dan Perayaan HUT RI di Kecamatan	1	kali	2,417,000.00	1.00	1,800,000.00	100.00	74.47		-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	12	Bulan	24,450,000.00	12.00	24,450,000.00	100.00	100.00		-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	87.24		-
Predikat kinerja									ST	T		-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						26,867,000.00	-	26,250,000.00	-	-		-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	87.24		-
Predikat kinerja Program									ST	T		-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100	Persen	42,653,450.00	-	42,653,450.00	-	-		-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100	Persen	42,653,450.00	-	42,653,450.00	-	-		-
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Evaluasi RAPERDES	1	kali	15,301,500.00	1.00	15,301,500.00	100.00	100.00		-
			Terlaksananya Evaluasi RAPDes	2	kali	-	-	-	-	-		-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Desa	12	bulan	14,117,500.00	12.00	14,117,500.00	100.00	100.00		-
			Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa	-	kali	-	-	-	-	-		-
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan Baik dan Benar	20	dokumen	4,975,000.00	20.00	4,975,000.00	100.00	100.00		-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
			- Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	-	kali	-	-	-				
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Keamanan Lingkungan	12	bulan	8,259,450.00	12.00	8,259,450.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									80.00	100.00		
Predikat kinerja									T	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						42,653,450.00	-	42,653,450.00	-	-		
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									80.00	100.00		
Predikat kinerja Program									T	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KECAMATAN PARITITIGA						3,526,204,545.00	-	3,355,777,131.00	-	-		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM KECAMATAN PARITITIGA (%)									96.67	95.37		
PREDIKAT KINERJA KECAMATAN PARITITIGA									ST	ST		
KECAMATAN KELAPA												
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-	100	persen	4,545,872,840.00	-	4,355,620,061.00	-	-	KEC. KELAPA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100	persen	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	3	Dokumen	2,000,000.00	3.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen tersusun	4	Dokumen	4,000,000.00	4.00	4,000,000.00	100.00	100.00		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen tersusun	4	Dokumen	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00		
Predikat kinerja									ST	ST		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100	Persen	3,068,960,000.00	-	2,891,940,194.00	-	-	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	3,062,960,000.00	12.00	2,885,940,194.00	100.00	94.22		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen tersusun	1	Dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.56		
Predikat kinerja									ST	ST		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100	Persen	-	-	-	-		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	25	Stel	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						4,545,872,840.00	-	4,355,620,061.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.08	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100	Persen	26,405,200.00	-	23,945,200.00	-	-	-	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100	Persen	22,560,000.00	-	20,100,000.00	-	-	-	-
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musrenbang kecamatan	1	Kali	22,560,000.00	1.00	20,100,000.00	100.00	89.10	-	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya data profil dan informasi tentang kecamatan	-	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	89.10	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	100	Persen	3,845,200.00	-	3,845,200.00	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Tersedianya jasa pelayanan perizinan administrasi terpadu kecamatan	12	Bulan	3,845,200.00	12.00	3,845,200.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						26,405,200.00	-	23,945,200.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	94.55	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100	Persen	602,650,400.00	-	602,570,750.00	-	-	-	-
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	100	Persen	45,290,400.00	-	45,255,400.00	-	-	-	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan	-	kali	45,290,400.00	-	45,255,400.00	target tidak diisi	99.92	-	-
		-	Terlaksananya Lomba Desa	-	Kali	-	-	-	-	-	-	-
		-	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan di Kecamatan	12	Bulan	-	12.00	-	100.00	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.92	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	100	persen	435,360,000.00	-	435,360,000.00	-	-	-	-
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Peningkatan kualitas RT/RW dan LPM	83	Orang	435,360,000.00	83.00	435,360,000.00	100.00	100.00	-	-
		-	Terlaksananya pembangunan SDM Kelurahan serta adanya keterlibatan lembaga dan masyarakat secara langsung	100	Persen	-	100.00	-	100.00	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan	
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5			6		7		8	9	
		Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya lomba kelurahan	-	Kelurahan	-	-	-					
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	100.00	100.00	-	
									Predikat kinerja	ST	ST	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM)				122,000,000.00		-					
		Penanganan Covid- di Tingkat Desa dan Kelurahan				122,000,000.00		-	0	target tidak diisi	0.0		
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	100.00	99.98		
									Predikat kinerja	ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						602,650,400.00	-	602,570,750.00	-	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)	SR	SR		
									Predikat kinerja Program	ST	ST		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				436,223,600.00		324,393,400.00					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				436,223,600.00		324,393,400.00					
		Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan		1	kegiatan	436,223,600.00	1	324,393,400	100.00	74.4			
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	100.00	74.36		
									Predikat kinerja	ST	S		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						436,223,600.00		324,393,400.00					
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)	100.00	74.36		
									Predikat kinerja Program	ST	S		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		-	100	Persen	18,597,800.00	-	18,583,500.00	-	-		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	100	Persen	18,597,800.00	-	18,583,500.00	-	-		
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Lancarnya perayaan dan Peringatan HUT RI	1	Kali	5,578,400.00	1.00	5,578,400.00	100.00	100.00			
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi pimpinan tingkat kecamatan	12	Bulan	13,019,400.00	12.00	13,005,100.00	100.00	99.89			
									Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)	100.00	99.95	-	
									Predikat kinerja	ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						18,597,800.00	-	18,583,500.00	-	-	-		
									Rata-rata capaian kinerja Program (%)	100.00	99.95	-	
									Predikat kinerja Program	ST	ST	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	100	Persen	65,501,000.00	-	65,501,000.00	-	-	-	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	100	Persen	65,501,000.00	-	65,501,000.00	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Evaluasi RAPB-Desa	2	Kali	30,799,000.00	2.00	30,799,000.00	100.00	100.00	-	-
		-	Terlaksananya kegiatan Evaluasi RAPERDES	26	Perdes	-	26.00	-	100.00	-	-	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam manajemen pemerintahan desa	-	Kali	27,018,000.00	-	27,018,000.00	target tidak diisi	100.00	-	-
		-	Terlaksananya pembinaan desa	12	Bulan	-	12.00	-	100.00	-	-	-
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan	-	Kali	7,684,000.00	-	7,684,000.00	target tidak diisi	100.00	-	-
		-	Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan baik dan benar	26	Dokumen	-	26.00	-	100.00	-	-	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Pengendalian keamanan lingkungan	-	Bulan	-	-	-	target tidak diisi	target tidak diisi	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						65,501,000.00	-	65,501,000.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	100.00	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KECAMATAN KELAPA						5,695,250,840.00	-	5,390,613,911.00	-	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM KECAMATAN KELAPA (%)									100.00	94.65	-	-
PREDIKAT KINERJA KECAMATAN KELAPA									ST	ST	-	-
		KECAMATAN TEMPILANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	2,652,282,560.00	-	2,497,047,004.00	-	-	KEC. TEMPILANG	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	7,003,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen tersusun	4	dokumen	2,000,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen tersusun	4	dokumen	3,003,000.00	4.00	2,000,000.00	100.00	66.60	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen tersusun	3	dokumen	2,000,000.00	3.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	88.87	-	-
Predikat kinerja									ST	T	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	1,932,760,000.00	-	1,813,588,204.00	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				5			6		7			
1	2	3	4	K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp	8	9
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	1,926,760,000.00	12.00	1,807,588,204.00	100.00	93.81	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen tersusun	2	dokumen	2,000,000.00	2.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen tersusun	1	dokumen	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00	100.00	100.00	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	98.45	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25	stel	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	177,232,360.00	-	175,474,500.00	-	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	2,552,400.00	12.00	2,552,400.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	2,500,000.00	12.00	2,500,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Tamu	12	bulan	29,999,300.00	12.00	29,977,100.00	100.00	99.93	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan kantor	12	bulan	12,749,745.00	12.00	12,116,000.00	100.00	95.03	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	3,606,000.00	12.00	2,520,000.00	100.00	69.88	-	
		Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12	bulan	25,499,915.00	12.00	25,499,000.00	100.00	100.00	-	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12	bulan	100,325,000.00	12.00	100,310,000.00	100.00	99.99	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	94.97	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	3	jenis	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									-	-	-	
Predikat kinerja									SR	SR	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	411,562,600.00	-	392,709,000.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembayaran Honorarium PHL	72	OB	184,820,000.00	72.00	184,620,000.00	100.00	99.89	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	bulan	21,000,000.00	12.00	2,741,000.00	100.00	13.05	-	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya administrasi keuangan dan pembayaran honorarium PHL	84	OB	205,742,600.00	84.00	205,348,000.00	100.00	99.81	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	70.92	-	
Predikat kinerja									ST	S	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	123,724,600.00	-	109,275,300.00	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran Honorarium PHL	12	OB	98,800,600.00	12.00	93,627,300.00	100.00	94.76	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan Rumah Dinas	4	gedung	14,998,500.00	3.00	9,246,000.00	75.00	61.65	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	4	unit	4,989,800.00	2.00	1,482,000.00	50.00	29.70	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	4	unit	4,935,700.00	4.00	4,920,000.00	100.00	99.68	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									81.25	71.45	-	
Predikat kinerja									T	S	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						2,652,282,560.00	-	2,497,047,004.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									96.25	84.93	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	24,287,900.00	-	19,936,900.00	-	-	-	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	19,986,900.00	-	19,936,900.00	-	-	-	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1	kali	16,287,300.00	1.00	16,287,300.00	100.00	100.00	-	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersusunnya Data Profil dan Informasi tentang Kecamatan	1	dokumen	3,699,600.00	1.00	3,649,600.00	100.00	98.65	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.32	-	
Predikat kinerja									ST	ST	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-	-	4,301,000.00	-	-	-	-	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan	12	bulan	4,301,000.00	12.00	-	100.00	-	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	-	-	
Predikat kinerja									ST	SR	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						24,287,900.00	-	19,936,900.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	49.66	-	
Predikat kinerja Program									ST	SR	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	37,958,650.00	-	36,858,200.00	-	-	-	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	37,958,650.00	-	36,858,200.00	-	-	-	-
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya penguatan kelembagaan di kecamatan, Pelaksanaan BBGRM di Kecamatan Tempilang, Terlaksananya Lomba Desa	12	bulan	37,958,650.00	12.00	36,858,200.00	100.00	97.10	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	97.10	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						37,958,650.00	-	36,858,200.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	97.10	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	390,550,000.00	-	267,894,400.00	-	-	-	-
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	390,550,000.00	-	267,894,400.00	-	-	-	-
		Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di Wilayah kecamatan	-	9.00	bulan	390,550,000.00	9.00	267,894,400.00	100.00	68.59	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	68.59	-	-
Predikat kinerja									ST	S	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						390,550,000.00	-	267,894,400.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	68.59	-	-
Predikat kinerja Program									ST	S	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	55,169,046.00	-	54,779,146.00	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	55,169,046.00	-	54,779,146.00	-	-	-	-
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Peringatan dan perayaan HUT RI di Kecamatan Tempilang	1	kali	32,476,846.00	1.00	32,214,546.00	100.00	99.19	-	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya koordinasi forum pimpinan tingkat Kecamatan	12	bulan	22,692,200.00	12.00	22,564,600.00	100.00	99.44	-	-
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	99.32	-	-
Predikat kinerja									ST	ST	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						55,169,046.00	-	54,779,146.00	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	99.32	-	-
Predikat kinerja Program									ST	ST	-	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-	-	58,504,100.00	-	49,049,500.00	-	-	-	-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		PD Penanggung jawab	Keterangan
				K	Satuan K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5			6		7		8	9
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	58,504,100.00	-	49,049,500.00	-	-	-	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya valuasi RAPBDes dan Tersedia serta tersusunnya Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	bulan	18,415,600.00	12.00	16,971,500.00	100.00	92.16	-	
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan pembinaan pemerintahan desa	12	bulan	18,235,600.00	12.00	15,311,000.00	100.00	83.96	-	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunnya LKPJ dan LPPD Desa dengan baik dan benar	18	dokumen	10,840,400.00	18.00	5,794,500.00	100.00	53.45	-	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya forum koordinasi pengendalian keamanan lingkungan	12	bulan	11,012,500.00	12.00	10,972,500.00	100.00	99.64	-	
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)									100.00	82.30	-	
Predikat kinerja									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM						58,504,100.00	-	49,049,500.00	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Program (%)									100.00	82.30	-	
Predikat kinerja Program									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KECAMATAN TEMPILANG						3,218,752,256.00	-	2,925,565,150.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM KECAMATAN TEMPILANG (%)									99.38	80.32	-	
PREDIKAT KINERJA KECAMATAN TEMPILANG									ST	T	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI UNSUR KEWILAYAHAN						31,142,598,601.00	-	28,392,300,637.00	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM UNSUR KEWILAYAHAN %									99.16	91.39	-	
PREDIKAT KINERJA UNSUR KEWILAYAHAN									ST	ST	-	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						267,533,046,092.90	-	235,810,943,849.99	-	-	-	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN %									96.12	83.99	-	
PREDIKAT KINERJA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									ST	T	-	
JTOTAL ANGGARAN & REALISASI SELURUH PROGRAM URUSAN WAJIB +PILIHAN+PENUNJANG						947,021,149,144.24	-	814,298,456,353.03	-	-	-	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM URUSAN WAJIB +PILIHAN+PENUNJANG (%)									95.08	85.45	-	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PROGRAM URUSAN WAJIB +PILIHAN+PENUNJANG									ST	T	-	



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyempurnaan proses desentralisasi, menghendaki pemisahan wewenang dan kekuasaan terdistribusi hingga ke lapisan bawah di masyarakat. Perwujudan atas desentralisasi tersebut ialah dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah mendapat hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemunculan otonomi daerah ini mengakibatkan banyak terjadi perubahan-perubahan di daerah berupa perubahan positif maupun negatif. Apalagi di era globalisasi ini, pemerintah daerah tentu akan semakin banyak menghadapi masalah dan kendala. Tantangan global di masa depan menjadi isu hangat di Indonesia. Sejauh mana peran dan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai masalah yang akan timbul nantinya. Pemerintah daerah harus dapat mandiri serta terbuka dalam membangun dan mengelola dengan baik wilayahnya agar tidak tertinggal daerah lain. Namun, pemerintah daerah harus tetap bijak agar tidak kehilangan jati diri dan kearifan lokal setempat di tengah derasnya arus globalisasi.

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat, hal tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu bangsa. Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil ataupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran sertanya dalam aktifitas ekonomi di daerah. Hal tersebut akan tergambarkan melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat dimana dengan semakin tinggi peredaran suatu produk maka dapat menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Secara garis besar perekonomian regional memiliki kaitan sangat erat serta berpengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perubahan iklim ekonomi dan stabilitas politik serta stabilitas keamanan yang terjadi di negara tertentu akan berdampak pada ekonomi khususnya di negara sekitar serta kawasan regional. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan nasional atau negara lainnya.



Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, maka secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai *output* akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang merupakan gambaran kinerja makro dari pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan 2021

a. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2020

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, pelaksanaan perdagangan antar negara (ekspor dan impor) dan lainnya.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi dunia dengan munculnya pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Kebijakan pencegahan yang diambil guna mengurangi penyebaran Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah sangat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Kebijakan *Lockdown* di beberapa negara juga sangat mempengaruhi kebijakan ekspor produk dari Indonesia yang juga sangat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 yang berkontraksi sebesar -2,07 persen, dengan pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2020 sebesar -2,19 persen (year on year). Realisasi tersebut sangat mendekati proyeksi Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2020 berada di angka -2,0 persen, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021. Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 56,94 juta dari sebelumnya Rp 59,06 juta di 2019 atau turun dari USD 4.174 per kapita menjadi USD 3.912 per kapita. Status Indonesia dari Upper Middle Income yang tercermin dari Gross National Income (GNI) per capita sebesar USD 4.047,6 di 2019, diperkirakan akan turun menjadi Lower Middle Income dengan GNI per capita sebesar USD 3.806,4 di 2020.



Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen di 2021, dibutuhkan total investasi dalam perekonomian sekitar Rp5.817,3—Rp5.912,1 triliun. Sementara itu, realisasi investasi di 2020 hanya sebesar Rp 4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi. Dengan demikian, pada 2021, dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp 919,52—1.014,32 triliun dari 2020 agar ekonomi dapat tumbuh di kisaran 4,5—5,5 persen.

Deselerasi pertumbuhan ekonomi dipastikan terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020, dampak dari merebaknya pandemi Covid-19. Sektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pertambangan, pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan dipastikan terkena dampak langsung akibat pandemi Covid-19 ini. Penurunan kinerja sektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memberikan berdampak pada penurunan kinerja sektor perdagangan akibat penurunan pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata juga merupakan sektor ekonomi unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terkena dampak cukup besarnya melalui kebijakan penutupan tempat wisata dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan diwajibkannya masyarakat untuk melakukan *social distancing*. Penurunan ekspor beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti logam timah, karet, serta lada juga turut memperburuk kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2020 dengan adanya krisis pandemi Covid-19 ini terkontraksi sebesar -2,30 persen.

Begitu pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, yang pertumbuhan ekonominya negatif (resesi) sebesar 5,37 persen. hal tersebut terjadi karena sektor utama penggerak ekonomi di Kabupaten Bangka Barat adalah sektor industri pengolahan yaitu logam timah serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan khususnya sub sektor perkebunan tahunan sebagai bahan baku pada sektor industri pengolahan yang memiliki dampak sangat besar oleh lingkungan eksternal akibat pandemi Covid-19 ini.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 hanya mampu mencapai 10,306 triliun rupiah, turun dibandingkan tahun 2019 yang mampu mencapai 10,897 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -5,37 persen, dimana capaian pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 ini merupakan yang terburuk semenjak Kabupaten Bangka Barat terbentuk. Hal ini menandakan masih tingginya ketergantungan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat terhadap Industri Pengolahan khususnya Logam Dasar.



b. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dengan munculnya pandemi Covid-19. Tema pembangunan yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN Tahun 2021 sebagai *survival and recovery kit* untuk memastikan penanganan pandemi lebih efektif. Kebijakan fiskal tahun 2021 akan diarahkan untuk melanjutkan program penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan program lain untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Pelaksanaan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan sinyal positif bagi investor sesuai dengan tujuannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi, mendorong kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan investasi.

Badan Pusat Statistik merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 3,69 persen. Perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak Triwulan II hingga Triwulan IV 2021, meskipun sedikit mengalami koreksi di Triwulan III karena kemunculan varian Delta Covid-19. Setelah terkendalinya varian Delta dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif di Triwulan IV-2021 sebesar 5,02% (yoy).

Apabila dilihat dari sisi produksi, lima sektor kontributor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makanan-minuman, yang sempat berkontraksi di Triwulan III-2021 telah berhasil *rebound* dengan pertumbuhan positif di Triwulan IV-2021. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan US\$4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp59,3 juta di 2019.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen kembali bertumbuh positif. Perdagangan internasional pun terus mencatatkan kinerja impresif, ditopang pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas. Pada Triwulan IV-2021, kinerja ekspor meningkat sebesar 29,83% (yoy), sementara impor tumbuh sebesar 29,60% (yoy).

Bangkitnya kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi barang ataupun jasa, telah mendorong pemulihan permintaan domestik serta menyebabkan peningkatan produksi sebagai respon dari dunia usaha. Sepanjang 2021, PMTB (investasi) yang tumbuh sebesar 3,80% (yoy) telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran.



Sedangkan industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, berhasil tumbuh sebesar 3,39% (yoy).

Pencapaian tersebut juga akan membawa Indonesia masuk kembali dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle-income country*). Posisi ini merupakan fondasi awal yang sangat baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar mampu keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*).

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB (ADHB) mencapai Rp85,94 triliun dan PDRB (ADHK) 2010 mencapai Rp55,36 triliun. Berdasarkan capaian tersebut, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 5,05 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 2,30 persen. Dengan capaian tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi tertinggi pertumbuhan ekonomi pada Pulau Sumatera.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,32 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, Penyediaan akomodasi dan makan minum serta pengadaan listrik dan gas. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri.

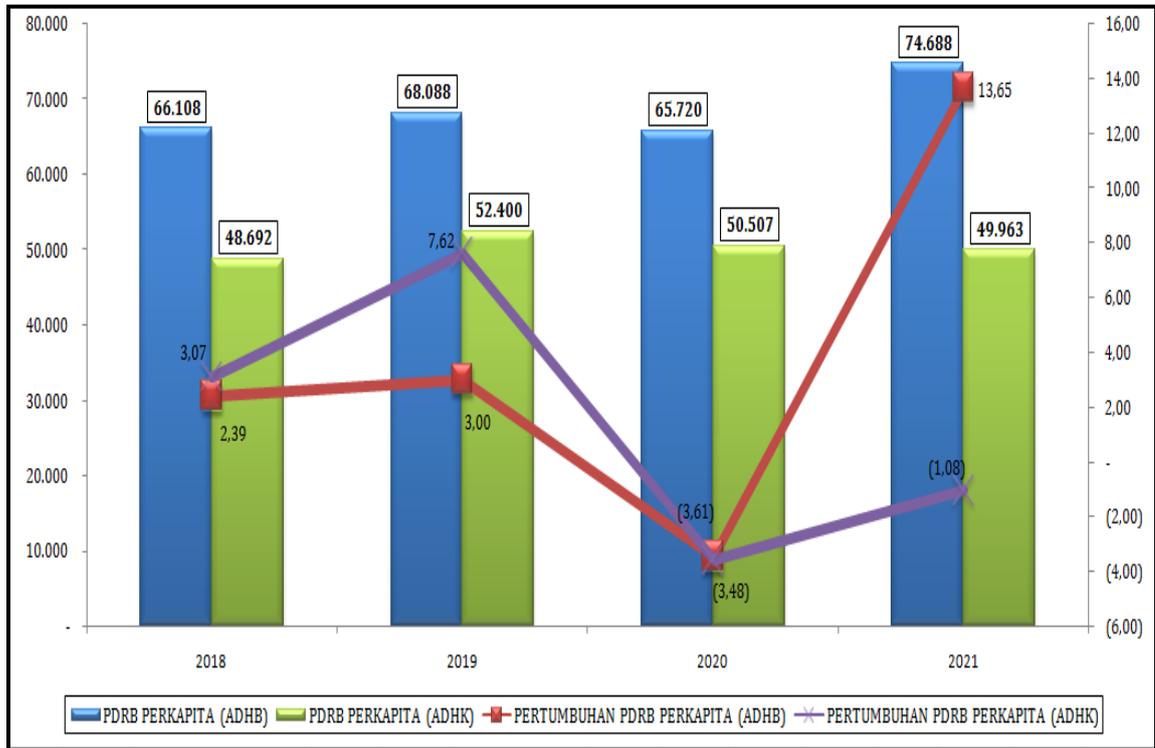
Perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB (ADHB) mencapai Rp15,44 triliun dan PDRB (ADHK) 2010 mencapai Rp10,33 triliun. Berdasarkan capaian tersebut, perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 0,21 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berkontraksi cukup dalam sebesar negatif 5,37 persen.

Melihat dari laju pertumbuhan, hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali satu lapangan usaha yang tumbuh negatif yaitu pada lapangan usaha industri pengolahan (-4,51). Hal tersebut yang menjadi faktor utama masih rendahnya pertumbuhan ekonomi ditahun 2021, mengingat masih tingginya distribusi pada lapangan usaha industri pengolahan dalam membentuk PDRB Kabupaten Bangka Barat yaitu di angka 45,13 persen.

c. PDRB perkapita

Untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran penduduk serta tingkat pembangunan di suatu wilayah, salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB perkapita. Dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang tumbuh sebesar 0,21 persen, capaian PDRB perkapita (ADHK) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 masih

tumbuh negatif sebesar 1,08 persen. Namun untuk capaian PDRB perkapita (ADHB) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 tumbuh positif sebesar 13,65 persen. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada gambar 3.1 dibawah.



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Barat, 2022 (diolah)

Gambar 3.1

Capaian PDRB Perkapita (dalam ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (%) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021

3.1.2. Kebijakan Ekonomi Nasional

Berkaca dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen akibat pandemi Covid-19, dan dengan berbagai kebijakan percepatan ekonomi membuat perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,69 persen.

Dengan telah pulihnya perekonomian nasional di tahun 2021, diharapkan berlanjut terus membaik pada Produk Domestik Bruto Indonesia di Tahun 2022 dan 2023. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, khususnya penanganan pandemi Covid-19 yaitu rencana pelaksanaan vaksinasi ke seluruh masyarakat secara bertahap yang diharapkan mampu mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi seperti sedia kala serta kondisi perekonomian dan keuangan global yang turut membaik walaupun saat ini kasus Covid-19 varian Omicron yang cukup banyak harus segera dilakukan kebijakan.



Pulihnya perekonomian Indonesia beriring dengan kenaikan ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga yang sampai saat ini masih menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Membaiknya konsumsi rumah tangga sejalan dengan stimulus belanja sosial yang digulirkan oleh pemerintah lewat program jaring pengaman sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen.

Namun perlu dicermati pula, mengingat adanya kebutuhan pengeluaran dan pada saat yang sama pemerintah harus melandaikan 'kurva utang', kebijakan stimulus fiskal perlu secara bertahap dikurangi seiring dengan perlunya peningkatan penerimaan. Jika tidak terdapat reformasi dalam kebijakan peningkatan penerimaan, pada akhirnya biaya utang akan berdampak pada belanja prioritas pembangunan.

Dilanjutkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 dengan tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2022 merupakan tahun kunci terkait pemulihan ekonomi Indonesia yang harus lebih cepat, khususnya dari investasi, ekspor, serta industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi COVID-19 akan mengalami akselerasi. Strategi penerapan Reformasi Struktural diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan gambaran kebutuhan investasi di tahun 2022 sebesar 5.891,4 - 5.931,8 Triliun Rupiah baik berasal dari Investasi Pemerintah, Investasi BUMD, serta Investasi Swasta.

Di tahun-tahun kedepan (tahun 2022 dan 2023), Pemerintah masih akan memfokuskan belanja yang berkaitan secara langsung dengan pemulihan ekonomi. Diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan di Tahun 2021 yang dapat melakukan recovery perekonomian yang terpuruk di Tahun 2020 sehingga pelaksanaan pembangunan di Tahun



2022 dan 2023 dapat terus tumbuh positif, dengan asumsi bahwa ekonomi akan dibuka kembali secara bertahap dan stabil serta konsumsi swasta diperkirakan pulih lebih cepat, diikuti oleh investor di sektor swasta. PDB riil diproyeksikan tumbuh 5,4 - 6,0 persen pada Tahun 2022 karena pertumbuhan investasi yang tinggi dan rendahnya basis PDB (*base effect*) di tahun-tahun sebelumnya.

3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Tahun 2022 dan 2023

Gambaran secara umum dalam melihat kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022 dan 2023 akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang melingkupinya. Dengan melihat perkembangan yang terjadi pada Tahun 2020 dan 2021 khususnya terkait permasalahan keterpurukan ekonomi dampak dari situasi pandemi Covid-19, menjadi suatu gambaran dalam menentukan dan menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah, khususnya dalam pemulihan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkaca pada data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa tahun terakhir yang trendnya mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi (4,47 persen di Tahun 2017, 4,46 persen di Tahun 2018, dan 3,32 persen di Tahun 2019), serta melihat kondisi perekonomian dalam pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2020 hanya mampu tumbuh sebesar negatif -2,30 persen. Melalui percepatan pemulihan ekonomi di Tahun 2021, membuktikan perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu tumbuh sebesar 5,05% di tahun 2021. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari komponen Ekspor Luar Negeri.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2021 bila dibandingkan triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,32 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Pendidikan yang tumbuh sebesar 29,34 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri. Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2021 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 2,75 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha kecuali lapangan usaha Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Dari sisi pengeluaran, kenaikan laju pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan pada seluruh komponen pengeluaran.



Dengan mempertimbangkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan, khususnya terkait strategi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu tumbuh di angka 3,22 persen di Tahun 2022 dengan angka kemiskinan diharapkan hanya sebesar 4,55 persen dan anggapengangguran diharapkan hanya sebesar 4,05 persen.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2022 memfokuskan memfokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat menuju sumber daya manusia yang unggul dan dilanjutkan di Tahun 2023 dengan kembali memfokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi pasca Covid-19 serta melakukan transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian dan perikanan dengan penguatan sumber daya manusia. Aspek ekonomi yang fokus dilaksanakan untuk percepatan pemulihan ekonomi adalah pembangunan agropolitan, pembangunan bahari, pembangunan pariwisata serta pembangunan ekonomi masyarakat.

Prioritas pembangunan peningkatan ekonomi masyarakat yang merupakan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan mampu untuk menurunkan tingkat kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tahun 2022 dan 2023

Kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka Barat pada masa pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh secara negatif dan signifikan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 mengalami kontraksi atau tumbuh negatif besaran 5,37 persen. Kontraksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 didapat dari kontraksinya lapangan usaha industri pengolahan yang selama ini menopang perekonomian Kabupaten Bangka Barat lebih dari 40 persen dan kontraksi pada jenis lapangan usaha lainnya yang berdampak secara langsung dengan pandemi Covid-19 ini.

Di tahun 2021 perekonomian di Kabupaten Bangka Barat mampu tumbuh walau hanya sebesar 0,21 persen. Faktor utama rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di Kabupaten Bangka Barat karena masih kontraksinya pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 4,52 persen, dimana lapangan usaha industri pengolahan merupakan sektor utama dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Bangka Barat, yaitu sebesar 45,13 persen.

Terkait dengan kebijakan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 dan 2021 serta perencanaan di Tahun 2022, khususnya terkait penanganan pemulihan



ekonomi, maka target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat diharapkan pada tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 4,91 persen dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar 11.369.885 juta rupiah serta proyeksi ekonomi di tahun 2023 tumbuh dengan sebesar 4,68 persen dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar 11.901.823 juta rupiah. Namun untuk target ekonomi ini, sangat tergantung dengan perkembangan ekonomi makro secara global dan juga kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19 ini, khusus terkait kebijakan ekspor produk logam timah yang menjadi penopang utama perekonomian di Kabupaten Bangka Barat.

Gambaran ekonomi Kabupaten Bangka Barat diatas sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu untuk Tahun 2022 dan Tahun 2023 mendatang, lingkungan eksternal dan internal akan tetap berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat. Pada lingkungan eksternal adalah keberpihakan ekonomi daerah terhadap kebijakan nasional, sedangkan pada lingkungan internal bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menjadi pemantik jalannya pembangunan baik melalui kebijakan tingkat daerah yang dikeluarkan serta melalui kelengkapan sarana prasarana pendukung perekonomian yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Besar harapan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, agar pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Tanjung Ular dapat berjalan dengan lancar dan memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bangka Barat secara khusus. Berikut digambarkan proyeksi nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel 3.1 Proyeksi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 - Tahun 2023

KATEGORI	URAIAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI	
		2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.395.393	1.421.402
B	Pertambangan dan Penggalian	1.081.984	1.096.576
C	Industri Pengolahan	5.590.532	5.913.384
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.096	6.404
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	766	790
F	Konstruksi	674.783	710.232
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.322.533	1.388.359
H	Transportasi dan Pergudangan	88.587	93.364



I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119.625	124.554
J	Informasi dan Komunikasi	54.522	57.770
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	42.967	44.726
L	Real Estate	226.223	234.991
M,N	Jasa Perusahaan	13.092	13.500
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450.581	475.508
P	Jasa Pendidikan	183.449	194.795
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	87.137	92.170
R,S,T,U	Jasa lainnya	31.621	33.299
PDRB KABUPATEN BANGKA BARAT		11.369.885	11.901.823

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Bangka Barat, 2022 (diolah)



Upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk periode Tahun 2023 diarahkan melalui kebijakan umum kerangka ekonomi daerah, diantaranya adalah:

- Mendorong perekonomian daerah dengan fokus mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta berupaya meningkatkan laju investasi daerah;
- Pengalokasian pengeluaran diprioritaskan kepada belanja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat khususnya terkait pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib yang bersifat dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta belanja infrastruktur untuk penunjang perekonomian secara berkelanjutan;
- Pengalokasian belanja terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bangka Barat merupakan prasyarat di dalam mewujudkan pembangunan masyarakat.

Melalui sinergisitas pembangunan, baik antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta dengan pihak swasta sebagai pelaku pembangunan diharapkan mampu memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bangka Barat dan umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yang merupakan tahun kedua agenda pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan antara lain pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi serta pendapatan daerah lainnya yang sah maupun kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.



APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat serta pendapatan transfer antar daerah; serta
- 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan PAD dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Komponen PAD yang menjadi sorotan utama dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui pajak daerah serta retribusi daerah.

Selanjutnya untuk pembiayaan daerah diperoleh dari total penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi SiLPA Tahun sebelumnya, pengembalian pinjaman daerah, serta penerimaan pinjaman daerah dikurangi dengan total pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari rencana penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah serta pembayaran cicilan pokok hutang.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi pendapatan Kabupaten Bangka Barat yang dituangkan dalam Rancangan RKPD pada Tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp817.050.500.500,00 (delapan ratus tujuh belas milyar lima puluh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dengan rincian :

- a. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp76.603.427.500,00 (tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Proyeksi Pendapatan Transfer sebesar Rp696.522.340.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah); serta
- c. Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp43.924.733.000,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Proyeksi pendapatan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2023 diasumsikan mengalami penurunan dibanding proyeksi pendapatan pada tahun 2022, dikarenakan dalam



penentuan proyeksi pendapatan di tahun 2023, belum memasukkan komponen sumber Dana bantuan keuangan dari pihak pemerintah provinsi. Pendapatan daerah secara umum masih bergantung pada pendapatan transfer terutama pada pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu sebesar 85,25 persen.



Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 s.d. Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	69.765.373.034,63	67.746.468.419,01	51.908.135.042,09	40.768.104.339,86	81.686.938.010,00	76.603.427.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	27.367.198.725,09	21.936.235.354,47	20.587.992.763,8	20.049.651.503,75	30.163.590.000,00	35.919.287.500,00
1.1.2	Retribusi Daerah	3.833.809.842,00	4.385.901.940,00	5.346.696.788,00	4.438.495.945,25	9.354.920.000,00	7.284.140.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.252.700.036,98	3.760.378.244,79	3.994.903.753,00	4.856.440.070,26	5.115.000.000,00	3.900.000.000,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.311.664.430,56	37.663.952.879,75	21.978.541.737,51	11.423.516.820,60	37.053.428.010,00	29.500.000.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	772.422.454.818,35	846.524.840.935,98	733.204.031.479,00	788.577.615.370,20	813.532.688.000,00	696.522.340.000,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	728.730.242.281,00	758.555.538.567,00	680.964.564.108,00	736.201.371.708,00	712.829.902.000,00	654.522.340.000,00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	655.801.168.744,00	702.774.160.567,00	599.326.297.108,00	645.046.447.708,00	629.483.593.000	588.022.340.000,00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84.801.981.768	110.783.510.577,00	64.239.176.268,00	98.719.155.107,00	79.000.000,000	91.000.000.000,00
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	445.168.706.000	466.440.075.000,00	425.158.892.000,00	419.681.643.719,00	441.000.000,000	450.000.000.000,00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	125.830.480.976	125.550.574.990,00	109.928.228.840,00	126.645.648.882,00	109.483.593.000	47.022.340.000,00
1.2.1.2	Dana Desa dan DID	72.929.073.537	55.781.378.000,00	81.638.267.000,00	91.154.924.000,00	93.346.309,000	66.500.000.000,00



1.2.2	Transfer Antar Daerah	43,692,212,537.35	87,969,302,368.98	52,239,467,371.37	52,376,243,662.20	100,702,786,000.00	42,000,000,000.00
1.2.2.1	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	33.788.811.537,35	52,419,427,528.98	36,879,667,371.37	36,282,186,145.66	50,702,786,000	42,000,000,000.00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya**)	9.903.401.000	35,549,874,840.00	15,359,800,000.00	16,094,057,516.54	50,000,000,000	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24,659,942,322.00	-	24,838,720,000.00	23,113,318,000.00	9,800,000,000.00	43,924,733,000.00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24,659,942,322.00	-	19,838,720,000.00	23,113,318,000.00	9,800,000,000.00	43,924,733,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	866,847,770,184.98	914,271,309,354.99	804, 950,886,521.46	852,459,037,710.06	905,109,626,010.00	817,050,500.500,00



Untuk hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan diperkirakan akan stabil, baik itu yang bersumber dari PT BPD Sumsel Babel maupun BPR Syariah Babel. Terkait dana BLUD diprediksi stabil, dimana pada Tahun 2023 diasumsikan seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat telah menggunakan fasilitas BPJS dalam pelayanan kesehatan karena kebijakan terkait urusan kesehatan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Namun perlu dicermati bahwa pendapatan yang ada pada lain-lain PAD yang sah seperti BLUD pihak Rumah Sakit Umum Daerah harus dialokasikan dan dituangkan dalam belanja dengan sumber pendanaan tersebut.

Untuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, masih dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang berkembang terkait dengan keuangan negara dan provinsi. Hal ini disebabkan besaran DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sangat tergantung dari pembagian pusat. Jumlah pendapatan ini merupakan perkiraan yang diharapkan tidak jauh bergeser dari proyeksi.

Daya serap belanja APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 diperkirakan mencapai 90 persen, begitu juga dengan pelampauan target pendapatan, diperkirakan tidak lebih dari 10 persen dari prediksi, sehingga asumsi inilah yang dipakai dalam penentuan SILPA Tahun 2022. Tabel realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 3.2 diatas.

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Ada beberapa kebijakan yang masih harus ditempuh pada Tahun 2023 berkaitan dengan perencanaan peningkatan pendapatan, yaitu :

1. Terus melakukan intensifikasi/ektensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi yang mempunyai potensi;
3. Penerapan tarif baru berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat terutama untuk pendapatan-pendapatan yang mempunyai potensi seperti Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan PBB;
4. Mengoptimalkan belanja daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan sumber sumber lainnya; serta
5. Mengoptimalkan penerimaan dari kekayaan daerah dan aset daerah.

Perhitungan target pendapatan daerah dengan asumsi tingkat elastisitas pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,65 artinya



setiap kenaikan PDRB 1 persen akan menaikkan pendapatan daerah dari pajak sebesar 1,65 persen. Untuk PAD lainnya diasumsikan tingkat elastisitasnya 1,33, dimana setiap kenaikan PDRB 1 persen akan menaikkan pendapatan daerah dan retribusi dan PAD lainnya sebesar 1,33 persen.

Target pendapatan daerah meliputi PAD, dana perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

A. PAD meliputi :

- Pajak, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2023 sebesar Rp35.919.287.500,00 (tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Retribusi, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2023 sebesar Rp7.284.140.000,00 (tujuh milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2023 sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
- Lain-lain PAD yang sah, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2023 sebesar Rp29.500.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

Rincian PAD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Target Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023

No.	JENIS PENERIMAAN	Target Tahun 2023 (Rp)
(1)	(2)	(3)
	HASIL PAJAK DAERAH	
1	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel	105.787.500,00
2	Pajak Restoran	2.961.000.000,00
3	Pajak Hiburan	70.000.000,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	500.000.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	18.000.000.000,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.250.000.000,00
7	Pajak Parkir	20.000.000,00
8	Pajak Air Tanah	262.500.000,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	800.000.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan P2	6.300.000.000,00



11	Pajak BPHTB	1.650.000.000,00
JUMLAH PAJAK DAERAH		35.919.287.500,00
HASIL RETRIBUSI DAERAH		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.200.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	120.000.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir Khusus	1.600.000.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	100.000.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000,00
8	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	225.000.000,00
9	Retribusi Tempat Pelelangan	100.000.000,00
10	Retribusi Terminal-Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bus	210.000.000,00
11	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	117.140.000,00
12	Retribusi Penjualan Hasil Perikanan BBI	25.000.000,00
13	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	250.000.000,00
14	Retribusi Izin Trayek	2.000.000,00
15	Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000,00
16	Retribusi Kios	10.000.000,00
17	Retribusi Pelayanan Tempat penginapan/Pesanggrahan/Vila	100.000.000,00
18	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	205.000.000,00
19	Retribusi Tera / Tera Ulang	30.000.000,00
20	Izin IMTA (Izin Menetap Tenaga Kerja Asing)	60.000.000,00
21	Pelayanan dan Penyedotan Kakus	125.000.000,00
22	Izin pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	500.000.000,00
JUMLAH RETRIBUSI DAERAH		6.998.444.326,00
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL :		
JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		3.900.000.000,00
LAIN-LAIN PAD YANG SAH :		
1	Jasa Giro (pada bank pemerintah/swasta)	1.500.000.000,00
2	Deposito	3.500.000.000,00
3	Pendapatan Denda	250.000.000,00
4	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.500.000.000,00
5	Penjualan Aset Daerah	250.000.000,00
6	BLUD	22.500.000.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH		29.500.000.000,00
JUMLAH PAD		76.603.427.500,00



B. Pendapatan Transfer meliputi :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi :
 - Dana Perimbangan sebesar Rp588.022.340.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan milyar tiga dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), antara lain :
 - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2023 sebesar Rp91.000.000.000,00 (sembilan puluh satu milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Bagi Hasil Pajak, dengan jumlah target pendapatan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dengan jumlah target pendapatan sebesar Rp66.000.000.000,00 (enam puluh enam milyar rupiah).
 - DAU Tahun 2023, ditargetkan sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh milyar rupiah);
 - DAK Tahun 2023, ditargetkan sementara sebesar Rp47.022.340.000 (empat puluh tujuh milyar dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) antara lain DAK non fisik urusan pendidikan sebesar Rp39.822.340.000,00 (tiga puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan DAK Fisik pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
 - Dana Desa sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
 - Dana Insentif Daerah sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).
- Pendapatan Transfer Antar Daerah, meliputi :
 - Pendapatan Transfer dari dana bagi hasil pajak provinsi ditargetkan sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua milyar rupiah) seiring pula dengan baiknya perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga akan meningkatkan bagi hasil pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :



- Pendapatan Dana BOS diasumsikan sebesar Rp32.924.733.000,00 (tiga puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); serta
- Pendapatan Kapitasi JKN untuk Puskesmas diasuksikan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah)

Total keseluruhan target pendapatan daerah Tahun 2023 adalah Rp817.050.500.500,00 (delapan ratus tujuh belas milyar lima puluh juta lima ratus ribu lima ratus rupiah).

Upaya – upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kinerja aparatur di bidang pendapatan;
- Pelaksanaan monitoring dan koordinasi kegiatan pendapatan secara berkelanjutan;
- Memberikan motivasi kepada aparatur dalam pencapaian target pendapatan daerah;
- Peningkatan sosialisasi kepada penerima wajib pajak;
- Efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.4. Target Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023

NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
	PENDAPATAN DAERAH	
1	Pendapatan Asli Daerah	76.603.427.500,00
1.1	Hasil Pajak Daerah	35.919.287.500,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.284.140.000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.900.000.000,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	29.500.000.000,00
2	Pendapatan Transfer	696.522.340.000,00
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	654.522.340.000,00
2.1.1	Dana perimbangan	588,022,340,000.00
2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	91.000.000.000,00
2.1.1.1.1	<i>Bagi Hasil Pajak</i>	<i>25.000.000.000,00</i>
2.1.1.1.2	<i>Bagi Hasil Bukan Pajak</i>	<i>66.000.000.000,00</i>
2.1.1.2	DAU	450.000.000.000,00
2.1.1.3	DAK	47.022.340.000,00



NO.	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
2.1.2	Dana Desa	60.000.000.000,00
2.1.3	Dana Insentif Daerah	6.500.000.000,00
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.000.000.000,00
2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.000.000.000,00
2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	43.924.733.000,00
3.1	Pendapatan Hibah	-
3.2	Dana Darurat	-
3.3	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	43.924.733.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	817.050.500.500,00

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja yang ditempuh pada tahun anggaran 2023 adalah mengimplementasikan tahun kedua dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2021-2026. Selain dengan mempedomani dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2021-2026 khususnya terkait pencapaian kinerja tujuan serta sasaran pembangunan, penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 juga memperhatikan:

- a. Kebijakan Umum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2023; serta
- b. Arah Presiden untuk pembangunan Periode 2020-2024 serta memperhatikan Prioritas Nasional serta Program Prioritas pada RPJMN.

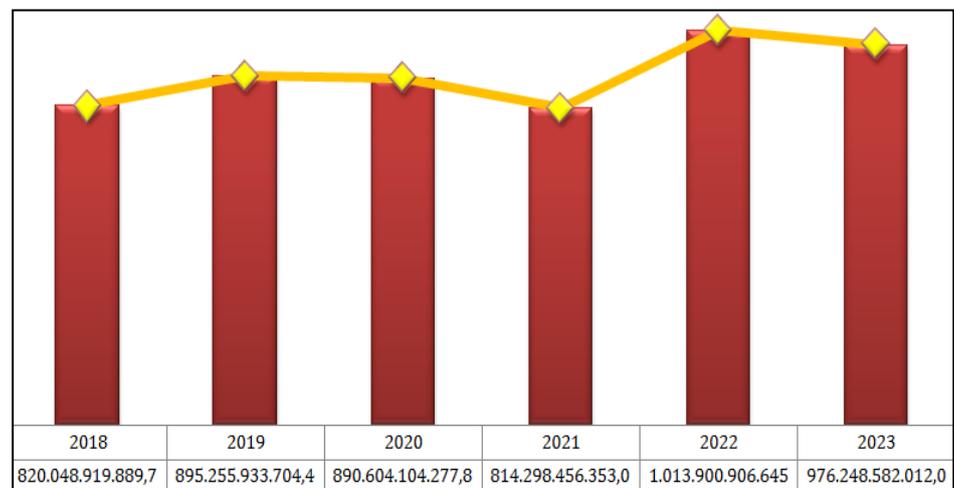
Uraian umum kebijakan belanja yang dituangkan dalam perencanaan Tahun 2023 adalah :

- a. Memperhatikan belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah pegawai serta kebijakan terkait tunjangan kinerja;
- b. Menyiapkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi Daerah) Kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;



- c. Menyiapkan pagu anggaran untuk kegiatan yang bersifat *multy years*;
- d. Memprioritaskan alokasi dana hibah, khususnya kepada lembaga lembaga yang secara langsung mampu memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan tema dan prioritas pembangunan, antara lain;
 - Memprioritaskan pada belanja pelaksanaan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat;
 - Memprioritaskan pada belanja pelaksanaan standar pelayanan minimal pada urusan wajib yang bersifat dasar;
 - Memprioritaskan pada belanja pelaksanaan pelayanan publik;
 - Memprioritaskan pada belanja pengembangan sumber daya manusia, termasuk didalamnya penguatan olahraga prestasi melalui pelaksanaan pekan olahraga propinsi tahun 2023; serta
 - Memprioritaskan pada belanja untuk perkembangan pembangunan secara berkelanjutan.

Berikut disajikan data realisasi belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 sampai dengan 2021 serta proyeksi belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 serta 2023.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2022.

Gambar 3.2
Data Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2023



Terkait rincian rencana belanja daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Rincian Rencana Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	RENCANA BELANJA
1	2	3
	BELANJA DAERAH	
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Rp567.314.297.885,00
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Rp116.134.593.380,00
3	Urusan Pilihan	Rp9.906.919.050,00
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp152.675.663.408,00
5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Rp79.936.678.689,00
6	Unsur Pengawasan	Rp6.655.257.000,00
7	Unsur Pemerintahan Umum	Rp8.220.661.000,00
8	Unsur Kewilayahan	Rp35.404.511.600,00
	JUMLAH BELANJA	Rp976.248.582.012,00

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah diuraikan sebagai berikut uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rincian Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 – 2024

NO.	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	BELANJA	890.604.104.278	814.298.456.353	1.013.900.906.645	976.248.582.012	862.433.053.196
1.1.	BELANJA OPERASI	641.549.554.562	600.932.964.601	732.433.951.076	760.457.391.537	654.833.959.917
1.1.1	Belanja Pegawai	305.343.462.521	325.979.956.595	355.244.510.469	373.100.000.000	373.100.000.000
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	299.824.149.424	259.605.494.167	349.398.371.235	331.047.482.887	246.279.154.412
1.1.3	Belanja Hibah	36.264.574.617	12.966.036.565	22.606.963.772	49.411.004.000	29.791.975.972
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	117.368.000	2.381.477.274	5.184.105.600	6.898.904.650	5.662.829.533



NO.	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.2	BELANJA MODAL	136.111.740.454	98.962.846.124	164.843.355.569	96.370.847.725	81.678.750.529
1.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.694.222	0	5.335.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.4	BELANJA TRANSFER	112.934.115.039	114.402.645.628	111.288.600.000	118.420.342.750	124.920.342.750
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.632.212.275	2.595.710.028	3.951.851.000	4.320.342.750	4.320.342.750
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	110.301.902.764	111.806.935.600	107.336.749.000	114.100.000.000	120.600.000.000

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu terkait penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada upaya penutupan defisit anggaran serta pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Terkait penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023 diprediksi sebesar Rp166.198.081.512,00 (seratus enam puluh enam milyar seratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah). Untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA Tahun 2021 diprediksi sebesar Rp166.98.081.512,00 (seratus enam puluh enam milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah)., serta pada pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah). Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

Secara keseluruhan rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.7 Rincian Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019 – 2023

NO.	URAIAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023
1	2	3	4	5	6	7
	PEMBIAYAAN DAERAH					
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	86.864.125.424	103.046.051.213	11.446.362.215	141.903.913.635	166.198.081.512
1.1.	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	86.520.133.359	102.879.501.075	11.323.202.562	99.803.913.635	166.098.081.512
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	42.000.000.000	-
1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	343.992.065	192.300.138	123.159.653	100.000.000	100.000.000
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000	3.000.000.000	-	7.000.000.000	7.000.000.000
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	-	7.000.000.000	7.000.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	NETTO PEMBIAYAAN DAERAH	83.864.125.424	100.046.051.213	11.446.362.215	134.903.913.635	159.198.081.512

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2022.



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat RKPD Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Keterkaitan antara visi serta misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
		2. Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah
3. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah		
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
2. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia	2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Menurunnya Angka Kemiskinan
	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Menurunnya Angka Pengangguran
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan		
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	4. Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat
		1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
		2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah



VISI : Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
MISI	TUJUAN	SASARAN
	2.Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	1.Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, visi Bupati Bangka Barat diwujudkan melalui 3 (tiga) misi, yang diharapkan dapat mencapai 5 (lima) tujuan dengan 13 sasaran pembangunan. Indikasi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan tersebut dapat dilihat dari pencapaian beberapa target indikator makro yang telah ditetapkan pada tahun perencanaan. Target indikator makro Kabupaten Bangka Barat yang disandingkan dengan target indikator makro Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2023 ditampilkan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat disandingkan dengan Target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2023

No.	INDIKATOR MAKRO	Target 2023		
		Bangka Barat	Provinsi	Nasional
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,68	5,27	5,3 -5,9
2	Pengeluaran Perkapita (Rp)	12.791.000	n.a.	n.a.
3	Indeks Pembangunan Manusia	69,86	71,91	73,29 – 73,35
4	Tingkat Kemiskinan (%)	2,63	4,30	7,0 – 8,0
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,75	4,47	5,3 – 6,0

4.1.2 Tema Pembangunan Daerah Tahun 2023

Perumusan tema pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan pentahapan arahan tema pembangunan tahunan. Pentahapan arahan tema pembangunan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan tema dalam setiap tahunnya selama periode RPJMD berkesinambungan dalam setiap tahun dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tema pembangunan Tahun 2023 yang telah dirumuskan dalam RPJMD 2021-2026 adalah **“Peningkatan pelayanan dasar, perekonomian berbasis keunggulan daerah, peningkatan olah raga prestasi yang didukung tata kelola pemerintahan yang efektif**



dan efisien". Tema tersebut disesuaikan dengan permasalahan dan perubahan kondisi/isu strategis yang berkembang ke dalam tema pembangunan tahunan dalam RKPD.

2. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Dinamika dan realita kondisi umum daerah merupakan salah satu faktor yang mendasari penentuan tema pembangunan daerah. Upaya untuk memasukan faktor dinamika dan realita kondisi umum daerah dilakukan melalui analisa terhadap evaluasi kinerja tahun lalu dengan mereview RPJMD dan RKPD sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga memperhatikan capaian pembangunan tahun berjalan (Tahun 2022).

3. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Perencanaan pembangunan Tahun 2023 di tingkat Nasional merupakan perencanaan periode ke empat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 masih mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024 khususnya pada 5 (lima) arah pembangunan serta prioritas pembangunan nasional, dikarenakan pada saat dokumen ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 belum tersedia.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Tema RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah **"Penguatan Perekonomian, SDM dan Tata Kelola Pemerintahan melalui pemanfaatan Sumberdaya dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan"**. Adapun Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 yaitu penguatan dan peningkatan perekonomian daerah, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, peningkatan partisipasi publik dan tatakelola pemerintahan, menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

Dengan melihat dari berbagai aspek tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yaitu **"Peningkatan pelayanan dasar, perekonomian berbasis keunggulan daerah, peningkatan olah raga prestasi yang didukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien"**.

Keselarasn tema pembangunan Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat disajikan pada Tabel 4.3.



Tabel 4.3.
Keselarasan Tema Pembangunan Nasional,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Nasional	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Barat
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Perekonomian, SDM dan Tata Kelola Pemerintahan melalui pemanfaatan Sumberdaya dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat yang bermartabat melalui peningkatan pelayanan dasar, perekonomian berbasis keunggulan daerah, peningkatan olah raga prestasi yang didukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

5. Analisis hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan capaian kinerja dalam RPJMD tahun 2021.

Evaluasi hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV disajikan dalam bentuk kinerja kegiatan/subkegiatan (output) dan keuangan. Adapun capaian kinerja kegiatan/subkegiatan maupun keuangan dengan kategori sangat tinggi yaitu :

- Total anggaran belanja langsung Tahun 2021 adalah Rp. 947.015.149.144,24 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp.814.298.456.353,03 atau 85,99 persen dengan kriteria tinggi;
- Total rata-rata capaian kinerja RKPD Tahun 2021 sebesar 95,06 persen dengan kriteria sangat tinggi;
- Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD Tahun 2021 sebesar 85,48 persen dengan kriteria tinggi;
- Dikarenakan tidak bisa membandingkan capaian Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD, maka untuk melihat capaian kinerja RPJMD digunakan evaluasi hasil RKPD sampai dengan Tahun 2020;
- Total rata-rata capaian kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020 sebesar 67,40 persen dengan kriteria Sedang;
- Total rata-rata capaian realisasi anggaran RPJMD Tahun 2020 sebesar 56,89 persen dengan kriteria Rendah;
- Pada laporan evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan Tahun 2020 masih terdapat program, kegiatan serta satuan target Renstra yang belum selaras dengan program, kegiatan serta satuan target Renja dan APBD Tahun 2020, sehingga capaian kinerja RKPD dan RPJMD belum dapat dihitung dengan tepat;



- Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV di tahun 2020, maka rata-rata capaian di tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV untuk rata-rata realisasi kinerja lebih tinggi, sementara untuk rata-rata realisasi anggaran lebih rendah. Capaian pada Triwulan IV di tahun 2021 untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 95,06 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 85,48 persen.

Capaian urusan pemerintahan tahun 2021, untuk urusan wajib rata-rata realisasi kinerja sebesar 91,14 persen dan keuangan sebesar 85,38 persen. Untuk Urusan Pilihan, rata-rata realisasi kinerja sebesar 97,92 persen dan keuangan sebesar 87,07 persen. Sementara untuk Fungsi Penunjang, rata-rata realisasi kinerja sebesar 96,12 persen dan keuangan sebesar 83,99 persen. Pada Tahun 2021, capaian kinerja tertinggi adalah pada fungsi pilihan dan capaian anggaran tertinggi pada urusan pilihan.

6. Permasalahan di tingkat daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat disimpulkan dengan melihat data dan hasil evaluasi pada setiap pelaksanaan perencanaan yang dilakukan dan permasalahan yang terkait gambaran umum kondisi daerah. Permasalahan pembangunan juga bisa dilihat dari perkembangan maupun tren pencapaian pembangunan daerah yang masih belum mencapai ideal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berdasarkan hasil inventarisir permasalahan untuk Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Urusan Penunjang dapat dilihat pada Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

7. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Berikut permasalahan pembangunan daerah secara umum yang dianggap memiliki nilai strategis jika dihubungkan dengan capaian sasaran pembangunan pada RPJMD di tahun 2023. Berdasarkan hasil pencapaian sasaran pembangunan RPJMD di Tahun 2021, permasalahan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian sesuai misi pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat, yaitu :

a. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Misi pertama RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 adalah “Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat” yang terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Jika dilihat dari capaian indikator kedua tujuan diatas untuk tujuan Meningkatkan



Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi masih memiliki capaian yang rendah yaitu 0,21 persen jika dibandingkan dengan perkiraan capaian yang tercantum dalam RPJMD yaitu 5,16 persen.

Dilihat dari pertumbuhannya, jika dibandingkan dengan tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi sebesar -5,37 persen dan pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Bangka Barat tumbuh sebesar 0,21 persen meskipun terlihat masih sangat rendah. Seluruh sektor lapangan usaha di Kabupaten Bangka Barat mengalami pertumbuhan yang positif kecuali sektor industri pengolahan. Hal ini yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat tidak meningkat terlalu signifikan, dimana sektor industri pengolahan yang biasanya menjadi salah satu penyumbang terbesar mengalami kontraksi sebesar 4,52 persen.

b. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 misi kedua pembangunan adalah “Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia” yang terdiri dari 1 (satu) tujuan yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Jika melihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2021 mengalami kenaikan, yang mana pada Tahun 2020 capaian Kabupaten Bangka Barat sebesar 69,08 persen sedangkan di Tahun 2021 sebesar 69,60 persen. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, capaian IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 berada di posisi dua terendah.

c. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 misi ketiga pembangunan adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik” yang terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dan “Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah”.

Salah satu permasalahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebesar 49,6 dengan kategori “C” atau predikat “Buruk”. Kategori ini diinterpretasikan bahwa penerapan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bangka Barat perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar.



Sebagai salah satu area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penataan SDM aparatur menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif merupakan sasaran yang berkaitan dengan manajemen sumber daya aparatur yang baik yang diukur melalui tingkat profesionalitas ASN. Melalui indikator ini akan diukur kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Berdasarkan hasil perhitungan, Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 hanya mencapai 60,16 poin.

Dari 4 (empat) dimensi yang digunakan dalam perhitungan indeks profesional ASN yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin, 2 (dua) dimensi masih belum baik hasilnya yaitu dimensi kualifikasi dan dimensi kompetensi.

Permasalahan terkait pencapaian Indeks Profesional ASN di Kabupaten Bangka Barat, khususnya pada dimensi kualifikasi dan kompetensi antara lain :

- a. Belum adanya pemetaan kebutuhan Pegawai dengan spesifikasi pendidikan lanjutan (S1, S2 dan dokter spesialis) yang dapat mendukung kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. Belum semua Jabatan Eselon/Fungsional yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya;
- c. Masih minimnya keikutsertaan Pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pengembangan kompetensinya, baik dalam cakupan keikutsertaan pegawai dalam mengikuti diklat teknis minimal 20 JP per tahun dan seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya guna peningkatan sumber daya ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu upaya lebih untuk dapat meningkatkan kualitas profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, khususnya pada dimensi kualifikasi ASN (Jenjang Pendidikan) dan kompetensi ASN yang nilainya masih sangat jauh dari bobot yang ada.

Permasalahan lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah nilai maturitas SPIP yang masih di level berkembang dan indeks SPBE masih dalam kategori cukup.

Maturitas SPIP menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya. Nilai maturitas SPIP Kabupaten Bangka Barat yang masih di level-2 atau berkembang, menunjukkan bahwa sebagian besar indikator penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Bangka Barat hanya pada tahap tersedianya kebijakan yang sudah dikomunikasikan dan dipahami. Namun kebijakan tersebut sebagian besar belum diimplementasikan dan belum



di evaluasi keefektifannya. Pengendalian yang belum optimal tersebut disebabkan karena masih belum pahamnya Perangkat Daerah terhadap penyelenggaraan SPIP.

Indeks SPBE merupakan suatu nilai yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di suatu daerah. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nilai Indeks SPBE dapat dijadikan acuan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mampu beradaptasi dengan kebutuhan yang sesuai dengan zaman.

Permasalahan terkait pelaksanaan SPBE di Kabupaten Bangka Barat yaitu belum menerapkan sertifikat elektronik sebagai dukungan penyelenggaraan SPBE, sehingga waktu pelayanan lebih lama, otoritas dokumen hasil pelayanan SPBE berkurang, terjadinya penyangkalan oleh penandatanganan dokumen, serta kerugian transaksi elektronik dalam pelayanan SPBE

Permasalahan berikutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana capaian di Tahun 2021 hanya sebesar 6,79% dengan target awal sebesar 8,96%. Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan PAD melalui pajak daerah serta retribusi daerah. Di Kabupaten Bangka Barat, pelaksanaan Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi belum dilakukan secara optimal. Ekstensifikasi dilakukan melalui peningkatan jumlah wajib pajak sedangkan intensifikasi dilakukan dengan target penerimaan pajak dari data wajib pajak yang sudah terdata.

8. Identifikasi permasalahan /isu strategis di tingkat provinsi dan nasional

Permasalahan dan isu strategis di tingkat provinsi dan nasional merupakan salah satu masukan (sebagai bahan analisa) dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023. Karena pada saat penyusunan Rancangan RKPD ini Ranwal RKP dan Ranwal RKPD Provinsi belum dikeluarkan, maka permasalahan dan isu strategis yang digunakan diambil dari RPJMN 2020-2024 dan paparan Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Tabel 4.4. Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Tingkat Provinsi dan Nasional

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	
TINGKAT NASIONAL	TINGKAT PROVINSI
<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, rendahnya akses permodalan serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam- Mismatch keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja (kualitas SDM rendah)- kualitas investasi rendah- Masih adanya kesenjangan antar wilayah- Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang- Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan daya saing daerah- Belum memadainya ketersediaan infrastruktur perkotaan termasuk transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK, akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, aksesperumahan dan permukiman- Depleksi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup- Tingginya resiko bencana- Rendahnya indeks profesionalitas ASN- Tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah- Masih rendahnya kinerja pelayanan publik- Masih terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal- Jumlah penduduk usia produktif semakin besar- Perubahan struktur umur penduduk yang cepat- Ketimpangan sumber perekonomian menyebabkan perpindahan penduduk yang tidak merata- Jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi- perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama kepesertaan pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) melambat- Jumlah peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran) cukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerja maupun pada kelompok PBPU- Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan	<ul style="list-style-type: none">- Laju pertumbuhan ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertambangan , transformasi ekonomi kesektor pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan yang masih lambat- Masih Rendahnya Kualitas Pembangunan Manusia di Prov. Kep. Bangka Belitung dari aspek Pendidikan dan Kesehatan- Masih belum optimal pembangunan demokrasi dari Aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi- Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Aspek pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, pemerintah yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas- Masih Lambatnya percepatan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat melalui percepatan penurunan angka kemiskinan, pengangguran serta percepatan pembangunan pada Kawasan Wilayah Pedesaan- Belum optimalnya pemerataan pembangunan antar wilayah pada bidang infrastruktur kePUan , Pehubungan, Pelayanan Dasar dan tata Kelola bencana- Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tata Kelola kehutanan- Transformasi ekonomi dari yang berbasis pertambangan (timah) menjadi berbasis renewable ecotourism (pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata) belum optimal- Perlunya Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia- Adanya Ancaman Degradasi Kualitas Lingkungan- Rata-rata pertumbuhan Kep Babel selama 2011-2020 berada dibawah nasional dan terendah dibandingkan daerah sebanding- PDRB per kapita Kep Babel dalam 10 tahun terakhir, posisinya mengalami penurunan.- Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Kep Babel didorong oleh jasa (utamanya



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	
TINGKAT NASIONAL	TINGKAT PROVINSI
<p>Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan masih belum harmonis</p> <ul style="list-style-type: none">- Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk.- Kematian ibu dan bayi masih tinggi- Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal.- Pola hidup yang tidak sehat- Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper.- Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi- Masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu, remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak.- Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan- Adanya kesenjangan mutu antar satuan pendidikan tinggi- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal- Laju penurunan kemiskinan cenderung melambat- Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia- Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti- Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama- Belum optimalnya peran keluarga- Rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas	<p>perdagangan), pertanian, dan industri</p> <ul style="list-style-type: none">- Dari sisi pengeluaran, ekonomi didorong oleh didorong permintaan domestik (konsumsi masyarakat dan investasi)

4.1.3 Perumusan Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dalam RPJMD, permasalahan pembangunan dalam RKPD Tahun 2023, arah



kebijakan RPJMD dan arah kebijakan dalam RKPD Tahun 2023. Perumusan isu strategis daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.5. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
A.	Peningkatan Kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> Masih rendahnya capaian RLS dan HLS Belum optimalnya kompetensi dan sertifikasi pendidik Ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal Masih belum optimalnya capaian Angka Harapan Hidup Keterbatasan data penduduk miskin Belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Belum optimalnya pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan Belum optimalnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dan jaminan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat miskin Rendahnya jumlah pelaksanaan kegiatan pendampingan psikososial korban bencana sosial Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Lebih Rendah dari Angka Provinsi dan Nasional Belum optimalnya kompetensi dan sertifikasi pendidik Menurunnya Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI Ke SMP/MTs Menurunnya APK/APM SD/MI Meningkatnya Angka Putus Sekolah SD/MI Meningkatnya angka kematian ibu yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil dan pada saat hamil Meningkatnya angka kematian bayi dengan penyebab utama berat badan lahir rendah Meningkatnya kasus balita gizi buruk dan masih tingginya prevalensi status gizi di Kabupaten Bangka Barat (tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung) Ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal Kurangnya tenaga kesehatan (dokter), tenaga kefarmasian, tenaga sanitasi dan tenaga gizi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Belum memadainya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan Penguatan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesalehan sosial masyarakat Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> Universal Health Coverage (UHC); Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan; Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak; Bangka Barat akan menjadi tuan rumah Porprov 2023; Dimulainya Tahapan Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada Serentak sejak Tahun 2023 Perubahan Struktur Organisasi dalam rangka penyederhaan birokrasi pemerintah; Penerapan SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar Peningkatan Sistem pengawasan internal Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
		<ul style="list-style-type: none">12. Keterbatasan lapangan kerja13. Minimnya kualitas tenaga kerja,14. Masih terjadinya kasus kekerasan perempuan dan anak,15. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender,16. Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak17. Rendahnya prestasi olahraga18. Masih kurangnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik19. Masih lambatnya peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat20. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan olah raga dan kepemudaan21. Banyaknya cagar budaya yang terbengkalai karena kurang optimalnya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di daerah22. Pelaksanaan kegiatan peningkatan minat baca masih belum optimal23. Belum meratanya pertumbuhan perpustakaan umum dan khusus24. Belum terpenuhinya layanan	<p>Bangka Barat</p> <ul style="list-style-type: none">12. Meningkatnya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak13. Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak14. Belum mencukupinya pemenuhan petugas PLKB/PKB di 6 (enam) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk melayani kebutuhan masyarakat.15. Rendahnya Prestasi Olahraga di Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan kurangnya pembinaan ke atlet, kurangnya perhatian kepada atlet berprestasi, serta minimnya SDM olahraga berlesensi;16. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan olahraga dan kepemudaan17. Belum optimalnya peningkatan ketertiban dan keamanan;18. Belum optimalnya pelaksanaan bidang pemadam kebakaran;;19. Belum optimalnya pelaksanaan urusan bidang kebencanaan;;20. Belum optimalnya pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bangka Barat21. Data Statistik Sektoral belum terkelola dan tervalidasi dengan baik;22. Turunnya jumlah pengunjung di		<ul style="list-style-type: none">11.Peningkatan kapasitas aparatur12.Penerapan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
		<p>digitalisasi perpustakaan</p> <p>25. Kurangnya sosialisasi terkait penyerahan naskah kuno</p> <p>26. Belum optimalnya pengelolaan arsip</p> <p>27. Regulasi terkait digitalisasi arsip karena kebijakan pemerintah pusat (ANRI) dan pemerintah provinsi yang terus berubah</p> <p>28. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik</p> <p>29. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial</p> <p>30. Belum optimalnya peningkatan ketertiban dan keamanan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi;</p> <p>31. Belum optimalnya pelaksanaan bidang pemadam kebakaran yang handal dan efektif</p> <p>32. Belum optimalnya pelaksanaan urusan bidang kebencanaan;</p> <p>33. Penerapan SAKIP sebagai implementasi dari manajemen kinerja sektor publik belum sepenuhnya mampu menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran jika dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan;</p>	<p>perpustakaan daerah;</p> <p>23. Turunnya jumlah perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat</p> <p>24. Koleksi Bahan Pustaka Digital serta Sarana Prasarana untuk Alih Media/Koleksi <i>E-Book</i> belum optimal;</p> <p>25. Turunnya jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.</p> <p>26. Masih rendahnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi;</p> <p>27. Turunnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);</p> <p>28. Tingkat maturasi SPIP masih pada kategori berkembang;</p> <p>29. Masih rendahnya Indeks Profesional ASN;</p> <p>30. Masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.</p>		



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
		<p>34. Perencanaan berbasis tematik holistik, integratif, dan spasial belum berjalan dengan baik;Belum maksimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;</p> <p>35. BUMD belum berkontribusi terhadap PAD;</p> <p>36. Penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum optimal;</p> <p>37. Indeks reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat belum cukup baik.</p>			
B.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	<p>1. Jaringan irigasi, jalan, dan penanganan banjir belum optimal</p> <p>2. keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi belum optimal</p> <p>3. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak masih rendah</p> <p>4. Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal</p> <p>5. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang dibangun di daerah irigasi</p> <p>6. Rendahnya konektivitas menuju kawasan strategis kabupaten dan wilayah pesisir</p> <p>7. Pengendalian bencana banjir di kawasan rawan banjir yang belum optimal.</p> <p>8. Belum adanya perencanaan dan regulasi pengelolaan sumberdaya</p>	<p>1. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang dibangun di daerah irigasi;</p> <p>2. RTRW kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;</p> <p>3. Belum ditetapkannya Dokumen RDTR yang merupakan dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Bangka Barat</p> <p>4. Belum terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;</p> <p>5. Belum terpenuhinya pelayanan pengolahan air limbah domestik;</p> <p>6. Belum terpenuhinya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>7. Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Bangka Barat.</p>		<p>1.Keberlanjutan rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Ular oleh Pemerintah Pusat (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 169 Tahun 2019 Tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal Tanjung Ular di Dusun Tanjung Ular, Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)</p> <p>2.Pemantapan kualitas sarana dan prasarana wilayah dalam menopang pembangunan yang</p>



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
		<p>air wilayah sungai kabupaten</p> <p>9. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang belum optimal</p> <p>10. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM</p> <p>11. Belum optimalnya layanan sanitasi layak dan berkelanjutan bagi rumah tangga</p> <p>12. Penyelenggaraan bangunan gedung yang belum maksimal</p> <p>13. Penataan bangunan dan lingkungan yang belum optimal</p> <p>14. Belum tersedianya dokumen perencanaan infrastruktur kawasan permukiman</p> <p>15. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem drainase perkotaan dan lingkungan</p> <p>16. Belum optimalnya penataan ruang</p> <p>17. Masih terdapat rumah tidak layak huni</p> <p>18. Kelengkapan data-data perumahan yang belum valid atau berubah-ubah</p> <p>19. Penyelesaian pembebasan lahan yang memerlukan waktu yang cukup panjang;</p> <p>20. Masih lemahnya jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi masyarakat</p> <p>21. Ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat</p>			berkelanjutan



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
		<p>22. Belum optimalnya pelayanan tata kelola pertanahan kepada masyarakat</p> <p>23. Pengadaan tanah untuk fasilitas publik</p> <p>24. Kurang optimalnya penyediaan, penataan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan (LPJU, Rambu, Guardrail, Marka Jalan dan lain-lain)</p> <p>25. kurang optimalnya penyediaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas antarwilayah</p> <p>26. Masih adanya wilayah blank spot yang tidak terakses dengan jaringan komunikasi atau teknologi informasi</p> <p>27. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi layanan informasi;</p> <p>28. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di dalam memfasilitasi dan menjalankan pembangunan baik dari sisi pemerintahan maupun dunia usaha</p> <p>29. Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan dengan basis sistem informasi</p> <p>30. Masih belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat</p> <p>31. Pemutakhiran data sektoral belum optimal</p>			



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
		32. Belum optimalnya pengelolaan persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah			
C.	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin2. Kurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat miskin untuk pemenuhan pangan rendah3. Pengeluaran perkapita masih relatif rendah4. Masih tingginya tingkat ketergantungan beras dengan daerah lainnya5. Belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat6. Kecenderungan masyarakat terhadap pangan pokok beras yang tinggi7. Masih adanya daerah rawan pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Barat belum mencapai target Nasional;2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah.		Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
D.	Penanggulangan Pengangguran disertai dengan peningkatan <i>decent job</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Keterbatasan lapangan kerja2. Kualitas tenaga kerja yang masih rendah3. Lemahnya SDM di bidang pertanian4. Kurangnya kemampuan modal, peralatan, SDM, kemitraan dan literasi digital industri kecil menengah	<ol style="list-style-type: none">1. Minimnya daya tampung sektor formal dalam menampung pencari kerja2. Minimnya investasi yang melibatkan banyak tenaga kerja3. Menurunnya rasio daya serap tenaga kerja proyek investasi Penanaman Modal Asingra dan dan Penanaman Modal Dalam Negeri;4. Kurangnya kemampuan modal, peralatan, SDM, kemitraan dan literasi digital industri kecil menengah;		<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kualitas SDM tenaga kerja2. Peningkatan jumlah investasi di daerah untuk menambah lapangan kerja
E.	Mendorong pemulihan dunia	<ol style="list-style-type: none">1. Industri pengolahan yang	<ol style="list-style-type: none">5. Kelembagaan dan peran koperasi	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
	usaha	<ol style="list-style-type: none">didominasi pengolahan timah mengalami kontraksi di tahun 2020Belum optimalnya sektor pertanianBelum optimalnya kontribusi sektor pariwisata;Koperasi dan UMKM yang belum berdaya saingIklm usaha dan peningkatan investasi yang belum optimalKeterbatasan akses dan minimnya ketersediaan panganKemandirian daerah masih sangat rendahKapasitas fiskal masih sangat rendahMinimnya transfer pusat di luar Dana Alokasi UmumRendahnya kualitas konsumsi pangan dan tingkat konsumsi ikan;Masih rendahnya kualitas produk olahan pangan yang dihasilkan oleh pelaku usaha atau kelompok masyarakat;Keamanan pangan perlu ditingkatkanKelembagaan dan peran koperasi belum optimalTingkat pemasaran produk UMKM masih terbatasMasih banyak produk UMKM yang belum tersertifikasi halalMasih banyak produk UMKM yang belum mendaftarkan produknya seperti PIRT, dan laik hygiene;Terbatasnya ketersediaan bahan	<ol style="list-style-type: none">belum optimalTingkat pemasaran produk UMKM masih terbatasBelum optimalnya potensi dalam sektor perkebunan dan perindustrian untuk pengembangan investasiTurunnya produksi perikanan budidaya air tawar;Belum kembali pulihnya tingkat kunjungan wisatawan seperti sebelum munculnya pandemi <i>covid-19</i>;Minimnya usaha yang mendukung sektor pariwisata;Pengembangan produk IKM yang berkualitas, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi ekspor belum optimalTurunnya produksi ternak unggas khususnya pada komoditas ayam petelur, ayam pedaging dan ayam buras;Kabupaten Bangka Barat belum menetapkan dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan;Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pasar	<ol style="list-style-type: none">perekonomian dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan, usaha mikro dan koperasi, pengembangan pariwisata & kebudayaan daerahMeningkatkan peran penanaman modal melalui perbaikan iklim dan layanan investasiMeningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah	<ol style="list-style-type: none">Dermaga 2 Tanjung Kalian;Peningkatan Nilai Investasi Daerah;Peningkatan nilai tambah usaha pertanian dalam arti luasPengaruh global terhadap harga komoditas strategis Bangka BaratPeningkatan daya saing usaha mikro, industri kecil dan menengah di semua sektorAkan beroperasionalnya KEK Tj. Api Api



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
		<p>baku untuk memenuhi kebutuhan pasar (kontinuitas produksi);</p> <p>18. Belum optimalnya upaya untuk mempromosikan produk UMKM</p> <p>19. Belum adanya peta potensi investasi</p> <p>20. Terbatasnya regulasi investasi/penanaman modal daerah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha</p> <p>21. Terbatasnya informasi penanaman modal;</p> <p>22. Turunnya produksi perikanan budidaya air tawar;</p> <p>23. Masih rendahnya akses permodalan untuk pengembangan usaha.</p> <p>24. Tingginya tingkat NPL (Non Performing Loan) pada pinjaman ke nelayan;</p> <p>25. Terjadinya konflik kepentingan antarsektor</p> <p>26. Masih maraknya kegiatan ilegal unregulated and unreported fishing di wilayah perairan Kabupaten Bangka Barat;</p> <p>27. Masih terbatasnya budidaya pembibitan produk perikanan khas Kabupaten Bangka Barat (kerang darah);</p> <p>28. Belum optimalnya sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan</p> <p>29. Belum adanya regulasi terkait tata kelola perikanan daerah;</p>			



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
		<p>30. Daya saing produk Teknologi Pengolahan Hasil (TPH) yang masih rendah</p> <p>31. Belum kembali pulihnya tingkat kunjungan wisatawan seperti sebelum munculnya pandemi covid-19</p> <p>32. Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata baru</p> <p>33. Minimnya usaha yang mendukung sektor pariwisata</p> <p>34. Belum terwujudnya pengelolaan pariwisata secara terpadu</p> <p>35. Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian</p> <p>36. Terbatasnya lahan pertanian</p> <p>37. Terbatasnya akses permodalan;</p> <p>38. Lemahnya pengembangan komoditas tanaman alternatif selain komoditas utama khususnya yang bernilai ekonomi tinggi;</p> <p>39. Rendahnya kuantitas produksi ternak di tingkat lokal;</p> <p>40. Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas penunjang serta promosi perdagangan luar negeri</p> <p>41. Belum maksimalnya kerja sama perdagangan dengan daerah pemasok</p> <p>42. Belum semua pelaku usaha memiliki izin usaha</p> <p>43. Belum tercapainya target ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya</p> <p>44. Belum optimalnya pembangunan</p>			



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan Pembangunan dalam RKPD 2023	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2023	Isu Strategis Daerah Tahun 2023
		dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan 45. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pasar 46. Belum optimalnya dorongan kebijakan dari pemerintah daerah terkait industri pengolahan non timah 47. Pengembangan produk IKM yang berkualitas, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi ekspor belum optimal.			
E.	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim)	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya capaian kualitas lingkungan hidup2. Pengelolaan persampahan yang belum ditangani secara optimal3. Terjadinya perubahan tutupan lahan4. Luas areal lahan kritis cukup tinggi5. Lokasi pemulihan terbatas yang disebabkan lokasi untuk pemulihan yang berada di areal pengguna lainnya milik masyarakat dan IUP PT Timah6. Pengelolaan persampahan belum optimal7. Pengelolaan limbah belum optimal,8. Rendahnya pengelolaan kawasan Tahura	<ol style="list-style-type: none">1. Belum seluruh kecamatan melakukan pengolahan sampah serta ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana persampahan belum optimal;2. Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu khususnya pada wilayah perkotaan masih belum optimal3. Masih rendahnya penanganan terhadap lahan kritis di Kabupaten Bangka Barat;4. Belum terkelolanya kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Menumbing	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup2. Peningkatan infrastruktur ke sumber-sumber produksi/perekonomian3. Peningkatan pengelolaan persampahan4. Pemulihan lahan kritis



Dari hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, Identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan isu strategis daerah, permasalahan dan isu strategis ditingkat nasional dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 4.6. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Tema : Peningkatan pelayanan dasar, perekonomian berbasis keunggulan daerah, peningkatan olah raga prestasi yang didukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Capaian RPJMD Tahun 2021 dan s.d. 2026			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu Strategis(Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPDTahun 2022
Sasaran	Capaian 2021	Capaian s.d. 2026			
<p>Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah :</p> <p>1. Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)</p> <p>2. Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)</p> <p>3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)</p> <p>4. Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)</p>	<p>8,16</p> <p>20,87</p> <p>2,22</p> <p>16,97</p>	<p>8,16</p> <p>20,87</p> <p>2,22</p> <p>16,97</p>	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	<p>1. Laju pertumbuhan ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertambangan</p> <p>2. Transformasi ekonomi ke sektor pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan yang masih lambat</p> <p>3. Transformasi ekonomi dari yang berbasis pertambangan (timah) menjadi berbasis renewable ecotourism (pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata) belum optimal</p> <p>4. Rata-rata pertumbuhan Kep Babel selama 2011-2020 berada dibawah nasional dan terendah dibandingkan daerah sebanding</p> <p>5. PDRB per kapita Kep Babel dalam 10 tahun terakhir, posisinya mengalami penurunan.</p> <p>6. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Kep Babel didorong oleh jasa (utamanya perdagangan), pertanian, dan industri</p> <p>7. Dari sisi pengeluaran, ekonomi didorong oleh permintaan domestik (konsumsi masyarakat dan investasi)</p> <p>8. Pengelolaan sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, rendahnya akses permodalan serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung</p>	1. Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan
<p>Meningkatnya peran penanaman modal pada perekonomian daerah:</p> <p>1. Pertumbuhan realisasi penanaman modal</p>	989,38	989,38			



Capaian RPJMD Tahun 2021 dan s.d. 2026			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu Strategis(Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPDTahun 2022
Sasaran	Capaian 2021	Capaian s.d. 2026			
				<p>penghidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam;</p> <ol style="list-style-type: none">9. Ketimpangan sumber perekonomian menyebabkan perpindahan penduduk yang tidak merata;10. Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi juga masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan;11. Masih rendahnya upaya lintas sektor dalam meminimalisasi hambatan sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, serta pola layanan pendidikan yang belum optimal untuk anak berkebutuhan khusus, anak jalanan dan anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam pernikahan atau ibu, remaja, dan anak yang bekerja atau pekerja anak;12. Menurunnya rasio daya serap tenaga kerja proyek investasi Penanaman Modal Asing dan dan Penanaman Modal Dalam Negeri;13. Belum optimalnya potensi dalam sektor perkebunan dan perindustrian untuk pengembangan investasi;14. Belum kembali pulihnya tingkat kunjungan wisatawan seperti sebelum munculnya pandemi covid-19;15. Turunnya produksi perikanan budidaya air tawar;16. Minimnya usaha yang mendukung sektor pariwisata;17. Kurangnya kemampuan modal, peralatan, SDM, kemitraan dan literasi digital industri kecil menengah;18. Pengembangan produk IKM yang berkualitas, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi ekspor belum optimal.19. Turunnya produksi ternak unggas khususnya pada komoditas ayam petelur, ayam pedaging dan ayam buras;20. Kabupaten Bangka Barat belum menetapkan dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);21. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan;22. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pasar23. Kualitas investasi rendah	



Capaian RPJMD Tahun 2021 dan s.d. 2026			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu Strategis(Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPDTahun 2022
Sasaran	Capaian 2021	Capaian s.d. 2026			
<p>Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks konektivitas 2. Indeks Bangunan Gedung 	<p>1,25 n.a.</p>	<p>1,25 n.a.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 24. Belum optimalnya pemerataan pembangunan antar wilayah pada bidang infrastruktur kePUan , Pehubungan, Pelayanan Dasar dan tata Kelola bencana 25. Masih adanya kesenjangan antar wilayah; 26. Pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan sinkron dengan rencana tata ruang; 27. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tata Kelola kehutanan 28. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur perkotaan termasuk transportasi, energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur dan ekosistem TIK, akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman, akses perumahan dan permukiman; 	
<p>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan 3. Indeks Resiko Bencana 	<p>69,21 35,29 180/ Tinggi</p>	<p>69,21 35,29 180/ Tinggi</p>		<ol style="list-style-type: none"> 29. Depleksi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup; 30. Tingginya resiko bencana; 31. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta tata Kelola kehutanan; 32. Adanya Ancaman Degradasi Kualitas Lingkungan; 33. Belum seluruh kecamatan melakukan pengolahan sampah serta ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana persampahan belum optimal; 34. Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu khususnya pada wilayah perkotaan masih belum optimal 35. Masih rendahnya penanganan terhadap lahan kritis di Kabupaten Bangka Barat; 36. Belum terpenuhinya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman; 37. Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Kabupaten Bangka Barat; 38. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang dibangun di daerah irigasi 	



Capaian RPJMD Tahun 2021 dan s.d. 2026			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu Strategis(Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPDTahun 2022
Sasaran	Capaian 2021	Capaian s.d. 2026			
				39. RTRW kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang; 40. Belum ditetapkannya Dokumen RDTR yang merupakan dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Bangka Barat 41. Belum terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 42. Belum terpenuhinya pelayanan pengolahan air limbah domestic; 43. Belum terkelolanya kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Menumbing.	
Menurunnya angka kemiskinan : 1. Angka kemiskinan	2,75	2,75	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Masih Lambatnya percepatan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat melalui percepatan penurunan angka kemiskinan, pengangguran serta percepatan pembangunan pada Kawasan Wilayah Pedesaan 2. Jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi; 3. Laju penurunan kemiskinan cenderung melambat; 4. Kelembagaan dan peran koperasi belum optimal; 5. Tingkat pemasaran produk UMKM masih terbatas. 6. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Bangka Barat belum mencapai target Nasional; 7. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Bangka Barat masih sangat rendah.	2.Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat
Menurunnya angka pengangguran: 1. Tingkat pengangguran Terbuka	3,83	3,83			
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan: 1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah 3. Persentase Sekolah Akreditasi A	7,44 11,7 22,46	7,44 11,7 22,46	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Masih Rendahnya Kualitas Pembangunan Manusia DI Prov. Kep. Bangka Belitung dari aspek Pendidikan dan Kesehatan 2. Perlunya Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 3. Jumlah penduduk usia produktif semakin besar; 4. Perubahan struktur umur penduduk yang cepat; 5. <i>Mismatch</i> keterampilan, kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan talenta untuk siap dilatih dan bekerja (kualitas SDM rendah)	3.Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia



Capaian RPJMD Tahun 2021 dan s.d. 2026			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu Strategis(Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPDTahun 2022
Sasaran	Capaian 2021	Capaian s.d. 2026			
				6. Perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama kepesertaan pekerja informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) melambat; 7. Jumlah peserta tidak aktif (berhenti membayar iuran) cukup banyak dan kepatuhan para pemberi kerja maupun pada kelompok PBPU; 8. Regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan masih belum harmonis; 9. Adanya kesenjangan mutu antar satuan pendidikan tinggi; 10. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal; 11. Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk; 12. Kematian ibu dan bayi masih tinggi; 13. Meningkatnya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak 14. Belum optimalnya Pemenuhan Hak Anak 15. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal; 16. Pola hidup yang tidak sehat; 17. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper; 18. Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi; 19. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia 20. Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti; 21. Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama; 22. Belum optimalnya peran keluarga; 23. Rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas; 24. Minimnya daya tampung sektor formal dalam menampung pencari kerja; 25. Minimnya investasi yang melibatkan banyak tenaga kerja; 26. Belum mencukupinya pemenuhan petugas PLKB/PKB di 6 (enam) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk melayani	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat : 1. Angka Harapan Hidup 2. Prevalensi Stunting	70.08 1,10	70.08 1,10			
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak : 1. Indeks Pembangunan Gender 2. Status Kabupaten Layak Anak	90.04 Pratama	90.04 Pratama			
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat: 1. Indeks Kesalehan Sosial	n.a.	n.a.			



Capaian RPJMD Tahun 2021 dan s.d. 2026			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu Strategis(Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPDTahun 2022
Sasaran	Capaian 2021	Capaian s.d. 2026			
				<p>kebutuhan masyarakat.</p> <p>27. Meningkatnya angka kematian ibu yang terjadi mulai dari fase sebelum hamil dan pada saat hamil;</p> <p>28. Meningkatnya angka kematian bayi dengan penyebab utama berat badan lahir rendah;</p> <p>29. Meningkatnya kasus balita gizi buruk dan masih tingginya prevalensi status gizi di Kabupaten Bangka Barat (tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung);</p> <p>30. Ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal;</p> <p>31. Kurangnya tenaga kesehatan (dokter), tenaga kefarmasian, tenaga sanitasi dan tenaga gizi di Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;</p> <p>32. Belum memadainya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Kabupaten Bangka Barat;</p> <p>33. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Lebih Rendah dari Angka Provinsi dan Nasional;</p> <p>34. Belum optimalnya kompetensi dan sertifikasi pendidik;</p> <p>35. Menurunnya Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI Ke SMP/MTs;</p> <p>36. Menurunnya APK/APM SD/MI;</p> <p>37. Meningkatnya Angka Putus Sekolah SD/MI;</p> <p>38. Rendahnya Prestasi Olahraga di Kabupaten Bangka Barat, dikarenakan kurangnya pembinaan ke atlet, kurangnya perhatian kepada atlet berprestasi, serta minimnya SDM olahraga berlesensi;</p> <p>39. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan olahraga dan kepemudaan;</p> <p>40. Turunnya jumlah pengunjung di perpustakaan daerah;</p> <p>41. Turunnya jumlah perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat</p> <p>42. Koleksi Bahan Pustaka Digital serta Sarana Prasarana untuk Alih Media/Koleksi E-Book belum optimal.</p>	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel :			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang	<p>1. Rendahnya pemenuhan pelayanan dasar dan daya saing daerah;</p> <p>2. Tumpang tindih tugas dan fungsi antarlembaga pemerintah;</p> <p>3. Masih rendahnya kinerja pelayanan publik;</p>	4.Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi



Capaian RPJMD Tahun 2021 dan s.d. 2026			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu Strategis(Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPDTahun 2022
Sasaran	Capaian 2021	Capaian s.d. 2026			
1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK 3. Maturitas SPIP 4. Indeks SPBE 5. Indeks Profesionalitas ASN	n.a. WTP Berkembang 2,27 /Cukup 60,16	n.a. WTP Berkembang 2,27 /Cukup 60,16	baik	4. Masih terdapat permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal; 5. Masih belum optimal pembangunan demokrasi dari Aspek Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi 6. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Aspek pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, pemerintah yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas 7. Belum optimalnya pemenuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, karena pelayanan masih terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 8. Masih rendahnya kepatuhan terhadap standard pelayanan publik; 9. Belum optimalnya peningkatan ketertiban dan keamanan; 10. Belum optimalnya pelaksanaan bidang pemadam kebakaran; 11. Belum optimalnya pelaksanaan urusan bidang kebencanaan;	Birokrasi
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah: 1.Derajat Otonomi Fiskal Daerah	6,79	6,79	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	12. Belum optimalnya pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bangka Barat 13. Data Statistik Sektoral belum terkelola dan tervalidasi dengan baik; 14. Turunnya jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.; 15. Masih rendahnya Nilai Indeks Reformasi Birokrasi; 16. Turunnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 17. Tingkat maturasi SPIP masih pada kategori berkembang; 18. Masih rendahnya Indeks Profesional ASN; 19. Masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah: 1.Indeks Kepuasan Masyarakat	82,07	82,07			



4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat;
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia;
4. Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi.

Dari prioritas yang telah ditetapkan, maka dilakukan sinkronisasi dengan tujuan serta sasaran pembangunan yang dimaksudkan agar implementasinya lebih fokus dan lebih terarah serta dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholdernya* sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.7. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Tahun 2023 dan Tujuan Pembangunan Daerah serta Sasaran Pembangunan Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
		Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah
		Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan
		Menurunnya angka pengangguran
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat
Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah



Agar pencapaian pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah tahun 2023 sesuai dengan tahapan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.8. Tujuan, Sasaran, Indikator serta Target Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2023

TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	
		SATUAN	NILAI
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6
	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,39
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,40
	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	18,77
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	917
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,7
	Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,43
	Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	47,06
	Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu rupiah	12.791
Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,63
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69,86
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,60
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,90
	Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	24,86
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,56
	Prevalensi <i>Stunting</i>	%	7,46
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,82
	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik

TUJUAN / SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET	
		SATUAN	NILAI
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Cukup
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71,56
	Opini BPK	Opini	WTP
	Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang
	Indeks SPBE	kategori	Cukup
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,84
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,07
Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,58
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,68

4.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan tersebut disusun strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung layanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah diuraikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.9. Keterkaitan antara Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan produksi peternakan) dan perikanan	Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan,
	Mengoptimalkan dan menyinergikan fungsi jaringan irigasi	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian	usaha mikro dan koperasi, pengembangan pariwisata & kebudayaan daerah
	Pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis potensi daerah	
	Peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan kemitraan, serta literasi digital usaha mikro	
	Penguatan kelembagaan dan peran koperasi	
	Meningkatkan infrastruktur destinasi pariwisata terpadu	
	Meningkatkan promosi pariwisata yang inovatif berbasis teknologi informasi melalui pendekatan penta helix	
	Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	
	Meningkatkan pelestarian kekayaan sejarah, adat istiadat, seni dan budaya lokal	
	Mengoptimalkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	
	Mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura)	
	Mengoptimalkan pembangunan, pemeliharaan, distribusi perdagangan serta pengembangan potensi pasar	
	Meningkatkan perlindungan konsumen	
Meningkatnya peran penanaman modal pada perekonomian daerah	Penguatan ketersediaan data yang berkualitas serta penyusunan regulasi investasi untuk fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	Meningkatkan peran penanaman modal melalui perbaikan iklim dan layanan investasi
	Peningkatan iklim investasi daerah	
	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Meningkatkan ketersediaan jaringan dan perlengkapan jalan	Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dalam rangka mendorong percepatan
	Percepatan penatagunaan dan pengelolaan tanah untuk pembangunan	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung Negara	pertumbuhan ekonomi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengendalian kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah
	Peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu	
	Penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur penanggulangan bencana daerah	
Menurunnya angka kemiskinan	Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dan jaminan perlindungan sosial	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, stabilitasi harga pangan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan
	Mengembangkan dan meningkatkan pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan miskin	
	Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh desa dan kelurahan	
	Peningkatan akses dan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau	
	Menyediakan akses perumahan dan pemukiman yang layak, serta meningkatkan pembangunan dan infrastruktur perumahan	
Menurunnya angka pengangguran	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi, kewirausahaan, dan kemitraan	
	Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu infrastruktur dan memberikan jaminan bebas biaya pendidikan	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan
	Memperluas dan memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu	
	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat	
	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan	
	Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat	
	Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan	
	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pemberdayaan kualitas keluarga sejahtera	
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pembinaan keluarga, keikutsertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk, perlindungan anak	Penguatan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesalehan sosial masyarakat
	Melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak	
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Meningkatkan kepedulian terhadap sesama (kepedulian sosial)	
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian Lingkungan hidup	
	Meningkatkan masyarakat sadar hukum	
	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai kemajemukan (kebhinekaan)	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan daerah	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
	Penguatan penerapan kebijakan satu data	
	Menguatkan tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah	
	Menguatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan implementasi pengamanan informasi	
	Optimalisasi penerapan SPBE	
	Meningkatkan tertib kearsipan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan	
	Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	
	Menguatkan implementasi manajemen ASN	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	
	Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital	
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah
	Meningkatkan peran BUMD Dan BUMDes	

Strategi dan arah kebijakan tersebut merupakan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan upaya dalam pencapaian Visi Misi Kepala Daerah untuk masa Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis serta pencapaian pembangunan yang telah dicapai.

4.2.2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi

Untuk menjamin keselarasan dan ketercapaian hasil-hasil pembangunan dari level Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Pusat perlu dilakukan penyelarasan prioritas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sehingga ada dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Prioritas Nasional. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Barat dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi ditampilkan pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.10. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prioritas Nasional		Prioritas Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas Daerah Kabupaten Bangka Barat
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PN 1	Pembangunan Ekonomi	Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PN 5	Pembangunan Wilayah	
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PN 6	Pembangunan Lingkungan	
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PN 2	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PN 3	Pembangunan SDM	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PN 4	Pembangunan Demokrasi	
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PN 7	Pembangunan Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi

4.2.3. Program Pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prioritas yang sudah ditetapkan diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan dengan indikator dan target sebagai bahan untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan. Selanjutnya dalam rangka menjabarkan program pembangunan daerah yang dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam tabel 4.11.

Pencapaian prioritas nasional dan provinsi sangat ditentukan dukungan prioritas Kabupaten yang dituangkan melalui program/kegiatan. Dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, dukungan program/kegiatan terhadap prioritas nasional dan provinsi disajikan sebagaimana tabel 4.12. dan 4.13.

4.3 Penyelerasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan



Wajib yang terkait pelayanan dasar tersebut ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Selanjutnya sesuai Pasal 298 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, maka prioritas pembangunan daerah diarahkan untuk pemenuhan SPM. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Sosial.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ditetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang berkaitan dengan penerapan SPM. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dengan SPM sebagaimana tergambar pada tabel 4.14.



Tabel 4.14. Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
BIDANG PENDIDIKAN	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,60 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	95,85%
			Harapan Lama Sekolah	11,90 Tahun		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	95,12%
			Persentase Sekolah Terakreditasi A	24,86%		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	95,14%
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	70,85%
BIDANG KESEHATAN	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,56 Tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%
			Prevalensi <i>Stunting</i>	7,46%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80,5
						Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78
						Persentase baduta <i>stunting</i>	9%
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	80%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	45%			



STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%
						Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	65%
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,56 Tahun	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	17,78%
			Prevalensi <i>Stunting</i>	7,46%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	3,59%
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	82,47%
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,63%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	100%
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori Baik	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	100%
	Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	Kategori Tinggi	Rogram Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%



STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	32%
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	25%
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	100%
BIDANG SOSIAL	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,63%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	100%
					Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana yang tertangani	100%



4.4. Penyelerasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB terdiri dari 17 tujuan yang secara singkat yaitu : 1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan TPB ditingkat daerah disesuaikan dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dalam rangka pencapaian TPB, maka perlu adanya penyelerasan dengan dokumen perencanaan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan TPB tersebut, dilakukan penyelerasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dengan TPB yang disajikan pada tabel 4.15. Berdasarkan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat 2 TPB yang tidak dipetakan dalam penyelerasan yaitu TPB Nomor 7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau dan TPB Nomor 14 yaitu Ekosistem Lautan.



Tabel 4.15. Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan	Nomor 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
	Nomor 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
	Nomor 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
	Nomor 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
	Nomor 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Nomor 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun
	Nomor 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
	Nomor 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
	Nomor 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Nomor 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
	Nomor 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
	Nomor 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
	Nomor 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	Nomor 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
	Nomor 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

Tabel 4.11. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan	Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	Dinas Pertanian dan Pangan
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5.39	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	2	Dinas Pertanian dan Pangan
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2.4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	25	Dinas Pertanian dan Pangan		
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	40,107	Dinas Kelautan dan Perikanan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	219.41	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	70	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	5.45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	%	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3.45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian			
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	19.23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian					
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	50.82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	59.62	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian					

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	%	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	18	Dinas Kelautan dan Perikanan
					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW	DTW	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	100,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	15.13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	Jumlah	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	4	Dinas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3.9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	917	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	8.21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	81	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	%	70	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase kebijakan penyelenggaraan p	%	28.57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0.7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82.17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	95.28	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhana sarana dan prasarana LLAJ	%	25.77	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	35.71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	22.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71.43	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	55	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	47.06	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	33	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	16	Dinas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	41.67	Dinas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5,208.86	Dinas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	28.57	Dinas Lingkungan Hidup
					ROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	32	Satuan Polisi Pamong Praja
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	25	
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.63	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	Dinas Pertanian dan Pangan
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/ hr	2,100	Dinas Pertanian dan Pangan
						Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/ hr	57	
						Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/ hr	1,307	
						Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	60	
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	Dinas Pertanian dan Pangan
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	Dinas Pertanian dan Pangan
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	13.3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3.23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	16.7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3.85	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	35	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.31	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	95.85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.55		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95.12		
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	24.86		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95.14		
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	70.85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	46.84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	15.38	
					Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	10.43			
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.56	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESAHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	93	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi <i>Stunting</i>				Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	80.5		
						Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	78		
						Persentase baduta <i>stunting</i>	%	9		
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	80	Dinas Kesehatan
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80.08	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	45	Dinas Kesehatan		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan	
						Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	65		
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	17.78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	3.59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	82.47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pencab Aktif	Jumlah	28	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	80		
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90.82	Indeks	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	40	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	60	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya								

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	Dinas Lingkungan Hidup
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	Seluruh Kecamatan
					PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas yang aktif	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan
Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71.56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
		Opini BPK	Opini	WTP	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
		Indeks SPBE	kategori	Cukup		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64.845		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
						Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	70	Dinas Komunikasi dan Informatika
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	indeks manajemen resiko	Indeks	1.7	Inspektorat Daerah
						Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1.1	
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	level	2+	Inspektorat Daerah
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Sekretariat DPRD
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	40	Dinas Komunikasi dan Informatika
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	6.25	
						Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100	
						Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	40	Dinas Komunikasi dan Informatika
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	840	Dinas Komunikasi dan Informatika
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	74.43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	435	
						Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	1,742	
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	%	95.42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	37	
						Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	77	
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah
						Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81.82	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	83.3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	67.51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	66.67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	75	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kematangan UKPBJ	level	3	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9.22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3.8	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
					Persentase peningkatan retribusi daerah	%	3.11		
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	31.67	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 4.12. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 Mendukung Prioritas Nasional

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai			
Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan	Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5.39	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	2	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2.4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	27.46	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	%	25	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	25	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	%	100	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	%	100	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	%	42	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	ton/tahun	40,107	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	40,107	Dinas Kelautan dan Perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	ton/tahun	219.41	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	219.41	Dinas Kelautan dan Perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	%	70	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	70	Dinas Kelautan dan Perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	%	5.45	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	5.45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	%	30	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	%	4	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	%	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	%	3.45	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3.45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	%	19.23	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	19.23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	50.82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	59.62	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPIU, IUKI dan IPKI	%	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	18	Dinas Kelautan dan Perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpulan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW	DTW	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	100,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	15.13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	Jumlah	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	4	Dinas Lingkungan Hidup	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3.9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	917	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	8.21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	81	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	%	70	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase kebijakan penyelenggaraan p	%	28.57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0.7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82.17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	95.28		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhana sarana dan prasarana LLAJ	%	25.77	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	35.71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	22.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71.43	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	55	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	47.06	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	33	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	16	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	41.67	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5,208.86	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	28.57	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100		
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	32	Satuan Polisi Pamong Praja	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	25		
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100		
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.63	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/ hr	2,100	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
				Tingkat konsumsi pangan AKP		gr/kap/ hr	57			
				Tingkat ketersediaan pangan AKE		kkal/kap/ hr	1,307			
				Tingkat ketersediaan pangan AKP		gr/kap/ hr	60			
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh yang tertangani	%	13.3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3.23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	16.7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3.85	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	35	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai			
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.31	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	95.85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.55		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95.12			
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	24.86		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95.14			
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	70.85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	0	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	46.84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
				Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B		%	15.38				
				Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		%	10.43				
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.56	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	93	Dinas Kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
	Prevalensi <i>Stunting</i>		%	7.46	Tingkat Kepuasan layanan puskesmas		Nilai	80.5			
Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit					Nilai		78				
Persentase baduta <i>stunting</i>					%		9				
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	80	Dinas Kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80.08	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	45	Dinas Kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing			

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
						Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	65		
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	17.78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	3.59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	82.47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pencab Aktif	Jumlah	28	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
						persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	80		
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90.82	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	40	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	60	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegaskan	%	100	Seluruh Kecamatan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas yang aktif	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71.56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Opini BPK	Opini	WTP	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Indeks SPBE	kategori	Cukup		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100		
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64.845		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2			
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	70	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	indeks manajemen resiko	Indeks	1.7	Inspektorat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
						Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1.1		
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	level	2+	Inspektorat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Sekretariat DPRD	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	40	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
						Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	6.25		
						Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100		
						Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100		
					PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	40	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	840	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL				
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai						
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	74.43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
						Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	435						
						Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	1,742						
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	%	95.42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
						Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	37						
						Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	77						
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
						Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100						
					Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81.82	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	83.3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
									PROGAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	67.51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	66.67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik					
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan					Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik					
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan					Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik					
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	75	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik					

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kematangan UKPBJ	level	3	Sekretariat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9.22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3.8	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
Persentase peningkatan retribusi daerah						%	3.11			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	31.67	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Tabel 4.13. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 Mendukung Prioritas Provinsi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan	Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5.39	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	2	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2.4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	27.46	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	25	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	40,107	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	219.41	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	70	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	5.45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	%	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3.45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	19.23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	50.82	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan		%	59.62	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Sentra IKM		sentra	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi				
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi					

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	%	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	18	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW	DTW	7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	100,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	15.13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpustnas	Jumlah	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	4	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3.9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	917	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	8.21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai			
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	81	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi	
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	21	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi	
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	%	70	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	persentase kebijakan penyelenggaraan	%	28.57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Ekonomi	
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0.7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82.17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah	
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	95.28			
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	%	25.77	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pembangunan Wilayah
						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
						PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	35.71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	22.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71.43	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	55	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan	
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	47.06	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	33	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan	
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan	
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan	
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	16	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	41.67	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5,208.86	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	28.57	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Lingkungan
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100		
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	32	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembangunan Lingkungan
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	25		
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100		
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Lingkungan
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.63	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan Pendapatan Masyarakat
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan Pendapatan Masyarakat
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan Pendapatan Masyarakat
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan Pendapatan Masyarakat
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat
					PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/ hr	2,100	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat
						Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/ hr	57		
						Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/ hr	1,307		
						Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	60		
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai			
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	
					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	13.3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3.23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	
					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	16.7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	
	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3.85	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	35	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.31	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	95.85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan SDM	
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11.55		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95.12			
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	24.86		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95.14			
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	70.85	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan SDM
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	35	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan SDM
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	46.84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan SDM
							Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	15.38		
					Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	10.43				
	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70.56	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	93	Dinas Kesehatan	Pembangunan SDM	
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	7.46		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	80.5			
						Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	78			
						Persentase baduta <i>stunting</i>	%	9			

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	80	Dinas Kesehatan	Pembangunan SDM
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan SDM
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80.08	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan SDM
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	45	Dinas Kesehatan	Pembangunan SDM
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan	Pembangunan SDM
						Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	65		
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	17.78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SDM
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkategori layak	%	3.59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SDM
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	82.47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SDM
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pencab Aktif	Jumlah	28	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan SDM
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan SDM
						persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	80		
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90.82	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	40	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan SDM
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	60	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan SDM
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan SDM

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan SDM
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	75	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan SDM
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan SDM
	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Pembangunan SDM
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	5	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan SDM
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	40	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan SDM
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan SDM
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Demokrasi
					PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembangunan Demokrasi
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Demokrasi
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Demokrasi
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase ormas yang aktif	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Demokrasi
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Demokrasi
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Demokrasi
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan	Pembangunan Demokrasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
Meningkatkan Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71.56	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
		Opini BPK	Opini	WTP	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Pembangunan Pemerintahan
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Pembangunan Pemerintahan
		Indeks SPBE	kategori	Cukup		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100		
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64.845		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100		
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Pembangunan Pemerintahan
						Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	70	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Pemerintahan
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembangunan Pemerintahan
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembangunan Pemerintahan
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	indeks manajemen resiko	Indeks	1.7	Inspektorat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
						Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1.1		
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PEDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	level	2+	Inspektorat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Sekretariat DPRD	Pembangunan Pemerintahan
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	40	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Pemerintahan
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan Pemerintahan
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan Pemerintahan
						Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	6.25		
						Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100		
						Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100		
					PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan Pemerintahan
					PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	40	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Pemerintahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	840	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Pemerintahan
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	74.43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pembangunan Pemerintahan
				Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya		Orang	435			
				Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir		Orang	1,742			
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥ 76	%	95.42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pembangunan Pemerintahan
				Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat		Orang	37			
				Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II		Orang	77			
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
				Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah		%	100			
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81.82	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	83.3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembangunan Pemerintahan
PROGAM PENCATATAN SIPIL					Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	67.51	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembangunan Pemerintahan	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					Persentase ketersediaan data kependudukan	%	66.67	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembangunan Pemerintahan	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembangunan Pemerintahan	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Pemerintahan	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Pemerintahan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	75	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pemerintahan	
PROGRAM PENATAAN DESA					Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pemerintahan	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pemerintahan	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat kematangan UKPEJ	level	3	Sekretariat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9.22	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3.8	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pembangunan Pemerintahan
						Persentase peningkatan retribusi daerah	%	3.11		
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	31.67	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pemerintahan



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta isu strategis pembangunan yang ada. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan untuk kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan.

Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan diharapkan memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Tentu saja rencana pembangunan yang telah disusun tidak akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, mengingat keterbatasan potensi anggaran. Namun demikian, melalui program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan secara langsung dapat menyelesaikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan perumusan program/kegiatan/subkegiatan diklasifikasikan atas program penunjang urusan pemerintahan daerah, urusan wajib, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur pemerintahan umum serta unsur kewilayahan.

5.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, yang merupakan program untuk pelaksanaan kegiatan rutin pada setiap perangkat daerah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan rutin perangkat daerah antara lain kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (digunakan bagi perangkat daerah yang memiliki penerimaan daerah) administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan BLUD (digunakan bagi perangkat daerah yang menggunakan sistem BLUD).

Namun ada beberapa kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperuntukkan khusus untuk pelaksanaan rutin pada unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) antara lain kegiatan administrasi keuangan dan



operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, penataan organisasi, pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, layanan administrasi DPRD penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

5.1.2. Program Urusan Wajib

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 3) Program Pengembangan Kurikulum.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan sub unit organisasi yaitu sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan dengan 4 (empat) program strategis yaitu:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

b. Sub Unit Organisasi dalam hal ini RSUD Sejiran Setason dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat".

c. Sub Unit Organisasi dalam hal ini Puskesmas Muntok, Puskesmas Simpangteritip, Puskesmas Kundi, Puskesmas Jebus, Puskesmas Puput, Puskesmas Sekar Biru, Puskesmas Kelapa, serta Puskesmas Tempilang memiliki 1 (satu) program strategis yaitu "Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat".

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 10 program strategis yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 3) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 4) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;



- 5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - 7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
 - 8) Program Penataan Bangunan Gedung;
 - 9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
dan
 - 10) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Pengembangan Perumahan;
 - 2) Program Kawasan Permukiman;
 - 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 - 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 1 (satu) program strategis yaitu Program Penanggulangan Bencana;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua) program strategis yaitu :
 - 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Pemberdayaan Sosial;
 - 2) Program Rehabilitasi Sosial;
 - 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - 4) Program Penanganan Bencana.



7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja; dan
- 3) Program Hubungan Industrial.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 (enam) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 2) Program Perlindungan Perempuan;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
- 3) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 4 (empat) program strategis yaitu:

- 1) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- 2) Program Pengelolaan Tanah Kosong;
- 3) Program Penatagunaan Tanah; dan
- 4) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.



11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan 9 (sembilan) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; dan
- 9) Program Pengelolaan Persampahan.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Pendaftaran Penduduk;
- 2) Program Pencatatan Sipil;
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Desa;
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.



14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :
 - 1) Program Pengendalian Penduduk;
 - 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
 - 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :
 - 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
 - 2) Program Pengelolaan Pelayaran.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :
 - 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - 2) Program Aplikasi Informatika.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan 7 (tujuh) program strategis sebagai berikut :
 - 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - 2) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
 - 4) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - 5) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 - 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro; dan
 - 7) Program Pengembangan UMKM.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Urusan Penanaman Modal Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;



- 2) Program Promosi Penanaman Modal;
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal; dan
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral".

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi".

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 3) Program Pembinaan Sejarah;
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 2 (dua) program strategis yaitu:

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan; dan
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.



24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Kearsipan; dan
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

5.1.3. Program Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Program Pemasaran Pariwisata;
- 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan 6 (enam) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- 5) Program Perizinan Usaha Pertanian; dan
- 6) Program Penyuluhan Pertanian.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya".



5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan 6 (enam) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- 3) Program Pengembangan Ekspor;
- 4) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- 5) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
- 6) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; dan
- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

5.1.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Bidang Penelitian

Bidang Penelitian dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Penelitian dan Pengembangan Daerah".

3. Bidang Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :



- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Pengelolaan Pendapatan Daerah”.
4. Bidang Kepegawaian
- Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Kepegawaian Daerah”.
5. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
- Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Pengembangan Sumber Daya Manusia”.

5.1.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah melaksanakan 1 (satu) program strategis yaitu “Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”.

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.



5.1.7. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

5.1.8. Unsur Kewilayahan

Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 6 (enam) perangkat daerah yaitu Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parititga serta Kecamatan Tempilang.

1. Kecamatan Muntok

Kecamatan Muntok melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Kecamatan Simpangteritip

Kecamatan Simpangteritip melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3. Kecamatan Jebus

Kecamatan Jebus melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;



- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4. Kecamatan Kelapa

Kecamatan Kelapa melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5. Kecamatan Tempilang

Kecamatan Tempilang melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6. Kecamatan Parititga

Kecamatan Parititga melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas yang ditetapkan sudah memiliki pagu indikatif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2023. Rincian pagu indikatif berdasarkan urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.1 Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Tahun 2023

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)
A.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		567.314.297.885,00
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	253.127.098.000
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	180.076.976.400,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96.527.159.165,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	12.678.600.570,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.651.898.750,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.491.460.000,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.761.105.000,00
B.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		116.134.593.380,00
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.827.506.610,00
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.921.010.000,00
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	15.252.673.800,00
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.415.000.000,00
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	12.739.014.910,00
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.670.177.200,00
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.444.842.500,00
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	977.675.660,00
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	6.468.488.700,00
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.360.060.000,00
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	5.682.995.000,00
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	576.549.000,00
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	33.662.500.000,00
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	129.000.000,00
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	76.000.000,00
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.260.590.000,00
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.440.510.000,00
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	230.000.000,00



NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)
C.	Urusan Pemerintahan Pilihan		9.906.919.050,00
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.041.830.000,00
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.480.550.000,00
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	1.657.210.000,00
28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	614.790.250,00
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	794.998.800,00
30	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	317.540.000,00
D.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		79.936.678.689,00
31	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	29.207.069.159,00
		Sekretariat DPRD	50.729.609.530,00
E.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		152.675.663.408,00
32	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	6.948.507.280,00
33	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	607.626.810,00
34	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	127.305.617.268,00
		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9.968.776.300,00
35	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	6.772.883.500,00
36	Pendidikan Dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.072.252.250,00
F.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		6.655.257.000,00
37	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	6.655.257.000,00
G.	Unsur Kewilayahan		35.404.511.600,00
38	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Muntok	13.576.590.000,00
		Kecamatan Simpangteritip	3.883.480.000,00
		Kecamatan Jebus	3.947.901.600,00
		Kecamatan Parittiga	3.689.330.000,00
		Kecamatan Kelapa	6.552.920.000,00
		Kecamatan Tempilang	3.754.290.000,00
H.	Unsur Pemerintahan Umum		8.220.661.000,00
39	Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.220.661.000,00
TOTAL			976.248.582.012,00



Tabel 5.2 Pagu Indikatif Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
1	Sekretariat Daerah	29.207.069.159,00
2	Sekretariat DPRD	50.729.609.530,00
3	Inspektorat Daerah	6.655.257.000,00
4	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	7.556.134.090,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	127.305.617.268,00
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	9.968.776.300,00
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	7.845.135.750,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.220.661.000,00
9	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	286.789.598.000,00
10	Dinas Kesehatan	180.076.976.400,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.942.159.165,00
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	19.147.089.270,00
13	Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.651.898.750,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.491.460.000,00
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.205.947.500,00
16	Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.404.055.610,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.898.685.660,00
18	Dinas Pertanian dan Pangan	16.909.883.800,00
19	Dinas Lingkungan Hidup	13.353.805.160,00
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.670.177.200,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.565.060.000,00
22	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	6.795.533.800,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.741.140.000,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.670.510.000,00
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.041.830.000,00
26	Kecamatan Muntok	13.576.590.000,00
27	Kecamatan Simpangteritip	3.883.480.000,00
28	Kecamatan Jebus	3.947.901.600,00
29	Kecamatan Parittiga	3.689.330.000,00
30	Kecamatan Kelapa	6.552.920.000,00
31	Kecamatan Tempilang	3.754.290.000,00
TOTAL		976.248.582.012,00

TABEL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN BANGKA BARAT

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Tolok Ukur	Target							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				567,314,297,885.00	484,649,951,740.00					
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				253,127,098,000.00	250,291,854,000.00					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhiya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	177,482,815,000.00	177,881,185,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
1	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00			
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00	APBD
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00	APBD
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00	APBD
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00	APBD
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00	APBD
1	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	175,005,000,000.00	175,010,000,000.00			
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.346 Orang/bulan	175,000,000,000.00	175,000,000,000.00	APBD
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00	APBD
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00	APBD
1	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00	APBD
1	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	55,000,000.00	55,000,000.00			
1	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	55,000,000.00	55,000,000.00	APBD
1	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	74,000,000.00	88,500,000.00			
1	1	1	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00	APBD
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	18,000,000.00	18,000,000.00	APBD
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	54,000,000.00	54,000,000.00	APBD
1	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	590,965,000.00	900,015,000.00			
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	23,000,000.00	23,000,000.00	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									
			Tolok Ukur	Target								
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	11,550,000.00		APBD
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	79,165,000.00	79,165,000.00		APBD
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	40,000,000.00		APBD
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	13,800,000.00	13,800,000.00		APBD
1	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00		APBD
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	355,000,000.00	650,000,000.00		APBD
1	1	1	2.09	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,707,870,000.00	1,763,690,000.00		
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	158,250,000.00	158,250,000.00		APBD
1	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,522,620,000.00	1,553,440,000.00		APBD
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	35,980,000.00	35,980,000.00		
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
1	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	10,980,000.00	10,980,000.00		APBD
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	95.85%	75,607,283,000.00	72,365,669,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	95.12%				
							Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	95.14%				
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	94.75%	43,277,481,000.00	41,263,721,000.00		
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang kelas baru	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 ruang	600,000,000.00	200,000,000.00		APBD+Reses
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	1,750,000,000.00	-		APBD+Reses
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	250,000,000.00	-		Reses
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Unit	440,000,000.00	-		APBD+Reses
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	28 Paket	35,000,000.00	-		APBD
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11.415 Unit	406,050,000.00	406,050,000.00		APBD
1	1	2	2.01	21	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	136 Satuan Pendidikan	5,000,000.00	50,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									
			Tolok Ukur	Target								
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	255 Peserta Didik	275,000,000.00	265,000,000.00		APBD
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	710 Orang	15,753,200,000.00	15,125,740,000.00		APBD
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 orang	105,000,000.00	292,500,000.00		APBD
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	30 Satuan Pendidikan	65,000,000.00	65,000,000.00		APBD
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	136 Satuan Pendidikan	23,468,231,000.00	24,684,431,000.00		APBD
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136 Orang	25,000,000.00	75,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80.85%	15,856,762,000.00	16,386,242,000.00		
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 unit	120,000,000.00	-		APBD
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perlengkapan Siswa yang Tersedia	2.800 Paket	137,000,000.00	137,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	37,110,000.00	37,110,000.00		APBD
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	400 Peserta Didik	180,000,000.00	180,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.257 Paket	62,850,000.00	62,850,000.00		APBD
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1.640 Peserta Didik	4,200,000.00	15,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	193 Peserta Didik	275,000,000.00	265,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	251 Orang	5,486,600,000.00	5,395,080,000.00		APBD
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 orang	52,500,000.00	127,500,000.00		APBD
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	10 Satuan Pendidikan	35,000,000.00	35,000,000.00		APBD
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	9,456,502,000.00	10,081,702,000.00		APBD
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34 Orang	10,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	90.25%	9,900,960,000.00	8,140,626,000.00		
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.000 Paket	45,000,000.00	45,000,000.00		APBD
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.000 Peserta Didik		142,586,000.00		APBD
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	619 Orang	5,498,200,000.00	3,532,280,000.00		APBD
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 orang	115,500,000.00	178,500,000.00		APBD
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	167 Satuan Pendidikan	140,000,000.00	140,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									
			Tolok Ukur	Target								
1	1	2	03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	167 Satuan Pendidikan	4,102,260,000.00	4,102,260,000.00		APBD
1	1	2	04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.95%	6,572,080,000.00	6,575,080,000.00		
1	1	2	04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	439 Peserta Didik	2,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1	1	2	04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	975 orang	5,850,000,000.00	5,850,000,000.00		APBD
1	1	2	04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5 Satuan Pendidikan	720,080,000.00	720,080,000.00		APBD
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	70.85%	22,000,000.00	30,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Persentase pendidikan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) dan sertifikat pendidik	43.15%	22,000,000.00	30,000,000.00		
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Dokumen	22,000,000.00	30,000,000.00		APBD
1	1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	0%	15,000,000.00	15,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	0 sekolah	15,000,000.00	15,000,000.00		
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar		Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				180,076,976,400.00	186,760,284,900.00		
					DINAS KESEHATAN				180,076,976,400.00	186,760,284,900.00		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	74,046,800,000.00	74,512,680,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	70,005,000,000.00	70,010,000,000.00		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	719 Orang/bulan	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00		APBD
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
1 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Dokumen	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	72,000,000.00	86,500,000.00		
1 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	17,500,000.00	17,500,000.00		APBD
1 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	52,500,000.00	52,500,000.00		APBD
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	361,000,000.00	656,500,000.00		
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	40,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	45,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	3,531,620,000.00	3,665,700,000.00		
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139,800,000.00	139,800,000.00		APBD
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,365,020,000.00	3,473,900,000.00		APBD
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	59,980,000.00	59,980,000.00		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	5 unit	11,250,000.00	11,250,000.00		APBD
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	22,500,000.00	22,500,000.00		APBD
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 unit	26,230,000.00	26,230,000.00		APBD
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	48,057,200,800.00	54,201,409,300.00	Meningkatkan sumber daya manusia	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
	KESEHATAN MASYARAKAT		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80,5			berkualitas dan berdaya saing	
			Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78				
			Persentase baduta <i>stunting</i>	9%				
1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
				Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen	1,258,330,000.00	1,033,330,000.00	
				Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	72 Persen			
				Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	72 Persen			
1	02	02	2.01	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				Reses
				Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	55,000,000.00		
1	02	02	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				APBD
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	35 Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	
1	02	02	2.01	16 Pengadaan Obat, Vaksin				APBD
				Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	533,330,000.00	533,330,000.00	
1	02	02	2.01	20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				APBD
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	216 unit	150,000,000.00	150,000,000.00	
1	02	02	2.01	22 Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga				APBD
				Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	12.752 keluarga	20,000,000.00		
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 Persen	46,769,268,400.00	52,973,232,300.00	
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 Persen			
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 Persen			
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100 Persen			
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen			
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen			
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	100 Persen			
				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen			
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen			
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen			
				Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen			
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen			
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	100 Persen			
				Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	100 Persen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
			Tolok Ukur						
			Target						
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100 Persen					
			Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	98340 Jiwa					
			Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100 Persen					
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100 Persen					
1	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.730 Orang	11,925,000.00	11,925,000.00	APBD
1	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.540 Orang	11,925,000.00	11,925,000.00	APBD
1	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.309 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	APBD
1	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41.350 Orang	95,300,000.00	67,140,000.00	APBD
1	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	141.294 Orang	15,752,500.00	18,725,000.00	APBD
1	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21.338 Orang	32,605,000.00	64,330,000.00	APBD
1	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	51.034 Orang	12,950,000.00	12,950,000.00	APBD
1	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	4.174 Orang	12,400,000.00	12,400,000.00	APBD
1	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	492 Orang	10,000,000.00		APBD
1	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.956 Orang	35,440,000.00	35,440,000.00	APBD
1	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.155 Orang	60,000,000.00	60,000,000.00	APBD
1	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	5,150,000.00	50,000,000.00	APBD
1	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	150,000,000.00	379,686,500.00	APBD
1	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	APBD
1	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	50,000,000.00	100,000,000.00	APBD
1	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	45,860,000.00	45,860,000.00	APBD
1	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	15,000,000.00	24,000,000.00	APBD
1	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9,025,000.00	20,000,000.00	APBD
1	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		19,770,000.00	APBD
1	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	48,330,000.00	63,330,000.00	APBD
1	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	372,459,500.00	403,330,000.00	APBD
1	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	45,669,886,400.00	51,432,420,800.00	APBD
1	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	43,000,000.00	70,000,000.00	APBD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 unit	12,260,000.00	20,000,000.00		APBD
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Persentase Puskesmas yang mampu menyediakan laporan melalui Sistem Informasi Puskesmas	90 Persen	5,951,400.00	17,847,000.00		
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	2,966,900.00	8,000,000.00		APBD
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	2,984,500.00	9,847,000.00		APBD
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pengukuran mutu pelayanan kesehatan	100 Persen	23,651,000.00	177,000,000.00		
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinan	18 unit	10,000,000.00	37,000,000.00		APBD
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 unit	3,651,000.00	20,000,000.00		APBD
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	8 unit	10,000,000.00	120,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	7,048,775,600.00	7,079,295,600.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
			Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	65%				
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1 Buku	6,808,775,600.00	6,839,295,600.00		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	194 Orang	6,808,775,600.00	6,839,295,600.00		APBD
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	91 Persen	240,000,000.00	240,000,000.00		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang	240,000,000.00	240,000,000.00		APBD
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	80 Persen	12,600,000.00	12,600,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT berizin	70 Persen	3,800,000.00	3,800,000.00		
1 02 04 2.01 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15 Dokumen	3,800,000.00	3,800,000.00		APBD
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan dan izin produksi	70 Persen	3,800,000.00	3,800,000.00		
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	25 Dokumen	3,800,000.00	3,800,000.00		APBD
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase hasil permintaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang diperiksa dan ditindaklanjuti	100 Persen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	45%	33,500,000.00	76,200,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah tangga yang ber PHBS	5201 RT	20,800,000.00	50,000,000.00		
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	20,800,000.00	50,000,000.00		APBD
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rata-rata capaian indikator PHBS	42 Persen	1,500,000.00	15,000,000.00		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1,500,000.00	15,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Posyandu Aktif	65 Persen	11,200,000.00	11,200,000.00		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	11,200,000.00	11,200,000.00		APBD
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD SEJIRAN SETASON				38,598,100,000.00	38,598,100,000.00		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhiya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Terlaksananya Pelayanan BLUD	100 persen	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	22,500,000,000.00	22,500,000,000.00		APBD
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks kepuasan layanan Puskesmas	80,5 Angka	16,098,100,000.00	16,098,100,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Indeks kepuasan layanan rumah sakit	78 Angka					
		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93 Persen					
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				16,098,100,000.00	16,098,100,000.00		
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	16,098,100,000.00	16,098,100,000.00		APBD
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Muntok				2,238,000,000.00	2,238,000,000.00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	2,238,000,000.00	2,238,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80.5					
		Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78					
		Persentase baduta stunting	9%					
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2,238,000,000.00	2,238,000,000.00		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2,238,000,000.00	2,238,000,000.00		APBD
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Jebus				1,662,000,000.00	1,662,000,000.00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	1,662,000,000.00	1,662,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80.5					
		Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78					
		Persentase baduta stunting	9%					
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,662,000,000.00	1,662,000,000.00		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,662,000,000.00	1,662,000,000.00		APBD
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Puput				663,000,000.00	663,000,000.00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	663,000,000.00	663,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80.5					
		Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78					
		Persentase baduta stunting	9%					
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				663,000,000.00	663,000,000.00		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	663,000,000.00	663,000,000.00		APBD
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kelapa				2,122,000,000.00	2,122,000,000.00		APBD
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	2,122,000,000.00	2,122,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80.5					
		Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78					
		Persentase baduta stunting	9%					

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2,122,000,000.00	2,122,000,000.00		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2,122,000,000.00	2,122,000,000.00		APBD
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tempilang				2,050,000,000.00	2,050,000,000.00		APBD
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80.5					
		Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78					
		Persentase baduta stunting	9%					
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2,050,000,000.00	2,050,000,000.00		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	2,050,000,000.00	2,050,000,000.00		APBD
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Simanoneritis				1,646,000,000.00	1,646,000,000.00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	1,646,000,000.00	1,646,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80.5					
		Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78					
		Persentase baduta stunting	9%					
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,646,000,000.00	1,646,000,000.00		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,646,000,000.00	1,646,000,000.00		APBD
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Sekarbiru				1,258,000,000.00	1,258,000,000.00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	1,258,000,000.00	1,258,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80.5					
		Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78					
		Persentase baduta stunting	9%					
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1,258,000,000.00	1,258,000,000.00		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1,258,000,000.00	1,258,000,000.00		APBD
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kundi				641,000,000.00	641,000,000.00		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	93%	641,000,000.00	641,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	80.5					
		Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	78					
		Persentase baduta stunting	9%					
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				641,000,000.00	641,000,000.00		
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	641,000,000.00	641,000,000.00		APBD
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				96,527,159,165.00	12,973,314,840.00		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				96,527,159,165.00	12,973,314,840.00		
1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	7,374,580,000.00	7,353,480,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4,505,000,000.00	4,510,000,000.00		
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00		APBD
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 03 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,500,000.00	2,500,000.00		
1 03 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	2,500,000.00	2,500,000.00		APBD
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	42,000,000.00	96,500,000.00		
1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	12,500,000.00		APBD
1 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	10,000,000.00	20,000,000.00		APBD
1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	30,000,000.00	60,000,000.00		APBD
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	494,000,000.00	614,500,000.00		
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	9,000,000.00	7,000,000.00		APBD
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	45,000,000.00		APBD
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	35,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	110,000,000.00	110,000,000.00		APBD
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300,000,000.00	400,000,000.00		APBD
1 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2,043,080,000.00	1,824,980,000.00		
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200,000,000.00	120,000,000.00		APBD
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30,000,000.00	40,000,000.00		APBD
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,811,080,000.00	1,662,980,000.00		APBD
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	271,000,000.00	271,000,000.00		
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	9 unit	21,000,000.00	21,000,000.00		APBD
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	250,000,000.00	250,000,000.00		APBD
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	42%	1,005,000,000.00	175,000,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
			Persentase titik banjir yang dimitigasi	54%			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah titik banjir akibat sedimentasi dan gelombang air laut yang di mitigasi	8 Titik	845,000,000.00	-		
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1,3 KM	820,000,000.00			Reses
	-Normalisasi Sungai Dusun Puput Atas berbatasan dengan Desa Sekar Biru, Kab. Bangka Barat			500 m				reses
	-Normalisasi Sungai belakang rumah bapak kuten sampai ke pertengahan desa puput, Kab. Bangka Barat			300 m				reses
	-Normalisasi Sungai rumah pak RT 07 Desa Puput dengan patung kuda, Kab. Bangka Barat			500 m				reses
1 03 02 2.01 58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam		Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	25,000,000.00			Renja
	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam sungai Ciulong			1 Unit				APBD
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	%	160,000,000.00	175,000,000.00		
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	2 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00		Renja
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	-	75,000,000.00		Renja
1 03 02 2.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi		Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Bendung	60,000,000.00			APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
			Pemeliharaan Bendung D.I Tebing Bulin		1 Bendung			Renja
			Pemeliharaan Bendung D.I Pebuar		1 Bendung			Renja
			Pemeliharaan Embung D.I Simpang Yul		1 Bendung			Renja
1 03 06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	82.47%	75,000,000.00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
1 03 06 02			Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang drainase kondisi baik	0.9528	75,000,000.00		
1 03 06 02 01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 dok	50,000,000.00		Renja
1 03 06 02 09			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	200 m	25,000,000.00		Renja
1 03 10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	82.17%	64,153,682,155.00	100,000,000.00	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	95.28%			
1 03 10 2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	79.52%	64,153,682,155.00	100,000,000.00	
				Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	95.28%		-	
1 03 10 2.01 01			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	APBD
1 03 10 2.01 04			Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	135,000,000.00	-	APBD
1 03 10 2.01 05			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7,150 KM	2,750,000,000.00		
			Pembangunan Jalan Tembus Kawasan Wisata Pantai Batu Rakit		315,5 m			Renja
			jalan kelapa/tebing, Kab. Bangka Barat		1.500 m			Reses
			jl. hutan lestari rt 004/rw 002 kelurahan kelapa, Kab. Bangka Barat		500 m			Reses
			jl. air sipet buntek rt 12 rw 04 kelurahan kelapa kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat		400 m			Reses
			Jalan Tebing - Air Bulin		2.500 m			
1 03 10 2.01 06			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	15 KM	34,900,000,000.00		APBD
			- pelebaran jalan desa pusuk - desa kelapa		12 km			Renia APBD
			- pelebaran jalan pelangas - kundi		1.5 km			DAK
			- pelebaran jalan simpang bulin - petar		1.5 km			DAK
1 03 10 2.01 08			Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	9.145 KM	13,751,723,635.00		Reses+musren +renja Reses
			Peningkatan Jalan Ababil RT. 02 Kelurahan Menjelang, Kab. Bangka Barat		470 M			Reses
			Peningkatan Gang Timor Desa Air Nyatch, Kab. Bangka Barat		1.800 M			Reses
			Peningkatan jalan kenangan sampai air ketok Rt 02 Rv 01 kp. menjelang baru kelurahan menjelang, Kab. Bangka Barat		1,2 KM			Reses
			Peningkatan Jalan gg damai RT 03, Kab. Bangka Barat		175 M			Reses
			Peningkatan jalan gg rindu desa air belo, Kab. Bangka Barat		300 M			Reses
			Peningkatan dusun rebak air ibul desa kundi kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat		500 M			Reses
			Peningkatan dusun limau desa Pangkal Beras, Kab. Bangka Barat		100 M			Reses
			Peningkatan jalan gang barat timur, Kab. Bangka Barat		250 M			Reses
			peningkatan jalan , pengaspalan jalan dusun sungai lalang desa bakit kecamatan parittiga, Kab. Bangka Barat		400 M			Reses
			Peningkatan Jalan Gg family menuju rumah bpk jarkasi Rt 02, Kab. Bangka Barat		150 M			Reses

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Jalan Kp. Sinar Menumbing RT 11 Desa Air Belo, Kab. Bangka Barat			150 M				Reses
	Peningkatan jalan lingkar desa rukam sampai tembus simpang kubur, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses
	Peningkatan Jalan Desa Mancung Lapangan Bola RT 01/RW 01, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses
	Peningkatan Jalan RT 04 ke RT 01 desa kacung, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses
	Peningkatan Jalan desa bukit terak kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses
	Peningkatan Jalan lingkar dusun anyai desa air menduyung kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat			500 M				Reses
	Peningkatan Ruas jalan Kapit-Dusun Sinar Kelabat, Kab. Bangka Barat			500 M				Reses
	Peningkatan jalan lingkar desa pebuar, Kab. Bangka Barat			500 M				Reses
	Peningkatan Jalan lingkar Desa Kamat, Kab. Bangka Barat			300 M				Reses
	Peningkatan Jalan Kp. selindung desa air putih, Kab. Bangka Barat			800 M				Reses
	Rekonstruksi jalan simpang IV desa kacung, Kab. Bangka Barat			250 M				Reses
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,320 KM	1,856,000,000.00			Reses
	Jalan lingkar gg cik dris-gg paud-gg gotong royong, Kab. Bangka Barat			300 M				Reses
	dusun rintis, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses
	makam kampung jawa/parit 10 sampai simpang PKS desa tempilang kecamatan tempilang, Kab. Bangka Barat			300 M				Reses
	Jalan olah raga lingkar U. Kab. Bangka Barat			420 M				Reses
	Air samak kelurahan menjelang, Kab. Bangka Barat			100 M				Reses
1 03 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	13,323 KM	6,108,993,520.00			Reses
	Pemeliharaan Gang Mayor Kelurahan Menjelang, Kab. Bangka Barat			500 M				Reses
	Pembangunan Siring RT. 03 Tambang 25, Kab. Bangka Barat			100 M				Reses
	Pembangunan Siring Jl. Pasar - Binaria, Kab. Bangka Barat			523 M				Reses
	Pembangunan Siring jalan keramat Rw 01 kelurahan keranggan, Kab. Bangka Barat			100 M				Reses
	pembangunan Siring jalan Rt 02 Rw 02 kelurahan keranggan, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses
	Pembangunan Siring Desa juruh (depan rumah bapak dong), Kab. Bangka Barat			1 KM				Reses
	Pembangunan Siring Di depan SD Negeri 12 Desa Air Putih, Kab. Bangka Barat			100 M				Reses
	Pembangunan siring jalan mayor rt 001/rw 003 kelurahan keranggan, Kab. Bangka Barat			1 KM				Reses
	Pembangunan Siring kelurahan sungai baru kecamatan muntok, Kab. Bangka Barat			250 M				Reses
	Pembangunan Siring dusun pulau, Kab. Bangka Barat			400 M				Reses
	Pembangunan Siring Jalan Perumnas - Culong			705 M				Reses
	Pembangunan Siring Gang-Gang RT 11 Desa Air Belo, Kab. Bangka Barat			500 M				Reses
	Pembangunan Siring jalan bandar dalam, Kab. Bangka Barat			500 M				Reses
	Pembangunan Siring rt 02/rw 02 kelurahan sungai daeng kecamatan muntok, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses
	Pembangunan Siring rt 07 sampai dengan rt 12 desa tempilang kecamatan tempilang, Kab. Bangka Barat			500 M				Reses
	pembangunan siring di jalan lingkar rt 01 belakang kecamatan tempilang, Kab. Bangka Barat			400 M				Reses
	Pembangunan Siring Jl. Gelatik RT. 01 Kelurahan Menjelang, Kab. Bangka Barat			840 M				Reses
	Pembangunan siring Jalan kenagan ke jalan cempaka Kelurahan Menjelang, Kab. Bangka Barat			900 M				Reses
	Pembangunan Siring Gang Ababil, Kab. Bangka Barat			500 M				Reses

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Siring Pasar Paritiga, Kab. Bangka Barat			400 M				Reses
	Pembangunan Siring RT 04 ke RT 06 desa kacang, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses
	Pembangunan Siring Rt 001 & Rt 002 Rw 002 Kp. Menjelang Baru Kelurahan Menjelang, Kab. Bangka Barat			1672 M				Reses
	Pembangunan Siring Puput atas, dekat kelenteng RT. 14, Kab. Bangka Barat + box culvert			500 M				Reses
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	5 Km	3,151,460,000.00			APBD Renja
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan		Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	10 M	60,505,000.00			APBD
	Rehabilitasi Jembatan Culong			10 M				Renja
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan		Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	30 M	150,000,000.00			APBD
1 03 10 2.01 24	Pembangunan Jalan Strategis Desa		Panjang Jalan Strategis Desa yang Dibangun	1.050 M	1,190,000,000.00			Reses
	jalan berungai dan jalan pakis desa air putih, Kab. Bangka Barat			800 M				Reses
	jalan perkuburan desa air putih, Kab. Bangka Barat			250 M				Reses
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	22.12%	154,000,000.00	210,000,000.00	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi pada tahun n	60 orang	94,000,000.00	110,000,000.00		
1 03 11 2.01 03	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi		Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	60 orang	84,000,000.00	100,000,000.00		APBD
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	1 sistem informasi	50,000,000.00	50,000,000.00		
1 03 11 2.01 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha		Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Persentase jasa konstruksi yang dilakukan pengawasan	100%	10,000,000.00	50,000,000.00		
1 03 11 2.01 01	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	10,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	28.57%	1,454,062,170.00	2,425,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah RTRW dan RRTR yang sudah ditetapkan	2 Peraturan	306,062,170.00	550,000,000.00		
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	306,062,170.00	400,000,000.00		APBD
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	0 Dokumen	-	150,000,000.00		
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disusun	2 Rancangan kebijakan	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 dokumen	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		APBD
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis data base pemanfaatan ruang	0 Jenis	-	600,000,000.00		
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0 dokumen	-	100,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	0 sistem informasi	-	500,000,000.00		
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase objek ruang yang dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%	148,000,000.00	275,000,000.00		
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0 Dokumen	-	75,000,000.00		
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	148,000,000.00	200,000,000.00		APBD
								APBD
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	17.78%	701,000,000.00	695,000,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SPAM dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	100%	701,000,000.00	695,000,000.00		
1 03 03 2.01 14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM		Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkatkan kinerjanya	31 Penyelenggara SPAM	31,000,000.00	25,000,000.00		APBD
1 03 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	2 Unit	120,000,000.00	120,000,000.00		APBD
1 03 03 2.01 19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah SR yang terpasang di Kawasan Perdesaan	250 SR	550,000,000.00	550,000,000.00		APBD
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Sarana Prasarana Sistem Air Limbah Domestik Berkondisi Layak	3.59%	429,834,840.00	939,834,840.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sarana Air Limbah Domestik Layak dalam Kondisi Baik	100%	429,834,840.00	939,834,840.00		
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	500 Rumah tangga	196,075,040.00	196,075,040.00		APBD
1 03 05 2.01 05	Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	100 Rumah tangga	70,000,000.00	70,000,000.00		APBD
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	20 Rumah tangga	120,000,000.00	500,000,000.00		Renja + Reses
1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	23 unit	43,759,800.00	43,759,800.00		APBD
1 03 05 2.01 15	Pembangunan/penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT		Kapasitas IPLT Terbangun	M ³ /Hari	-	30,000,000.00		
1 03 05 2.01 16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	0 M ³ /Hari	-	100,000,000.00		
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang tertangani	87%	16,165,000,000.00	775,000,000.00	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	APBD
1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Sarana dan Prasarana bangunan Gedung yang tertangani;Jumlah Bangunan yang memiliki IMB dan SLF	100%	16,165,000,000.00	775,000,000.00		APBD
1 03 08 2.01 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200 Dokumen	200,000,000.00	200,000,000.00		APBD
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15,750,000,000.00			APBD
1 03 08 2.01 4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 03 08 2.01 6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	4 unit	-	60,000,000.00		
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	2 unit	200,000,000.00	500,000,000.00		APBD
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan (TPA & TPST)	28.57%	15,000,000.00	300,000,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang beroperasi	1 unit	15,000,000.00	300,000,000.00		
1 03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten / Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	-	200,000,000.00		APBD
1 03 04 2.01 04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS		Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	1 unit	15,000,000.00	100,000,000.00		APBD
1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan yang tertangani	35.71%	5,000,000,000.00		- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penataan Bangunan dan lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota yang tertangani tahun n	100%	5,000,000,000.00			
1 03 09 2.01 03	Penataan bangunan dan lingkungan		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	5,000,000,000.00			APBD
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					12,678,600,570.00	9,374,800,000.00	
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN					12,678,600,570.00	9,374,800,000.00	
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	6,236,220,000.00	6,453,800,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 04 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,805,000,000.00	3,510,000,000.00		
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3,800,000,000.00	3,500,000,000.00		APBD
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 04 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
1 04 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 04 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	240,000,000.00	2,500,000.00		
1 04 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	240,000,000.00	2,500,000.00		APBD
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	30,000,000.00	44,500,000.00		
1 04 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	28 orang	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	21,000,000.00	21,000,000.00		APBD
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	293,000,000.00	887,500,000.00		
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25,000,000.00	275,000,000.00		APBD
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 04 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	25,000,000.00	45,000,000.00		APBD
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	200,000,000.00	500,000,000.00		APBD
1 04 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,771,290,000.00	1,917,170,000.00		
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	117,000,000.00	117,000,000.00		APBD
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,627,290,000.00	1,748,170,000.00		APBD
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	79,930,000.00	58,130,000.00		
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	30,000,000.00	8,200,000.00		APBD
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 unit	7,930,000.00	7,930,000.00		APBD
1 04 01 2.09 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
1 04 01 2.09 11	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	35,000,000.00	35,000,000.00		APBD
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	100%	959,250,000.00	337,500,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	100%	200,000,000.00	200,000,000.00		
1 04 02 2.01 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	90,000,000.00	90,000,000.00		APBD
1 04 02 2.01 2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi	1 Dokumen	90,000,000.00	90,000,000.00		APBD
1 04 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 04 02 2.01 05	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan		Persentase izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan	100 persen	113,000,000.00			
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 laporan	113,000,000.00			APBD
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah yang dibangun dan direhabilitasi bagi Korban bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Unit	646,250,000.00	137,500,000.00		
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	151,250,000.00	137,500,000.00		APBD
1 04 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	495,000,000.00	495,000,000.00		APBD
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	3.23%	1,244,000,000.00	1,163,500,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		Persentase Izin pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100%	183,500,000.00	113,500,000.00		
1 04 03 2.01 2	Penyusunan dan/atau Review serta legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terreview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	70,000,000.00	-		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
1 04 03 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	113,500,000.00	113,500,000.00		APBD
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Kali	250,000,000.00	-		
1 04 03 2.02 2	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	250,000,000.00	-		APBD
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	20.00%	810,500,000.00	1,050,000,000.00		
1 04 03 2.03 1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman KUmuh		Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	250,000,000.00	250,000,000.00		APBD
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kawasan Kumuh Kabupaten	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2 Unit rumah	60,500,000.00	300,000,000.00		APBD
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan Kumuh Kabupaten	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	0.5 ha	500,000,000.00	500,000,000.00		APBD
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	13.30%	1,310,000,000.00	1,150,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun/direhabilitasi pada Daerah Kabupaten/Kota	40 Unit	1,310,000,000.00	1,150,000,000.00		
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	40 Unit rumah	1,210,000,000.00	1,050,000,000.00		APBD & Musren Kec
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	16.7%	2,929,130,570.00	270,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Persentase PSU Perumahan dalam Kondisi baik	100%	2,929,130,570.00	270,000,000.00		
1 04 05 2.01 1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	105,000,000.00	-		APBD
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tanjung, Kec Muntok	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	17 Lokasi	2,774,130,570.00	220,000,000.00		Reses
	- Pembangunan jalan Kel. Sungai Daeng			1 lokasi				Renja
	- Rehabilitasi Jalan Setapak Kp. Senang Hati Rt.003 RW 001, Kel. Sungai Daeng			50 meter				
	- Pembangunan Pagar Kuburan (Sp. Yul, Tempilang)			100 meter				Reses
	- Pembangunan Pagar Kuburan (Kelabat, Paritiga)			100 meter				Reses
	- jalan gang Tajwid Kelurahan Merjelang, Kab. Bangka Barat			210 M				Reses
	- Kampung Jawa RT. 17 Desa Cupat, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses
	- jalan amalyah Rt 03 Rw 02 Kp air terjun, Kab. Bangka Barat			175 M				Reses
	- jalan setapak gang mantri Rt 03 Rw 02 Kp. Air terjun, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
	- gang sukun Rt 03 Rw 02 Kp. Air Terjun, Kab. Bangka Barat			150 M				Reses
	- jalan setapak di rt 01/ rw 02 kelurahan keranggan, Kab. Bangka Barat			250 M				Reses
	- jalan dari perumahan ke belakang MAN, Kab. Bangka Barat			10 M				Reses
	- jalan tirta perumahan, Kab. Bangka Barat			66 M				Reses
	- rt 02/rw 02 kelurahan sungai daeng kecamatan muntok, Kab. Bangka Barat			200 M				Reses
	- Jalan perkuburan PLT Desa Kelabat Kecamatan Parit tiga., Kab. Bangka Barat			195 M				Reses
	- Rumah Ibu Sinta Kelurahan Keranggan, Kab. Bangka Barat			25 M				Reses
	- jl. tugu permai rt 011/rw 005 kelurahan kelapa, Kab. Bangka Barat			400 M				Reses
	- jl. tangsi rt 01 sampai rt 08 kelurahan kelapa kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat			400 M				Reses
1 04 05 2.01 05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15,143,358,750.00	15,019,023,000.00		
	KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				10,651,898,750.00	11,184,153,000.00		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,993,240,000.00	5,325,240,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	4,005,000,000.00	4,010,000,000.00		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		APBD
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 05 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	40,000,000.00	54,500,000.00		
1 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 05 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang	9,500,000.00	9,500,000.00		APBD
1 05 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang	28,500,000.00	28,500,000.00		APBD
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	361,000,000.00	656,500,000.00		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	40,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	45,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
1 05 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	537,220,000.00	537,220,000.00		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42,000,000.00	42,000,000.00		APBD
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	483,220,000.00	483,220,000.00		APBD
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	33,020,000.00	33,020,000.00		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	13,750,000.00	13,750,000.00		APBD
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana/Perbaikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	4,270,000.00	4,270,000.00		APBD
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketertarikan dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	100%	4,585,832,500.00	4,703,633,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100%	4,423,089,300.00	4,479,133,000.00		
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24 Kasus	73,937,000.00	190,390,000.00		APBD
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	62 Kasus	141,378,000.00	277,998,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	31,802,500.00	58,980,000.00		APBD
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	134 Orang	4,141,380,000.00	3,914,765,000.00		APBD
1 05 02 2.01 06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	34,591,800.00	37,000,000.00		APBD
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	162,743,200.00	224,500,000.00		
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walkota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	6 Laporan	-	52,500,000.00		APBD
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60 Laporan	12,743,200.00	22,000,000.00		APBD
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1 Laporan	150,000,000.00	150,000,000.00		APBD
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	32%	1,072,826,250.00	1,155,280,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
			Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	25%				
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	100%				
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	100%	988,926,250.00	1,071,380,000.00		
1 05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	126,226,250.00	208,680,000.00		APBD
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	704,300,000.00	704,300,000.00		APBD
1 05 04 2.01 05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 unit	8,400,000.00	8,400,000.00		APBD
1 05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 persen	10,000,000.00	10,000,000.00		
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran		Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	100 persen	18,900,000.00	18,900,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 05 04 2.03 01	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	18,900,000.00	18,900,000.00		APBD
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	55,000,000.00	55,000,000.00		
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	6 Desa / Kelurahan	55,000,000.00	55,000,000.00		APBD
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				4,491,460,000.00	3,834,870,000.00		
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,102,760,000.00	2,951,690,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2,205,000,000.00	1,510,000,000.00		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ bulan	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00		APBD
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 05 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22,000,000.00	36,500,000.00		
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 Paket	-	12,500,000.00		APBD
1 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Person	346,000,000.00	641,500,000.00		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	45,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	40,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD
1 05 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
1 05 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	489,100,000.00	706,030,000.00		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48,000,000.00	48,000,000.00		APBD
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	429,100,000.00	646,030,000.00		APBD
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	23,660,000.00	23,660,000.00		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	3,660,000.00	3,660,000.00		APBD
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1,388,700,000.00	883,180,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
			Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%				
			Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%				
05 03 2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Ketersediaan data/informasi rawan bencana	100 Person	50,000,000.00	50,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target							
05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	2.769 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD	
1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	1,148,400,000.00	632,880,000.00			
					Terlaksananya Pelayanan pasca bencana	100%					
05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	75,000,000.00	-		APBD	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 orang	19,500,000.00	19,500,000.00		APBD
05	03	2.03	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	1 laporan	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	923,900,000.00	558,380,000.00		APBD
05	03	2.02	09	Penyusunan rencana kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	75,000,000.00			APBD	
05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	25,000,000.00	25,000,000.00		APBD	
1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	175,300,000.00	155,300,000.00			
05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana kab/ kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	110,300,000.00	110,300,000.00		APBD
05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	130 orang	45,000,000.00	25,000,000.00		APBD	
05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Persen	15,000,000.00	45,000,000.00			
05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	5,000,000.00	35,000,000.00		APBD	
05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 laporan	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			9,761,105,000.00	10,230,675,000.00			
				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			9,761,105,000.00	10,218,175,000.00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	6,197,335,000.00	6,608,775,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 06 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4,805,000,000.00	4,810,000,000.00		
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/Bulan	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00		APBD
1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 06 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 06 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
1 06 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
1 06 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	24,000,000.00	38,500,000.00		
1 06 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	-	12,500,000.00		APBD
1 06 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
1 06 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	5,500,000.00	5,500,000.00		APBD
1 06 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22 orang	16,500,000.00	16,500,000.00		APBD
1 06 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	361,000,000.00	656,500,000.00		
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	40,000,000.00		APBD
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 06 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	45,000,000.00		APBD
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD
1 06 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	959,235,000.00	1,038,675,000.00		
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45,675,000.00	45,675,000.00		APBD
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	886,560,000.00	941,000,000.00		APBD
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	31,100,000.00	31,100,000.00		
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
1 06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6,100,000.00	6,100,000.00		APBD
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang aktif	100%	511,000,000.00	511,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1 06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan peningkatan kemampuan potensi	100%	511,000,000.00	511,000,000.00		
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	450,000,000.00	450,000,000.00		APBD
1 06 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	36,000,000.00	36,000,000.00		APBD
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	100%	2,459,000,000.00	2,509,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tokol Ukur					
				Target				
1 06 04 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terseleenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti	100%	2,419,000,000.00	2,439,000,000.00		
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.090 Orang	1,962,000,000.00	1,962,000,000.00		APBD
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Orang	22,000,000.00	22,000,000.00		APBD
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	25,000,000.00	25,000,000.00		APBD
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	60,000,000.00	40,000,000.00		APBD
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	40,000,000.00		APBD
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	200,000,000.00	200,000,000.00		APBD
1 06 04 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Terseleenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	40,000,000.00	70,000,000.00		
1 06 04 2.02 1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	20,000,000.00		APBD
1 06 04 2.02 7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	20,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 06 04 2.02 8	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	20,000,000.00		APBD
1 06 04 2.02 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan	1 dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	247,800,000.00	342,200,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1 06 05 2.01	Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar		Terlaksananya Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	100%	10,000,000.00	30,000,000.00		
1 06 05 2.01 1	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	10,000,000.00		APBD
1 06 05 2.01 2	Rujukan Anak - Anak Terlantar		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 06 05 2.01 3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	10,000,000.00		APBD
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya updating verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan PPKS	100%	237,800,000.00	312,200,000.00		
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	66.506 Orang	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	23.122 Keluarga	10,000,000.00	84,400,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
1 06 05 2.02 03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	286 Keluarga	212,800,000.00	212,800,000.00		APBD
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100%	345,970,000.00	247,200,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	100%	33,750,000.00	37,500,000.00		
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Penggugatan) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	33,750,000.00	37,500,000.00		APBD
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase jumlah taruna siaga bencana dalam penanganan korban bencana, koordinasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana	100%	312,220,000.00	209,700,000.00		
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	104 orang	302,220,000.00	199,700,000.00		APBD
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				116,134,593,380.00	85,186,297,328.00		
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5,827,506,610.00	6,297,397,560.00		
	DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				5,827,506,610.00	6,297,397,560.00		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.271.630.000.00	5.681.570.000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 07 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 07 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2 07 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4,005,000,000.00	4,010,000,000.00		
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		APBD
2 07 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
			Target					
2 07 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 07 01 2.04	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
2 07 01 2.04 04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 09 01 2.03	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,000,000.00	2,500,000.00		
2 09 01 2.03 06	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
2 07 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	62,000,000.00	76,500,000.00		
2 07 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 07 01 2.05 03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 07 01 2.05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	45,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2 07 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	361,000,000.00	656,500,000.00		
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 07 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD
2 07 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
2 07 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	799,310,000.00	878,750,000.00		
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86,400,000.00	86,400,000.00		APBD
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	685,910,000.00	740,350,000.00		APBD
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	25,320,000.00	23,320,000.00		
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	4,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	14,000,000.00	14,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana/Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	7,320,000.00	7,320,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	40%	465,360,560.00	465,360,560.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	5 jenis pelatihan	465,360,560.00	465,360,560.00		
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 orang	465,360,560.00	465,360,560.00		APBD
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	35%	36,218,500.00	64,727,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	5 jenis/ 20 perusahaan	6,218,500.00	14,727,000.00		
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	40 Orang	6,218,500.00	14,727,000.00		APBD
	Kegiatan Penerbitan perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tenaga kerja asing yang memiliki IMTA	0.0375	30,000,000.00	50,000,000.00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah TKA yang melakukan perpanjangan IMTA	15 orang	30,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	100%	54,297,550.00	85,740,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2 07 05 2.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jaminan sosial tenaga kerja	100%	10,000,000.00	10,000,000.00		
2 07 05 2.01 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		persentase kasus perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang diselesaikan	100%	44,297,550.00	75,740,000.00		
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	5 Perkara	6,515,000.00	9,910,000.00		APBD
2 07 05 2.02 03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3 Asosiasi dan Serikat Pekerja	2,262,550.00	5,000,000.00		APBD
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	28,545,000.00	50,000,000.00		APBD
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.682 Orang	6,975,000.00	10,830,000.00		APBD
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,921,010,000.00	5,475,670,000.00		
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4,921,010,000.00	5,475,670,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
21401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,318,680,000.00	4,708,340,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
21401201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
2140120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2140120102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2140120103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2140120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2140120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
21401202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,005,000,000.00	3,010,000,000.00		
2230120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		APBD
2140120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2140120207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2140120208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realsasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
21401203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
2140120306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
21401205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	23,000,000.00	37,500,000.00		
2140120503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5030120510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	5,250,000.00	5,250,000.00		APBD
5030120511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	15,750,000.00	15,750,000.00		APBD
21401206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	293,000,000.00	544,500,000.00		
2140120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2140120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
2140120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2140120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2140120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2140120607	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2140120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000.00	400,000,000.00		APBD
2140120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
21401208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	938,960,000.00	1,040,620,000.00		
2140120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2140120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75,000,000.00	75,000,000.00		APBD
2140120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2140120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	841,960,000.00	923,620,000.00		APBD
21401209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	41,720,000.00	41,720,000.00		
2140120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 unit	15,400,000.00	15,400,000.00		APBD
0120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2140120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2140120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	7,320,000.00	7,320,000.00		APBD
20802	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	40%	135,000,000.00	179,000,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
20802201	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Penerapan PUG di lembaga pemerintah daerah	100%	10,000,000.00	26,500,000.00		
2080220103	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Perangkat Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2080220104	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	-	16,500,000.00		APBD
20802202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Penerapan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi di Lembaga Perempuan	0 Lembaga Perempuan	-	12,500,000.00		
2080220201	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	12,500,000.00		APBD
20802203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan	30 Persen	125,000,000.00	140,000,000.00		
208022032	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0 Orang	-	15,000,000.00		APBD
2080220303	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	125,000,000.00	125,000,000.00		APBD
283	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persen	49,000,000.00	60,000,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 8 3 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dari total kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi	50 Persen	10,000,000.00	10,000,000.00		
2 8 3 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 8 3 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah laporan pengaduan yang dilayani/ditindaklanjuti	100 Persen	25,000,000.00	25,000,000.00		
2 8 3 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2 8 3 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Layanan	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 8 3 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah		Persentase Keikutsertaan lembaga Penyedia Layanan perlindungan perempuan dalam penanganan kasus	60 Persen	14,000,000.00	25,000,000.00		
2 8 3 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	21,000,000.00		APBD
2 8 3 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	48 Orang	12,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 8 3 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	75%	258,330,000.00	278,330,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan Kualitas Keluarga yang aktif	75 Persen	183,330,000.00	203,330,000.00		
2 08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	183,330,000.00	183,330,000.00		APBD
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	20,000,000.00		APBD
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penguatan Lembaga Penyedia Layanan	75 Persen	10,000,000.00	10,000,000.00		
2 08 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit layanan bagi Keluarga	2 unit	65,000,000.00	65,000,000.00		
2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Layanan	65,000,000.00	65,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	60%	2,000,000.00	10,000,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota		Cakupan proses pelaksanaan data gender dan anak	100%	2,000,000.00	10,000,000.00		
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	2,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	75%	128,000,000.00	193,000,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2 08 06 2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga PHA	2 Lembaga PHA	15,000,000.00	15,000,000.00		
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 organisasi	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase penguatan kualitas hidup anak	75 Persen	113,000,000.00	178,000,000.00		
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	80,000,000.00	80,000,000.00		APBD
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	33,000,000.00	33,000,000.00		APBD
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	65,000,000.00		APBD
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	100%	30,000,000.00	47,000,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase keterlibatan pihak lingkup daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Persen	-	10,000,000.00		
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	10,000,000.00		APBD
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah layanan perlindungan khusus bagi anak	100 persen	30,000,000.00	35,000,000.00		
2 08 07 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Layanan Tidak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Layanan	-	5,000,000.00		APBD
2 08 07 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	0 persen	-	2,000,000.00		
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	2,000,000.00		APBD
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				15,252,673,800.00	15,471,411,300.00		
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				15,252,673,800.00	15,471,411,300.00		
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		Terpenuhinya kebutuhan penunjang	100 Persen	14,934,173,800.00	15,074,411,300.00	Memperkuat stabilitas	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Pemerintahan Daerah				Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 09 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 09 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	12,005,000,000.00	12,010,000,000.00		
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/bulan	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00		APBD
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 09 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 09 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
2 09 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 09 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	108,000,000.00	16,500,000.00		
2 09 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 09 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	106 Orang	26,500,000.00	-		APBD
2 09 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	106 Orang	79,500,000.00	-		APBD
2 09 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	426,000,000.00	656,500,000.00		
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1Paket	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2,287,693,800.00	2,319,893,800.00		
2 09 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tokol Ukur					
				Target				
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	98,523,800.00	98,523,800.00		APBD
2 09 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,162,170,000.00	2,169,370,000.00		APBD
2 09 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	90,480,000.00	37,517,500.00		
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	83 Unit	23,500,000.00	23,500,000.00		APBD
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	56,000,000.00	14,017,500.00		APBD
2 09 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	18 Unit	10,980,000.00	10,980,000.00		APBD
2 09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	40%	5,000,000.00		Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2 09 02 2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		persentase penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40%	5,000,000.00			APBD
2 09 02 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 laporan	5,000,000.00			APBD
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		tingkat konsumsi pangan AKE	2100 kkal/kap/hr	50,000,000.00	90,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
		tingkat konsumsi pangan AKP	57 gr/kap/hr					
		Tingkat ketersediaan pangan AKE	1307 kkal/kap/hr					
		Tingkat ketersediaan pangan AKP	60 gr/kap/hr					
2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	90%	25,500,000.00	40,000,000.00		
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4 Laporan	10,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	15,500,000.00	25,000,000.00		APBD
2 09 03 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Tercapainya target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	90%	24,500,000.00	50,000,000.00		
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	9,500,000.00	15,000,000.00		APBD
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	15,000,000.00	35,000,000.00		APBD
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase penanganan daerah rawan pangan	50%	197,500,000.00	225,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		dokumen informasi kerentanan dan ketahanan pangan	1 dokumen	37,500,000.00	55,000,000.00		APBD
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	37,500,000.00	55,000,000.00		APBD
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		dokumen informasi situasi pangan dan gizi kabupaten	1 dokumen	160,000,000.00	170,000,000.00		APBD
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	20,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	140,000,000.00	140,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%	66,000,000.00	82,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Persentase jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	90%	66,000,000.00	82,000,000.00		
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	16,000,000.00	27,000,000.00		APBD
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000.00	55,000,000.00		APBD
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				4,415,000,000.00	1,775,000,000.00		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				4,415,000,000.00	1,775,000,000.00		
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	4,050,000,000.00	1,350,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	4,050,000,000.00	1,350,000,000.00		
2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	3 Dokumen	150,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3,900,000,000.00	1,300,000,000.00		APBD
2 10 08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	50%	100,000,000.00	160,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong		Persentase kecamatan yang tersedia data pemanfaatan tanah kosong	50 persil	100,000,000.00	160,000,000.00		
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Dirinventarisasi.	1 Laporan	100,000,000.00	160,000,000.00		APBD
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	24%	180,000,000.00	180,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Ketersediaan Data Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten	50 persil	180,000,000.00	180,000,000.00		
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	150,000,000.00	150,000,000.00		APBD
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	85,000,000.00	85,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
2 10 04 2.04	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten		Persentase konflik lahan tanah garapan yang di selesaikan	100%	85,000,000.00	85,000,000.00		
2 10 04 2.04 01	Inventarisasi Sengketa ,Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 daerah Kabupaten		Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 10 04 2.04 02	Mediasi Penyelesaian SengketaTanah Garapan dalam 1 Daerah Kabupaten		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten	4 Berita Acara	35,000,000.00	35,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				12,739,014,910.00	12,286,960,510.00		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				12,739,014,910.00	12,286,960,510.00		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.696.810.000.00	5.127.379.000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,805,000,000.00	2,810,000,000.00		
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/ bulan	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00		APBD
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 11 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 11 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
2 11 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 11 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	16,800,000.00	2,500,000.00		
2 11 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 dokumen	16,800,000.00	2,500,000.00		APBD
2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	23,000,000.00	96,500,000.00		
2 11 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 11 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	5,250,000.00	20,000,000.00		APBD
2 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	15,750,000.00	60,000,000.00		APBD
2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	361,000,000.00	658,315,000.00		
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	7,815,000.00		APBD
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 11 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD
2 11 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,393,660,000.00	1,458,814,000.00		
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000.00	6,182,000.00		APBD
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	201,960,000.00	201,960,000.00		APBD
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,164,700,000.00	1,200,672,000.00		APBD
2 11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	80,350,000.00	67,250,000.00		
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	48,700,000.00	35,600,000.00		APBD
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	22,500,000.00	22,500,000.00		APBD
2 11 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	9,150,000.00	9,150,000.00		APBD
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	55 persen	666,000,000.00	266,000,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2 11 02 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang disusun	100 persen	400,000,000.00	-		
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	400,000,000.00	-		APBD
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang disusun	17 persen	266,000,000.00	266,000,000.00		
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	266,000,000.00	266,000,000.00		APBD
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	235,689,000.00	318,033,650.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat	100%	207,614,000.00	268,048,700.00		
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	103,683,500.00	103,683,500.00		APBD
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	14,268,500.00	20,000,000.00		APBD
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	89,662,000.00	144,365,200.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100 persen	28,075,000.00	49,984,950.00		
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	28,075,000.00	49,984,950.00		APBD
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	41,67 persen	23,000,000.00	75,199,950.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan Kelembagaan dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	100 Persen	23,000,000.00	75,199,950.00		
2 11 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 orang	-	25,199,950.00		APBD
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	9,92 Ha	23,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	33%	5,000,000.00	-	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase Penyimpanan sementara Limbah B3 oleh Perusahaan/Badan Usaha	100 persen	5,000,000.00	-		
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	5,000,000.00	-		APBD
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	100 persen	140,989,000.00	186,384,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	140,989,000.00	186,384,000.00		
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	3 Dokumen	65,724,000.00	65,724,000.00		APBD
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	75,265,000.00	120,660,000.00		APBD
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	100 persen	15,000,000.00	15,000,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Persentase Tersesainya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten	100 persen	15,000,000.00	15,000,000.00		
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang	16 persen	32,943,000.00	50,000,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	Sumber Anggaran	
			Program/Kegiatan/Subkegiatan						Keterangan
			Tolok Ukur	Target					
				memperoleh penghargaan lingkungan			ketahanan bencana, dan perubahan iklim		
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	100 persen	32,943,000.00	50,000,000.00			
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	19 Entitas	32,943,000.00	50,000,000.00		APBD	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah sampah yang dikelola	5,208,86 Ton/Thn	6,913,583,910.00	6,238,963,910.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah		Persentase sampah yang dikelola	63.54%	6,913,583,910.00	6,238,963,910.00			
2 11 11 2.01 01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00		APBD	
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 Laporan	6,057,167,810.00	5,409,547,810.00		APBD	
2 11 11 2.01 03	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5,195,86 ton	831,416,100.00	804,416,100.00		APBD	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah komunitas pencinta lingkungan	1 komunitas	10,000,000.00	10,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	100 persen	10,000,000.00	10,000,000.00			
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,670,177,200.00	5,153,050,000.00			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				4,670,177,200.00	5,153,050,000.00			
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,289,610,000.00	4,730,550,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00			
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD	
2 12 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD	
2 12 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD	
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD	
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,305,000,000.00	2,310,000,000.00			
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2,300,000,000.00	2,300,000,000.00		APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
212012.0205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
212012.0207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
212012.0208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
212012.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
212012.0306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
212012.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22,000,000.00	36,500,000.00		
212012.0503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
212012.0510	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
212012.0511	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
212012.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	293,500,000.00	538,500,000.00		
212012.0601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
212012.0603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
212012.0604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	45,000,000.00		APBD
212012.0605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
212012.0606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
212012.0607	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	40,000,000.00		APBD
212012.0609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000.00	400,000,000.00		APBD
212012.0610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,500,000.00	2,500,000.00		APBD
212012.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,606,570,000.00	1,661,010,000.00		
212012.20801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
212012.20802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
212012.20803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	40,000,000.00	40,000,000.00		APBD
212012.20804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,464,570,000.00	1,519,010,000.00		APBD
212012.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	45,540,000.00	150,540,000.00		
212012.21106	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
212012.20909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
212012.20910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 unit	8,540,000.00	8,540,000.00		APBD
21202	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	83,30 persen	297,067,200.00	300,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
212022.201	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	47,000,000.00	59,932,800.00		
212022.20101	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	500 Dokumen	2,000,000.00	20,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
212020104	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	45,000,000.00	39,932,800.00		APBD
212020202	Penataan Pendaftaran Penduduk		Persentase Pelaksanaan Penataan Pendaftaran Penduduk	100%	248,067,200.00	233,067,200.00		
212020202	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	25.000 Dokumen	248,067,200.00	233,067,200.00		APBD
212020204	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk		Persentase pembinaan pendaftaran penduduk yang terseleenggarakan	100 persen	2,000,000.00	7,000,000.00		
21202020402	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	7 Laporan	2,000,000.00	7,000,000.00		APBD
21203	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	67.51%	43,000,000.00	50,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
212030201	Pelayanan Pencatatan Sipil		Persentase pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil	100%	17,000,000.00	24,000,000.00		
21203020102	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	2,000,000.00	9,000,000.00		APBD
21203020105	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
212030202	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	26,000,000.00	26,000,000.00		
21203020201	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2 Laporan	26,000,000.00	26,000,000.00		APBD
21204	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase ketersediaan data kependudukan	66.67%	20,500,000.00	50,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
212040201	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Persentase Data yang terkumpul dan tersaji dengan akurat	100%	7,500,000.00	9,830,000.00		
21204020101	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	5,000,000.00	7,330,000.00		APBD
21204020102	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	2,500,000.00	2,500,000.00		APBD
212040203	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terseleenggara dengan baik	100%	11,000,000.00	29,000,000.00		
21204020305	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0 Laporan	-	18,000,000.00		APBD
21204020308	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1 Dokumen	11,000,000.00	11,000,000.00		APBD
212040204	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100%	2,000,000.00	11,170,000.00		
21204020401	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	2,000,000.00	11,170,000.00		APBD
21205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase ketersediaan profil kependudukan	100%	20,000,000.00	22,500,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
212050201	Penyusunan Profil Kependudukan		Persentase Penyusunan profil kependudukan	100%	20,000,000.00	22,500,000.00		
21205020101	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	2,500,000.00		APBD
21205020102	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1,444,842,500.00	1,719,842,500.00		
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1,444,842,500.00	1,719,842,500.00		
2 13 02	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	100%	75,000,000.00	20,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 13 02 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa		Terlaksananya penyelenggaraan penataan desa	60 Desa	75,000,000.00	20,000,000.00		
2 13 02 2.01 01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	40,000,000.00	-		APBD
2 13 02 2.01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	60 Desa	25,000,000.00	-		APBD
2 13 02 2.01 03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	60 Desa	10,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2 13 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase kerja sama yang diimplementasi	31.67%	65,000,000.00	100,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 13 03 2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah kerjasama yang terbentuk antar desa	15 kerjasama	65,000,000.00	100,000,000.00		
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	10,000,000.00	25,000,000.00		APBD
2 13 03 2.01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	13 Dokumen	35,000,000.00	35,000,000.00		APBD
2 13 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	100%	454,842,500.00	549,842,500.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	60 desa	454,842,500.00	549,842,500.00		
2 13 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	12,780,000.00	12,780,000.00		APBD
2 13 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	24,515,000.00	24,515,000.00		APBD
2 13 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	14,297,500.00	74,297,500.00		APBD
2 13 04 2.01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	87,750,000.00	87,750,000.00		APBD
2 13 04 2.01 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan	1 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2 13 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 13 04 2.01 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	20,000,000.00	-		APBD
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Profil Desa	60 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 13 04 2.01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	35,000,000.00	70,000,000.00		APBD
2 13 04 2.01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	71 Orang	50,500,000.00	50,500,000.00		APBD
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	80,000,000.00	100,000,000.00		APBD
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	75%	850,000,000.00	1,050,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 13 05 2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah		Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	50%	850,000,000.00	1,050,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
			Program/Kegiatan/Subkegiatan									
			Tolok Ukur	Target								
	Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Lembaga adat desa yang aktif	13 lembaga adat								
			Alat Teknologi Tepat Guna yang dimanfaatkan	2 alat								
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60 Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00		APBD
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	150,000,000.00		APBD
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	7 Dokumen	245,000,000.00	245,000,000.00		APBD
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	80,000,000.00	80,000,000.00		APBD
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0 Laporan	-	50,000,000.00		APBD
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	500,000,000.00	500,000,000.00		APBD
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				977,675,660.00	1,048,740,000.00		
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELURGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				977,675,660.00	1,048,740,000.00		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	1	40,935,660.00	57,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2	14	02	2.01		Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase jumlah kebijakan terkait kuantitas penduduk di Pemerintah daerah dengan jumlah kebijakan yang disusun Pemerintah Provinsi	100 Persen	5,000,000.00	5,000,000.00		
2	14	02	2.01	01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2	14	02	2.02		Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pengendalian penduduk yang dimanfaatkan terhadap total dokumen pengendalian penduduk yang disusun	100 persen	35,935,660.00	52,000,000.00		
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	35,935,660.00	46,000,000.00		APBD
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (MCP)	80.08	642,740,000.00	642,740,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 persen	75,330,000.00	75,330,000.00		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target				
			Tolok Ukur	Target				
2140320102	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2140320103	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Unit	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2140320104	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	63,330,000.00	63,330,000.00		APBD
2140320106	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2140320107	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2140320108	Pengendalian Program KKBPK		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
21403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PLKB yang aktif terhadap PLKB yang ada		421,296,000.00	421,296,000.00		
2140320203	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	419,296,000.00	419,296,000.00		APBD
2140320204	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	264 Orang	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
21403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	145,114,000.00	145,114,000.00		
2140320301	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	139,990,000.00	139,990,000.00		APBD
2140320302	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	20 Orang	2,500,000.00	2,500,000.00		APBD
2140320303	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50 Orang	500,000.00	500,000.00		APBD
2140320306	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2140320308	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	124,000.00	124,000.00		APBD
21403204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	100 Persen	1,000,000.00	1,000,000.00		
2140320403	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	15 Kampung	1,000,000.00	1,000,000.00		APBD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	79%	294,000,000.00	349,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
			Persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	80%				
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pemandangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	249,000,000.00	289,000,000.00		
2 14 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Unit	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	108 Orang	40,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	465 Orang	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	113 Kelompok	170,000,000.00	170,000,000.00		APBD
2 14 04 2.01 08	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutan serta pengelolaan keuangan keluarga)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	35,000,000.00	75,000,000.00		APBD
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Persen	45,000,000.00	60,000,000.00		
2 14 04 2.02 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakkan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakkan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan	-	15,000,000.00		APBD
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	45,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				6,468,488,700.00	5,725,000,000.00		
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN				6,468,488,700.00	5,725,000,000.00		
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	25.77%	5,873,488,700.00	5,305,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
2 15 02 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Kabupaten	20%	2,270,000,000.00	1,740,000,000.00		
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Air Belo, Kec Muntok serta Mislak dan Sinar Manik Kec Jebus, Kab. Babar	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	103 unit	1,030,000,000.00	500,000,000.00		Reses
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	725 Unit	1,240,000,000.00	1,240,000,000.00		APBD
2 15 02 2.03	Pengelolaan Terminal Tipe C		Persentase Terminal Tipe C dalam Kondisi Baik	100%	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan pendukung)		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 15 02 2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20%	248,488,700.00	150,000,000.00		
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	10 unit	48,488,700.00	50,000,000.00		APBD
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	50,000,000.00	-		APBD
2 15 02 2.05 02	Peningkatan Kapasitas SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 org	50,000,000.00	-		APBD
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00		APBD
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	75,000,000.00	75,000,000.00		APBD
2 15 02 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	60,000,000.00	120,000,000.00		
2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	30 Peserta	-	60,000,000.00		APBD
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	10 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 15 02 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	295,000,000.00	295,000,000.00		
2 15 02 2.08 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ		Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang	45,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3 Laporan	250,000,000.00	250,000,000.00		APBD
2 15 02 2.08 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	- Peserta	-	50,000,000.00		APBD
2 15	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	100%	595,000,000.00	420,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
2 15 03 2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Kondisi Baik	100%	595,000,000.00	420,000,000.00		
2 15 03 2.12 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dokumen	260,000,000.00	35,000,000.00		APBD
2 15 03 2.12 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	-	50,000,000.00		APBD
2 15 03 2.12 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Laporan	35,000,000.00	35,000,000.00		APBD
15 03 2.12 05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersedia	1 Unit	300,000,000.00	300,000,000.00		APBD
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,360,060,000.00	8,059,090,000.00		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,360,060,000.00	8,059,090,000.00		
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,172,500,000.00	4,368,400,000.00	Memperkuat stabilitas Poltuhkankam dan transformasi pelayanan publik	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 16 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,805,000,000.00	2,810,000,000.00		
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00		APBD
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 16 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
2 16 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 16 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	62,000,000.00	76,500,000.00		
2 16 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 16 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 16 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	45,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	343,000,000.00	538,500,000.00		
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 16 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	400,000,000.00		APBD
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	871,800,000.00	837,700,000.00		
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94,500,000.00	94,500,000.00		APBD
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	755,300,000.00	701,200,000.00		APBD
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	73,700,000.00	71,700,000.00		
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	4,000,000.00	2,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	57,500,000.00	57,500,000.00		APBD
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	12,200,000.00	12,200,000.00		APBD
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	840	711,660,000.00	1,143,790,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	600 Informasi	711,660,000.00	1,143,790,000.00		
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	10,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	28,000,000.00	38,755,000.00		APBD
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan media komunikasi publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	76,660,000.00	30,000,000.00		APBD
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	147,000,000.00	204,932,000.00		APBD
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	-	127,975,000.00		APBD
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	450,000,000.00	722,128,000.00		APBD
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	40%	2,475,900,000.00	2,546,900,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 16 03 2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah OPD dan Desa/Kelurahan yang memiliki domain dan sub domain yang telah ditetapkan	64%	305,000,000.00	305,000,000.00		
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7 Unit	275,000,000.00	275,000,000.00		APBD
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan e-government yang dikelola	45 Layanan e-government	2,170,900,000.00	2,241,900,000.00		
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1,800,000,000.00	2,000,000,000.00		APBD
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	100,000,000.00	109,000,000.00		APBD
2 16 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	12,000,000.00	25,000,000.00		APBD
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	238,900,000.00	42,900,000.00		APBD
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	10,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10,000,000.00	35,000,000.00		APBD
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5,682,995,000.00	5,146,165,000.00		
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN				5,682,995,000.00	5,146,165,000.00		
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,208,786,000.00	4,526,476,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 17 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2170120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2090120102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2090120103	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2170120106	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2170120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
21701202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,205,000,000.00	2,910,000,000.00		
2170120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	3,200,000,000.00	2,900,000,000.00		APBD
2170120205	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2170120207	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2170120208	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
20901203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
2090120306	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
20901203	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	40,000,000.00	2,500,000.00		
2090120306	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 dokumen	40,000,000.00	2,500,000.00		APBD
20901205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	23,000,000.00	16,500,000.00		
2090120503	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2090120503	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	5,250,000.00	-		APBD
2090120503	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 orang	15,750,000.00	-		APBD
21701206	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	293,000,000.00	538,360,000.00		
2170120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2170120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
2170120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2170120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
2170120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	4,860,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2170120607	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2170120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000.00	400,000,000.00		APBD
2170120609	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
21701208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,590,416,000.00	975,616,000.00		
2170120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2170120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	119,776,000.00	119,776,000.00		APBD
2170120804	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2170120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,448,640,000.00	813,840,000.00		APBD
21701209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	40,370,000.00	52,000,000.00		
2170120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2170120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	28,000,000.00	50,000,000.00		APBD
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	10,370,000.00	5,000,000.00		APBD
21703	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	59.62%	28,170,000.00	43,400,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
21703201	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2 Kegiatan	28,170,000.00	43,400,000.00		
2170320102	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	5 unit usaha	28,170,000.00	43,400,000.00		APBD
21706	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	50.82%	60,000,000.00	130,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
21706201	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang di berdayakan dan memperoleh Perlindungan yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.82%	60,000,000.00	130,000,000.00		
2170620101	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 orang	60,000,000.00	130,000,000.00		APBD
21705	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	19.23%	37,500,000.00	83,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.23%	37,500,000.00	83,000,000.00		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	37,500,000.00	83,000,000.00		APBD

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
			Program/Kegiatan/Subkegiatan								
			Tolok Ukur	Target							
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	5.45%	10,000,000.00	20,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0.81%	5,000,000.00	20,000,000.00					
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD			
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0.81%	5,000,000.00	10,000,000.00					
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD			
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	30%	5,000,000.00	20,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya	55 unit	5,000,000.00	20,000,000.00					
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 unit usaha	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD			
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	unit usaha	-	15,000,000.00		APBD			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	4%	78,450,000.00	191,200,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang dinilai kesehatannya	100%	78,450,000.00	191,200,000.00		
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 unit usaha	40,950,000.00	8,200,000.00	APBD
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	unit usaha	-	100,000,000.00	APBD
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 unit usaha	37,500,000.00	83,000,000.00	APBD
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	3.45%	255,089,000.00	255,089,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Peningkatan Unit Skala Usaha UMI	1 Kegiatan	255,089,000.00	255,089,000.00		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100 unit usaha	255,089,000.00	255,089,000.00	APBD

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				576,549,000.00	635,895,000.00		
	DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				576,549,000.00	635,895,000.00		
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase peningkatan layanan penanaman modal	8.21%	90,000,000.00	90,000,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Pemetaan potensi dan Peluang Investasi	1 Peta Potensi Daerah	90,000,000.00	90,000,000.00		
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	90,000,000.00	90,000,000.00		APBD
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	70%	297,954,000.00	305,000,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 kali	297,954,000.00	305,000,000.00		
18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	292,954,000.00	300,000,000.00		APBD
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	81	168,595,000.00	220,895,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		jumlah perizinan berusaha beresiko yang dikeluarkan	1000 izin	168,595,000.00	220,895,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2180420101	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	900 Pelaku Usaha	90,745,000.00	117,565,000.00		APBD
2180420102	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	77,850,000.00	103,330,000.00		APBD
21805	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	21%	20,000,000.00	20,000,000.00	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	
21805201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	1 laporan	20,000,000.00	20,000,000.00		
2180520101	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Kegiatan Usaha	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2180520102	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	220 Pelaku Usaha	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2180520103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				33,662,500,000.00	2,900,000,000.00		
	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				33,662,500,000.00	2,900,000,000.00		
2193	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Pencab Aktif	28	33,362,500,000.00	2,900,000,000.00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	
2193202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2 event	500,000,000.00	900,000,000.00		
21932021	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen		900,000,000.00		APBD
21932022	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500,000,000.00			APBD
21903203	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2 Cabor	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00		
2190320304	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota		Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	122 orang	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00		APBD
2193204	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga		Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat provinsi	50%	30,062,500,000.00	2,000,000,000.00		
21932042	Pengembangan organisasi keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	30,062,500,000.00	2,000,000,000.00		APBD
2193205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 cabang	50,000,000.00	50,000,000.00		
21932051	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2194	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Fasilitas Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	5	300,000,000.00	300,000,000.00		
2194201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		Jumlah Gugus Depan yang Berpartisipasi dalam Organisasi Kepramukaan	80 gugus depan	300,000,000.00	300,000,000.00		
21942018	Partisipasi dan keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan		Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	300,000,000.00	300,000,000.00		APBD
220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				129,000,000.00	188,090,000.00		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				129,000,000.00	188,090,000.00		
22002	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	70%	129,000,000.00	188,090,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	70%	129,000,000.00	188,090,000.00		
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	32,000,000.00	47,050,000.00		APBD
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral		Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	57,000,000.00	82,940,000.00		APBD
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	31 Orang	31,000,000.00	44,800,000.00		APBD
2 20 02 2.01 05	Pengembangan Infrastruktur		Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	9,000,000.00	13,300,000.00		APBD
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				76,000,000.00	91,135,000.00		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				76,000,000.00	91,135,000.00		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	40%	76,000,000.00	91,135,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mempunyai keamanan informasi	10.34%	55,000,000.00	60,000,000.00		
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah	25,000,000.00	25,000,000.00		APBD
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang mempunyai akun Government Secured Intramail	2 OPD	21,000,000.00	31,135,000.00		
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	21,000,000.00	31,135,000.00		APBD
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6,260,590,000.00	6,531,270,000.00		
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				6,260,590,000.00	6,531,270,000.00		
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,751,070,000.00	5,008,070,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 22 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 22 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 22 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2 22 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,405,000,000.00	3,410,000,000.00		
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00		APBD
2 22 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 22 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 22 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 22 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
2 22 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 22 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	27,000,000.00	2,500,000.00		
2 22 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	27,000,000.00	2,500,000.00		APBD
2 22 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	29,000,000.00	43,500,000.00		
2 22 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 22 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27 orang	6,750,000.00	6,750,000.00		APBD
2 22 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 orang	20,250,000.00	20,250,000.00		APBD
2 22 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	345,000,000.00	572,000,000.00		
2 22 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	7,500,000.00	4,000,000.00		APBD
2 22 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
2 22 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	73,500,000.00	78,500,000.00		APBD
2 22 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
2 22 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 22 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 22 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000.00	400,000,000.00		APBD
2 22 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
2 22 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	886,420,000.00	906,420,000.00		
2 22 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 22 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250,800,000.00	250,800,000.00		APBD
2 22 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 22 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	613,620,000.00	613,620,000.00		APBD
2 22 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	41,650,000.00	39,650,000.00		
2 22 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	6,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 22 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	22,500,000.00	22,500,000.00		APBD
2 22 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	9,150,000.00	9,150,000.00		APBD

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 22 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	10.46%	435,000,000.00	500,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2 22 02 2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitasi acara Adat dan Kesenian	10 Fasilitasi	240,000,000.00	320,000,000.00		
2 22 02 2.01 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	16 Objek	240,000,000.00	300,000,000.00		Renja
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	-	20,000,000.00		APBD
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi atas pelaku seni berprestasi	20 ceremoni	95,000,000.00	80,000,000.00		
2 22 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat	95,000,000.00	80,000,000.00		APBD
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga adat yang dibina	1 Lembaga Adat	100,000,000.00	100,000,000.00		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat		Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	34 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	1	150,000,000.00	280,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah fasilitasi kesenian kepada masyarakat pada tahun n	1	150,000,000.00	280,000,000.00		
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	12 Orang	150,000,000.00			APBD
	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat	-	230,000,000.00		APBD
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	50,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang dikelola dan atau dipublikasi	2	150,000,000.00	150,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal yang dilakukan	2	150,000,000.00	150,000,000.00		
2 22 04 2.01 01	Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	200 Orang	87,325,000.00	87,325,000.00		APBD
2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	62,675,000.00	62,675,000.00		APBD
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Persentase cagar budaya yang dilestarikan	61%	466,980,000.00	454,980,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	4%	112,000,000.00	100,000,000.00		
2 22 05 2.01	Pendaftaran objek diduga cagar budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	12,000,000.00	100,000,000.00		APBD
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya		Objek diduga cagar budaya yang dikaji dan ditetapkan sebagai CB dengan SK Kepala Daerah	4 Objek	100,000,000.00			APBD
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	17 CB	354,980,000.00	354,980,000.00		
2 22 05 2.02 01	Peindungan Cagar Budaya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	17 Objek	354,980,000.00	354,980,000.00		APBD
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase museum dalam kondisi baik	100%	307,540,000.00	138,220,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 22 06 1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		Jumlah Museum yang dikelola	100%	307,540,000.00	138,220,000.00		
2 22 06 2.01 01	Peindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Peindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	3 Unit	75,000,000.00	75,000,000.00		APBD
2 22 06 2.01 02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	7 Orang	202,540,000.00	33,220,000.00		APBD
2 22 06 2.01 03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 22 06 2.01 04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5,440,510,000.00	6,348,180,458.00		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				5,440,510,000.00	6,014,780,458.00		
2 23 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,107,520,000.00	5,464,520,000.00	Memperkuat stabilitas Polihukankam dan transformasi pelayanan publik	
2 23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
2 23 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 23 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 23 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 23 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2 23 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 23 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,005,000,000.00	3,010,000,000.00		
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00		APBD
2 23 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 23 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 23 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
23 01 2.02	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
2 22 01 2.02 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
23 01 2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22,000,000.00	36,500,000.00		
2 22 01 2.02 02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
2 22 01 2.02 05	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 22 01 2.02 02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 23 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	361,000,000.00	656,500,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 23 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	45,000,000.00		APBD
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD
2 23 01 2.06 09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
2 23 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	 12 bulan	 1,579,170,000.00	 1,604,170,000.00		
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 23 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250,000,000.00	250,000,000.00		APBD
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,302,170,000.00	1,302,170,000.00		APBD
2 23 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	 12 bulan	 123,350,000.00	 123,350,000.00		
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
2 23 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	31 Unit	21,350,000.00	21,350,000.00		APBD
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		 Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	 46.84%	 282,990,000.00	 500,260,458.00	 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
			 Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	 15.38%				
			 Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	 10.43%				
2 23 02 2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		 Indeks Kepuasan Masyarakat	 Sangat Baik	 139,660,000.00	 217,400,000.00		
			 Jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi minimal B	 16 SD 15 SMP				
			 Jumlah perpustakaan Desa yang terakreditasi minimal B	 11 Desa				
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	-	30,000,000.00		
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	500 Eksemplar	41,340,000.00	100,000,000.00		APBD
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2000 Eksemplar	77,320,000.00	60,000,000.00		APBD
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	6 Perpustakaan	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	21 Perpustakaan	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	11,000,000.00	17,400,000.00		APBD
2 23 02 2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum dan sekolah	4.23	143,330,000.00	282,860,458.00		
			masyarakat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan promosi budaya baca	1,400				
2 23 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	6 Lokus	83,330,000.00	156,860,458.00	Usulan Msurenbang Kecamatan peningkatan kapasitas SDM perpustakaan di Desa Sekar Biru dialihkan ke sub kegiatan ini	APBD
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	10,000,000.00	16,000,000.00		APBD
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	30,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Budaya Membaca		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang	-	40,000,000.00		APBD
2 23 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kejadiannya	1 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	0	50,000,000.00	50,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
2 23 03 2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya naskah kuno yang dapat dijadikan referensi dan daya tarik wisata pendidikan di perpustakaan daerah	0	20,000,000.00	20,000,000.00		
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	18 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2 23 03 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Tersedianya naskah kuno khas daerah di perpustakaan daerah yang sudah divalidasi oleh perpunas	1 dok	30,000,000.00	30,000,000.00		
2 23 03 2.02 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	15 Eksemplar	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				230,000,000.00	333,400,000.00		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				230,000,000.00	333,400,000.00		
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	50%	155,000,000.00	198,400,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
			Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	6.25%				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
			Target					
			Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%				
			Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDi)	100%				
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya kualitas tertib arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	65%	105,000,000.00	128,400,000.00		
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	600 berkas	5,000,000.00	74,900,000.00		APBD
	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	8000 berkas	50,000,000.00	53,500,000.00		APBD
	2.01 03	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	2 Laporan	50,000,000.00			APBD
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	Meningkatnya sistem pelayanan kearsipan berbasis informasi teknologi dan komunikasi	20 OPD	50,000,000.00	70,000,000.00		
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7 pengguna	10,000,000.00	30,000,000.00		APBD
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 laporan	40,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	5	70,000,000.00	130,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		Meningkatnya kualitas manajemen kearsipan melalui penyusunan JRA	15%	15,000,000.00	60,000,000.00		
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 arsip	5,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 24 03 2.01 02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 berkas	10,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 24 03 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Tersedianya Daftar Pencarian Arsip (DPA) arsip statis/sejarah peembentukan Kabupaten Bangka Barat	100%	50,000,000.00	40,000,000.00		
2 24 03 2.04 01	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	5 arsip	40,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 24 03 2.04 02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip		Jumlah Daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	5 Arsip	10,000,000.00			APBD
2 24 03 2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		Meningkatnya kualitas penilaian dan penetapan arsip statis daerah yang dinyatakan hilang yang sesuai dengan NSPK	1 Tema	5,000,000.00	30,000,000.00		
2 24 03 2.05 03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 arsip	5,000,000.00	30,000,000.00		APBD
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	7 kali	5,000,000.00	5,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		Diterbitkannya izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK	7	5,000,000.00	5,000,000.00		
	Penyediaan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	7 arsip	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				9,906,919,050.00	9,374,903,450.00		
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				4,041,830,000.00	4,085,485,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran		
			Program/Kegiatan/Subkegiatan							
			Tolok Ukur	Target						
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				4.041.830.000.00	4.085.485.000.00				
3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
				Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.080.420.000.00	3.243.485.000.00	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik		
3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14.000.000.00	28.000.000.00			
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.000.000.00	10.000.000.00	APBD
3	25	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000.00	2.000.000.00	APBD
3	25	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1.000.000.00	2.000.000.00	APBD
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4.000.000.00	8.000.000.00	APBD
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3.000.000.00	6.000.000.00	APBD
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.005.000.000.00	2.010.000.000.00			
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/Bulan	2.000.000.000.00	2.000.000.000.00	APBD
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1.000.000.00	2.000.000.00	APBD
3	25	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2.000.000.00	4.000.000.00	APBD
3	25	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2.000.000.00	4.000.000.00	APBD
3	25	1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	7.500.000.00	7.500.000.00			
3	25	1	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	7.500.000.00	7.500.000.00	APBD
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	15.000.000.00	16.500.000.00			
3	25	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2.000.000.00	4.000.000.00	APBD
3	25	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13 orang	3.250.000.00	-	APBD
3	25	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 orang	9.750.000.00	-	APBD
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	291.000.000.00	418.000.000.00			
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.000.000.00	2.000.000.00	APBD
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.000.000.00	6.000.000.00	APBD
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000.00	40.000.000.00	APBD
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000.00	30.000.000.00	APBD
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.000.000.00	5.000.000.00	APBD
3	25	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25.000.000.00	35.000.000.00	APBD
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000.00	300.000.000.00	APBD
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	711.700.000.00	726.515.000.00			
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000.00	2.000.000.00	APBD
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	111.400.000.00	111.400.000.00	APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	578,300,000.00	593,115,000.00		APBD
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	36,220,000.00	36,970,000.00		
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	3,400,000.00	4,150,000.00		APBD
3 25 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	3,000,000.00	3,000,000.00		APBD
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
3 25 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	7,320,000.00	7,320,000.00		APBD
3 25 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	7,500,000.00	7,500,000.00		APBD
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Produksi Perikanan Tangkap	40,107 Ton/Tahun	391,750,000.00	147,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	9 Persen	214,750,000.00	-		
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	214,750,000.00	-		APBD
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kelompok Nelayan Nelayan yang dibina	12 KUB	162,000,000.00	132,000,000.00		
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	32 orang	62,000,000.00	32,000,000.00		APBD
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	12 Kelompok	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
3 25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 unit usaha	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	100%	15,000,000.00	15,000,000.00		
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 layanan	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Produksi Perikanan Budidaya	219,41 Ton/Tahun	345,430,000.00	360,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	100%	200,000,000.00	100,000,000.00		
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 kelompok	200,000,000.00	100,000,000.00		APBD
3 25 04 2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	10 Persen	145,430,000.00	260,000,000.00		
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 unit	93,330,000.00	50,000,000.00		APBD
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	2,100,000.00	-		Reses

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	0 dokumen	-	10,000,000.00		APBD
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 orang	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	0 ha	-	150,000,000.00		APBD
3 25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		Persentase ketataan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	70%	140,730,000.00	250,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 25 05 2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		Persentase Kepatuhan Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya terhadap hukum	70 Persen	140,730,000.00	250,000,000.00		
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	90,730,000.00	200,000,000.00		APBD
3 25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	18%	83,500,000.00	85,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 25 06 2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)	18 Persen	63,500,000.00	65,000,000.00		
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2 dokumen	63,500,000.00	65,000,000.00		APBD
3 25 06 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	18 Persen	20,000,000.00	20,000,000.00		
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	40 unit usaha	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				2,480,550,000.00	2,252,220,000.00		
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				2,480,550,000.00	2,252,220,000.00		
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Peningkatan jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)	7 DTW	1,343,050,000.00	1,249,720,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Potensi Daya Tarik wisata yang dikembangkan	10 DTW	66,290,000.00	56,290,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 dokumen	80,000,000.00	80,000,000.00		APBD
3 27 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 laporan	60,000,000.00	60,000,000.00		APBD
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	3 Unit	610,000,000.00	170,000,000.00		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1 unit	90,000,000.00	90,000,000.00		APBD
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	520,000,000.00	80,000,000.00		APBD
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten	1 dokumen	3,000,000.00	6,000,000.00		
3 27 03 2.03 02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	100%	155,500,000.00	155,500,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		dokumen pemetaan penyakit hewan menular dan zoonosis di wilayah Kabupaten Bangka Barat	1 dokumen	122,500,000.00	122,500,000.00		
3 27 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 laporan	102,000,000.00	102,000,000.00		APBD
3 27 04 2.01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 laporan	20,500,000.00	20,500,000.00		APBD
3 27 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan		Jumah Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	1 Kegiatan	33,000,000.00	33,000,000.00		
3 27 04 2.05 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	1 laporan	33,000,000.00	33,000,000.00		APBD
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	25%	275,000,000.00	275,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	100%	275,000,000.00	275,000,000.00		
3 27 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	350 Ha	275,000,000.00	275,000,000.00		APBD
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase pengendalian izin usaha pertanian	100%	16,200,000.00	20,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten	100%	16,200,000.00	20,000,000.00		
3 27 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 laporan	16,200,000.00	20,000,000.00		APBD
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	100%	148,410,000.00	206,785,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		persentase penyelenggaraan penyuluhan pertanian	100%	148,410,000.00	206,785,000.00		
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 unit	36,000,000.00	36,000,000.00		APBD
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 unit	36,000,000.00	63,675,000.00		APBD
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6 unit	67,110,000.00	67,110,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tokol Ukur					
				Target				
3 27 07 2.01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 unit	9,300,000.00	10,000,000.00		APBD
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 unit	-	30,000,000.00		Musren Kecamatan
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				614,790,250.00	849,574,650.00		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				614,790,250.00	849,574,650.00		
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	4	614,790,250.00	849,574,650.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 28 04 2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		Persentase Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	100 persen	614,790,250.00	849,574,650.00		
3 28 04 2.01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	12 operasi	254,790,250.00	254,575,000.00		APBD
3 28 04 2.01 05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	2 Ha	-	209,999,850.00		APBD
3 28 04 2.01 07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota		Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	4 dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
3 28 04 2.01 08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	5 desa	-	24,999,800.00		APBD
3 28 04 2.01 11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	2 dokumen	350,000,000.00	350,000,000.00		APBD
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				794,998,800.00	461,283,800.00		
3 30	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN				794,998,800.00	461,283,800.00		
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	50%	111,705,000.00	11,705,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 30 3 2.02	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		jumlah saarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	2 unit	100,000,000.00			
3 30 03 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	100,000,000.00			APBD
3 30 3 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Akses Distribusi perdagangan yang tertib dan Kondusif	1 Kegiatan	11,705,000.00	11,705,000.00		
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	11,705,000.00	11,705,000.00		APBD
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.90%	92,270,000.00	100,675,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Terkendalinya harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan barang penting di pasar wilayah Kabupaten Bangka Barat	3 kegiatan	80,100,000.00	82,675,000.00		
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	17,725,000.00	18,000,000.00		APBD
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	13,375,000.00	15,675,000.00		APBD
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	49,000,000.00	49,000,000.00		APBD
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengawasan pupuk dan pestisida di Kab.Bangka Barat	6 kecamatan	12,170,000.00	18,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	12,170,000.00	18,000,000.00		APBD
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	20 persen	136,125,000.00	185,300,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pameran yang Diikuti	2 kegiatan	136,125,000.00	185,300,000.00		
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 pelaku usaha	85,550,000.00	120,050,000.00		APBD
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 pelaku usaha	50,575,000.00	65,250,000.00		APBD
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	100%	399,898,800.00	163,603,800.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2 kegiatan	399,898,800.00	163,603,800.00		
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	520 unit	351,843,800.00	101,843,800.00		APBD
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 orang	48,055,000.00	61,760,000.00		APBD
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	100%	40,000,000.00	60,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	2 Kegiatan	40,000,000.00	60,000,000.00		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	80 UMKM	40,000,000.00	60,000,000.00		APBD
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase rekomendasi yang diterbitkan	100%	15,000,000.00	50,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	25%	15,000,000.00	-		
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang terfasilitasi	1 Dokumen	15,000,000.00	-		APBD
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	1 Dokumen	-	50,000,000.00		
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	-	50,000,000.00		APBD
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				317,540,000.00	374,625,000.00		
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN				317,540,000.00	374,625,000.00		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Jumlah Sentra IKM	1 Sentra	256,575,000.00	256,575,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tokol Ukur					
			Jumlah Dokumen yang disusun	Target				
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dok	256,575,000.00	256,575,000.00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	206,575,000.00	206,575,000.00		Renja
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	100%	39,665,000.00	77,450,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri	2 Kegiatan	39,665,000.00	77,450,000.00		
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	100 dokumen	22,740,000.00	46,450,000.00		APBD
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	50 dokumen	16,925,000.00	31,000,000.00		APBD
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	50%	21,300,000.00	40,600,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Ketersediaan Sistem Informasi Industri	1 Kegiatan	21,300,000.00	40,600,000.00		
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	21,300,000.00	40,600,000.00		APBD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				79,936,678,689.00	80,419,657,383.00		
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				29,207,069,159.00	29,091,047,853.00		
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	23,139,297,800.00	24,645,605,901.00	Memperkuat stabilitas Poltuhkankam dan transformasi pelayanan publik	
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
4 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	10,005,000,000.00	10,010,000,000.00		
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/Bulan	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
4 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	3,000,000.00	6,000,001.00		
4 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,001.00		APBD
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	72,000,000.00	104,300,000.00		
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
4 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	17,500,000.00	17,500,000.00		APBD
4 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	52,500,000.00	52,500,000.00		APBD
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2,474,736,000.00	3,400,236,000.00		
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	70,000,000.00	70,000,000.00		APBD
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	120,000,000.00	120,000,000.00		APBD
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	800,000,000.00	1,200,000,000.00		APBD
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	150,000,000.00	175,000,000.00		APBD
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	107,736,000.00	107,736,000.00		APBD
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00		APBD
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00		APBD
4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	6,351,345,000.00	6,508,700,000.00		
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	900,000,000.00	900,000,000.00		APBD
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	320,000,000.00	320,000,000.00		APBD
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	5,129,345,000.00	5,286,700,000.00		APBD
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	962,117,000.00	962,117,000.00		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	196,650,000.00	196,650,000.00		APBD
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	280,870,000.00	280,870,000.00		APBD
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	300,000,000.00	300,000,000.00		APBD
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	198 unit	124,597,000.00	124,597,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Terpenuhinya administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	809,660,000.00	809,660,000.00		
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	200,000,000.00	200,000,000.00		APBD
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 paket	77,660,000.00	77,660,000.00		APBD
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	132,000,000.00	132,000,000.00		APBD
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	400,000,000.00	400,000,000.00		APBD
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Kepala Daerah,Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100%	244,510,000.00	244,510,000.00		
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	7 paket	92,170,000.00	89,670,000.00		APBD
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 paket	89,670,000.00	92,170,000.00		APBD
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 paket	62,670,000.00	62,670,000.00		APBD
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi		Jumlah kebijakan daerah terkait Penataan Organisasi yang dikeluarkan	3 kebijakan	468,579,800.00	711,532,900.00		
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 dokumen	225,000,000.00	267,145,000.00		APBD
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 laporan	76,937,000.00	137,197,000.00		APBD
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	90,961,000.00	159,950,900.00		APBD
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen	37,980,750.00	88,168,000.00		APBD
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	37,701,050.00	59,072,000.00		APBD
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Terselenggaranya protokol dan komunikasi Pimpinan	100%	1,734,350,000.00	1,860,550,000.00		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	95,550,000.00	95,550,000.00		APBD
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	1,607,300,000.00	1,730,000,000.00		APBD
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	31,500,000.00	35,000,000.00		APBD
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%	5,553,242,510.00	3,824,129,952.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
			Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%				
			Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	100%				
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan		Jumlah kebijakan tata pemerintahan Daerah yang dikeluarkan	5 kebijakan	256,435,660.00	331,093,952.00		
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen	102,660,660.00	172,585,920.00		APBD
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 dokumen	53,775,000.00	75,083,032.00		APBD
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 dokumen	100,000,000.00	83,425,000.00		APBD
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah kebijakan Daerah terkait Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan	3 kebijakan	4,708,083,850.00	2,492,200,000.00		
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 dokumen	2,013,937,200.00	2,392,500,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 dokumen	2,685,354,650.00	82,700,000.00		APBD
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	8,792,000.00	17,000,000.00		APBD
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Jumlah kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum	3 Kebijakan	545,723,000.00	893,166,000.00		
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	85 dokumen	109,683,000.00	203,704,000.00		APBD
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	98,920,000.00	40,000,000.00		APBD
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 dokumen	337,120,000.00	563,475,000.00		APBD
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah Kebijakan Daerah bidang kerjasama daerah yang dikeluarkan	2 kebijakan	43,000,000.00	107,670,000.00		
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 dokumen	43,000,000.00	58,900,000.00		APBD
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	laporan	-	48,770,000.00		APBD
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Tingkat kematangan UKPBJ	level 3	514,528,849.00	621,312,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
			Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	100%				
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan	2 kebijakan	153,261,500.00	211,937,000.00		
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 dokumen	59,583,000.00	79,307,000.00		APBD
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan	60,000,000.00	80,615,000.00		APBD
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 dokumen	33,678,500.00	52,015,000.00		APBD
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan	2 kebijakan	136,147,374.00	177,445,000.00		
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 laporan	47,600,000.00	47,600,000.00		APBD
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	88,547,374.00	129,845,000.00		APBD
4 01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Kebijakan Daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan	3 kebijakan	225,119,975.00	231,930,000.00		
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 dokumen	110,373,113.00	86,000,000.00		APBD
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50 dokumen	54,746,862.00	83,430,000.00		APBD
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 orang	60,000,000.00	62,500,000.00		APBD
4 02	SEKRETARIAT DPRD				50,729,609,530.00	51,328,609,530.00		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	23,071,780,500.00	23,670,780,500.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
4 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,205,000,000.00	3,210,000,000.00		
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/Bulan	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00		APBD
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
4 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
4 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
4 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22,000,000.00	36,500,000.00		
4 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
4 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
4 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	969,200,000.00	1,481,700,000.00		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	30,000,000.00	60,000,000.00		APBD
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	300,000,000.00	430,000,000.00		APBD
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	150,000,000.00	450,000,000.00		APBD
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	67,200,000.00	67,200,000.00		APBD
4 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	220,000,000.00	222,000,000.00		APBD
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150,000,000.00	200,000,000.00		APBD
4 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2,274,538,000.00	2,324,538,000.00		
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	415,000,000.00	415,000,000.00		APBD
4 02 01 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	50,000,000.00	100,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,807,538,000.00	1,807,538,000.00		APBD
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	282,590,000.00	282,590,000.00		
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2,250,000.00	2,250,000.00		APBD
4 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	25,000,000.00	25,000,000.00		APBD
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 unit	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	190,000,000.00	190,000,000.00		APBD
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	74 unit	57,340,000.00	57,340,000.00		APBD
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bulan	14,812,122,500.00	14,812,122,500.00		
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 orang/bulan	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00		APBD
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 paket	337,563,500.00	337,563,500.00		APBD
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	474,559,000.00	474,559,000.00		APBD
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD		Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	100%	1,489,330,000.00	1,489,330,000.00		
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 laporan	700,000,000.00	700,000,000.00		APBD
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	789,330,000.00	789,330,000.00		APBD
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada	27,657,829,030.00	27,657,829,030.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	586,838,920.00	586,838,920.00		
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	13 dokumen	510,000,000.00	510,000,000.00		APBD
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 dokumen	76,838,920.00	76,838,920.00		APBD
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	188,627,320.00	188,627,320.00		
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 dokumen	188,627,320.00	188,627,320.00		APBD
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	5,766,904,000.00	5,766,904,000.00		
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	4,590,634,000.00	4,590,634,000.00		APBD
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	441,000,000.00	441,000,000.00		APBD
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 orang	321,270,000.00	321,270,000.00		APBD
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	270,000,000.00	270,000,000.00		APBD
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	144,000,000.00	144,000,000.00		APBD
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	648,155,000.00	648,155,000.00		
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	648,155,000.00	648,155,000.00		APBD
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD		Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	20,467,303,790.00	20,467,303,790.00		
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84 dokumen	20,467,303,790.00	20,467,303,790.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target				
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				152,675,663,408.00	158,472,331,000.00		
5.01	PERENCANAAN				6,948,507,280.00	9,075,892,000.00		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH				6,948,507,280.00	9,075,892,000.00		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	5,431,432,000.00	6,035,892,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	4,005,000,000.00	4,010,000,000.00		
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/ Bulan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		APBD
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	34,000,000.00	48,500,000.00		
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 orang	24,000,000.00	24,000,000.00		APBD
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	414,000,000.00	859,500,000.00		
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	9,000,000.00	9,000,000.00		APBD
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	30,000,000.00	50,000,000.00		APBD
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	30,000,000.00	40,000,000.00		APBD
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
5.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	30,000,000.00	45,000,000.00		APBD
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	300,000,000.00	700,000,000.00		APBD
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	909,292,000.00	1,031,752,000.00		
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	105,000,000.00	105,000,000.00		APBD
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	30,000,000.00	60,000,000.00		APBD
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	772,292,000.00	864,752,000.00		APBD
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	52,140,000.00	52,140,000.00		
5 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	24 unit	14,640,000.00	14,640,000.00		APBD
5 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	7,500,000.00	7,500,000.00		APBD
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah	100%	478,965,480.00	780,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundangan	100%	246,910,850.00	401,500,000.00		
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	-	21,000,000.00		APBD
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	80,018,600.00	84,500,000.00		APBD
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	usulan	-	29,000,000.00		APBD
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	166,892,250.00	267,000,000.00		APBD
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Analisis Data dan Informasi yang diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100	100,000,000.00	212,500,000.00		
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 masukan	-	73,500,000.00		APBD
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	31 orang	100,000,000.00	139,000,000.00		APBD
5 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun menggunakan aplikasi	100 Persen	44,018,630.00	-		
5 01 02 02.04 02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	44,018,630.00			APBD
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase pengendalian dan evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan daerah	100	88,036,000.00	166,000,000.00		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	39,325,000.00	83,500,000.00		APBD
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 laporan	48,711,000.00	82,500,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	1,038,109,800.00	2,260,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
			Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%				
			Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintahan daerah Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%				
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase keselarasan sub kegiatan pada renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan renstra perangkat daerah	100%	449,102,800.00	810,000,000.00		
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 dokumen	77,280,000.00	115,000,000.00		APBD
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	12 perangkat daerah	33,529,900.00	65,000,000.00		APBD
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	36,029,000.00	70,000,000.00		APBD
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 laporan	82,280,000.00	70,000,000.00		APBD
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 dokumen	79,770,000.00	120,000,000.00		APBD
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 perangkat daerah	38,519,900.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 perangkat daerah	45,714,000.00	90,000,000.00		APBD
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	55,980,000.00	200,000,000.00		APBD
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Persentase keselarasan subkegiatan pada renja bidang perekonomian dan SDA dengan Renstra Perangkat Daerah	100 Persen	279,686,400.00	720,000,000.00		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 dokumen	21,270,800.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 perangkat daerah	20,303,300.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 perangkat daerah	19,345,800.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	88,120,800.00	120,000,000.00		APBD
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	1 dokumen	21,248,800.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 perangkat daerah	20,354,800.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 perangkat daerah	19,419,800.00	80,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan	69,622,300.00	120,000,000.00		APBD
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase keselarasan sub kegiatan pada renja bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan renstra perangkat daerah	100 Persen	309,320,600.00	730,000,000.00		
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	41,242,300.00	90,000,000.00		APBD
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2 perangkat daerah	20,303,300.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2 perangkat daerah	19,019,800.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	88,121,100.00	120,000,000.00		APBD
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	31,665,900.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8 perangkat daerah	20,326,100.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	8 perangkat daerah	19,019,800.00	80,000,000.00		APBD
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 laporan	69,622,300.00	120,000,000.00		APBD
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				607,626,810.00	265,000,000.00		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH				607,626,810.00	265,000,000.00		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	100%	607,626,810.00	265,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi	
			Jumlah Inovasi Daerah	2 Inovasi				
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah dokumen data penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	6 Dokumen	130,000,000.00	50,000,000.00		
5 05 02 2.01 11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	80,000,000.00	80,000,000.00		APBD
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 Persen	172,626,810.00	85,000,000.00		
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - aspek Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	61,313,405.00	80,000,000.00		APBD
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	61,313,405.00	85,000,000.00		APBD
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	50,000,000.00	100,000,000.00		APBD
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Penelitian	205,000,000.00	80,000,000.00		
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	80,000,000.00	80,000,000.00		APBD
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	125,000,000.00	125,000,000.00		APBD
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Jumlah inovasi daerah	2 inovasi	100,000,000.00	50,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 05 02 04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	100,000,000.00			APBD
5 05 02 04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0 Laporan	-	50,000,000.00		APBD
KEUANGAN					137,274,393,568.00	140,016,850,000.00		
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					127,305,617,268.00	128,849,820,000.00		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	5,251,835,000.00	5,682,100,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	3,805,000,000.00	3,810,000,000.00		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/Bulan	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00		APBD
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	32,000,000.00	46,500,000.00		
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	7,500,000.00	7,500,000.00		APBD
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	22,500,000.00	22,500,000.00		APBD
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	364,375,000.00	671,500,000.00		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	43,375,000.00	75,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	40,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	994,760,000.00	1,081,400,000.00		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	110,000,000.00	110,000,000.00		APBD
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	857,760,000.00	919,400,000.00		APBD
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	38,700,000.00	38,700,000.00		
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	22,500,000.00	22,500,000.00		APBD
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	20 unit	12,200,000.00	12,200,000.00		APBD
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		 Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	100%	121.208.231.118.00	121.790.938.775.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5 02 02 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		 Persentase dokumen penganggaran yang disusun dengan tepat waktu	100%	1,095,464,750.00	1,442,437,100.00		
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	132,685,000.00	158,240,000.00		APBD
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	133,180,000.00	160,332,100.00		APBD
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	28,600,000.00	49,680,000.00		APBD
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	32,740,000.00	49,680,000.00		APBD
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	39,860,000.00	50,460,000.00		APBD
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	47,272,250.00	66,124,700.00		APBD
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dokumen	272,982,000.00	298,571,000.00		APBD
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 dokumen	287,194,200.00	329,999,300.00		APBD
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	40,640,000.00	165,000,000.00		APBD
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	31 orang	80,311,300.00	114,350,000.00		APBD
5 02 02 2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		 Persentase layanan Perbendaharaan Daerah sesuai SOP	100%	346,290,518.00	185,370,350.00		
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	30,158,000.00	45,000,000.00		APBD
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen	1,500,000.00	16,556,500.00		APBD
5 02 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	8,627,230.00	46,023,730		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 02 02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	12,180,000.00	69,695,000		APBD
5 02 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 laporan	123,813,850.00	123,813,850.00		APBD
5 02 02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen	8,290,000.00	43,330,000		APBD
5 02 02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 dokumen	160,221,438.00	195,892,320		APBD
5 02 02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	85 orang	1,500,000.00	17,245,000		APBD
5 02 02 2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Persentase laporan keuangan OPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	213,792,100.00	442,788,575.00		
5 02 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 dokumen	5,588,800.00	46,556,000.00		APBD
5 02 02 2.03 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	6,584,300.00	66,116,925.00		APBD
5 02 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	16,139,000.00	96,927,500.00		APBD
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dokumen	71,135,000.00	84,898,150.00		APBD
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	114,345,000.00	148,290,000.00		APBD
5 02 02 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Anggaran Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia	100%	119,552,683,750.00	119,720,342,750.00		
5 02 02 2.04 02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	4 laporan	132,341,000.00	300,000,000.00		APBD
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 laporan	114,100,000,000.00	114,100,000,000.00		APBD
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 laporan	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		APBD
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 laporan	4,320,342,750.00	4,320,342,750.00		APBD
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100%	845,551,150.00	1,376,781,225.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5 02 03 2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Laporan BMD yang disusun dengan tepat waktu	100%	845,551,150.00	1,376,781,225.00		
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	37,075,000.00	54,405,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	32,590,300.00	46,515,825.00		APBD
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 laporan	111,503,000.00	215,055,300.00		APBD
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	267,857,650.00	536,950,000.00		APBD
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 laporan	78,252,000.00	183,177,000.00		APBD
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	171,529,000.00	212,369,500.00		APBD
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 laporan	1,744,200.00	5,258,600.00		APBD
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 orang	45,000,000.00	23,050,000.00		APBD
5 02	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH				9,968,776,300.00	11,167,030,000.00		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhiya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	8,494,050,000.00	9,097,030,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	6,705,000,000.00	6,710,000,000.00		
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/ Bulan	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00		APBD
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realsasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realsasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	40,000,000.00	54,500,000.00		
5 02 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang	9,500,000.00	9,500,000.00		APBD
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 orang	28,500,000.00	28,500,000.00		APBD
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	200,000,000.00	761,500,000.00		
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	7,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44,000,000.00	64,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	100,000,000.00	140,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10,000,000.00	500,000,000.00		APBD
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,499,180,000.00	1,504,160,000.00		
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	326,000,000.00	326,000,000.00		APBD
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,146,180,000.00	1,126,160,000.00		APBD
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	32,870,000.00	32,870,000.00		
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	22,500,000.00	22,500,000.00		APBD
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	17 unit	10,370,000.00	10,370,000.00		APBD
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase peningkatan pajak daerah	3.80%	1,474,726,300.00	2,070,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
			Persentase peningkatan retribusi daerah	3.11%				
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	16 Laporan	1,474,726,300.00	2,070,000,000.00		
			Jumlah Dokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah	20 Laporan				
			Jumlah Dokumen/Laporan Pajak daerah penyelesaian pajak daerah dan pemeriksaan serta pengawasan pajak daerah	6 laporan				
5 02 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	221,750,200.00	260,000,000.00		APBD
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 dokumen	63,020,000.00	85,000,000.00		APBD
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 laporan	46,227,300.00	140,000,000.00		APBD
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 laporan	139,682,500.00	220,000,000.00		APBD
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	138,000,000.00	208,000,000.00		APBD
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	4.460 objek pajak	27,533,500.00	50,000,000.00		APBD
5 02 04 02 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen	17,670,000.00	40,000,000.00		APBD
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 dokumen	164,027,800.00	270,000,000.00		APBD
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 dokumen	247,045,000.00	300,000,000.00		APBD
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 dokumen	36,396,900.00	57,000,000.00		APBD
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 dokumen	53,141,900.00	80,000,000.00		APBD
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	320,231,200.00	360,000,000.00		APBD
5 03	KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH				6,772,883,500.00	7,193,589,000.00		
					6,772,883,500.00	7,193,589,000.00		
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,308,110,000.00	5,682,330,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
5 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,705,000,000.00	3,710,000,000.00		
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang/ Bulan	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00		APBD
5 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	2 laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5 03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
5 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	32,000,000.00	51,500,000.00		
5 03 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
5 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	7,500,000.00	7,500,000.00		APBD
5 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	22,500,000.00	22,500,000.00		APBD
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	375,000,000.00	655,500,000.00		
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	45,000,000.00		APBD
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
5 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00		APBD
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tokol Ukur					
			Target	Target				
5 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,012,970,000.00	1,065,190,000.00		
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan Menyurat	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300,400,000.00	300,400,000.00		APBD
5 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	685,570,000.00	712,790,000.00		APBD
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	166,140,000.00	166,140,000.00		
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 unit	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	115,000,000.00	115,000,000.00		APBD
5 03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	74 unit	45,140,000.00	45,140,000.00		APBD
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja ≥76	95.42%	1,464,773,500.00	1,511,259,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
			Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	37 orang				
			Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	77 orang				
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan formasi	20%	480,153,500.00	502,500,000.00		
	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	11,219,500.00	18,000,000.00		APBD
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	220,000,000.00	220,000,000.00		APBD
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	6,684,000.00	10,000,000.00		APBD
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	30,000,000.00	25,000,000.00		APBD
5 03 02 2.01 07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	0 Dokumen	-	19,500,000.00		APBD
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	22,250,000.00	30,000,000.00		APBD
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	130,000,000.00	130,000,000.00		APBD
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN		Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	100%	187,510,000.00	200,000,000.00		
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	13,344,000.00	20,000,000.00		APBD
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	24,166,000.00	30,000,000.00		APBD
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00		APBD
5 03 02 2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100%	636,426,500.00	603,000,000.00		
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	60,000,000.00	60,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	375,000,000.00	375,000,000.00		APBD
5 03 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	36 Orang	120,000,000.00	120,000,000.00		APBD
5 03 02 2.03 12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	48,000,000.00	48,000,000.00		APBD
5 03 02 2.03 13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	20 Orang	14,000,000.00	20,000,000.00		APBD
5 03 02 2.03 14	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	14 Orang	13,819,000.00	20,000,000.00		APBD
5 03 02 2.03 15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	5,607,500.00	20,000,000.00		APBD
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	84%	160,683,500.00	205,759,000.00		
			Persentase Pelayanan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	82%				
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	63,759,000.00	63,759,000.00		APBD
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	7,840,000.00	17,500,000.00		APBD
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	32,144,000.00	44,000,000.00		APBD
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilyani	1 Dokumen	31,245,500.00	40,500,000.00		APBD
5 03 02 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	5,695,000.00	20,000,000.00		APBD
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,072,252,250.00	1,921,000,000.00		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH				1,072,252,250.00	1,921,000,000.00		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	74.43%	1,072,252,250.00	1,921,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
			Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	435 Orang				
			Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	1,742 Orang				
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	132,798,750.00	140,000,000.00		
5 04 02 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
5 04 02 2.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	2,798,750.00	10,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	939,453,500.00	1,781,000,000.00		
5 04 02 2.02 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan.Sertjabatan Fungsional	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	7,829,750.00	10,000,000.00		APBD
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	926,000,000.00	1,761,000,000.00		APBD
5 04 02 2.02 08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	1 Dokumen	5,623,750.00	10,000,000.00		APBD
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				6,655,257,000.00	8,480,784,000.00		
6 01	INSPEKTORAT DAERAH				6,655,257,000.00	8,480,784,000.00		
6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	4,997,570,000.00	5,354,570,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
6 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
6 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	4,005,000,000.00	4,010,000,000.00		
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		APBD
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
6 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
6 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
			Target					
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	31,000,000.00	45,500,000.00		
6 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
6 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	7,250,000.00	7,250,000.00		APBD
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	21,750,000.00	21,750,000.00		APBD
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	346,000,000.00	641,500,000.00		
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	45,000,000.00		APBD
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25,000,000.00	40,000,000.00		APBD
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000.00	500,000,000.00		APBD
6 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersebiadanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	574,420,000.00	599,420,000.00		
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	67,200,000.00	67,200,000.00		APBD
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	480,220,000.00	480,220,000.00		APBD
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	24,150,000.00	24,150,000.00		
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
6 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	9,150,000.00	9,150,000.00		APBD
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Indeks manajemen resiko	1.7	1,341,500,000.00	2,673,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
		Indeks efektivitas pengendalian korupsi	1.1					
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal yang sesuai rekomendasi	100%	1,238,800,000.00	2,470,400,000.00		
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	62 Laporan	111,100,000.00	221,500,000.00		APBD
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	62 Laporan	179,755,000.00	358,610,000.00		APBD
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	86 Laporan	278,800,000.00	556,900,000.00		APBD
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	56,275,000.00	111,850,000.00		APBD
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60 Laporan	252,020,000.00	502,240,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	200 Dokumen	360,850,000.00	719,300,000.00		APBD
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	100%	102,700,000.00	202,600,000.00		
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	36,000,000.00	72,600,000.00		APBD
6 01 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	66,700,000.00	130,000,000.00		APBD
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Level Kapabilitas APIP	3	316,187,000.00	453,214,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi		Level IACM	3	316.187.000.00	453.214.000.00		
6 01 03 2.01 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	31 perangkat daerah	11,125,000.00	21,550,000.00		APBD
6 01 03 2.01 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 perangkat daerah	14,350,000.00	28,000,000.00		APBD
6 01 03 2.01 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	271,202,000.00	375,664,000.00		APBD
6 01 03 2.01 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 perangkat daerah	19,510,000.00	28,000,000.00		APBD
	UNSUR KEWILAYAHAN				35,404,511,600.00	36,780,811,600.00		
	KECAMATAN MUNTOK				13,576,590,000.00	13,993,970,000.00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	6,750,100,000.00	6,893,210,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4,505,000,000.00	4,510,000,000.00		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Person	44,000,000.00	58,500,000.00		
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 11 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	10,500,000.00	10,500,000.00		APBD
7 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 Orang	31,500,000.00	31,500,000.00		APBD
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Person	130,000,000.00	202,500,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60,000,000.00	100,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,982,340,000.00	2,051,780,000.00		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	88,000,000.00	88,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,877,340,000.00	1,931,780,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	71,760,000.00	36,430,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35,330,000.00			APBD
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	21,000,000.00	21,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	7,930,000.00	7,930,000.00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,500,000.00	7,500,000.00		APBD
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	19,650,000.00	19,650,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	85 orang	10,650,000.00	10,650,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10,650,000.00	10,650,000.00		APBD
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	9,000,000.00	9,000,000.00		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Kelurahan	1 Laporan	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	45,000,000.00	55,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	25,000,000.00	35,000,000.00		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	20,000,000.00	20,000,000.00		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga	100%	10,000,000.00	23,520,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	140 orang	10,000,000.00	23,520,000.00		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5,000,000.00	13,520,000.00		APBD
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	55,000,000.00	92,980,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 urusan	55,000,000.00	92,980,000.00		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	40,000,000.00	75,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000.00	17,980,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	100%	33,000,000.00	31,330,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	66 orang	33,000,000.00	31,330,000.00		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	13,640,000.00		APBD
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	13,640,000.00		APBD
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,000,000.00	4,050,000.00		APBD
			Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN TANJUNG		1,507,340,000.00	1,555,470,000.00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	115,900,000.00	160,900,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	71,200,000.00	111,200,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000.00	1,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2,200,000.00	2,200,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	30,200,000.00	35,200,000.00		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,200,000.00	25,200,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	14,500,000.00	14,500,000.00		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,500,000.00	7,500,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	1,391,440,000.00	1,394,570,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	1,391,440,000.00	1,394,570,000.00		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000.00	8,130,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
			Target					
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	116,530,000.00	161,530,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	71,200,000.00	111,200,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000.00	1,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2,200,000.00	2,200,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terseadinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	29,000,000.00	34,000,000.00		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24,000,000.00	24,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	16,330,000.00	16,330,000.00		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1,830,000.00	1,830,000.00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,500,000.00	7,500,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	1,280,440,000.00	1,284,020,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	1,280,440,000.00	1,284,020,000.00		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000.00	8,580,000.00		APBD
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	46 Unit	400,000,000.00	400,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	875,440,000.00	875,440,000.00		APBD
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan	0 lembaga	-	-		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan				APBD
	Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MENJELANG				1,136,690,000.00	1,184,010,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
			Target					
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	92,410,000.00	137,410,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	71,200,000.00	111,200,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	1,000,000.00	1,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2,200,000.00	2,200,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1Laporan	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	20,600,000.00	25,600,000.00		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15,600,000.00	15,600,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	610,000.00	610,000.00		
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	610,000.00	610,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	1,044,280,000.00	1,046,600,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	1,044,280,000.00	1,046,600,000.00		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000.00	7,320,000.00		APBD
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	400,000,000.00	400,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	639,280,000.00	639,280,000.00		APBD
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan	0 lembaga	-	-		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan				APBD
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN KERANGGAN					1,177,530,000.00	1,198,940,000.00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	105,410,000.00	150,410,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	71,200,000.00	111,200,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000.00	1,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2,200,000.00	2,200,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	26,600,000.00	31,600,000.00		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21,600,000.00	21,600,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	7,610,000.00	7,610,000.00		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	610,000.00	610,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	1,072,120,000.00	1,048,530,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	1,072,120,000.00	1,048,530,000.00		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000.00	7,810,000.00		APBD
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	18 Unit	400,000,000.00	400,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	667,120,000.00	640,720,000.00		APBD
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan	0 lembaga	-	-		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan				APBD
KECAMATAN SIMPANGTERITIP					3,883,480,000.00	3,903,215,000.00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,739,030,000.00	3,685,600,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target				
			Tolok Ukur	Target				
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,005,000,000.00	2,910,000,000.00		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	3,000,000,000.00	2,900,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	18,000,000.00	16,500,000.00		
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.05 03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	4,000,000.00	-		APBD
7 01 01 2.05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	12,000,000.00	-		APBD
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	130,000,000.00	190,500,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60,000,000.00	90,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		 Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	494,600,000.00	509,600,000.00		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,200,000.00	25,200,000.00		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	452,400,000.00	452,400,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	74,430,000.00	25,000,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35,330,000.00	-		APBD
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	28,000,000.00	15,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	6,100,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	21,450,000.00	21,450,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	105 orang	12,450,000.00	12,450,000.00		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12,450,000.00	12,450,000.00		APBD
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	9,000,000.00	9,000,000.00		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	25,000,000.00	35,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	52 Orang	25,000,000.00	35,000,000.00		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga	100%	10,000,000.00	23,520,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	10,000,000.00	23,520,000.00		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5,000,000.00	13,520,000.00		APBD
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	55,000,000.00	94,660,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan		Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	55,000,000.00	94,660,000.00		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	40,000,000.00	75,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000.00	19,660,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pembinaan Yang Diberikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	100%	33,000,000.00	42,985,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	169 Orang	33,000,000.00	42,985,000.00		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	18,680,000.00		APBD
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	18,680,000.00		APBD
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,000,000.00	5,625,000.00		APBD
	KECAMATAN JEBUS				3,947,901,600.00	4,144,246,600.00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,564,305,800.00	3,700,915,800.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,605,000,000.00	2,610,000,000.00		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,000,000.00	2,500,000.00		
7 01 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	27,000,000.00	36,500,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tokol Ukur					
				Target				
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.05 03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	6,250,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	18,750,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Person	140,000,000.00	210,500,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70,000,000.00	110,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	685,305,800.00	754,745,800.00		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	29,100,000.00	29,100,000.00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	639,205,800.00	693,645,800.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	88,000,000.00	52,670,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	37,630,000.00	2,300,000.00		APBD
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	35,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	10,370,000.00	10,370,000.00		APBD
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	260,595,800.00	250,595,800.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 orang	11,550,000.00	11,550,000.00		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	11,550,000.00	11,550,000.00		APBD
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	240,045,800.00	230,045,800.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 02 2.03 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	240,045,800.00	230,045,800.00		APBD
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	9,000,000.00	9,000,000.00		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	25,000,000.00	35,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	200 orang	25,000,000.00	35,000,000.00		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	100%	10,000,000.00	23,520,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 orang	10,000,000.00	23,520,000.00		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5,000,000.00	13,520,000.00		APBD
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	55,000,000.00	93,820,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	55,000,000.00	93,820,000.00		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	40,000,000.00	75,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000.00	18,820,000.00		APBD
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan	100%	33,000,000.00	40,395,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	173 orang	33,000,000.00	40,395,000.00		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	17,560,000.00		APBD
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	17,560,000.00		APBD
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,000,000.00	5,275,000.00		APBD
	KECAMATAN PARITIGA				3,689,330,000.00	3,900,490,000.00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Person	3,149,080,000.00	3,292,220,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
	KABUPATEN/KOTA						transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,005,000,000.00	2,010,000,000.00		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,000,000.00	2,500,000.00		
7 01 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	19,000,000.00	34,500,000.00		
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	4,250,000.00	4,500,000.00		APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	12,750,000.00	13,500,000.00		APBD
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	150,000,000.00	220,500,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	35,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80,000,000.00	120,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	878,960,000.00	948,400,000.00		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35,500,000.00	35,500,000.00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	826,460,000.00	880,900,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	77,120,000.00	42,320,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	36,800,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	28,000,000.00	28,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 Unit	7,320,000.00	7,320,000.00		APBD
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	417,250,000.00	417,250,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90 orang	11,100,000.00	11,100,000.00		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	11,100,000.00	11,100,000.00		APBD
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	397,150,000.00	397,150,000.00		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	397,150,000.00	397,150,000.00		APBD
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Kependudukan, Perizinan, Perencanaan)	8 urusan	9,000,000.00	9,000,000.00		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	25,000,000.00	35,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	25,000,000.00	35,000,000.00		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	100%	10,000,000.00	23,520,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	10,000,000.00	23,520,000.00		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5,000,000.00	13,520,000.00		APBD
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	55,000,000.00	93,400,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	55,000,000.00	93,400,000.00		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	40,000,000.00	75,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000.00	18,400,000.00		APBD
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	33,000,000.00	39,100,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	160 Orang	33,000,000.00	39,100,000.00		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	17,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	17,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,000,000.00	5,100,000.00		APBD
	KECAMATAN KELAPA				6,552,920,000.00	6,875,955,000.00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,620,810,000.00	4,831,960,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,805,000,000.00	3,810,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,000,000.00	2,500,000.00		
7 01 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	28,000,000.00	46,500,000.00		
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 11 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	6,500,000.00	7,500,000.00		APBD
7 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	19,500,000.00	22,500,000.00		APBD
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	140,500,000.00	212,500,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70,000,000.00	110,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,500,000.00	2,500,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	533,000,000.00	666,480,000.00		APBD
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62,400,000.00	62,400,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	453,600,000.00	572,080,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	95,310,000.00	59,980,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	39,930,000.00	4,600,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	28,000,000.00	28,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	4,880,000.00	4,880,000.00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	22,500,000.00	22,500,000.00		APBD
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	489,840,000.00	479,840,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Orang	12,900,000.00	12,900,000.00		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	12,900,000.00	12,900,000.00		APBD
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Urusan	467,940,000.00	457,940,000.00		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	467,940,000.00	457,940,000.00		APBD
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	9,000,000.00	9,000,000.00		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	30,000,000.00	40,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Orang	25,000,000.00	35,000,000.00		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Usulan Kelurahan Yang Terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	5,000,000.00	5,000,000.00		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga	100%	10,000,000.00	23,520,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	10,000,000.00	23,520,000.00		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5,000,000.00	13,520,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	55,000,000.00	95,080,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	55,000,000.00	95,080,000.00		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	40,000,000.00	75,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000.00	20,080,000.00		APBD
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	100%	33,000,000.00	42,985,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	199 orang	33,000,000.00	42,985,000.00		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	18,680,000.00		APBD
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	18,680,000.00		APBD
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,000,000.00	5,625,000.00		APBD
			Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN KELAPA		1,314,270,000.00	1,362,570,000.00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhiya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	103,310,000.00	148,310,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	71,200,000.00	111,200,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000.00	1,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2,200,000.00	2,200,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	17,000,000.00	22,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12,000,000.00	12,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	15,110,000.00	15,110,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,000,000.00	7,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	610,000.00	610,000.00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,500,000.00	7,500,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	1,210,960,000.00	1,214,260,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Usulan Kelurahan Yang Terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	1,210,960,000.00	1,214,260,000.00		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	5,000,000.00	8,300,000.00		APBD
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	400,000,000.00	400,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	805,960,000.00	805,960,000.00		APBD
	KECAMATAN TEMPILANG				3,754,290,000.00	3,962,935,000.00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,536,060,000.00	3,678,400,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	14,000,000.00	28,000,000.00		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4,000,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,805,000,000.00	2,610,000,000.00		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,800,000,000.00	2,600,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	3,000,000.00	6,000,000.00		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	22,000,000.00	16,500,000.00		
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2,000,000.00	4,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	5,000,000.00			APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	15,000,000.00			APBD
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	151,500,000.00	400,500,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,000,000.00	-		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80,000,000.00	300,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	2,500,000.00	2,500,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	470,100,000.00	485,100,000.00		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33,600,000.00	33,600,000.00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	419,500,000.00	419,500,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	70,460,000.00	25,300,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	35,630,000.00	300,000.00		APBD
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	28,000,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1,830,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	95,230,000.00	95,230,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85 orang	10,650,000.00	10,650,000.00		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	10,650,000.00	10,650,000.00		APBD
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	75,580,000.00	75,580,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur					
				Target				
7 01 02 2.02 03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	75,580,000.00	75,580,000.00		APBD
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	9,000,000.00	9,000,000.00		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	4,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	25,000,000.00	35,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	25,000,000.00	35,000,000.00		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	25,000,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0 lembaga	-	-		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	-	-		APBD
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Terlaksananya Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Forkopimka, Tomas dan Toga	100%	10,000,000.00	23,520,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	10,000,000.00	23,520,000.00		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5,000,000.00	13,520,000.00		APBD
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	55,000,000.00	92,980,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	55,000,000.00	92,980,000.00		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	40,000,000.00	75,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	15,000,000.00	17,980,000.00		APBD
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	33,000,000.00	37,805,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117 Orang	33,000,000.00	37,805,000.00		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	16,440,000.00		APBD
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	15,000,000.00	16,440,000.00		APBD
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,000,000.00	4,925,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Tolok Ukur	Target				
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				8.220.661.000.00	7.077.797.004.00		
8 01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8.220.661.000.00	7.077.797.004.00		
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	2.470.770.000.00	2.699.770.003.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	14.000.000.00	28.000.000.00		
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000.00	10.000.000.00		APBD
8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000.00	2.000.000.00		APBD
8 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000.00	2.000.000.00		APBD
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.000.000.00	8.000.000.00		APBD
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.000.000.00	6.000.000.00		APBD
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.605.000.000.00	1.610.000.000.00		
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	1.600.000.000.00	1.600.000.000.00		APBD
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000.00	2.000.000.00		APBD
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.000.000.00	4.000.000.00		APBD
8 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.000.000.00	4.000.000.00		APBD
8 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	3.000.000.00	6.000.001.00		
8 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3.000.000.00	6.000.001.00		APBD
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	52.000.000.00	66.500.000.00		
8 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.000.000.00	4.000.000.00		APBD
8 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	12.500.000.00	12.500.000.00		APBD
8 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	37.500.000.00	37.500.000.00		APBD
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	346.000.000.00	523.500.000.00		
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.000.000.00	4.000.000.00		APBD
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8.000.000.00	7.000.000.00		APBD
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000.00	40.000.000.00		APBD
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000.00	30.000.000.00		APBD
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000.00	5.000.000.00		APBD
8 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	25.000.000.00	35.000.000.00		APBD
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000.00	400.000.000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
8 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	2,000,000.00	2,500,000.00		APBD
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	435,000,000.00	450,000,001.00		
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,001.00		APBD
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48,000,000.00	48,000,000.00		APBD
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,000,000.00	40,000,000.00		APBD
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	360,000,000.00	360,000,000.00		APBD
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	15,770,000.00	15,770,001.00		
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7,500,000.00	7,500,000.00		APBD
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	4,270,000.00	4,270,000.00		APBD
8 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4,000,000.00	4,000,001.00		APBD
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	0 Kasus	1,356,470,000.00	1,334,670,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100 persen	1,356,470,000.00	1,334,670,000.00		
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 Orang	1,161,470,000.00	1,161,470,000.00		APBD
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	440 Orang	150,000,000.00	150,000,000.00		APBD
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	5,000,000.00	23,200,000.00		APBD
	Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30 keluarga	40,000,000.00			APBD
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100%	3,539,671,000.00	1,511,785,001.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	3,539,671,000.00	1,511,785,001.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2367 Orang	3,491,671,000.00	1,444,785,001.00		APBD
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23 Orang	25,000,000.00	34,000,000.00		APBD
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	23,000,000.00	33,000,000.00		APBD
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase ormas yang aktif	100%	85,500,000.00	117,600,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	85,500,000.00	117,600,000.00		
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	37,500,000.00	47,600,000.00		APBD
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23 Orang	25,000,000.00	37,000,000.00		APBD
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	23,000,000.00	33,000,000.00		APBD
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	0 Kasus	157,000,000.00	274,677,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8 01 05 2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 person	157,000,000.00	274,677,000.00		
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57 Orang	100,000,000.00	164,102,000.00		APBD
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57 Orang	34,000,000.00	53,000,000.00		APBD
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	23,000,000.00	57,575,000.00		APBD
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100%	611,250,000.00	1,139,295,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
			Program/Kegiatan/Subkegiatan					
			Tolok Ukur	Target				
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	611,250,000.00	1,139,295,000.00		
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	183 Orang	35,250,000.00	39,315,000.00		APBD
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 Orang	44,000,000.00	250,000,000.00		APBD
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	32,000,000.00	49,980,000.00		APBD
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500,000,000.00	800,000,000.00		APBD
TOTAL					976,248,582,012.00	870,442,533,505.00		



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diketahui dengan menetapkan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator tersebut bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk mengevaluasi hasil kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai IKK dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek tersebut dibagi menjadi beberapa fokus perbidang urusan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan IKK dapat ditentukan dengan menggunakan formula yang disajikan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penetapan Target IKK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
1.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.1	Persentase Penduduk di atas Garis Miskin	Persentase	97,37	Pemerintah Daerah
1.2	Persentase balita gizi buruk	Juta rupiah	0,05	DINKES
1.3	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase	3,26	DINKES
1.4	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase	100	DINKES
1.5	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persentase	9,22	DINDIKPORA
1.6	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	87	DINDIKPORA
1.7	Penguatan cadangan pangan	Persentase	18,00	DISTANGAN
2	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
2.1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persentase	45,78	Pemerintah Daerah
2.2	Rasio Ketergantungan	Persentase	49,28	Pemerintah Daerah
2.3	Produktivitas total daerah	Rupiah	131.505	Pemerintah Daerah
2.4	Rasio ekspor + impor terhadap PDRB	Persentase	33,45	Pemerintah Daerah
3.	ASPEK PELAYANAN UMUM			
3.1	Layanan Urusan Wajib Dasar			
1.	Pendidikan			
1.1	APK PAUD	Angka	89,82	DINDIKPORA
1.2	APK SD/MI/Paket A	Angka	105,67	DINDIKPORA



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
1.2.1	APK SMP/MTs/Paket B	Angka	94,34	DINDIKPORA
1.2.2	APM SD/MI/Paket A	Angka	96,27	DINDIKPORA
1.3	APM SMP/MTs/Paket B	Angka	89,35	
1.3.1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs	Persentase	95,12	DINDIKPORA
1.3.2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	95,14	DINDIKPORA
1.4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,14	DINDIKPORA
1.5	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	1,05	DINDIKPORA
1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	91,19	DINDIKPORA
1.7	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase	100	DINDIKPORA
1.8	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	Persentase	70,85	DINDIKPORA
1.9	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	0	DINDIKPORA
2. Kesehatan				
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,82	DINKES
2.2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,75	DINKES
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	3,35	DINKES
2.4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	50,99	DINKES
2.5	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	1:80	DINKES
2.6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,03	DINKES
2.7	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,59	DINKES
2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,63	DINKES
2.9	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase	100	DINKES
2.10	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	Persentase	100	DINKES
2.11	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase	100	DINKES
2.12	Pelayanan kesehatan balita	Persentase	100	DINKES



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
2.13	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase	100	DINKES
2.14	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	Persentase	100	DINKES
2.15	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase	100	DINKES
2.16	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Persentase	100	DINKES
2.17	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase	100	DINKES
2.18	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase	100	DINKES
2.19	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase	100	DINKES
2.20	Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	80,5	DINKES
2.21	Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	78	DINKES
2.22	Persentase baduta Stunting	Persentase	9	DINKES
2.23	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	Persentase	80	DINKES
2.24	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	100	DINKES
2.25	Tingkat pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	65	DINKES
2.26	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	Persentase	45	DINKES
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Persentase	82,17	DPUPR
3.2	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak	Persentase	103,82	DPUPR
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persentase	88,63	DPUPR
3.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	87,62	DPUPR
3.5	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Persentase	100	DPUPR
3.6	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persentase	95,28	DPUPR
3.7	Persentase titik banjir yang dimitigasi	Persentase	54	DPUPR
3.8	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	Persentase	87	DISPERKIMHUB



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
3.9	Persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	Persentase	35,71	DISPERKIMHUB
3.10	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	Persentase	22,12	DPUPR
3.11	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	Persentase	82,47	DPUPR
3.12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	Persentase	17,78	DPUPR
3.13	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	Persentase	3,59	DPUPR
3.14	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	Persentase	28,57	DPUPR
3.15	Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase	100	DPUPR
3.16	Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persentase	100	DPUPR
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persentase	97,25	DISPERKIMHUB
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persentase	0,016	DISPERKIMHUB
4.3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persentase	6,35	DISPERKIMHUB
4.4	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase	252	DISPERKIMHUB
4.5	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	Persentase	100	DISPERKIMHUB
4.6	Persentase warga negara masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	Persentase	100	DISPERKIMHUB
4.7	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	Persentase	13,3	DISPERKIMHUB
4.8	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	Persentase	3,23	DISPERKIMHUB
4.9	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	Persentase	16,7	DISPERKIMHUB
4.10	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Persentase	100	DISPERKIMHUB
4.11	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase	100	DISPERKIMHUB
5.	Sosial			
5.1	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.3	persentase korban bencana yang tertangani	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.4	Persentase PSKS yang aktif	Persentase	100	DINSOSPEMDES



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
5.5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.6	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.7	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.8	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.9	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase	100	DINSOSPEMDES
3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1. Tenaga Kerja				
1.1	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase	40	DPMNakertrans
1.2	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	Persentase	35	DPMNakertrans
1.3	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Persentase	100	DPMNakertrans
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
2.1	Proporsikursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase	16	DPPKBPPA
2.2	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	Persentase	40	DPPKBPPA
2.2	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	Persentase	60	DPPKBPPA
2.3	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	DPPKBPPA
2.4	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	Persentase	75	DPPKBPPA
2.5	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	Persentase	75	DPPKBPPA
2.6	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	DPPKBPPA
3 Pangan				
3.1	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase	10,76	DISTANGAN
3.2	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	Persentase	40	DISTANGAN
3.3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	Persentase	90	DISTANGAN
3.4	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persentase	50	DISTANGAN
3.5	tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/hr	2.100	DISTANGAN
3.6	tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/hr	57	DISTANGAN
3.7	Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/hr	1.307	DISTANGAN



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
3.8	Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/hr	60,00	DISTANGAN
4	Pertanahan			
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persentase	17,65	DPUPR
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase	100	DPUPR
4.3	Penyelesaian izin lokasi	Persentase	100	DPUPR
4.4	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase	100	DPUPR
4.5	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	Persentase	50	DPUPR
4.6	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	Persentase	24	DPUPR
4.7	Persentase sengeketa tanah garapan yang terselesaikan	Persentase	100	DPUPR
5.	Lingkungan Hidup			
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Ada	DLH
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota	Dokumen	Ada	DLH
5.3	Indeks kualitas Air	Angka	91,52	DLH
5.4	Hasil Pengukuran Udara	Angka	88,70	DLH
5.5	Indeks kualitas Tutupan Lahan	Angka	42,63	DLH
5.6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase	32,99	DLH
5.7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Angka	3	DLH
5.8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada	Ada	DLH
5.9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persentase	100	DLH
5.10	Timbulan sampah yang ditangani	Persentase	20,37	DLH
5.11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persentase	0,06	DLH
5.12	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	Persentase	12,11	DLH
5.13	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase	55	DLH
5.14	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase	33	DLH
5.15	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	Persentase	100	DLH
5.16	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	Persentase	100	DLH



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
5.17	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase	100	DLH
5.18	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	Persentase	41,67	DLH
5.19	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.208,86	DLH
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	Persentase	83,3	DISDUKCAPIL
6.2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Persentase	67,51	DISDUKCAPIL
6.3	Persentase ketersediaan data kependudukan	Persentase	66,67	DISDUKCAPIL
6.4	Persentase ketersediaan profil kependudukan	Persentase	100	DISDUKCAPIL
6.5	Persentase Penduduk Memiliki KTP	Persentase	98,71	DISDUKCAPIL
6.6	Persentase Penduduk Berakte Kelahiran	Persentase	79	DISDUKCAPIL
6.7	Persentase penduduk umur 0—18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	Persentase	98,06	DISDUKCAPIL
6.8	Pasangan berakte nikah/ berakte perkawinan	Persentase	79	DISDUKCAPIL
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Angka	7	DPPKBPPA
7.2	Persentase PKK aktif	Persentase	100	DPPKBPPA
7.3	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	Persentase	75	DPPKBPPA
7.4	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	Persentase	100	DPPKBPPA
7.5	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	Persentase	100	DPPKBPPA
7.6	Persentase kerja sama yang diimplementasi	Persentase	31,67	DPPKBPPA
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase	1,21	DPPKBPPA
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase	2,3	DPPKBPPA
8.3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	8,48	DPPKBPPA
8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase	17,99	DPPKBPPA
8.5	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase	14,07	DPPKBPPA
8.6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase	86,13	DPPKBPPA
8.7	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase	93,45	DPPKBPPA
8.8	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase	81,38	DPPKBPPA
8.9	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di	Persentase	100	DPPKBPPA



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
	bidang pengendalian penduduk			
8.10	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase	79,09	DPPKBPPA
8.11	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase	100	DPPKBPPA
8.12	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persentase	100	DPPKBPPA
8.13	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka	25	DPPKBPPA
8.14	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	1	DPPKBPPA
8.15	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	Persentase	79	DPPKBPPA
8.16	persentase keluarga <i>stunting</i> yang mengikuti KIE 1000 HPK	Persentase	80	DPPKBPPA
8.17	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80,08	DPPKBPPA
9.	Perhubungan			
9.1	Rasio Izin Trayek	Angka	0,5	DISPERKIMHUB
9.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org	32.876	DISPERKIMHUB
9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Org	22.013	DISPERKIMHUB
9.4	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	Persentase	100	DISPERKIMHUB
9.5	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	Persentase	25,77	DISPERKIMHUB
10.	Komunikasi dan Informatika			
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	Persentase	1,53	DISKOMINFO
10.2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Persentase	68,17	DISKOMINFO
10.3	Proporsi rumah tangga dengana kses internet	Angka	0,90	DISKOMINFO
10.4	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi	Angka	0,90	DISKOMINFO
10.5	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	Persentase	40	DISKOMINFO
10.6	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	840	DISKOMINFO
11.	Koperasi dan UKM			
11.1	Persentase koperasi aktif	Persentase	88	DKUP
11.2	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	Persentase	5,45	DKUP
11.3	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	Persentase	30	DKUP



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
11.4	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	Persentase	4	DKUP
11.5	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	Persentase	3,45	DKUP
11.6	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase	19,23	DKUP
11.7	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Persentase	50,82	DKUP
11.8	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	Persentase	59,62	DKUP
12.	Penanaman Modal			
12.1	Realisasi Investasi PMA	Rupiah	164.505.653.756	DPMNakertrans
12.2	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	446.206.774.396	DPMNakertrans
12.3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	610.712.428.152	DPMNakertrans
12.4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Angka	283,07	DPMNakertrans
12.5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) berskala nasional (PMDN/PMA)	Persentase	40	DPMNakertrans
12.6	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	Persentase	8,21	DPMNakertrans
12.7	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	81	DPMNakertrans
12.8	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	Persentase	21	DPMNakertrans
12.9	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	Persentase	70	DPMNakertrans
13.	Kepemudaan dan Olah Raga			
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	100	DINDIKPORA
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase	18,66	DINDIKPORA
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase	18,87	DINDIKPORA
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Angka	36,32	DINDIKPORA
13.5	Jumlah Atlet Berprestasi	Angka	64,57	DINDIKPORA
13.6	Capaian Prestasi Olahraga	Angka	6	DINDIKPORA
13.7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persentase	40	DINDIKPORA
13.8	Pencab Aktif	Jumlah	28	DINDIKPORA
13.9	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	5	DINDIKPORA
14.	Statistik			
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Dokumen	Ada	DISKOMINFO
14.2	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	Persentase	70	DISKOMINFO



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
15.	Persandian			
15.1	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	Persentase	40	DISKOMINFO
16.	Kebudayaan			
16.1	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	Persentase	10,46	DISPARBUD
16.2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	Jumlah	1	DISPARBUD
16.3	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang dikelola dan atau dipublikasi	Jumlah	2	DISPARBUD
16.4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persentase	61	DISPARBUD
16.5	Persentase museum dalam kondisi baik	Persentase	100	DISPARBUD
17.	Perpustakaan			
17.1	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	Jumlah	0	DPK
17.2	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persentase	46,84	DPK
17.3	Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	-	DPK
17.4	Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	Persentase	15,38	DPK
17.5	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persentase	10,43	DPK
18.	Kearsipan			
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase	100	DPK
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	DPK
18.3	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	-	DPK
18.4	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	-	DPK
18.5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Persentase	5	DPK
18.6	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	50	DPK
18.7	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	6,25	DPK
18.8	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase	100	DPK
18.9	Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	Persentase	100	DPK
18.10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	7	DPK



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
5.	Kelautan dan Perikanan			
5.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/tahun	40.107	DKP
5.2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/tahun	219,41	DKP
5.3	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Persentase	70	DKP
5.4	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase	18	DKP
3.3	Layanan Urusan Pilihan			
1.	Pariwisata			
1.1	Peningkatan jumlah DTW	DTW	7	DISPARBUD
1.2	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	50.000	DISPARBUD
1.3	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase	100	DISPARBUD
1.4	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	Persentase	100	DISPARBUD
1.5	PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	Persentase	5,14	DISPARBUD
2.	Pertanian			
2.1	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	Persentase	5	DISTANGAN
2.2	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persentase	2	DISTANGAN
2.3	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	Persentase	100	DISTANGAN
2.4	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	Persentase	25	DISTANGAN
2.5	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	Persentase	100	DISTANGAN
2.6	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	Persentase	100	DISTANGAN
3.	Perdagangan			
3.1	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	Persentase	50	DKUP
3.2	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase	3,9	DKUP
3.3	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	Persentase	100	DKUP
3.4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase	20	DKUP
4.	Perindustrian			
4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase	100	DKUP
4.2	Jumlah Sentra IKM	Sentra	1	DKUP
4.3	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	Persentase	100	DKUP
4.4	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Persentase	50	DKUP



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
Urusan Penunjang				
1.	Perencanaan Pembangunan			
1.1	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	Persentase	100	BP4D
1.2	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	BP4D
1.3	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase	100	BP4D
1.4	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase	100	BP4D
2.	Keuangan			
2.1	Persentase SiLPA	Persentase	3,07	BPKAD
2.2	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	Persentase	100	BPKAD
2.3	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase	100	BPKAD
2.4	Persentase peningkatan pajak daerah	Persentase	3,80	BP2RD
2.5	Persentase peningkatan retribusi daerah	Persentase	3,11	BP2RD
3.	Penelitian dan pengembangan			
3.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase	100	BP4D
3.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	6,67	BP4D
3.3	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Persentase	100	BP4D
3.4	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	2	BP4D
4.	Pengawasan			
4.1	Persentase tindak lanjut temuan	Persentase	100	INSPEKTORAT
4.2	indeks manajemen resiko	Indeks	1,7	INSPEKTORAT
4.3	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1,1	INSPEKTORAT
4.4	Level Kapabilitas APIP	Level	3	INSPEKTORAT
5.	Sekretariat Daerah			
5.1	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	SETDA
5.2	Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	SETDA
5.3	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	SETDA
5.4	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	3	SETDA



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2023	PENANGGUNG JAWAB
5.5	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	SETDA
5.6	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	SETDA
6.	Sekretariat Dewan			
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Barat	Dokumen	Ada	SETWAN
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	SETWAN
6.3	Terintegrasi program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perdadang Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat Dewan	Dokumen	Ada	SETWAN
7.	Pemerintahan Umum			
7.1	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	BADAN KESBANGPOL
7.2	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Persentase	100	BADAN KESBANGPOL
7.3	Persentase ormas yang aktif	Persentase	100	BADAN KESBANGPOL
7.4	Angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	BADAN KESBANGPOL
7.5	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	Persentase	100	BADAN KESBANGPOL
7.6	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	BADAN KESBANGPOL

Terkait pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan melalui IKU, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Daerah. Target IKU Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 dijabarkan pada tabel dibawah ini.



Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target	
	Satuan	Nilai
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,68
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6,00
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,39
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,40
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	18,77
PDRB per kapita	Ribu Rupiah	78.349
Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Miliar rupiah	917
Indeks konektivitas	Nilai	0,70
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,43
Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	47,06
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi
Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	12.791
Angka kemiskinan	%	2,63
Jumlah penduduk miskin	Orang	5.595
Tingkat pengangguran terbuka	%	3,75
Jumlah penganggur	Orang	3.910
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,86
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,60
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,90
Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	24,86
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,56
Prevalensi <i>Stunting</i>	%	7,46
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,82
Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Cukup



Indikator Kinerja Utama	Target	
	Satuan	Nilai
Nilai SAKIP	Nilai	71,56
Opini BPK	Opini	WTP
Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang
Indeks SPBE	Indeks	Cukup
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,84
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,07
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,58
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,68



BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan serta komitmen tinggi pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun. Diharapkan penggunaan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial pada substansi perencanaan pembangunan mampu menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis yang ada.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Bangka Barat yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 menggunakan kaidah-kaidah sebagai berikut :

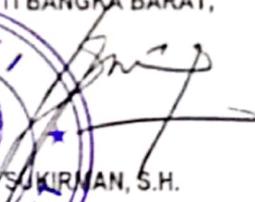
1. Tata cara penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
3. Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. *Tools* yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah milik Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;
5. Guna memastikan penyusunan RKPD Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dilakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah melalui pemantauan dan supervisi pada setiap tahapan penyusunan;
6. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan di sampaikan ke Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dilakukannya penelaahan bersama antara Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang kemudian hasilnya akan menjadi berita acara dan menjadi pedoman



dalam penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir RKPD menjadi dokumen Rancangan Peraturan Bupati Bangka Barat RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023;

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 kepada Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat untuk dilakukan reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten;
8. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bangka Barat;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan RKPD di tahun berikutnya serta penyusunan Perubahan RKPD di tahun berjalan.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023, diharapkan perencanaan pembangunan daerah akan lebih sinergis serta lebih fokus dalam pencapaian target indikator pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang telah ditetapkan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan secara regional dan nasional.

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN, S.H.